Kota Probolinggo











RPJMD Kota Probolinggo

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2025-2029

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025

WALI KOTA PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Probolinggo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kota Probolinggo dan memperhatikan RPJMD Propinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kota Probolinggo untuk Periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kota Probolinggo untuk Periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
17. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
19. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk menunjukkan visi dan misi.
24. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
25. Prioritas Pembangunan Daerah adalah focus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJPD.
26. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

27. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
28. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
29. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
30. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
31. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
32. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II
PENETAPAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan RPJMD Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka menengah untuk 5 (lima) tahun.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.

Pasal 3

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi:
a. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029; dan
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahunan.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu serta dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah, provinsi dan nasional.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Penyusunan RPJMD Tahun 2025 2029 dilakukan sesuai dengan sistematika penjabaran RPJMD.
(2) Sistematika penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD.
(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengendalian terhadap:
    a. perumusan kebijakan perencanaan Pembangunan jangka menengah daerah; dan
    b. pelaksanaan rencana Pembangunan jangka menengah daerah.
(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi terhadap:
    a. perumusan kebijakan perencanaan Pembangunan jangka menengah daerah;
    b. pelaksanaan rencana Pembangunan jangka menengah daerah; dan
    c. hasil rencana Pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi mengacu pada ketentuan perundangan-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    c. terjadi perubahan kebijakan mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan Nasional.

(3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Peraturan Daerah ini dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Agustus 2025
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 147-3/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

I. PENJELASAN UMUM:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Kabupaten/Kota untuk menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah beserta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, disebutkan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses yang partisipatif dan inklusif, serta mempertimbangkan keterpaduan antara perencanaan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. RPJMD ini disusun sebagai pedoman utama pembangunan lima tahunan yang akan menjadi dasar perumusan kebijakan, program, dan kegiatan di setiap Perangkat Daerah.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 75

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 LATAR BELAKANG I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-3
1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA I-7
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN I-11
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN I-12

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH **II-1**
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1.1 EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN PERIODE 2020-2024 ..... II-1
2.1.2 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI II-9
2.1.2.1 POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH II-9
A. LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI II-9
B. LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS II-9
C. TOPOGRAFI II-10
D. GEOLOGI II-11
E. HIDROLOGI II-11
F. KLIMATOLOGI II-13
G. PENGGUNAAN LAHAN II-14
H. POTENSI BENCANA II-15
I. KETERKAITAN DENGAN WILAYAH SEKITAR II-17
2.1.2.2 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP II-24
A. DAYA TAMPUNG LAHAN II-24
B. DAYA DUKUNG BERDASARKAN KEMAMPUAN LAHAN II-24
C. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG AIR II-26
D. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG PANGAN II-28
2.1.2.3 BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN II-29

A. INDEKS KETAHANAN PANGAN II-29
B. PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN II-32
C. JUMLAH PELANGGAN LISTRIK II-33
D. AKSES RUMAH TANGGA TERHADAP KONSUMSI AIR MINUM II-34
2.1.2.4 LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS II-37
A. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP II-37
B. RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI LAYAK DAN AMAN II-39
C. KETERSEDIAAN FASILITAS PENGURANGAN SAMPAH II-41
2.1.2.5 RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM II-45
A. PENURUNAN EMISI GRK II-45
B. INDEKS RISIKO BENCANA II-48
2.1.2.6 DEMOGRAFI II-50
A. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK II-50
B. RASIO PENDUDUK II-51
C. KEPADATAN PENDUDUK II-52
D. PROYEKSI PENDUDUK TAHUN 2025-2029 ..... II-53
2.1.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II-54
2.1.3.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI II-54
A. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI II-54
B. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) II-58
C. ANGKA KEMISKINAN II-67
D. PDRB PER KAPITA II-70
E. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA II-72
F. RASIO GINI II-74
G. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA II-76
2.1.3.2 KESEHATAN UNTUK SEMUA II-78
A. UMUR HARAPAN HIDUP II-78
B. PREVALENSI STUNTING II-79
C. LAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN BALITA II-81
D. PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR STRATEGIS II-83
E. KELURAHAN SIAGA SEHAT AKTIF II-87
2.1.3.3 PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA II-88
A. RATA-RATA LAMA SEKOLAH II-88
B. HARAPAN LAMA SEKOLAH II-89
C. INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT II-90
2.1.3.4 PROFIL DISABILITAS KOTA PROBOLINGGO II-91
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH II-98

2.1.4.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA II-98
A. ANGKA KETERGANTUNGAN II-98
2.1.4.2 IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI II-99
A. RASIO PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN II-99
B. RASIO PDRB AKOMODASI MAKAN DAN MINUM II-100
C. RASIO PDRB TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN II-102
D. EKONOMI SYARIAH II-103
E. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA II-105
F. INDEKS MASYARAKAT DIGITAL (IMDI) II-106
2.1.4.3 PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI II-108
A. INDEKS INFRASTRUKTUR II-108
B. INDEKS KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR II-110
C. RASIO KONEKTIVITAS II-112
2.1.4.4 GAMBARAN UMUM EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA PROBOLINGGO II-113
2.1.5 ASPEK PELAYANAN UMUM II-118
2.1.5.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF II-118
A. INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK II-118
B. INDEKS REFORMASI HUKUM II-120
2.1.5.2 HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL II-121
A. PERSENTASE PENURUNAN KASUS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM II-121
B. INDEKS DEMOKRASI INDONESIA II-123
2.1.5.3 KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN II-124
A. INDEKS DAYA SAING DAERAH II-124
2.1.5.4 KINERJA URUSAN PEMERINTAH DAERAH II-126
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR II-126
1) PENDIDIKAN II-126
2) KESEHATAN II-131
3) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG II-136
4) PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN II-143

5) KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT II-147
6) SOSIAL II-152
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR II-155
1) TENAGA KERJA II-155
2) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK II-158
3) PANGAN II-160
4) PERTANAHAN II-163
5) LINGKUNGAN HIDUP II-164
6) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL II-166
7) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT II-168
8) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA II-171
9) PERHUBUNGAN II-176
10) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA II-180
11) KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH II-183
12) PENANAMAN MODAL II-185
13) KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA II-189
14) STATISTIK II-191
15) PERSANDIAN II-193
16) KEBUDAYAAN II-194
17) PERPUSTAKAAN II-198
18) KEARSIPAN II-202
C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN II-206
1) KELAUTAN DAN PERIKANAN II-206
2) PARIWISATA II-211
3) PERTANIAN II-214
4) PERDAGANGAN II-218
5) PERINDUSTRIAN II-220
D. URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN II-223
1) SEKRETARIAT DAERAH II-223
2) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT II-226
3) PERENCANAAN II-227
4) KEUANGAN II-228
5) KEPEGAWAIAN II-231
6) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN II-233
7) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN II-234

8) PENGAWASAN II-236
9) KEWILAYAHAN II-238
10) KESATUAN BANGSA DAN POLITIK II-240
2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH II-242
2.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU II-243
2.2.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD II-243
A. PENDAPATAN DAERAH II-244
2.2.1.2 NERACA DAERAH II-256
A. ASET II-260
B. KEWAJIBAN II-261
C. EKUITAS II-262
2.2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU II-267
2.2.2.1 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN II-268
A. PENDAPATAN DAERAH II-268
B. BELANJA DAERAH II-280
2.2.2.2 ANALISIS PEMBIAYAAN II-298
A. ANALISIS SUMBER PENUTUP DEFISIT RIIL II-298
B. ANALISIS SUMBER PENUTUP DEFISIT RIIL II-301
C. ANALISIS REALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN II-303
2.2.3 KERANGKA PENDANAAN II-306
2.2.3.1 PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA II-306
2.2.3.2 PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN II-315
2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS II-318
2.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN II-318
2.3.2 ISU STRATEGIS DAERAH II-323
2.3.2.1 ISU GLOBAL II-323
A. GEOPOLITIK DAN GEOEKONOMI II-323
B. PELEMAHAN EKONOMI CHINA II-324
C. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM GLOBAL II-325
D. KEBIJAKAN PROTEKSIONISME AMERIKA SERIKAT II-325
E. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) II-326
2.3.2.2 ISU NASIONAL (ASTA CITA dan RPJMN TAHUN 2025-2029) II-328
2.3.2.3 ISU REGIONAL II-339
A. ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2029 ..... II-339
B. VISI DAN MISI PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2029 ..... II-342
2.3.2.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PROBOLINGGO II-346

2.3.2.5 TELAAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025-2045 ..... II-352
2.3.2.6 TELAAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS II-359
2.3.2.7 TELAAH RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID) II-363
2.3.2.8 ISU STRATEGIS KOTA PROBOLINGGO 2025-2030 ..... II-370
2.3.2.9 POTENSI DAERAH II-380

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN III-1
3.1.1 VISI DAN MISI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029 ..... III-1
3.1.1.1 MISI I PENGUATAN KUALITAS SDM SEBAGAI MODAL DASAR PEMBANGUNAN III-6
3.1.1.2 MISI II AKSELERASI PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN III-7
3.1.1.3 MISI III EKONOMI INKLUSIF BERBASIS POTENSI LOKAL DAERAH YANG DIDUKUNG INTEGRASI EKONOMI DIGITAL III-8
3.1.1.4 MISI IV BIROKRASI ADAPTIF, MODERN DAN BERORIENTASI LAYANAN III-10
3.1.1.5 MISI V AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGGERAK EKONOMI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN III-11
3.1.2 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029 ..... III-12
3.1.2.1 TUJUAN DAN SASARAN MISI I III-13
3.1.2.2 TUJUAN DAN SASARAN MISI II III-14
3.1.2.3 TUJUAN DAN SASARAN MISI III III-16
3.1.2.4 TUJUAN DAN SASARAN MISI IV III-17
3.1.2.5 TUJUAN DAN SASARAN MISI V III-19
3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-25
3.2.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH III-25
3.2.2 ARAH KEBIJAKAN III-40
3.2.3 PROGRAM PRIORITAS III-44

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1
4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH IV-1

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-77

BAB V PENUTUP V-1

5.1 PEDOMAN TRANSISI V-1

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN V-2

5.3 PENUTUP V-3

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Tabel Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 ..... II-3
Tabel II.2 Topografi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan II-11
Tabel II.3 Nama dan Panjang Sungai Kota Probolinggo II-12
Tabel II.4 Sumber Mata Air di Kota Probolinggo II-12
Tabel II.5 Data Penggunaan Lahan di Kota Probolinggo Tahun 2024 ..... II-14
Tabel II.6 Indeks Pengembangan Wilayah BTS II-18
Tabel II.7 Daya Tampung Lahan Kota Probolinggo Tahun 2029 ..... II-24
Tabel II.8 Kemampuan Lahan Menurut Kecamatan Kota Probolinggo II-25
Tabel II.9 Proyeksi Daya Dukung Sumber Daya Air Kota Probolinggo Tahun 2029 ... II-27
Tabel II.10 Daya Dukung Penyedia Pangan Kota Probolinggo Tahun 2029 ..... II-29
Tabel II.11 Capaian Pengelolaan Sampah sesuai SIPSN Kota Probolinggo II-42
Tabel II.12 Perhitungan Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) dan Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Persampahan (% RT) II-43
Tabel II.13 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-51
Tabel II.14 Proyeksi Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 ..... II-53
Tabel II.15 Hasil Perhitungan LQ (*Location Quotient*) Sektor Ekonomi di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-62
Tabel II.16 Hasil Perhitungan *Shift Share* Sektor Ekonomi di Kota Probolinggo II-64
Tabel II.17 Capaian Kinerja Penanggulangan Penyakit Menular Strategis Kota Probolinggo II-83
Tabel II.18 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Probolinggo Tahun 2022-2024 ..... II-90
Tabel II.19 Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2022 ..... II-95
Tabel II.20 Ragam/ Jenis Disabilitas di Kota Probolinggo Tahun 2022 ..... II-96
Tabel II.21 Data Jumlah Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin II-96
Tabel II.22 Data Jumlah Disabilitas Berdasarkan Ragam Difabel II-96
Tabel II.23 Data Jumlah Disabilitas Berdasarkan Ragam Difabel dan Jenis Kelamin .. II-97
Tabel II.24 Data Jumlah Disabilitas Berdasarkan Ragam Difabel dan Jenis Kelamin .. II-97
Tabel II.25 Data Jumlah Disabilitas Berdasarkan Usia II-97
Tabel II.26 Data Jumlah Disabilitas Berdasarkan Pendidikan Terakhir II-97

Tabel II.27 Organisasi Disabilitas di Kota Probolinggo II-98
Tabel II.28 Data Sertifikasi Produk Halal di Kota Probolinggo sampai dengan Tahun 2024 ..... II-105
Tabel II.29 Data Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-105
Tabel II.30 Perkembangan Jumlah Jenis Penelitian Tahun 2020-2024 ..... II-114
Tabel II.31 Jumlah dan Peringkat Inovasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-116
Tabel II.32 Persentase Anggaran Riset dan Inovasi Daerah Terhadap APBD Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-117
Tabel II.33 Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022-2024 ..... II-126
Tabel II.34 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024 ..... II-127
Tabel II.35 Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022-2024 ..... II-132
Tabel II.36 Ruas Jalan Menurut Fungsinya Tahun 2023 ..... II-137
Tabel II.37 Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-141
Tabel II.38 Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ... II-143
Tabel II.39 Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022-024 ..... II-151
Tabel II.40 Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2022-2024 ..... II-153
Tabel II.41 Kota Layak Anak Tahun 2020-2024 ..... II-158
Tabel II.42 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024 ..... II-179
Tabel II.43 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024 ..... II-201
Tabel II.44 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-209
Tabel II.45 Rata-rata Lama Tinggal dan Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2020-2024 ..... II-212
Tabel II.46 Produksi Hasil Peternakan Tahun 2020-2024 ..... II-216
Tabel II.47 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024 II-220
Tabel II.48 Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian II-222
Tabel II.49 Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 - 2024 ..... II-246
Tabel II.50 Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 249
Tabel II.51 Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 - 2024 ..... II-253
Tabel II.52 Neraca Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-257
Tabel II.53 Rasio Neraca Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-262

Tabel II.54 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-269
Tabel II.55 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-271
Tabel II.56 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah II-271
Tabel II.57 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-272
Tabel II.58 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal II-273
Tabel II.59 Rasio Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-274
Tabel II.60 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah II-274
Tabel II.61 Kriteria Rasio Kapasitas Fiskal Daerah II-276
Tabel II.62 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-277
Tabel II.63 Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah II-277
Tabel II.64 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 II-280
Tabel II.65 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-287
Tabel II.66 Nilai Anggaran dan Realisasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-291
Tabel II.67 Nilai Anggaran dan Realisasi Belanja Pendidikan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-292
Tabel II.68 Nilai Anggaran dan Realisasi Belanja Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-293
Tabel II.69 Perkembangan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-295
Tabel II.70 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2030 ..... II-297
Tabel II.71 Defisit Riil Anggaran Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-299
Tabel II.72 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-300
Tabel II.73 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Probolinggo Tahun 2022 - 2024 ..... II-302
Tabel II.74 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-303
Tabel II.75 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2030 ..... II-305

Tabel II.76 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kota Probolinggo Tahun 2026 - 2030..... II-310
Tabel II.77 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 - 2030..... II-317
Tabel II.78 Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo II-318
Tabel II.79 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat RPJMN Tahun 2025-2029..... II-333
Tabel II.80 Penetapan Target Berdasarkan Periodesasi RPJPD Kota Probolinggo ... II-353
Tabel II.81 Daya Tampung Tempat Tinggal Kota Probolinggo Tahun 2029..... II-361
Tabel II.82 Permasalahan Utama Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo II-363
Tabel II.83 Strategi dan Arah Kebijakan PUD Kota Probolinggo..... II-366
Tabel II.84 Strategi dan Arah Kebijakan Permasalahan Utama RIDA Kota Probolinggo..... II-368
Tabel III.1 Keterkaitan Isu Strategis dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029..... III-5
Tabel III.2 Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029..... III-21
Tabel III.3 Keterkaitan Strategi Pembangunan dengan Sasaran, Tujuan, Misi Dan Visi Kota Probolinggo 2025-2029..... III-38
Tabel III.4 Arah Kebijakan Kota Probolinggo 2025-2029..... III-40
Tabel III.5 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2030 III-49
Tabel IV.1 PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026-2030..... IV-4
Tabel IV.2 Prioritas Pendanaan Kota Probolinggo Tahun 2026-2030 ..... IV-76
Tabel IV.3 Indikator Kinerja Utama Kota Probolinggo Tahun 2025-2030..... IV-80
Tabel IV.4 Indikator Kinerja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2030 ..... IV-82

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-9
Gambar II-1 Peta Administratif Kota Probolinggo II-10
Gambar II-2 Persentase luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi II-11
Gambar II-3 Peta Hidrologi Kota Probolinggo II-13
Gambar II-4 Peta Tutupan Vegetasi Tahun 2024 ..... II-15
Gambar II-5 Diagram Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita Kabupaten/ Kota BTS Tahun 2024 ..... II-19
Gambar II-6 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini Kabupaten/ Kota BTS Tahun 2024 ..... II-20
Gambar II-7 Korelasi Spasial Sektor Transportasi II-21
Gambar II-8 Korelasi Spasial Sektor Perdagangan II-21
Gambar II-9 Korelasi Spasial Sektor Industri Pengolahan II-22
Gambar II-10 NTL Kawasan BTS Tahun 2020 ..... II-23
Gambar II-11 NTL Kawasan BTS Tahun 2023 ..... II-23
Gambar II-12 Peta Kemampuan Lahan Kota Probolinggo II-26
Gambar II-13 Indeks Ketahanan Pangan Kota Probolinggo II-30
Gambar II-14 Prevalensi Ketidakcukupan Konsusmsi Pangan Kota Probolinggo (%) II-33
Gambar II-15 Jumlah Pelanggan Listrik Kota Probolinggo II-34
Gambar II-16 Cakupan Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak (%) II-35
Gambar II-17 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan II-36
Gambar II-18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo II-37
Gambar II-19 Capaian IKA, IKU, dan IKL Kota Probolinggo II-38
Gambar II-20 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Layak di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-39
Gambar II-21 Ketersediaan Fasilitas Pengurangan dan Penanganan Sampah di Kota Probolinggo II-42
Gambar II-22 Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kota Probolinggo II-45
Gambar II-23 Penurunan Emisi GRK Kumulatif Kota Probolinggo II-47
Gambar II-24 Indeks Risiko Bencana Kota Probolinggo II-48

Gambar II-25 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 .... II-50
Gambar II-26 Piramida Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2024 .... II-51
Gambar II-27 Kepadatan Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 .... II-52
Gambar II-28 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 .... II-55
Gambar II-29 Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2024 . II-57
Gambar II-30 Capaian Inflasi Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 .... II-57
Gambar II-31 PDRB ADHK dan PDRB ADHB Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 .... II-58
Gambar II-32 Klasifikasi Sektor PDRB Kota Probolinggo Berdasarkan Tipology Klassen Tahun 2020-2024 .... II-60
Gambar II-33 Hasil Analisis *Shift Share* 4 Kuadran II-66
Gambar II-34 Kontribusi PDRB Kota Probolinggo terhadap Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 .... II-67
Gambar II-35 Angka Kemiskinan Kota Probolinggo (%) dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024 .... II-68
Gambar II-36 Angka Kemiskinan Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2024 .... II-69
Gambar II-37 PDRB Per Kapita Kota Probolinggo (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024 .. II-70
Gambar II-38 PDRB Per Kapita ADHB Menurut Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2024 .... II-71
Gambar II-39 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Probolinggo Terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 .... II-72
Gambar II-40 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2024 .... II-73
Gambar II-41 Rasio Gini Kota Probolinggo Terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 .... II-75
Gambar II-42 Rasio Gini Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2024 .... II-76
Gambar II-43 Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo Terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 .... II-77
Gambar II-44 Indeks Pembangunan Manusia Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2024 .... II-78
Gambar II-45 Umur Harapan Hidup Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 .... II-79
Gambar II-46 Prevalensi Stunting Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 .... II-80
Gambar II-47 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Balita Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 .... II-81

Gambar II-48 Status Gizi Balita Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-82
Gambar II-49 Penemuan Kasus Tuberculosis Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 . II-84
Gambar II-50 Pasien HIV Baru yang memulai Pengobatan ARV Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-85
Gambar II-51 Penemuan Kasus Malaria yang Diobati sesuai Standar Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-86
Gambar II-52 Cakupan Kelurahan Siaga Sehat Aktif Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-87
Gambar II-53 Rata-rata Lama Sekolah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-88
Gambar II-54 Harapan Lama Sekolah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-89
Gambar II-55 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2024 ..... II-91
Gambar II-56 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-99
Gambar II-57 PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kota Probolinggo 2020-2024 ..... II-101
Gambar II-58 Rasio PDRB Transportasi dan Pergudangan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-102
Gambar II-59 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-106
Gambar II-60 Indeks Masyarakat Digital (IMDI) Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-107
Gambar II-61 Capaian Indeks Infrastruktur Tahun 2020-2024 ..... II-109
Gambar II-62 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-111
Gambar II-63 Rasio Konektivitas Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-113
Gambar II-64 Hasil Penelitian berdasarkan Bidang Urusan di Kota Probolinggo II-115
Gambar II-65 Indeks SPBE Tahun 2020-2024 ..... II-118
Gambar II-66 Indeks Reformasi Hukum Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-120
Gambar II-67 Persentase Penurunan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2020-2024 ..... II-122
Gambar II-68 Indeks Demokrasi Indonesia, Rata-Rata Provinsi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2023 ..... II-124

Gambar II-69 Perbandingan Capian Indeks Daya Saing Daerah Kota Probolinggo dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024 ..... II-125
Gambar II-70 Indeks Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-133
Gambar II-71 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tahun 2020-2024 ... II-134
Gambar II-72 Cakupan Layanan Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 .. II-135
Gambar II-73 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024 ..... II-138
Gambar II-74 Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Tahun 2020-2024 ..... II-139
Gambar II-75 Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman Tahun 2020-2024 ..... II-140
Gambar II-76 Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-142
Gambar II-77 Capaian Rumah Tidak Layak Huni dan Luasan Permukiman Kumuh II-145
Gambar II-78 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Tahun 2020-2024 (%) II-146
Gambar II-79 Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 ..... II-147
Gambar II-80 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%) di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-148
Gambar II-81 Indeks Risiko Bencana dan Wilayah Tangguh Bencana Tahun 2020-2024 ..... II-150
Gambar II-82 Capaian Kinerja Kesejahteraan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-154
Gambar II-83 Capaian Indikator Layanan Urusan Sosial Tahun 2020-2024 ..... II-155
Gambar II-84 Capaian Indikator Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-156
Gambar II-85 Angka Sengketa Perusahaan - Pekerja Tahun 2020-2024 ..... II-157
Gambar II-86 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 ..... II-159
Gambar II-87 Ketersediaan Pangan (Ton) Tahun 2020-2024 ..... II-161
Gambar II-88 Konsumsi Pangan (Kg/Kap/Tahun) Tahun 2020-2024 ..... II-162
Gambar II-89 Capaian Indikator Urusan Pangan Tahun 2020-2024 ..... II-162

Gambar II-90 Capaian Indikator Jumlah Tanah yang Bersertifikat Tahun 2020-2024 ..... II-164
Gambar II-91 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 ..... II-165
Gambar II-92 Ruang Terbuka Hijau Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-166
Gambar II-93 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-167
Gambar II-94 Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi oleh Dinsos PPPA Tahun 2020-2024 ..... II-169
Gambar II-95 Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi oleh Kecamatan Tahun 2020-2024 ..... II-169
Gambar II-96 Persentase Kelompok Masyarakat Aktif Tahun 2020-2024 ..... II-170
Gambar II-97 Tingkat Aktivitas Kelompok Bina Keluarga Sejahtera, Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja dan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tahun 2020-2024 ..... II-171
Gambar II-98 Capaian Indikator Keluarga Berencana (KB) Tahun 2020-2024 ..... II-173
Gambar II-99 Capaian Indeks Lansia Berdaya dan Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Yang Mandiri Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-175
Gambar II-100 Capaian Indikator Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-177
Gambar II-101 Indeks SPBE Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-181
Gambar II-102 Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E-Government Terintegrasi Tahun 2020-2024 ..... II-182
Gambar II-103 Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020-2024 ..... II-183
Gambar II-104 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 ..... II-184
Gambar II-105 Rasio Kewirausahaan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-185
Gambar II-106 Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp dalam Milyar) berdasarkan Data LKPM dan NIB Tahun 2020-2024 ..... II-186
Gambar II-107 Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Tahun 2020-2024 ..... II-186
Gambar II-108 ICOR dan Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-187
Gambar II-109 Nilai Realisasi Investasi II-188

Gambar II-110 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada DPMPTSP Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-189
Gambar II-111 Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 ..... II-190
Gambar II-112 Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024 ..... II-191
Gambar II-113 Capaian Indikator Urusan Statistik tahun 2020-2024 ..... II-192
Gambar II-114 Capaian Indikator Urusan Persandian Tahun 2020-2024 ..... II-194
Gambar II-115 Jumlah Sarana Seni dan Budaya serta Benda, Situd dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2020-2024 ..... II-195
Gambar II-116 Jumlah Penyelenggara Seni dan Budaya (Kegiatan) Tahun 2020-2024 ..... II-196
Gambar II-117 Jumlah Kelompok, Sanggar, Organisasi Seni Tahun 2020-2024 ..... II-196
Gambar II-118 Indeks Kebudayaan berbasis Capaian Pelaksanaan PPKD / Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah serta Persentase Kebudayaan yang dikelola serta yang menjadi Daya Saing Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-197
Gambar II-119 Jumlah Pengunjung dan Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Tahun 2020-2024 ..... II-199
Gambar II-120 Capaian Indikator TGM dan IPLM Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024 ..... II-200
Gambar II-121 Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baik dan Baku Tahun 2020-2024 ..... II-202
Gambar II-122 Indeks Pengawasan Kearsipan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 II-204
Gambar II-123 Tingkat Ketersesiaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-205
Gambar II-124 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-206
Gambar II-125 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kota Probolinggo 2020-2024 ..... II-207
Gambar II-126 Nilai Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-210
Gambar II-127 Capaian Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-211

Gambar II-128 Capaian Indikator Rasio PAD Sektor Pariwisata di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-213
Gambar II-129 Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-214
Gambar II-130 Produksi Padi, Jagung, dan Bawang Merah Tahun 2020-2024 ..... II-215
Gambar II-131 Jumlah Kelompok Tani Aktif dan Nilai Tukar Petani Tahun 2020-2024 ..... II-216
Gambar II-132 Persentase penurunan penyakit hewan menular strategis Tahun 2020-2024 ..... II-217
Gambar II-133 Jumlah Nilai Impor dan Ekspor Kota Probolinggo Tahun 2021-2024 II-219
Gambar II-134 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perindustrian serta Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2020-2024 ..... II-221
Gambar II-135 Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri dan Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri Tahun 2020-2024 ..... II-222
Gambar II-136 Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-223
Gambar II-137 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-224
Gambar II-138 Nilai SAKIP Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-225
Gambar II-139 Persentase Anggota DPRD yang Puas Akan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-226
Gambar II-140 Capaian Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024 ..... II-227
Gambar II-141 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-229
Gambar II-142 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kota Probolinggo II-231
Gambar II-143 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2020-2024 ..... II-233
Gambar II-144 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-235
Gambar II-145 Capaian Kinerja Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-236
Gambar II-146 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2020-2024 ..... II-237
Gambar II-147 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat 5 Kecamatan Di Kota Probolinggo 2020-2024 ..... II-239

Gambar II-148 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kesbangpol Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 ..... II-240
Gambar II-149 Jumlah Orkesmas Aktif Kota Probolinggo tahun 2020-2024 ..... II-241
Gambar II-150 Pendapatan Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2024 ..... II-245
Gambar II-151 Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-252
Gambar II-152 Rasio Likuiditas Kota Probolinggo II-263
Gambar II-153 Rasio Solvabilitas Kota Probolinggo II-265
Gambar II-154 Rasio Aktiva Kota Probolinggo II-266
Gambar II-155 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-269
Gambar II-156 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-271
Gambar II-157 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-273
Gambar II-158 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-274
Gambar II-159 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kota Probolinggo dan Kota Lainnya di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 - 2024 ..... II-276
Gambar II-160 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-277
Gambar II-161 Rasio PAD terhadap PDRB Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-278
Gambar II-162 Rasio Ruang Fiskal Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-279
Gambar II-163 Tingkat Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-282
Gambar II-164 Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-283
Gambar II-165 Proporsi SILPA terhadap Total Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-284
Gambar II-166 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-286
Gambar II-167 Proporsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik terhadap Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-289
Gambar II-168 Proporsi Belanja Pendidikan terhadap Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-291

Gambar II-169 Proporsi Belanja Kesehatan terhadap Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 ..... II-293
Gambar II-170 Misi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 ..... II-329
Gambar II-171 Peta Struktur Ruang Wilayah Kota Probolinggo II-347
Gambar II-172 Penggunaan Lahan di Kota Probolinggo II-349
Gambar II-173 Peta Pola Ruang Wilayah Kota Probolinggo II-350
Gambar II-174 Rencana Kawasan Strategis Kota Probolinggo II-351
Gambar III-1 Pokok-Pokok Visi Kota Probolinggo 2025-2029 ..... III-2
Gambar III-2 Kerangka Pikir Penajaman Misi I Kota Probolinggo III-6
Gambar III-3 Kerangka Pikir Penajaman Misi II Kota Probolinggo III-8
Gambar III-4 Kerangka Pikir Penajaman Misi III Kota Probolinggo III-9
Gambar III-5 Kerangka Pikir Penajaman Misi IV Kota Probolinggo III-10
Gambar III-6 Kerangka Pikir Penajaman Misi V Kota Probolinggo III-12
Gambar III-7 Cascading Misi I RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029 ..... III-14
Gambar III-8 Cascading Misi II RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029 ..... III-15
Gambar III-9 Cascading Misi III RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029 ..... III-16
Gambar III-10 Cascading Misi IV RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029 ..... III-18
Gambar III-11 Cascading Misi V RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029 ..... III-19
Gambar III-12 Tema/ Pentahapan Tahunan Pembangunan Kota Probolinggo 2026-2030 ..... III-44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat memberikan ruang bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Hal ini sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Kewenangan ini menegaskan bahwa daerah, termasuk Kota Probolinggo, memiliki tanggung jawab penuh dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Untuk menjamin arah pembangunan daerah yang terencana dan sistematis, maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi sebuah keharusan, yang juga menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD ini merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyusun rancangan RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Dalam hal ini, **dr. H. Aminuddin, Sp.OG(K)., M.Kes**. sebagai Wali Kota Probolinggo bersama **Hj. Ina Dwi Lestari Buchori, S.AP., M.M**. sebagai Wakil Wali Kota Probolinggo hasil pemilihan umum 2024, yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, telah berkomitmen menerjemahkan visi, misi, dan program prioritas ke dalam dokumen RPJMD sebagai panduan pembangunan lima tahun ke depan.

RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 menjadi sangat strategis karena merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2045. Sebagai dokumen jangka menengah, RPJMD ini tidak hanya memuat janji-janji politik kepala daerah terpilih, tetapi juga harus mencerminkan visi jangka panjang pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam kurun waktu 2025-2029 ini, Pemerintah Kota Probolinggo dihadapkan pada tantangan untuk membangun fondasi yang kokoh guna mewujudkan visi besar RPJPD, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan dari periode sebelumnya. Oleh karena itu, seluruh proses penyusunan RPJMD ini harus mempertimbangkan capaian pembangunan sebelumnya, permasalahan aktual, serta dinamika perkembangan global, nasional, dan regional.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo untuk periode 2025-2029 adalah "**Mewujudkan Kota Probolinggo yang Tangguh, Berkelanjutan, Sejahtera, Modern, dan Adaptif**". Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun Kota Probolinggo sebagai kota yang mampu menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong transformasi menuju kota modern berbasis inovasi dan teknologi yang tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal.

Penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam regulasi tersebut, ditekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses yang partisipatif dan inklusif, serta mempertimbangkan keterpaduan antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RPJMD ini disusun sebagai pedoman utama pembangunan lima tahunan yang akan menjadi dasar perumusan kebijakan, program, dan kegiatan di setiap perangkat daerah.

RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 juga menjadi dokumen strategis yang memuat kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi daerah, serta penanggulangan dampak perubahan iklim. Sejalan dengan komitmen terhadap pembangunan

berkelanjutan, RPJMD ini juga mengakomodasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bagian dari proses perencanaan yang memperhitungkan aspek lingkungan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Integrasi KLHS dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekologi serta ketahanan lingkungan dalam jangka panjang.

Dengan disusunnya RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 ini, maka seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing. RPJMD ini juga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, sekaligus alat monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pembangunan Kota Probolinggo dalam lima tahun ke depan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan akuntabel.

Melalui komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, Pemerintah Kota Probolinggo bertekad menjadikan periode 2025-2029 sebagai fondasi awal menuju terwujudnya Kota Probolinggo yang tangguh, berkelanjutan, sejahtera, modern, dan adaptif. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta lingkungan hidup yang lestari. RPJMD ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga instrumen nyata untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah menuju visi besar Kota Probolinggo Tahun 2045.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 6757, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
12. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;

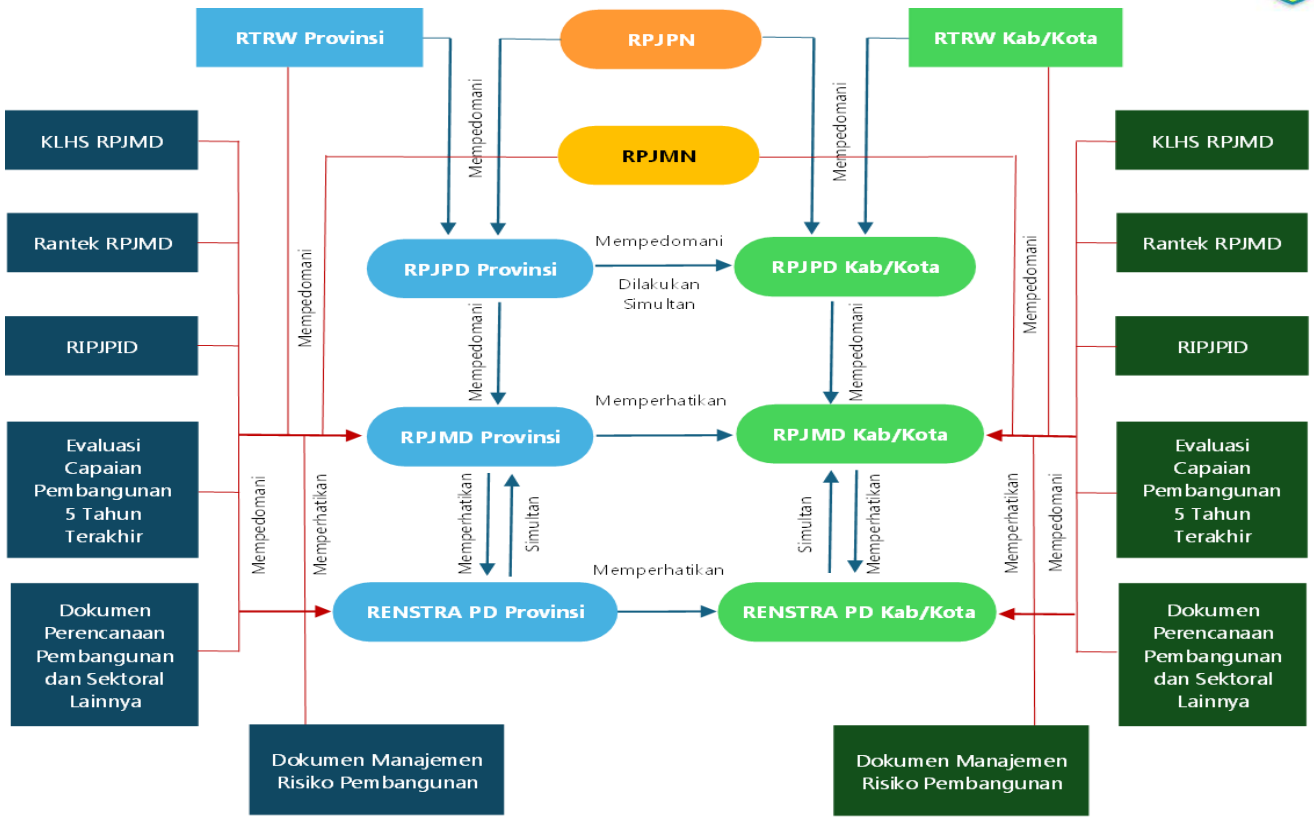
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);
31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9); dan;
32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 9).

1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 dilaksanakan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur keterpaduan antara perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sesuai amanat regulasi tersebut, penyusunan RPJMD diawali dengan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD yang berbasis pada kajian teknokratik. Rancangan tersebut menjadi dasar untuk merumuskan isu-isu strategis yang bersifat jangka menengah, yang kemudian akan menjadi landasan dalam perumusan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya, setelah ditetapkannya Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Rancangan Teknokratik RPJMD disempurnakan melalui penyelarasan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJMD tidak hanya bersifat internal, tetapi juga mengutamakan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lain. Hal ini untuk memastikan adanya keterpaduan dan keselarasan antar level pemerintahan, antar waktu, antar ruang, antar fungsi pemerintahan, serta menjamin keterkaitan yang logis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan. Dengan demikian, RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang bersifat holistik dan sistematis.

Secara hierarkis dan substantif, RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Pertama, RPJMD harus selaras dengan RPJPN dan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran arah pembangunan nasional. Kedua, RPJMD juga mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, sebagai bagian dari konsistensi arah pembangunan wilayah provinsi dengan prioritas daerah. Ketiga, RPJMD menjadi penjabaran jangka menengah dari RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 yang telah menetapkan visi jangka panjang pembangunan daerah. Keempat, keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo menjadi penting untuk menjamin konsistensi antara pembangunan fisik wilayah dengan kebijakan sektoral yang diusung dalam RPJMD. Kelima, RPJMD juga mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Probolinggo sebagai instrumen penting untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Sinergi kelima dokumen tersebut menjadi landasan penting agar RPJMD dapat menjawab tantangan pembangunan daerah, menciptakan keterpaduan kebijakan, dan menjamin kualitas hidup masyarakat Kota Probolinggo secara berkelanjutan.



Gambar I-1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber: Diolah, 2025

Dalam rangka memastikan integrasi, konsistensi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan memerhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hal ini bertujuan agar arah pembangunan Kota Probolinggo selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi, serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan tata ruang. Adapun keterkaitan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2045. RPJMD ini menjadi bagian dari tahapan pencapaian RPJPD, khususnya untuk periode pembangunan tahap pertama (2025-2029). Oleh karena itu, seluruh rumusan visi-misi Kepala Daerah, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 harus mengacu dan konsisten dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang telah dirumuskan dalam RPJPD. Hal ini memastikan kesinambungan pembangunan Kota Probolinggo secara berkelanjutan dan terarah dalam jangka panjang;

2. RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 disusun dengan memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Hal ini dikarenakan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sinkronisasi dilakukan agar program dan kebijakan pembangunan Kota Probolinggo sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, seperti penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan daya saing ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan ketahanan lingkungan. Dengan demikian, RPJMD Kota Probolinggo tidak hanya mendukung pencapaian target pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi pada tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan;
3. Penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 juga mengacu dan selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan sinergi kebijakan pembangunan antar-wilayah di Provinsi Jawa Timur, khususnya antara Kota Probolinggo dengan daerah lainnya. Melalui sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan, diharapkan dapat memperkuat peran Kota Probolinggo dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti industri, perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata yang menjadi unggulan wilayah tapal kuda Jawa Timur;
4. RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan Rencana Induk Peta Jalan Pengembangan dan Inovasi Daerah agar selaras antara inovasi-inovasi dalam segala lini penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menunjang sebagai upaya mencapai efektivitas dan efisiensi pembangunan;
5. RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo. RTRW menjadi dasar dalam penataan ruang wilayah, yang mencakup penetapan pola ruang, struktur ruang, dan kawasan strategis. Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD harus memperhatikan arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, sehingga mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang, meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur, serta menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat; dan;

6. Dalam rangka menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan, penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS ini merupakan instrumen penting yang digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program pembangunan dalam RPJMD telah mempertimbangkan dampak lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara komprehensif. KLHS juga bertujuan untuk mengidentifikasi alternatif strategi pembangunan yang ramah lingkungan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta melindungi keanekaragaman hayati di wilayah Kota Probolinggo. Dengan adanya integrasi KLHS, diharapkan pembangunan yang direncanakan mampu mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 memiliki maksud untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2025-2029. RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Probolinggo Tahun 2025-2045.

Tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yakni:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan Kota Probolinggo Tahun 2025-2029;
2. Sebagai pedoman tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029;
3. Sebagai pedoman terhadap strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2025-2029;
4. Sebagai pedoman perumusan program prioritas tahun 2025-2029;
5. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029; dan
6. Sebagai tolok ukur dalam pengukuran dan evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 sepenuhnya mengacu kepada Inmendagri No. 2 Tahun 2025 yang terdiri atas 5 (lima) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum Kota Probolinggo yang memuat subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah yang terdiri dari dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum; subbab Gambaran Keuangan Daerah yang terdiri dari penjelasan tentang realisasi APBD tahun anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2025-2029; serta subbab Permasalahan dan Isu Strategis yang terdiri atas permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisikan subbab Visi dan Misi kepala daerah terpilih yang kemudian diterjemahkan menjadi tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, sekaligus juga dengan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sebagai representasi dari tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo pada tahun 2025-2029. Pada bab ini juga diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta menguraikan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta berbagai program prioritas daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat subbab program pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program prioritas disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan. Pada bab ini dijelaskan

juga tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan pedoman transisi serta kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN PERIODE 2020-2024

Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam proses manajemen pembangunan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Evaluasi hanya dapat dilakukan dengan efektif jika terdapat indikator yang jelas dan dapat diukur mengenai hasil yang ingin dicapai dalam program pembangunan. Oleh karena itu yang dijadikan landasan dalam melakukan evaluasi kinerja Kota Probolinggo adalah indikator kinerja Utama pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Probolinggo tahun 2019-2024 (mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021). Evaluasi capaian kinerja mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 mengingat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 sebagai dokumen transisi sekaligus landasan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 dan 2026 belum dapat diukur capaian kinerjanya untuk Tahun 2025 yang sedang berjalan, dimana capaian kinerja akhir yang dapat diukur atas Tahun 2024.

Evaluasi kinerja indikator pembangunan daerah merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi yang menyeluruh dan terstruktur, pemerintah daerah dapat menilai keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi kinerja juga menjadi alat untuk menciptakan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki pelayanan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 terdapat enam tujuan yang menjadi representasi ketercapaian Misi, yakni:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing, yang dibentuk dari sasaran pembangunan: (1) Meningkatnya Nilai Investasi Daerah; (2) Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri.
2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yang dibentuk dari sasaran pembangunan: (1) Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan; (2) Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, yang dibentuk dari sasaran pembangunan: (1) Meningkatnya Kuantitas Penyerapan Tenaga Kerja; (2) Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat; (3) Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah; (4) Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum; (5) Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender .
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas, yang dibentuk dari sasaran pembangunan: Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur.
5. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana, yang dibentuk dari sasaran pembangunan: (1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup; (2) Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana
6. Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik, yang dibentuk dari sasaran pembangunan: (1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas; (2) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan.

Berdasarkan fokus tujuan dan indikator kinerja Utama pada Perubahan RPJMD tahun 2019-2024 dapat disajikan capaian kinerja pemerintah Kota Probolinggo pada tabel di bawah ini:

Tabel II.1 Tabel Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	2020			2021			2022			2023			2024			Catatan Gap Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) / INDIKATOR TUJUAN																	
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	5,99	-3,64	-60,77%	2,5-3	4,06	147,64%	3-3,5	6,12	188,31%	3,5-4	6,04	161,07%	4-5	5,15	114,44%	Realisasi tahun 2024 telah melampui target. Capaian 114,44% menunjukkan kinerja sangat baik
2	Indeks Pembangunan Manusia	73,59	74,81	101,66%	73,50	75,20	102,31%	73,60	76,08	103,37%	74,07	76,93	103,86	74,47	77,79	104,46%	Realisasi tahun 2024 telah melampui target dengan Capaian 104,46% akan tetapi masih tetap memerlukan usaha untuk mempertahankan capaian pada lima tahun yang akan datang.
3	Persentase Penduduk Miskin	7,10	7,43	95,35%	7,41	7,44	99,60%	7,39	6,65	110,01%	7,35	6,48	111,84%	7,3	6.18	118,122%	Realisasi tahun 2024 telah melampui target dengan Capaian 118,122%. Akan tetapi tetap memerlukan effort untuk mempertahankan capaian pada lima tahun yang akan datang.
4	Indeks Infrastruktur	71,28	73,64	103,31%	74,73	75,35	100,83%	75,54	74,91	99,17%	76,84	75,53	98,30%	77,28	74,66	96,61%	Realisasi tahun 2024 belum mencapai target sehingga capaiannya hanya 96,66%. Sehingga Memerlukan effort untuk meningkatkan capaian pada lima tahun yang akan datang.
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,61	56,51	99,82%	64,61	70,20	108,65%	64,83	60,85	93,86%	65,03	61,69	94,86%	65,19	58,17	89,23%	Realisasi tahun 2024 belum mencapai target sehingga capaiannya hanya 89,23%. Sehingga Memerlukan effort untuk meningkatkan capaian pada lima tahun yang akan datang.

No	Indikator Kinerja Daerah	2020			2021			2022			2023			2024			Catatan Gap Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
6	Indeks Reformasi Birokrasi	71,00	67,00	94,37%	70,00	67,27	96,10%	71,00	68,56	96,56%	72,00	76,13	105,74%	73	85,66	117,34%	Realisasi tahun 2024 telah melampui target dengan capaian 117,34%. Namun demikian tetap Memerlukan effort untuk meningkatkan capaian pada lima tahun yang akan datang.
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) / INDIKATOR SASARAN																	
1	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	0,50	0,40	80,00%	0,38	0,37	97,37%	0,39	0,39	100,00%	0,40	0,42	104,75%	0,41	-0,21%	-51,219%	Realisasi pertumbuhan nilai investasi Kota Probolinggo Tahun 2024 minus -0,21% dengan target 0,41%, capaiannya -51,219%. diperlukan usaha untuk peningkatan nilai investasi secara signifikan. Sumber realisasi investasi pada pada tahun 2020-2024 mengunakan sumber data LKPM +NIB sedangkan atas periode selanjutnya pada tahun 2025-2030 sumber data yang diambil akan menggunakan data dari LKPM
2	Persentase PDRB Sektor Perdagangan	10,46	-5,74	-54,88%	6,00	6,10	101,67%	6,10	6,08	99,67%	6,20	5,43	87,58%	6,3	4,82	76,51%	Realisasi tahun 2024 belum melampui target. Capaiannya masih 76,51% Sehingga Memerlukan effort untuk meningkatkan capaian pada lima tahun yang akan datang.
3	Persentase PDRB Sektor Perindustrian	8,04	-4,70	-58,46%	2,00	3,45	172,50%	2,10	6,03	287,14	2,20	6,72	305,45	2,3	3,92	170,43%	Realisasi tahun 2024 telah melampui target dengan Capaian 170,43%. Akan tetapi tetap Memerlukan effort untuk Meningkatkan capaian

No	Indikator Kinerja Daerah	2020			2021			2022			2023			2024			Catatan Gap Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
																	pada lima tahun yang akan datang.
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,47	6,7	6,92%	6,03	6,55	91,38%	5,73	4,57	120,24%	5,44	4,53	116,73%	5,17	4,44	114,12%	Realisasi tahun 2024 telah melampaui target dengan capaian 114,12%. akan tetapi tetap Memerlukan effort untuk meningkatkan kinerja lima tahun yang akan datang.
5	Persentase PMKS	31,03	35	87,21%	34,5	62,4	19,13%	34	48,82	56,41%	33,5	46,28	61,85%	33	43,46	68,30%	Realisasi tahun 2024 belum mencapai target. Sehingga Memerlukan effort untuk meningkatkan kinerja agar bisa mencapai target pada lima tahun yang akan datang.
6	Skor Pola Pangan Harapan	91,1	84,2	92,43%	84,4	78,2	92,65%	84,6	85,1	100,59%	84,8	81,2	95,75%	85	81,4	95,76%	Realisasi tahun 2024 belum mencapai target. Sehingga Memerlukan effort untuk meningkatkan kinerja agar bisa mencapai target pada lima tahun yang akan datang.
7	Persentase Penurunan Kasus Ketentraman dan Ketertiban	2,0	3,0	150%	2,0	5,40	270%	2,0	1,90	95%	2,0	1,46	73%	2,0	2	100%	Realisasi tahun 2024 telah memenuhi target dengan capaian 100%. Akan tetapi tetap Memerlukan effort untuk mempertahankan capaian pada lima tahun yang akan datang.
8	Indeks Pemberdayaan Gender	68,55	65,92	96,16%	68,3	65,05	95,24%	68,35	65,81	96,28%	68,4	68,74	100,50%	68,45	76.80	112.19	Realisasi tahun 2024 telah melampui target dengan capaian 112,19%. Akan tetapi tetap Memerlukan effort untuk mempertahankan capaian pada lima tahun yang akan datang
9	Indeks Pendidikan	0,69	0,67	97,10%	0,68	0,68	100,00	0,69	0,69	100,00	0,69	0,7	101,45	0,70	0,71	101,43%	Realisasi tahun 2024 telah melampui target

No	Indikator Kinerja Daerah	2020			2021			2022			2023			2024			Catatan Gap Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
																	dengan capaian 101,43 %. Akan tetapi tetap Memerlukan effort untuk mempertahankan capaian pada lima tahun yang akan datang.
10	Indeks Kesehatan	0,77	0,77	100,00	0,77	0,77	100,00	0,77	0,78	101,30	0,78	0,83	106,41%	0,79	0,836	105,82%	Realisasi tahun 2024 telah melampui target dengan capaian 105,82 %. Akan tetapi tetap Memerlukan effort untuk mempertahankan capaian pada lima tahun yang akan datang.
11	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	70,45	75,16	106,69%	77,10	77,61	100,66%	77,79	77,01	99,00%	79,72	77,00	96,59%	80,5	74,98	93,66%	Realisasi tahun 2024 belum mencapai target dengan capaian hanya 93,66%. Sehingga Memerlukan effort untuk meningkatkan capaian pada lima tahun yang akan datang.
12	Persentase Infrastruktur Berkualitas Baik	72,10	72,12	100,03%	72,35	73,09	101,02%	73,30	72,81	99,33%	73,95	74,07	100,16%	74,5	74,34	99,79	Realisasi tahun 2024 belum mencapai target dengan capaian hanya 99,79%. Sehingga Memerlukan effort untuk meningkatkan capaian pada lima tahun yang akan datang.
13	Indeks Kualitas Air	50,80	50,00	98,43%	50,50	66,67	132,02%	51,00	50,00	98,04%	51,30	50,00	97,47%	51,5	41,43	80,45%	Realisasi tahun 2024 belum mencapai target dengan capaian hanya 80,45%. Sehingga Memerlukan effort untuk meningkatkan capaian pada lima tahun yang akan datang.
14	Indeks Kualitas Udara	84,90	90,36	106,43%	90,38	91,55	101,29	90,40	91,44	101,15%	90,50	91,64	101,26%	90,6	91,74	100,15%	Realisasi tahun 2024 telah melampui target dengan capaian 100,15%.

No	Indikator Kinerja Daerah	2020			2021			2022			2023			2024			Catatan Gap Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
																	Akan tetapi tetap Memerlukan effort untuk mempertahankan capaian pada lima tahun yang akan datang.
15	Indeks Kualitas Lahan	46,00	41,10	89,35%	41,20	36,80	89,32%	41,30	22,90	55,45%	41,50	26,36	63,52%	41,7	26,66	63,93	Realisasi tahun 2024 belum mencapai target dengan capaian hanya 63,93%. Sehingga Memerlukan effort untuk meningkatkan capaian pada lima tahun yang akan datang.
16	Indeks Risiko Bencana	147,00	114,16	122,34%	114,00	108,3	95%	113,00	101,02	89,40%	112,00	107,22	95,73%	111	105,01	94,60%	Realisasi tahun 2024 telah melampui target dengan capaian 117,67%. Akan tetapi tetap Memerlukan effort untuk mempertahankan capaian pada lima tahun yang akan datang.
17	Nilai SAKIP	80,00	72,68	90,85%	75,00	73,22	97,63%	80,00	74,02	92,53%	81,00	73,25	90,43%	82	71.91	87.70%	Realisasi tahun 2024 belum mencapai target dengan capaian 87,7%. Sehingga Memerlukan effort untuk meningkatkan kinerja agar bisa mencapai target lima tahun yang akan datang.
18	Nilai LPPD	3,25	3,25	100,00%	3,25	3,14	96,62%	3,26	3,42	104,91%	3,26	2,9769	91,32%	3,27	3,442	105,26%	Realisasi tahun 2024 telah melampaui target dengan capaian 105,16%. Akan tetapi tetap Memerlukan effort untuk meningkatkan kinerja agar bisa mencapai target lima tahun yang akan datang.
19	Indeks SPBE	3,20	3,35	104,69%	3,40	2,59	76,18%	3,40	1,97	57,94%	3,50	3,10	88,57%	3,6	4.04	112,22%	Realisasi tahun 2024 telah melampaui target dengan capaian sebesar 112,22%. Akan tetapi

No	Indikator Kinerja Daerah	2020			2021			2022			2023			2024			Catatan Gap Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
																	tetap Memerlukan effort untuk meningkatkan kinerja agar bisa mencapai target lima tahun yang akan datang.
20	Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	Realisasi tahun 2024 sama dengan target yang ditetapkan. Akan tetapi tetap Memerlukan effort untuk mempertahankan capaian lima tahun yang akan datang.
21	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	63	64,25	101,98%	64	45,73	71,45%	64,25	42,08	65,49%	64,50	64,04	99,29%	65,00	78,02	120,03%	Realisasi tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 120.03%. Akan tetapi tetap Memerlukan effort untuk mempertahankan capaian lima tahun yang akan datang.
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	84,14	102,61%	84,15	76,91	91,40%	84,17	84,82	100,77%	84,2	85,41	101,44%	84,25	86,57	102,75%	Realisasi tahun 2024 telah melampui target dengan capaian sebesar 102,75%. Akan tetapi tetap Memerlukan effort untuk mempertahankan capaian lima tahun yang akan datang.
														Rata-Rata Pencapaian Target tahun 2024			**93.41% – BAIK**

Sumber: Bappeda Litbang Kota Probolinggo data diolah, 2025

2.1.2 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.2.1 POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH

A. LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Terdapat perubahan penetapan Luas wilayah adminsitratif Kota Probolinggo sebagai berikut :

1. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, ditetapkan luas wilayah Kota Probolinggo sebesar 56,67 km^2 ;
2. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, berdasarkan hasil Penetapan Hasil Konsultasi Pemetaan Lintas Sektor dengan BIG luas wilayah Kota Probolinggo dalam dokumen RTRW dimaksud sebesar 55,041 km^2 ;
3. Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, ditetapkan luas wilayah Kota Probolinggo sebesar 54,676 km^2 ;
4. Terakhir mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2 - 2l38 Tahun 2025 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, ditetapkan luas wilayah Kota Probolinggo sebesar 55,197 km^2.

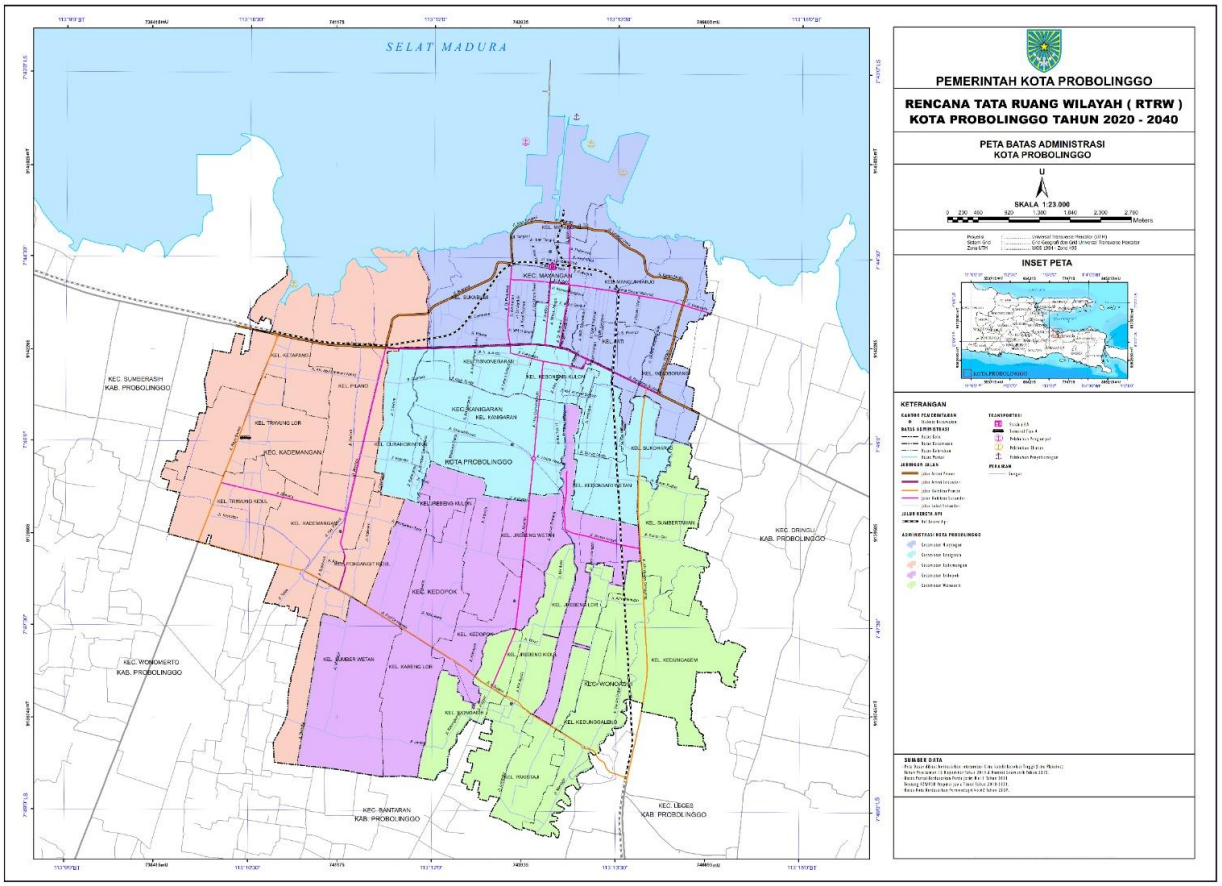
Berdasarkan luas wilayah dimaksud Kota Probolinggo terbagi dalam 5 (lima) kecamatan dan 29 (dua puluh sembilan) kelurahan.

B. LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS

Secara geografis Kota Probolinggo berada diantara 7°43’41” sampai 7°49’04” Lintang Selatan dan 113°10’ sampai dengan 113°15’ Bujur Timur. Batas administratif wilayah Kota Probolinggo meliputi:

a. Sebelah Utara : Selat Madura
b. Sebelah Timur : Kecamatan Dringu (Kabupaten Probolinggo)
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, Bantaran, dan Sumberasih (Kabupaten Probolinggo)

d. Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih (Kabupaten Probolinggo)



Gambar II-1 Peta Administratif Kota Probolinggo

Sumber: RTRW Kota Probolinggo Tahun 2020-2040

C. TOPOGRAFI

Topografi wilayah adalah gambaran atau deskripsi tentang bentuk dan susunan permukaan suatu wilayah atau daerah. Kota Probolinggo memiliki topografi wilayah yang relatif datar dengan kelerengan 0 – 2%. Wilayah dengan ketinggian antara 0 sampai 12,5 mdpl seluas 1.343,70 ha, ketinggian 12,5-25 mdpl seluas 1.750,50 ha, ketinggian 25-37,5 mdpl seluas 1.475,70 mdpl, ketinggian 37,5-50 mdpl seluas 838,16 mdpl, dan ketinggian >50 mdpl seluas 96,08 mdpl. Dengan topografi sebagaimana di atas, wilayah Kota Probolinggo bisa dikembangkan secara kawasan, khususnya kawasan budidaya. Secara kewilayahan wilayah utara yang berbatasan dengan Selat Madura memiliki ketinggian 0 – 12,5 mdpl dan beberapa kawasan di wilayah selatan memiliki ketinggian di atas 50 mdpl.

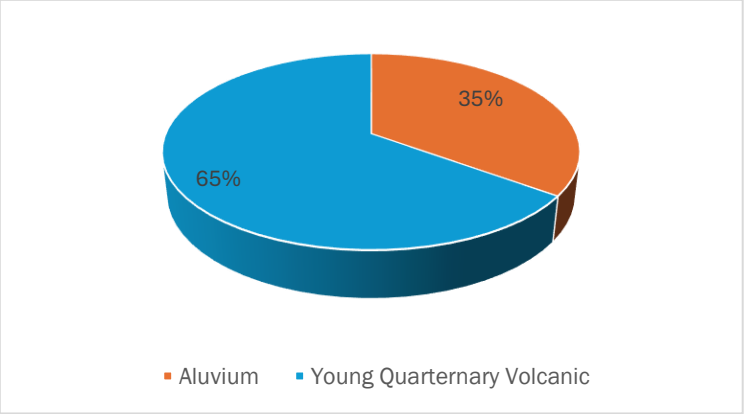
Tabel II.2 Topografi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Topografi (mdpl)				
		0-12.5	12.5-25	25-37.5	37.5-50	>50
1	Kademangan	7,12%	9,38%	6,53%	1,85%	0,56%
2	Kedopok	0,05%	2,71%	10,48%	6,32%	0,06%
3	Wonoasih	15,09%	2,68%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Mayangan	2,15%	13,48%	0,09%	0,00%	0,00%
5	Kanigaran	0,00%	3,55%	9,72%	7,05%	1,13%
	Jumlah	**24,41%**	**31,80%**	**26,81%**	**15,23%**	**1,75%**

Sumber: BPS Kota Probolinggo, 2025

D. GEOLOGI

Kondisi geologi adalah letak suatu daerah atau wilayah berdasarkan lempeng bumi. Kondisi geologi setiap wilayah bervariasi memiliki peran bagi terbentuknya suatu bentukan lahan di wilayah tersebut. Jenis Tanah di Kota Probolinggo berdasarkan struktur geologi terdapat berbagai susunan/struktur geologi yaitu:



Gambar II-2 Persentase luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi

Sumber: Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2024

Wilayah Kota Probolinggo dibentuk dari bahan induk batuan vulkanik dan zaman quarter muda (*young quarternary volcanic product*) dan batuan endapan (alluvium). Bahan induk tersebut terbentuk dengan fisiografi yang relatif datar. Geologi jenis young quarternary volcanic tersebar merata di kecamatan Kota Probolinggo ±65,05% dari luas wilayah, jenis batuan aluvium seluas ±34,95%, tersebar di Kecamatan Kademangan, Wonoasih, Mayangan dan Kanigaran.

E. HIDROLOGI

Kondisi hidrologi dapat menunjukkan kondisi sumber daya air yang terdapat di wilayah perencanaan. Kota Probolinggo mempunyai potensi sumber air yang cukup banyak, pada umumnya sungai-sungai yang ada mempunyai aliran

yang cukup. Sebagai bentuk pelestarian mata air, telah diterbitkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penetapan Sumber Mata Air di Wilayah Kota Probolinggo Sebagai Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah. Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh 6 (enam) sungai besar, antara lain Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah dan Pancur serta sungai-sungai kecil lainnya. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah Selatan ke Utara sesuai dengan kelerengan wilayah.

Tabel II.3 Nama dan Panjang Sungai Kota Probolinggo

No	Nama Sungai/Kali	Panjang (km)
1	Kedunggaleng	3.097
2	Umbul	5.138
3	Banger	2.865
4	Legundi	5.439
5	Kasbah	2.037
6	Pancor	4.239
7	Pesisir	3.693
8	Dringu	5.949
9	Tempuran	2.059
10	Avoer Brantas	3.704
11	Afvoer Bromo	3.297
12	Pakis	3.225
13	Gladak Serang	4.392
14	Akub	3.693
15	Belo'an	5.539
16	Esan	4.137
17	Bangsingan	2.844
18	Barat TPA	2.510
19	Kedungkaleng 1	3.206

Sumber: Dinas PUPR Kota Probolinggo, 2024

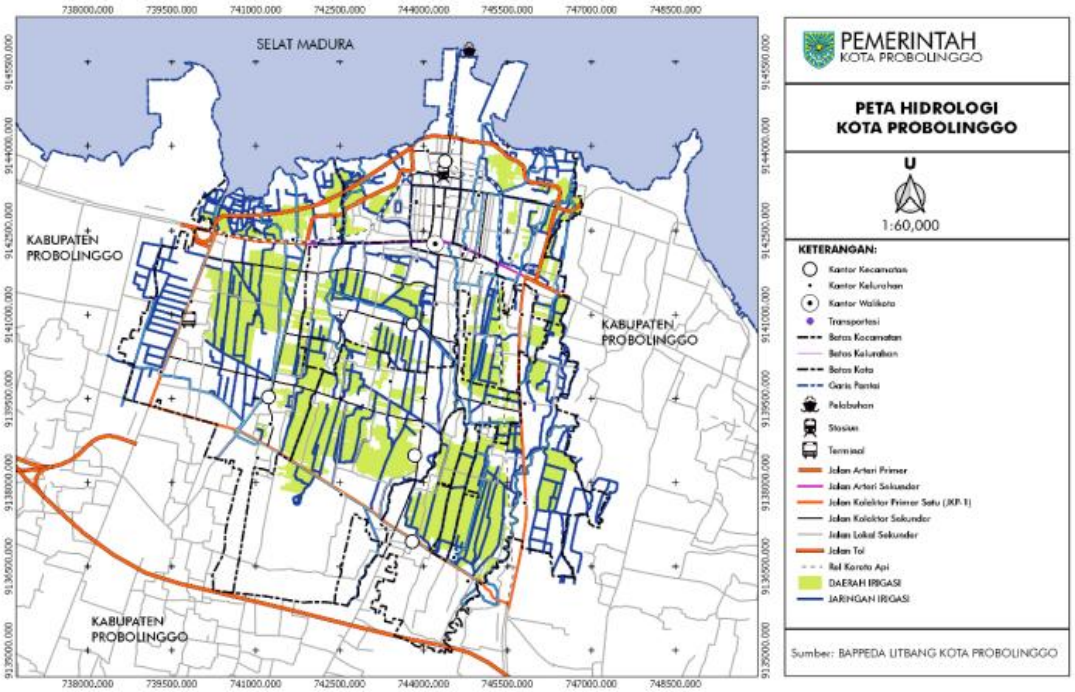
Selain memanfaatkan aliran air sungai untuk irigasi usaha di sektor pertanian, kondisi hidrologi Kota Probolinggo juga didukung oleh keberadaan sumber mata air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian serta berpotensi sebagai obyek wisata.

Tabel II.4 Sumber Mata Air di Kota Probolinggo

No	Sumber Mata Air	Lokasi	
		Kelurahan	Kecamatan
1	Sumber Mata Air Langse	Triwung Lor	Kademangan
2	Sumber Mata Air Pilang Renes	Pilang	Kademangan
3	Sumber Mata Air Jalil	Ketapang	Kademangan
4	Sumber Mata Air Tiban	Pilang	Kademangan
5	Sumber Mata Air Gentong	Pilang	Kademangan
6	Sumber Mata Air Umbul	Curah Ginting	Kanigaran
7	Sumber Mata Air Sumber Pacar	Tisnonegaran	Kanigaran
8	Sumber Mata Air Kekok	Tisnonegaran	Kanigaran
9	Sumber Mata Air Arum	Mangunharjo	Mayangan
10	Sumber Mata Air Jati	Jati	Mayangan
11	Sumber Mata Air Sumbertaman	Sumber Taman	Wonoasih

No	Sumber Mata Air	Lokasi	
		Kelurahan	Kecamatan
12	Sumber Mata Air Ardi	Wonoasih	Wonoasih
13	Sumber Mata Air Kareng	Kareng Lor	Kedopok
14	Sumber Mata Air Grinting	Sumber Wetan	Kedopok
15	Sumber Mata Air Sentong	Jrebeng Wetan	Kedopok

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, 2024



Gambar II-3 Peta Hidrologi Kota Probolinggo
Sumber: Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2024

F. KLIMATOLOGI

Kota Probolinggo yang merupakan daerah pesisir yang memiliki iklim tropis basah. Berikut merupakan gambaran iklim di Kota Probolinggo pada tahun 2022:

1. Rata-rata curah hujan selama tahun 2022 sebesar 294.875 mm. Curah hujan terendah terjadi pada Bulan Juli yaitu 28 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari mencapai 683.1 mm;
2. Persentase rata-rata penyinaran matahari pada tahun 2022 mencapai 3.26%, terendah pada Bulan Januari sebesar 1.8% dan tertinggi pada Bulan September mencapai 5.2%;
3. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2022 mencapai 80.02%. Kelembaban terendah terjadi pada Bulan April dengan rata-rata kelembaban udara sebesar 76.9%. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Oktober dengan besaran 84.1%;

Suhu rata-rata di tahun 2022 adalah sekitar 22.79 derajat Celsius. Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada Bulan Januari 2022 sebesar 22.1 derajat celcius. Sedang tertinggi pada Bulan September sebesar 23.6 derajat celcius.

G. PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan di Kota Probolinggo pada tahun 2024 menunjukkan pola pemanfaatan ruang yang masih didominasi oleh sektor pertanian, khususnya sawah dan kebun/tegalan. Berdasarkan data yang ada, luas lahan sawah mencapai 1.930,72 hektar, disusul oleh kebun dan tegalan seluas 1.846,72 hektar. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun Kota Probolinggo merupakan wilayah perkotaan, sektor agraris masih memiliki peran signifikan dalam struktur ruang kota.

Di sisi lain, kawasan permukiman mencakup luas sebesar 1.018,08 hektar, mencerminkan intensitas pembangunan kawasan hunian yang cukup tinggi. Penggunaan lahan untuk prasarana transportasi berupa jalan juga cukup besar, yaitu sebesar 211,25 hektar, yang mengindikasikan kebutuhan akan konektivitas dan mobilitas penduduk di kawasan urban.

Sektor industri menempati luas lahan sebesar 112,03 hektar, sedangkan kawasan perdagangan dan jasa seluas 31,69 hektar, yang menunjukkan kontribusi sektor ekonomi produktif terhadap struktur tata ruang kota. Selain itu, kawasan mangrove seluas 112,46 hektar dan perairan sebesar 174,46 hektar turut menggambarkan pentingnya perlindungan kawasan pesisir dan ekosistem lingkungan di wilayah Kota Probolinggo.

Pemanfaatan lahan untuk fasilitas publik seperti fasilitas umum (18,58 ha), pendidikan (20,52 ha), kesehatan (2,46 ha), dan peribadatan (5,39 ha) menunjukkan alokasi ruang untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat. Sedangkan lahan untuk perkantoran dan makam masing-masing tercatat seluas 6,80 ha dan 34,57 ha.

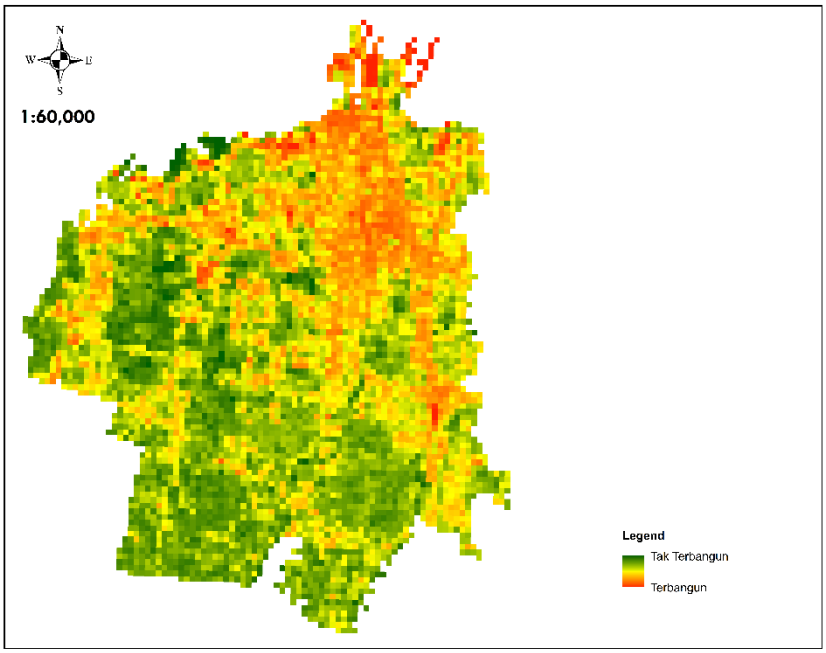
Tabel II.5 Data Penggunaan Lahan di Kota Probolinggo Tahun 2024

No.	Penggunaan Lahan	Luas	% Luasan
1.	Perairan	174,46 Ha	3,16
2.	Fasilitas Umum	18,58 Ha	0,34
3.	Fasilitas Peribadatan	5,39 Ha	0,10
4.	Industri	112,03 Ha	2,03
5.	Jalan	211,25 Ha	3,82
6.	Kebun dan Tegalan	1846,72 Ha	33,42
7.	Makam	34,57 Ha	0,63

No.	Penggunaan Lahan	Luas	% Luasan
8.	Mangrove	112,46 Ha	2,04
9.	Perkantoran	6,80 Ha	0,12
10.	Permukiman	1018,08 Ha	18,42
11.	Perdagangan dan Jasa	31,69 Ha	0,57
12.	Fasilitas Kesehatan	2,46 Ha	0,04
13.	Sawah	1930,72 Ha	34,94
14.	Fasilitas Pendidikan	20,52 Ha	0,37

Sumber: DPUPR PKP Kota Probolinggo, 2025

Secara keseluruhan, komposisi penggunaan lahan tersebut mencerminkan karakter Kota Probolinggo sebagai kota dengan fungsi ganda, yakni sebagai pusat aktivitas ekonomi sekaligus masih mempertahankan karakter pertanian dan kawasan pesisir. Oleh karena itu, dalam kerangka perencanaan jangka menengah, pengelolaan tata ruang yang berimbang dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mendukung pembangunan Kota Probolinggo yang inklusif dan berwawasan lingkungan.



Gambar II-4 Peta Tutupan Vegetasi Tahun 2024
Sumber: Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2025

H. POTENSI BENCANA

Jenis Bencana yang teridentifikasi di Kota Probolinggo meliputi : kawasan rawan banjir, kawasan rawan banjir lahar, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan angin puting beliung, dan kawasan rawan kebakaran.

1. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan genangan air (banjir) di Kota Probolinggo hampir tersebar di seluruh kecamatan dan diperburuk oleh keadaan status drainase yang rusak dan terjadinya banjir lahar Gunung Bromo. Ancaman banjir cenderung pada level sedang hingga tinggi dengan potensi ancaman terbesar berada di Kecamatan Kanigaran.

2. Kawasan Rawan Banjir Lahar

   Selain kawasan rawan banjir sebagaimana disebutkan sebelumnya, di Kota Probolinggo juga terdapat kawasan rawan banjir lahar akibat erupsi Gunung Bromo. Kawasan Rawan Banjir Lahar terutama berada pada kawasan di sekitar sungai yang ada di Kecamatan Wonoasih, Kedopok, dan Kademangan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Probolinggo. Kecamatan dengan dampak banjir lahar terbesar adalah Kecamatan Kademangan yang dilintasi oleh aliran sungai dari wilayah selatan (Gunung Bromo).

3. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

   Kawasan rawan bencana gelombang pasang air laut yang berpotensi di Kota Probolinggo ada 2 (dua) macam yaitu :

   a. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang

      Meliputi beberapa bagian dari wilayah kecamatan yang berlokasi di sekitar pantai utara yaitu Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kademangan. Pengendalian pemanfaatan ruang antara lain dengan pembatasan kegiatan budidaya ikan tambak dan penanaman mangrove di sekitar kawasan pantai. Selain itu pembangunan fisik di sepanjang pantai utara Kota Probolinggo harus memperhatikan ketentuan sempadan pantai.

   b. Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi (ROB)

      Gelombang ekstrim pada umumnya ditimbulkan oleh siklon tropis. Hampir sama dengan bencana tsunami dan daerah yang berpotensi adalah wilayah pantai utara namun gelombang ekstrim skalanya lebih kecil dan salah satu penyebab abrasi terjadi lebih cepat.

4. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung

   Kawasan rawan bencana angin puting beliung di Kota Probolinggo sering disebut juga angin gending. Angin puting beliung umumnya terjadi pada musim pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau

sebaliknya. Angin ini melanda seluruh Kota Probolinggo. Tingginya kecepatan angin dapat menimbulkan robohnya bangunana, baliho, tiang listrik, dan pohon.

5. Kawasan Rawan kebakaran

   Kawasan rawan bencana kebakaran di Kota Probolinggo meliputi beberapa bagian dari wilayah Kecamatan Mayangan (Kawasan Pelabuhan) dan Kecamatan Kanigaran yang merupakan wilayah dengan kepadatan bangunan yang tinggi. Kebakaran gedung dan permukiman penduduk sangat sering terjadi.

I. KETERKAITAN DENGAN WILAYAH SEKITAR

Pendekatan pengembangan wilayah fungsional yang tidak terbatas pada batas administratif menjadi penting karena aktivitas atau fungsi yang mendefinisikan wilayah dapat melintasi batas administratif. Konstelasi regional Kota Probolinggo dalam wilayah fungsional tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 menetapkan Kota Probolinggo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau kegiatan beberapa kabupaten/kota.

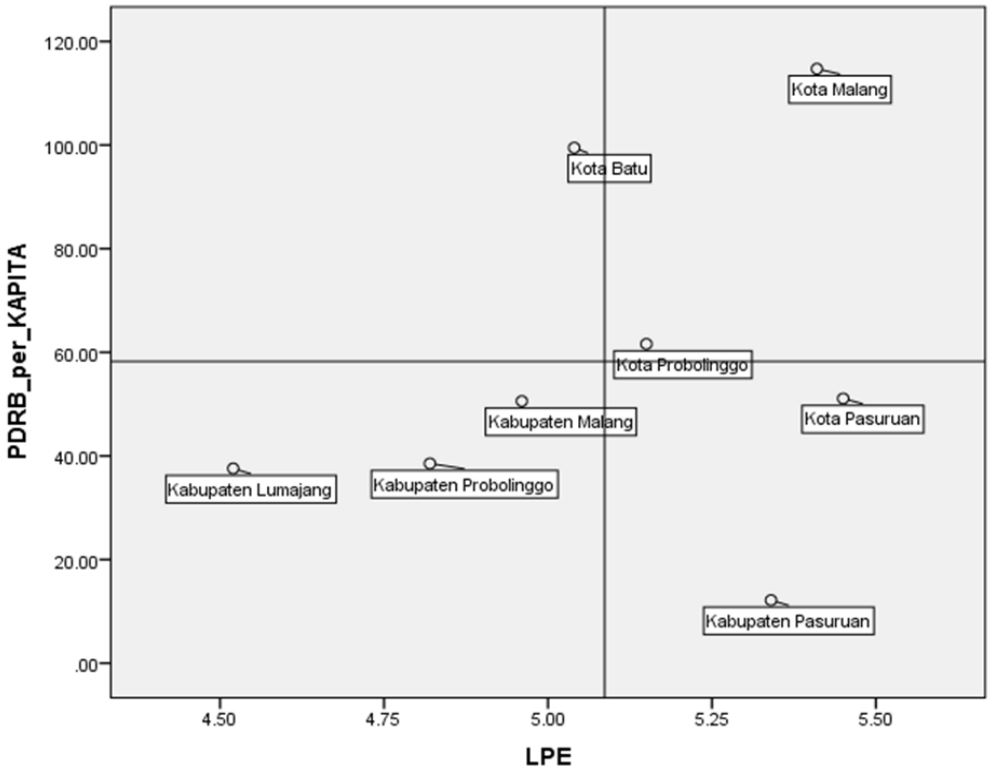
Jika ditinjau berdasarkan perkembangan wilayah Kawasan BTS (Bromo Tengger Semeru) berdasarkan analisis pengembangan wilayah, Kota Batu dapat diklasifikasikan sebagai wilayah maju sedangkan Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo termasuk wilayah sedang. Kota Probolinggo masuk dalam kategori sedang dengan capaian tertinggi adalah pada aspek akses air minum layak (100%). Secara agregat nilai Kota Probolinggo berada di urutan ketiga setalah Kota Batu dan Kota Malang.

Tabel II.6 Indeks Pengembangan Wilayah BTS

Kabupaten/Kota	TPT		IPM		LPE		Kemiskinan		Gini Ratio		PDRB per Kapita		Akses Sanitasi Layak		Akses Air Minum Layak		Agregat	Klasifkasi
	Nilai	Penskalaan	Nilai	Penskalaan	Nilai	Penskalaan	Nilai	Penskalaan	Nilai	Penskalaan	Nilai	Penskalaan	Nilai	Penskalaan	Nilai	Penskalaan		
Kabupaten Pasuruan	5.02	0.60	72.36	0.85	5.34	0.98	8.63	0.35	0.331	0.99	12.16	0.11	86.70	0.91	97.63	0.98	5.77	Tertinggal
Kabupaten Malang	5.13	0.58	73.53	0.87	4.96	0.91	8.98	0.34	0.343	0.95	50.59	0.44	84.03	0.88	98.18	0.98	5.96	Tertinggal
Kabupaten Lumajang	3.28	0.91	79.31	0.94	4.52	0.83	8.65	0.35	0.363	0.90	37.57	0.33	77.48	0.82	95.49	0.95	6.03	Tertinggal
Kabupaten Probolinggo	3.00	1.00	70.85	0.84	4.82	0.88	16.45	0.19	0.339	0.96	38.53	0.34	66.12	0.70	97.75	0.98	5.88	Tertinggal
Kota Pasuruan	4.63	0.65	78.00	0.92	5.45	1.00	6.32	0.48	0.334	0.98	51.08	0.45	91.73	0.96	99.38	0.99	6.44	Sedang
Kota Batu	3.63	0.83	79.69	0.94	5.04	0.92	3.06	1.00	0.327	1.00	99.48	0.87	95.06	1.00	99.16	0.99	7.55	Maju
Kota Malang	6.10	0.49	84.68	1.00	5.41	0.99	3.91	0.78	0.442	0.74	114.72	1.00	86.36	0.91	99.06	0.99	6.91	Berkembang
Kota Probolinggo	4.44	0.68	77.79	0.92	5.15	0.94	6.18	0.50	0.344	0.95	61.61	0.54	88.27	0.93	100	1.00	6.45	Sedang

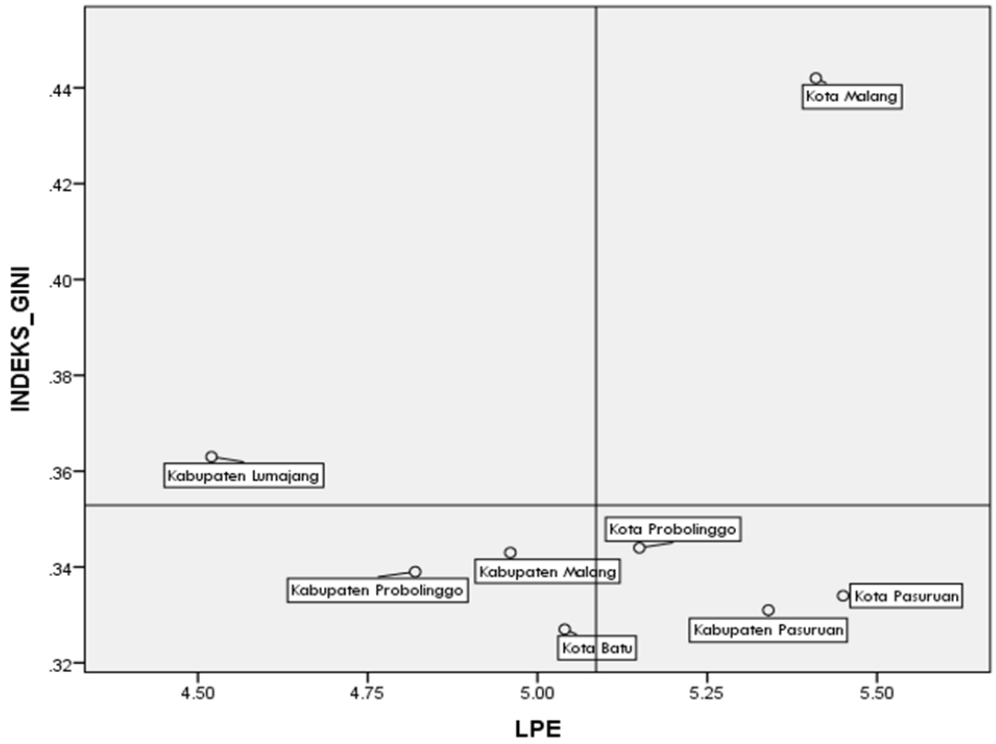
Sumber: BPS data diolah, 2025

Berdasarkan sebaran kabupaten/kota dalam diagram Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per kapita, Kota Probolinggo dan Kota Malang termasuk kabupaten/kota dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi tinggi dan PDRB per kapita tinggi. Sedangkan bila ditinjau dari Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini maka Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan termasuk wilayah dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi tinggi dan Rasio Gini rendah. Dua hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Kota Probolinggo relative baik, pertumbuhan ekonomi diindikasikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta di sisi lain juga terjadi pemerataan.



Gambar II-5 Diagram Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita Kabupaten/ Kota BTS Tahun 2024

Sumber: Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2025

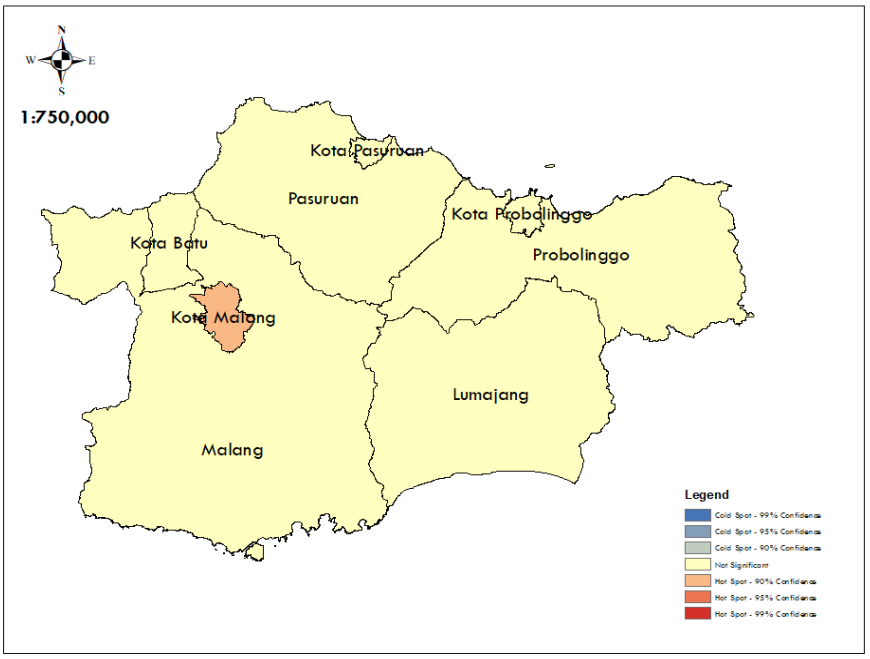


Gambar II-6 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini Kabupaten/ Kota BTS Tahun 2024
Sumber: Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2025

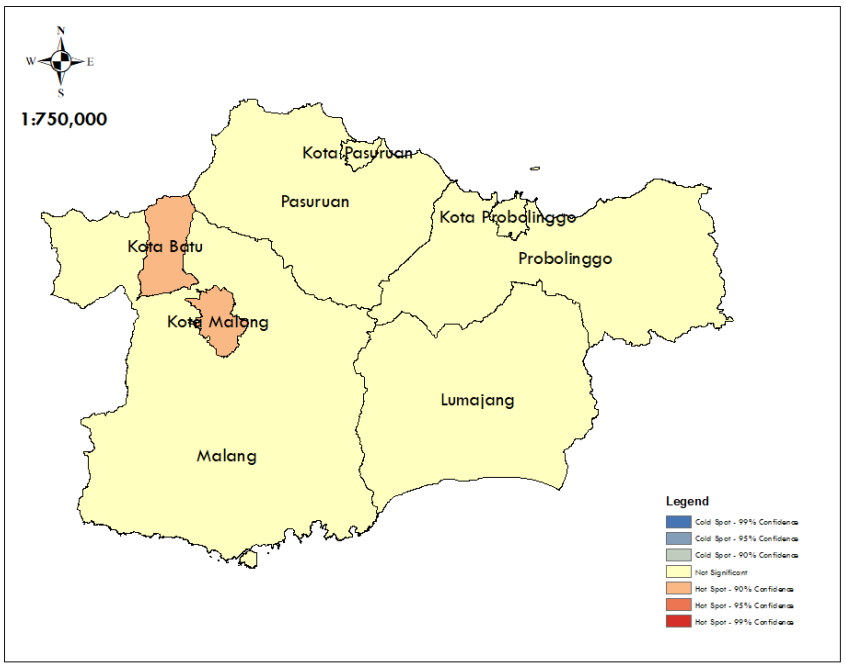
Interaksi spasial didefinisikan sebagai pergerakan atau komunikasi antar wilayah satu dengan wilayah lainnya dengan karakteristik yang berbeda. Lokasi yang berdekatan dan mempunyai nilai yang hampir sama serta cenderung berkelompok merupakan ciri-ciri terjadinya autokorelasi spasial positif, sedangkan autokorelasi spasial negatif menujukkan lokasi yang berdekatan memiliki nilai yang berbeda dan cenderung tidak berkelompok atau menyebar (Nuril Faiz, Rita Rahmawati, 2013). Semakin dekat jarak dengan posisi geografis suatu peristiwa maka keterkaitan atau interaksi antar wilayah akan semakin tinggi. (Hidayah & Gunanto, 2023).

Analisis keterkaitan dan pola spasial dilakukan terhadap sektor basis dan prospektif guna menggambarkan keterkaitan dan pengauh sektor-sektor unggulan secara regional. Berdasarkan analisis keterkaitan dan pola spasial dapat dilihat bahwa kekuatan keterkaitan spasial sektor-sektor unggulan di wilayah BTS masih tergolong rendah dengan pola spasial yang cenderung acak (random). Hal tersebut mengindikasikan belum terdapat pengaruh yang signifikan antar wilayah yang berdekatan untuk berkontibusi dalam pengembangan sektor-sektor unggulan. Sektor-sektor unggulan cenderung terpusat di wilayah Kota

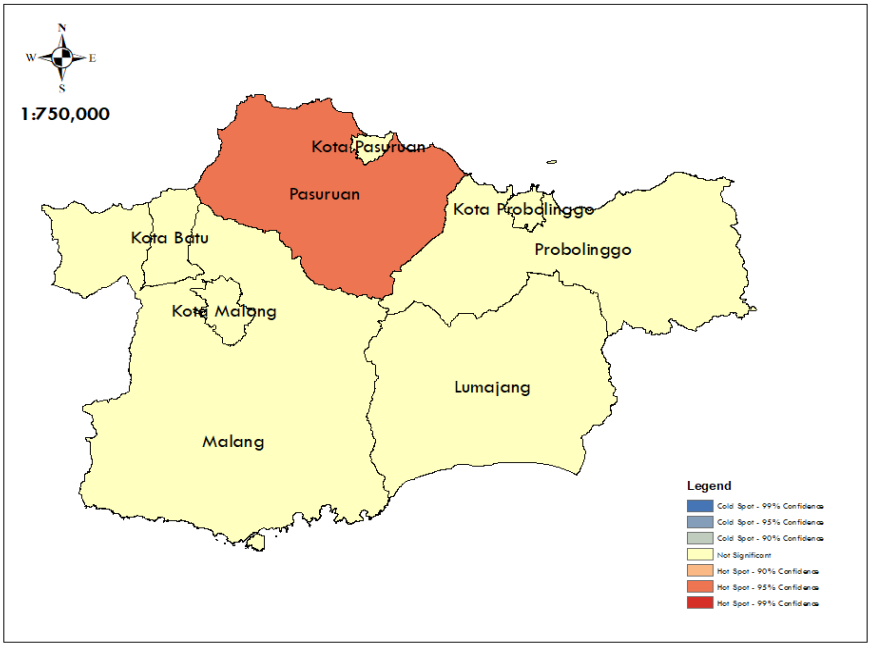
Malang dan Kota Batu untuk sektor transportasi dan perdagangan serta Kabupaten Pasuruan untuk sekto industri pengolahan.



Gambar II-7 Korelasi Spasial Sektor Transportasi
Sumber: Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2025



Gambar II-8 Korelasi Spasial Sektor Perdagangan
Sumber: Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2025

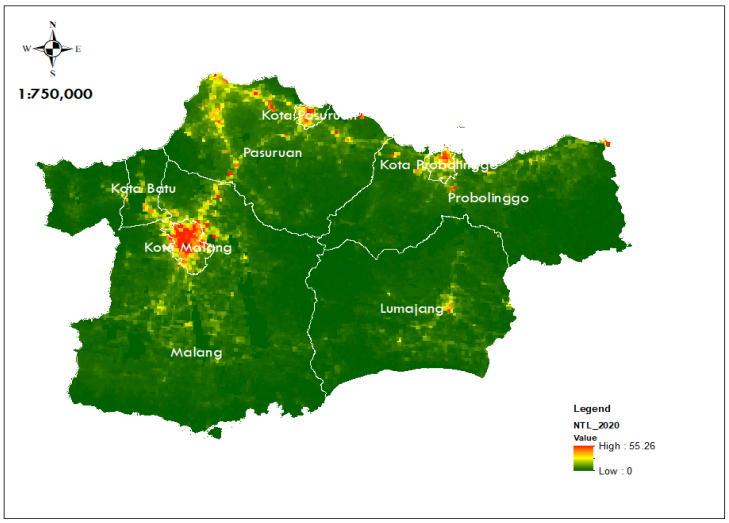


Gambar II-9 Korelasi Spasial Sektor Industri Pengolahan
Sumber: Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2025

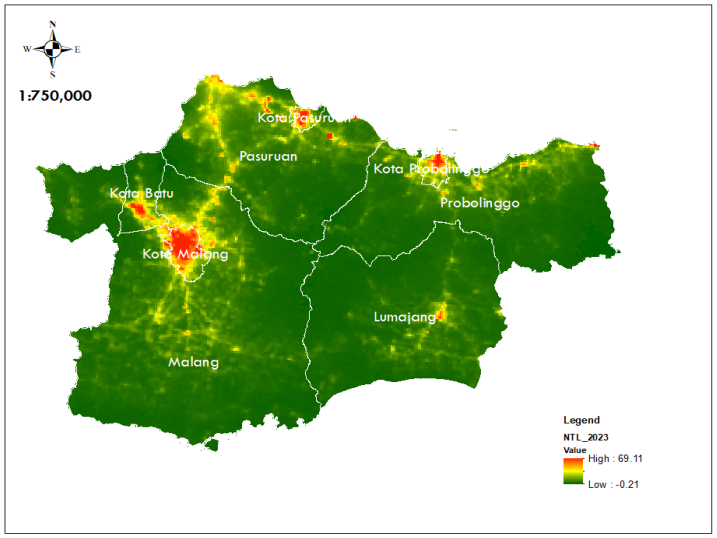
Konstelasi regional Kota Probolinggo juga dapat dilihat dari morfologi kawasan sebagai gambaran perkembangan kota secara fisik. Salah satu metode dalam analisis morfologi adalah metode penginderaan jauh Night Time Light satellite images. Night Time Light (NTL) adalah citra yang diambil oleh satelit yang menunjukkan intensitas cahaya pada malam hari di seluruh dunia. Gambar-gambar ini dihasilkan oleh sensor cahaya yang sensitif terhadap radiasi elektromagnetik dari permukaan bumi pada rentang spektrum cahaya tampak dan inframerah dekat (Afrianto & Graha, 2023).

Ditinjau dari aspek morfologi berdasarkan NTL dapat dilihat bahwa aktivitas cenderung terpusat di wilayah perkotaan terutama Kota Malang dan Kota Batu. Pemusatan aktivitas yang terjadi KOta Pasuruan dan Kota Pobolinggo diindikasikan belum sepesat di wilayah lainnya. Perkembangan kawasan di sepanjang jalur Kota Malang menuju Kota Pasuruan juga menunjukkan peningkatan aktivitas dan berpotensi memunculkan *sprawl*. *Sprawl* dalam konteks tata ruang dan perencanaan wilayah berarti Penyebaran pembangunan kota secara tidak terkendali ke wilayah pinggiran, biasanya ditandai dengan kepadatan rendah, ketergantungan tinggi terhadap kendaraan pribadi, dan lemahnya perencanaan tata ruang. Hal yang berbeda terjadi di sepanjang jalur ke timur dan selatan (menuju Probolinggo dan Lumajang) yang cenderung belum

terdapat konsentrasi aktivitas. Beberapa indikasi tersebut menunjukkan bahwa pemusatan kegiatan di wilayah BTS masih terpusat di senelah barat dan belum meluas ke wilayah lainnya. Hal tersebut perlu menjadi indikasi peran Kota Probolinggo sebagai salah satu gerbang utama menuju KSPN BTS perlu ditingkatkan guna mempercepat perkembangan wilayah. Aktivitas perkotaan di KOta Probolinggo cenderung terkonsentrasi di wilayah utara sedangkan di wilayah selatan cenderung berkembang sporadis.



Gambar II-10 NTL Kawasan BTS Tahun 2020
Sumber: Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2025



Gambar II-11 NTL Kawasan BTS Tahun 2023
Sumber: Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2025

2.1.2.2 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

A. DAYA TAMPUNG LAHAN

Daya tampung lahan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Setiap lahan memiliki kapasitas tertentu untuk mendukung kehidupan tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Perhitungan daya tampung berdasarkan arahan rasio tutupan lahan dengan asumsi masing-masing arahan rasio tersebut dipenuhi maksimum, dan dengan anggapan luas lahan yang digunakan untuk permukiman hanya 50% dari luas lahan yang boleh tertutup (30% untuk fasilitas dan 20% untuk jaringan jalan serta utilitas lainnya). Kemudian dengan asumsi 1 KK yang terdiri dari 5 orang memerlukan lahan seluas 100 m2. Maka dapat diperoleh daya tampung berdasarkan arahan rasio tutupan lahan ini sebagai berikut:

Tabel II.7 Daya Tampung Lahan Kota Probolinggo Tahun 2029

Kecamatan	Luas (Ha)	Luas (m2)	Jumlah Penduduk 2023	Proyeksi Penduduk 2029	Daya Tampung 50% (Tahun 2029)		Daya Tampung 30% (Tahun 2029)	
Kademangan	1.374,50	13.745.024	46.090	48.318	171.812	28,12%	103.087	46,87%
Kedopok	1.197,56	11.975.558	40.320	42.269	149.694	28,24%	89.816	47,06%
Wonoasih	1.068,43	10.684.295	36.290	38.044	133.553	28,49%	80.132	47,48%
Mayangan	832,00	8.319.963	62.300	65.312	103.999	62,80%	62.399	104,67%
Kanigaran	858,53	8.585.343	61.990	64.987	107.316	60,56%	64.390	100,93%
Kota Probolinggo	**5.331,02**	**53.310.186**	**246.990**	**258.931**	**666.377**	**38,86%**	**399.826**	**64,76%**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Probolinggo 2025 - 2029

Berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2029 dengan penggunaan lahan sebesar 50%, seluruh wilayah di Kota Probolinggo masih belum melebihi daya tampungnya. Namun terdapat dua kecamatan yaitu Mayangan dan Kanigaran mencapai 62,80% dan 60,56% daya tampungnya. Namun, apabila hanya 30% lahan yang digunakan untuk lahan, makanya kedua kecamatan tersebut telah melebihi daya tampungnya yaitu Kecamatan Mayangan mencapai 104,67% dan Kecamatan Kanigaran mencapai 100,93%.

B. DAYA DUKUNG BERDASARKAN KEMAMPUAN LAHAN

Kemampuan lahan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah adalah karakteristik lahan yang mencakup sifat-sifat tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain untuk mendukung kehidupan atau kegiatan. Kesesuaian lahan

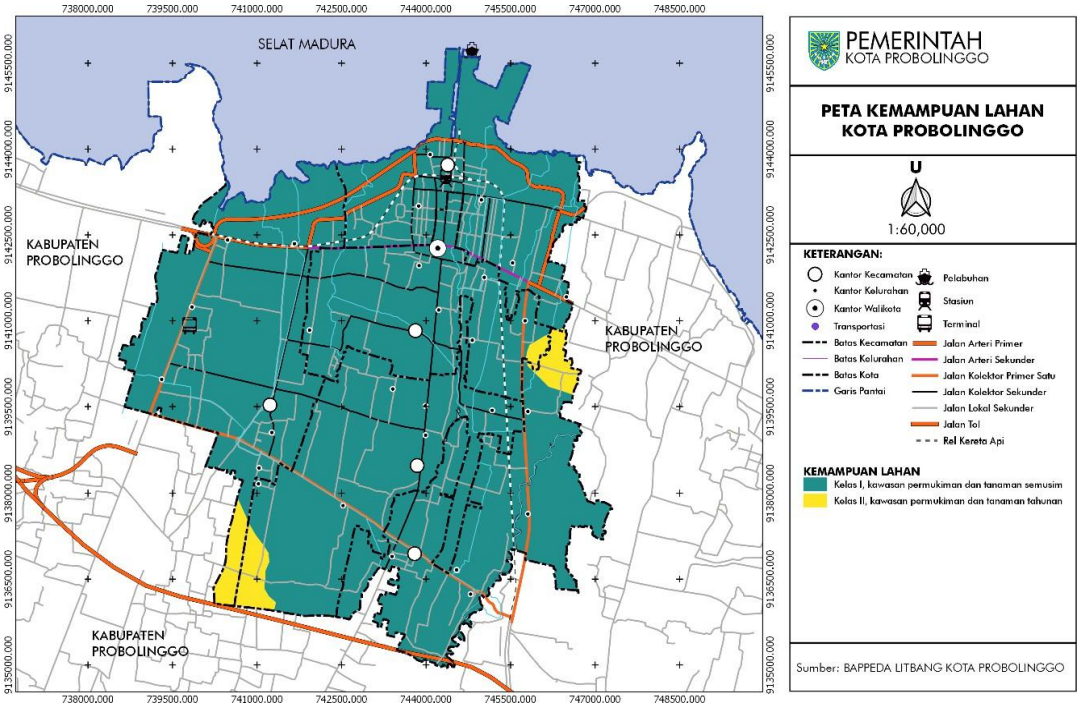
berhubungan dengan daya dukung lingkungan karena ketika suatu lahan digunakan untuk pemanfaatan lahan tertentu maka perlu diketahui apakah daya dukung lingkungan sekitar dapat mendukung pemanfaatan lahan tersebut. Lahan dikatakan sesuai atau tidak ketika akan dilakukan pemanfaatan lebih lanjut, maka digunakan mutu baku lingkungan untuk menilai bahwa apakah lingkungan telah rusak atau tercemar.

Nilai ambang batas terbagi menjadi batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Dapat dikatakan lingkungan tercemar apabila kondisi lingkungan telah melewati ambang batas (batas maksimum dan batas minimum) yang telah ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan. Analisis kemampuan lahan Kota Probolinggo ini beracuan pada 2 pedoman, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik& Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Berikut ini merupakan Daya Dukung Kemampuan Lahan Kota Probolinggo:

Tabel II.8 Kemampuan Lahan Menurut Kecamatan Kota Probolinggo

Kelas Kemampuan Lahan	Kesesuaian Lahan	Kecamatan	Luas (Ha)
Kemampuan Lahan	kawasan permukiman dan budidaya tanaman semusim	Kademangan	1345.33
Kemampuan Lahan Sangat Tinggi	kawasan permukiman dan budidaya tanaman semusim	Kanigaran	851.155
Kemampuan Lahan Sangat Tinggi	kawasan permukiman dan budidaya tanaman semusim	Kedopok	1,118.379
Kemampuan Lahan Sangat Tinggi	kawasan permukiman dan budidaya tanaman semusim	Mayangan	977.539
Kemampuan Lahan Sangat Tinggi	kawasan permukiman dan budidaya tanaman semusim	Wonoasih	1,027.840
Kemampuan Lahan Tinggi	kawasan permukiman dan budidaya tanaman tahunan	Kademangan	55.67
Kemampuan Lahan Tinggi	kawasan permukiman dan budidaya tanaman tahunan	Kanigaran	14.049
Kemampuan Lahan Tinggi	kawasan permukiman dan budidaya tanaman tahunan	Kedopok	62.21
Kemampuan Lahan Tinggi	kawasan permukiman dan budidaya tanaman tahunan	Mayangan	0.568
Kemampuan Lahan Tinggi	kawasan permukiman dan budidaya tanaman tahunan	Wonoasih	51.40

Sumber: KLHS RPJMD Kota Probolinggo 2025 – 2029



Gambar II-12 Peta Kemampuan Lahan Kota Probolinggo
Sumber: KLHS RPJMD Kota Probolinggo 2025 – 2029

C. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG AIR

Tingkat pelayanan air bersih telah mencapai hampir seluruh wilayah di Kota Probolinggo. Namun, berdasarkan hal tersebut jumlah dan ketersediaan jaringan air bersih tidak merata pada wilayah di Kota Probolinggo. Sistem jaringan air minum di Kota Probolinggo terdiri dari 2 jenis, yaitu sistem jaringan Perpipaan dan sistem jaringan Non Perpipaan. Sistem jaringan Perpipaan terdiri dari fasilitas produksi, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi. Sistem jaringan non Perpipaan dilakukan oleh mayoritas penduduk yang berada di bagian selatan Kota Probolinggo sementara itu jaringan perpipaan sampai saat ini baru melayani penduduk pada bagian utara Kota Probolinggo.

Perumda Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo memanfaatkan air baku dari Mata Air Ronggojalu, melayani hampir seluruh kelurahan dalam kecamatan. Kapasitas pengambilan Perumda Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo sesuai SIPA Tahun 2018 adalah sebanyak 390 L/detik dengan jumlah pelanggan dilayani pada Tahun 2019 sebanyak 19.938 pelanggan yang melayani 5 (lima) wilayah Kecamatan. Pengolahan air sederhana hanya dengan chlorinasi, karena kualitas air baku sudah baik. Dengan menggunakan pompa di M.A Ronggojalu, air dibawa

dengan pipa transmisi menuju 5 (lima) ground reservoir di Mayangan, Wonoasih, Randu Pangger, dan 2 unit *reservoir* pada Menara Air (atas dan bawah). Kapasitas total *Ground Reservoir* dimaksud sebesar 1.435m³. Disamping itu air juga didistribusikan langsung menuju pelanggan. Berikut adalah potensi mata air, unit produksi dan jalur transmisi pada penyediaan air bersih di Kota Probolinggo.

Tabel II.9 Proyeksi Daya Dukung Sumber Daya Air Kota Probolinggo Tahun 2029

No	Kecamatan	Proyeksi Penduduk Tahun 2029 (orang)	Ketersediaan Air (m3)	Kebutuhan Air (m3)	Daya Dukung Sumber Daya Air	Status
1	Kademangan	48861	34127536,35	126.379.200,00	-92.251.663,65	DEFISIT
2	Kedopok	42754	17400985,34	114.929.600,00	-97.528.614,66	DEFISIT
3	Wonoasih	38481	35837024,84	110.534.400,00	-74.697.375,16	DEFISIT
4	Mayangan	66061	184653481,6	104.310.400,00	80.343.081,56	SURPLUS
5	Kanigaran	65732	15525529,64	106.464.000,00	-90.938.470,36	DEFISIT
	Kota Probolinggo	**261888**	**287.544.558**	**562.617.600,00**	**-275.073.042,26**	**DEFISIT**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Probolinggo 2025 – 2029

Kondisi daya dukung air di Kota Probolinggo diproyeksikan semakin memburuk pada tahun 2029 dibandingkan dengan tahun 2023. Defisit air meningkat menjadi 287,5 juta m³ pada tahun 2029, dengan total kebutuhan air mencapai 562,6 juta m³, sedangkan ketersediaan air hanya sekitar 287,5 juta m³. Peningkatan jumlah penduduk dari 246.980 jiwa pada 2023 menjadi 261.888 jiwa pada 2029 turut berkontribusi terhadap peningkatan kebutuhan air yang tidak diimbangi dengan peningkatan ketersediaan sumber daya air. Semua kecamatan di Kota Probolinggo mengalami defisit air, kecuali Kecamatan Mayangan yang masih memiliki surplus sebesar 80,3 juta m³, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Kecamatan Kedopok mengalami peningkatan defisit dari 89,1 juta m³ pada 2023 menjadi 97,5 juta m³ pada 2029. Demikian pula, Kecamatan Kanigaran mengalami defisit yang memburuk, dari 83,4 juta m³ menjadi 90,9 juta m³. Kecamatan Kademangan mengalami defisit tertinggi dengan kekurangan air sebesar 92,3 juta m³, diikuti oleh Kecamatan Kedopok dan Kanigaran dengan defisit masing-masing sebesar 97,5 juta m³ dan 90,9 juta m³. Kecamatan Wonoasih juga mengalami defisit sebesar 74,7 juta m³. Dengan demikian, secara keseluruhan, Kota Probolinggo berada dalam kondisi defisit air yang signifikan, memerlukan strategi pengelolaan

sumber daya air yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan ini di masa mendatang.

Peningkatan defisit ini menegaskan bahwa Kota Probolinggo akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam penyediaan air bersih bagi penduduknya. Jika tidak ada intervensi strategis, seperti pembangunan infrastruktur air bersih baru, peningkatan efisiensi pemanfaatan air, atau eksplorasi sumber daya air alternatif, maka risiko krisis air akan semakin tinggi. Oleh karena itu, perencanaan jangka panjang yang mencakup konservasi air, pemanfaatan teknologi pengolahan air, serta edukasi masyarakat mengenai penggunaan air yang lebih efisien menjadi langkah krusial untuk mengurangi tekanan terhadap daya dukung sumber daya air di masa depan.

D. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG PANGAN

Mengacu pada Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021, diketahui bahwa terdapat 2.069,97 ha lahan sawah yang dilindungi yang berada di luar kawasan hutan. Luas lahan pertanian di Kota Probolinggo berdasarkan BPN seluas 1,916.57 Ha. Luas lahan sawah di Kota Probolinggo berdasarkan BPN seluas 1,703.91 Ha, sedangkan luas sawah pada tahun 2017 seluas 1,792.50 Ha. Luas lahan tegal berdasarkan BPN seluas 212.66 Ha, sedangkan luas tegal pada tahun 2017 seluas 627.50 Ha. Sementara itu, daya dukung lahan pertanian adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan bagi kebutuhan manusia. Dalam mengukur tingkat daya dukung lahan pertanian, maka digunakan beberapa variabel dalam rumus pengukuran teori Odum, Christeiler, Ebenezer Howard dan Issard dalam Soehardjo dan Tukiran (1990) dalam Moniaga (2011).

Nilai KFM (Kebutuhan Fisik Minimum) setara dengan 98 Kg per kapita per tahun. Sehingga, dapat diketahui bahwa wilayah yang mampu swasembada pangan adalah wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum atau KFM sebesar 98 Kg/Kapita/Tahun. Adapun klasifikasi daya dukung lahan pertanian antara lain apabila $\tau < 1$, artinya wilayah tersebut merupakan wilayah yang belum mampu swasembada pangan. Sedangkan apabila $\tau > 1$ artinya wilayah tersebut mampu swasembada pangan. Berikut merupakan perhitungan daya dukung lahan pertanian Kota Probolinggo Tahun 2029.

Tabel II.10 Daya Dukung Penyedia Pangan Kota Probolinggo Tahun 2029

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (ribu)	Luas Panen (Ha)	Produksi Beras (Ton)	X (Luas Panen/ Jumlah Penduduk)	Produktivitas Beras (Pr)	KFM (Ton)	Daya Dukung	Status
1	Kademangan	48.861	402	1330	0,008	3,308	0,265	0,1027	DEFISIT
2	Kedopok	42.754	300	993	0,007	3,31	0,265	0,0876	DEFISIT
3	Wonoasih	38.481	317	1050	0,008	3,312	0,265	0,1029	DEFISIT
4	Mayangan	66.061	88	291	0,001	3,307	0,265	0,0166	DEFISIT
5	Kanigaran	65.732	201	667	0,003	3,318	0,265	0,0382	DEFISIT
Kota Probolinggo		**261.888**	**1308**	**4331**	**0,005**	**3,311**	**0,265**	**0,0624**	**DEFISIT**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Probolinggo 2025 – 2029

Data proyeksi di atas menunjukkan bahwa Kota Probolinggo hingga tahun 2029 masih memiliki daya dukung penyedia pangan yang memiliki status defisit. Menghadapi defisit pangan yang signifikan ini, Kota Probolinggo perlu mengandalkan pasokan beras dari wilayah lain untuk menutupi kekurangan produksi lokal. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk yang terus berkembang akan semakin memperparah situasi defisit pangan, sehingga sangat penting dilakukan proyeksi daya dukung pangan ke depan. Diperlukan upaya agar menjaga kondisi surplus sehingga isu ketersediaan pangan dan kualitas konsumsi masyarakat dapat tertangani.

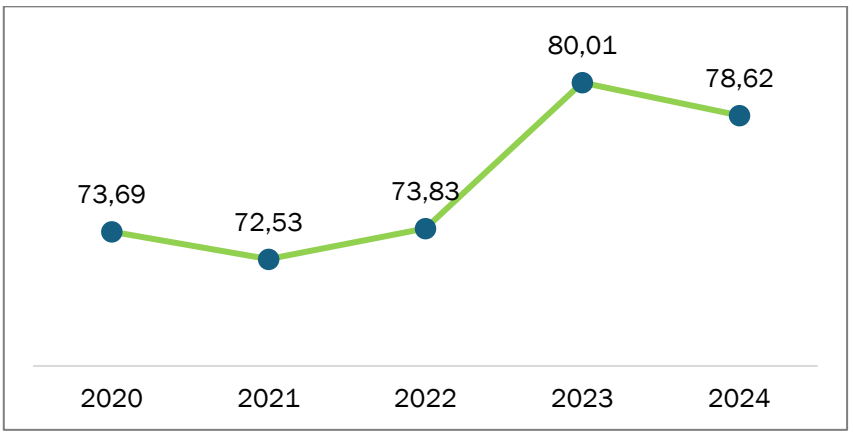
Strategi yang dapat ditempuh mencakup peningkatan area lahan pertanian, optimalisasi produktivitas melalui penerapan teknologi modern, dan diversifikasi sumber pangan. Perencanaan yang matang dan integrasi antara pasokan lokal dengan impor dari daerah lain menjadi kunci untuk menjaga ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Probolinggo di masa mendatang. Selanjutnya, diperlukan perhitungan rasio kemampuan daya dukung *(carrying capacity ratio)*. *Carrying Capacity Ratio* (CCR) merupakan sebagai kapasitas atau kemampuan lahan yang berupa lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

2.1.2.3 BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN

A. INDEKS KETAHANAN PANGAN

Indeks ketahanan pangan merupakan alat penting yang dapat digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan pada daerah tertentu guna mendukung kesejahteraan dan pembangunan daerah. Selain itu indeks ketahanan pangan

berfungsi sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah mencakup ketersediaan, aksesbilitas, kualitas dan pemanfaatan pangan. Berikut ini merupakan nilai indeks ketahanan pangan Kota Probolinggo selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024):



Gambar II-13 Indeks Ketahanan Pangan Kota Probolinggo
Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

Indeks ketahanan pangan Kota Probolinggo pada 5 tahun terakhir (2020 – 2024) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Capaian tertinggi tercatat terjadi pada tahun 2023 dengan angka sebesar 80,01 yang kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 78,62. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor seperti adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, yang mengurangi luas area produksi pangan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Probolinggo perlu memperhatikan penurunan pada indeks ketahanan pangan ini sehingga dapat meningkat kembali pada tahun berikutnya. Penurunan Indeks Ketahanan Pangan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya penurunan produksi pangan, tingginya angka stunting, terbatasnya akses air bersih, dan belum meratanya distribusi tenaga kesehatan. Selain itu, faktor-faktor lain seperti keterbatasan lahan pertanian, kualitas infrastruktur distribusi yang buruk, tingkat kemiskinan, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan juga turut berkontribusi. Capaian Indeks Ketahanan Pangan di Kota Probolinggo tidak berbanding lurus dengan capaian pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan kontribusi sektor Pertanian dan Perikanan hanya berkontribusi sekitar 7% dari Nilai PDRB, namun demikian tidak dapat dipungkiri penurunan sektor Pertanian dan perikanan pada tahun 2024 yang cukup signifikan terhadap PDRB yaitu sebesar -3,64% turut

berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi dimana laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 mengalami perlambatan sebesar 5,15%.

Disamping itu terjadinya gagal Panen pada tahun 2024 untuk Komoditas bawang Merah seluas 1.8 Ha yang terjadi di Kecamatan Wonoasih (Kelurahan Kedungasem, Kelurahan Kedunggaleng, Kelurahan Pakistaji dan Kelurahan Sumbertaman) Kecamatan Kedopok(Kelurahan Kareng Lor dan Kelurahan Sumber Wetan) dan Kecamatan Kanigaran (Kelurahan Kebonsari Kulon dan Sukoharjo) pada sekitar bulan Juli 2024 sampai dengan September 2024, gagal panen ini disebabkan oleh massivnya serangan Hama Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada bawang merah turut mempengaruhi penurunan ketahanan pangan daerah. Melonjaknya serangan OPT disebabkan oleh adanya perubahan iklim. Berdasarkan Data Statistik Sektoral Tahun 2024, Curah Hujan terendah terjadi pada medio bulan Mei s/d Oktober 2024.

Selain itu, terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk modal manusia, modal fisik, teknologi dan inovasi, institusi dan kebijakan pemerintah, serta sumber daya alam. Setiap negara memiliki kombinasi unik dari faktor-faktor ini, yang memungkinkan mereka mencapai pertumbuhan ekonomi dengan cara yang berbeda. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita bisa membuat strategi yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional ataupun internasional. Poin Sumber Daya Alam sebagai salah satu penentu dalam Pertumbuhan ekonomi, juga merupakan faktor penyusun utama dalam Ketahanan Pangan. Ketahanan Pangan suatu daerah ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya persentase produksi pertanian, rata-rata pengeluaran perkapita, indeks daya beli, persentase luas panen, dan kepadatan penduduk.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) memiliki kaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. IKP yang tinggi menunjukkan ketersediaan pangan yang baik, yang pada gilirannya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan yang baik, yang tercermin dalam IKP yang tinggi, memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi. Hal ini berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia, seperti peningkatan harapan hidup, kesehatan, dan produktivitas kerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan yang kuat juga

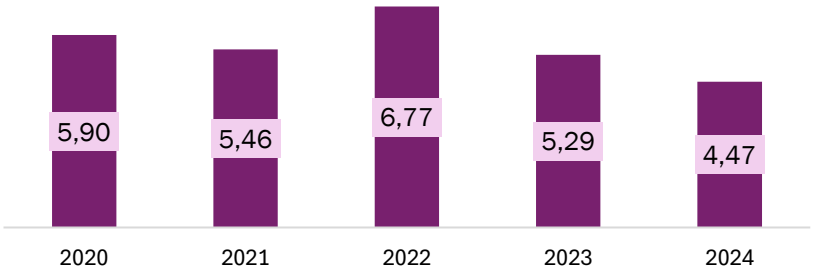
menciptakan stabilitas sosial. Jika masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, maka potensi konflik sosial akibat kelangkaan pangan akan berkurang. Stabilitas sosial ini penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan yang baik juga menarik investasi di sektor pertanian dan infrastruktur pendukungnya. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, efisiensi rantai pasok, dan akses pasar, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan yang baik juga dapat membantu mengurangi kemiskinan. Jika masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan terjangkau, maka beban pengeluaran untuk makanan akan berkurang, sehingga meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi kemiskinan. Hal ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena peningkatan pendapatan rumah tangga akan meningkatkan konsumsi dan investasi. IKP yang tinggi juga dapat meningkatkan berbagai indikator ekonomi, seperti PDRB perkapita, tingkat lapangan kerja, dan pertumbuhan ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya merupakan isu sosial, tetapi juga merupakan pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi pada sektor pangan dan pembangunan ketahanan pangan merupakan langkah strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

B. PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN

Prevalensi ketidakcukupan pangan merupakan estimasi proporsi konsumsi energi seseorang pada kehidupan sehari-hari dari makanan yang tidak cukup untuk memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Semakin tinggi prevalensi ketidakcukupan pangan, maka semakin tinggi pula persentase penduduk yang mengonsumsi makanan, namun kurang dari kebutuhan energinya. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga dalam mengakses di tingkat sosial ekonomi yang berbeda. Indikator ini dapat mengestimasi kondisi kekurangan pangan yang parah dalam jumlah populasi besar, sehingga PoU digunakan untuk mengukur target menghilangkan kelaparan secara menyeluruh.

Berikut ini merupakan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir:



Gambar II-14 Prevalensi Ketidakcukupan Konsusmsi Pangan Kota Probolinggo (%)
Sumber: Buku Saku PoU Badan Pangan Nasional

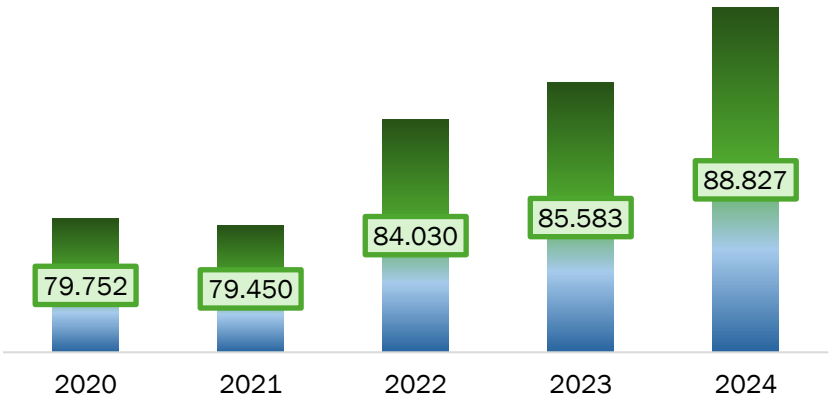
Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Probolinggo dalam waktu 5 tahun terakhir (2020 – 2024) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 atau sebesar 6,77% kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 5,29% dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2024 menjadi 4,47%. Menurunnya angka ini menunjukkan adanya perbaikan dalam ketahanan pangan di Kota Probolinggo. Hal ini sebagai tanda bahwa masyarakat Kota Probolinggo telah memiliki kondisi yang lebih sehat dan sejahtera serta dapat mengakses makanan yang cukup dan bergizi sehingga kebutuhan pangan mereka dapat terpenuhi dengan baik.

Kriteria minimum yang diterapkan dalam menghitung prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan disesuaikan dengan kebutuhan kalori suatu individu berdasarkan jenis kelamin, usia, tinggi dan berat badan, serta tingkat aktivitas tertentu. Dilihat dari persentasenya terdapat lima kategori PoU, jika dibawah 2,5 persen maka dikategorikan sangat rendah, 2,5 sampai 4 persen dikategorikan rendah, 5 sampai 19 persen dikategorikan sedang, 20 sampai 34 persen dikategorikan tinggi, dan jika diatas 35 persen maka dikategorikan sangat tinggi. Semakin tinggi PoU maka akan semakin banyak individu atau masyarakat yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kota Probolinggo pada tahun 2024 sebesar 4,47% dan termasuk dalam kategori rendah.

C. JUMLAH PELANGGAN LISTRIK

Akses listrik merupakan hal penting bagi masyarakat karena dapat mendukung berbagai aspek kehidupan baik dari segi sosial, ekonomi maupun

lingkungan. Dengan adanya listrik maka kualitas hidup dapat meningkat melalui kemudahan dalam menggunakan berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kenyamanan ini dapat mendukung perkembangan ekonomi, sosial, kemajuan teknologi serta mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang lebih mahal dan berpotensi untuk merusak lingkungan. Berikut ini merupakan jumlah pengguna listrik di Kota Probolinggo pada 5 tahun terakhir (2020 – 2024):



Gambar II-15 Jumlah Pelanggan Listrik Kota Probolinggo
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2025

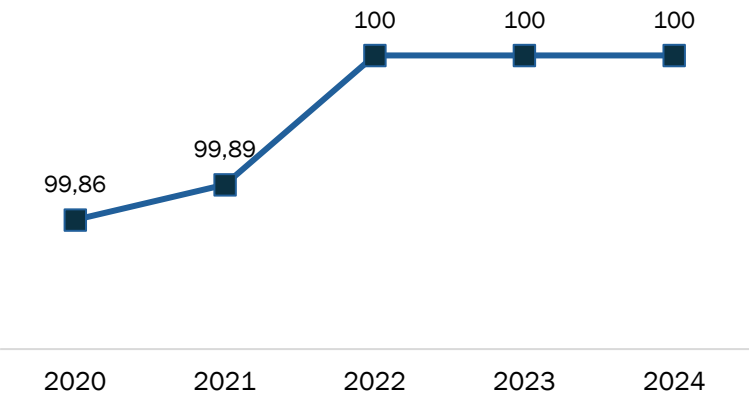
Jumlah pelanggan listrik Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir (2020 – 2024) menunjukkan perkembangan dengan tren yang semakin meningkat. Pada tahun 2020 tercatat jumlah pelanggan listrik Kota Probolinggo sebanyak 79.752 dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2024 yaitu menjadi 88.827. Peningkatan ini dikarenakan semakin banyaknya perkembangan jumlah penduduk dan semakin banyaknya masyarakat yang mengakses listrik di Kota Probolinggo.

D. AKSES RUMAH TANGGA TERHADAP KONSUMSI AIR MINUM

Air bersih yang layak sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat karena memberikan pengaruh secara langsung terhadap kesehatan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Akses air bersih yang layak dapat mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh air tercemar. Secara keseluruhan, memastikan rumah tangga memiliki akses air bersih yang aman berkontribusi pada kesehatan masyarakat dan mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Persentase rumah tangga yang memilliki akses terhadap air minum layak adalah jumlah rumah tangga adalah rumah

tangga yang memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari dari sumber air minum yang memenuhi standar kelayakan (perpipaan dan non perpipaan) dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga.

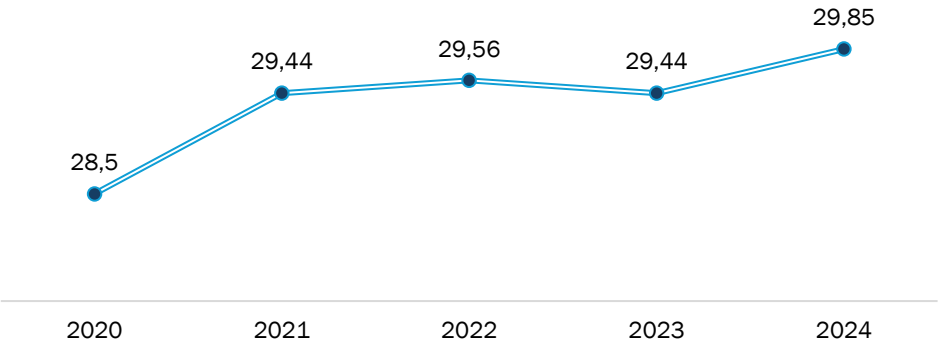
Berikut ini merupakan cakupan rumah tangga dengan akses air bersih yang layak di Kota Probolinggo:



Gambar II-16 Cakupan Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak (%) di Kota Probolinggo

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Berdasarkan grafik di atas serta hasil perhitungan sesuai definisi operasional, cakupan rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak di Kota Probolinggo menunjukkan tren peningkatan yang sangat baik dalam lima tahun terakhir (2020–2024). Pada tahun 2020, cakupan tercatat sebesar 99,86%, kemudian meningkat menjadi 99,89% pada tahun 2021. Capaian ini terus mengalami perbaikan hingga mencapai angka maksimal 100% pada tahun 2022, dan berhasil dipertahankan secara konsisten hingga tahun 2024. Capaian 100% ini menunjukkan bahwa seluruh rumah tangga di Kota Probolinggo telah memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak, namun tantangan ke depan bukan hanya memastikan akses terhadap air minum layak, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas layanan air minum aman melalui pengembangan jaringan perpipaan



Gambar II-17 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kota Probolinggo Tahun 2025-2029

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Definisi Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan PDAM. Adapun rumusan perhitungan atas indikator dimaksud yaitu :

$$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \; x \; 100\%$$

Keterangan :

PASMPP : Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan.

JRTASMPP : Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan.

JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya

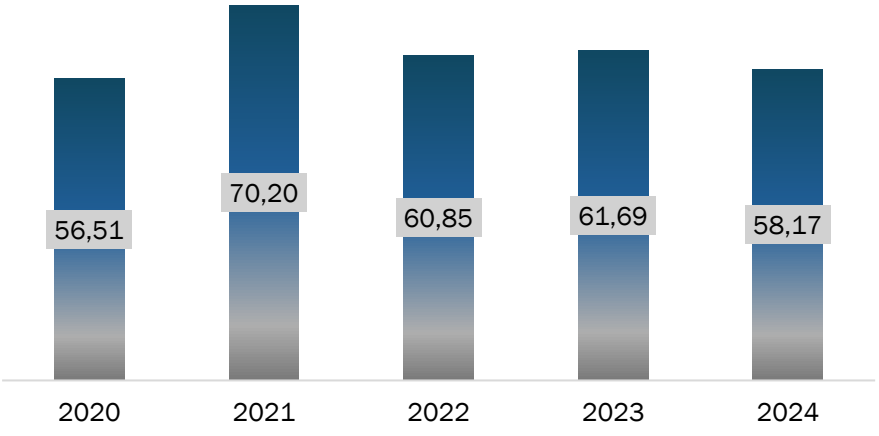
Meskipun cakupan akses air minum layak di Kota Probolinggo telah mencapai 100% sejak tahun 2022, tantangan berikutnya terletak pada peningkatan kualitas layanan air minum, khususnya dalam menyediakan air siap minum melalui jaringan perpipaan di wilayah perkotaan. Data capaian selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum dari sistem perpipaan masih relatif stagnan dan belum mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, cakupan tercatat sebesar 28,50%, kemudian meningkat sedikit menjadi 29,44% pada tahun 2021. Tahun 2022 mencatat angka 29,56%, sebagai capaian

tertinggi dalam lima tahun terakhir, namun kembali menurun tipis menjadi 29,44% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, cakupan naik kembali menjadi 29,85%. Pergerakan angka tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024, cakupan air siap minum perpipaan di wilayah perkotaan hanya mengalami peningkatan sekitar 1,35 persen. Rendahnya cakupan ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain keterbatasan jangkauan jaringan perpipaan, kapasitas produksi air siap minum yang belum mencukupi, tantangan dalam pemeliharaan kualitas air di tingkat distribusi, serta preferensi masyarakat terhadap sumber air alternatif. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi peningkatan layanan air siap minum berbasis perpipaan secara lebih terintegrasi, yang mencakup perluasan jaringan, peningkatan kapasitas produksi, penguatan pengawasan mutu air, serta kampanye perubahan perilaku masyarakat.

2.1.2.4 LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

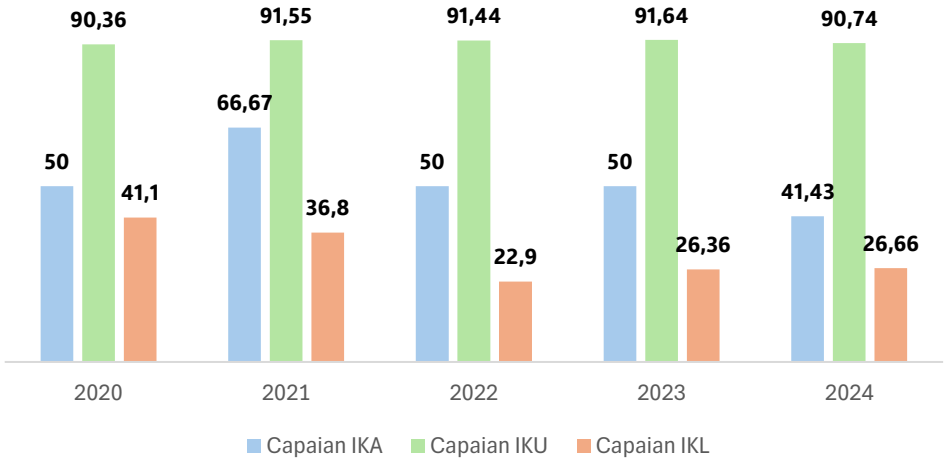
A. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks kualitas lingkungan hidup adalah nilai yang menggambarkan lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKLH berfungsi sebagai salah satu instrumen bagi pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan di bidang lingkungan hidup. Perhitungan IKLH mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berikut ini merupakan nilai IKLH Kota Probolinggo:



Gambar II-18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Angka tertinggi pada IKLH Kota Probolinggo terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 70,20 kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 60,85 dan kembali meningkat menjadi 61,69 pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 58,17. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan pada pada komponen penilaian IKLH seperti Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan sehingga hal ini berpengaruh pada angka IKLH secara keseluruhan.



Gambar II-19 Capaian IKA, IKU, dan IKL Kota Probolinggo
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, 2025

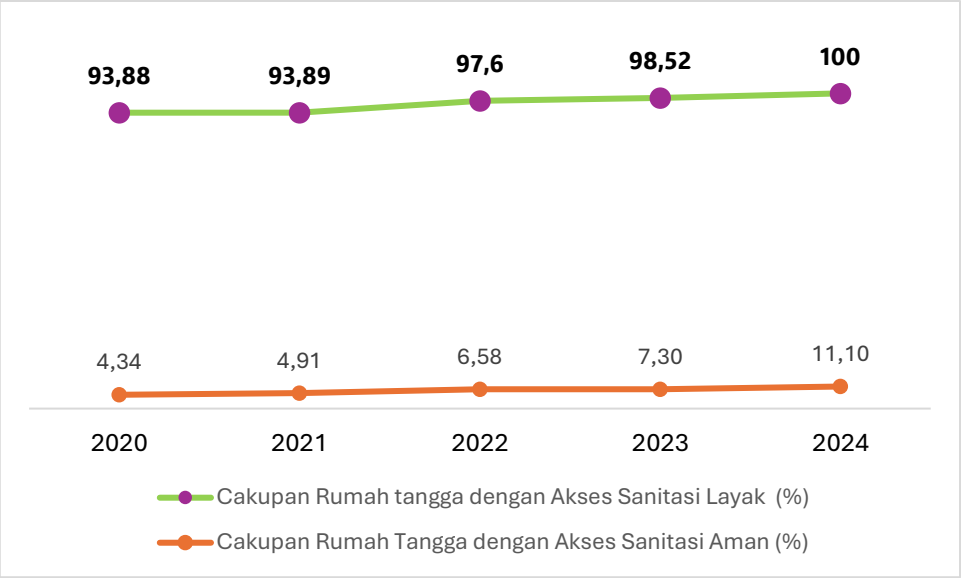
Realisasi capaian IKLH untuk tahun 2024 sebesar 58.17 dari target sebesar 65,19 atau tercapai sebesar 89.23%, dengan kriteria kualitas "Sedang". Perhitungan IKLH tahun 2024 dilakukan oleh sistem aplikasi dari IKLH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Capaian IKLH Tahun 2024 mengalami penurunan dari capaian tahun 2023 yaitu sebesar 61.69. Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak dapat mencapai target dikarenakan untuk Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan indeks Kualitas Lahan (IKL) tidak dapat mencapai target. Berdasar dari hasil perhitungan, Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Probolinggo tahun 2024 memiliki nilai sebesar 41,43 yang berada pada kategori dengan entitas “tercemar sedang”, dimana untuk kategori kurang ini skornya adalah antara 25 ≤ x ≤50. Pengujian Kualitas Air dilakukan sebanyak 14 (empat belas) data hasil uji diperoleh data rata-rata air sungai tercemar sedang oleh nitrat dan Fecal Coli. Adapun IKL Kota Probolinggo tahun 2024 tidak dapat mencapai target dikarenakan sebagian RTH yang ada tidak

didominasi tutupan vegetasi pepohonan dengan tinggi minimal 2 meter, serta memiiki kerapatan yang kurang sehingga pada saat dilaksanakan verifikasi dengan menggunakan system *Geograpic Information System* (GIS) tutupan lahan tidak dapat terdeteksi sehigga usulan tutupan lahan tidak terverifikasi. Dalam pelasanaanya terdapat beberapa kendala diantaranya adalah:

1. Upaya pemulihan harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan yang memerlukan waktu lama ;
2. Keterbatasan tenaga ahli dan sarana/fasilitas pendukung untuk mengoptimalkan upaya pemulihan ;
3. Sebagian kegiatan usaha belum optimal dalam melaksanakan pengelolaan air limbah yang dihasilkan.

B. RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI LAYAK DAN AMAN

Sistem sanitasi yang memadai seperti akses terhadap air bersih dan pembuangan limbah yang tepat dapat mencegah penyebaran penyakit yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Selain itu, sanitasi yang baik tidak hanya mencegah kontaminasi makanan dan air, namun juga dapat berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Berikut ini merupakan rumah tangga bersanitasi di Kota Probolinggo selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024):



Gambar II-20 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Layak di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas PUPR PKP Kota Probolinggo, 2025

Rumah Tangga Bersanitasi rumah tangga bersanitasi / rumah tangga bersanitasi layak adalah rumah tangga yang sekurang-kurangnya memiliki akses untuk memperoleh layanan sanitasi dasar. Sanitasi dasar yang dimaksud berupa sarana air bersih, jamban keluarga, serta sarana pembuangan air limbah. Metode perhitungannya adalah :

RTB = (JRTB / JRT) x 100%

Keterangan :
RTB = Rumah Tangga Bersanitasi
JRTB = Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi
JRT = Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya

Rumah tangga bersanitasi layak di Kota Probolinggo pada 5 tahun terakhir (2020 – 2024) menunjukkan tren yang semakin meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 93,88% rumah tangga telah bersanitasi layak dan terus meningkat pada setiap tahunnya hingga pada tahun 2024 telah 100% masyarakat di Kota Probolinggo telah memiliki akses sanitasi. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saat ini seluruh rumah tangga di Kota Probolinggo telah bersanitasi layak. Peningkatan yang terjadi untuk akses sanitasi layak hingga pada tahun 2024 mencapai angka 100% ini dikarenakan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo diantaranya adalah:

1. Pembangunan IPAL Komunal
2. Pembangunan Tangki Septik Individu
3. Pemeliharaan MCK Umum
4. Sosialisasi Jamban Sehat kepada Masyarakat
5. Sosialisasi Program Si Inol (Inovasi Layanan Arisan Jamban) dan Tabung Beras (Tabungan Bersama Rumah Sehat) kepada masyarakat
6. Pembangunan SPALDS dengan menggandeng CSR dan BAZNAS

Sedangkan akses sanitasi aman masyarakat belum mencapai 100% (masih rendah) karena belum terpenuhinya standar septictank rumah tangga yang kedap dan disedot secara berkala. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa dengan:

- Bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau
- Tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Adapun rumusan perhitungan indikator dimaksud yaitu :

$$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} x100\%$$

Keterangan :

PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman

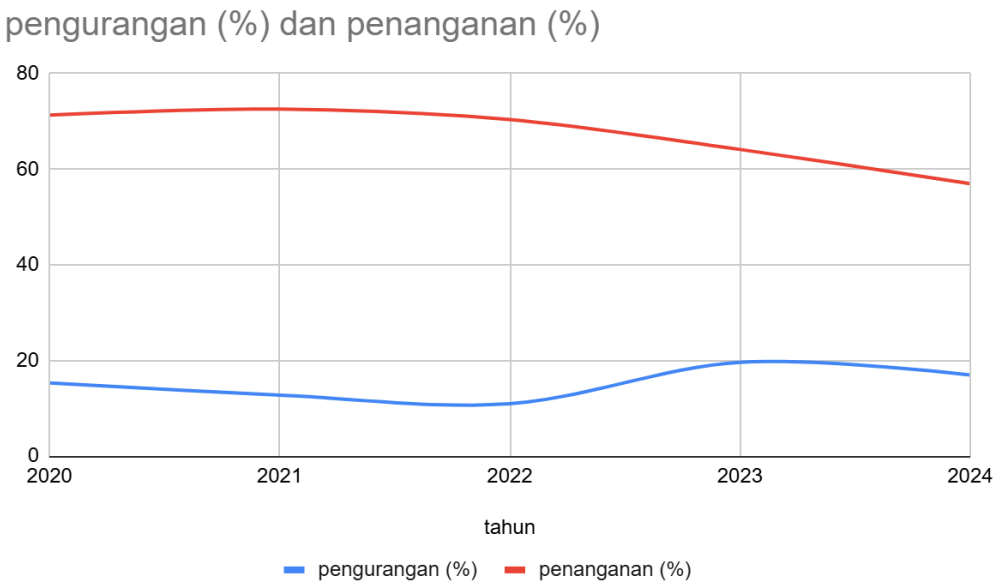
JRTST = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T

JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)

JRTS = jumlah rumah tangga seluruhnya

C. KETERSEDIAAN FASILITAS PENGURANGAN SAMPAH

Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dengan adanya fasilitas pengurangan sampah yang memadai seperti adanya tempat sampah terpisah untuk organik dan anorganik serta fasilitas daur ulang ini dapat mengurangi sampah yang masuk dalam tempat pembuangan akhir (TPA). Sehingga, ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi kebersihan dan kesehatan lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Berikut ini merupakan ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan di Kota Probolinggo selama 5 tahun terakhir:



Gambar II-21 Ketersediaan Fasilitas Pengurangan dan Penanganan Sampah di Kota Probolinggo
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, 2025

Tabel II.11 Capaian Pengelolaan Sampah sesuai SIPSN Kota Probolinggo

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
pengurangan (%)	15,33	12,77	10,98	19,63	16,96
pengurangan (ton/thn)	5357,33	4502,34	3893,66	7008,27	7543,16
penanganan (%)	71,33	72,57	70,37	64,13	57
penanganan (ton/thn)	24931,1	25578,83	24957,57	22899,64	25354,22
sampah terkelola (%)	86,66	85,34	81,35	83,76	73,96
sampah terkelola (ton/thn)	30288,43	30081,17	28851,23	29907,91	32897,38

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, 2025

Pengelolaan sampah di Kota Probolinggo dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2020, persentase sampah yang terkelola mencapai 86,66%, namun menurun menjadi 85,34% pada tahun 2021 dan terus turun menjadi 81,35% di tahun 2022. Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2023 menjadi 83,76%, angka tersebut kembali menurun signifikan pada tahun 2024 menjadi hanya 73,96%. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh menurunnya ketersediaan dan efektivitas fasilitas pengurangan sampah, khususnya bank sampah. Dari 122 bank sampah yang tercatat di tahun 2024, hanya 41 yang masih aktif, atau sekitar 36%.

Tabel II.12 Perhitungan Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) dan Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Persampahan (% RT)

TIMBULAN SAMPAH (ton/tahun)	TIMBULAN SAMPAH PER RT (ton/tahun)	SAMPAH TEROLAH TPS3R (ton/hari)	SAMPAH MASUK TPS3R (ton/thn)	SAMPAH MASUK TPA (ton/thn)	RT TERLAYANI TPS3R & TPA		Sampah Masuk Fasilitas Pengelolaan Sampah (ton/tahun)		Sumber Data (SIPSN)
44.483,65	0,71	1,70	620,50	24.945,42	35,854	57,47%	7,373.29	16.58%	P2 2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, 2025

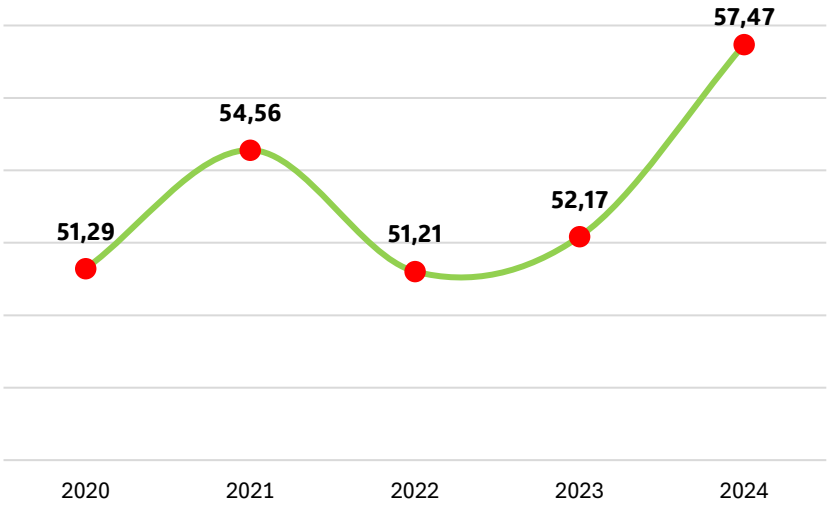
Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari *waste recovery* sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (*recovery*) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memilikifungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan daur ulang adalah pengolahan sampah anorganik high value untuk dikembalikan ke siklus manufaktur, pengemasan, dan/atau distribusi produk. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Material dan energy recovery adalah pengolahan sampah organik, anorganik lowvalue, dan residu menjadi; (1) produk seperti; kompos, pakan, perkakas rumah, material konstruksi, dsb. dan (2) energi dan/atau bahan bakar lainnya seperti; PLTSa, pirolisis, insinerasi, gasifikasi, Refuse Derived Fuel (RDF), dll. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung difasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), PLTSa, RDF Plant atau fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah, swasta dan/atau lembaga non pemerintah berbadan hukum (koperasi, KSM, dan lainnya).

Sedangkan Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah didefinisikan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu) dan dikumpulkan dalam 3 (tiga) atau lebih jenis yang terpisah (contoh: basah (organik), daur ulang, dan residu) dengan syarat: (1) dari pintu ke pintu; atau (2) memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m tanpa membuang sampah sembarangan. Namun, untuk menuju tingkat layanan penuh pada tahun 2045 diperlukan pentahapan sehingga untuk RPJMN periode awal terdapat penyesuaian menjadi indikator menjadi rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah (dalam hal ini tingkat layanan dasar), dan dapat didefinisikan: Rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu) baik dengan metode pengumpulan tercampur maupun terpilah sesuai jenis sampah, dengan syarat: dari pintu ke pintu (*door to door*); atau memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m tanpa membuang sampah sembarangan

Fasilitas pengelolaan sampah di kota ini mencakup dua jenis, yaitu fasilitas pengurangan sampah seperti bank sampah dan sektor informal, serta fasilitas penanganan sampah seperti Pusat Daur Ulang (PDU), Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R), UPTD Pengelolaan Sampah, dan Rumah Kompos. Penurunan jumlah bank sampah aktif secara langsung berdampak pada berkurangnya volume sampah yang bisa didaur ulang atau dikelola dari sumbernya.

Meskipun menghadapi tantangan, Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah, di antaranya menyediakan 106 unit gerobak sampah dorong, membangun 2 unit TPS permanen, menyediakan 7 unit TPS kontainer, 6 unit armada pengangkut sampah, pembangunan RDF (*Refuse Derived Fuel*) serta melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam pembentukan serta penguatan kegiatan bank sampah. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan sampah secara keseluruhan.



Gambar II-22 Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah di Kota Probolinggo

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, 2025

Proporsi rumah tangga (RT) di Kota Probolinggo yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, sebanyak 51,29% rumah tangga telah terlayani, kemudian meningkat menjadi 54,46% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, angka ini kembali menurun menjadi 51,21%, disusul peningkatan tipis di tahun 2023 menjadi 52,17%. Pada tahun 2024 capaian mengalami peningkatan menjadi 57,47%. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan armada dan sumber daya pengangkut sampah, pertambahan jumlah rumah tangga yang belum diimbangi dengan perluasan cakupan layanan, serta belum optimalnya integrasi antara sistem pengelolaan sampah formal dan informal. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan resmi juga menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan cakupan layanan pengumpulan sampah.

2.1.2.5 RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

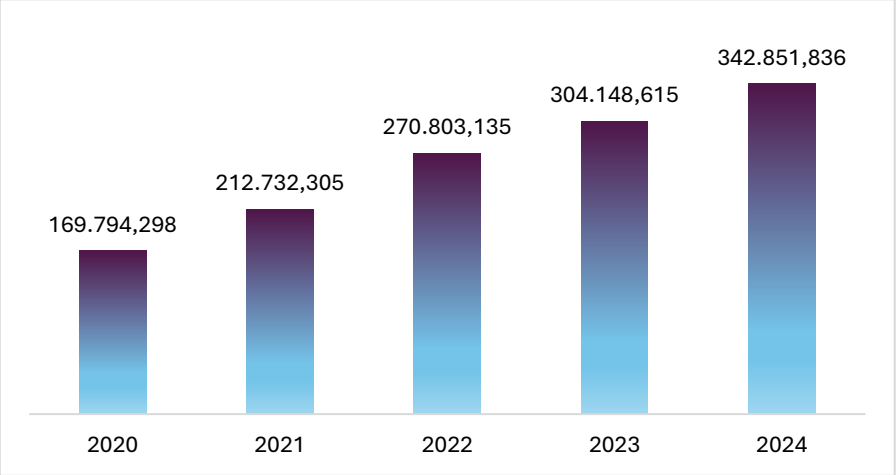
A. PENURUNAN EMISI GRK

Dalam rangka mendukung upaya nasional dalam pengendalian perubahan iklim dan memenuhi komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana tertuang dalam dokumen *Nationally Determined Contribution (*NDC) Indonesia, Pemerintah Kota Probolinggo menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Oleh karena

itu, beberapa langkah strategis dirancang untuk menurunkan emisi GRK dari berbagai sektor, antara lain:

1. Sektor Energi
   - Peningkatan efisiensi energi pada gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas publik melalui retrofit peralatan listrik, penerapan lampu hemat energi, dan pengembangan program energi terbarukan berbasis tenaga surya
   - Sosialisasi penggunaan energi bersih untuk sektor rumah tangga dan usaha kecil menengah
2. Sektor Transportasi
   - Pengembangan sistem transportasi ramah lingkungan dan perluasan jalur sepeda di dalam kota
   - Kampanye pengurangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan peningkatan layanan angkutan umum
3. Sektor Limbah
   - Optimalisasi pengelolaan sampah melalui program pemilahan sampah dari sumber, peningkatan kapasitas bank sampah, dan pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R)
   - Implementasi pengelolaan limbah organik menjadi kompos atau energi alternatif
4. Sektor Pertanian dan Kehutanan
   - Pengembangan urban farming dan pertanian ramah lingkungan yang rendah emisi.
   - Penanaman pohon secara massal di kawasan perkotaan dan pesisir untuk meningkatkan serapan karbon, serta pelestarian ruang terbuka hijau (RTH)
5. Adaptasi dan peningkatan kapasitas
   - Penguatan sistem pemantauan dan pelaporan emisi berbasis data
   - Pelatihan dan peningkatan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha terhadap pentingnya mitigasi perubahan iklim
6. Sektor IPPU
   - Penguatan Compliance/ kepatuhan untuk proses/ bahan baku yang menimbulkan emisi GRK untuk jenis industri kayu, kimia, konveksi dan keramik dan indsutri lainnya;

- Sosialisasi terkait optimalisasi pengelolaan limbah, proses bahan baku dan gas buang yang menghasilkan emisi GRK; Pembinaan dan Pengawasan industri yang menjadi sumber emisi GRK secara berkala;
- Subsitusi Penggunaan Produk yang menggunakan zat yang menipiskan lapisan ozon



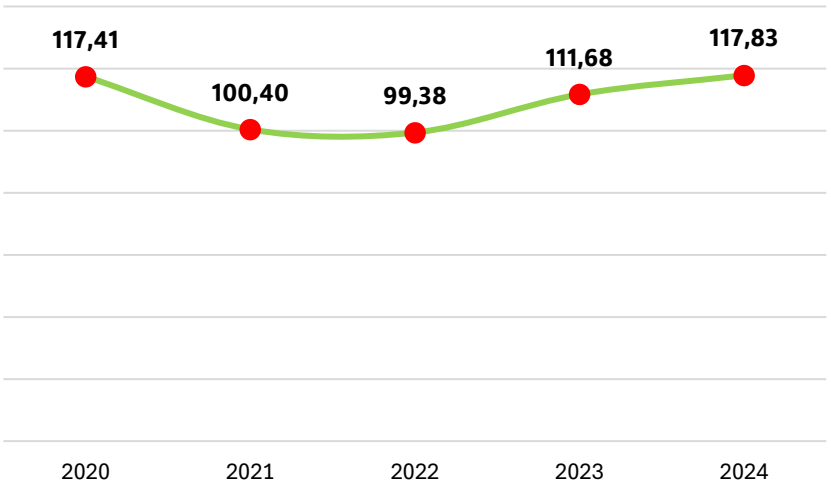
Gambar II-23 Penurunan Emisi GRK Kumulatif Kota Probolinggo
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, 2025

Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif di Kota Probolinggo menunjukkan tren yang positif dalam lima tahun terakhir. Perhitungan penurunan emisi GRK Kota Probolinggo merupakan perhitungan emisi GRK kumulatif dalam satuan Ton CO2 Eq yang bersumber dari AKSARA. Pada tahun 2020, total penurunan kumulatif emisi tercatat sebesar 169.794,298 ton CO_2 eq, dan terus meningkat setiap tahun. Tahun 2021 mencapai 212.732,298 ton CO_2 eq, kemudian naik menjadi 270.803,135 ton CO_2 eq pada 2022. Pada tahun 2023, capaian penurunan emisi mencapai 304.148,615 ton CO_2 eq, dan meningkat lagi menjadi 342.851,836 ton CO_2 eq pada tahun 2024. Tren peningkatan capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, seperti efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, pengendalian emisi kendaraan, peningkatan ruang terbuka hijau, serta pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Meski capaian penurunan emisi terus tumbuh, tantangan seperti pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, peningkatan konsumsi energi, dan alih fungsi lahan tetap perlu diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan pengurangan emisi di masa mendatang

Sebagai kota pesisir dengan tingkat kerentanan terhadap berbagai jenis bencana seperti banjir, angin kencang, gelombang pasang dan kebakaran, Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB) secara sistematis dan berkelanjutan. Penurunan IRB ini merupakan bagian dari strategi pembangunan yang berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

B. INDEKS RISIKO BENCANA

Indeks risiko bencana menggambarkan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana alam yang memungkinkan perencanaan mitigasi dan pengelolaan terhadap risiko yang lebih baik. Dengan memetakan daerah yang paling rentan terhadap bencana, maka IRB dapat digunakan untuk fokus pada area yang membutuhkan perhatian khusus. Oleh karena itu, IRB sangat berperan untuk mengetahui potensi ancaman bencana dan merencanakan langkah-langkah mitigasi yang efektif sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi dampak bencana. Berikut ini merupakan indeks risiko bencana Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir:



Gambar II-24 Indeks Risiko Bencana Kota Probolinggo
Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), 2025

Indeks risiko bencana Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir (2020 – 2024) menunjukkan tren yang fluktuatif pada setiap tahunnya. Capaian indeks risiko bencana ini mengacu pada H&V tahun 2021 (lampiran 4 Dokumen IRBI). Pada tahun 2020 hingga 2024 rata-rata berada di atas 100 dengan capaian

terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 99,38 dan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 117,83. Meningkatnya indeks risiko bencana di Kota Probolinggo ini menunjukkan bahwa Kota Probolinggo semakin tinggi tingkat kerentanannya terhadap bencana. Sehingga diperlukan upaya untuk optimalisasi pencegahan, mitigasi, dan penanganan bencana yang mungkin terjadi di Kota Probolinggo.

Untuk mencapai penurunan IRB, Pemerintah Kota Probolinggo melaksanakan berbagai upaya strategis yang mencakup:

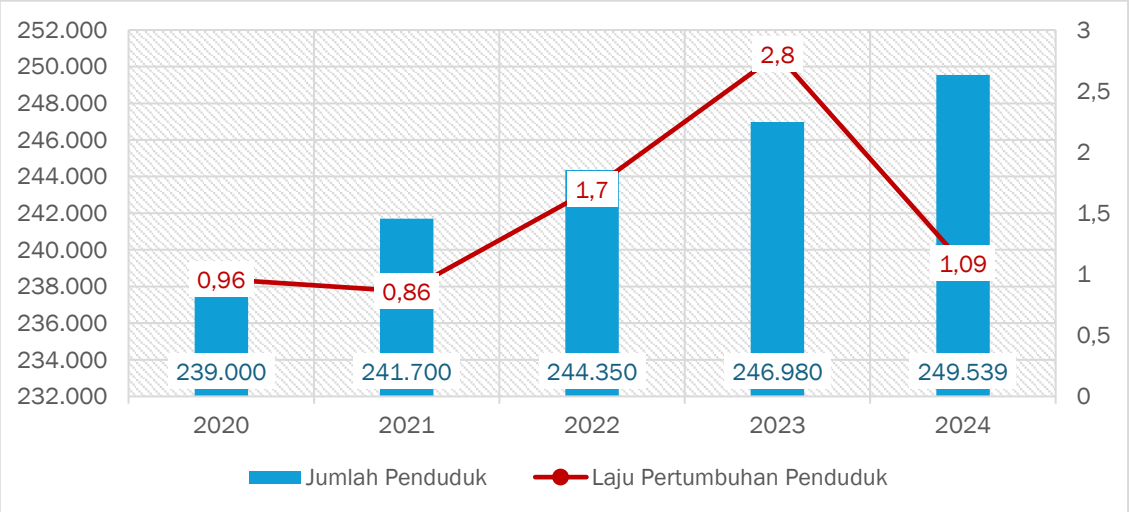
1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat
    - Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai leading sector dalam koordinasi penanggulangan bencana
    - Pelatihan dan simulasi kebencanaan secara berkala kepada masyarakat, sekolah, dunia usaha, serta komunitas lokal untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons tanggap darurat
    - Peningkatan peran Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) sebagai ujung tombak mitigasi di tingkat komunitas
2. Penyusunan Peraturan Wali Kota mengenai Penanggulangan Bencana, penyusunan dokumen kajian kebencanaan yang komprehensif meliputi Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi, Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana (RPKB), Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)
3. Mitigasi struktural dan non-struktural
    - Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir seperti drainase kota
    - Penataan ruang berbasis risiko bencana melalui penerapan prinsip zonasi aman bencana dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW)
    - Penanaman mangrove dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) untuk mengurangi risiko banjir dan abrasi pantai
4. Penguatan sistem peringatan dini
    - Pemasangan dan optimalisasi alat peringatan dini banjir dan cuaca ekstrem khususnya di daerah rawan
    - Penyebarluasan informasi kebencanaan secara cepat dan efektif melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan sirine peringatan
5. Pengelolaan risiko berbasis data

Pemerintah Kota Probolinggo menargetkan penurunan Indeks Risiko Bencana secara bertahap yang didukung dengan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, media massa, serta dunia pendidikan. Sinergi multipihak menjadi kunci dalam mewujudkan Kota Probolinggo yang tangguh bencana, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berkelanjutan.

2.1.2.6 DEMOGRAFI

A. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

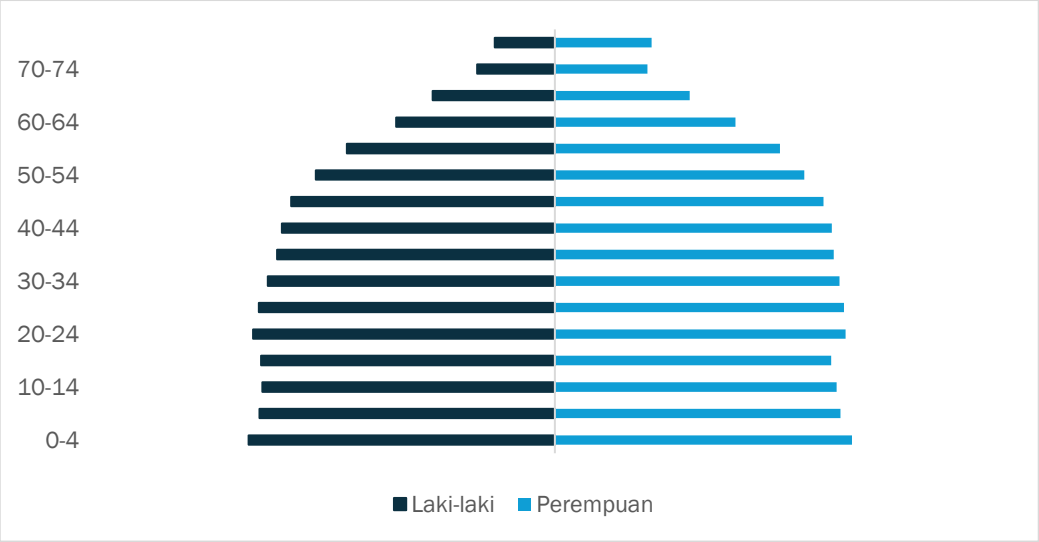
Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Probolinggo cenderung linier dengan angka pertumbuhan di kisaran 0,86% - 2,8% setiap tahunnya. Angka kelahiran dalam lima tahun terakhir berada di kisaran 3.000 kelahiran per tahun dengan angka kematian yang lebih rendah (berada di kisaran 1.000 s/d 2.000 kematian tiap tahunnya). Adapun angka jumlah penduduk yang datang dan pindah relatif sama dan bersifat fluktuatif, secara rinci laju pertumbuhan penduduk Kota Probolinggo tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar II-25 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2025

Sebagai gambaran lebih detail lagi, merujuk terhadap piramida penduduk Kota Probolinggo pada tahun 2024 didominasi dengan jumlah penduduk usia produktif dimana usia 15 – 64 tahun menjadi penggerak pembangunan Kota Probolinggo. Sedangkan angka non produktif yakni usia 65 – 75 tahun keatas lebih rendah bila dibandingkan dengan kelompok usia non produktif lain pada usia 0 – 14 tahun. Jika mempertimbangkan jumlah penduduk dan laju

pertumbuhan penduduk diatas, maka bentuk piramida penduduk Kota Probolinggo tahun 2024 dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar II-26 Piramida Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2025

Piramida penduduk Kota Probolinggo tahun 2024 berbentuk expansive (piramida penduduk muda) dimana jumlah penduduk usia muda lebih besar (tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi). Angka kelahiran yang tinggi dan potensi pertumbuhan penduduk yang signifikan dapat mempengaruhi berbagai aspek pembangunan seperti kebutuhan akan fasilitas pendidikan, lapangan pekerjaan dan layanan kesehatan yang memadai untuk mendukung populasi usia produktif yang besar di masa mendatang.

B. RASIO PENDUDUK

Sex Ratio/ rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan dalam suatu wilayah, biasanya dinyatakan dalam jumlah laki-laki per 100 perempuan. Adapun rasio jenis kelamin Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel II.13 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

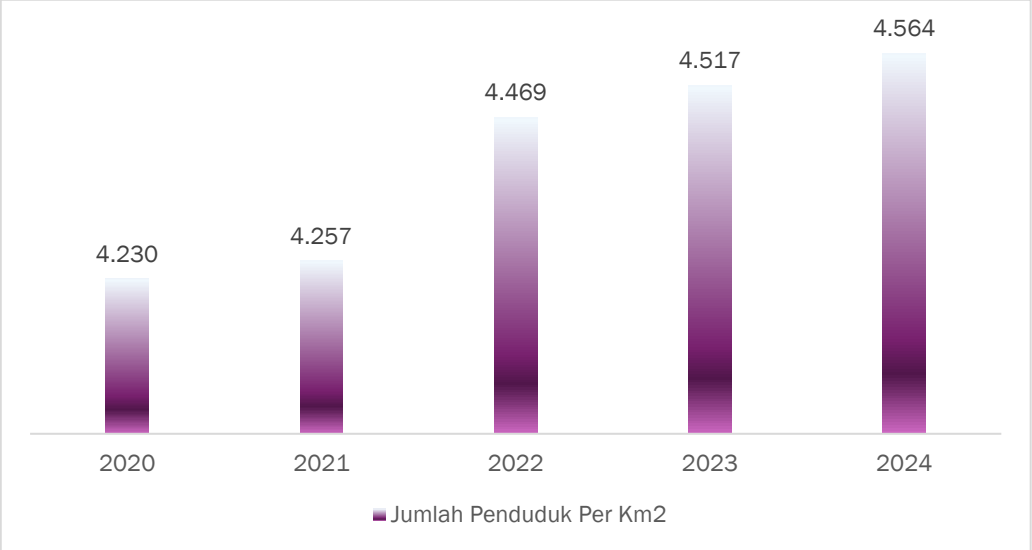
Tahun	Penduduk (Ribu Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
2020	118,51	120,49	239,00	98,36
2021	119,89	121,81	241,70	98,43
2022	121,25	123,11	243,20	98,49
2023	122,57	124,41	246,98	98,53
2024	123,86	125,68	249,54	98,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir berkisar antara 98,36 – 98,55 yang artinya dalam setiap 100 perempuan terdapat sekitar 98 laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

C. KEPADATAN PENDUDUK

Kepadatan penduduk merupakan jumlah penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu per satuan luas (biasanya dihitung dalam kilometer persegi). Menghitung kepadatan penduduk sangat penting dilakukan untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan. Data kepadatan penduduk dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan jalan, sekolah, rumah sakit, serta jaringan listrik di suatu wilayah. Lebih lanjut kepadatan penduduk berguna sebagai dasar dalam merancang tata ruang kota seperti zona permukiman, zona hijau dan zona industri. Adapun kepadatan penduduk di Kota Probolinggo tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar II-27 Kepadatan Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2025

Kota Probolinggo terus mengalami peningkatan jumlah penduduk Kota dalam 5 tahun terakhir yang berpengaruh pada peningkatan angka kepadatan penduduk di Kota Probolinggo. Peningkatan kepadatan penduduk Kota Probolinggo dari 4.230 penduduk per km^2 di tahun 2020 menjadi 4.564 penduduk per km^2 di tahun 2024. Kepadatan penduduk yang semakin padat di suatu wilayah memiliki peluang yang besar untuk pengembangan sektor perdagangan dan jasa. Namun jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang

cukup, dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan masalah sosial. Oleh karena itu kepadatan penduduk di Kota Probolinggo dapat menjadi peluang maupun tantangan, tergantung pada bagaimana pemerintah daerah mengelola pertumbuhan penduduk ini dalam kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

D. PROYEKSI PENDUDUK TAHUN 2025-2029

Proyeksi penduduk adalah perkiraan jumlah penduduk di masa depan berdasarkan data dan tren saat ini. Proyeksi ini menggunakan berbagai metode statistik dan demografis untuk memprediksi perubahan dalam jumlah penduduk, distribusi umur, rasio jenis kelamin, serta pola kelahiran, kematian, dan migrasi. Tujuannya adalah untuk membantu perencanaan dan pengambilan keputusan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Adapun proyeksi penduduk Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel II.14 Proyeksi Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2025-2029

INDIKATOR KEPENDUDUKAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penduduk						
Laki-Laki	125.13	126.37	127.57	128.73	129.86	130.94
Perempuan	126.95	128.2	129.42	130.63	131.81	132.98
Rasio Jenis Kelamin (%)	98.57%	98.57%	98.57%	98.55%	98.52%	98%
Jumlah Penduduk	252.08	254.57	256.99	259.36	261.67	263.92
Laju Pertumbuhan (%)	1.02%	0.99%	0.95%	0.92%	0.89%	0,86%
Kepadatan Penduduk (jiwa / km²)	4610.43	4655.97	4700.23	4743.58	4785.83	4656
Komposisi Penduduk						
0-14 Tahun	23.05%	22.84%	22.62%	22.39%	22.16%	21.96%
15-64 Tahun	68.88%	68.74%	68.60%	68.46%	68.32%	68.13%
65 + Tahun	8.07%	8.42%	8.78%	9.15%	9.52%	9.92%
Angka Ketergantungan (%)	45.18%	45.47%	45.77%	46.06%	46.38%	46.79%

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Proyeksi penduduk Kota Probolinggo tahun 2025-2030 menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dengan peningkatan dari 252.080 jiwa pada tahun 2025 menjadi 263.920 jiwa pada tahun 2030, mencerminkan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 0,93%. Pertumbuhan ini memperlihatkan potensi peningkatan kebutuhan akan berbagai fasilitas publik, perumahan, dan

infrastruktur. Komposisi penduduk berdasarkan usia menunjukkan dominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun), yang menandakan ketersediaan tenaga kerja dan peluang produktivitas ekonomi. Proporsi penduduk usia muda mungkin tetap signifikan, yang menunjukkan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dan layanan anak-anak. Sedangkan pada kelompok usia lanjut, proporsi penduduk cenderung meningkat yang mengindikasikan kebutuhan akan layanan kesehatan, pensiun, dan dukungan sosial. Peningkatan populasi lansia memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan ini membawa tantangan dan peluang bagi pemerintah Kota Probolinggo dalam merencanakan penyediaan infrastruktur, layanan sosial, dan ekonomi yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan yang terintegrasi dan strategis sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini diterjemahkan menjadi manfaat bagi semua lapisan masyarakat.

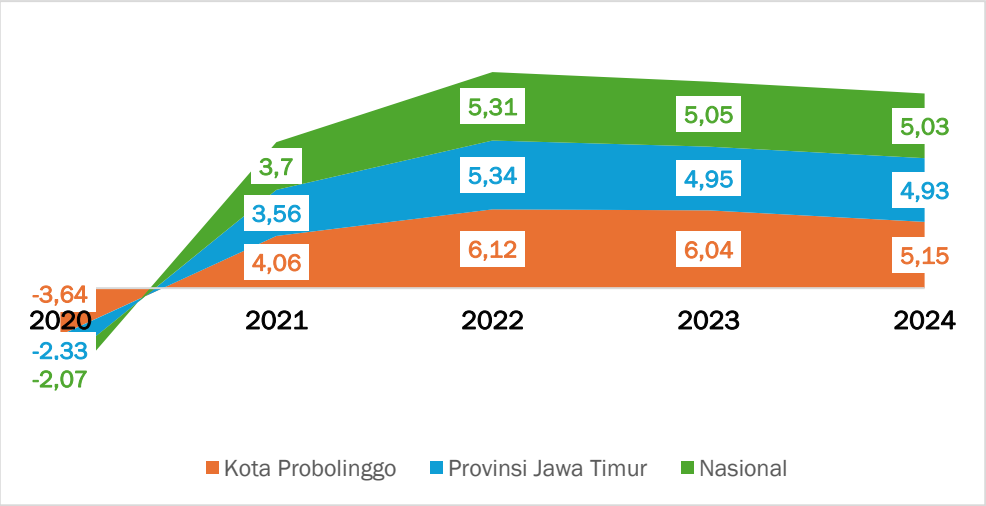
2.1.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.3.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

A. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mengukur perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah tertentu dalam satu tahun. Laju ini dihitung sebagai persentase pertumbuhan dibandingkan dengan periode sebelumnya dan mencerminkan tingkat ekspansi atau kontraksi aktivitas ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan, dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo mencapai -3,64%, sedangkan capaian pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 5,15% Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang minus dikarenakan adanya pandemi Covid-19 telah memporak-porandakan sistem perekonomian di Kota Probolinggo pada khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya. Adanya kebijakan pembatasan social distancing telah mengurangi bahkan menghentikan aktivitas ekonomi dari berbagai sektor, sehingga pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo mengalami penurunan hingga mencapai -3,64%. Terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo pada tahun 2020

dipengaruhi oleh menurunnya nilai tambah (PDRB) dari sebagian besar sektor/ lapangan usaha, dari 17 sektor sebanyak 11 sektor mengalami penurunan dengan nilai penurunan terbesar pada sektor Jasa Lainnya yang mencapai -15,09% dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan PDRB yang mencapai -8,43%. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2021 kembali mengalami pertumbuhan positif yang mencapai 4,06%, dan Kembali mengalami pertumbuhan hingga pada tahun 2024 yang mencapai 5,15%.



Gambar II-28 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2025

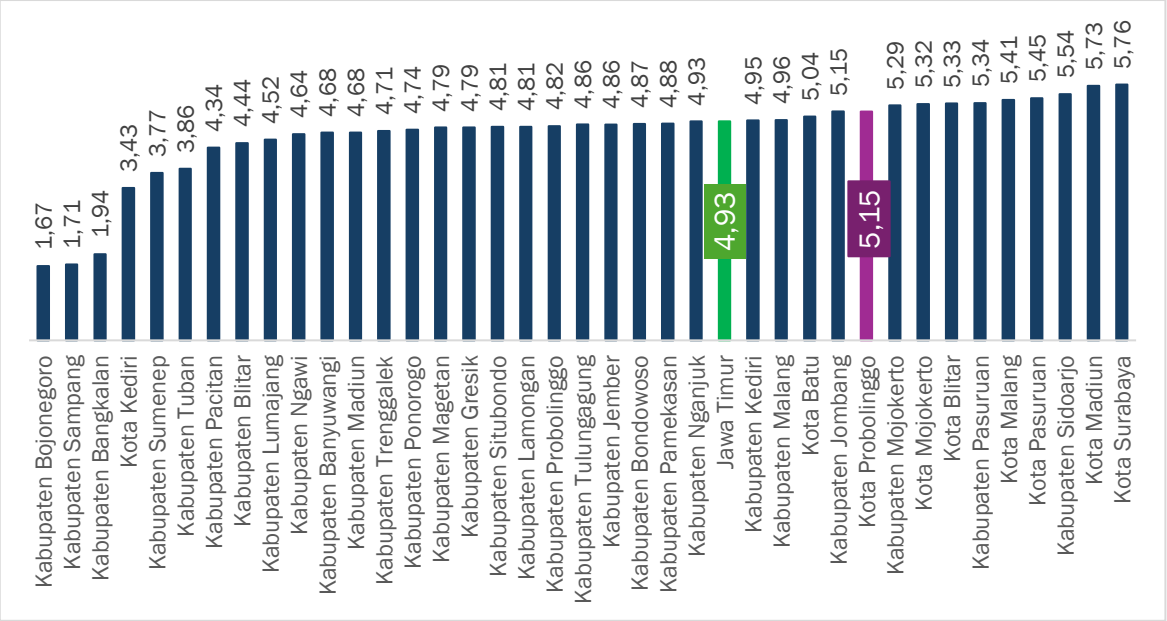
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan yang tertinggi dalam 17 tahun terakhir. Adapun beberapa sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 di Kota Probolinggo diantaranya adalah : Transportasi dan Pergudangan; Jasa lainnya; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; serta Kontruksi. Meskipun tahun 2023 mengalami pelambatan namun hal tersebut masih dapat dicatat sebagai capaian positif dimana masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 6% dalam 2 tahun berturut-turut. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2024 mengalami penurunan capaian jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 5,15 di tahun 2024. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan yang cukup signifikan di beberapa sektor

lapangan usaha antara lain sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Real Estate; Sektor Jasa Perusahaan; serta Sektor Jasa Pendidikan.

Empat sub kategori dalam sektor transportasi dan pergudangan Kota Probolinggo adalah angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut, pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Pasca PPKM, mobilitas masyarakat dan termasuk kunjungan wisata meningkat. Peningkatan mobilitas tersebut salah satunya ditandai dengan peningkatan jumlah penumpang di Terminal Bayuangga dan Stasiun Probolinggo. Dari sisi angkutan laut, keberadaan Pelabuhan DABN yang secara resmi menjadi pusat distribusi pupuk Indonesia Wilayah Jawa Timur mendorong peningkatan layanan angkutan laut. Demikian pula pergudangan serta aktivitas pos dan kurir yang menggelilat seiring dengan semakin meningkatnya transaksi produk dan jasa yang memanfatkan media elektronik (ecommerce) di Kota Probolinggo.

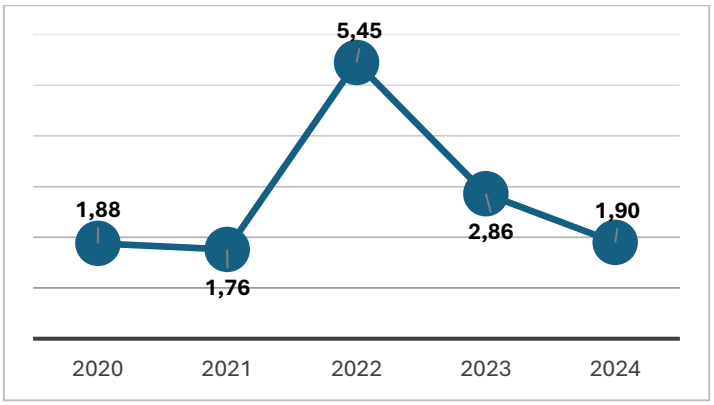
Bila dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Jawa Timur, data terakhir menunjukkan data yang bisa dikomparasi ialah data pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Dimana pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2024 menempati peringkat ke 10 dari 38 Kabupaten/ Kota atau berada pada peringkat ke 7 dari 9 wilayah dengan tipologi Kota di Provinsi Jawa Timur, artinya masih terdapat 2 Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi dibawah Kota Probolinggo. Secara umum Kota Probolinggo mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi, namun nampaknya hal tersebut terjadi juga pada kabupaten / kota lainnya di Jawa Timur. Hal tersebut seperti yang ditunjukkan, bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur juga mengalami pelemahan dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang mencapai 4.93%, maka pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo masih berada diatasnya, artinya posisi pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo masih lebih baik dibandingkan dengan sebagian besar di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo bila dibandingkan dengan wilayah yang berada disekitarnya, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Lumajang maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo masih lebih tinggi dari

ketiga wilayah tersebut, bahkan pertumbuhan ekonomi pada ketiga wilayah tersebut masih berada dibawah Provinsi Jawa Timur.



Gambar II-29 Pertumbuhan Ekonomi Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025

Pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 relatif stabil, sehingga kedepan diperlukan pengembangan sektor-sektor potensial dalam rangka memperkuat struktur dan pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.



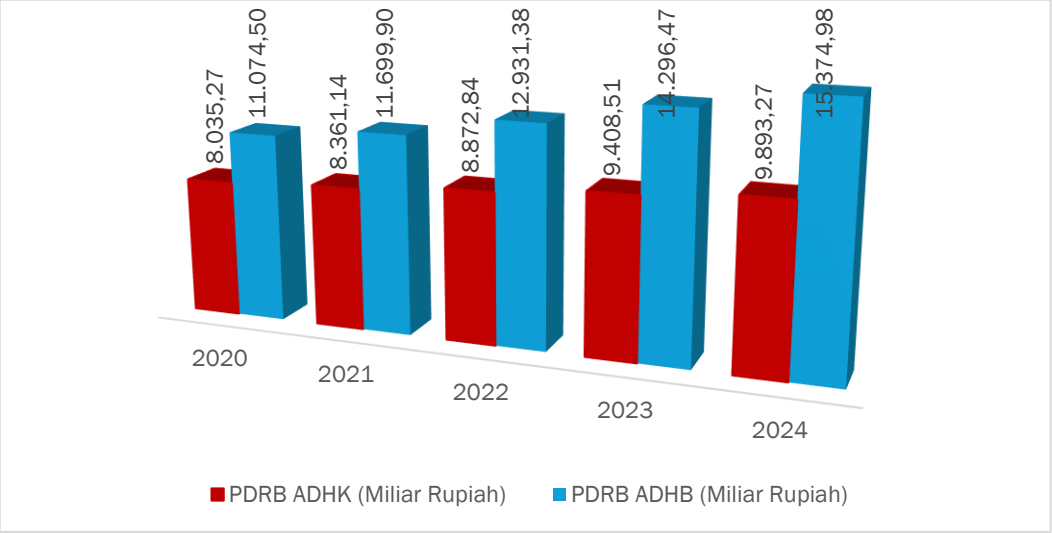
Gambar II-30 Capaian Inflasi Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025

Bahwa salah satu indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Gambar diatas menunjukkan bahwa inflasi Kota Probolinggo mengalami fluktuatif selama 5 tahun. dari Tahun 2020 inflasi Kota Probolinggo sebesar 1,88 yang kemudian sedikit menurun di Tahun

2021 menjadi 1,76. Inflasi Kota Probolinggo mengalami kenaikan yang signifikan pada Tahun 2022 sebesar 5,45 disebabkan oleh kenaikan komoditas telur ayam ras, minyak goreng, emas perhiasan dan cabe rawit. Tahun 2023 inflasi kembali menurun menjadi 2,86 dan di tahun 2024 menjadi 1,90.

B. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi yang menggambarkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan dimana PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencerminkan nilai produksi berdasarkan harga pasar saat ini, mencerminkan nominal ekonomi daerah sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menghilangkan pengaruh inflasi sehingga dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara riil. Adapun capaian PDRB Kota Probolinggo tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar II-31 PDRB ADHK dan PDRB ADHB Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2025

Grafik diatas menunjukkan bahwa PDRB Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif. PDRB ADHK tumbuh sebesar 23,12% dari Rp. 8.035,27 Milyar Rupiah di tahun 2020 menjadi Rp. 9.893,27 Milyar Rupiah di tahun 2024. Kenaikan ini juga selaras dengan tren kenaikan PDRB ADHB yang tumbuh sebesar 38,83% dari Rp. 11.074,50 Milyar Rupiah di tahun 2020 menjadi Rp. 15.374,98 Milyar Rupiah di tahun 2024.

Berdasarkan pada besarnya pertumbuhan dan kontribusi yang dimiliki oleh masing-masing sektor PDRB sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan analisis *Tipology Klassen* yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektor perekonomian. Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung rasio antara laju pertumbuhan masing-masing sektor perekonomian di Kota Probolinggo dengan laju pertumbuhan PDRB total Kota Probolinggo serta menghitung rasio proporsi kontribusi masing-masing sektor di Kota Probolinggo terhadap pembentukan PDRB dengan proporsi kontribusi rata-rata sektor terhadap total PDRB Kota Probolinggo. Dengan menggunakan analisis *Tipology Klassen*, sektor-sektor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu : sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang. Penentuan kategori suatu sektor ke dalam empat kategori di atas didasarkan pada laju pertumbuhan kontribusi sektoral dan rerata besar kontribusi sektoralnya terhadap PDRB, sebagai berikut :

- Kuadran Sektor Prima : Sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Daerah;
- Kuadran Sektor Potensial : Sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi;
- Kuadran Sektor Berkembang : Sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah;
- Kuadran Sektor Terbelakang : Sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah.

Berdasarkan data pertumbuhan dan distribusi/ kontribusi sektor PDRB sebagaimana yang telah disajikan pada pembahasan sebelumnya, maka selanjutnya dapat diperoleh hasil klasifikasi sektor PDRB Kota Probolinggo berdasarkan *Tipology Klassen* secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar dan matriks sebagai berikut.



Gambar II-32 Klasifikasi Sektor PDRB Kota Probolinggo Berdasarkan Tipology Klassen Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kontribusi Sektoral / Laju Pertumbuhan Sektoral	Kontribusi Besar ($Y_{Sektor} \geq Y_{PDRB}$)	Kontribusi Kecil ($Y_{Sektor} < Y_{PDRB}$)
Tumbuh Cepat ($r_{Sektor} \geq r_{PDRB}$)	Sektor Prima (Transportasi dan Pergudangan)	Sektor Berkembang (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Tumbuh Lambat ($r_{Sektor} < r_{PDRB}$)	Sektor Potensial (Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Keuangan dan Asuransi)	Sektor Terbelakang (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Lainnya

Tipology Klassen Sektor PDRB Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Analisis ini mendasarkan pada pengelompokkan suatu sektor dengan melihat pada pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Probolinggo berdasarkan rata-rata dalam

setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan pada gambar dan matriks yang telah disajikan di atas selanjutnya dapat diperoleh hasil bahwa terdapat 1 (satu) sektor ekonomi di Kota Probolinggo yang termasuk kedalam kategori sektor dengan pertumbuhan tinggi dan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Kota Probolinggo (Sektor Prima), yaitu Transportasi dan Pergudangan. Sektor tersebut memiliki karakteristik sebagai sektor maju dan tumbuh cepat, mengingat pertumbuhan dan distribusinya dalam 5 tahun terakhir rata-rata berada di atas rata-rata PDRB. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi (Sektor Potensial) di Kota Probolinggo tercatat sebanyak 3 (tiga) sektor, yaitu Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Mengingat pertumbuhan dan distribusinya dalam 5 tahun terakhir rata-rata berada di atas rata-rata PDRB. Ketiga sektor tersebut termasuk sebagai sektor maju namun tertekan, mengingat pertumbuhannya rata-rata selama 5 tahun terakhir berada dibawah pertumbuhan PDRB.

Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah (Sektor Berkembang) tercatat sebanyak 4 (empat) sektor meliputi : Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor tersebut termasuk dalam kategori sektor berkembang cepat. Sedangkan sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah (Sektor Terbelakang) tercatat sebanyak 9 (sembilan) sektor yang meliputi: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; serta Jasa Lainnya. Sektor tersebut termasuk dalam kategori relatif tertinggal.

Dari berbagai sektor ekonomi di Kota Probolinggo diperlukan pengembangan terhadap sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis, dimana sektor-sektor yang menjadi basis dapat diketahui melalui Analisis *Location Quotient* (LQ). Analisis *Location Quotient* (LQ) dimaksudkan untuk mengetahui sektor-sektor perekonomian di Kota Probolinggo yang masuk dalam kategori sektor basis (unggulan) maupun sektor non basis. Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat

spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau *leading* sektor. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan. Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai *leading* sektor suatu kegiatan ekonomi. *Location quotient* menghitung perbandingan *share output* sektor i di kota atau kabupaten dan *share output* sektor i di provinsi. Analisis dilakukan dengan menggunakan data PDRB Kota Probolinggo tahun 2020 – 2024 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebagai wilayah analisis dan data PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2020 - 2024 ADHK sebagai wilayah acuan. Berdasarkan data tersebut selanjutnya diperoleh hasil perhitungan Indeks LQ (*Location Quotient*) Sektor Ekonomi di Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut.

Tabel II.15 Hasil Perhitungan LQ (*Location Quotient*) Sektor Ekonomi di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	Nilai LQ/ Tahun					LQ 2024	Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,539	0,503	0,529	0,545	0,523	0,523	NON BASIS
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	0,000	NON BASIS
C	Industri Pengolahan	0,505	0,503	0,498	0,506	0,497	0,497	NON BASIS
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,418	0,405	0,402	0,339	0,321	0,321	NON BASIS
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,405	2,386	2,376	2,317	2,362	2,362	BASIS
F	Konstruksi	0,669	0,656	0,644	0,647	0,644	0,644	NON BASIS
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,358	1,330	1,310	1,293	1,294	1,294	BASIS
H	Transportasi dan Pergudangan	5,261	5,560	5,234	4,939	4,873	4,873	BASIS
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	0,650	0,641	0,623	0,608	0,610	0,610	NON BASIS
J	Informasi dan Komunikasi	1,047	1,033	1,014	0,999	0,988	0,988	NON BASIS
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,365	2,341	2,287	2,288	2,273	2,273	BASIS
L	Real Estat	1,803	1,795	1,781	1,797	1,786	1,786	BASIS
M,N	Jasa Perusahaan	0,840	0,835	0,782	0,829	0,824	0,824	NON BASIS
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,107	2,096	2,069	2,054	2,086	2,086	BASIS
P	Jasa Pendidikan	1,782	1,791	1,766	1,749	1,734	1,734	BASIS
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,366	1,393	1,356	1,367	1,369	1,369	BASIS
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,355	2,316	2,270	2,183	2,152	2,152	BASIS

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil perhitungan analisis LQ memberikan informasi tentang sektor-sektor perekonomian mana saja yang merupakan potensi unggulan daerah (sektor basis) dan sektor mana yang merupakan sektor non basis. Jika hasil perhitungan LQ menunjukkan > 1 maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor basis sedangkan jika hasil perhitungan LQ < 1 maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor non basis. Hasil perhitungan analisis LQ dengan menggunakan data PDRB Kota Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tabel diatas diperoleh informasi bahwa di Kota Probolinggo secara konsisten pada 5 tahun terakhir (2020 - 2024) terdapat 8 (delapan) sektor yang termasuk menjadi sektor basis, dimana sektor tersebut memiliki nilai LQ diatas 1 (> 1). Adapun sektor-sektor tersebut meliputi : Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya. Hal ini mengartikan keberadaan sektor-sektor tersebut menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan (Kota Probolinggo) akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah Kota Probolinggo. Sub kategori Transportasi dan Pergudangan merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah terbesar pada sektor lapangan usaha ini, yaitu dengan nilai LQ sebesar 4,873 di tahun 2024. Hal ini dipicu oleh letak geografis dan infrastruktur yang strategis Kota Probolinggo dimana berperan sebagai pusat logistik dan distribusi di wilayah Jawa Timur. Terutama karena lokasinya yang dekat dengan Pelabuhan Tanjung Tembaga, yang merupakan jalur utama transportasi darat serta aktivitas perdagangan yang tinggi. Keunggulan ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi daerah tetapi juga membuka peluang investasi dalam pengembangan infrastruktur transportasi dan pergudangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kinerja dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah memiliki beberapa dimensi pengukuran. Salah satu alat untuk mengukur produktivitas daerah ialah metode analisis *shift share*. Analisis *shift share* digunakan untuk membagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah ke dalam tiga komponen dan mengukur kontribusi dari masing-masing komponen tersebut (Curtis, 1972). Analisis *shift*

share merupakan analisis untuk membandingkan laju. *Shift share* merupakan suatu metode alternatif untuk mengukur laju pertumbuhan dan daya saing suatu wilayah. Melalui metode ini, suatu sektor ekonomi dapat diukur cepat atau lambatnya tingkat pertumbuhan suatu wilayah, termasuk sektor yang menjadi penyumbang daya saing suatu wilayah terhadap wilayah lain. Analisis *shift share* digunakan untuk menganalisis peranan suatu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang sempit terhadap wilayah yang lebih luas. Analisis *shift share* memiliki tiga komponen yaitu :

1. *Regional share*, untuk melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap daerah yang lebih luas. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.
2. *Proportional shift*, untuk mengukur perubahan pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini dapat mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibanding perekonomian yang dijadikan acuan.
3. *Differential shift*, untuk menentukan seberapa jauh daya saing suatu sektor ekonomi di daerah (lokal) dengan perekonomian yang cakupannya lebih besar yang dijadikan acuan.

Analisis *Shift Share* digunakan untuk melihat kinerja masing-masing sektor PDRB Kota Probolinggo dan membandingkannya dengan nilai PDRB Provinsi Jawa Timur. Adapun hasil perhitungan *Shift Share* Sektor Ekonomi di Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.16 Hasil Perhitungan *Shift Share* Sektor Ekonomi di Kota Probolinggo

No	Lapangan Usaha	Regional Share (Nij)	Proportional Shift (Pij)	Differential Shift (Dij)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	90,748	-63,433	-3,106
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
C	Industri Pengolahan	247,647	4,758	13,975
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,868	2,876	-2,994
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,025	-1,241	0,147

No	Lapangan Usaha	Regional Share (Nij)	Proportional Shift (Pij)	Differential Shift (Dij)
F	Konstruksi	99,794	11,295	-7,479
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	394,763	141,559	-58,431
H	Transportasi dan Pergudangan	229,580	362,746	-87,796
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	54,481	27,415	-13,216
J	Informasi dan Komunikasi	112,065	36,898	-22,903
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	98,397	-39,033	-8,034
L	Real Estat	53,511	-18,912	4,661
M,N	Jasa Perusahaan	10,266	2,864	0,381
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	73,724	-42,910	5,775
P	Jasa Pendidikan	81,868	-33,666	-1,252
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,781	-2,074	2,713
R,S,T,U	Jasa lainnya	48,204	50,152	-21,466
	Total	1.617,721	439,295	-199,025

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan di atas dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki *regional share* terbesar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 394,763, sedangkan yang terkecil adalah Pengadaan Listrik dan Gas dengan angka 1,868. Adapun total regional share sebesar 1.617,721. Keseluruhan sektor memiliki nilai *regional share* yang bertanda positif, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pergeseran struktur perekonomian Kota Probolinggo pada masing-masing sektor dipengaruhi oleh perubahan struktur perekonomian pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

Untuk angka *proportional shift* sektor ekonomi di Kota Probolinggo telah terdapat 9 (sembilan) sektor yang bernilai positif yaitu : Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; serta Jasa Lainnya. Kesembilan sektor tersebut memiliki tingkat pertumbuhan di daerah (Kota Probolinggo) yang lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi karena pengaruh sektor tersebut pada lingkup yang lebih luas (Provinsi Jawa Timur) terhadap sektor dalam PDRB Kota Probolinggo. Masih terdapat sebanyak 8 (delapan) sektor di Kota Probolinggo yang tergolong lambat pertumbuhannya dibandingkan pertumbuhan sektor di Provinsi Jawa Timur dengan memiliki nilai *proportional shift* yang bertanda negatif.

Sektor ekonomi yang memiliki nilai Differential shift dengan tanda positif terdapat pada 6 (enam) sektor, yaitu : Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan keenam sektor tersebut memiliki daya saing yang tinggi/kuat, dimana sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif regional yang tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) sektor lainnya memiliki nilai differential shift dengan tanda negatif, yang artinya sektor-sektor tersebut memiliki daya saing yang masih rendah/lemah.

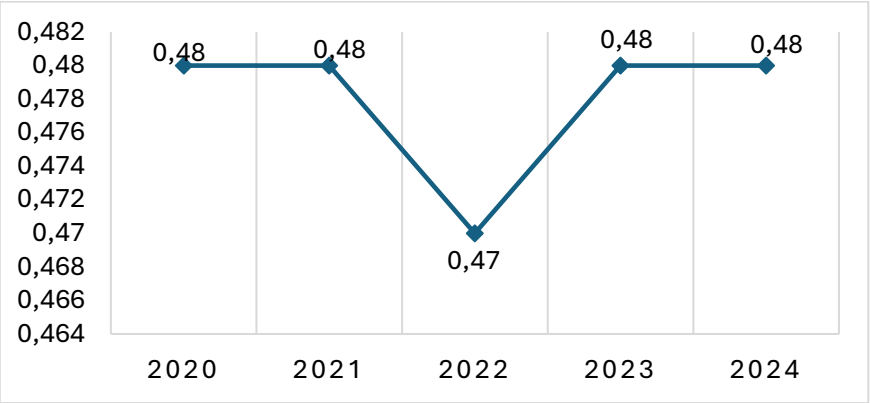
Hasil analisis *shift share* digunakan untuk mengklasifikasikan sektor dengan pertumbuhan dan daya saing. Dengan melihat pada nilai *proportional shift* dan *differential shift* maka dapat dilakukan pengelompokan sektor ekonomi di Kota Probolinggo yang secara lebih jelas disajikan pada gambar berikut.

KUADRAN I (Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Berdaya Saing)	KUADRAN III (Sektor dengan Pertumbuhan Cepat dan Tidak Berdaya Saing)
○ Industri Pengolahan; ○ Jasa Perusahaan	○ Konstruksi; ○ Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; ○ Transportasi dan Pergudangan; ○ Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; ○ Informasi dan Komunikasi; ○ Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial ○ Jasa Lainnya
KUADRAN II **(Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Berdaya Saing)**	**KUADRAN IV** **(Sektor dengan Pertumbuhan Lambat dan Tidak Berdaya Saing)**
○ Pengadaan Listrik dan Gas; ○ Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; ○ Real Estate; ○ Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;	○ Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; ○ Pertambangan dan Penggalian; ○ Jasa Keuangan dan Asuransi; ○ Jasa Pendidikan

Gambar II-33 Hasil Analisis *Shift Share* 4 Kuadran

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan pengelompokkan yang telah dilakukan maka dapat diperoleh hasil bahwa di Kota Probolinggo terdapat 2 sektor yang termasuk dalam kategori pertumbuhan cepat dan berdaya saing, yaitu : Industri Pengolahan serta Jasa Perusahaan, dimana kedua sektor tersebut memiliki *proportional shift* dan *differential shift* yang sama-sama bernilai positif (+).



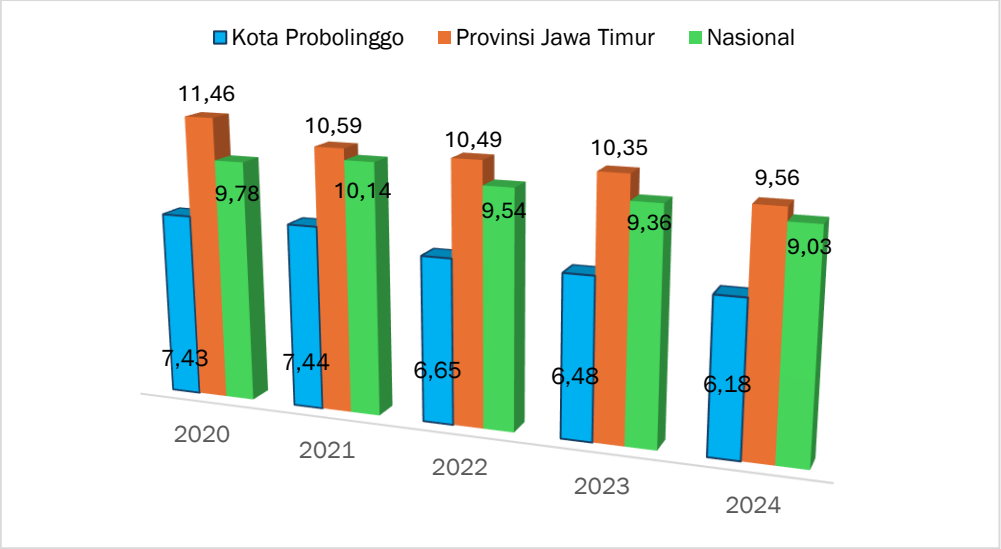
Gambar II-34 Kontribusi PDRB Kota Probolinggo terhadap Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025

Capaian Kontribusi PDRB Kota Probolinggo terhadap Provinsi menunjukkan seberapa besar sumbangan perekonomian Kota Probolinggo terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur. Dilihat dari data di atas bahwa Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi menunjukkan angka yang relatif tetap yaitu 0,48% kecuali pada Tahun 2022 sempat menurun menjadi 0,47%. Angka tersebut termasuk kecil jika dibandingkan dengan sumbangan Kota-Kota lain di Jawa Timur, hal ini wajar karena ekonomi Kota Probolinggo lebih kecil dibanding Kota-Kota besar seperti Surabaya, Kediri atau Malang. Namun secara pertumbuhan ekonomi, Kota Probolinggo masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi jawa Timur, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo relatif stabil termasuk didalam kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi.

C. ANGKA KEMISKINAN

Angka kemiskinan merupakan ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah tertentu. Angka ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadi indikator penting dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi. Garis kemiskinan sendiri ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan atau pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar. Indikator angka kemiskinan di Kota Probolinggo tahun 2020-2024 menunjukkan adanya penurunan yang signifikan. Secara rinci capaian angka

kemiskinan Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat melalui grafik berikut:



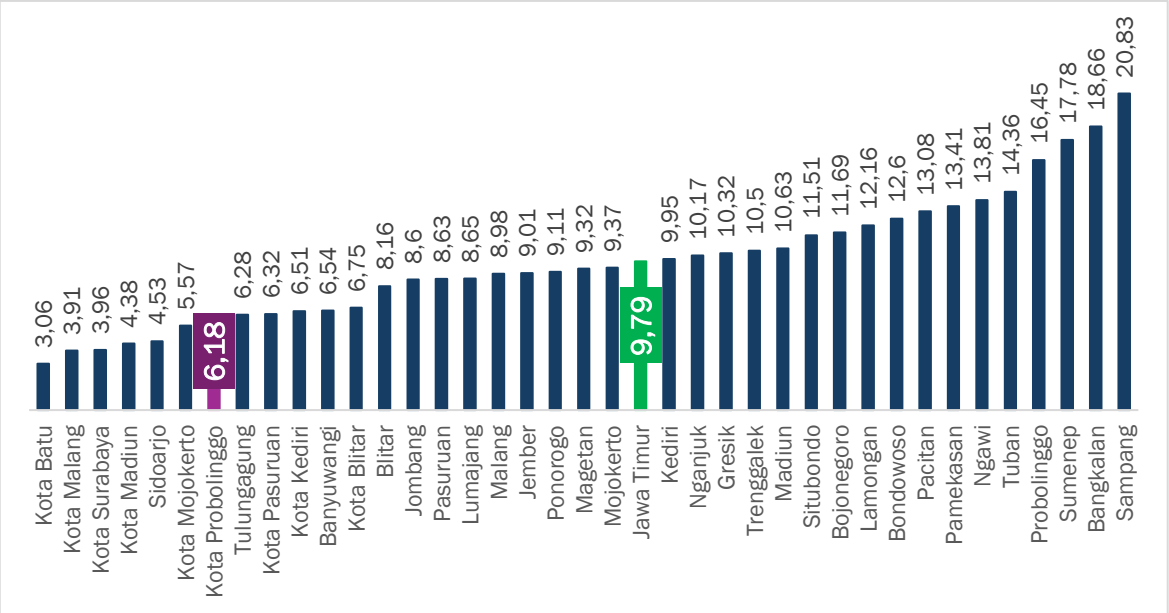
Gambar II-35 Angka Kemiskinan Kota Probolinggo (%) dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2025

Tahun 2020 angka kemiskinan Kota Probolinggo yaitu sebesar 7,43% hal ini tidak terlepas dari adanya Pandemi Covid-19 dimana masyarakat miskin, rentan miskin dan yang bekerja di sektor informal merupakan yang paling terdampak. Menurut Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19, hampir 50% responden dalam kelompok berpendapatan rendah (1,8 juta ke bawah) mengaku mengalami penurunan pendapatan. Penurunan tersebut menyebabkan kemiskinan semakin bertambah karena semakin banyak penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jika melihat pada perkembangan tahun 2020 hingga 2024 tercatat bahwa pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 7,43% dan 7,44%. Selain itu, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang pada tahun 2024 berada di angka 9,03%, Kota Probolinggo masih menunjukkan kinerja yang relatif baik. Angka kemiskinan Kota Probolinggo yang lebih rendah dari angka nasional menunjukkan bahwa upaya Kota Probolinggo cukup efektif dalam melakukan penanganan kemiskinan.

Posisi angka kemiskinan Kota Probolinggo pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Jawa Timur masih menempati peringkat ke 7 dari 38 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur, serta berada pada posisi ke 6 diantara tipologi Kota di Provinsi Jawa Timur atau masih

berada di atas Kota Kediri, Kota Pasuruan, dan Kota Blitar. Angka kemiskinan Kota Probolinggo bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 9,79%, posisinya masih berada dibawahnya, artinya angka kemiskinan di Kota Probolinggo masih jauh lebih rendah/ lebih baik dibandingkan dengan sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Timur dengan selisih lebih rendah sebesar 3,61%. Namun bila dibandingkan dengan wilayah yang berada disekitar Kota Probolinggo, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Lumajang terlihat bahwa angka kemiskinan Kota Probolinggo masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keempat wilayah tersebut. Angka kemiskinan pada ke empat wilayah tersebut masih lebih tinggi dari Kota Probolinggo, bahkan posisi Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo masih berada diatas Provinsi Jawa Timur dengan angka kemiskinan masing-masing mencapai 11,51% dan 16,45%.



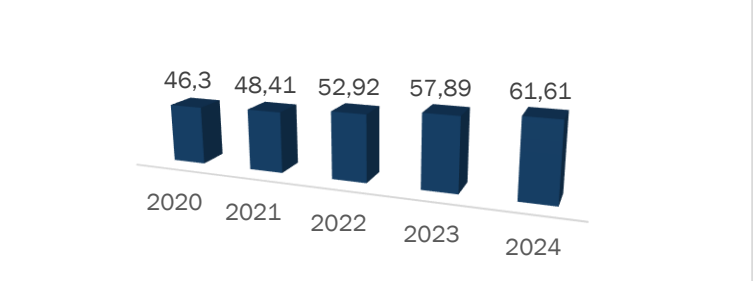
Gambar II-36 Angka Kemiskinan Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025

Melihat pada pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa posisi angka kemiskinan Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 telah menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, sehingga dengan demikian membawa Kota Probolinggo pada posisi yang lebih baik dibandingkan dengan daerah sekitarnya, dan angkanya lebih rendah dibandingkan dengan sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Timur, namun bila dibandingkan dengan sesama wilayah dengan tipologi kota di Provinsi Jawa Timur posisinya masih

berada pada urutan 6 dari 9 Kota. Sehingga kedepan angka kemiskinan di Kota Probolinggo masih perlu dituntaskan, mengingat masih terdapat 15,24 ribu jiwa penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

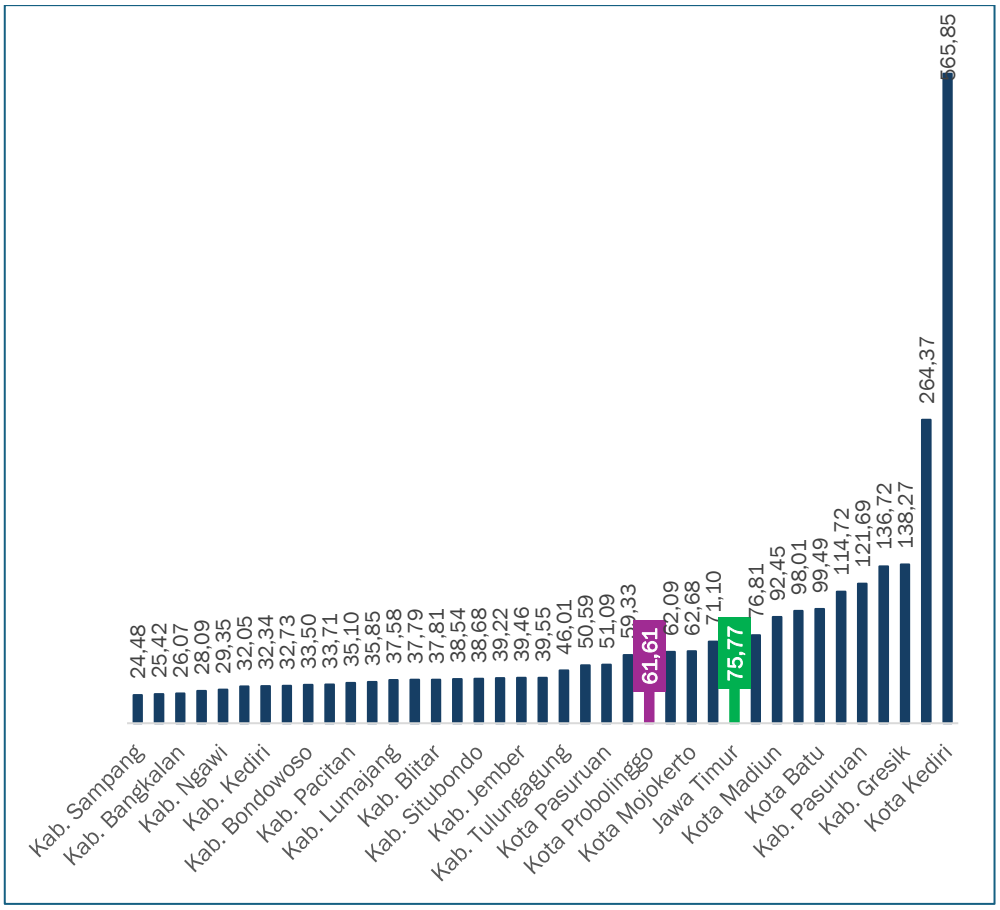
D. PDRB PER KAPITA

PDRB Per Kapita merupakan indikator ekonomi yang menunjukkan rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB Per Kapita diperoleh dengan membagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB Per Kapita, maka semakin besar rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap individu dalam perekonomian daerah. Adapun data PDRB Per Kapita Kota Probolinggo secara rinci dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar II-37 PDRB Per Kapita Kota Probolinggo (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2025

Grafik diatas menunjukkan bahwa angka PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan capaian, artinya yaitu rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap penduduk terus bertumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Kota Probolinggo terus berkembang sehingga menghasilkan lebih banyak output dan nilai tambah bagi masyarakat. Pertumbuhan ini juga bisa menjadi indikasi bahwa produktivitas tenaga kerja dan efisiensi dalam berbagai sektor seperti industri, perdagangan, transportasi dan pergudangan semakin meningkat.

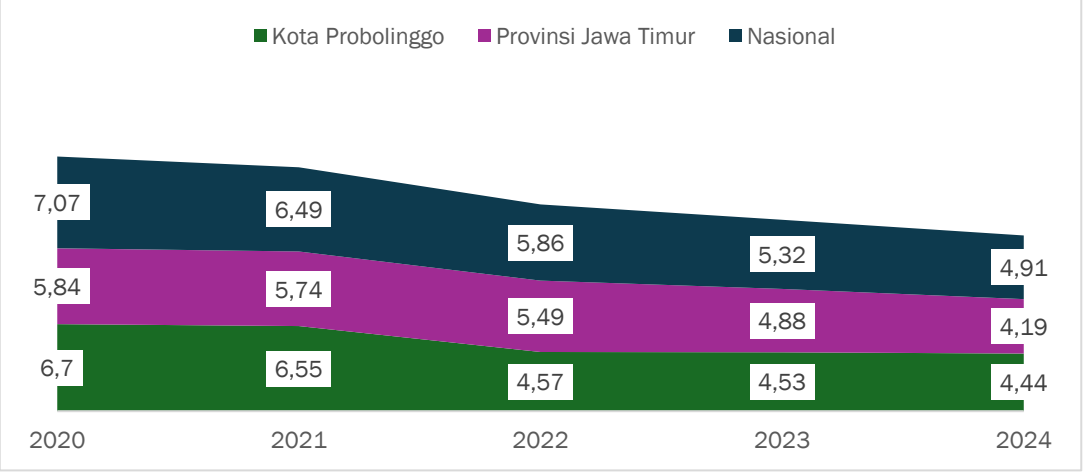


Gambar II-38 PDRB Per Kapita ADHB Menurut Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Timur, 2025

Posisi PDRB Per Kapita Kota Probolinggo pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Jawa Timur masih menempati peringkat ke 14 dari 38 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur, serta berada pada posisi ke 7 dari 9 Kota di Provinsi Jawa Timur, dimana posisinya masih berada di atas Kota Blitar dan Kota Pasuruan, dan berada dibawah Kota Mojokerto. Nilai PDRB Per Kapita Kota Probolinggo bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar Rp. 75,77,- (Juta Rupiah) posisinya masih berada dibawahnya, artinya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Probolinggo masih berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Namun bila dibandingkan dengan wilayah yang berada disekitar Kota Probolinggo, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Lumajang dapat terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Probolinggo masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga wilayah tersebut, bahkan posisi wilayah tersebut masih berada dibawah Provinsi Jawa Timur. Namun bila dibandingkan dengan Kota Kediri, maka posisi Kota Probolinggo masih jauh dibawahnya.

E. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Angka pengangguran pada suatu wilayah diketahui dengan melihat pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengggangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Angka pengangguran Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya penurunan, dimana pada capaian tahun 2020 terlihat bahwa angka pengangguran di Kota Probolinggo masih mencapai 6,70%, sedangkan pada tahun 2024 turun menjadi sebesar 4,44%. Melihat pada kondisi penduduk yang menganggur di Kota Probolinggo pada tahun 2024 masih tercatat sebanyak 5.748 jiwa. Sedangkan untuk angkatan kerja di Kota Probolinggo pada tahun 2024 tercatat sebanyak 129.602 Jiwa.

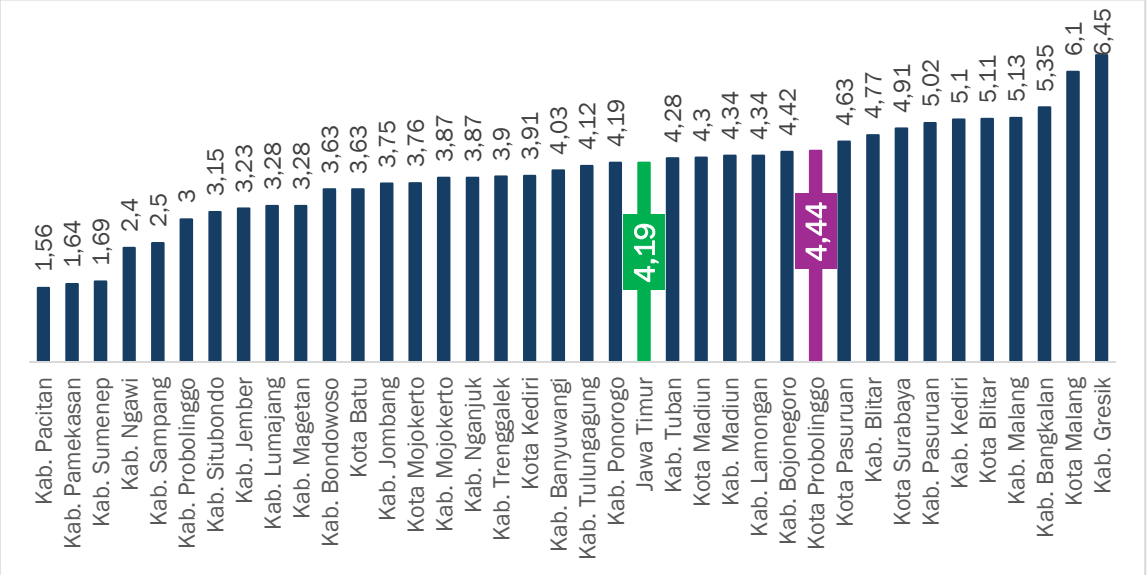


Gambar II-39 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Probolinggo Terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2025

Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, maka keberadaan angka pengangguran Kota Probolinggo pada tahun 2024 telah berada di atas angka pengangguran Provinsi Jawa Timur yang mencapai 4,19%, artinya angka pengangguran di Kota Probolinggo pada tahun tersebut tidak lebih baik dibandingkan dengan sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Semakin rendah nilai angkatan kerja menunjukkan kondisi semakin sedikitnya persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan/ tidak terserap di pasar kerja

. Pada tahun 2024 angka pengangguran Kota Probolinggo menempati peringkat 11 tertinggi dari 38 Kabupaten/ Kota, sedangkan bila dibandingkan dengan 9 wilayah dengan tipologi perkotaan di Provinsi Jawa Timur, maka Kota Probolinggo menempati urutan tertinggi ke 5 setelah Kota Malang, Kota Blitar, Kota Surabaya dan Kota Pasuruan, adapun 4 wilayah perkotaan lainnya memiliki angka pengangguran dibawah Kota Probolinggo. Bila dibandingkan dengan wilayah disekitarnya, posisi angka pengangguran di Kota Probolinggo masih berada di atas Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang yang memiliki angka pengangguran masing-masing sebesar 3,0%, 3,15% dan3,28%.



Gambar II-40 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025

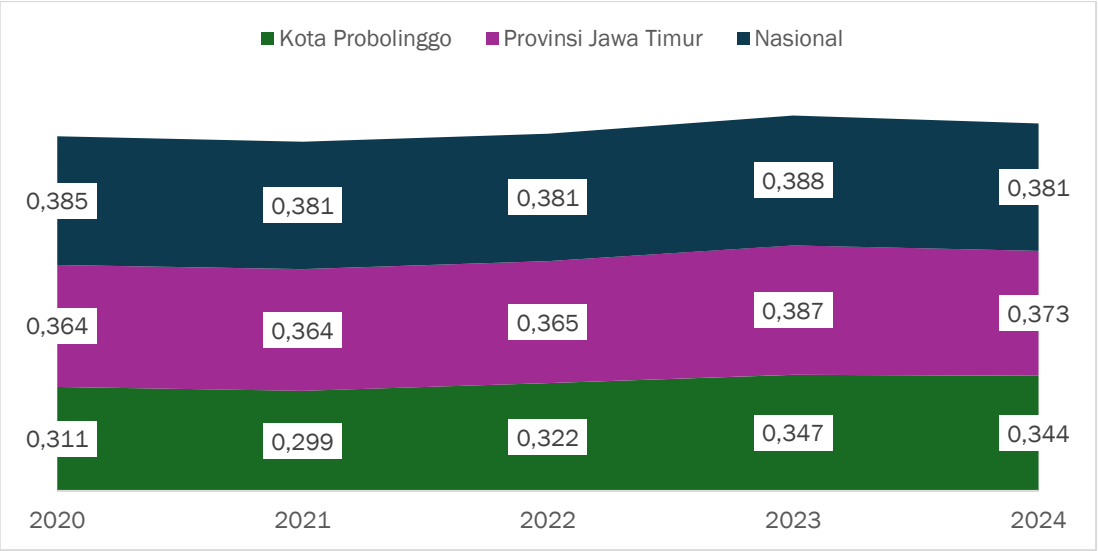
Bila melihat kondisi angka pengangguran di Kota Probolinggo dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 hingga 2024 keberadaan angka pengangguran Kota Probolinggo belum menunjukkan adanya penurunan, namun demikian bila dilihat posisi angka pengangguran Kota Probolinggo terhadap sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Timur menunjukkan kondisi kurang baik, bahkan pada wilayah dengan tipologi yang sama (perkotaan). Walaupun demikian, kedepan penurunan angka pengangguran di Kota Probolinggo masih perlu ditingkatkan, mengingat pada tahun 2024 masih terdapat sebanyak 5.748 Jiwa penduduk yang menganggur, selain itu perkembangan penduduk usia kerja dalam setiap tahun selalu mengalami peningkatan, sehingga apabila bertambahnya penduduk usia kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang

mencukupi, maka dikhawatirkan angka pengangguran di Kota Probolinggo akan mengalami peningkatan.

F. RASIO GINI

Ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan Rasio gini. Rasio gini yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan. Koefisien Gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara nilai 0 (nol) dan 1 (satu). Rasio gini sama dengan 0 (nol) menunjukkan kesenjangan sebaran pendapatan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedang nilai 1 (satu) menunjukan tingkat kesenjangan sebaran yang tinggi (kesenjangan sempurna). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah.

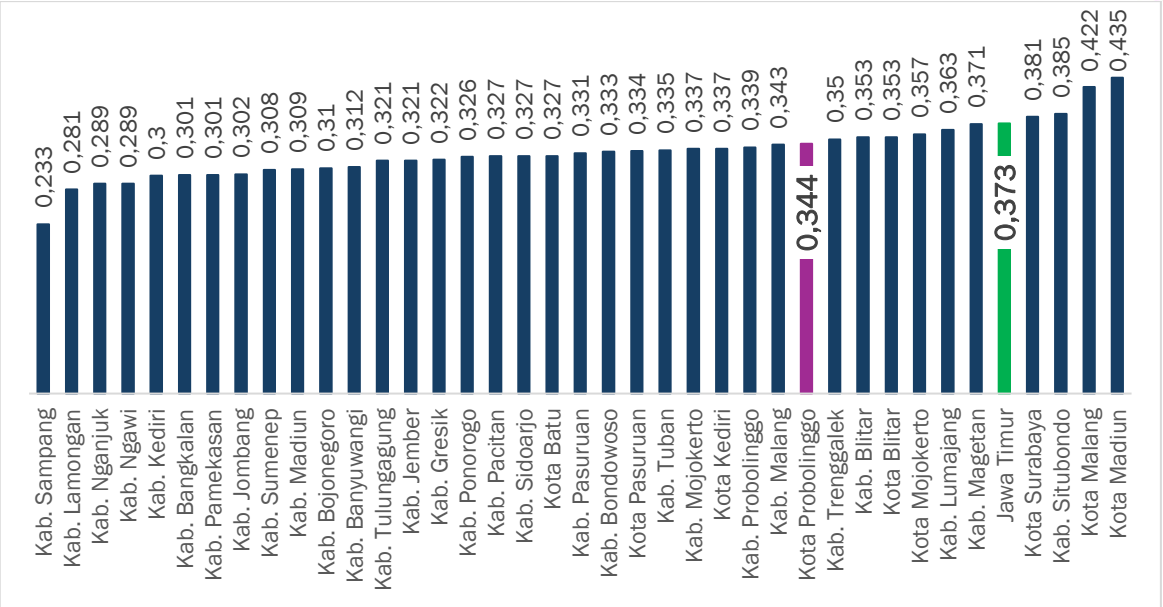
Indikator ketimpangan pendapatan (rasio gini) di Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 nilainya yaitu 0,311. Pada tahun 2021 ketimpangan pendapatan (rasio gini) di Kota Probolinggo mengalami penurunan menjadi 0,299, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sehingga menjadi 0,322. Peningkatan indeks gini terus berlanjut di tahun 2023 sehingga menjadi 0,347 namun di tahun 2024 indeks gini Kota Probolinggo kembali menurun menjadi 0,344. Walaupun ketimpangan pendapatan (rasio gini) di Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, namun ketimpangan yang terjadi di Kota Probolinggo masih termasuk dalam taraf/ kategori rendah atau memiliki pemerataan pendapatan yang relatif tinggi (merata), dimana menurut Michael Todaro seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia menyebutkan bahwa bila rasio gini terletak antara 0,20-0,35 maka ketimpangan termasuk dalam taraf rendah atau pemerataan relatif tinggi (merata), bila rasio gini terletak antara 0,36-0,49 menunjukkan ketimpangan taraf sedang, dan bila rasio gini terletak antara 0,50-0,70 maka menandakan bahwa pemerataan sangat timpang atau ketimpangan berada pada taraf tinggi.



Gambar II-41 Rasio Gini Kota Probolinggo Terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2024

Ketimpangan pendapatan (rasio gini) Kota Probolinggo bila dibandingkan dengan sebagian besar wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timurmenunjukkan kondisi yang lebih baik, dimana rasio gini pada tahun 2024 menempati peringkat ke 12 tertinggi dari 38 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur atau sebagai kota terendah ke 3 setelah Kota Batu dan Kota Kediri di Provinsi Jawa Timur. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, ketimpangan pendapatan (rasio gini) Kota Probolinggo masih berada dibawahnya dengan selisih sebesar 0,029, dimana pada tahun 2024 Provinsi Jawa Timur memiliki ketimpangan pendapatan (rasio gini) sebesar 0,373. Bila dibandingkan dengan wilayah disekitarnya, posisi ketimpangan pendapatan (rasio gini) di Kota Probolinggo masih berada di atas Kabupaten Probolinggo dengan nilai rasio gini sebesar 0,339, sedangkan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang masih berada di atas Kota Probolinggo dengan nilai rasio gini masing-masing wilayah sebesar 0,381 dan 0,363.

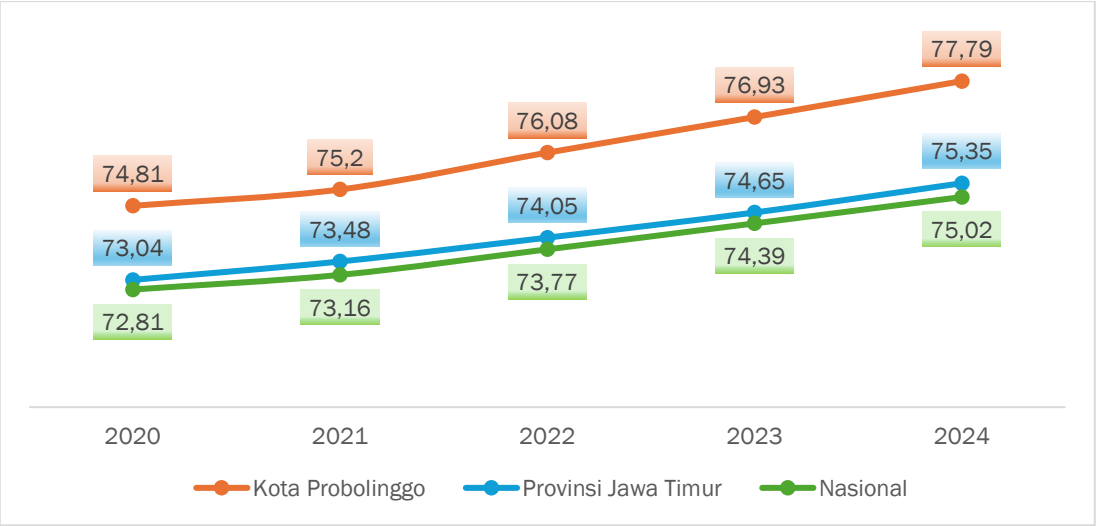


Gambar II-42 Rasio Gini Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Bila melihat kondisi ketimpangan pendapatan (gini rasio) di Kota Probolinggo dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 hingga 2024 ketimpangan pendapatan (gini rasio) di Kota Probolinggo walaupun mengalami fluktuasi masih menunjukkan ketimpangan dengan ketegori rendah atau memiliki pemerataan pendapatan yang relatif tinggi (merata), namun demikian bila dilihat posisi Kota Probolinggo terhadap sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Timur menunjukkan kondisi yang lebih baik, bahkan pada wilayah dengan tipologi yang sama (perkotaan). Namun demikian Pemerintah Kota Probolinggo kedepan harus tetap berusaha untuk mempertahankan dan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan (gini rasio) hingga serendah-rendahnya dengan berbagai kebijakan dan pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan.

G. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

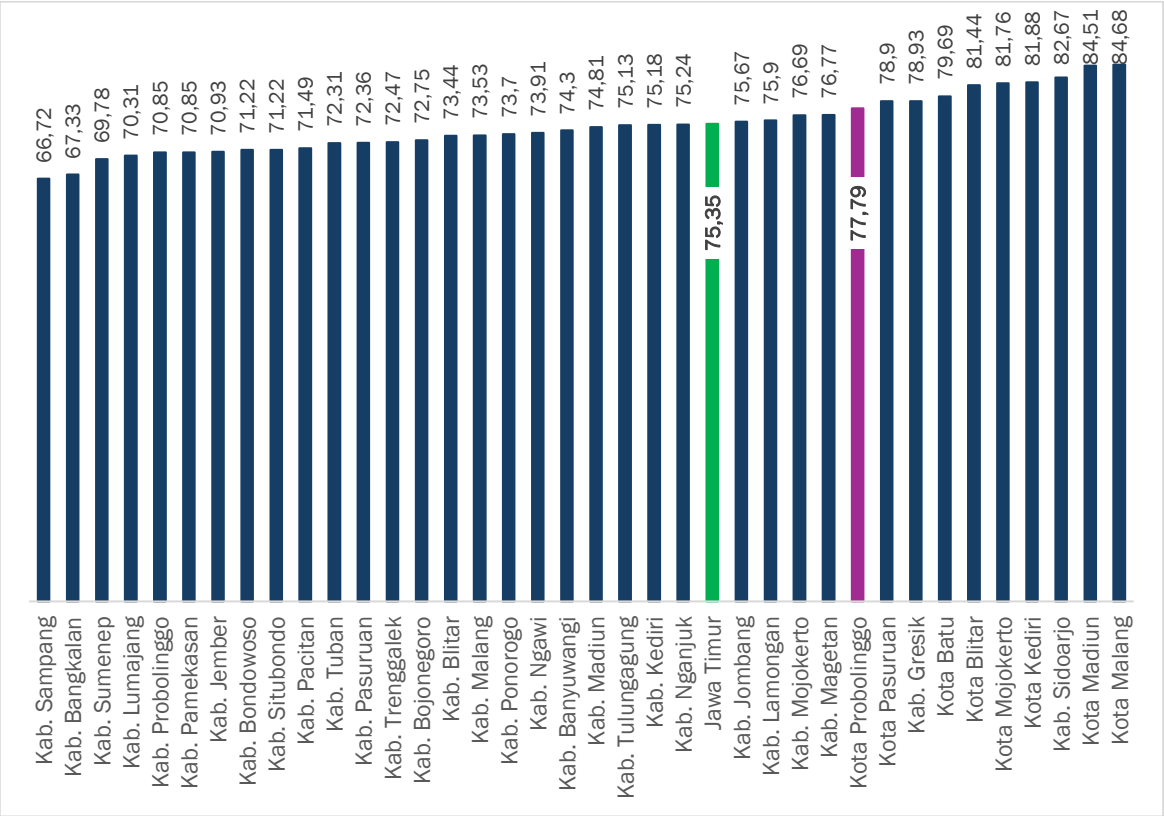
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia berdasarkan 3 dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Penghitungan IPM menggunakan 3 komponen utama yaitu umur harapan hidup (untuk dimensi kesehatan), rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah (untuk dimensi pendidikan), serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (untuk dimensi standar hidup). Adapun data capaian IPM Kota Probolinggo tahun 2020-2024 secara rinci terdapat pada grafik berikut:



Gambar II-43 Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo Terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025

Capaian IPM Kota Probolinggo dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan capaian yang signifikan yaitu dari 74,81 di tahun 2020 menjadi 77,79 di tahun 2024. Capaian ini jika disandingkan dengan capaian IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional maka capaian IPM Kota Probolinggo masih berada diatas Provinsi dan Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas hidup, akses pendidikan yang lebih baik, serta pertumbuhan ekonomi yang mendorong standar hidup lebih tinggi. Adapun jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Timur, capaian IPM Kota Probolinggo tahun 2024 berada pada peringkat 10 diantara 38 kota/kabupaten lain di Jawa Timur serta berada pada posisi ke 9 diantara tipologi Kota di Provinsi Jawa Timur atau terendah diantara tipologi kota. Namun bila dibandingkan dengan wilayah yang berada disekitar Kota Probolinggo, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Lumajang terlihat bahwa IPM Kota Probolinggo masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keempat wilayah tersebut. IPM pada ke empat wilayah tersebut masih lebih rendah dari Kota Probolinggo, bahkan keempat kabupaten tersebut masih berada dibawah Provinsi Jawa Timur dengan IPM.



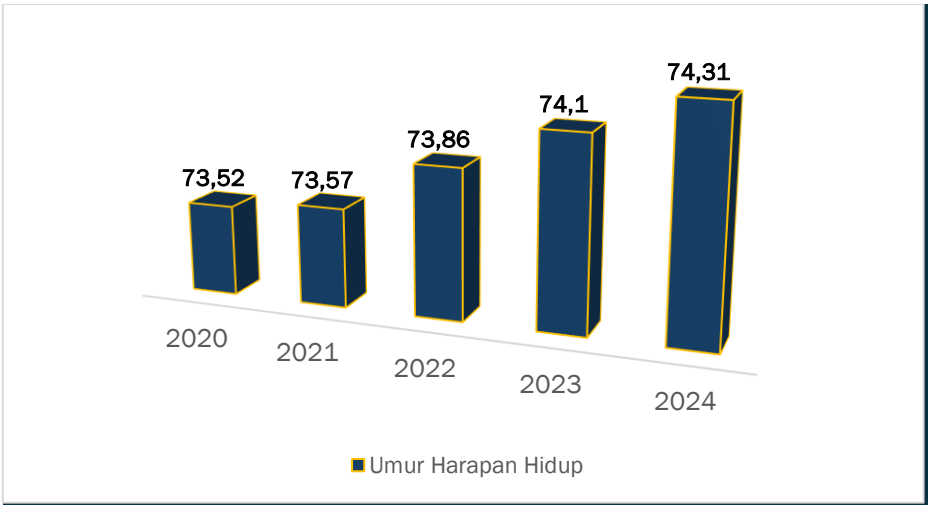
Gambar II-44 Indeks Pembangunan Manusia Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025

2.1.3.2 KESEHATAN UNTUK SEMUA

A. UMUR HARAPAN HIDUP

Secara definisi Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan perkiraan rata-rata jumlah tahun yang dapat diharapkan seseorang untuk hidup sejak lahir, berdasarkan tingkat kematian yang berlaku di suatu wilayah. Penghitungan UHH sudah mengalami perubahan perhitungan sejak tahun 2020 yang sebelumnya yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dimana AHH dihitung berdasarkan tabel mortalitas dengan menggunakan data kematian dari statistik kesehatan dan survei sosial ekonomi nasional (susenas). AHH mengacu pada jumlah tahun yang diharapkan seseorang hidup sejak lahir, dihitung dengan metode tidak langsung. Sementara UHH yang menggunakan *long form* sensus penduduk 2020 penghitungannya lebih akurat karena berbasis data kependudukan yang lebih luas dan detail. UHH dihitung menggunakan pendekatan tingkat kematian khusus (*Age-Specific Death Rate/* ASDR) berdasarkan hasil sensus. Adapun capaian UHH

Kota Probolinggo tahun 2020-2024 secara detail dapat dilihat melalui grafik berikut:



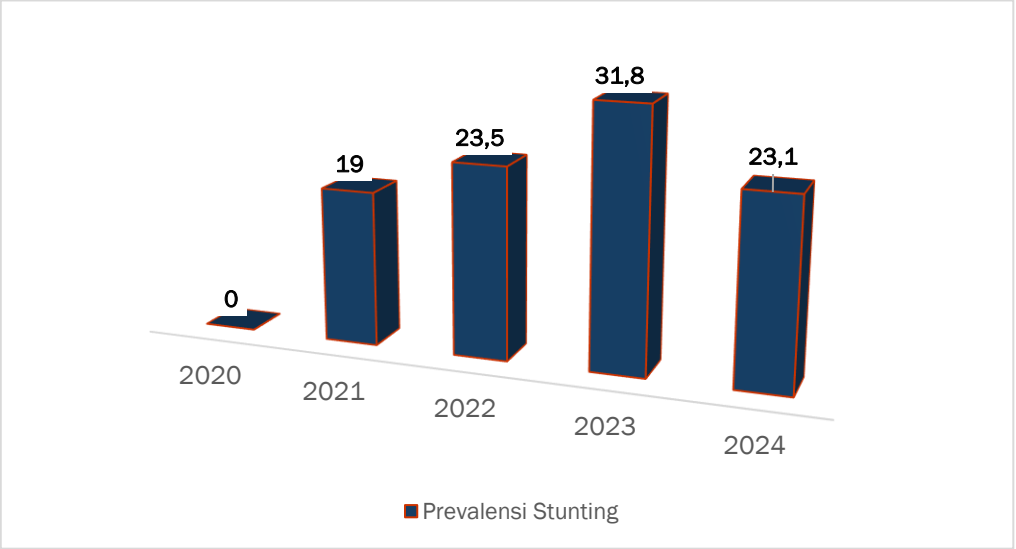
Gambar II-45 Umur Harapan Hidup Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2025

Grafik diatas menunjukkan bahwa UHH Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir memiliki capaian yang terus meningkat yaitu dari 73,52 di tahun 2020 menjadi 74,31 di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa akses layanan kesehatan di Kota Probolinggo semakin baik sehingga berkontribusi terhadap peningkatan UHH. Peningkatan akses layanan kesehatan tidak hanya pada infrastruktur fisiknya saja tetapi juga pemberian program-program kesehatan seperti imunisasi dan edukasi mengenai pola hidup sehat. Dengan capaian UHH yang terus meningkat ini menunjukkan bahwa adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Kota Probolinggo dalam upaya pencegahan penyakit serta meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

B. PREVALENSI STUNTING

Prevalensi stunting merupakan persentase anak usia di bawah 5 (lima) tahun/ balita yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan pola asuh yang kurang optimal. Stunting ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya menurut standar WHO. Beberapa faktor yang menyebabkan stunting diantaranya yaitu karena asupan gizi yang tidak memadai selama 1.000 hari pertama kehidupan (sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun); akibat pola asuh dan praktik pemberian makan yang tidak sesuai kebutuhan anak; ibu hamil yang kekurangan gizi atau mengalami anemia beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah;

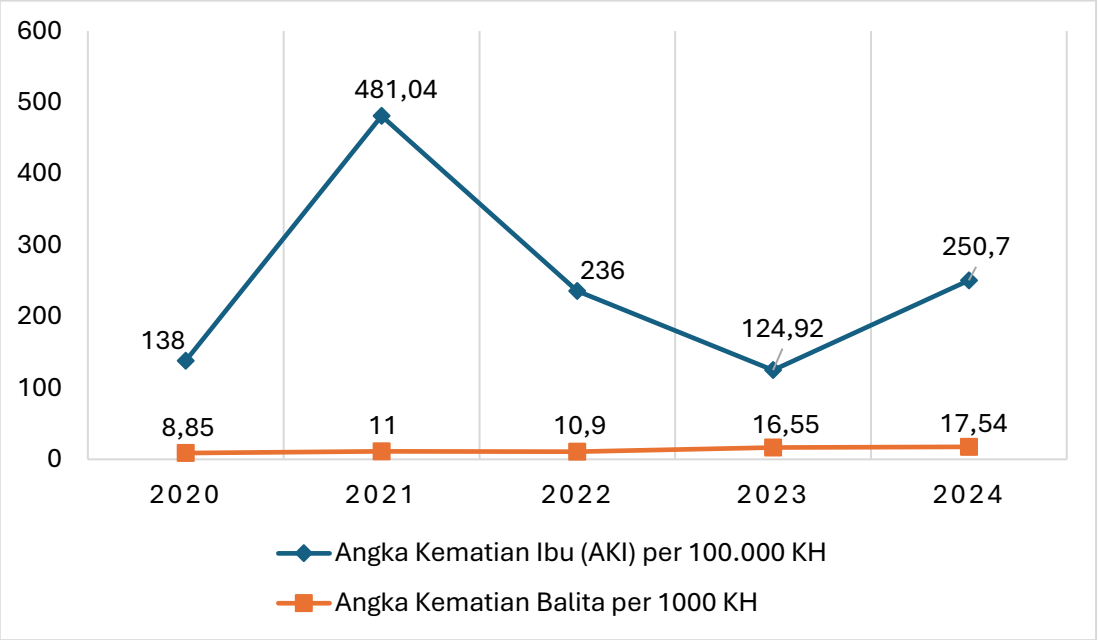
sanitasi dan akses air bersih yang suulit; serta keterbatasan akses layanan kesehatan (kemiskinan). Adapun capaian prevalensi stunting di Kota Probolinggo tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar II-46 Prevalensi Stunting Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Data SKI (SSGI, Kemenkes), 2025

Prevalensi stunting di Kota Probolinggo dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2021, angka stunting tercatat sebesar 19,00%, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 23,50% di tahun 2022. Kenaikan ini berlanjut hingga tahun 2023 dengan angka mencapai 31,80%. Untuk Capaian Stunting Tahun 2024 menunjukkan kinerja positif dari penurunan stunting menjadi 23,1. Tren ini mencerminkan adanya tantangan dalam penanganan stunting yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih efektif. Masih dibutuhkan perbaikan dan konsistensi dalam pelaksanaan program kesehatan dan gizi di Kota Probolinggo agar fluktuasi angka prevalensi stunting dapat terkendali sepenuhnya.

C. LAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN BALITA

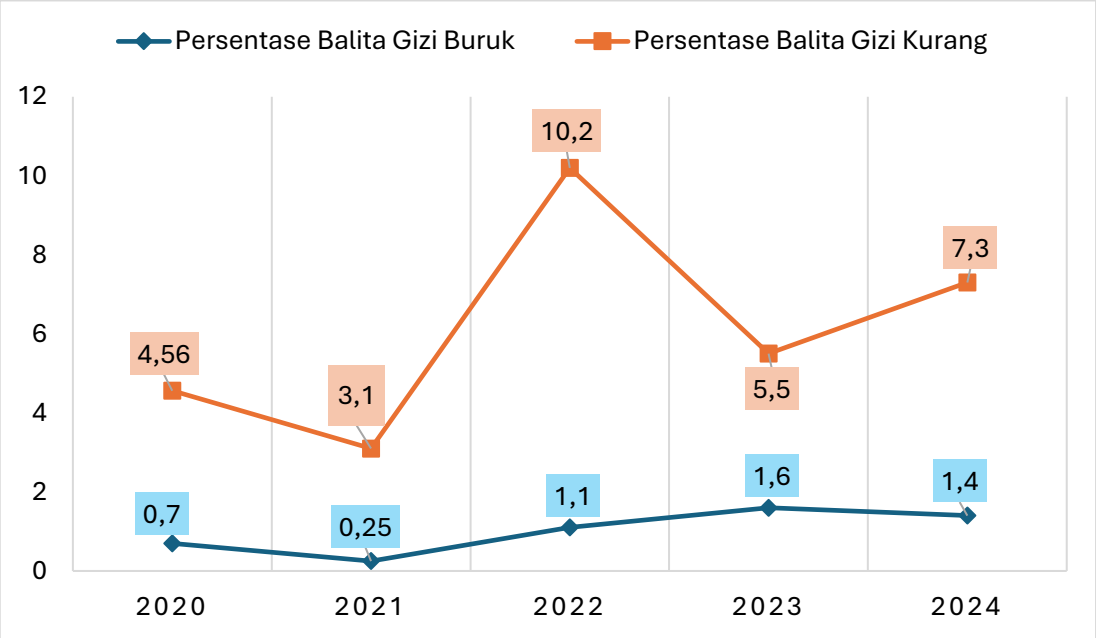


Gambar II-47 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Balita Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Kematian ibu dan bayi merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas kesehatan masyarakat suatu daerah. Data dari tabel menunjukkan AKI di Kota Probolinggo dalam rentang waktu 2020 hingga 2024. AKI menunjukkan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data, AKI di Kota Probolinggo mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, AKI tercatat sebesar 138,6 per 100.000 kelahiran hidup dengan 5 kasus kematian ibu dari 3632 kelahiran. Kemudian, pada tahun 2021, AKI melonjak tajam menjadi 481,04 per 100.000 kelahiran hidup karena adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya, AKI menurun menjadi 236 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2022 dan 124,92 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Pada tahun 2024, AKI sementara tercatat sebesar 250,70 per 100.000 kelahiran hidup karena banyaknya kasus penyakit bawaan Ibu melahirkan dan sepsis/infeksi.

Angka kematian balita di Kota Probolinggo pada tahun 2020 adalah 8,85, kemudian meningkat menjadi 11 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, angka tersebut sedikit menurun menjadi 10,9, namun kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 16,55 dan mencapai 17,54 pada tahun 2024. Peningkatan angka kematian balita dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2023 dan 2024

disebabkan asphexia, BBLR , Kelaianan Kongenintal dan Penyakit pada Balita kematian terbesar kematian pada usia 0-28 hari pada kasus asphexia dan Berat Badan Lahir Rendah.



Gambar II-48 Status Gizi Balita Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Analisis data persentase balita gizi buruk menunjukkan bahwa persentase pada tahun 2020 adalah 0,7%, kemudian terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 0,25% pada tahun 2021 karena Pandemi Covid-19 lalu meningkat lagi menjadi 1,1% pada tahun 2022, peningkatan ini karena semakin banyak balita yang diukur TB,BB dan ditemukan dengan gizi buruk. Kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 1,6%, dan sedikit menurun menjadi 1,4% pada tahun 2024. Faktor pendukung naik persentase gizi buruk : semakin meningkatnya balita yang diukur BB,TB dan semakin meningkatnya yang ditemukann status gizi buruk, balita mengalami infeksi, pola makan balita yang kurang memenuhi kebutuhan gizi , hygiene dan sanitasi kurang. Fakfor pendukung turun persentase gizi buruk : tahun 2021 ada kebijakan pembatasan kerumunan masa karena kasus covid meningkat sehingga jumlah balita yang diukur mengalami penurunan juga.

Sedangkan Analisis data persentase balita gizi kurang menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024. Secara umum, terdapat penurunan persentase dari tahun 2020 ke 2021, kemudian terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022 sebelum kembali menurun pada tahun 2023 dan sedikit

meningkat pada tahun 2024. Presentase balita gizi kurang mengalami peningkatan pada tahun 2022 karena pasca pandemi banyak balita yang mengalami infeksi dan sudah mulai aktif kembali pengukuran di posyandu dan banyak balita yang diukur BB dan TB. Faktor pendukung naik persentase gizi kurang : semakin meningkat balita yang diukur BB,TB dan semakin meningkat yang ditemukan status gizi kurang, balita mengalami infeksi, pola makan balita yang kurang memenuhi kebutuhan gizi , hygiene dan sanitasi kurang. Fakfor pendukung turun persentase gizi kurang : tahun 2021 ada kebijakan pembatasan kerumunan masa karena kasus covid meningkat sehingga jumlah balita yang diukur mengalami penurunan juga.

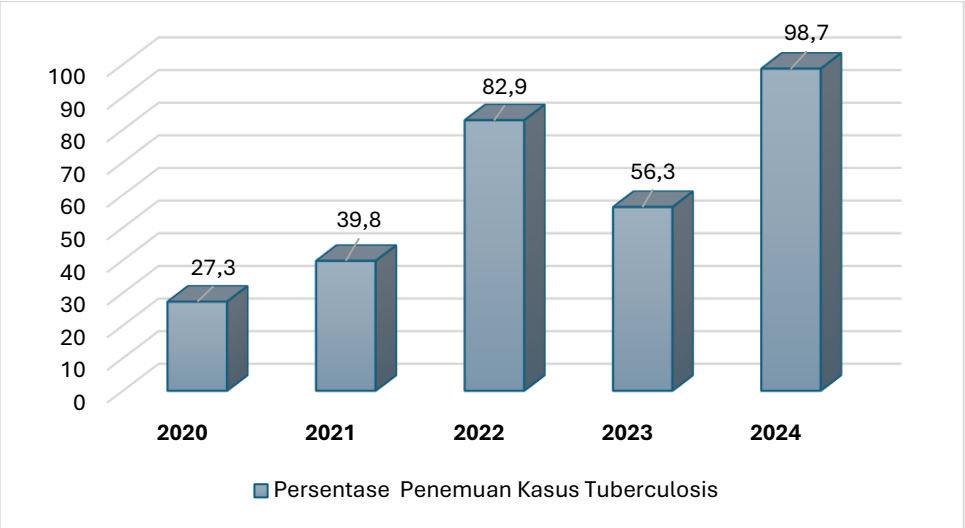
D. PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR STRATEGIS

Tabel II.17 Capaian Kinerja Penanggulangan Penyakit Menular Strategis Kota Probolinggo

INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penemuan Kasus Tuberculosis	%	27,3	39,8	82,9	56,3	98,7
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	%	27	39,8	82,9	56,3	98,7
Angka keberhasilan Pengobatan TB (*Treatment Success Rate*)	%	54,1	79,7	83,2	77	83,5
Persentase Pasien HIV Baru yang memulai pengobatan ARV	%	100	100	100	65,3	61,4
Persentase Penemuan Kasus Malaria diobati sesuai standar	%	100	100	100	0	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Pembangunan kesehatan yang berkualitas dan merata menjadi pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif. Dalam konteks ini, penanggulangan penyakit menular strategis seperti Tuberkulosis (TBC), Human Immunodeficiency Virus (HIV), dan Malaria, menjadi fokus krusial yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan, ketiga penyakit ini memiliki dampak multidimensional, tidak hanya pada kesehatan individu, tetapi juga pada produktivitas ekonomi, stabilitas sosial, dan beban sistem pelayanan kesehatan di Probolinggo dan sekitarnya.



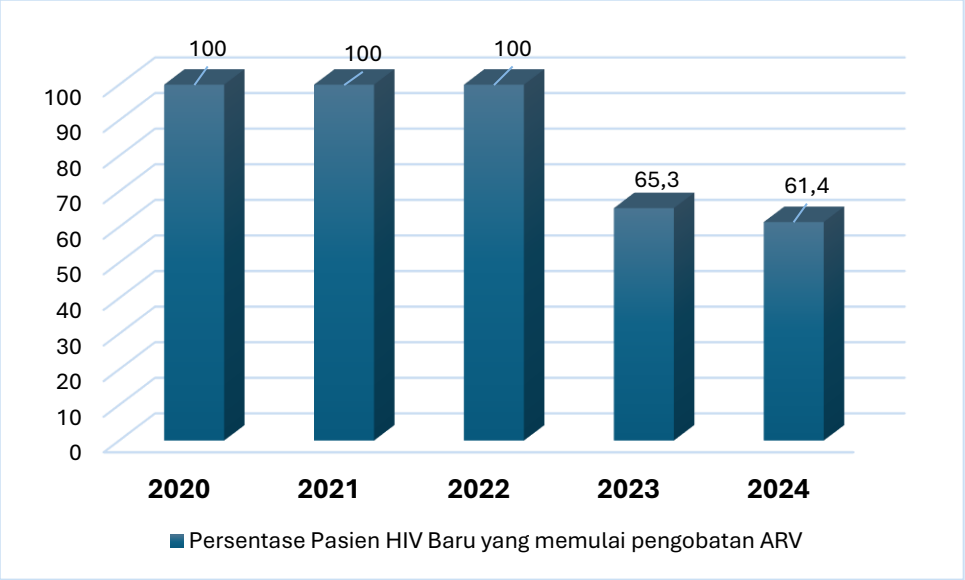
Gambar II-49 Penemuan Kasus Tuberculosis Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Sebagaimana tabel diatas menunjukkan adanya tren peningkatan yang signifikan dalam persentase penemuan kasus tuberkulosis (TB) dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, angka penemuan kasus TB berada di angka 27,3 persen. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan capaian penemuan kasus TB menjadi 39,8 persen. Rendahnya angka persentase penemuan kasus TB di tahun 2020 dan tahun 2021 ini dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19, dimana pada masa pandemi Covid-19 terdapat pembatasan pelayanan dan kunjungan pasien ke layanan Kesehatan. Di tahun 2022, penemuan kasus TB mulai meningkat di mana persentase penemuan kasus mencapai 82,9 persen. Peningkatan capaian yang cukup drastis ini, terjadi karena adanya peran serta dari fasyankes, lintas program dan lintas sektor yang ikut berperan aktif dalam penemuan kasus dan pelacakan kontak. Sedangkan pada tahun 2024, untuk persentase penemuan kasus mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu 98,7 persen. Capaian ini menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam upaya eliminasi dan pengendalian TB, Dimana capaian penemuan kasus TB sudah mencapai target (target penemuan kasus minimal 90% target Nasional). Peningkatan drastis ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan sistem pelaporan dan pencatatan, atau perluasan akses terhadap layanan diagnose dan skrining TB, peran serta lintas sektor dan lintas program.

Data capaian penemuan seluruh kasus TBC pada tahun 2024 diperoleh hasil sebesar 98,70% sudah mencapai target nasional (target 90%). Jika

dibandingkan dengan data capaian tahun sebelumnya (56,3%) mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh penjaringan terduga TBC atau penemuan pasien TBC di Puskesmas dan Rumah Sakit belum maksimal untuk itu diperlukan pemberdayaan masyarakat dengan peran serta kader melalui Satgas TBC Kecamatan dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan atau berobat TBC ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) DOTS semakin baik.

Angka keberhasilan Pengobatan TB di Kota Probolinggo pada tahun 2020 - 2023 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2023 capaiannya melebihi target 90%, tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan salah satunya penyebabnya banyaknya kasus yang di temukan tetapi tidak memulai pengobatan (enrollment) di karenakan stigma TBC dimasyarakat, tidak merasa sakit (sehat), ketika di lakukan kunjungan rumah alamat tidak ditemukan. Tahun 2024 angka keberhasilan pengobatan TBC di kota probolinggo kembali meningkat karena adanya upaya-upaya untuk meningkatkan skrining pada terduga kasus TBC.

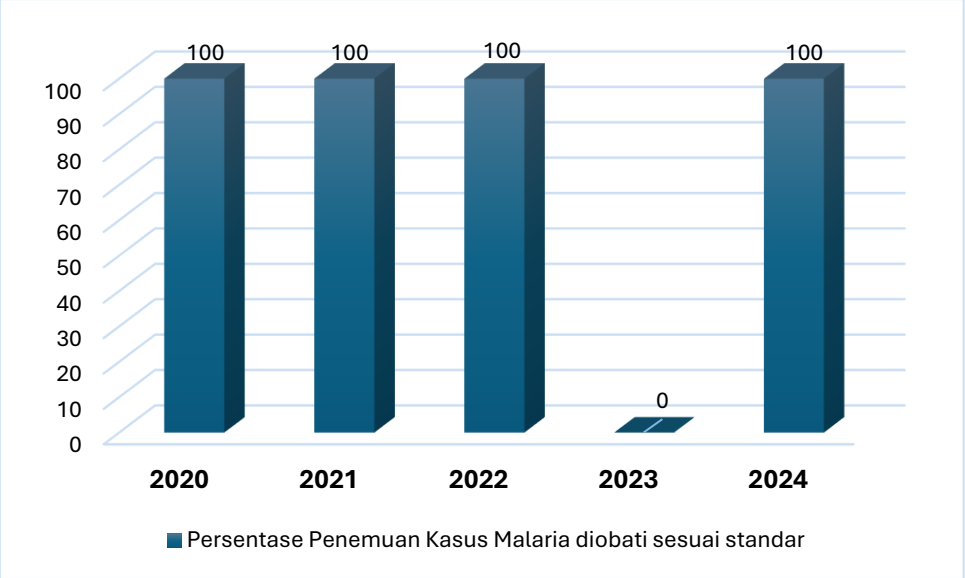


Gambar II-50 Pasien HIV Baru yang memulai Pengobatan ARV Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Data menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan terkait persentase pasien HIV baru yang memulai pengobatan Antiretroviral (ARV) di Probolinggo. Dari tahun 2020 hingga 2022, variabel untuk capaian inisiasi pengobatan ARV masih belum menjadi concern program penanggulangan HIV di Kota Probolinggo, sehingga seluruh pasien baru yang ditemukan di tahun 2020-2022 diasumsikan telah mendapatkan pelayanan pengobatan HIV sesuai standar.

Pada tahun 2023, di mana persentase pasien baru pasien HIV yang ditemukan memulai ARV adalah sejumlah 65,3 persen. Sedangkan di tahun 2024, persentase pasien HIV baru yang memulai pengobatan menurun menjadi 61,4 persen, angka ini masih jauh dibandingkan target nasional dimana pasien baru HIV yang ditemukan harus diobati minimal 90% dari total kasus. Penurunan ini memerlukan perhatian serius karena inisiasi ARV yang cepat dan berkelanjutan adalah kunci untuk menekan replikasi virus, meningkatkan kualitas hidup pasien, mencegah penularan, dan mengurangi angka kematian terkait HIV.



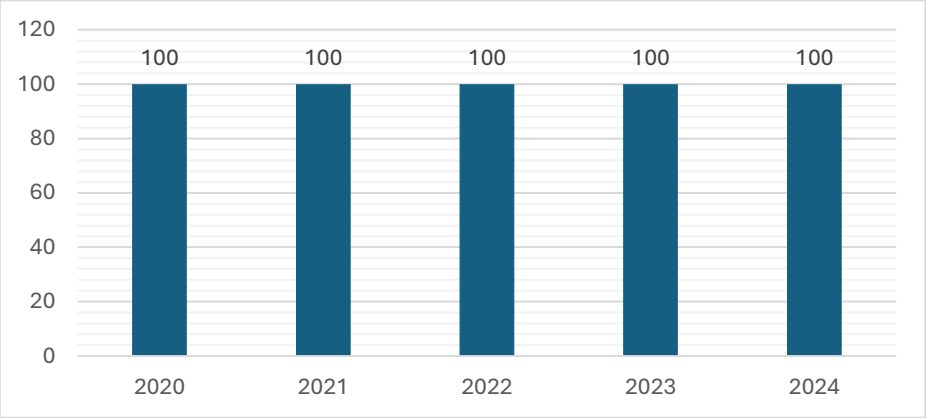
Gambar II-51 Penemuan Kasus Malaria yang Diobati sesuai Standar Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Data menunjukkan fluktuasi yang menarik terkait persentase penemuan kasus malaria yang diobati sesuai standar di Probolinggo. Dari tahun 2020 hingga 2022, kinerja sangat impresif dengan capaian 100 persen. Ini berarti setiap kasus malaria yang ditemukan pada periode tersebut mendapatkan penanganan sesuai standar yang berlaku, menunjukkan sistem pelayanan kesehatan yang responsif dan efektif. Namun, pada tahun 2023, tercatat persentase 0 persen. Hal ini disertai dengan catatan penting bahwa tidak ada kasus malaria yang ditemukan pada tahun tersebut. Artinya, angka nol ini bukan karena kegagalan pengobatan, melainkan karena absennya kasus baru. Ini bisa menjadi indikasi positif bahwa upaya pencegahan dan eliminasi malaria di Probolinggo sangat berhasil. Kemudian, pada tahun 2024, persentase kembali ke 100 persen. Jika ada kasus malaria yang ditemukan di tahun ini, data ini menunjukkan bahwa penanganan

medisnya kembali dilakukan sesuai standar sepenuhnya. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan komitmen kuat Probolinggo dalam mengeliminasi malaria dan memastikan setiap kasus yang muncul diobati dengan tepat.

E. KELURAHAN SIAGA SEHAT AKTIF



Gambar II-52 Cakupan Kelurahan Siaga Sehat Aktif Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Selama periode 2020–2024, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berhasil mencapai 100% Kelurahan Siaga Sehat Aktif. Capaian ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader, serta masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang lebih baik di tingkat kelurahan. Kelurahan Siaga Sehat Aktif adalah kelurahan yang mampu menggerakkan warganya untuk peduli, tanggap, dan mampu menghadapi masalah kesehatan secara mandiri dengan dukungan seluruh potensi yang ada. Upaya yang dilakukan meliputi:

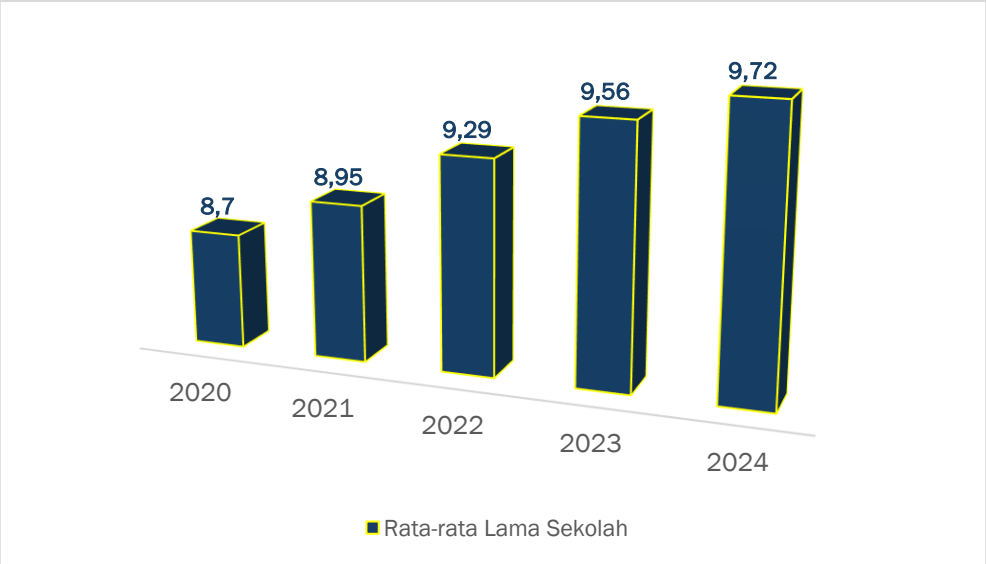
a. Penguatan Posyandu berbasis siklus hidup sebagai pusat pelayanan kesehatan berbasis masyarakat;
b. Peningkatan kapasitas kader kesehatan melalui pelatihan, supervisi, dan penyediaan media KIE;
c. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan promotif dan preventif, seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), pemantauan tumbuh kembang balita, dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular;
d. Sinergi lintas sektor antara pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, TP PKK, dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung kegiatan kesehatan;

e. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pencatatan dan pelaporan kesehatan secara cepat dan akurat.

2.1.3.3 PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

A. RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Keberhasilan pendidikan salah satunya ditentukan dari rata-rata lama sekolah (RLS), karena indikator ini mencerminkan seberapa lama penduduk usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan formal. Semakin tinggi RLS suatu daerah, semakin baik akses pendidikan yang diterima oleh penduduknya. Namun, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh RLS saja, tetapi juga oleh kualitas pembelajaran, pemerataan akses, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Capaian RLS Kota Probolinggo tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui grafik berikut:

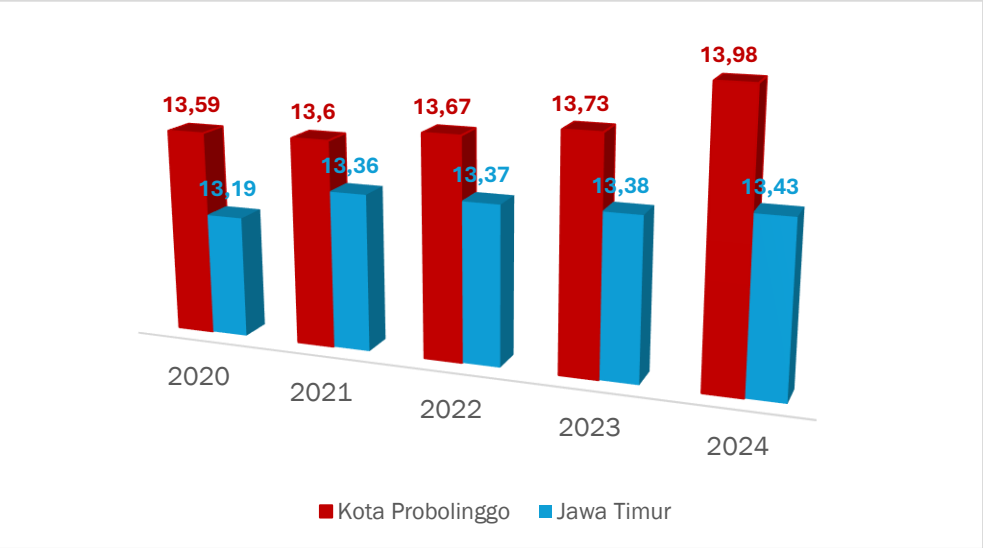


Gambar II-53 Rata-rata Lama Sekolah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Probolinggo mengalami peningkatan yang konsisten dan signifikan dari 8,7 tahun pada 2020 menjadi 9,72 tahun pada 2024. Grafik diatas juga menunjukkan bahwa peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021-2022 (+0,34 tahun), yang mengindikasikan adanya intervensi kebijakan pendidikan yang lebih kuat dalam periode tersebut. Namun, untuk mencapai RLS ≥ 12 tahun (setara dengan wajib belajar 12 tahun yang ideal), perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemerataan akses, menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

B. HARAPAN LAMA SEKOLAH

Keberhasilan pembangunan pendidikan suatu daerah tidak hanya dapat diukur dari capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS), tetapi juga dari Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS menunjukkan jumlah tahun pendidikan yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak yang baru memasuki dunia pendidikan dengan kata lain, HLS mencerminkan prospek pendidikan di masa depan. Harapan Lama Sekolah Kota Probolinggo dapat tercermin melalui grafik berikut:



Gambar II-54 Harapan Lama Sekolah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Probolinggo menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, dari 12,59 tahun pada 2020 menjadi 19,98 tahun pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan optimisme tinggi terhadap akses pendidikan yang lebih luas di masa depan, yang kemungkinan besar didorong oleh kebijakan wajib belajar 12 tahun, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya pendidikan. Jika dibandingkan dengan HLS Jawa Timur yang hanya meningkat dari 13,19 tahun pada 2020 menjadi 13,43 tahun pada 2024, Kota Probolinggo menunjukkan capaian yang jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Probolinggo memiliki potensi lebih besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang lebih panjang.

C. INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat literasi di suatu masyarakat. Literasi dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup keterampilan dasar lainnya seperti numerasi, literasi digital, dan literasi informasi. Tujuan dari penghitungan IPLM adalah untuk mengukur dan memantau kemajuan dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat serta mengidentifikasi wilayah yang perlu ditingkatkan dalam upaya meningkatkan literasi secara keseluruhan. IPLM juga mencakup upaya pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Adapun data capaian IPLM Kota Probolinggo tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui tabel berikut.

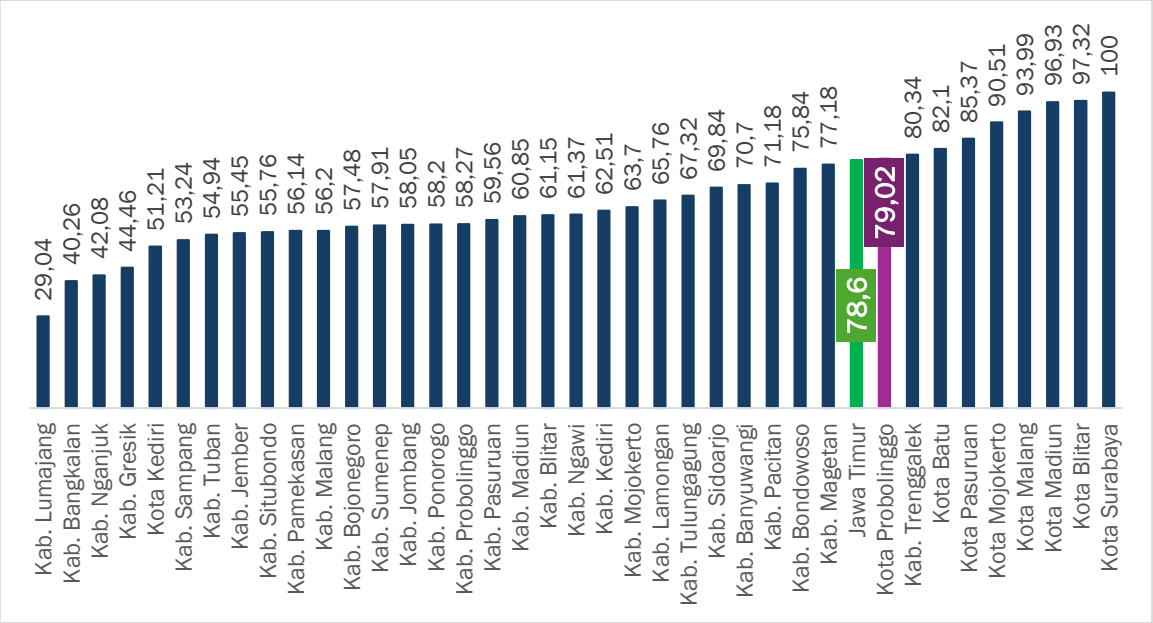
Tabel II.18 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Probolinggo Tahun 2022-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Probolinggo	N/A	14,78	15,98	14,29	79,02
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Jawa Timur	13,44	14,78	15,70	15,79	78,60

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo, 2025

Pada tahun 2020, IPLM di Provinsi Jawa Timur sebesar 13,44, namun IPLM di Kota Probolinggo pada tahun tersebut belum dilakukan perhitungan sehingga datanya nihil. IPLM di Kota Probolinggo mulai dilakukan penghitungan sejak tahun 2021 dengan nilai indeks sebesar 14,78, yang capaian nya sama dengan IPLM Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2022, IPLM mengalami peningkatan capaian di tahun sebesar 15,98 di Kota Probolinggo dan sebesar 15,70 untuk Provinsi Jawa Timur. Tahun 2023 IPLM Kota Probolinggo menjadi 14,29 dan di Provinsi sebesar 15,79. Namun di tahun 2024 menunjukkan terjadi kenaikan yang cukup drastis hingga menjadi 79,02 untuk Kota Probolinggo dan 78,60 untuk Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 ini adanya perubahan metode perhitungan. Capaian IPLM Kota Probolinggo tersebut tidak lepas dari 7 komponen pembentuk indeks yang terdiri atas pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, perpustakaan yang dibina sesuai SNP, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan dan anggota

perpustakaan. Adapun capaian IPLM Kota Probolinggo jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Timur dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar II-55 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2024

Sumber: Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024

Capaian IPLM Kota Probolinggo tahun 2024 jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Timur berada diperingkat 9 dan berada diatas capaian IPLM Provinsi Jawa Timur. Pencapaian IPLM Kota Probolinggo 79,02 tersebut termasuk dalam kategori sedang yang artinya sebagian besar masyarakat Kota Probolinggo memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis meskipun mungkin ada kebutuhan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta literasi.

2.1.3.4 PROFIL DISABILITAS KOTA PROBOLINGGO

Konstitusi kita menjamin bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminatif.

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi. Setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan

yang lebih, berkenaan dengan kekhususannya. Bahkan secara eksplisit undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Meskipun konstitusi dan UU tentang HAM menjamin HAM penyandang disabilitas, tetapi selama ini penyandang disabilitas masih banyak mengalami diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akibat adanya berbagai hambatan dari lingkungan, baik kultural, infrastruktur maupun struktural. Persepsi pemangku kebijakan dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas masih ditempatkan sebagai individu yang bermasalah secara sosial bahkan dianggap sebagai beban sosial. Dalam persepsi seperti itu, penyandang disabilitas diposisikan sebagai obyek belas kasihan saja. Hal ini diperparah juga dengan adanya Stigma negatif tentang Penyandang disabilitas yang dianggap sebagai sebuah aib bahkan juga kutukan dari masa lalu.

Gagasan pembangunan inklusif disabilitas telah menjadi arah bagi kerangka kebijakan Nasional. Paradigma HAM sebagai perpsektif baru menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek pembangunan tercermin dalam berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah pusat. Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tentang hak-hak penyandang disabilitas ditingkat nasional, antara lain Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas beserta aturan turunannya yaitu ada tujuh Peraturan Pemerintah, dua Peraturan Presiden, dan 3 Peraturan Menteri. Dari berbagai regulasi tersebut, sudah diturunkan menjadi rencana induk dan rencana aksi, antara lain Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional dan Daerah Penyandang Disabilitas dan Rencana Aksi Nasional HAM. Semua regulasi dan rencana aksi ini wajib kita kawal agar terimplementasi dengan baik dan tepat sasaran.

Inklusi adalah prinsip yang melibatkan rangkaian proses, hasil, dan semua yang tercantum di dalamnya. Ketika difabel/penyandang disabilitas menjadi subyek yang inklusif, maka bersama mereka, jaminan kepastian akan keterlibatan, pengarusutamaan, serta partisipasi yang penuh makna dalam proses maupun penikmatan hasil pembangunan haruslah nyata. Penyandang disabilitas cenderung memiliki kerentanan yang tinggi untuk mengalami eksklusi dalam pembangunan. Eksklusi tersebut tidak hanya dari kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, tetapi juga kesempatan untuk berpartisipasi aktif

dalam pembangunan. Konsekuensinya, warga penyandang disabilitas cenderung memiliki kualitas hidup lebih rendah daripada warga non-disabilitas: seperti tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih rendah, serta kesempatan kerja dan akses terhadap fasilitas umum yang lebih terbatas. Di samping itu, rumah tangga dengan penyandang disabilitas lebih banyak ditemukan pada kelompok kesejahteraan rendah. Kondisi-kondisi ini pada akhirnya makin memarginalkan peluang penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Mewujudkan pembangunan yang inklusif disabilitas telah menjadi salah satu prinsip kerangka pembangunan global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Penggunaan prinsip pembangunan yang inklusif ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi ketidakmerataan yang terjadi akibat ketidakseimbangan kekuatan, suara dan pengaruh antar individu/antar kelompok (termasuk individu/kelompok penyandang disabilitas) dalam proses pembangunan. Pembangunan inklusif diharapkan dapat memperkuat tidak hanya tatanan ekonomi, tetapi juga tatanan sosial dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan (*United Nations*, 2016).

Tanpa adanya upaya mewujudkan pembangunan inklusif, penyandang disabilitas akan makin termarginalkan yang selanjutnya akan makin memperparah wajah kemiskinan dan ketimpangan. Ini merupakan catatan penting dalam pergerakan disabilitas. Penting untuk mengaitkan dengan pendekatan kapasitas untuk mendorong maksimalnya inklusivitas seperti yang diutarakan oleh Amartha Sen dan Marta Nussbaum (Baylies C, *Disability and the notion of human development: questions of rights and capabilities, Disability and society* Vol.17, Iss. 7, 2002).

Indonesia telah melembagakan pembangunan inklusi disabilitas ke dalam agenda pembangunan nasional, yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini berarti Indonesia berupaya menciptakan pembangunan yang inklusif disabilitas untuk memastikan tidak adanya satu orang pun yang tertinggal dalam proses pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari UU 8 Tahun 2016, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dimaksudkan mendorong proses perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pembangunan yang inklusif, serta

meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam keseluruhan proses pembangunan.

Sejalan dengan kebijakan nasional, Pemerintah Kota Probolinggo menerbitkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo nomer 2 tahun 2024 dengan Penghormatan,Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penyandang disabilitas di daerah, serta mengoptimalkan peran perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam mendukung penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-hak dasar sebagaimana warga negara lainnya. Dukungan politis Wali Kota Probolinggo kepada penyandang disabilitas juga ditunjukkan dengan mengukuhkan Bunda Inklusi yang diharapkan dapat membantu pemerintah Kota Probolinggo mewujudkan pembangunan yang inkusi sehingga bisa mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Probolinggo. Langkah Gubernur ini merupakan salah satu Langkah awal untuk melawan ableism yang terjadi ditengah masyarakat dan memberikan ruang untuk para penyandang disabilitas mengembangkan diri dan berkontribusi dalam pembangunan di Kota Probolinggo.

Di Indonesia, orang dengan kondisi disabilitas dalam konteks regulasi disebutkan sebagai penyandang disabilitas. Sedangkan dalam pergerakan lebih dikenal dengan sebutan difabel. Difabel merupakan orang yang memiliki kemampuan tetapi mengalami kondisi stigmatik biomedik sehingga kemampuannya itu tidak diakui dan tidak dikenali sebagai hal yang melekat dalam dirinya. Dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan peran aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan, diperlukan pendataan yang akurat karena ketersediaan data yang kredibel merupakan unsur krusial dalam perencanaan pembangunan.

Keterbatasan data riil penyandang disabilitas dan organisasi yang menaungi para Penyandang Disabilitas masih menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Probolinggo dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dikarenakan oleh beberapa penyebab utama, antara lain: 1) pendataan melalui survei atau sensus yang dilakukan BPS belum memasukan instrumen terkait identitas Penyandang disabilitas; 2) Dinas Sosial hanya memiliki data disabilitas berat yang masuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penghuni panti disabilitas, dan penerima bantuan sosial. Ketika penyandang disabilitas dipandang sebagai salah satu PMKS, sesungguhnya

merupakan salah satu bentuk paradigma dan bentuk tindakan menjadikan Penyandang disabilitas sebagai obyek dalam pembangunan. Masyarakat juga masih membuat penyandang disabilitas menjadi tidak mampu, karena kondisi tubuh mereka seperti yang dikatakan oleh Oliver bahwa "disabled by society, not by our bodies" (Oliver, 1990, Thomas, 1999, hal.14). Ini membuat kita perlu bekerja keras untuk menghilangkan hambatan di masyarakat berupa stigma negatif yang masih kuat pada penyandang disabilitas melalui pendekatan sosial dan pendekatan berbasis Hak asasi manusia.

Memerdekakan penyandang disabilitas dari stigma masyarakat dengan menunjukkan kapabilitas yang dimiliki dalam organisasi penyandang disabilitas merupakan salah satu alasan sinkronisasi dengan RPJMD Kota Probolinggo. Penyusunan profil disabilitas ini juga diharapkan bisa menjadi akses bagi Penyandang disabilitas dalam membangun kemitraan dengan pemerintah sebagai mitra pembangunan.

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Sosial Kota Probolinggo pada tahun 2022, sekitar 0.63% (1.535) penduduk Kota Probolinggo merupakan penyandang disabilitas. Sebaran penyandang disabili- tas di seluruh wilayah Kota Probolinggo tidak merata. Penyandang disabilitas paling banyak berada di Kecamatan Kanigaran yaitu sebanyak 330 orang dan terendah di kecamatan Kademangan sebanyak 208 orang. Sebaran disabilitas berdasarkan data Dinas Sosial PPPA dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.19 Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penyandang Disabilitas
1.	Kademangan	208
2.	Kanigaran	330
3.	Kedopok	279
4.	Mayangan	332
5.	Wonoasih	312

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, 2022

Berdasarkan ragam atau jenis disabilitas, yang terbanyak adalah disabilitas Daksa, atau orang yang mengalami hambatan dalam fungsi tubuh atau ketidaklengkapan anggota gerak dengan jumlah 720 orang. Ragam disabilitas terbanyak kedua adalah penyandang disabilitas mental yang mengalamai hambatan dalam pengendalian emosi dan kontrol sosial. Secara lengkap, ragam disabilitas berdasarkan data Dinas Sosial PPPA digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel II.20 Ragam/ Jenis Disabilitas di Kota Probolinggo Tahun 2022

No	Jenis	Jumlah Penyandang
1	Disabilitas Netra (Buta)	169
2	Disabilitas Rungu (Tuli)	35
3	Disabilitas Wicara (Bisu)	102
5	Tuna Daksa (disabilitas tubuh): kelumpuhan/ kelainan/ ketidaklengkapan angota gerak	760
6	Tuna Grahita (keterbelakangan mental)	54
7	Tuna Laras (eks-sakit jiwa, mengalami hambatan/gangguan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial)	258
8	Tuna Eks-Sakit Kusta; pernah mengalami sakit kusta dan telah dinyatakan sembuh oleh dokter	1
9	Tuna ganda (fisik-mental); fisik (buta, tuli, bisu-tuli atau tubuh) dan mental (tuna grahitaatau tuna laras)	120
Jumlah		**1.535**

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, 2022

Pada bulan Juni tahun 2022, Kelompok Difabel Kelurahan (KDK) yang ada di 6 (enam) kelurahan yakni; Kelurahan Kanigaran, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kelurahan Curahgrinting, Kelurahan Kademangan, Kelurahan Pilang dan Kelurahan Ketapang melaksanakan pendataan mandiri di masing masing kelurahan dengan menggunakan metode WGQ (Washington Group Question), yakni kumpulan pertanyaan singkat tentang disabilitas yang sengaja dirancang untuk mengidentifikasi orang-orang dengan disabilitas. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menilai apakah orang-orang tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas dasar universal seperti berjalan, melihat, mendengar, kognisi, perawatan diri dan komunikasi. Hasil pendataan pada 6 KDK dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.21 Data Jumlah Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kebonsari Kulon	74	42	116
2.	Kanigaran	69	57	126
3.	Curahgrinting	27	35	62
4.	Pilang	41	31	72
5.	Kademangan	44	40	84
6.	Ketapang	35	19	54
TOTAL		290	224	514

Sumber: Bappeda Litbang, 2025

Tabel II.22 Data Jumlah Disabilitas Berdasarkan Ragam Difabel

No.	Kelurahan	Jumlah
1.	Fisik	238
2.	Intelektual	41
3.	Mental	70
4.	Mental Psikososial	23
5.	Multi Disabilitas	27
6.	Sensorik Netra	65

No.	Kelurahan	Jumlah
7.	Sensorik Tuli	50
TOTAL		514

Sumber: Bappeda Litbang, 2025

Tabel II.23 Data Jumlah Disabilitas Berdasarkan Ragam Difabel dan Jenis Kelamin

No.	Kelurahan	Laki-laki						
		Fisik	Sensorik Netra	Sensorik Tuli	Intelektual	Mental	Mental Psikososial	Mental Disabilitas
1.	Kebonsari Kulon	38	4	1	4	17	4	5
2.	Kanigaran	28	7	10	1	21	0	2
3.	Curahgrinting	16	4	0	4	0	0	3
4.	Pilang	17	4	4	4	3	9	0
5.	Kademangan	17	6	7	9	5	0	0
6.	Ketapang	12	6	3	4	2	6	2

Sumber: Bappeda Litbang, 2025

Tabel II.24 Data Jumlah Disabilitas Berdasarkan Ragam Difabel dan Jenis Kelamin

No.	Kelurahan	Perempuan						
		Fisik	Sensorik Netra	Sensorik Tuli	Intelektual	Mental	Mental Psikososial	Mental Disabilitas
1.	Kebonsari Kulon	25	2	3	1	4	2	5
2.	Kanigaran	23	9	10	0	12	0	3
3.	Curahgrinting	20	10	0	3	0	0	2
4.	Pilang	14	5	6	1	2	2	1
5.	Kademangan	19	6	3	6	3	0	3
6.	Ketapang	9	1	3	4	1	0	1

Sumber: Bappeda Litbang, 2025

Tabel II.25 Data Jumlah Disabilitas Berdasarkan Usia

No.	Jenis Kelamin	Anak (0-18 tahun)	Pemuda (19–24 tahun)	Dewasa (25-60 tahun)	Lansia (≥ 61 tahun)
1.	Laki-laki	34	19	186	51
2.	Perempuan	23	12	110	79
TOTAL		57	31	296	130

Sumber: Bappeda Litbang, 2025

Tabel II.26 Data Jumlah Disabilitas Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	110
2.	Tidak Lulus SD	40
3.	Belum Sekolah	11
4.	SD Sederajat	98
5.	SDLB	10
6.	SMP Sederajat	51
7.	SMPLB	10
8.	SMA Sederajat	90
9.	SMALB	16
10.	Diploma (D1-D3)	6
11.	S1/D4	9
12.	S2	1
13.	Tidak Menyebutkan	62
TOTAL		514

Sumber: Bappeda Litbang, 2025

Data dikompilasi dari 6 kelurahan dampingan Program SOLIDER-INKLUSI yang diimplementasikan oleh SIGAB Indonesia yang bekerja sama dengan PPDiS. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara data disabilitas bersumber dari Dinas Sosial Kota Probolinggo dengan data kompilasi 6 KDK yang dilakukan secara mandiri. Rata-rata jumlah disabilitas di 6 KDK sebanyak 85.6 penyandang disabilitas per kelurahan sedangkan dengan metode penghitungan yang sama, rata-rata jumlah penyandang disabilitas Dinas Sosial PPPA sebanyak 52.9 Penyandang disabilitas per Kelurahan. Selain perbedaan jumlah yang cukup signifikan, hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah kesempatan untuk mendapatkan hak-hak penyandang disabilitas secara layak sebagaimana PERDA Kota Probolinggo nomor 2 tahun 2024.

Kota Probolinggo dalam perkembangan pembangunan Inklusif disabilitas saat ini memiliki sebuah wadah untuk saling berkomunikasi, sharing informasi dan menciptakan peluang untuk bisa mewujudkan ekosistem lingkungan sosial yang inklusif melalui Forum Sahabat Disabilitas. Keanggotaan forum ini di isi oleh unsur Perangkat Daerah, Komunitas Disabilitas dan Masyarakat umum.

Forum Sahabat Disabilitas ini berfungsi juga untuk mempersatukan Komunitas Disabilitas yang ada di Kota Probolinggo, agar bisa seiring sejalan dan berjuang bersama untuk kesetaraan Penyandang Disabilitas. Berikut beberapa kelompok/komunitas disabilitas di Kota Probolinggo.

Tabel II.27 Organisasi Disabilitas di Kota Probolinggo

No.	Nama Komunitas Disabilitas
1.	PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia)
2.	GERKATIN (Gerakan Kesejahteraan Tuli Indonesia)
3.	HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)
4.	PERDISAPRO (Persatuan Disabilitas Kota Probolinggo)
5.	YAMI (Yayasan Amanah Mutiara Indonesia)
6.	DMI (Disabilitas Motorcycle Indonesia)
7.	PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia)

Sumber: Bappeda Litbang, 2025

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

A. ANGKA KETERGANTUNGAN

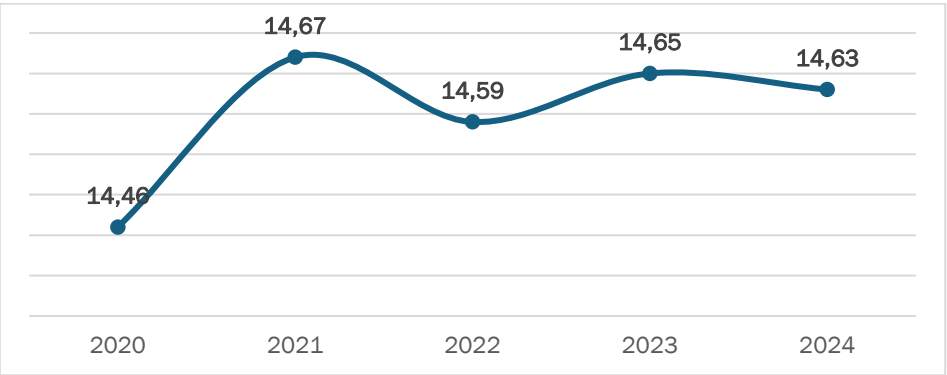
Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah

apakah tergolong daerah dengan golongan maju atau daerah yang tertinggal. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berdasarkan data dari BPS Kota Probolinggo tahun 2021, jumlah penduduk Kota Probolinggo dengan kategori tidak produktif yaitu usia (0-14) sebesar 57.896 dan usia 65 ke atas sebesar 15.448. Sedangkan jumlah penduduk usia produktif yaitu pada rentang umur (15-64) sebesar 166.305. Dari data tersebut dapat diketahui rasio ketergantuan penduduk usia tidak produktif dengan usia produktif di Kota Probolinggo yaitu 63.71%. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 64 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.1.4.2 IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

A. RASIO PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN

Sektor Industri pengolahan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi cerminan penting bagi daya saing ekonomi daerah. Dalam periode tahun 2020 hingga 2024, kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kota Probolinggo mengalami fluktuasi, yang menggambarkan dinamika kondisi industri daerah serta pengaruh berbagai faktor ekonomi. Berikut merupakan grafik PDRB Industri Pengolahan Kota Probolinggo tahun 2020-2024:



Gambar II-56 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Probolinggo, 2025

Pada tahun 2020, rasio PDRB sektor industri pengolahan tercatat sebesar 14,46%. Rasio ini mengalami peningkatan yang cukup baik pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 14,67%, menunjukkan pertumbuhan positif dalam aktivitas industri di Kota Probolinggo. Namun, pada tahun 2022, rasio ini mengalami penurunan menjadi 14,59%, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi atau dampak pasca pandemi COVID-19 yang mempengaruhi produktivitas sektor industri secara umum. Pada tahun 2023, rasio PDRB industri pengolahan kembali menunjukkan hasil positif dengan meningkat menjadi 14,65%. Kenaikan ini mengindikasikan adanya pemulihan aktivitas produksi dan iklim investasi yang kembali membaik, sekaligus mencerminkan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan sektor industri pengolahan. Meski demikian, tantangan yang dihadapi seperti stabilitas bahan baku, teknologi produksi yang belum optimal, serta dinamika pasar regional maupun nasional masih menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

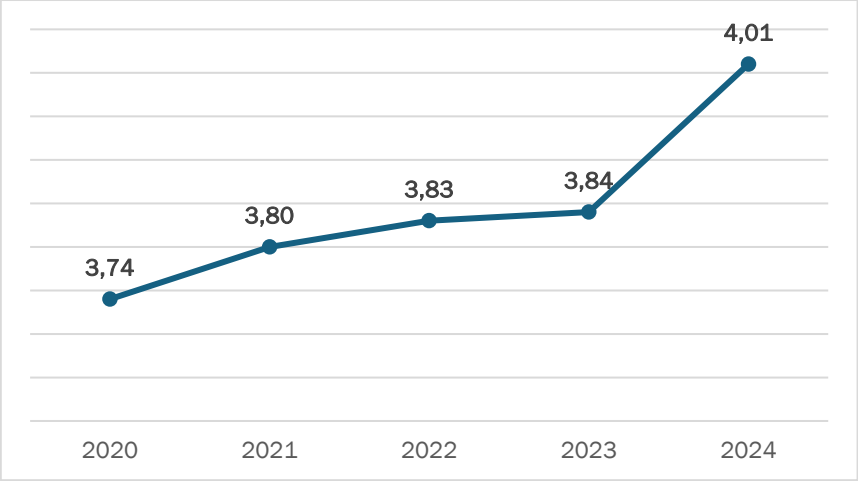
Dengan mempertimbangkan fluktuasi capaian rasio PDRB industri pengolahan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo perlu lebih intensif dalam merancang strategi penguatan sektor industri, terutama melalui peningkatan inovasi teknologi, fasilitasi kemitraan industri lokal dengan pelaku usaha regional dan nasional, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia industri. Strategi ini penting agar kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah dapat terus tumbuh secara stabil dan berkelanjutan di masa mendatang.

B. RASIO PDRB AKOMODASI MAKAN DAN MINUM

Sektor penyedia akomodasi makan dan minum memiliki peranan strategis dalam daya saing perekonomian Kota Probolinggo, terutama sebagai sektor penunjang pariwisata serta aktivitas ekonomi lainnya. Sektor ini mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data periode 2020-2024, terlihat bahwa kontribusi sektor penyedia akomodasi makan dan minum mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pemilihan rasio PDRB antara Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan dan Minum dalam subbab ini didasarkan pada kontribusi kedua sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta perannya dalam mendukung sektor-sektor lainnya. Industri

Pengolahan memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah melalui proses produksi dan distribusi barang, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu, sektor Akomodasi Makan dan Minum merupakan sektor yang tumbuh pesat seiring dengan perkembangan pariwisata dan peningkatan mobilitas masyarakat.

Meskipun sektor transportasi dan pergudangan juga menunjukkan daya saing yang kuat berdasarkan analisis LQ, pemilihan rasio PDRB Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan dan Minum lebih relevan dalam menggambarkan produktivitas ekonomi daerah karena keterkaitan erat kedua sektor tersebut dengan pengembangan infrastruktur, peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja di Kota Probolinggo.



Gambar II-57 PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kota Probolinggo 2020-2024
Sumber: BPS Kota Probolinggo, 2025

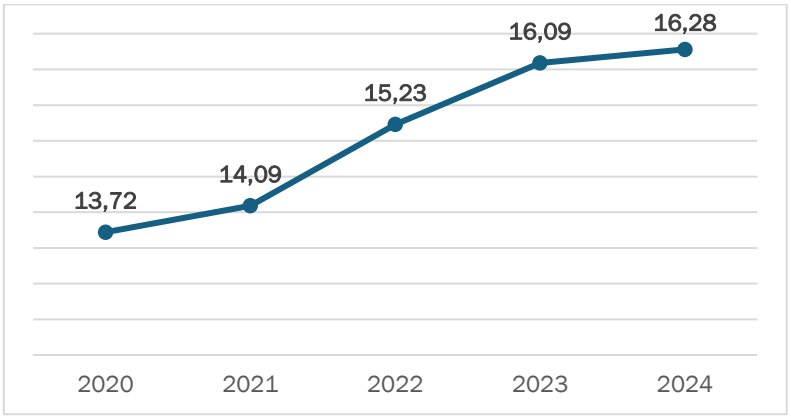
Pada tahun 2020, rasio PDRB dari sektor ini tercatat sebesar 3,74%, kemudian meningkat menjadi 3,80% pada tahun 2021, dan terus meningkat hingga mencapai angka 4,01% pada tahun 2024. Hasil ini menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi di sektor penyedia akomodasi makan dan minum semakin meningkat, yang mencerminkan tumbuhnya aktivitas pariwisata, perdagangan, dan peningkatan konsumsi masyarakat di Kota Probolinggo.

Peningkatan ini juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, yaitu bagaimana menjaga momentum pertumbuhan sekaligus meningkatkan daya saing sektor ini agar mampu bersaing secara regional maupun nasional. Faktor-faktor seperti kualitas layanan, standar kebersihan, promosi wisata kuliner, serta diversifikasi produk dan layanan perlu menjadi perhatian agar pertumbuhan di sektor ini tetap stabil dan mampu memberikan

dampak ekonomi yang lebih luas. Dengan strategi penguatan yang tepat, diharapkan sektor penyedia akomodasi makan dan minum terus menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo di masa mendatang.

C. RASIO PDRB TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

Sektor transportasi dan pergudangan berfungsi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam konteks wilayah yang memiliki akses strategis terhadap jalur perdagangan dan pariwisata. Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas perdagangan, kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi telah berkembang menjadi sektor yang kompetitif dan produktif.



Gambar II-58 Rasio PDRB Transportasi dan Pergudangan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kota Probolinggo, 2025

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor transportasi dan pergudangan di Kota Probolinggo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, Rasio PDRB sektor ini tercatat sebesar 13,72%. Nilai tersebut terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 14,09% pada tahun 2021, kemudian naik signifikan menjadi 15,23% pada tahun 2022. Pertumbuhan ini berlanjut hingga tahun 2023 dengan capaian sebesar 16,09%, dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2024 sebesar 16,28%. Kenaikan ini mencerminkan adanya penguatan aktivitas ekonomi di sektor transportasi dan pergudangan, yang kemungkinan didorong

oleh meningkatnya kebutuhan logistik, distribusi barang, serta mobilitas masyarakat dan sektor usaha di Kota Probolinggo.

D. EKONOMI SYARIAH

Ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan dan merupakan salah satu penggerak utama ekonomi nasional. Ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dengan tujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Di dalam RPJMN 2025-2029 ekonomi syariah ditetapkan sebagai salah satu fokus Program Prioritas Nasional 2 (PN 2), dengan lima intervensi kebijakan yaitu penguatan industri halal dan UMKM halal, penguatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, penguatan ekosistem syariah, penguatan keuangan syariah dan penguatan dana sosial syariah. Arah kebijakan ekonomi syariah diukur melalui indikator Jumlah Produk Tersertifikasi Halal, Aset Perbankan Syariah/PDRB dan Indeks Zakat Nasional Kota. Urgensi indikator ekonomi syariah untuk daerah antara lain :

a. Mendorong implementasi ekonomi syariah secara konkret sampai level Daerah;
b. Memastikan Sinkronisasi Arah Kebijakan Ekonomi Syariah di pusat dengan daerah;
c. Mendorong pencapaian Target Pembangunan Ekonomi Syariah Nasional,
d. Memperkuat Basis Data dan Evaluasi Kinerja Daerah; dan
e. Memperkuat peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang ada di daerah.

Dalam pengembangan ekonomi syariah di Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Perangkat Daerah terkait telah melakukan beberapa hal antara lain :

1) Meluncurkan pasar tradisional dengan konsep syariah di Pasar Kronong, dengan ciri khas terdapat pos ukur ulang untuk memastikan keakuratan timbangan, menjaga kepercayaan pembeli terhadap pedagang; Transaksi nontunai untuk retribusi pasar agar lebih bersih dan akuntabel; Lingkungan bersih dan ramah dengan semangat pasar yang bermartabat, aman, ramah, bersahabat dan berlandaskan syariat islam ;

2) Membentuk Zona Kuliner dan UMKM KHAS (Kuliner Halal Aman dan Sehat Gladak Serang (Glaser), menjadi ikon pemberdayaan UMKM sekaligus destinasi wisata kuliner kreatif yang berstandar digital dan modern serta Halal ;
3) Melakukan Pendampingan UMKM dalam pengajuan Sertifikasi Halal baik yang Sertifikasi Halal *Self Declare* maupun Sertifikasi halal Reguler.
4) Menyediakan sarana Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia dan unggas yang telah tersertifikasi Halal dan sudah ber-NKV (Nomor Kontrol Veteriner);
5) Pengelolaan Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo, yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat muslim terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Salah satu indikator dalam Integrasi Pengembangan Ekonomi Syariah yaitu Indeks Zakat Nasional. Pengelolaan Zakat bertujuan untuk mengelola zakat sebagai sumber dana potensial, agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat muslim terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Pengukuran Indeks Zakat dimaksud diarahkan sebagai upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah.

Indeks Zakat ini diukur oleh Badan Amil Zakat Nasional dengan pengumpulan data dukung dari masing-masing daerah dan baru dihitung sejak Tahun 2024. Untuk Indeks Zakat Nasional Kota Probolinggo Tahun 2024 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 0,04% dan capaian Indeks Zakat Kota Probolinggo sebesar 0,49 dengan interpretasi *stable*/stabil. Badan Amil Zakat Nasional melalui Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Tanggal 6 Agustus 2025 Nomor 12830/D.03/PR.01.02/08/2025 Hal Permohonan Penyelarasan Indikator Outcome Ekonomi Syariah dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029 telah menetapkan Target Indikator dimaksud untuk Tahun 2025-2029. Integrasi target indeks zakat dalam pengembangan ekonomi syariah daerah ditujukan untuk memberikan gambaran obyektif sasaran dari kualitas pengelolaan zakat, baik penerimaan maupun pendistribusian yang mencerminkan peran pemerintah dan Masyarakat.

Selanjutnya indikator dalam Integrasi Pengembangan Ekonomi Syariah yaitu Capaian Sertifikasi Halal serta Pengelolaan Keuangan Syariah. Data Sertifikasi Produk Halal untuk Kota Probolinggo sampai dengan Tahun 2024 serta data perbankan dan lembaga keuangan Syariah Kota Probolinggo sebagaimana data tabel dibawah ini.

Tabel II.28 Data Sertifikasi Produk Halal di Kota Probolinggo sampai dengan Tahun 2024

NO	DATA	REGULER	*SELF DECLARE*	JUMLAH
1	Jumlah Pendaftar	119	2.666	2.785
2	Jumlah Sertifikasi Halal Terbit	110	2.651	2.761
3	Jumlah Produk ber Sertifikasi Halal	763	5.324	6.087
4	Jumlah Pendamping	-	93	93

Sumber: BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), 2025

Tabel II.29 Data Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

JENIS	Jumlah Bank/Lembaga				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bank Syariah - KC	1	1			
Bank Syariah - KCP	2	2	3	3	2
Koperasi Syariah	2	2	2	2	2

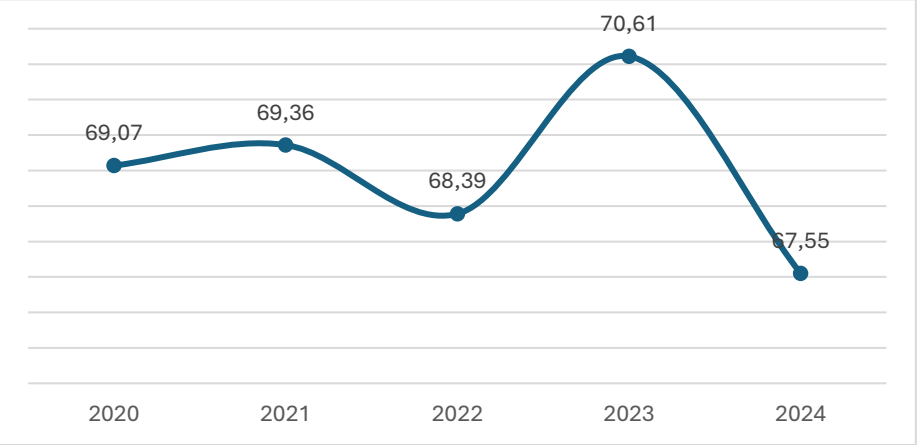
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Probolinggo, 2025

E. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam pasar kerja, baik yang sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Di Kota Probolinggo, indikator ini mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja tercatat sebesar 69,07%, kemudian meningkat menjadi 69,36% di tahun 2021. Namun, pada tahun berikutnya yaitu 2022, angka ini mengalami penurunan ke level 68,39%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja maupun kondisi ekonomi yang berpengaruh pada aktivitas ketenagakerjaan.

Kondisi membaik kembali terjadi pada tahun 2023 dengan kenaikan signifikan mencapai angka tertinggi sebesar 70,61%, yang dapat diinterpretasikan sebagai pulihnya perekonomian dan meningkatnya

ketersediaan lapangan kerja. Akan tetapi, pada tahun 2024, tingkat partisipasi angkatan kerja kembali mengalami penurunan tajam ke angka 67,55%, yang menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk mengevaluasi kondisi pasar kerja lokal, termasuk tantangan dalam penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan serta hambatan yang dihadapi para pencari kerja.

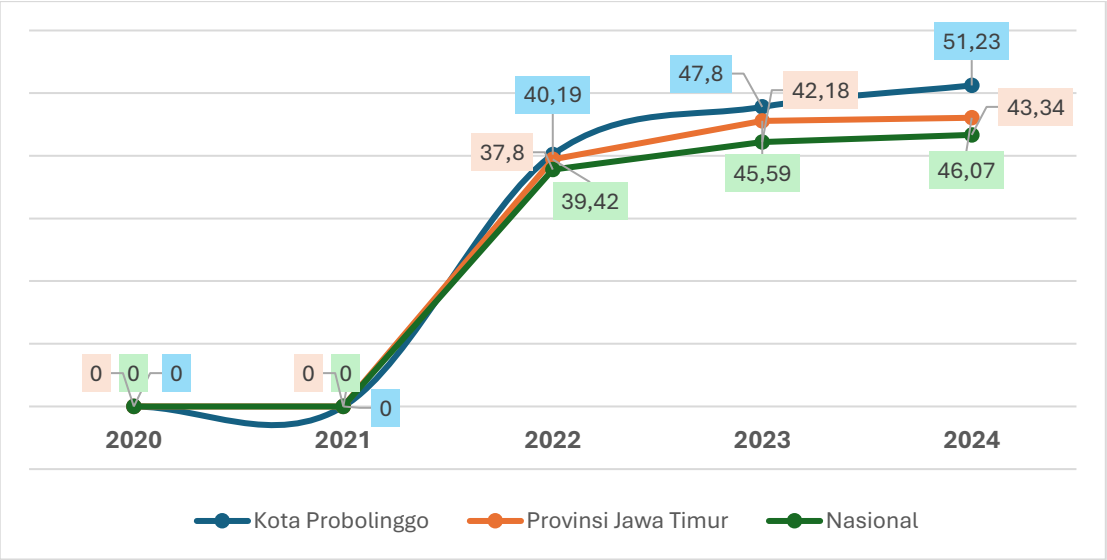


Gambar II-59 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, 2025

Fluktuasi tingkat partisipasi angkatan kerja ini menunjukkan bahwa Kota Probolinggo masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek ketenagakerjaan. Faktor-faktor seperti kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi angkatan kerja, keterbatasan investasi baru, serta potensi mismatch antara kebutuhan industri dan keterampilan tenaga kerja perlu segera diatasi. Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan yang relevan, serta mendorong tumbuhnya sektor ekonomi potensial yang dapat menyerap tenaga kerja secara lebih efektif dan stabil di masa mendatang.

F. INDEKS MASYARAKAT DIGITAL (IMDI)

IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun tingkat pekerjaannya. Pengukuran IMDI telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dan dilaksanakan setiap tahun. 4 pilar IMDI adalah: infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan, pekerjaan. Capaian IMDI Kota Probolinggo sebagaimana data dibawah ini.



Gambar II-60 Indeks Masyarakat Digital (IMDI) Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: https://imdi.sdmdigital.id/

IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun tingkat pekerjaannya. Pengukuran IMDI telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dan dilaksanakan setiap tahun. 4 pilar IMDI adalah: infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan, pekerjaan.

Capaian IMDI Kota Probolinggo mengacu pada rilis data https://imdi.sdmdigital.id/ untuk tahun 2022 sebesar 40,19 meningkat menjadi 47,8 pada tahun 2023 dan 51,23 pada tahun 2024. Capaian IMDI KOta Probolinggo tahun 2024 termasuk klasifikasi tinggi dan di atas capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pilar dengan capaian paling tinggi pada tahun 2024 adalah Pilar 2 Keterampilan Digital (71,09) sedangkan pilar dengan angka kenaikan tertinggi adalah Pilar 4 Pekerjaan sebesar 9,68. Nilai Indeks Masyarakat Digital Kota Probolinggo yang tinggi merupaka indikasi bahwa masyarakat Kota Probolinggo bertransformasi menuju masyarakat "cerdas" yang siap menghadapi disrupsi dan tantangan di era digital. Hal tersebut merupakan pondasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.3 PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

A. INDEKS INFRASTRUKTUR

Indeks Infrastruktur merupakan gambaran obyektif penyediaan infrastruktur yang diukur berdasarkan data-data sekunder. Indeks infrastruktur dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatik dari indeks Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dengan PD Pengampu DPUPR-PKP. Indeks Infrastruktur terdiri dari 2 komponen pembentuk yaitu: persentase ketersediaan layanan dasar dan persentase infrastruktur berkualitas baik. Rumus Indeks Infrastruktur adalah:

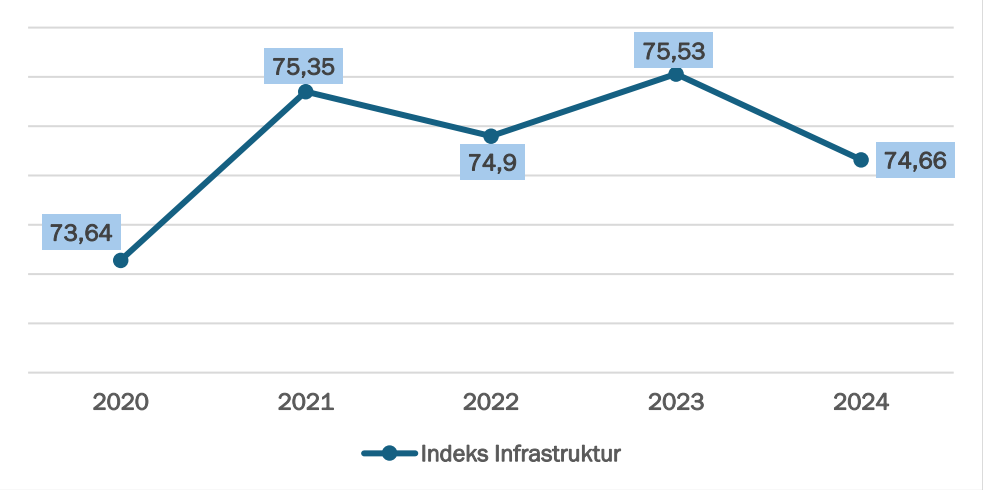
$$\text{Indeks Infrastruktur} = \frac{\{\boldsymbol{Ketersediaan\ Infrastruktur}\ (\%) + \boldsymbol{Kualitas\ Infrastruktur}\ (\%)\}}{\mathbf{2}}$$

Indikator infrastruktur yang dikategorikan dalam 2 aspek yaitu ketersediaan dan kualitas sebagai berikut:

a. Persentase Ketersediaan Infrastruktur sebagai gambaran Fungsi Pelayanan (Daya Layan) Atau *Function Of Availability* yang merupakan perbandingan antara jumlah ketersediaan fasilitas dengan variabel pembanding (seperti jumlah penduduk, standar/jumlah ideal). Ketersediaan infrastruktur memberikan indikasi tingkat ketercukupan pelayanan. Indikator-indikator dalam kateogori ketersediaan adalah:
   - Ketersediaan fasilitas perpengkapan jalan
   - Ketersediaan angkutan umum
   - Cakupan layanan sarana prasarana air limbah
   - Cakupan layanan persampahan
   - Cakupan layanan irigasi
   - Layanan drainase
   - Ketersediaan RTH Publik
   - Cakupan layanan fasilitas kesehatan
   - Cakupan layanan fasilitas pendidikan
   - Cakupan layanan fasilitas perekonomian
   - Layanan perizinan bangunan
b. Kualitas pelayanan, yang pada dasarnya menggambarkan kondisi kualitas fasilitas yang diukur (baik atau buruk) atau dengan kata lain tidak hanya sekedar tersedia, seperti: kondisi jalan dalam kondisi baik dan sedang

dibandingkan dengan panjang jalan total. Indikator-indikator dalam kategori ini meliputi:

- Jaringan jalan dalam kondisi baik
- Layanan air minum berkualitas (perpipaan)
- Jalan lingkungan dalam kondisi baik
- Drainase lingkungan dalam kondisi baik
- Penyelesaian permasalahan pertanahan



Gambar II-61 Capaian Indeks Infrastruktur Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo,2025

Indeks Infrastruktur Kota Probolinggo selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi meskipun dengan kecenderungan berada pada kisaran nilai yang relatif tinggi. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 73,64 dan mengalami peningkatan menjadi 75,35 pada tahun 2021. Meskipun mengalami penurunan menjadi 74,90 pada tahun 2022, kemudian kembali naik menjadi 75,53 di tahun 2023, yang merupakan capaian tertinggi selama periode lima tahun. Namun demikian, pada tahun 2024 kembali turun ke angka 74,66. Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun upaya peningkatan infrastruktur terus dilakukan, masih terdapat dinamika dalam pencapaian kualitas dan ketersediaannya secara seimbang. Lonjakan maupun penurunan nilai indeks dapat diindikasikan oleh sejumlah faktor seperti perubahan kebijakan penganggaran, kondisi teknis pembangunan, serta keberlanjutan program infrastruktur di tingkat perangkat daerah.

Sebagai respons terhadap kebutuhan konektivitas dan pemerataan pembangunan, Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan jaringan jalan

yang terintegrasi dengan sub-sub pusat pertumbuhan sebagaimana diatur dalam dokumen tata ruang. Pusat-pusat pertumbuhan tersebut ditopang oleh sistem jaringan jalan nasional dan kota. Ruas jalan nasional dengan fungsi sebagai jalan arteri primer di Kota Probolinggo meliputi: Jalan Sukarno Hatta (batas kota – Pilang), Jalan Lingkar Utara, Jalan Bromo, Jalan Prof. Hamka, Jalan Ir. Sutami, Jalan KH. Hasan Genggong, Jalan Panglima Sudirman (Randu Pangger – Batas Kota). Selain jalan nasional, konektivitas antar wilayah Kota Probolinggo didukung oleh jaringan jalan kota seperti Jalan Brantas, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Mastrip, Jalan Abdurrahman Wahid. Keberadaan jaringan jalan kota ini medukung aksesibilitas terhadap wilayah-wilayah yang menjadi pemusatan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya mendorong pergerakan barang dan jasa dan memperkuat konektivitas antarwilayah untuk mendukung arah pertumbuhan kota yang lebih merata dan berkelanjutan.

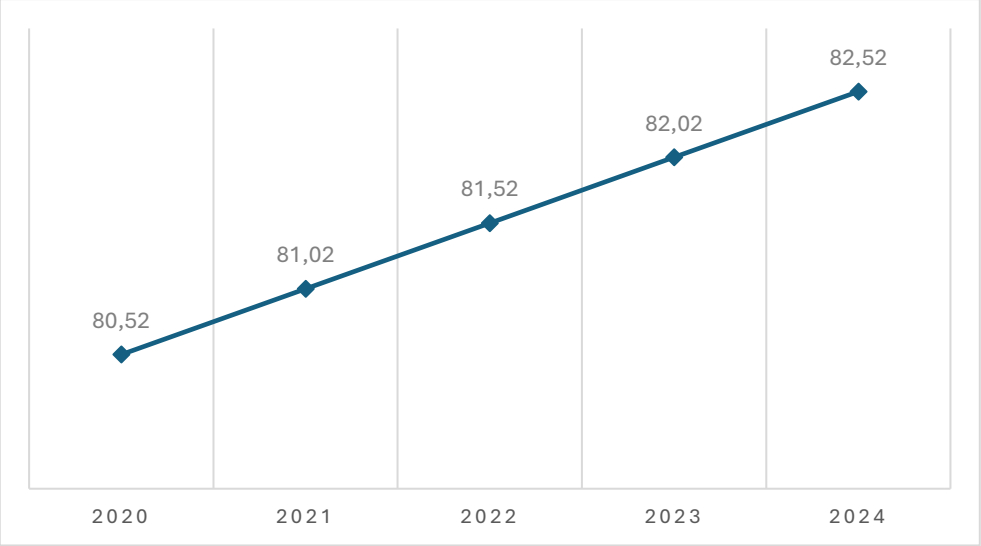
Pemerintah Kota Probolinggo telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, meski masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan ketersediaannya secara optimal. Permasalahan seperti tantangan teknis dalam perencangan serta pemeliharaan infrastruktur, dan peningkatan kebutuhan masyarakat menjadi beberapa isu penting yang harus ditangani secara strategis. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan seperti peningkatan investasi infrastruktur, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta perencanaan pembangunan yang lebih integratif menjadi langkah penting untuk memastikan infrastruktur Kota Probolinggo dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

B. INDEKS KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan indikator strategis yang mencerminkan sejauh mana infrastruktur publik mampu mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah ataupun penyedia layanan lainnya. IKLI mengukur kepuasan masyarakat dari beberapa aspek antara lain kualitas layanan infrastruktur seperti ketersediaan, kualitas, kesesuaian, pemanfaatan, dan kontribusi terhadap perekonomian menjadi satu skor tunggal.

Untuk mengukur IKLI biasanya dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang ada di suatu wilayah. Survei ini melibatkan responden yang merupakan pengguna layanan infrastruktur dan mereka diminta untuk memberikan penilaian terhadap aspek layanan. Hasil survei kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan nilai IKLI.

Di Kota Probolinggo, IKLI menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas layanan dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi yang berperan dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, efisiensi produksi, serta kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang andal dan merata tidak hanya mendukung kehidupan urban, tetapi juga memperkuat wilayah sub-perkotaan dan perdesaan sebagai bagian integral dari sistem pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan IKLI secara konsisten menjadi kunci dalam mendorong daya saing wilayah, terutama dalam konteks pemerataan pembangunan. Kota Probolinggo yang memiliki potensi sektor unggulan seperti perikanan, industri kecil, dan pariwisata, memerlukan layanan infrastruktur yang berkualitas untuk memperkuat rantai pasok, memperluas akses pasar, serta menarik investasi. Berikut capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Probolinggo Tahun 2020-2024:



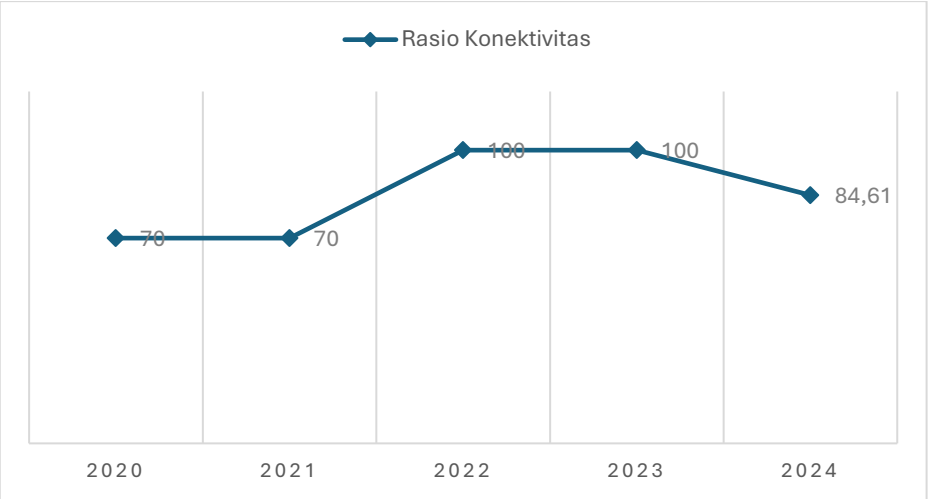
Gambar II-62 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo,2025

Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Probolinggo selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan. Nilai IKLI yang naik secara bertahap dari 80,52 pada tahun 2020

menjadi 82,52 pada tahun 2024 mengindikasikan perbaikan berkelanjutan dalam penyediaan dan aksesibilitas infrastruktur dasar di berbagai sektor. Konsistensi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan infrastruktur secara terencana dan berkelanjutan. Peningkatan IKLI juga menunjukkan semakin tingginya kualitas layanan publik yang mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Peningkatan ini berdampak positif terhadap konektivitas antarwilayah, efisiensi distribusi barang dan jasa, serta penguatan kapasitas wilayah sub-perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan baru. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa investasi infrastruktur telah diarahkan secara tepat untuk memperkuat daya saing daerah dan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif.

C. RASIO KONEKTIVITAS

Rasio konektivitas mencerminkan tingkat keterhubungan antarwilayah, baik secara fisik melalui jaringan transportasi maupun secara digital melalui infrastruktur teknologi informasi. Tingginya rasio konektivitas menjadi fondasi penting dalam mendukung pergerakan barang, jasa, informasi, dan mobilitas penduduk secara efisien. Di wilayah sub perkotaan dan perdesaan, konektivitas yang baik dapat mempercepat aliran komoditas unggulan lokal ke pasar yang lebih luas serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik. Peningkatan rasio konektivitas secara langsung berdampak pada daya saing daerah. Wilayah sub perkotaan dan perdesaan di Kota Probolinggo lebih kompetitif dalam menarik investasi dan memperkuat sektor unggulan lokal, seperti pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga. Berikut adalah data capaian rasio konektivitas Kota Probolinggo:



Gambar II-63 Rasio Konektivitas Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, 2025

Capaian rasio konektivitas Kota Probolinggo selama lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang perlu dicermati secara mendalam. Periode 2020–2021 ditandai dengan capaian yang masih terbatas pada angka 70, kemudian mengalami lonjakan signifikan menjadi 100 pada 2022–2023, yang mencerminkan perbaikan akses dan keterhubungan antarwilayah. Lompatan tersebut mengindikasikan optimalisasi infrastruktur konektivitas dan penyediaan layanan transportasi yang lebih merata. Penurunan capaian rasio konektivitas pada tahun 2024 menjadi 84,61 menandakan adanya tantangan baru dalam menjawab dinamika kebutuhan mobilitas masyarakat. Bertambahnya jumlah kebutuhan trayek menunjukkan meningkatnya permintaan terhadap aksesibilitas yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh sistem yang ada. Kondisi ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi, baik dari sisi layanan, trayek maupun integrasi moda transportasi.

2.1.4.4 GAMBARAN UMUM EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA PROBOLINGGO

- **SUMBERDAYA DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DAERAH**

Sumber Daya manusia Iptek di Kota Probolinggo adalah periset yang bekerja pada lembaga riset dan perguruan tinggi yang berada di wilayah Kota Probolinggo sebagai mitra Pemerintah Daerah, termasuk SDM yang bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Probolinggo. Sampai dengan tahun 2024, jumlah pejabat fungsional di Bappeda Litbang Kota Probolinggo sebanyak 63 orang, yang terdiri

dari fungsional perencana 25 orang, fungsional peneliti 3 orang, fungsional perekayasa 1 orang dan fungsional analis kebijakan 34 orang. Selain itu, SDM IPTEK di Kota Probolinggo juga terdiri dari seluruh dosen perguruan tinggi se- Kota Probolinggo, dimana terdapat dua perguruan tinggi di Kota Probolinggo yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bayuangga dan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo.

Infrastruktur riset dan inovasi di Kota Probolinggo merupakan infrastruktur fisik sebagai sarana penunjang perkembangan riset dan inovasi yang berbentuk fisik diantaranya adalah (1) Ruang Publik Kreatif (RPK) atau Ruang Terbuka Hijau; (2) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT); Laboratorium yang ada dibeberapa perangkat daerah; (4) Museum.

➢ PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH YANG PERNAH DILAKSANAKAN

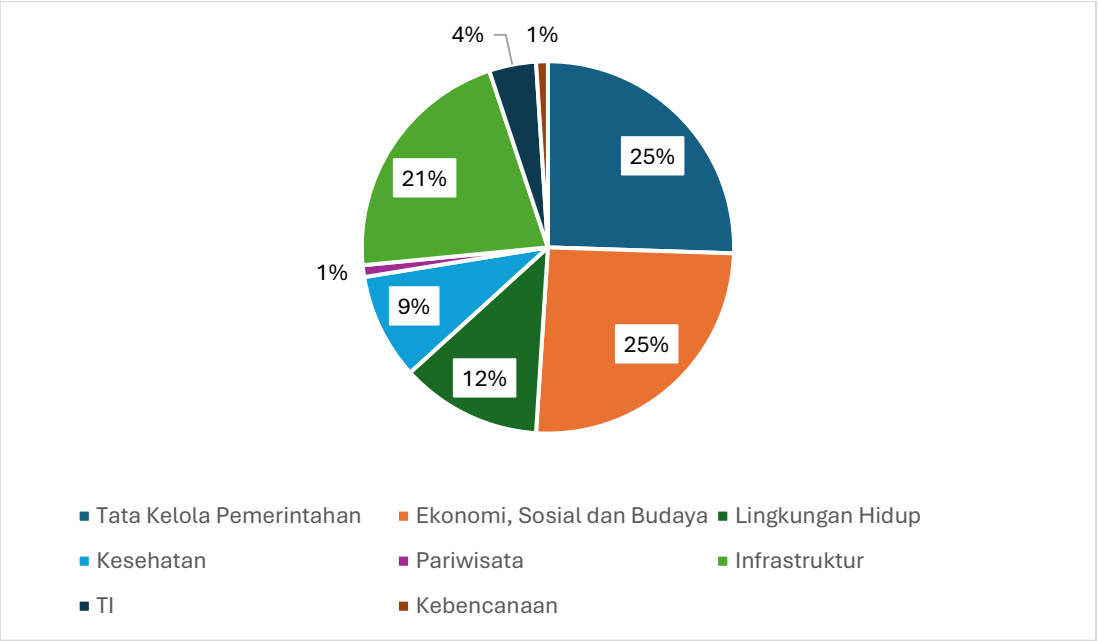
1. Pengalaman dalam pelaksana kegiatan/kajian riset.

Dari tahun 2020-2024, kegiatan/kajian riset yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo mengalami perkembangan yang fluktuatif. Berdasarkan data hasil kelitbangan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 8 kajian, tahun 2021 terdapat 20 kajian, tahun 2022 terdapat 15 kajian, tahun 2023 terdapat 11 kajian riset, dan tahun 2024 terdapat 13 kajian riset yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

Tabel II.30 Perkembangan Jumlah Jenis Penelitian Tahun 2020-2024

No.	Jenis Penelitian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tata Kelola Pemerintahan	-	4	5	3	5
2.	Ekonomi, Sosial dan Budaya	3	6	1	2	5
3.	Lingkungan Hidup	-	3	3	2	-
4.	Kesehatan	-	-	4	-	2
5.	Pariwisata	-	-	-	1	-
6.	Infrastruktur	5	3	2	3	1
7.	TI	-	3	-	-	-
8.	Kebencanaan	-	1	-	-	-
	Total	8	20	15	11	13

Sumber: Bappedalitbang Kota Probolinggo, 2025



Gambar II-64 Hasil Penelitian berdasarkan Bidang Urusan di Kota Probolinggo
Sumber: Bappedalitbang Kota Probolinggo, 2025

2. Kerjasama Riset dan Inovasi Daerah

Kerja sama riset dan inovasi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Probolinggo dan atau Bappedalitbang dengan Universitas atau Perguruan Tinggi atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024 berdasarkan data dari bagian Pemerintahan. Tahun 2020, terdapat 3 kerjasama; tahun 2022 dan 2023, terdapat 13 kerjasama; tahun 2024, terdapat 21 kerjasama. Kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Universitas atau Perguruan Tinggi atau Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota bertujuan pada kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan potensi daerah, dan replika inovasi daerah.

3. Inovasi Daerah

Berdasarkan Perwali Kota Probolinggo No 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Inovasi Daerah, jumlah inovasi daerah Kota Probolinggo pada tahun 2024 mencapai 202 inovasi. Sedangkan sejak tahun 2019, Pemerintah Kota Probolinggo secara aktif melaporkan penerapan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri, melalui pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh BSKDN Kemendagri (eks-Badan Litbang Kemendagri). Dengan jumlah inovasi yang dilaporkan dalam IGA (*Innovation Government Award*) mengalami

peningkatan dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020: 37 inovasi, tahun 2021 : 51 inovasi, tahun 2022: 58 inovasi, tahun 2023: 75 inovasi dan tahun 2024: 110 inovasi.

Capaian nilai indeks inovasi daerah (IID) di Kota Probolinggo pada tahun 2021 sebesar 61,51 dengan predikat sangat inovatif dan pada tahun 2022, angka ini turun menjadi 56,98 dengan predikat inovatif saja. Pada tahun 2023 nilai indeks inovasi daerah (IID) kembali mengalami peningkatan menjadi 64,01 basis point dengan predikat sangat inovatif dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 66,38 dengan predikat yang sangat inovatif. Peningkatan nilai indeks inovasi daerah (IID) ini, mengindikasikan bahwa Kota Probolinggo memiliki ekosistem inovasi yang kondusif untuk mendukung lahirnya inovasi baru. Dukungan tersebut terwujud dengan adanya regulasi, sistem pembinaan inovasi yang terstruktur, adaptif terhadap teknologi, serta adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat. Sehingga proses monitoring dan evaluasi berjalan lebih komperhensif dan fokus pada pengembangan inovasi di tahun-tahun mendatang.

Selain itu, Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka membangun ekosistem inovasi daerah, yang salah satunya adalah peningkatan Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID). Namun demikian, berbagai kendala dan tantangan masih terjadi, sehingga capaian masih belum maksimal. Pemerintah Kota Probolinggo, terus berupaya meningkatkan capaian Skor Nilai IID setiap tahun. Salah satu upaya, Pemerintah Kota Probolinggo untuk mendorong inovasi, yakni adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan, yakni:

- Perwali Kota Probolinggo Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Inovasi Daerah
- Surat Edaran Wali Kota Probolinggo Nomor 070/4795/425.201/2021 Tentang Inovasi Daerah
- Perwali Kota Probolinggo Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah.

Tabel II.31 Jumlah dan Peringkat Inovasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Inovasi Terlapor di IGA	37	51	58	75	110
Jumlah inovasi yang ditetapkan SK	0	0	137	150	149
Skor	59	61,51	56,98	64,01	66,38
Rangking Indonesia	72	8	25	13	24
Rangking Jawa Timur	7	3	3	2	5
Kategori	Kurang inovatif	Sangat inovatif	Inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	59	61,51	56,98	64,01	66,38

Sumber: Bappedalitbang Kota Probolinggo, 2025

- **ANGGARAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Berdasarkan data yang diperoleh menunjkkan bahwa persentasi anggaran Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo mengalami fluktuatif dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, anggaran riset dan inovasi menunjukan persentase 0,58% dari APBD Kota Probolinggo mengalami peningkatan di Tahun 2021, kemudian mengalami penurunan di Tahun 2022-2024. Pada tahun 2024, persentase anggaran riset dan inovasi hanya sebesar 0,33% dari APBD Kota Probolinggo Tahun 2024. Detail persentase anggaran riset dan inovasi daerah Kota Probolinggo sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel II.32 Persentase Anggaran Riset dan Inovasi Daerah Terhadap APBD Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Anggaran Riset dan Inovasi	Total APBD Kota Probolinggo	Persentase (%)
1.	2020	6.296.137.500,00	1.082.004.882.500,62	0,58%
2.	2021	13.930.916.360	1.113.315.247.534,00	1,25%
3.	2022	12.280.212.360	1.263.103.482.080,00	0,97%
4.	2023	6.488.485.646	1.116.603.394.169,00	0,58%
5.	2024	3.655.346.733	1.099.642.611.061,00	0,33%

Sumber: Bappedalitbang Kota Probolinggo, 2025

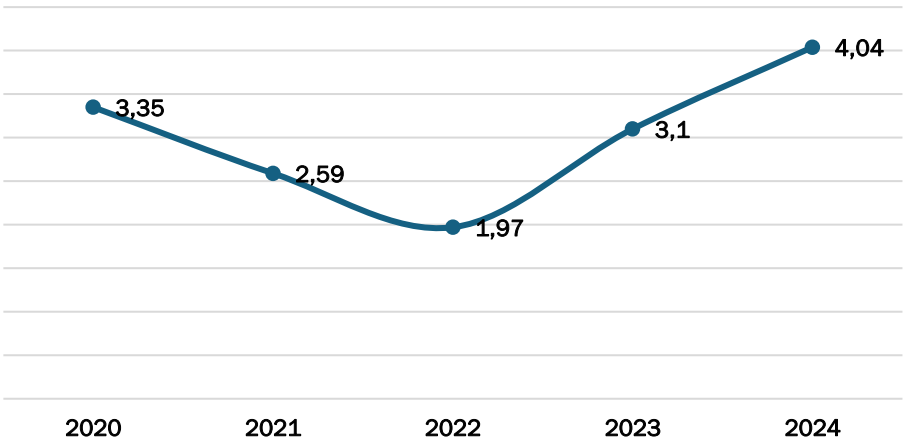
Kemampuan riset dan inovasi Kota Probolinggo dalam melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) masih perlu diperkuat agar dapat mendukung perencanaanWS dan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat memperkuat kapasitas Kota Probolinggo dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, seperti komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan secara akuntabel dan partisipatif, serta adanya struktur birokrasi yang telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Untuk meningkatkan efektivitas kajian kebijakan, diperlukan penguatan dalam aspek pengumpulan dan analisis data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data kebijakan.

2.1.5 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.5.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

A. INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Probolinggo memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital dan pengelolaan informasi pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Implementasi SPBE bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indeks SPBE menjadi alat ukur utama dalam menilai tingkat kematangan dan efektivitas penerapan sistem digital dalam layanan pemerintahan. Peningkatan indeks ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mempercepat digitalisasi layanan, mengoptimalkan sistem informasi manajemen, serta meningkatkan keterpaduan antarinstansi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.



Gambar II-65 Indeks SPBE Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, 2025

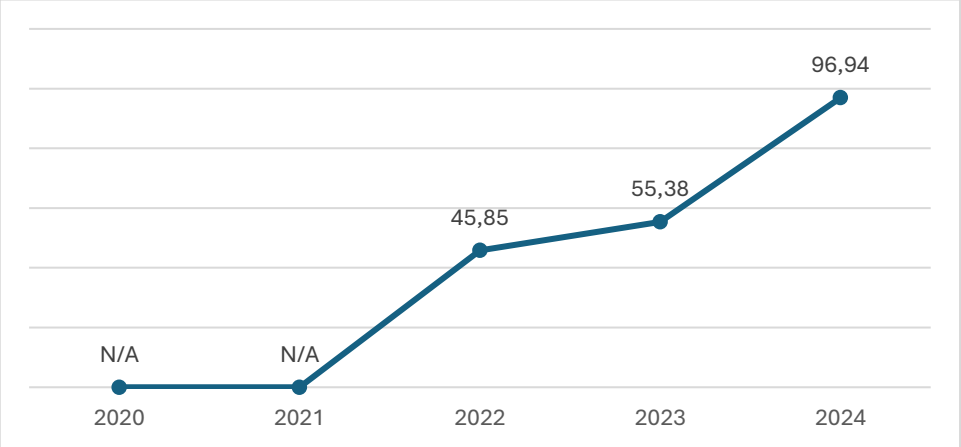
Berdasarkan data Indeks SPBE Kota Probolinggo tahun 2020-2024, terlihat adanya capaian fluktuatif dalam implementasi transformasi digital. Pada tahun 2020, indeks ini berada di angka 3,35, mengalami penurunan ke 2,59 pada tahun 2021, dan kembali turun ke titik terendah 1,97 di tahun 2022. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penguatan infrastruktur digital, integrasi sistem, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi informasi. Namun, upaya pemulihan dilakukan secara signifikan pada tahun 2023 dengan peningkatan indeks ke 3,1, dan terus meningkat hingga

mencapai 4,04 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan e-government, peningkatan kapabilitas layanan digital, serta penguatan kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kenaikan SPBE secara signifikan pada tahun 2024 dikarenakan mencapai 112% dari target 3,60 pada tahun 2024 kenaikan pada domain; Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE dan Manajemen SPBE. Domain Layanan SPBE merupakan domain yang signifikan capaiannya dari 3 (tiga) domain yang lain, yakni sebesar 4,63. Hal ini merupakan dukungan dari aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Meskipun terdapat kemajuan dalam pengembangan layanan digital pemerintahan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan transformasi digital. Salah satu kendala utama adalah ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta kesiapan aparatur dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Selain itu, interoperabilitas sistem antarperangkat daerah juga menjadi faktor penting dalam memastikan integrasi data dan layanan yang lebih efektif. Dengan semakin meningkatnya nilai indeks pada tahun 2023 dan 2024, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah perbaikan telah berhasil diterapkan, termasuk penguatan regulasi SPBE, pengembangan aplikasi layanan publik berbasis digital, serta peningkatan literasi digital bagi aparatur pemerintah. terdapat beberapa tantangan utama yang masih harus dihadapi oleh Diskominfo Kota Probolinggo dalam mengoptimalkan SPBE. Salah satunya adalah memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya sebatas pada peningkatan sistem teknologi, tetapi juga diiringi dengan perubahan budaya kerja birokrasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berorientasi pada data. Selain itu, aspek keamanan siber juga menjadi perhatian penting dalam menjamin kelangsungan dan keandalan sistem elektronik yang digunakan dalam pemerintahan. Dengan strategi yang lebih terarah dan investasi yang berkelanjutan dalam penguatan infrastruktur digital, Diskominfo Kota Probolinggo diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas SPBE dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan inovatif.

B. INDEKS REFORMASI HUKUM

Reformasi hukum merupakan aspek krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan akuntabel. Upaya reformasi hukum bertujuan untuk membangun sistem hukum yang transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Di tingkat daerah, reformasi hukum menjadi instrumen penting dalam memperkuat integritas birokrasi dan mendukung efektivitas pelayanan publik. Kota Probolinggo sebagai bagian dari upaya nasional dalam memperkuat sistem hukum, telah mulai mengintegrasikan indikator reformasi hukum dalam kerangka evaluasi kinerja pembangunan daerah.



Gambar II-66 Indeks Reformasi Hukum Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Kemenkumham, 2025

Capaian Indeks Reformasi Hukum Kota Probolinggo pada periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian indeks reformasi hukum masih belum dihitung yang dapat mengindikasikan belum adanya pengukuran atau inisiatif reformasi hukum yang terdokumentasi secara sistematis. Namun, mulai tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan dengan capaian sebesar 45,85 poin, yang menunjukkan dimulainya implementasi kebijakan dan program terkait reformasi hukum. Lalu meningkat pada tahun 2023 menjadi 55,38 poin, dan mengalami peningkatan tajam pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 96,94 poin. Peningkatan ini mengindikasikan adanya komitmen kuat dari Pemerintah Kota Probolinggo dalam memperbaiki sistem hukum, penyederhanaan regulasi, serta memperkuat kelembagaan hukum di tingkat daerah.

Meski capaian reformasi hukum menunjukkan kemajuan signifikan, Kota Probolinggo masih menghadapi beberapa tantangan mendasar. Pertama, masih terdapat tumpang tindih regulasi antar perangkat daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga menimbulkan hambatan birokrasi dalam implementasi program pembangunan. Kedua, literasi hukum masyarakat dan aparatur di tingkat kelurahan masih rendah, yang berdampak pada lemahnya pemanfaatan akses keadilan. Ketiga, mekanisme penyusunan regulasi belum sepenuhnya berbasis *evidence-based policy*, serta minimnya pelibatan masyarakat dan kelompok rentan dalam proses penyusunan kebijakan. Selain itu, penguatan fungsi dokumentasi dan pemantauan peraturan daerah juga masih menjadi pekerjaan rumah, termasuk sistem informasi peraturan yang belum optimal diakses secara daring.

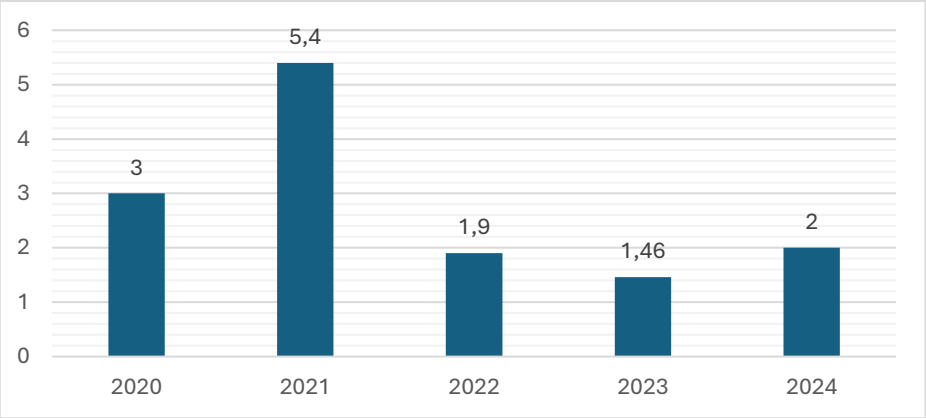
2.1.5.2 HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

A. PERSENTASE PENURUNAN KASUS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase penurunan kasus ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat di suatu daerah. Penurunan kasus ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan terhadap hukum, efektivitas penegakan aturan, serta keberhasilan program pencegahan konflik dan kriminalitas. Ketika angka gangguan trantib menurun secara konsisten, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya norma hukum dan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap regulasi yang berlaku.

Penurunan kasus ketenteraman dan ketertiban umum berkaitan erat dengan hukum yang berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial. Hukum yang ditegakkan secara adil, tanpa diskriminasi, akan menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum, sehingga masyarakat lebih cenderung untuk mematuhi aturan dan berkontribusi terhadap keamanan. Keamanan nasional yang kuat juga bergantung pada stabilitas sosial di tingkat daerah, karena ketertiban yang terjaga akan mengurangi potensi ancaman terhadap kedaulatan negara. Sementara itu, dalam demokrasi substansial, ketertiban bukan hanya hasil dari penegakan hukum yang represif, tetapi juga dari adanya ruang partisipasi publik yang sehat,

di mana masyarakat dapat mengekspresikan hak-haknya tanpa menimbulkan gangguan sosial. Adapun capaian indikator persentase penurunan kasus ketenteraman dan ketertiban umum Kota Probolinggo secara rinci terlihat pada grafik berikut:



Gambar II-67 Persentase Penurunan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2020-2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, 2025

Persentase penurunan kasus ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di Kota Probolinggo mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2020 dan 2021 persentasenya cukup tinggi sebesar 3% dan 5,4% yang menunjukkan tingginya kasus ketentraman dan ketertiban umum di Kota Probolinggo. Pada 2022, persentasenya menurun mencapai 1,9%, kemudian turun menjadi 1,46% di 2023, sebelum kembali meningkat ke 2% pada 2024. Penurunan pada 2023 menunjukkan adanya keberhasilan dalam upaya menciptakan kondisi yang lebih kondusif, yang kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan efektivitas penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap aturan, serta optimalisasi peran aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial. Namun, kenaikan kembali pada 2024 mengindikasikan adanya faktor-faktor baru yang berkontribusi terhadap peningkatan gangguan ketertiban, seperti dinamika sosial-politik, faktor ekonomi, atau perubahan pola kejahatan dan pelanggaran hukum di masyarakat.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa menjaga ketenteraman dan ketertiban umum bukanlah tugas yang bisa selesai dalam satu periode, melainkan memerlukan strategi berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan kondisi sosial. Kenaikan pada 2024 perlu direspons dengan langkah-langkah strategis, seperti penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat,

peningkatan program pencegahan konflik, serta penerapan kebijakan yang lebih inklusif dalam menangani faktor pemicu ketidakstabilan.

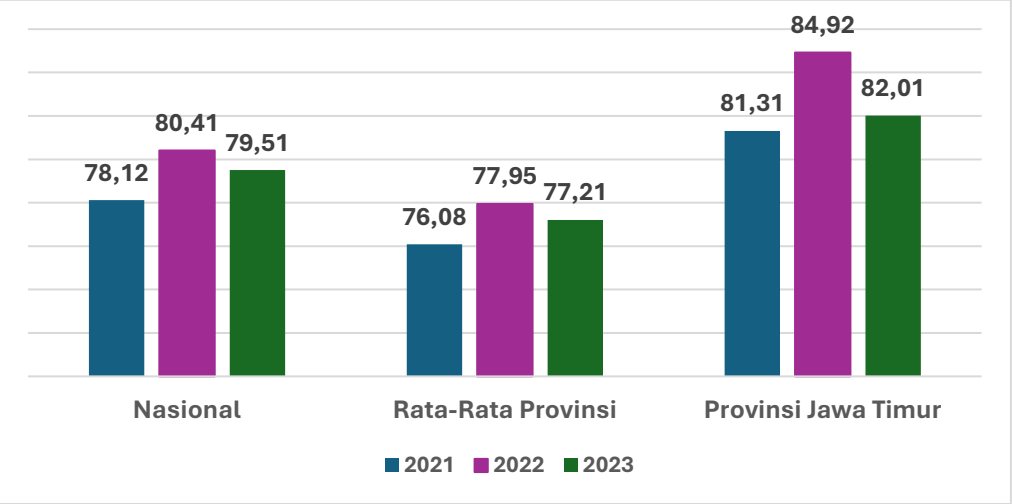
B. INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah sebagai bagian dari daya saing global.Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik agar dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat atau yang dikenal dengan Indeks Demokrasi Indonesia. Kualitas demokrasi diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi, diantaranya adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*), hal tersebut menunjukkan bahwa penilaian indeks tersebut tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Adanya demokrasi yang sehat merupakan harapan seluruh stakeholder karena dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan membuka ruang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sehingga dapat terwujud tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Capaian indeks demokrasi Indonesia dalam tiga tahun terakhir telah dirilis oleh Lembaga internasional dengan trend yang mengalami penurunan. Berdasarkan data dari V-Dem Democracy Index 2024, ranking Indonesia terjun bebas dari 79 ke 87 di tahun 2024 dengan penurunan skornya 0,43 menjadi 0,36 bahkan lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste. Hal yang sama ditunjukkan oleh Freedom House, sebagai salah satu Lembaga pemerhati demokrasi, bahwa skor indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 pada tahun 2019 menjadi 57 pada tahun 2024. Penyebab Utama turunnya kualitas demokrasi dari lembaga internasional pada tahun 2024 adalah isu politik dinasti yang dianggap memberikan intervensi pada Lembaga pemerintahan.

Badan Pusat Statistik telah merilis bahwa Indeks Demokrasi Indonesia pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2022 Indeks Demokrasi nasional berada di angka 80,41 menurun menjadi 79,51 di tahun 2023. Hal tersebut juga terjadi pada rata-rata indeks demokrasi provinsi termasuk

capaian untuk Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan Indeks Demokrasi perlu komitmen seluruh stakeholder pembangunan untuk menjunjung asas kebebasan berpendapat, memperhatikan aspek kesetaraan dalam perumusan dan implementasi kebijakan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara demokrasi. Secara detail perbandingan capaian Indeks Demokrasi dapat dilihat pada grafis berikut.



Gambar II-68 Indeks Demokrasi Indonesia, Rata-Rata Provinsi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

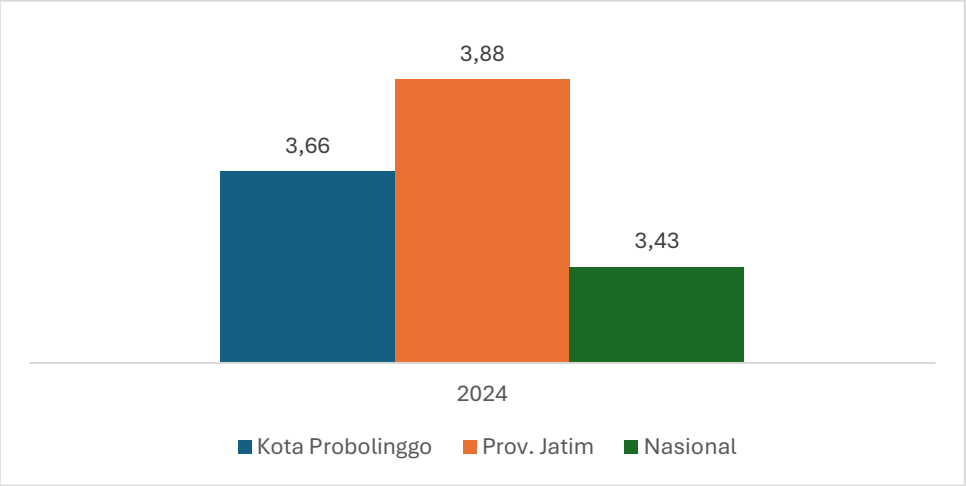
2.1.5.3 KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN

A. INDEKS DAYA SAING DAERAH

Dalam menunjang pembangunan daerah berkelanjutan yang semakin dinamis diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara terarah dan terpadu. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Indeks Daya Saing Daerah merupakan gambaran tingkat produktivitas, perkembangan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah.

Daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja, tetapi daya saing tersebut diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup rakyat yang nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat di suatu daerah.

Faktor-faktor pendorong daya saing, Kemampuan suatu wilayah dalam menetapkan kebijakan ekonomi yang difokuskan untuk dapat mendorong transformasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi regional turut menjadi penentu daya saing. transformasi dan akselerasi pembangunan haruslah bertumpu pada peningkatan kapasitas SDM, peningkatan produktivitas, penguatan kapasitas IPTEK, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata, serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan akhir meningkatkan daya saing daerah.



Gambar II-69 Perbandingan Capian Indeks Daya Saing Daerah Kota Probolinggo dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024
Sumber: BRIN, 2025

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengukuran indeks daya saing daerah menyebutkan bahwa terdapat empat komponen utama dalam pengukuran skor Indeks Daya Saing Daerah yakni: Pertama, Lingkungan Pendukung; Kedua, Pasar; Ketiga, Sumber Daya Manusia; dan Keempat, Ekosistem Inovasi. Berdasarkan hasil pengukuran skor indeks Pada tahun 2024, capaian Indeks Daya Saing Daerah Kota Probolinggo tercatat sebesar 3,66. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 3,43, tetapi masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur yang mencapai 3,88. Perbedaan ini menunjukkan bahwa daya saing Kota Probolinggo relatif baik dalam konteks nasional, tetapi masih terdapat ruang untuk peningkatan agar bisa sejajar atau melampaui capaian tingkat provinsi.

Beberapa faktor yang memengaruhi indeks daya saing daerah meliputi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, inovasi, regulasi, serta kemudahan investasi. Diperlukan strategi yang berfokus pada penguatan kebijakan yang

mendukung iklim investasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pengembangan infrastruktur yang lebih memadai. Tahapan pencapaian kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan daerah perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan daya saing daerah sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan dan dampaknya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

2.1.5.4 KINERJA URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1) PENDIDIKAN

Penyelenggaraan pelayanan urusan pendidikan di Kota Probolinggo merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. Sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terjadi perubahan dalam pengelolaan urusan pendidikan. Ada pembatasan kewenangan di setiap level pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pendidikan. Pemerintah Kota Probolinggo berfokus pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar (SD dan SMP), serta pendidikan kesetaraan. Di dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan juga terdapat standar pelayanan minimal yang harus diakomodir oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan arahan Kemendagri melalui Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Pelayanan Minimal dan Permendikbud Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Adapun capaian SPM urusan pendidikan Kota Probolinggo dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel II.33 Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022-2024

INDIKATOR SPM PENDIDIKAN	SATUAN	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	95,07	95,07	96,55	96,33	97,44
Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	96,01	96,03	100	90,80	78,85
Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	94,83	87,25	97,64	100,30	92,94

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2025

Secara umum capaian pelayanan SPM urusan pendidikan di Kota Probolinggo menunjukkan tren yang positif namun setiap tahunnya hanya satu dari tiga pelayanan SPM yang mencapai target 100%. Jenis layanan pendidikan dasar mengalami peningkatan di tahun 2021-2022 namun mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 0,22% dan selama tiga tahun terakhir belum memenuhi target 100%. Pada pelayanan pendidikan kesetaraan mencapai target di tahun 2022 sebesar 100% namun menurun di tahun 2023 menjadi 90,80%. Sedangkan pada pelayanan pendidikan anak usia dini menunjukkan pertumbuhan yang positif selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dan perbaikan dalam sektor pendidikan namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi semua standar yang ditetapkan.

Bidang Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang mampu berinovasi, berkreasi dan memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Dalam 5 tahun terakhir capaian kinerja layanan Pendidikan telah mengalami beberapa peningkatan dan juga penurunan. Adapun indikator pelayanan urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan terdiri pendidikan dasar, pendidikan menengah, fasilitas pendidikan, angka putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan yang secara rinci capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.34 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	85,75	74,06	82,85	84,35	84,35
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	102,27	102,17	89,05	88,77	89,83
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	115,68	115,48	106,16	108,36	107,77
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	96,47	96,87	84,45	85,67	85,79
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	92,36	94,9	88,07	91,79	87,37
3	Angka Partisispasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100	97,59	99,46	99,88	99,67
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	94,73	87,6	96,93	99,28	99,12
4	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah (Pendidikan Dasar)	Rasio	0,0043	0,0044	0,0046	0,00467	0,00459
5	Rasio Guru/Murid (Pendidikan Dasar)	Rasio	1:17	1:16	1:20	1:20	1:27

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Gedung SD/MI dalam kondisi baik	Unit	112	112	114	114	115
	Gedung SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik	Unit	46	47	49	49	49
7	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,02	0	0,02	0,05	0,04
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,02	n/a	0,06	0,31	0
8	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	100	100	100
9	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	%	116,27	113,26	104,11	100	100
	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	124,38	118,86	112,86	100	100
10	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB yang bersertifikat pendidik	%	51,40	51,93	46,02	46,50	56,58
11	Skor Kemampuan Literasi SD	Skor	n/a	56,01	57,89	64,84	66,09
	Skor Kemampuan Literasi SMP	Skor	n/a	69,53	69,87	75,00	76,90
12	Skor Kemampuan Numerasi SD	Skor	n/a	36,78	41,89	48,11	55,61
	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Skor	n/a	69,53	69,87	64,80	65,87
13	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun) PAUD	%	n/a	78,54	73,64	89,64	75,76
	Angka Partisipasi Sekolah (7-15 tahun)	%	n/a	98,60	99,69	99,52	98,48
	Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan	%	n/a	6,90	8,52	33,43	32,72
14	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	n/a	53,20	56,16	54,61	59,00
	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	n/a	53,20	56,58	57,30	57,89
15	Iklim Keamanan SD	Nilai	n/a	67,91	69,52	71,84	74,73
	Iklim Keamanan SMP	Nilai	n/a	67,91	68,10	69,37	70,36
16	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	n/a	60,61	69,66	73,58	74,56
	Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	n/a	60,61	67,55	73,91	70,50
17	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	n/a	82,46	71,08	70,83	71,17
18	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	%	n/a	72,78	76,75	85,71	85,72
19	Indeks Distribusi Guru	Indeks	N/A	0,48	0,70	0,42	0,59
20	Persentase Anak Tidak Sekolah Usia 5-6 tahun	%	N/A	N/A	N/A	N/A	0
21	Persentase Anak Tidak Sekolah Usia 7-15 tahun	%	N/A	N/A	N/A	N/A	2,51

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2025

Data tabel diatas menunjukkan capaian indikator kinerja urusan pendidikan selama 5 tahun terakhir yang secara umum memiliki capaian yang fluktuatif. Adanya penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan serta masih tingginya angka kemiskinan di Kota Probolinggo. Beberapa wilayah di Kota Probolinggo seperti

Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Wonoasih memiliki daya tampung sekolah yang terbatas sehingga menyebabkan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut memilih pendidikan diluar daerah seperti pondok pesantren. Penurunan angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebagian besar dikarenakan faktor ekonomi dan psikologis yaitu kurang motivasi/minat sekolah. Selain itu, terbatasnya sekolah SMA/SMK yang berstatus negeri serta sulitnya aksesibilitas dan jarak ke sekolah SMA/SMK yang cukup jauh karena SMA/SMK sebagian besar terletak di wilayah utara yaitu Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Kedopok.

Terdapat adanya perbedaan metode perhitungan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B pada tahun 2022-2024. Pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2020-2021 pengolahan data dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan sumber data dari Hasil Pendataan Profil dan Data Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan pada tahun 2022-2024, data capaian diperoleh berdasarkan capaian Platform Rapor Pendidikan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Perbedaan sumber data dimaksud menyebabkan adanya penurunan capaian kinerja dari periode 2020-2021 ke periode 2022-2024.

Masalah utama dalam bidang pendidikan di Kota Probolinggo adalah belum optimalnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu belum meratanya kualitas pendidikan dan terbatasnya akses terhadap pendidikan. Dari sisi kualitas, tantangan utama meliputi belum meratanya pemenuhan kebutuhan guru dan rendahnya proporsi guru bersertifikat. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Pemenuhan Guru/Indeks Distribusi Guru Pendidikan Dasar yang masih rendah. Rendahnya proporsi guru bersertifikat juga disebabkan oleh minimnya partisipasi dalam pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Padahal, penggunaan PMM diharapkan dapat mendorong guru untuk berinovasi dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Selain itu, masih banyak guru PAUD yang belum berkualifikasi S1. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya regulasi yang kuat sebagai dasar intervensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengelolaan

SDM pada satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga kualitas layanan PAUD belum optimal.

Dari sisi akses, masih terdapat anak usia 7–15 tahun yang belum atau tidak bersekolah. Hal ini diperburuk oleh kesenjangan daya tampung antar satuan pendidikan serta banyaknya sarana dan prasarana sekolah yang belum memenuhi standar kelayakan minimal. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga menjadi faktor penyumbang, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan karakteristik wilayah. Setiap kecamatan di Kota Probolinggo memiliki karakteristik sosial yang berbeda. Di wilayah selatan seperti Kedopok dan Wonoasih, pendidikan berbasis keagamaan (pondok pesantren) lebih dominan, sehingga masyarakat cenderung memilih jalur pendidikan informal. Selain itu, pernikahan usia dini masih sering terjadi. Sementara itu, di wilayah pesisir seperti Kecamatan Mayangan, masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan juga lebih memilih pendidikan informal.

Pemanfaatan Bantuan masih belum optimal sehingga turut menyebabkan anak-anak dari kelompok rentan tetap tidak bersekolah. serta kurangnya dukungan Infrastruktur yang menyebabkan ketimpangan daya tampung diperparah oleh distribusi fasilitas pendidikan yang belum merata, serta adanya stigma terhadap sekolah unggulan akibat kebijakan zonasi. Hal ini juga didukung dengan permasalahan pemenuhan akses Jenjang SMP pada Wilayah Kecamatan Kademangan yang belum terdapat SMP Negeri, sehingga setiap tahunnya terdapat potensi Anak usia 13 - 15 tahun di wilayah Kademangan bersekolah bukan pada SMP Negeri. Di sisi lain, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK), sementara kemampuan APBD Kota Probolinggo masih terbatas. Kombinasi dari berbagai faktor tersebut berdampak signifikan terhadap belum optimalnya pencapaian pendidikan di Kota Probolinggo.

Berdasarkan capaian kinerja indikator Indeks Distribusi Guru yang merepresentasikan ketersediaan pendidik per mata pelajaran di masing-masing satuan pendidikan pada tiap wilayah, kondisi di Kota Probolinggo hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks distribusi guru sebesar 0,59 belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh belum terpenuhinya kebutuhan akan pendidik, terutama pada jenjang Satuan

Pendidikan Dasar. Akibatnya, lebih dari 30% satuan pendidikan dasar di wilayah tersebut mengalami kekurangan tenaga pendidik.

Terkait dengan data Anak Tidak Sekolah (ATS) pada tahun 2020-2023, tidak tersedia data Kota Probolinggo mengenai anak tidak sekolah dikarenakan Pemerintah Kota Probolinggo juga tidak melakukan pendataan terkait data dimaksud. Dari aplikasi Kemendikbudristek juga tidak tersedia data indikator dimaksud untuk Kota Probolinggo. Sedangkan untuk tahun 2024, data menunjukkan bahwa 2,51% anak usia 7 - 15 tahun di Kota Probolinggo belum mengenyam pendidikan formal, sedangkan untuk anak usia 5-6 tahun tidak ditemukan anak tidak sekolah. Angka ini menggambarkan potret nyata tantangan pemerataan akses pendidikan dasar yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Situasi ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti penyandang disabilitas, keterbatasan ekonomi, hingga permasalahan sosial seperti perkawinan anak atau anak yang sudah bekerja. Berdasarkan data Pusdatin Kemendikbudristek, jumlah ATS pada tahun 2024 berjumlah 1.568 Anak Tidak Sekolah (ATS) dan sebanyak 542 anak telah kembali bersekolah. Ini menunjukkan adanya progres, namun juga menegaskan bahwa masih diperlukan upaya lebih intensif dan kolaboratif agar seluruh ATS usia 7–15 tahun dapat kembali mengakses pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal

2) KESEHATAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu layanan wajib dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Penyelenggaraan urusan Kesehatan di Kota Probolinggo menjadi tugas dan kewenangan dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta RSUD Dr. Moh. Saleh dan RSUD Ar Rozy. Pelayanan Kesehatan di Kota Probolinggo secara umum dilaksanakan oleh rumah sakit daerah dan puskesmas di setiap kecamatan, yang didukung oleh puskesmas pembantu dalam rangka pengoptimalan layanan.

Pada urusan Kesehatan terdapat standar pelayanan minimal yang harus diakomodir oleh pemerintah daerah. Pada urusan Kesehatan terdapat 12 indikator yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM.

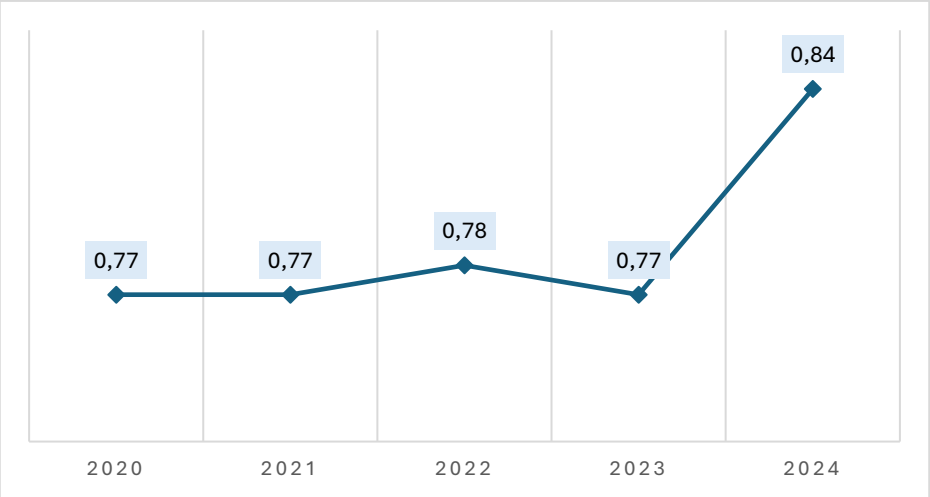
Adapun capaian SPM urusan kesehatan Kota Probolinggo dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel II.35 Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022-2024

No.	JENIS PELAYANAN	Standar Pelayanan Minimal	Satuan	Realisasi				
		Indikator		2020	2021	2022	2023	2024
KESEHATAN								
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Layanan Kesehatan	%	88,88	90,78	94,85	92	86,84
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Layanan Kesehatan	%	93,85	95,05	92,83	86	82,93
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru lahir yang mendapatkan Layanan Kesehatan	%	90,91	97,36	91,16	83	85,75
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	68,96	88,69	88,09	90	91,12
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan.	%	33,93	40,83	93,35	97,44	99,41
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah warga negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	36,31	42,58	84,53	88, 487	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	%	64,74	75,22	84,32	87,42	99,60
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi	Jumlah Warga negara Penderita Hipertensi yang mendapatkan Layanan Kesehatan	%	14,89	23,18	60,84	50,96	94,51
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah warga Negara Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan Layanan Kesehatan	%	63,46	77,62	98,75	100	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan Jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	85,44	94,77	74,43	100	100
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tubberculosis	Jumlah Warga negara terduga Tuberullosis yang mendapat Layanan Kesehatan	%	100	14,84	97,60	100	100
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya Tahan tubuh Manusia (HIV)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan Daya Tahan tubuh Manusia (HIV) Yang mendapat layanan kes.	%	100	80,90	100	100	95,27

Sumber: Dinas Kesehatan PPKB Kota Probolinggo, 2025

Secara umum capaian SPM Kota Probolinggo tahun 2022-2024 cukup baik meski belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan penyelenggaraan urusan kesehatan di Kota Probolinggo dapat digambarkan melalui indikator berikut:

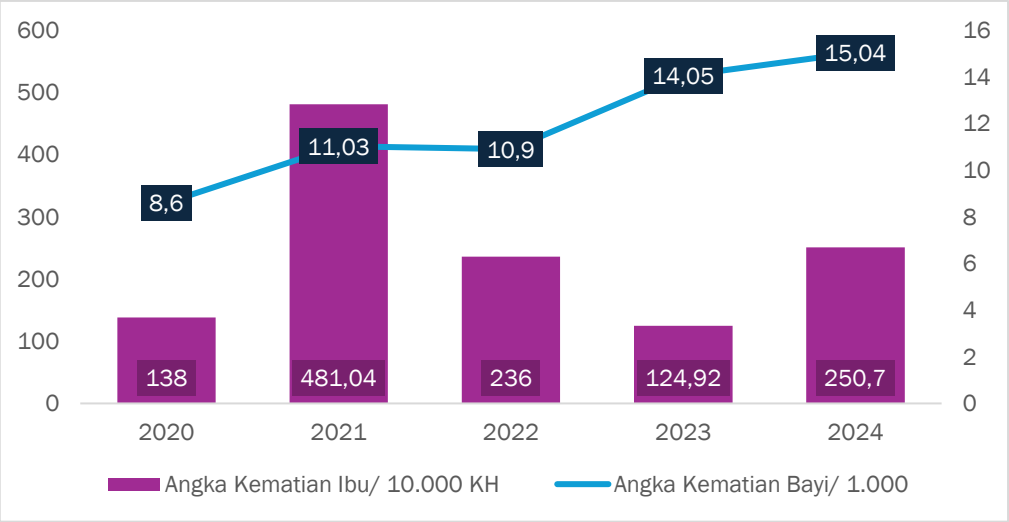


Gambar II-70 Indeks Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan PPKB Kota Probolinggo, 2025

Grafik diatas menunjukkan bahwa indeks kesehatan Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir memiliki tren yang terus meningkat. Persentase peningkatan indeks kesehatan Kota Probolinggo dari tahun 2023 ke 2024 adalah sekitar 9,09%. Peningkatan signifikan ini mencerminkan adanya perbaikan nyata dalam sektor kesehatan, baik dari sisi pelayanan, infrastruktur, maupun kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Setelah mengalami stagnasi pada 2020 dan 2021 serta sedikit peningkatan pada 2022, penurunan kembali di 2023 menunjukkan tantangan yang sempat menghambat kemajuan. Lonjakan di 2024 menjadi indikator kuat bahwa intervensi kebijakan atau program kesehatan yang diterapkan berjalan efektif dan berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat.

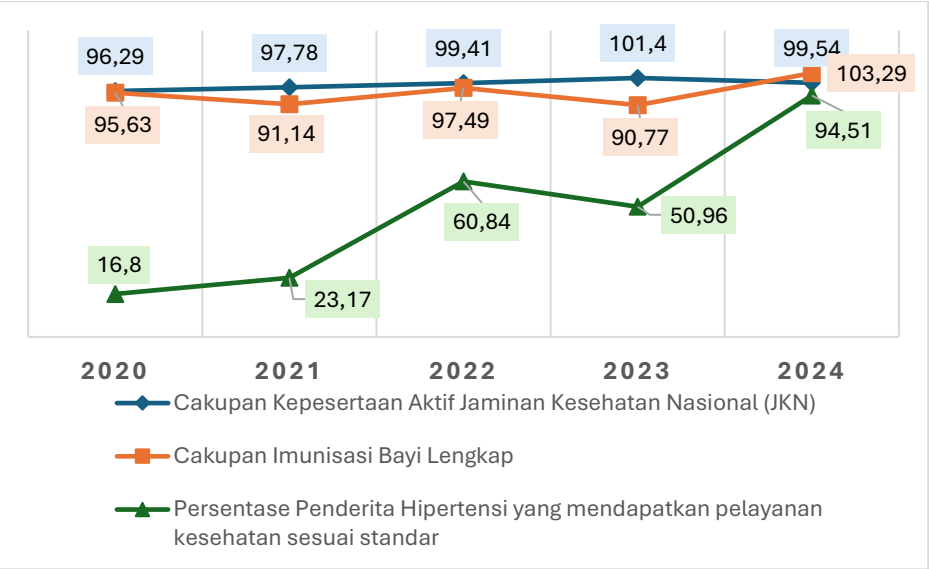
Capaian Indeks Kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), karena kedua indikator tersebut merupakan komponen utama dalam penilaian kualitas layanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat. Penurunan AKI dan AKB mencerminkan keberhasilan sistem kesehatan dalam memberikan layanan yang responsif, terutama dalam aspek kesehatan ibu dan anak seperti ketersediaan fasilitas persalinan, tenaga medis, serta akses terhadap pelayanan prenatal dan neonatal. Sebaliknya, tingginya AKI dan AKB dapat menurunkan nilai Indeks

Kesehatan, karena menunjukkan adanya celah dalam sistem layanan atau kesenjangan dalam akses masyarakat terhadap layanan esensial. Adapun capaian AKI dan AKB kota Probolinggo secara rinci dapat dilihat melalui grafik berikut



Gambar II-71 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafis diatas menunjukkan capaian AKI yang sangat fluktuatif Angka Kematian Ibu (AKI) diartikan sebagai indikator yang mengukur jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah persalinan, terkait dengan kondisi kehamilan atau persalinan. AKI adalah salah satu indikator kunci dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak serta kualitas pelayanan kesehatan maternal. Penurunan AKI adalah tujuan utama dalam upaya meningkatkan perawatan maternal dan mengurangi risiko kematian maternal yang dapat terjadi selama periode kehamilan dan persalinan. AKB Kota Probolinggo juga memiliki fluktuasi yang sangat dinamis. Adapun penyebab meningkatnya AKB pada tahun tersebut disebabkan oleh belum optimalnya posyandu sebagai garda terdepan dalam menjamin tersedianya akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan urusan kesehatan dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami capaian yang kurang signifikan, mengingat Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi harus diperbaiki lagi capaiannya agar tidak defisit. Pemerintah Kota Probolinggo ke depannya masih memiliki sisa kinerja yang perlu diefektifkan sehingga bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Probolinggo hingga akhir periode.



Gambar II-72 Cakupan Layanan Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2025

Persentase penduduk yang telah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional terus mengalami perkembangan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Terjadi peningkatan secara terus-menerus dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Hingga pada tahun 2023 capaian kepesertaan JKN menjadi 101,40%. Di tahun 2024, dilakukan evaluasi dan update data dengan melakukan penonaktifan secara berkala terhadap data meninggal, data pindah maupun data tidak valid sehingga terjadi penurunan capaian. Meski demikian capaian tahun 2024 masih memenuhi target RPJMN dan hingga saat ini Kota Probolinggo masih tergolong pada daerah dengan kriteria UHC Prioritas.

Guna mendukung layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terdapat program nasional Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang merupakan program pemerintah untuk menyediakan pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi masyarakat Indonesia. Program ini bertujuan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan, mencegah penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program tersebut baru di launching tanggal 10 Februari 2025. Capaian Kota Probolinggo per 22 Juli 2025 sebesar 5,08%. Selain itu juga terdapat program yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana masyarakat Indonesia telah mencapai tingkat aktivitas fisik yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan dan produktivitas. Indikator Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup ini mendukung mewujudkan masyarakat sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045, meningkatkan kualitas hidup dan mencegah PTM. Pengukuran

indikator melalui survei skala nasional seperti Riskesdas dan SKI, serta Survei lain yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait juga dapat menyumbang data untuk indikator ini. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden mengenai jenis, frekuensi, dan durasi aktivitas fisik yang mereka lakukan dalam seminggu. Hasilnya kemudian dianalisis untuk menentukan persentase penduduk yang memenuhi kriteria "cukup aktif". Kedua Program prioritas ini nantinya juga akan menjadi indikator untuk tolok ukur keberhasilan layanan kesehatan di Kota Probolinggo sebagaimana disajikan pada Bab IV.

Ditinjau dari Cakupan imunisasi bayi lengkap setiap tahun telah memenuhi target meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021 dan 2023 dikarenakan pandemi covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat termasuk kunjungan bayi dan balita ke Posyandu sehingga mempengaruhi cakupan imunisasi bayi lengkap. Adapun pada tahun 2024 kesadaran masyarakat untuk memberikan imunisasi pada bayi semakin baik sehingga cakupan imunisasi bayi lengkap melebihi target. Pada Tahun 2024 Capaian melebihi 100 dikarenakan adanya program imunisasi sekolah sehingga sasaran juga menjangkau anak kabupaten Probolinggo yang bersekolah di Kota Probolinggo.

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentasenya hanya 16,8%, kemudian meningkat menjadi 23,17% pada tahun 2021. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2022, mencapai 60,84%, meskipun sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 50,96%, namun kembali melonjak drastis pada tahun 2024 menjadi 94,51% adanya perubahan gaya hidup sehat dan kesadaran pemantauan tekanan darah untuk mengontrol ke fasilitas layanan kesehatan.

3) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penyelenggaraan pemerintahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Probolinggo merupakan bagian dari kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau yang biasa disingkat DPUPRPKP Kota Probolinggo. Pemerintah Kota Probollinggo telah memiliki Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kota Probolingo Tahun 2020-2040 dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor

55 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mayangan-Kanigaran Dan Perkotaan Kademangan Tahun 2023-2043. Ketersediaan dokumen rencana tata ruang tersebut diharapkan dapat mewujudkan tertib ruang dan kepastian investasi di Kota Probolinggo. Salah satu substansi dalam Perda RTRW Kota Probolinggo adalah penetapan kawasan peruntukan budidaya yang meliputi: kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan. Selain kawasan peruntukan budidaya tersebut, Perda RTRW menetapkan Kawasan Pelabuhan di Kecamatan Mayangan sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Terdapat 5 indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Probolinggo yang dapat menggambarkan kinerja DPUPRPKP (sub pekerjaan umum dan penataan ruang) selama periode 2020-2024. Kinerja pada urusan ini menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki tren yang positif.

Tabel II.36 Ruas Jalan Menurut Fungsinya Tahun 2023

NO.	REKAPITULASI RUAS JALAN MENURUT FUNGSINYA	2023
1	Jumlah	
	Ruas	217
	Panjang (km)	178,92
2	Sistem Primer	
	Panjang (km) JKP 2	-
	Panjang (km) JKP 3	-
	Panjang (km) JKP 4	-
	Panjang (km) JLP	-
	Panjang J. Ling P	-
3	Sistem Sekunder	
	Panjang (km) JAS	4,03
	Panjang (km) JKS	46,91
	Panjang (km) JLS	118,91
	Panjang (km) J. Ling. S	9,05

Sumber: SKGub Nomor 188/207/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Fungsinya, 2025

Kota Probolinggo pada tahun 2023 memiliki total 217 ruas jalan dengan panjang keseluruhan mencapai 178,92 km. Komposisi panjang jalan berdasarkan sistem sekunder menunjukkan dominasi Jalur Kolektor Sekunder (JKS) dan Jalur Lokal Sekunder (JLS). JKS tercatat sepanjang 46,91 km, sedangkan JLS mendominasi jaringan jalan sekunder dengan panjang 118,91 km. Kontribusi Jalur Arteri Sekunder (JAS) dan Jalan Lingkar Sekunder (J. Ling S) relatif kecil, masing-masing sepanjang 4,03 km dan 9,05 km. Proporsi jaringan ini

mencerminkan bahwa struktur jaringan jalan Kota Probolinggo masih sangat bergantung pada sistem lokal dan kolektor dalam menopang mobilitas harian. Komposisi tersebut menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas jalan pada segmen-segmen utama untuk mendukung konektivitas kawasan perkotaan dan pelayanan logistik.



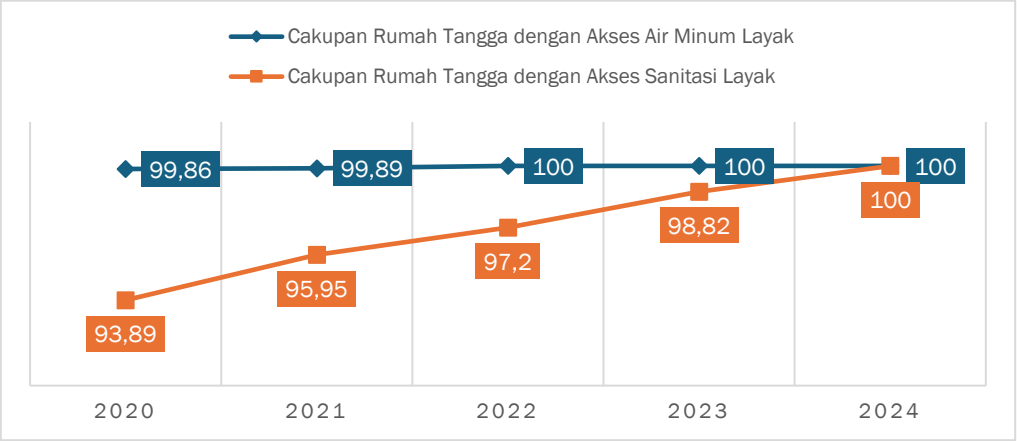
Gambar II-73 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, 2025

Secara umum nilai capaian indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Grafik di atas menggambarkan perkembangan panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Probolinggo. Bertambahnya Panjang jalan dalam kondisi baik didukung dengan ketersediaan anggaran pendanaan dari Dana Alokasi Khusus untuk jalan-jalan kota yang terhubung langsung dengan jalan nasional. Adapun permasalahan yang masih ditemukan dalam pencapaian indikator terkait dengan integrasi lintas perangkat daerah. Kegiatan pembangunan sektoral yang masih belum sinkron dengan kegiatan pembangunan ataupun pemeliharaan jalan. Sehingga jalan yang semula sudah baik karena kebutuhan pembangunan jaringan utilitas seperti air, kabel telekomunikasi ataupun gas bumi, menjadikan turunnya kualitas jalan dikarenakan pekerjaan rekondisi yang tidak sesuai kualitas semula.

Demikian pula dengan indikator presentase jumlah prasarana irigasi yang terpelihara dan berfungsi yang secara umum mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2020-2024. Kinerja yang baik tersebut telah didukung dengan ketersediaan anggaran yang dapat digunakan untuk melakukan

pemeliharaan prasarana irigasi ataupun pembersihan saluran irigasi. Selain itu, terdapat HIPPA dan GHIPPA yang turut menjaga dan memelihara jaringan irigasi. Indikator berikutnya yaitu cakupan drainase dalam kondisi baik yang konsisten mengalami peningkatan secara signifikan selama periode 2020-2024. Kendala terbesar dalam pencapaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga sampah-sampah tersebut menumpuk dan menyumbat aliran drainase kemudian menyebabkan pencemaran.



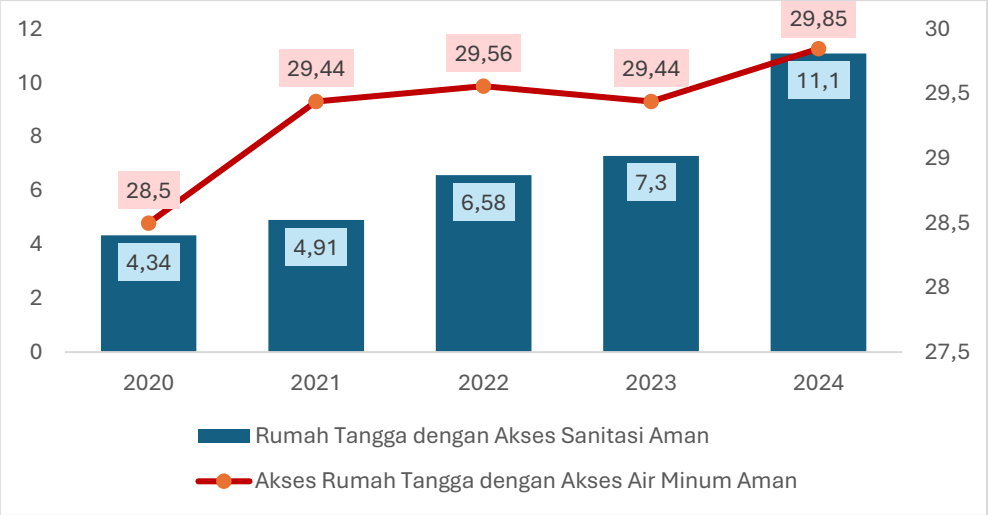
Gambar II-74 Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, 2025

Dalam lima tahun terakhir, capaian akses layanan dasar air minum dan sanitasi layak di Kota Probolinggo menunjukkan tren yang sangat positif dan progresif. Akses air minum layak telah mengalami peningkatan stabil dari tahun 2020 sebesar 99,86%, menjadi 99,89% pada tahun 2021, dan mencapai 100% sejak tahun 2022 hingga 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan program penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan, sumber air terlindungi, serta edukasi konsumsi air minum aman.

Sementara itu, akses sanitasi layak juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 93,89%, meningkat menjadi 95,95% di tahun 2021, kemudian 97,20% pada 2022, 98,82% pada 2023, dan akhirnya mencapai 100% pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pembangunan dan rehabilitasi sarana sanitasi, termasuk pembangunan septic tank individual dan komunal, serta edukasi perubahan perilaku masyarakat. Pencapaian 100% akses air minum dan sanitasi layak menandai bahwa Kota Probolinggo telah memenuhi target akses universal

yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak untuk Semua.



Gambar II-75 Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, 2025

Dalam lima tahun terakhir, capaian akses rumah tangga terhadap air minum aman dan sanitasi aman di Kota Probolinggo menunjukkan tren peningkatan meskipun masih berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan dengan akses layanan dasar secara umum. Akses rumah tangga terhadap air minum aman meningkat secara bertahap dari 28,50% pada tahun 2020 menjadi 29,44% di tahun 2021, kemudian naik sedikit menjadi 29,56% pada 2022, 29,70% di 2023, dan 29,85% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan bertahap dalam pengelolaan sumber air, perlindungan kualitas air, dan sistem penyediaan air yang memenuhi syarat secara fisik, kimia, dan mikrobiologis. Dalam pemenuhan akses air minum diupayakan pemenuhan syarat air minum aman dengan pendekatan 4K, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas dan Keterjangkauan. Sementara itu, akses rumah tangga terhadap sanitasi aman juga menunjukkan peningkatan dari 4,34% pada tahun 2020 menjadi 4,91% di tahun 2021, lalu naik menjadi 6,58% pada tahun 2022 dan 7,30% pada tahun 2023, serta 11,10% pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya penguatan dalam sistem pengelolaan lumpur tinja, pengolahan akhir limbah domestik, dan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi aman. Meski peningkatannya belum signifikan, data ini mencerminkan komitmen dan langkah awal yang positif dalam pemenuhan target akses universal terhadap

layanan air minum dan sanitasi yang aman, sebagaimana diamanatkan dalam SDG 6. Diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur dan edukasi masyarakat untuk mempercepat capaian akses aman ini di tahun-tahun mendatang.

Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ialah terkait Pembangunan Infrastruktur kurang Optimal. Permasalahan tersebut dikarenakan Penyedia yang kurang kompeten, Kurangnya Kesadaran Masyarakat terkait dengan pemanfaatan infrastruktur dan Potensi Kerusakan Infrastruktur yang sulit dikendalikan. Permasalahan terkait infrastruktur yang sulit dikendalikan menjadi permasalahan yang sangat kompleks, faktor seperti Masih Banyak Genangan Air yang disebabkan oleh letak geografis Kota Probolinggo serta Kondisi Iklim yang tidak menentu. Dari dua faktor tersebut menyebabkan berbagai masalah yang mengakar yaitu diantaranya perilaku masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan dan Banyak Bangunan yang didirikan diarea sungai yang tidak sesuai standar.

Pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat standar pelayanan minimal yang harus diakomodir oleh pemerintah daerah. Pada urusan tersebut terdapat 2 indikator yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Adapun capaian SPM urusan kesehatan Kota Probolinggo dapat dilihat melalui penjelasan seperti dibawah ini:

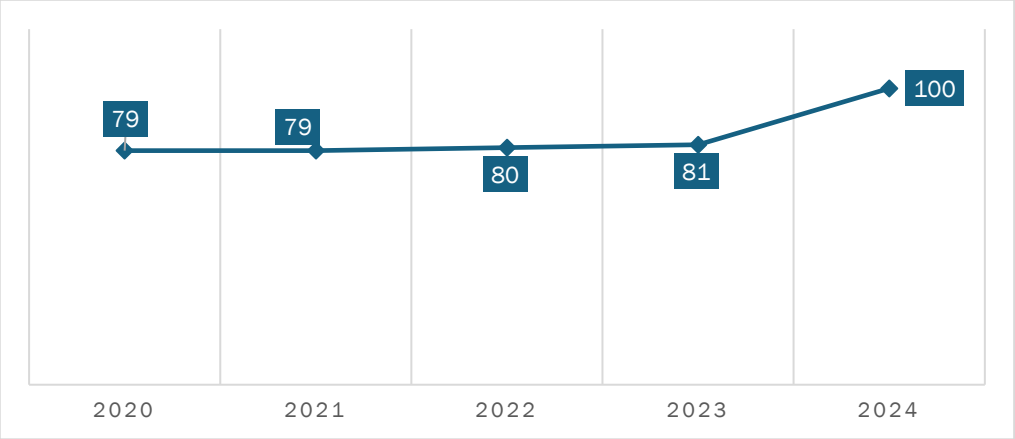
Tabel II.37 Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	100	100	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	%	93,89	95,95	97,2	98,82	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kedua jenis pelayanan standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Probolinggo tahun 2022-2024 terus mengalami peningkatan capaian. Jenis pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2022-2024 berhasil memenuhi target yang sudah ditetapkan yaitu 100%. Kualitas suatu air limbah akan dapat terindikasi dari kualitas parameter kunci, dimana

konsentrasi parameter kunci tidak melebihi dari standard baku mutu yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan tabel atas capaian pada tahun 2022 masih berada pada angka 97,2% dengan indikasi bahwa pengolahan air limbah domestik masih belum terlaksana dengan baik. Namun pada tahun- tahun berikutnya terdapat peningkatan capaian hingga mencapai target pelaksanaan program yakni 100% pada Tahun 2024.



Gambar II-76 Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, 2025

Kinerja penyelenggaraan sub urusan penataan ruang dapat dilihat dari indikator persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang yang menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020 pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang adalah sebesar 79% yang meningkat menjadi 100% pada tahun 2024. Dalam konteks perencanaan tata ruang, Kota Probolinggo telah memiliki instrumen rencana tata ruang berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mayangan-Kanigaran dan Perkotaan Kademangan Tahun 2023-2043. Dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang, upaya pembinaan dan pengawasan terus dilakukan guna mewujudkan keteraturan, keterpaduan an kepastian hukum yang pada akhirnya dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup.

4) PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo. Kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dianalisis kinerjanya berdasarkan capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian. Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat Kota Probolinggo tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PKP) Kota Probolinggo. Adapun jenis pelayanan beserta target dan realisasi urusan perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.38 Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	Satuan	REALISASI				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Daerah Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kota yang Memperoleh Fasilitasi Rumah yang Layak Huni	%	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, 2025

Penetapan target pada standar pelayanan minimal urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tabel diatas menunjukkan realisasi pelayanan SPM urusan perumahan rakyat Kota Probolinggo tahun 2020-2024 adalah nihil yang artinya tidak ada korban bencana selama tahun 2020-2024. Adapun terkait target yang dipasang 100% mengindikasikan bahwa setiap ada warga negara yang menjadi korban bencana maka DPUPR-PKP selaku pelaksana wajib melakukan pelayanan dan juga dikarenakan korban bencana disetiap tahun tidak selalu ada.

Indikator "Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi rumah yang layak huni" merupakan ukuran kinerja pelayanan Pemerintah Kota dalam menjamin hak atas tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang terdampak kebijakan pembangunan atau penataan wilayah kota. Meskipun target yang ditetapkan adalah 100%, yaitu seluruh warga yang terkena relokasi akibat program daerah kota seharusnya memperoleh fasilitasi rumah layak huni, data realisasi menunjukkan bahwa pada tahun 2022, 2023, dan 2024, belum terdapat capaian atas indikator ini (realisasi nihil). Hal ini dapat disebabkan oleh tidak warga negara yang terkena relokasi sebagai akibat dari program pemerintah

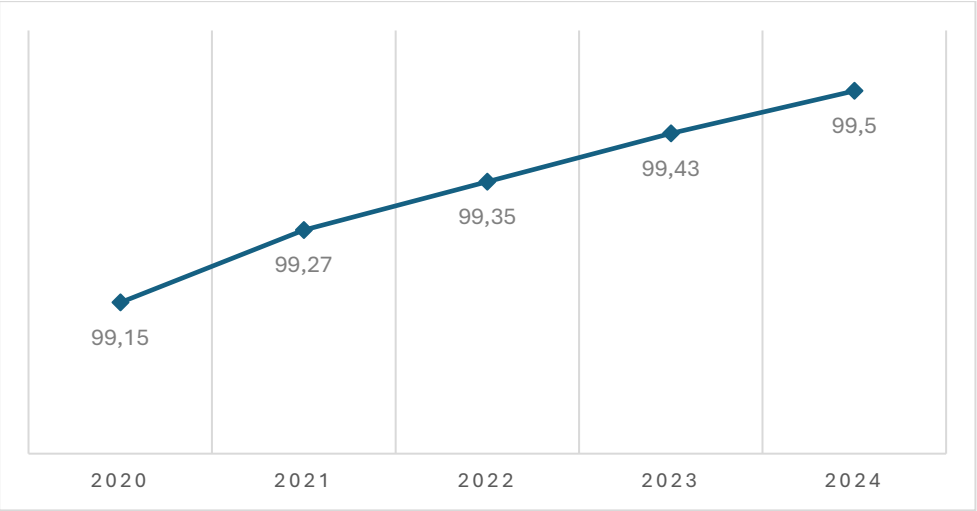
Kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman juga dapat direpresentasikan oleh capaian indikator jumlah rumah tidak layak huni dan persentase penurunan luas permukiman kumuh. Dimana capaian indikator jumlah rumah tidak layak huni Kota Probolinggo tahun 2021-2024 mengalami penurunan capaian dari 634 menjadi 354. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan program rehabilitasi dan peningkatan kualitas perumahan rakyat, yang kemungkinan besar didukung oleh berbagai intervensi pemerintah, seperti bantuan renovasi rumah, program bedah rumah, serta peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar di permukiman. Penurunan ini mencerminkan upaya konkret dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih layak dan sehat. Sedangkan capaian persentase penurunan luas permukiman kumuh Kota Probolinggo tahun 2020-2024 memiliki capaian yang fluktuatif dari 20,53 di tahun 2020 dan sempat mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 0 lalu meningkat di tahun 2022 menjadi 49,98 dan berakhir di 41,2 di tahun 2024. Fluktuasi ini dapat mencerminkan dinamika dalam program penataan kawasan kumuh, di mana efektivitas kebijakan, tingkat implementasi program, serta faktor sosial-ekonomi masyarakat dapat memengaruhi capaian dari tahun ke tahun. Meskipun terjadi penurunan rumah tidak layak huni, masih ada tantangan dalam memastikan keberlanjutan program penataan kawasan kumuh agar tidak hanya berdampak sementara, tetapi juga memberikan perubahan yang lebih stabil dan merata dalam jangka panjang. Secara rinci capaian indikator urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Probolinggo terlihat melalui grafik berikut:



Gambar II-77 Capaian Rumah Tidak Layak Huni dan Luasan Permukiman Kumuh
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, 2025

Permukiman kumuh Kota Probolinggo mengalami penurunan luasan tiap tahunnya. Luasan permukiman kumuh pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 sebesar 53,14 ha, pada tahun 2024 luasan permukiman kumuh menurun menjadi 21,85 ha di Kelurahan Mangunharjo dan Jati. Dalam rangka penanganan permukiman kumuh, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan beberapa upaya meliputi: penyediaan PSU, peningkatan kualitas lingkungan, perbaikan dan peningkatan kondisi rumah.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Probolinggo adalah: masih terdapatnya jalan dan drainase lingkungan yang berasal dari kegiatan pengembangan kavling perumahan yang tidak dibangun dengan baik. Selain itu Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan tersebut belum dilakukan serah terima, dikarenakan tidak terlacaknya pengembang kavling dan perumahan di waktu lalu yang belum melakukan serah terima PSU. Maka dengan permasalahan tersebut tantangan kedepan yaitu semakin banyaknya unit pembangunan perumahan maka harus memastikan perbaikan tentang jalan dan drainase pada pengembang perumahan.



Gambar II-78 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo, 2025

Definisi operasional Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan yaitu Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah dengan kondisi fisik yang baik (tidak kumuh, memiliki sanitasi dan air bersih, serta cukup ventilasi dengan biaya tempat tinggal yang tidak melebihi 30% dari pendapatan rumah tangga, serta berada di lokasi yang aman dan memiliki akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik dan transportasi. Adapun rumusan perhitungan atas indikator dimaksud yaitu :

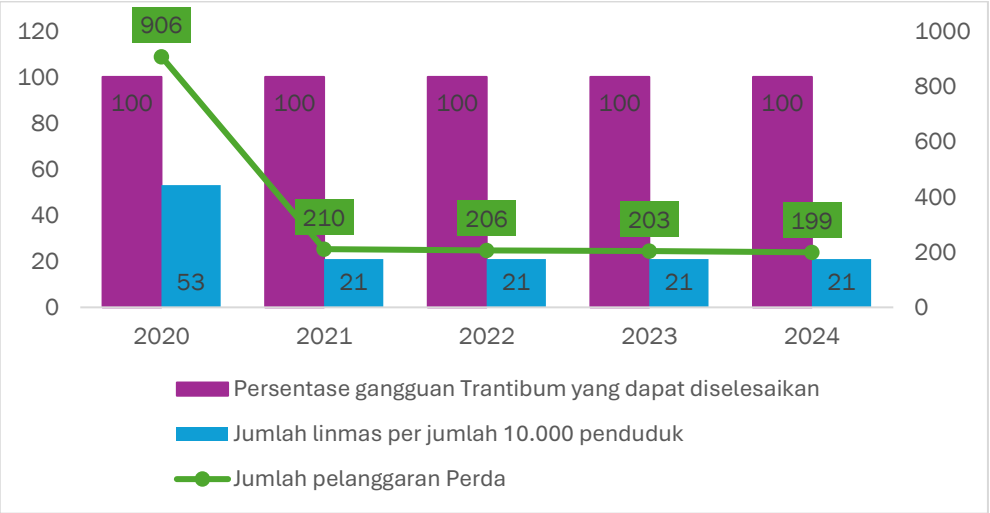
$$\frac{Jumlah\ rumah\ layak\ huni, terjangkau\ dan\ berkelanjutan}{jumlah\ rumah\ di\ wilayah\ kota}\ x\ 100\%$$

Tingkat rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kota Probolinggo menunjukkan konsistensi sangat tinggi dari tahun 2020 hingga 2024, dengan kenaikan bertahap dari 99,15% menjadi 99,50%. Stabilitas angka tersebut mencerminkan capaian positif dalam pemenuhan kebutuhan dasar perumahan, serta menunjukkan efektivitas kebijakan penyediaan hunian yang inklusif dan berkelanjutan. Kenaikan yang meskipun relatif kecil setiap tahunnya mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap hunian yang memenuhi standar kelayakan, namun juga menjadi sinyal bahwa tantangan ke depan lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif.

Permasalahan lain yang masih dalam ruang lingkup urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah terkait tingginya pelanggaran tata ruang akibat kurangnya pengawasan sebab sistem pengawasan belum terintegrasi terhadap izin perizinan. Tingkat pelanggaran tata ruang juga disebabkan oleh keberadaan sanksi berdasarkan peraturan berlaku yang belum memberikan efek jera serta rendahnya kesadaran terhadap urgensi dari tersusunnya Peraturan dan Perencanaan Tata Ruang di Kota Probolinggo. Sedangkan pada domain Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga masih tinggi, yang disebabkan struktur bangunan belum sesuai standar, sanitasi belum layak serta masih terdapat rumah yang belum terlayani air. Hal tersebut juga terkait dengan kendala layanan air akibat sumber air baku yang menurun di Kota Probolinggo.

5) KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

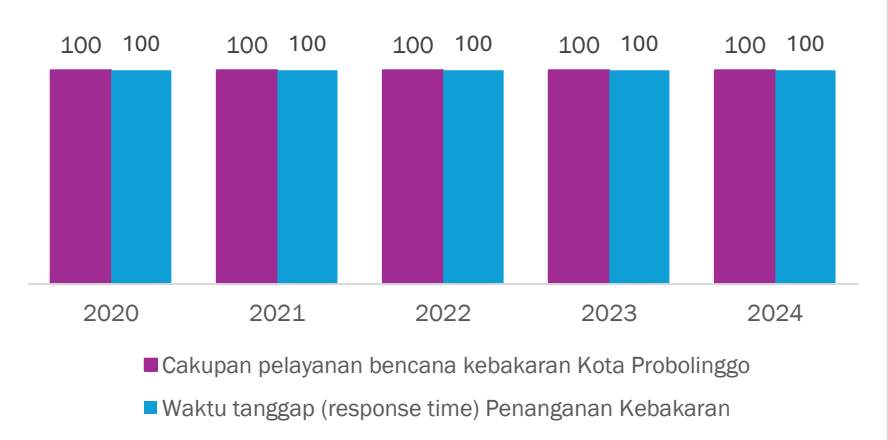
Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) terdiri atas tiga sub urusan yaitu sub ketentraman dan ketertiban umum, sub kebakaran dan sub kebencanaan. Penyelenggaraan sub urusan trantibum di Kota Probolinggo diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo yang memiliki tupoksi utama sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Representasi kinerja Satpol PP pada sub urusan tantribum Kota Probolinggo tahun 2020-2024 direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja berikut:



Gambar II-79 Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, 2025

Grafik diatas menunjukkan bahwa capaian indikator persatuan gangguan trantibum yang dapat diselesaikan selama periode 2020-2024 memiliki capaian yang stagnan yaitu 100%. Artinya bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2024 Satpol PP Kota Probolinggo mampu menyelesaikan 100% pelanggaran trantibum. Sementara pada indikator jumlah pelanggaran Perda mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2024 secara umum mengalami penurunan capaian. Jumlah pelanggaran Perda berhasil ditekan secara signifikan dari 906 kasus pada tahun 2020 menjadi 210 kasus pada tahun 2021. Penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2024, dengan 199 kasus pelanggaran. Meskipun demikian, masih adanya jumlah pelanggaran menunjukkan masih rendahnya kepedulian serta kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah akibat pengaruh lingkungan yang kurang baik dan minimnya pengetahuan sebab frekuensi sosialisasi dan edukasi terkit perda masih terbatas. Indikator selanjutnya yaitu jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk di Kota Probolinggo yang dapat memberikan gambaran tentang tingkat ketersediaan petugas Linmas untuk melindungi dan mengawasi masyarakat di wilayah tersebut. Tren tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan capaian dengan kecenderungan menurun. Capaian ini dipengaruhi oleh faktor adanya anggota linmas yang dibentuk saat pemilu namun kemudian tidak aktif kembali, sehingga diperlukan pendataan ulang anggota linmas yang ada di Kota Probolinggo.



Gambar II-80 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%) di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, 2025

Cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah layanan bencana kebakaran yang mencakup luas wilayah kebakaran (WMK) dan penentuan lokasi pemadam yaitu seluruh cakupan luas wilayah Kota Probolinggo. Gambaran

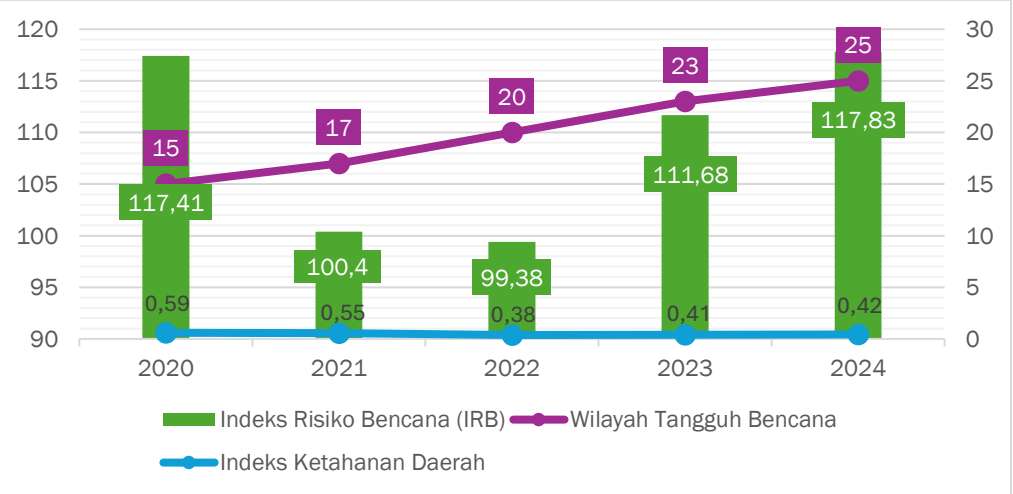
realisasi sebesar 100% artinya bahwa, Pemerintah Kota Probolinggo telah mampu mengcover seluruh area Kota Probolinggo dalam layanan penanganan kebakaran. Sehingga, tidak terdapat angka pertumbuhan/penurunan, nilai kenaikan/penurunan dan rata-rata pertumbuhan pada indikator utama sub kebakaran. Oleh karena itu, berdasarkan capaian indikator pada penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran menunjukkan adanya capaian yang positif dimana Pemerintah Kota Probolinggo mampu mempertahankan 100% coverage area layanan disuluruh wilayah Kota Probolinggo. Meskipun demikian, belum terdapat upaya penanggulangan bahaya kebakaran yang efektif sehingga kejadian kebakaran masih rawan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait penanggulangan bahaya kebakaran maupun pencegahan dini kebakaran, selain itu dari segi kepemilikan APAR oleh masyarakat maupun pelaku usaha masih kurang serta belum adanya petugas inspektur muda yang menginspeksi APAR.

Pada periode tahun 2020 hingga 2024, Pemadam Kebakaran berhasil mencapai capaian 100% terhadap indikator waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran, yang berarti seluruh kejadian kebakaran yang terjadi telah ditangani sesuai dengan waktu standar pelayanan yang ditetapkan 15 menit. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem kesiapsiagaan, kecepatan informasi, dan koordinasi lapangan telah berjalan secara optimal dalam menghadapi kejadian kebakaran, serta mencerminkan peningkatan kinerja layanan publik di sektor penanggulangan bencana kebakaran. Faktor pendukung capaian response time 100% dimaksud antara lain :

1. Ketersediaan Armada dan Peralatan Siaga, Tersedianya unit kendaraan pemadam kebakaran yang memadai dan siaga 24 jam pada setiap pos pemadam.
2. Peningkatan SDM dan Pelatihan Reguler, Petugas pemadam mendapatkan pelatihan rutin dan simulasi kebakaran yang meningkatkan kesiapsiagaan serta kecepatan dalam merespons kejadian.
3. Penerapan Teknologi Informasi (meteor 112), Adanya sistem pelaporan berbasis aplikasi dan call center darurat yang terintegrasi, mempermudah masyarakat dalam melaporkan kebakaran dengan cepat.

Sedangkan Factor penghambat yang dihadapi (tapi masih bisa diatasi) terkait penanganan kebakaran dimaksud antara lain :

1. Keterbatasan Akses Lokasi, Beberapa titik lokasi kebakaran sulit dijangkau karena gang sempit atau daerah padat penduduk, namun diantisipasi dengan kendaraan kecil dan perlengkapan portable
2. Keterbatasan Sumber Air di Lokasi Kejadian, Diatasi dengan membawa suplai air cadangan dan koordinasi dengan PDAM untuk suplai tambahan
3. Pelaporan Terlambat oleh Masyarakat, Tidak semua kejadian dilaporkan secara cepat oleh warga, namun sosialisasi dan edukasi terus ditingkatkan agar masyarakat paham pentingnya pelaporan dini.



Gambar II-81 Indeks Risiko Bencana dan Wilayah Tangguh Bencana Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo, 2025

Indeks Resiko Bencana atau selanjutnya disebut IRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko atau potensi kerentanan wilayah Kota Probolinggo terhadap berbagai jenis bencana alam atau insiden yang dapat terjadi. IRB Kota Probolinggo menunjukkan tren peningkatan dari data baseline tahun 2020 sebesar 117,41 dengan kategori kelas risiko sedang menjadi sebesar 117,83 pada Tahun 2024 dengan kategori kelas risiko sedang. Tren capaian IRB di atas masih belum diiringi pencapaian target IKD (Indeks Ketahanan Daerah) Kota Probolinggo dikarenakan faktor lemahnya mitigasi serta belum adanya dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat daerah hingga tahun 2024 serta belum optimalnya kapasitas kelembagaan termasuk belum semua satuan pendidikan membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagai langkah pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di Kota Probolinggo.

Meskipun demikian, Kota Probolinggo telah berhasil menurunkan kelas risiko bencana yang dimiliki dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat.

Indikator selanjutnya adalah jumlah kelurahan tangguh bencana yang dibentuk di Kota Probolinggo. Dalam rentang tahun 2020 hingga 2024, terdapat 13 kelurahan tangguh bencana yang telah dibentuk dari total 29 kelurahan yang ada di Kota Probolinggo. Meskipun demikian, kesadaran dan partisipasi masyarakat Kota Probolinggo dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana masih rendah. Kelurahan tangguh bencana yang dibentuk hampir 95% masih dalam kategori Pratama atau tingkatan paling awal dalam Kelurahan Tangguh Bencana.

Pelayanan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Probolinggo juga diwujudkan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Adapun capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel II.39 Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022-024

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	Satuan	REALISASI				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	40.5	100	100	100	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	83, 632	95, 23	96	100	100
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	83, 632	95, 23	100	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	87,216	85,05	96	92	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum kinerja SPM Urusan Trantibumlinmas selama lima tahun terakhir cukup baik. Meskipun terdapat beberapa target yang belum terpenuhi, namun diakhir tahun 2024 target dapat terpenuhi 100 persen. Adanya perubahan kondisi geografis dan iklim di Kota Probolinggo menjadi faktor utama penurunan kinerja pada beberapa indikator dengan capaian dibawah 100%. Potensi risiko bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, atau cuaca ekstrem, dapat meningkatkan tantangan dalam memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi, terutama jika terdapat peningkatan frekuensi atau intensitas bencana. Selanjutnya adanya keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun peralatan, keterlibatan TRC dan relawan BPBD yang belum optimal akibat faktor keaktifan relawan yang dinamis serta kapasitas SDM relawan yang kurang sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan tersebut serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pencegahan dan kesiapsiagaan juga dapat mempengaruhi kinerja pelayanan penyelamatan dan evakuasi.

Secara keseluruhan, data SPM Trantibum Linmas ini mencerminkan komitmen kuat dan kerja keras Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh warga Kota Probolinggo terhadap potensi dan kejadian bencana.

6) SOSIAL

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada masyarakat yang masuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pemerintah Kota Probolinggo menetapkan 5 standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Empat layanan tersebut meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti skala kab/kota; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap dadurat bencana bagi korban bencana kota. Tiga layanan telah mencapai target 100% namun satu layanan belum berkinerja yaitu layanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di

luar panti terpenuhi kebutuhan dasar. Adapun capaian SPM urusan sosial di Kota Probolinggo secara rinci tersaji dalam tabel berikut:

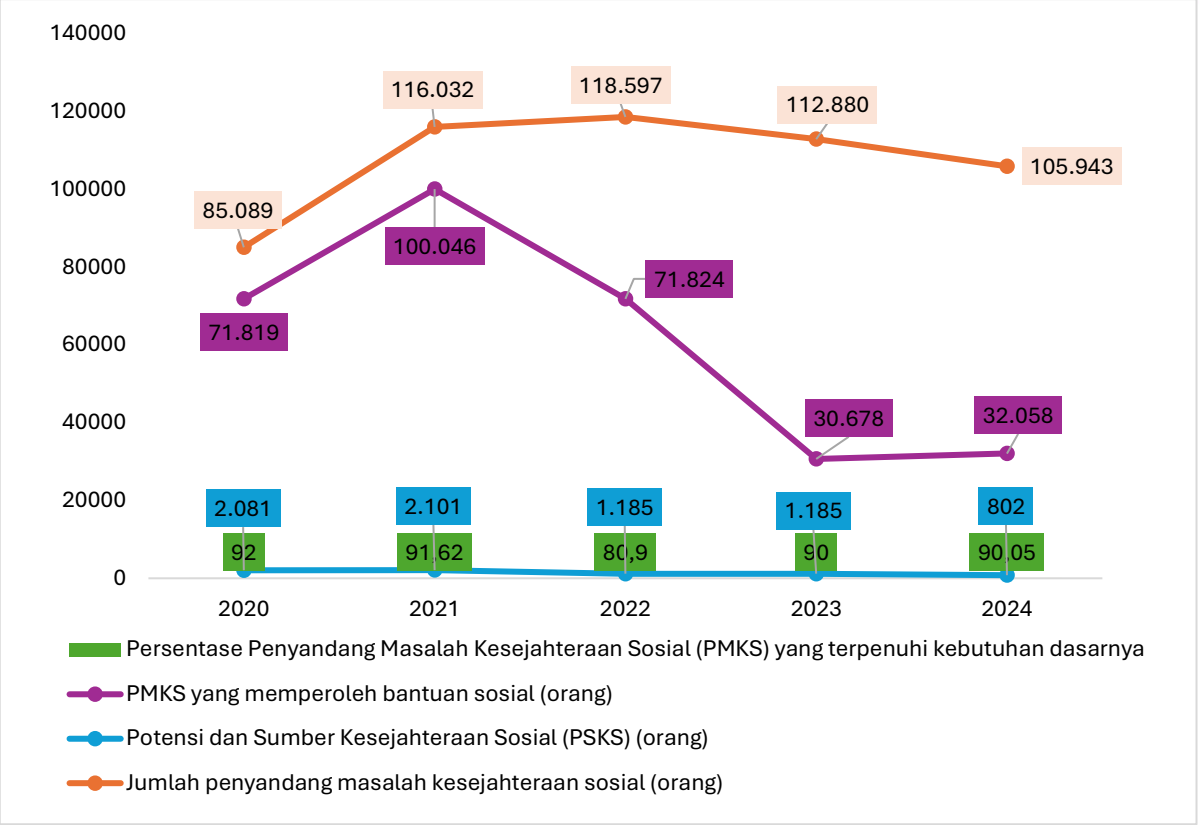
Tabel II.40 Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2022-2024

NO	JENIS PELAYANAN	Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Skala Kab / Kota	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	74.44	100	100	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	0	77.42	100	100	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	80.95	98.67	100	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	0	88.77	98.68	100	100
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	%	100	98.29	100	74.80	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, 2025

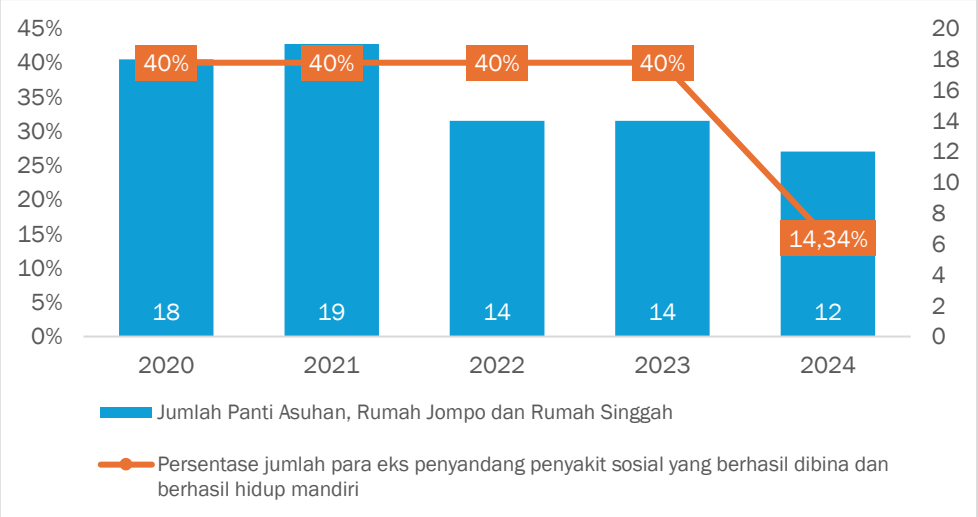
Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum kinerja SPM Urusan Sosial selama lima tahun terakhir cukup baik. Meskipun terdapat beberapa target yang belum terpenuhi, namun diakhir tahun 2024 target dapat terpenuhi 100 persen. Peningkatan ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo untuk memberikan layanan yang efektif.

Berikut merupakan gambaran capaian indikator kinerja urusan sosial Kota Probolinggo:



Gambar II-82 Capaian Kinerja Kesejahteraan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

Indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, mengalami fluktuasi yakni dari sebesar 92% pada tahun 2020 menjadi sebesar 90,05% di tahun 2024. Sedangkan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga menunjukkan tren yang dinamis, tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 118.597 jiwa. Untuk jumlah PMKS yang memperoleh bantuan, mengalami penurunan drastis pada tahun 2023, dari sebesar 71.824 jiwa di tahun 2022 menjadi sebesar 30.678 jiwa, sebelum sedikit meningkat kembali di tahun 2024. Adapun jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menunjukkan tren penurunan yang signifikan, dari 2.081 orang di tahun 2020 menjadi 802 orang di tahun 2024. Data ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap program-program kesejahteraan sosial serta optimalisasi pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada untuk memastikan cakupan layanan yang lebih efektif.



Gambar II-83 Capaian Indikator Layanan Urusan Sosial Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

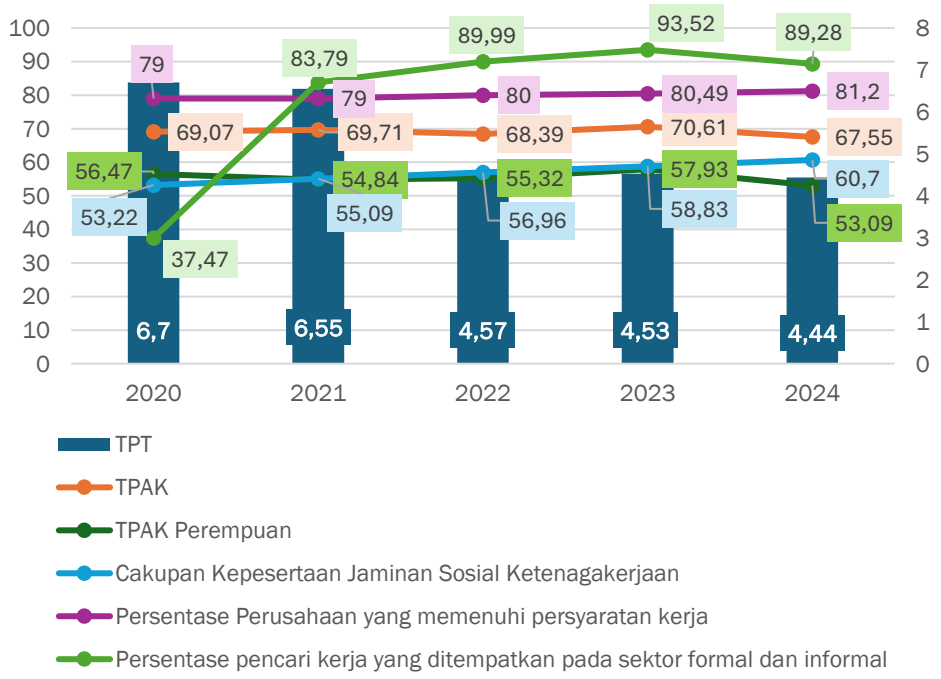
Indikator yang berkaitan dengan jumlah lembaga kesejahteraan sosial seperti Panti asuhan, rumah jompo dan rumah singgah yang aktif menjelaskan penurunan secara kuantitas dari periode awal 2020 sebanyak 18 Lembaga Kesejahteraan Sosial kemudian dalam rentang waktu tahun berjalan atau tahun 2024 turun menjadi 12 lembaga yang disebabkan karena eksistensi dari penyelenggara lembaga yang menurun sebagai akibat standarisasi lembaga kesejahteraan Sosial. Sedangkan Indikator kinerja persentase eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil hidup mandiri capaiannya stagnan dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2023 sebesar 40% dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 14,34%. Menurunnya eks penyandang penyakit sosial yang di bina karena sudah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1) TENAGA KERJA

Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa. Oleh sebab itu urusan ketenagakerjaan merupakan salah indikator kinerja yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan urusan ketenagakerjaan menggambarkan kualitas sumber daya manusia daerah tersebut yang berkaitan dengan tingkat pendidikan dan kemudian mempengaruhi

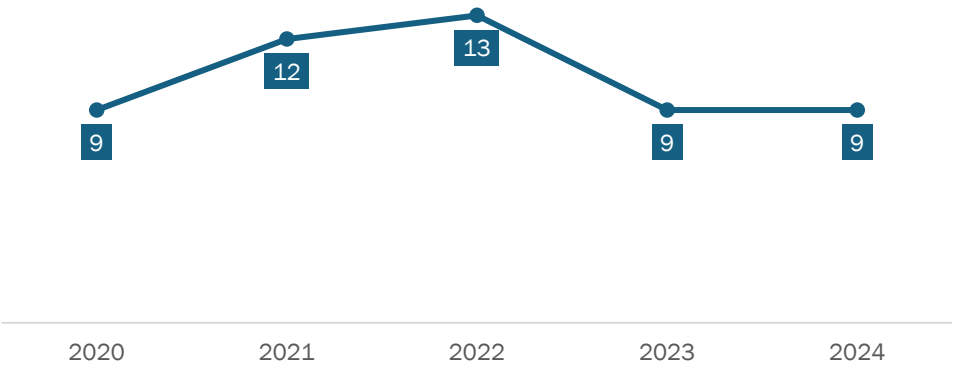
tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja dibedakan menjadi dua yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Jumlah Angkatan kerja dapat diketahui dari TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) yang merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Indikator kinerja daerah dari urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dari TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja).



Gambar II-84 Capaian Indikator Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, 2025

Berikut merupakan grafik capaian urusan ketenagakerjaan dari tahun 2020-2024. Data ketenagakerjaan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren perbaikan yang konsisten dalam berbagai indikator. Salah satu pencapaian yang paling menonjol adalah penurunan signifikan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang berhasil ditekan dari 6,7% di tahun 2020 menjadi 4,44% di tahun 2024, mengindikasikan adanya peningkatan kesempatan kerja. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan juga mengalami peningkatan yang stabil, naik dari 53,22% menjadi 60,7% dalam kurun waktu lima tahun. Hal ini mencerminkan perluasan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja. Selain itu, kepatuhan perusahaan juga meningkat, yang terlihat dari persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan yang terus merangkak naik dari 79%

menjadi 81,2%. Persentase pencari kerja yang ditempatkan pada sektor formal dan informal melonjak tajam, dari hanya 37,47% di tahun 2020 menjadi 89,28% di tahun 2024. Peningkatan drastis ini menunjukkan efektivitas program penempatan kerja atau pemulihan pasar tenaga kerja yang kuat pasca-tahun 2020. Meskipun sebagian besar indikator menunjukkan tren positif, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan sedikit fluktuasi, mencapai puncaknya di 70,61% pada tahun 2023 sebelum sedikit menurun menjadi 67,55% di tahun 2024. Hal ini mungkin mengindikasikan adanya pergeseran dalam komposisi angkatan kerja atau faktor-faktor lain yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pasar kerja. Secara keseluruhan, data ini merefleksikan keberhasilan kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaan selama periode tersebut



Gambar II-85 Angka Sengketa Perusahaan - Pekerja Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, 2025

Indikator Angka Sengketa Perusahaan – Pekerja memiliki capaian yang fluktuatif namun cenderung menurun. Hal ini diartikan kasus perselisihan antara perusahaan dengan pekerja di Kota Probolinggo semakin berkurang. Pada grafik di atas menunjukkan angka sengketa antara perusahaan dan pekerja di Kota Probolinggo selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, tercatat 9 kasus sengketa. Angka ini meningkat pada 2021 menjadi 12 kasus dan mencapai puncaknya pada 2022 dengan 13 kasus sengketa, menunjukkan adanya peningkatan ketegangan hubungan industrial selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2023 hingga 2024 terjadi penurunan signifikan dengan jumlah sengketa kembali turun menjadi 9 kasus.

2) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

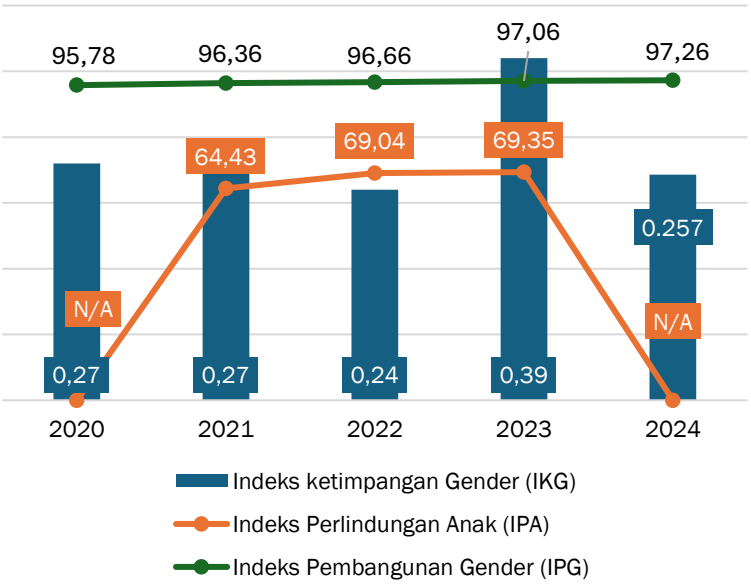
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sosial yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender dan memastikan hak-hak anak terpenuhi. Pemberdayaan perempuan berfokus pada peningkatan kapasitas, peran, dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Melalui program pelatihan keterampilan, pemberian akses ekonomi, serta peningkatan pendidikan dan kesehatan, perempuan didorong untuk lebih mandiri dan berdaya saing. Sinergi antara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diharapkan mampu menciptakan keluarga dan masyarakat yang harmonis, sejahtera, serta ramah anak, yang menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Berikut merupakan beberapa indikator yang mencerminkan capaian dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada kurun waktu 2020- 2024:

Tabel II.41 Kota Layak Anak Tahun 2020-2024

INDIKATOR	TAHUN				
Kota Layak Anak	2020	2021	2022	2023	2024
	Madya	Nindya	Utama	Utama	Utama*

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, 2025

Status Kota Layak Anak (KLA) di Kota Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, Kota Probolinggo memperoleh predikat Madya, yang kemudian meningkat menjadi Nindya pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya serius dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak. Lebih lanjut, pada tahun 2022 hingga 2024, Kota Probolinggo berhasil meraih predikat Utama, yang merupakan salah satu tingkat penghargaan tinggi dalam KLA. Pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung hak-hak anak.



Gambar II-86 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik tentang Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi pada dua indikator utama, yaitu Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA). Secara umum, capaian IKG mengalami dinamika dari tahun ke tahun, sempat menunjukkan stabilitas pada awal periode, kemudian menurun, dan kembali meningkat secara signifikan sebelum akhirnya tidak tersedia pada tahun terakhir. Sementara itu, capaian IPA menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Perubahan capaian ini mencerminkan adanya berbagai faktor pendorong dan penghambat.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator penting yang mengukur capaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan gender. IPG melihat disparitas capaian antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu: (1) dimensi umur panjang dan hidup sehat; (2) dimensi pengetahuan; dan (3) dimensi standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPG (mendekati 100), semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di suatu daerah.

Berdasarkan tabel/grafik di atas, terlihat bahwa IPG (Indeks Pembangunan Gender) secara berkelanjutan meningkat dari 95.87 pada tahun 2020 menjadi 97.26 pada tahun 2024. Peningkatan capaian sebesar 1.39 dalam kurun waktu

empat tahun ini menandakan keberhasilan upaya Pemerintah Daerah beserta seluruh pemangku kepentingan dalam mengurangi kesenjangan gender. Capaian ini merefleksikan perbaikan yang signifikan dalam hal akses dan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penguasaan sumber daya ekonomi. Pencapaian IPG di atas 95 menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan gender di daerah kita tergolong rendah. Hal ini menjadi modal dasar yang kuat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

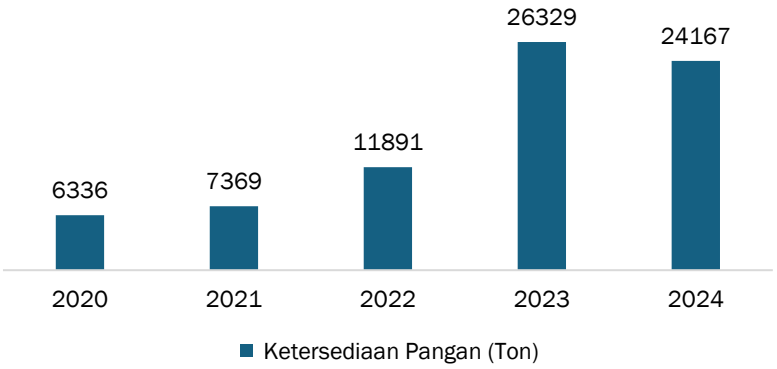
Peningkatan capaian kemungkinan didorong oleh penguatan program-program kesetaraan gender dan perlindungan anak, dukungan kebijakan yang lebih responsif, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Di sisi lain, penurunan atau stagnasi bisa disebabkan oleh hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta tantangan dalam pengumpulan dan pelaporan data yang akurat dan berkelanjutan. Ketidaksediaan data pada tahun terakhir menjadi catatan penting yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sistem pemantauan dan evaluasi agar program yang telah berjalan dapat terus dipantau dan ditingkatkan efektivitasnya.

3) PANGAN

Urusan Pangan merupakan aspek fundamental dalam menjaga ketahanan dan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pangan mencakup ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan aktif. Upaya dalam bidang pangan meliputi peningkatan produksi pangan lokal, pengembangan sistem distribusi yang efisien, serta pengendalian harga untuk memastikan keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, perhatian terhadap keamanan dan kualitas pangan menjadi prioritas guna mencegah potensi risiko kesehatan. Urusan pangan tidak hanya berfokus pada aspek produksi dan distribusi, tetapi juga mencakup edukasi masyarakat tentang pola konsumsi sehat, pengurangan food loss dan food waste, serta penguatan cadangan pangan dalam menghadapi potensi krisis atau bencana.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah indikator yang mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat di suatu wilayah. Skor ini menunjukkan keragaman dan keseimbangan kelompok pangan yang dikonsumsi, dengan skor maksimal

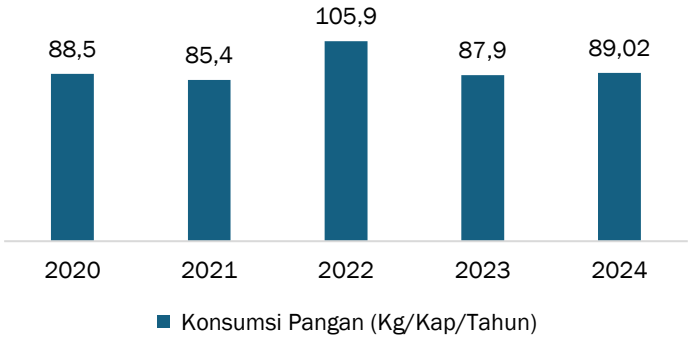
100. Semakin tinggi skor PPH, semakin beragam dan seimbang pola konsumsi pangan penduduk, yang berarti semakin baik kualitas konsumsi pangan secara keseluruhan. PPH digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan dan membantu mewujudkan ketahanan pangan serta pemenuhan gizi seimbang.



Gambar II-87 Ketersediaan Pangan (Ton) Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

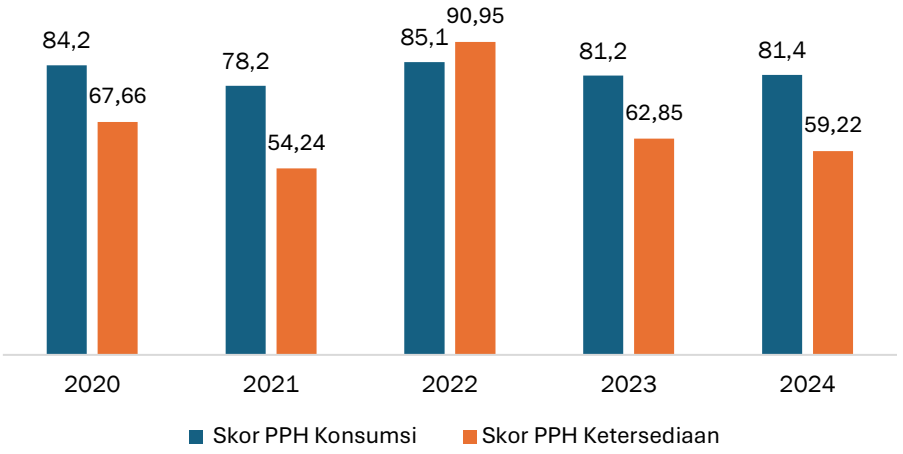
Ketersediaan pangan di Kota Probolinggo mengalami tren peningkatan signifikan sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah ketersediaan pangan tercatat sebesar 6.336 ton dan mengalami kenaikan menjadi 7.369 ton di tahun 2021. Peningkatan lebih tajam terlihat pada tahun 2022 dengan ketersediaan mencapai 11.891 ton. Puncak ketersediaan pangan terjadi di tahun 2023 dengan lonjakan signifikan hingga 26.329 ton, menunjukkan adanya peningkatan produksi atau keberhasilan program ketahanan pangan di kota tersebut. Namun, pada tahun 2024, angka tersebut sedikit menurun menjadi 24.167 ton, meskipun masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun awal.

Ketersediaan pangan daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan pemerintah daerah, serta pasokan dari luar daerah jika kebutuhan tidak terpenuhi oleh sumber-sumber tersebut. Secara sederhana, ini adalah jumlah makanan yang tersedia di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan makan masyarakatnya. Ketersediaan pangan daerah sangat penting karena berkaitan erat dengan ketahanan pangan masyarakat di suatu daerah. Ketahanan pangan adalah kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri dan berkelanjutan. Ketersediaan pangan yang baik akan mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar II-88 Konsumsi Pangan (Kg/Kap/Tahun) Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

Konsumsi pangan adalah segala jenis dan jumlah makanan serta minuman yang dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hayatinya. Konsumsi pangan mencakup berbagai aspek, seperti jenis makanan yang dikonsumsi, jumlahnya, frekuensi konsumsi, dan juga bagaimana makanan tersebut dipersiapkan. Konsumsi pangan di Kota Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, konsumsi pangan tercatat sebesar 88,5 kg/kapita/tahun dan mengalami sedikit penurunan menjadi 85,4 kg/kapita/tahun di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan konsumsi yang cukup tinggi hingga mencapai 105,9 kg/kapita/tahun, menjadi angka tertinggi selama periode tersebut. Tahun 2023 menunjukkan penurunan kembali ke angka 87,9 kg/kapita/tahun, mendekati tingkat konsumsi pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2024 dengan konsumsi pangan sebesar 89.02 kg/kapita/tahun melebihi besaran konsumsi pangan di tahun 2020.



Gambar II-89 Capaian Indikator Urusan Pangan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

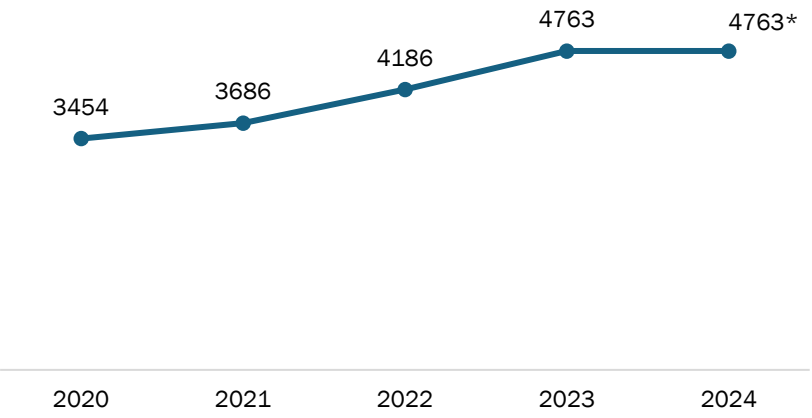
Berdasarkan grafilk Tren skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk konsumsi dan ketersediaan di Kota Probolinggo selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang menggambarkan ketidakseimbangan antara pola konsumsi masyarakat dan ketersediaan pangan lokal. Skor PPH konsumsi secara umum menunjukkan nilai yang relatif stabil, berada di atas angka 78, yang mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung mengonsumsi pangan yang lebih beragam dan mendekati pola konsumsi ideal. Peningkatan skor tertinggi terjadi pada tahun 2022 (85,1), yang kemungkinan besar didorong oleh program peningkatan kesadaran gizi dan edukasi konsumsi pangan seimbang.

Sebaliknya, skor PPH ketersediaan menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2021 (54,24), yang bisa disebabkan oleh gangguan distribusi dan produksi pangan akibat dampak pandemi serta gangguan rantai pasok. Meskipun terdapat lonjakan skor ketersediaan pada 2022 mencapai 90,95, yang mengindikasikan adanya intervensi kebijakan dalam penguatan produksi dan cadangan pangan, namun skor tersebut kembali turun di tahun 2023 dan 2024. Penurunan ini menandakan tantangan dalam mempertahankan kontinuitas ketersediaan pangan, yang mungkin disebabkan oleh perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, atau kurangnya dukungan terhadap sektor pertanian lokal. Faktor pendorong capaian positif meliputi program edukasi konsumsi pangan bergizi, penguatan sistem distribusi, dan dukungan kebijakan ketahanan pangan. Sementara itu, faktor penghambat yang dominan antara lain adalah kerentanan terhadap gangguan pasokan, kurangnya diversifikasi sumber pangan lokal, dan keterbatasan lahan pertanian di wilayah perkotaan seperti Kota Probolinggo.

4) PERTANAHAN

Urusan pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pertanahan mencakup aspek pengaturan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengendalian tanah agar sesuai dengan peruntukannya serta dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pengelolaan pertanahan yang baik dapat mendorong pemerataan akses lahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi potensi konflik agraria. Selain itu, pertanahan juga berkaitan erat dengan sektor lain seperti perumahan, infrastruktur, pertanian, dan investasi. Oleh karena itu, tata

kelola pertanahan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci dalam menciptakan kepastian hukum hak atas tanah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan. Perencanaan penggunaan lahan yang tepat juga membantu mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta memastikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan konservasi sumber daya alam.



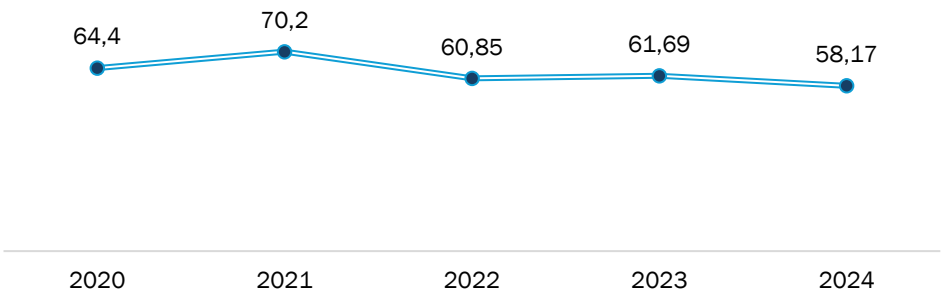
Gambar II-90 Capaian Indikator Jumlah Tanah yang Bersertifikat Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Probolinggo, 2025
Keterangan: (*) Data sementara

Berdasarkan data jumlah tanah yang bersertifikat di Kota Probolinggo menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah tanah bersertifikat tercatat sebanyak 3.454 bidang. Angka ini meningkat menjadi 3.686 bidang pada tahun 2021 dan terus bertambah menjadi 4.186 bidang pada tahun 2022. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan capaian 4.763 bidang tanah bersertifikat. Jumlah ini kemudian bertahan di angka yang sama, yakni 4.763 bidang, hingga tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui program sertifikasi tanah, yang berkontribusi penting terhadap ketertiban administrasi pertanahan dan peningkatan nilai ekonomi tanah masyarakat.

5) LINGKUNGAN HIDUP

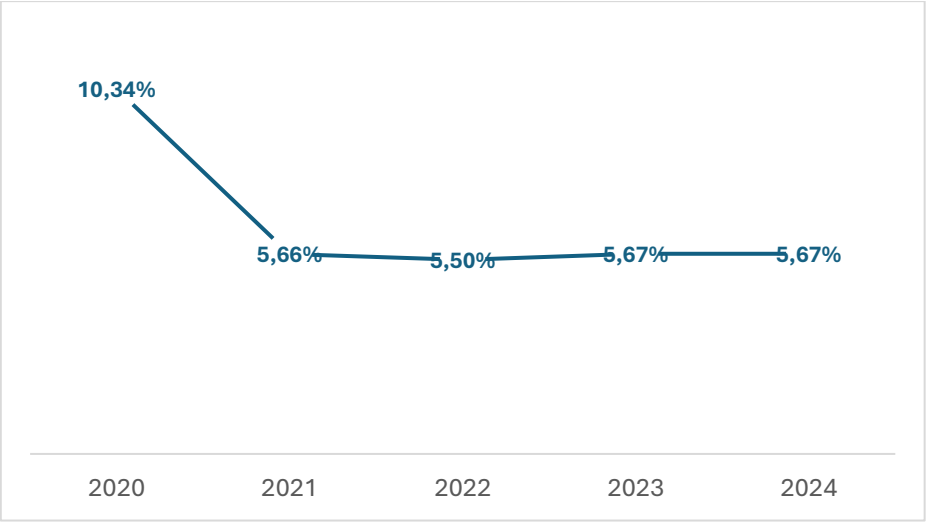
Urusan lingkungan hidup memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Lingkungan hidup mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan sumber daya alam, pengendalian

pencemaran, pelestarian keanekaragaman hayati, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam sangat dibutuhkan, termasuk melalui program edukasi lingkungan dan gerakan ramah lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, lingkungan hidup dapat terus memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi sekarang dan yang akan datang.



Gambar II-91 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Probolinggo menunjukkan fluktuasi sepanjang periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IKLH tercatat sebesar 64,4 dan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2021 mencapai puncaknya di angka 70,2, yang mengindikasikan adanya perbaikan kualitas lingkungan pada tahun tersebut. Namun, mulai tahun 2022, indeks menurun tajam menjadi 60,85 dan hanya mengalami sedikit peningkatan di tahun 2023 menjadi 61,69. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2024 dengan skor mencapai titik terendah di angka 58,17. Penurunan kualitas lingkungan hidup ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan polusi, penurunan tutupan lahan hijau, atau kurangnya efektivitas program pelestarian lingkungan. Tren penurunan sejak 2021 menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Probolinggo.



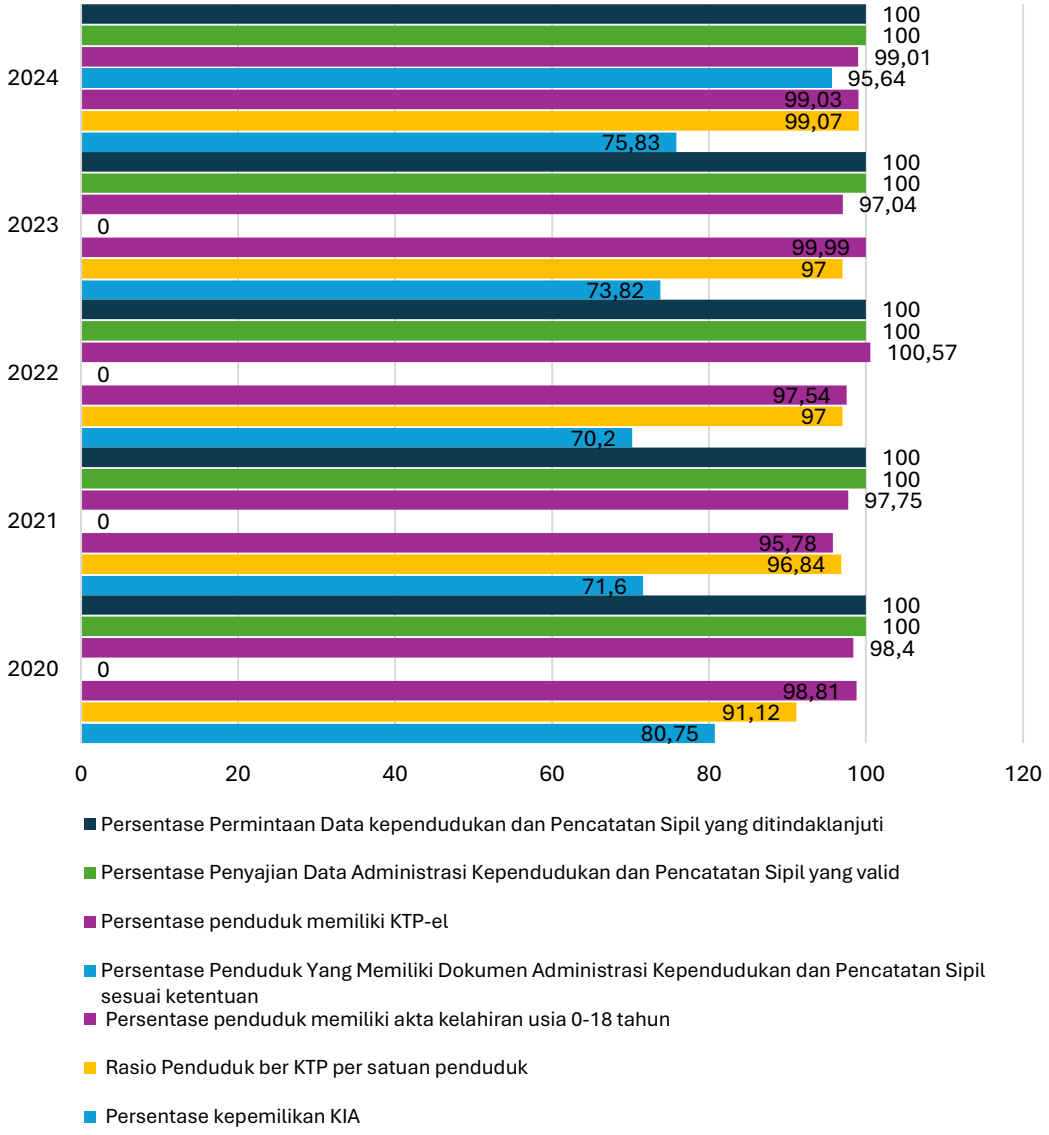
Gambar II-92 Ruang Terbuka Hijau Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, 2025

Capaian ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Probolinggo selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan tajam pada awal periode dan stagnasi di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2020 mencatat persentase tertinggi sebesar 10,34%, namun terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 5,66%. Persentase RTH relatif tidak mengalami perubahan berarti dari tahun 2021 hingga 2024, berkisar antara 5,50% hingga 5,67%. Kondisi ini mencerminkan perlunya kebijakan dan intervensi yang lebih kuat dalam pengembangan ruang terbuka hijau, terutama untuk memenuhi target ideal minimal 30% dari luas wilayah kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RTH yang memadai tidak hanya mendukung kualitas lingkungan hidup, tetapi juga meningkatkan daya dukung kota terhadap perubahan iklim dan kenyamanan ruang publik.

6) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada pengelolaan data dan dokumen kependudukan secara akurat, tertib, dan terintegrasi. Urusan ini mencakup berbagai layanan dasar seperti pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perubahan status kependudukan lainnya, yang menjadi landasan hukum identitas setiap warga negara. Selain itu, administrasi kependudukan juga meliputi penerbitan dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran,

dan Akta Kematian. Pengelolaan data kependudukan yang baik tidak hanya mendukung penyusunan kebijakan publik yang tepat sasaran, tetapi juga mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan sosial, pendidikan, kesehatan, serta hak-hak sipil lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan menjadi kunci untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Gambar II-93 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, 2025

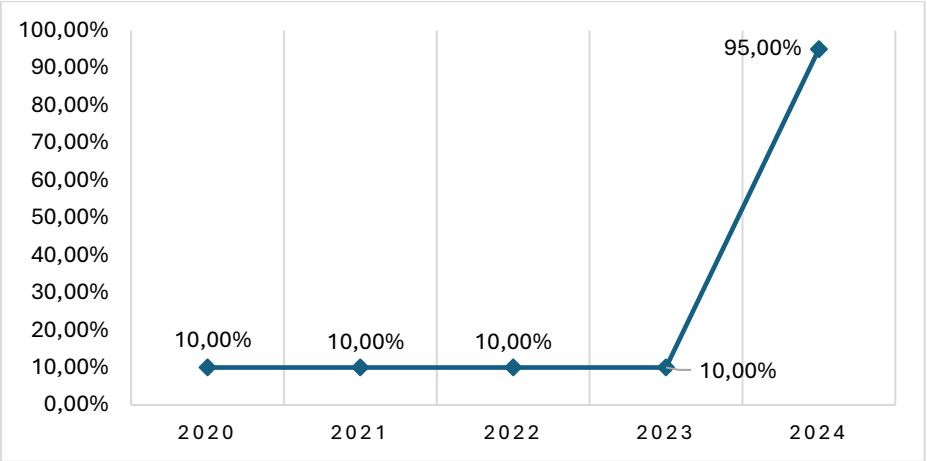
Capaian indikator urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Probolinggo pada periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan di beberapa aspek. Sebagian besar indikator, seperti persentase penduduk yang

memiliki akta kelahiran dan KTP-el, serta Persentase Penyajian Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang valid, dan Persentase Permintaan Data kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti, sudah mencapai atau mendekati 100% dan stabil selama periode tersebut. Indikator lain, seperti rasio penduduk per KTP, juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 91,12% menjadi 99,07%. Meskipun persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) berfluktuasi, angkanya tetap menunjukkan peningkatan di tahun 2024. Meskipun untuk indikator Persentase penduduk memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun mengalami penurunan dari tahun 2023 ke 2024 yakni 99,99 menjadi 99,03 namun secara keseluruhan mencerminkan efisiensi dan cakupan layanan administrasi kependudukan yang sangat tinggi

7) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Urusan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Pemerintah Kecamatan. Keberhasilan urusan Pemberdayaan Masyarakat ini diukur melalui dua indikator kinerja utama, yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan Persentase Kelompok Masyarakat yang Aktif. Kedua indikator ini saling berkaitan erat, di mana fasilitasi kepada lembaga diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas dan partisipasi masyarakat.

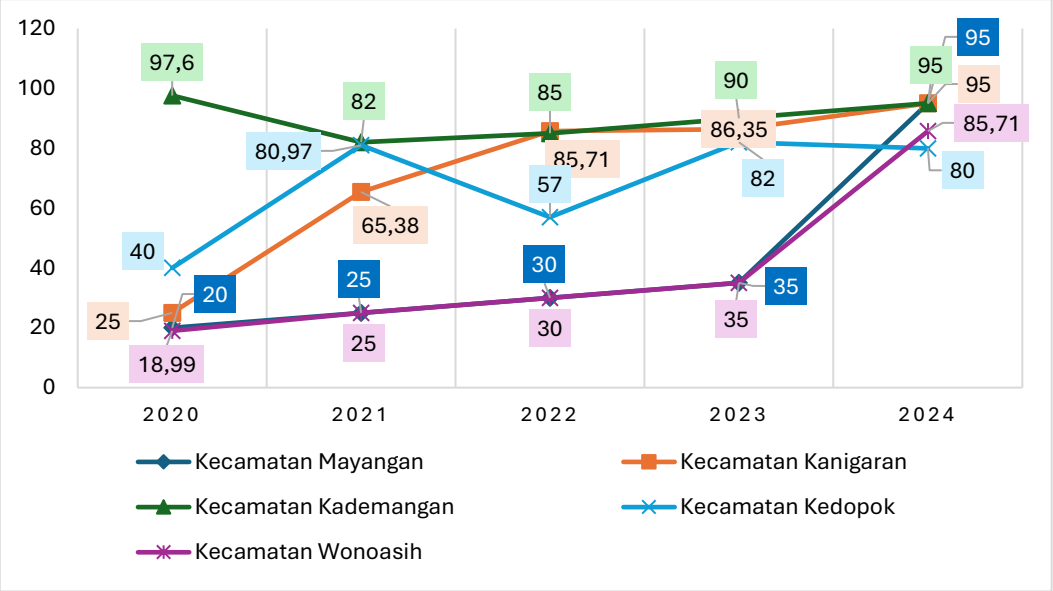
Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kecamatan telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan khususnya LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan). Hal ini terbukti dari kenaikan rata-rata Persentase Lembaga yang difasilitasi oleh Dinsos PPPA yang digambarkan pada gambar berikut.



Gambar II-94 Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi oleh Dinsos PPPA Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, 2025

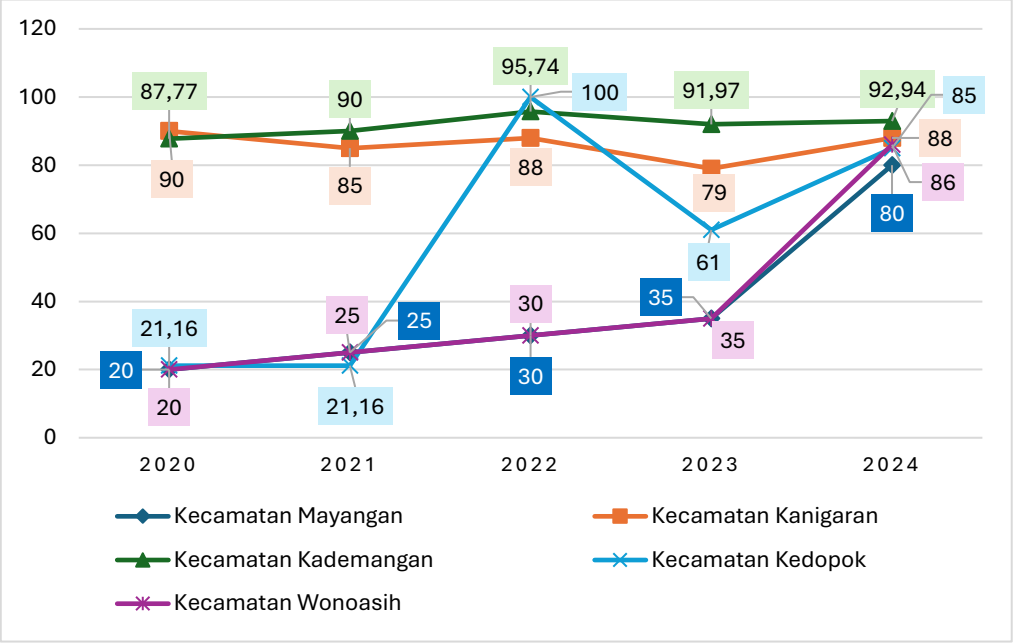
Untuk Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020-2023 hanya terbatas pada kegiatan PKK Kelurahan dan Kecamatan sehingga capaiannya stagnan selama tiga tahun yaitu sebesar 10%. Sementara pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan menjadi sebesar 95% karena terdapat penambahan anggaran untuk reward LKK sehingga pembinaan dan pemberdayaan LKK kelurahan dan kecamatan dapat dioptimalkan.



Gambar II-95 Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi oleh Kecamatan Tahun 2020-2024

Sumber: Kecamatan Kota Probolinggo, 2025

Pada tahun 2020, capaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi tertinggi berada di Kecamatan Kademangan yaitu sebesar 97,60%, sementara beberapa kecamatan seperti Kanigaran, Mayangan dan Wonoasih masih berada di bawah 25%. Untuk capaian tahun 2024, capaian di hampir seluruh kecamatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan yang berkelanjutan telah berhasil menjaga keberadaan dan aktivitas lembaga kemasyarakatan serta jangkauan pemerintah dalam menyentuh lembaga kemasyarakatan di seluruh wilayah telah merata dan efektif serta telah menciptakan pondasi yang kuat untuk partisipasi masyarakat.



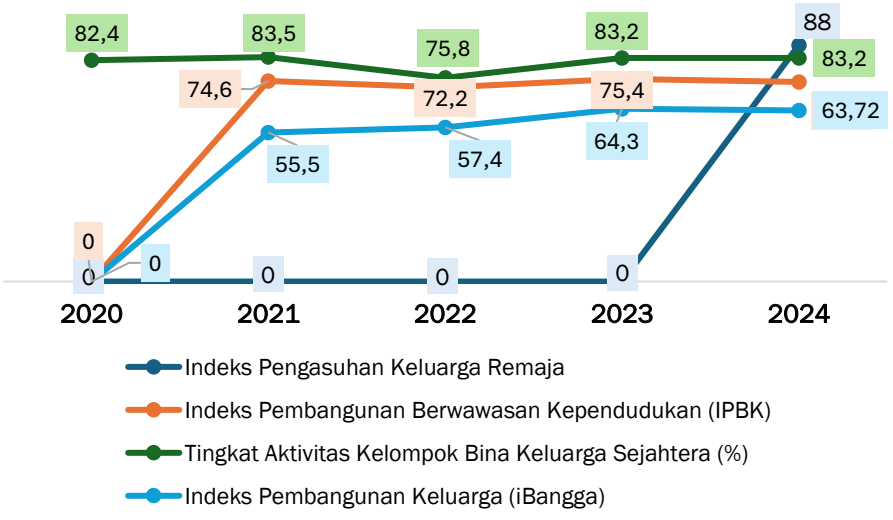
Gambar II-96 Persentase Kelompok Masyarakat Aktif Tahun 2020-2024
Sumber: Kecamatan Kota Probolinggo, 2025

Peningkatan fasilitasi lembaga kemasyarakatan berbanding lurus dengan kenaikan persentase kelompok masyarakat yang aktif. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berhasil memicu semangat gotong royong dan partisipasi di tingkat paling bawah. Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan tren positif terlihat di hampir semua kecamatan, di mana persentase kelompok masyarakat yang aktif mengalami kenaikan yang substansial. Pada tahun 2024 Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Kanigaran menunjukkan peningkatan yang konsisten, yakni sebesar 88% di Kecamatan Kanigaran dan sebesar 92,94% di Kecamatan Kademangan. Peningkatan yang sangat luar biasa terjadi di Kecamatan Mayangan dari tahun

2020 sebesar 20% kemudian di tahun 2024 menjadi sebesar 80%. Sementara di Kecamatan Wonoasih juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 20% pada tahun 2020 menjadi 86% di tahun 2024. Meskipun Kecamatan Kedopok telah mencapai 100% di tahun 2022, namun terjadi penurunan di tahun 2024menjadi 85%. Ini menjadi catatan penting yang mengindikasikan bahwa keberlanjutan partisipasi masyarakat membutuhkan perhatian khusus.

8) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sosial yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program ini berfokus pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui berbagai upaya strategis seperti penyuluhan, pelayanan kontrasepsi, dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Pengendalian penduduk tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kelahiran, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perencanaan keluarga yang matang. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat, dukungan infrastruktur kesehatan, serta sinergi antar lembaga terkait untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.



Gambar II-97 Tingkat Aktivitas Kelompok Bina Keluarga Sejahtera, Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja dan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2025

Data lima tahun terakhir menunjukkan dinamika capaian indikator kunci yang relevan dengan urusan pengendalian penduduk. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah indikator komposit yang mengukur sejauh mana pembangunan di suatu wilayah telah mempertimbangkan aspek dan dinamika kependudukan secara holistik. IPBK merepresentasikan lima dimensi utama, yaitu: Partisipasi, Keberlanjutan, Pemihakan, Integrasi, dan Kesetaraan. Nilai IPBK yang semakin tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin berhasil dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang selaras dengan kondisi dan kebutuhan penduduknya, termasuk dalam memastikan partisipasi masyarakat, keberlanjutan program, keberpihakan kepada kelompok rentan, integrasi isu kependudukan ke dalam semua sektor pembangunan, dan terciptanya kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, capaian IPBK menjadi tolok ukur penting keberhasilan upaya pengendalian penduduk dan pembangunan sumber daya manusia di daerah.

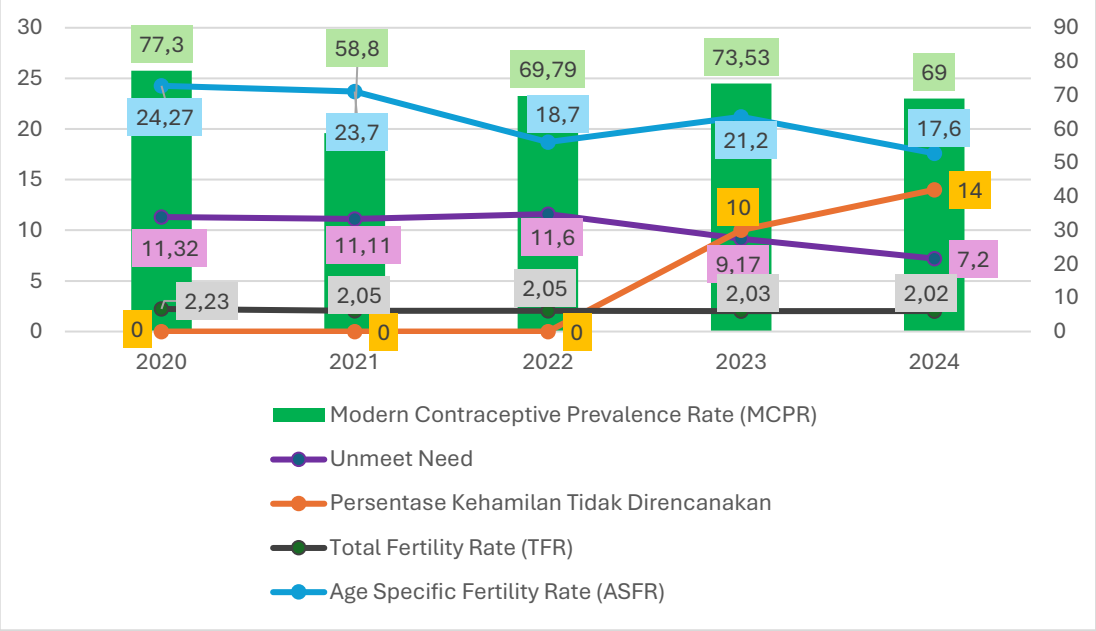
Berdasarkan grafik diatas, Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kota Probolinggo terlihat bahwa pada tahun 2020 indikator ini belum ada/dinilai. Pada tahun 2021 capaian indeks ini 74,6, kemudian sedikit menurun di tahun 2022 menjadi 72,2. Capaian kembali menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 di angka 75,4, meskipun sedikit menurun di tahun 2024 menjadi 74,3. Angka IPBK yang berada di kisaran 70-an menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang berwawasan kependudukan perlu terus diperkuat, terutama dalam mengintegrasikan aspek demografi ke dalam perencanaan pembangunan sektoral.

Tingkat Aktivitas Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) mencerminkan sejauh mana kelompok-kelompok keluarga di masyarakat (seperti BKB, BKR, BKL, UPPKA) aktif dalam mengikuti kegiatan penyuluhan, pertemuan, dan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Tingkat Aktivitas Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) terlihat bahwa pada tahun 2020 capaian berada di angka 82,4. Angka ini sedikit meningkat di tahun 2021 menjadi 83,5, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 75,8. Meskipun demikian, tren positif kembali terlihat di tahun 2023 dengan kenaikan menjadi 82,2 dan dilanjutkan dengan peningkatan stabil di tahun 2024 mencapai 83,2. Fluktuasi ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi

partisipasi dan aktivitas kelompok BKS, serta strategi untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan cakupan program secara berkelanjutan.

Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja menunjukkan perkembangan yang menarik. Pada rentang tahun 2020 hingga 2023, indikator ini belum muncul di Renstra BKKBN yg saat ini menjadi Kemendukbangga . Namun, pada tahun 2024 capaian indikator ini adalah 88. Ini mengindikasikan adanya intervensi atau program baru yang sangat efektif dalam mendukung pengasuhan remaja di tingkat keluarga . Pencapaian tinggi ini menjadi modal penting untuk terus mengembangkan program-program yang berfokus pada kesejahteraan dan pengembangan potensi remaja, sejalan dengan bonus demografi yang akan dihadapi.

iBangga adalah pengukuran kualitas keluarga yang mencakup dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Ibangga digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam pembangunan kualitas keluarga dan mengklasifikasikan wilayah berdasarkan status pembangunan keluarga (tangguh, berkembang, atau rentan). Di Kota Probolinggo iBangga baru tersaji data pada tahun 2021 dengan capaian yang terus meningkat di tahun 2021 sebesar 55,5 menjadi 64,3 di tahun 2023. Sedangkan di tahun 2024 kembali turun menjadi 63,72. Hal ini dikarenakan masih adanya pernikahan siri dan pernikahan dibawah umur serta tingginya angka perceraian.



Gambar II-98 Capaian Indikator Keluarga Berencana (KB) Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2025

Pada tahun 2020, m-CPR di Kota Probolinggo tercatat sebesar 77,3% yang merupakan capaian tertinggi selama 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 59,8%. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi kenaikan hingga mencapai angka 69,79% dan diikuti peningkatan kembali pada tahun 2023 menjadi 73,53%. Hal ini tentunya menunjukkan adanya peningkatan kesertaan masyarakat dalam penggunaan kontrasepsi modern. Meskipun demikian, di tahun 2024 angka m-CPR sedikit menurun menjadi 69%. Perubahan ini mencerminkan dinamika dalam penggunaan kontrasepsi modern di Kota Probolinggo yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perencanaan kehidupan berkeluarga, ketersediaan alat kontrasepsi, sosialisasi program keluarga berencana, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan kontrasepsi modern.

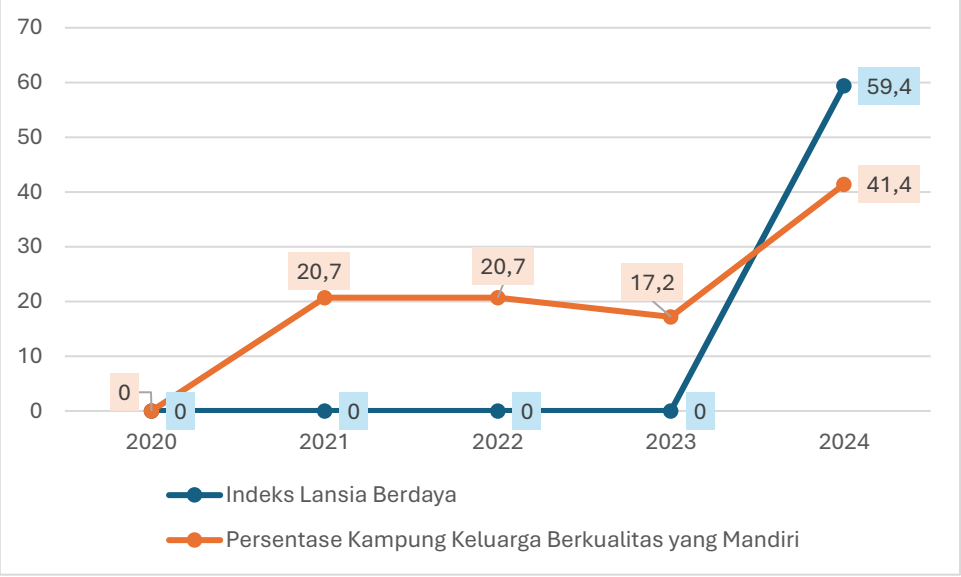
Total Fertility Rate atau Angka Kesuburan Total merupakan indicator demografi yang menunjukkan jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. TFR di Kota Probolinggo mengalami penurunan tiap tahunnya, pada tahun 2020 capaian TFR sebesar 2,23 dan turun menjadi 2,05 di tahun 2021 dan tahun 2022. Pada tahun 2023, TFR juga mengalami penurunan menjadi 2,03 dan di tahun 2024 turun Kembali menjadi 2,02. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran Masyarakat yang mulai peduli terhadap perencanaan kehidupan berkeluarga yang berpengaruh pada kualitas anak, baik dari faktor kesehatan maupun pendidikan.

Sedangkan indikator untuk mengukur banyaknya kelahiran hidup per 1.000 wanita pada kelompok umur tertentu dapat dilihat melalui capaian *Age Specific Fertility Rate* (ASFR). ASFR di Kota Probolinggo menunjukkan stabilitas yang relatif baik, pada tahun 2020 mencapai 24,27 dan turun di tahun 2021 mencapai 23,7 hingga 18,7 di tahun 2022. Pada tahun 2023 ASFR kembali naik hingga 21,2, namun mengalami penurunan kembali di tahun 2024 menjadi 17,6. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian kelahiran pada kelompok usia reproduktif berjalan cukup konsisten, meskipun masih perlu dijaga agar tidak terjadi lonjakan di kelompok umur tertentu. Selain itu juga diindikasikan karena berkurangnya angka pernikahan dini dan kehamilan di usia muda serta

adanya peningkatan akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan di Kota Probolinggo.

Terkait *Unmet Need* atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, menunjukkan tren yang menggembirakan. Pada tahun 2020, angka *Unmet Need* tercatat sebesar 11,32%. Angka ini sedikit menurun menjadi 11,11% pada tahun 2021, namun sedikit naik kembali di tahun 2022 menjadi 11,6%. Kabar baiknya, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 9,17% dan terus menurun drastis hingga mencapai 7,2% di tahun 2024. Penurunan yang konsisten ini mengindikasikan semakin baiknya akses dan pemenuhan layanan Keluarga Berencana di masyarakat, serta keberhasilan upaya penyuluhan dan pendampingan.

Namun, di sisi lain, data Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan menunjukkan tren yang perlu diwaspadai. Pada tahun 2020 dan 2021, persentase ini masih berada di angka 0%. Namun, mulai tahun 2022, angka ini muncul dengan 1,87%, lalu melonjak tajam menjadi 10% di tahun 2023, dan terus meningkat hingga 14% di tahun 2024. Peningkatan signifikan ini menjadi tantangan serius yang mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor penyebab kehamilan yang tidak direncanakan, seperti kurangnya pemahaman tentang alat kontrasepsi, akses yang terbatas, atau faktor sosial ekonomi lainnya. Intervensi yang lebih gencar dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.



Gambar II-99 Capaian Indeks Lansia Berdaya dan Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Yang Mandiri Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, 2025

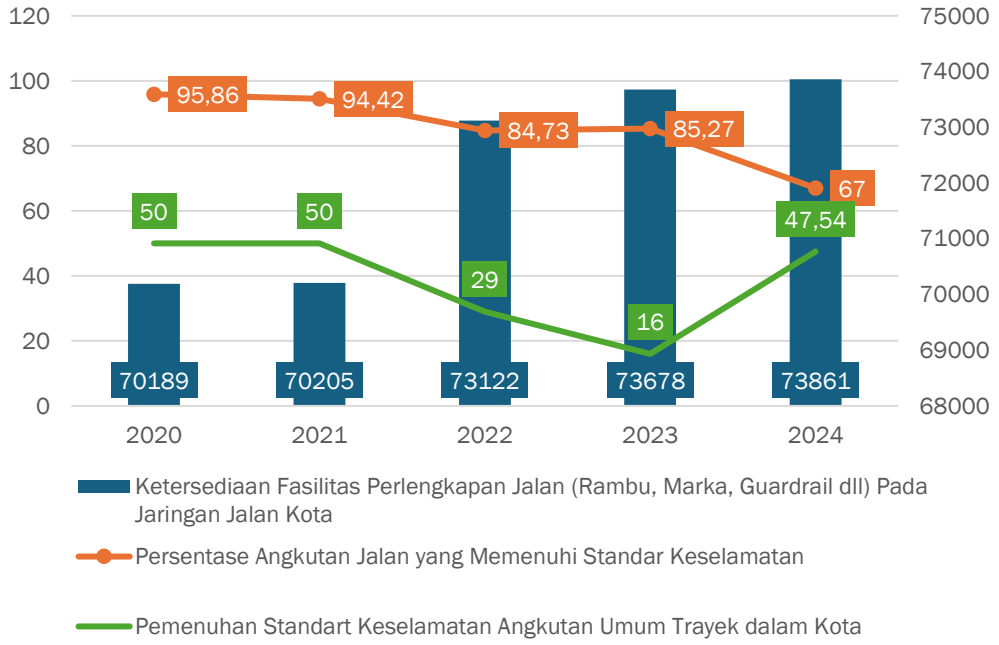
Dalam upaya mewujudkan pembangunan keluarga dan pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan program Kampung Keluarga Berkualitas, data lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang signifikan. Indeks Lansia Berdaya dirilis oleh Kemendukbangga pada tahun 2024 indikator ini muncul dan capaian untuk Kota Probolinggo adalah 59,4. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2024 telah ada intervensi atau program spesifik yang efektif dalam mendorong kemandirian dan keberdayaan lansia, atau adanya sistem pengukuran yang lebih komprehensif. Capaian ini menjadi fondasi penting untuk terus mengembangkan program pemberdayaan lansia agar mereka dapat berperan aktif dan produktif dalam masyarakat.

Untuk Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri, dapat dilihat adanya pertumbuhan yang bervariasi. Pada tahun 2020, persentasenya masih 0. Kemudian, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 mencapai 20,7% dan stabil di angka tersebut pada tahun 2022. Meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2023 menjadi 17,2% karena penambahan jumlah kampung keluarga berkualitas dari t kelurahan menjadi 29 kelurahan , persentase ini melonjak drastis di tahun 2024 hingga mencapai 41,4%. Lonjakan di tahun terakhir menunjukkan keberhasilan program dalam mendorong kemandirian Kampung Keluarga Berkualitas, yang kemungkinan didukung oleh kebijakan atau program intensif. Peningkatan ini adalah bukti nyata dari komitmen daerah dalam menciptakan keluarga dan komunitas yang berdaya secara mandiri.

9) PERHUBUNGAN

Urusan perhubungan memegang peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Sistem transportasi yang terintegrasi dan efisien mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperluas akses ke berbagai layanan, serta mengurangi waktu dan biaya perjalanan. Di Kota Probolinggo, pengelolaan urusan perhubungan meliputi pengembangan infrastruktur jalan, optimalisasi transportasi umum, pengaturan lalu lintas, dan peningkatan keselamatan lalu lintas. Selain itu, upaya untuk mengurangi kemacetan, mengembangkan fasilitas transportasi ramah lingkungan, dan

meningkatkan kualitas pelayanan transportasi menjadi fokus utama. Kinerja urusan perhubungan sebagai gambaran kondisi transportasi di Kota Probolinggo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir relatif baik.



Gambar II-100 Capaian Indikator Perhubungan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, 2025

Pada periode 2020-2024, ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Probolinggo, seperti rambu, marka, dan guardrail, menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Jumlah fasilitas tersebut bertambah dari 70.189 unit pada tahun 2020 menjadi 73.861 unit pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur jalan untuk mendukung keselamatan berlalu lintas. Namun, meskipun terjadi peningkatan fasilitas, persentase angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan justru mengalami penurunan. Pada tahun 2020, persentase ini berada di angka 95,86%, namun turun menjadi 84,73% di tahun 2022 sebelum sedikit membaik menjadi 85,27% di tahun 2023. Di sisi lain, pemenuhan standar keselamatan angkutan umum trayek dalam kota menunjukkan penurunan signifikan dari 50% pada tahun 2020 dan 2021 menjadi hanya 16% di tahun 2023. Meski begitu, ada sedikit perbaikan di tahun 2024 dengan peningkatan pemenuhan standar menjadi 47,54%. Data ini menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur jalan belum cukup untuk menjamin keselamatan lalu lintas secara menyeluruh. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik

infrastruktur, tapi juga mencakup pengawasan, peremajaan armada, dan peningkatan kompetensi pengemudi serta penegakan regulasi.

Jumlah perlintasan sebidang kereta api yang ada di Kota Probolinggo adalah sebanyak 19 titik, dimana 17 titik masih aktif dan 2 titik sudah ditutup yakni di Utara RSUD dr. Moh. Saleh dan Gang Lori dikarenakan bukan perlintasan resmi dan dikhawatirkan membahayakan masyarakat. Sejumlah 13 titik perlintasan sebidang ini kondisi eksisting sudah terdapat pos jaga dilengkapi dengan palang pintu, EWS, serta rambu dan marka. akan tetapi kondisi rambu dan marka yang ada sudah banyak yang pudar sehingga membutuhkan pemeliharaan dalam hal ini adalah pengecatan. Sedangkan 4 titik lokasi masih belum tersedia palang pintu sehingga membutuhkan perhatian yang lebih untuk direncanakan pengadaan. Adapun lokasi dari 17 titik perlintasan sebidang yang masih aktif adalah sebagai berikut :

- Jl. Anggrek (JPL 189 km. 98+443)
- Jl. Flamboyan (JPL 190 km. 98+872)
- Jl. S. Parman (JPL 3 km. 103+227)
- Jl. Sunan Muria (JPL 5 km. 105+388)
- Jl. Sunan Ampel (JPL 06 km. 106+383)
- Belakang Pos Polisi Ketapang (JPL 185 km. 96+785)
- Akses ke Masjid Tiban (JPL187 km. 97+550)
- Jl. Soekarno Hatta Gg. Gayam (JPL 188 km. 98+085)
- Jl. Soekarno Hatta Depan Kel. Pilang (JPL 188A km. 98+207)
- Jl. Wijaya Kusuma (JPL 192 km. 99+666)
- Jl. Ikan Hiu (JPL 194 km.101+172)
- Jl. Ikan Kerapu (JPL 195 km. 101+704)
- Jl. Pattimura (JPL 01 km. 102+100)
- Jl. Basuki Rahmad (JPL 02 km. 102+582)
- Jl. Panglima Sudirman (JPL 04 km. 103+771)
- Jl. Amir Hamzah (JPL 07 km. 107+268)
- Gg. Lapangan Kedungasem (JPL 10 km. 108+260)

Salah satu langkah penting dalam mendukung implementasi berkelanjutan adalah penyediaan transportasi umum yang layak, aman, dan terjangkau. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan fasilitas pengujian

kendaraan bermotor yang memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk membangun Gedung UPT PKB Kota Probolinggo yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang kompeten. Capaian indikator kinerja urusan perhubungan Kota Probolinggo tahun 2020-2024 berikut ini:

Tabel II.42 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	430.093	505.638	1.340.483	1.581.895	1.428.439
Rasio ijin trayek	%	1,6	1,6	0,9	0,5	1
Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	8.093	7.882	7.133	4.955	2.410
Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/ jumlah penumpang angkutan darat)	%	33,15%	-	-	-	
Jumlah angkutan darat	Unit	142.559	136.207	105.061	103.225	95.002
Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	430.093	505.638	1.340.483	1.581.895	1.428.439
Pemasangan rambu-rambu	Unit	1.198	1.198	1.247	1.282	1.317
Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	7.932	7.882	7.133	4.955	2.410
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	40	40	40	40	40
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp	30.000-40.000	30.000-40.000	30.000-40.000	30.000-40.000	0
Cakupan layanan angkutan umum pada jaringan jalan kota	%	32	32	32	32	32
Ketersediaan halte pada jalur trayek angkutan umum	Unit	24	24	24	24	24
Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardril, dll) pada jaringan jalan kota	Unit	70.189	70.205	73.122	73.678	73.861
Ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor untuk minimal 4.000 kendaraan	Unit	1	1	1	1	1
Pemenuhan standart keselamatan angkutan umum trayek dalam kota	Unit	50	50	29	16	32
Data organda	Organisasi	1	1	1	1	1

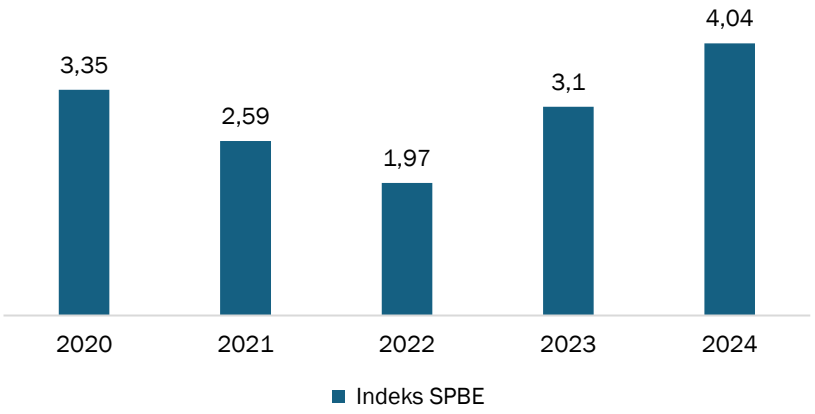
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, 2025

Capaian kinerja urusan perhubungan Kota Probolinggo selama periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami peningkatan yang pesat. Pada tahun 2020, jumlah penumpang tercatat sebanyak 430.093 orang dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan

1.581.895 penumpang, meskipun mengalami sedikit penurunan di tahun 2024 menjadi 1.428.439 penumpang. Tren ini mencerminkan peningkatan minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan transportasi. Kedua, indikator ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pada jaringan jalan kota menunjukkan tren positif. Jumlah fasilitas seperti rambu, marka, dan guardrail mengalami peningkatan dari 70.189 unit pada tahun 2020 menjadi 73.861 unit di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur jalan yang lebih aman dan memadai bagi pengguna jalan, yang diharapkan dapat mendukung kelancaran lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan. Ketiga, pemenuhan standar keselamatan angkutan umum trayek dalam kota menjadi perhatian penting meskipun mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2020 dan 2021, indikator ini berada di angka 50 unit, namun menurun drastis menjadi 16 unit di tahun 2023. Meskipun demikian, terdapat peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 32 unit. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan keselamatan angkutan umum perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui revitalisasi armada, peningkatan pengujian kendaraan serta pembinaan dan pengawasan terhadap operator angkutan demi menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang.

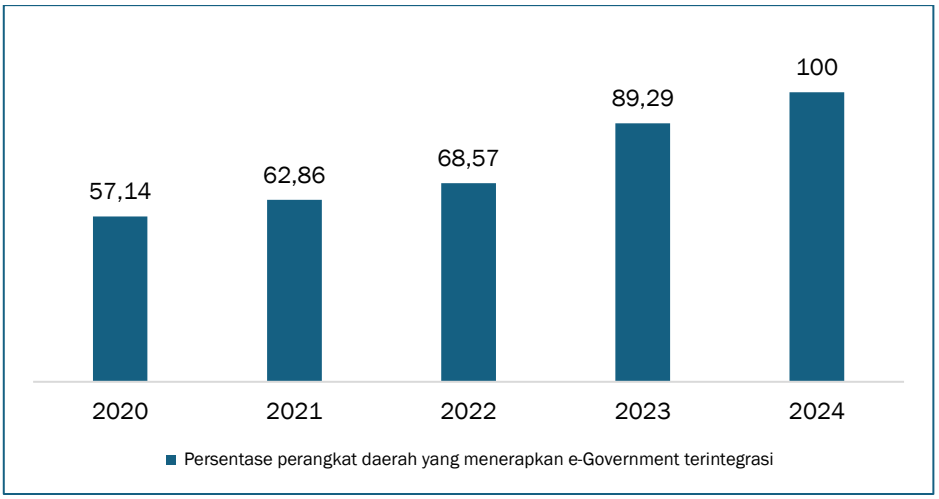
10) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan komunikasi dan informatika memegang peranan penting dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan percepatan arus informasi di berbagai sektor pemerintahan maupun masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong pemerintah untuk terus memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi. Dengan pengembangan yang terarah dalam sektor komunikasi dan informatika, diharapkan tercipta konektivitas yang kuat, masyarakat yang melek teknologi, dan layanan publik yang lebih efisien dan responsif.



Gambar II-101 Indeks SPBE Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan data terkait Indeks SPBE Kota Probolinggo tahun 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam tingkat penerapan e-Government oleh perangkat daerah. Pada tahun 2020, capaian indeks tercatat sebesar 3,35, namun mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 2,59 dan 1,97. Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan transformasi digital, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya integrasi sistem antar perangkat daerah, serta belum optimalnya kompetensi aparatur sipil negara dalam mengoperasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun demikian, mulai tahun 2023, Pemerintah Kota Probolinggo menunjukkan upaya serius untuk membalikkan tren tersebut. Indeks meningkat menjadi 3,1 dan melonjak lebih tinggi lagi pada tahun 2024 hingga mencapai angka 4,04. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai langkah strategis, seperti penguatan infrastruktur digital, pelatihan literasi digital bagi ASN, pengembangan layanan publik berbasis aplikasi, serta evaluasi dan pembenahan tata kelola sistem SPBE secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mulai berjalan secara sistematis dan berdampak pada peningkatan efisiensi pelayanan publik.



Gambar II-102 Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan E-Government Terintegrasi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, 2025

Pemerintahan elektronik atau e-government, yang juga dikenal sebagai e-gov, merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan kepada masyarakat, dunia usaha, serta berbagai aspek terkait pemerintahan. Persentase perangkat daerah di Kota Probolinggo yang menerapkan e-Government menunjukkan tren peningkatan signifikan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, sebesar 57,14% perangkat daerah telah mengadopsi sistem e-Government. Angka ini terus meningkat secara konsisten setiap tahunnya, mencapai 62,86% pada 2021 dan 68,57% pada 2022, mencerminkan adanya komitmen untuk memperluas digitalisasi layanan pemerintahan. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan persentase mencapai 89,29%, menunjukkan upaya akselerasi dalam penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan. Akhirnya, pada tahun 2024, capaian optimal berhasil diraih dengan seluruh perangkat daerah (100%) telah menerapkan sistem e-Government. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan strategi transformasi digital Pemerintah Kota Probolinggo dalam mewujudkan layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi.



Gambar II-103 Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020-2024

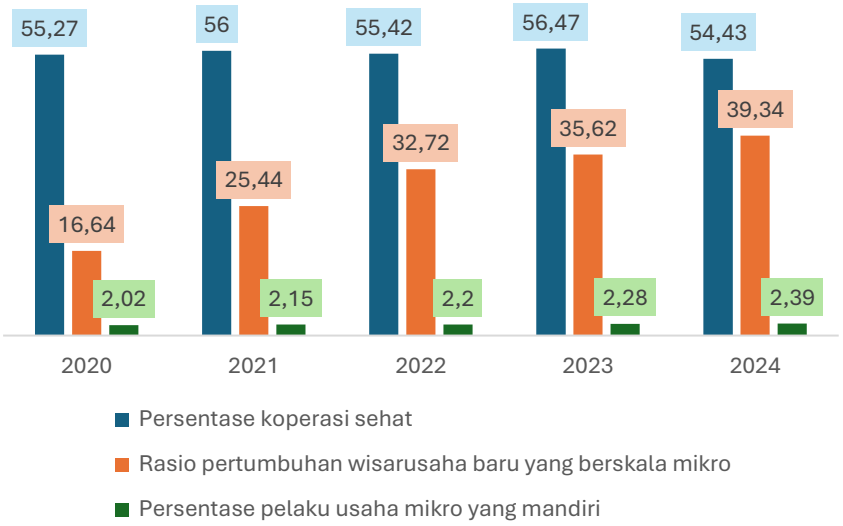
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, 2025

Sebagai Indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan Kominfo, penghitungan indikator Persentase PD yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai standar disesuikan menjadi Persentase Badan Publik yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya untuk memastikan bahwa Badan Publik yang meliputi perangkat daerah dan lembaga/unit teknis dibawahnya telah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai dukungan terhadap pelaksanaan transformasi digital pemerintahan.

11) KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib non-dasar yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Probolinggo. Dinas ini memiliki peran penting mencakup pelayanan perizinan usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan koperasi guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi. Selain itu, dinas juga menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk meningkatkan kapasitas pengelola koperasi.

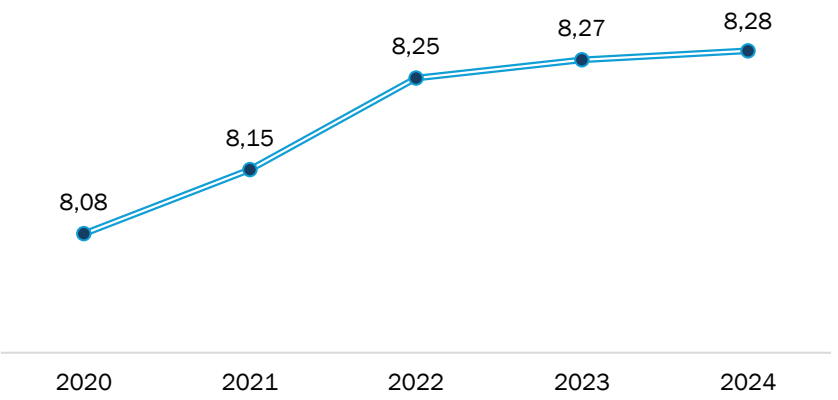
Kinerja dari urusan ini dapat diukur melalui berbagai indikator capaian yang mencerminkan efektivitas program dan kebijakan yang telah dijalankan. Indikator tersebut mencakup aspek pelayanan perizinan, pengawasan koperasi, peningkatan kapasitas UMKM, hingga tingkat keberhasilan pemberdayaan pelaku usaha di Kota Probolinggo.



Gambar II-104 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan data capaian indikator urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Probolinggo selama periode 2020-2024, terlihat adanya perkembangan yang cukup signifikan di beberapa aspek. Persentase koperasi sehat menunjukkan tren stabil dengan sedikit penurunan pada tahun terakhir, mencerminkan masih perlu adanya upaya yang konsisten dalam menjaga kesehatan dan kualitas koperasi di daerah ini. Sementara itu, rasio pertumbuhan wirausaha baru berskala mikro mengalami peningkatan yang cukup signifikan sepanjang periode tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya dorongan kuat terhadap pelaku usaha mikro untuk memulai usaha baru, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh program pemberdayaan UMKM dan kemudahan akses permodalan. Di sisi lain, persentase pelaku usaha mikro yang mandiri juga menunjukkan tren positif, meskipun kenaikannya relatif lebih lambat dibandingkan indikator lainnya.

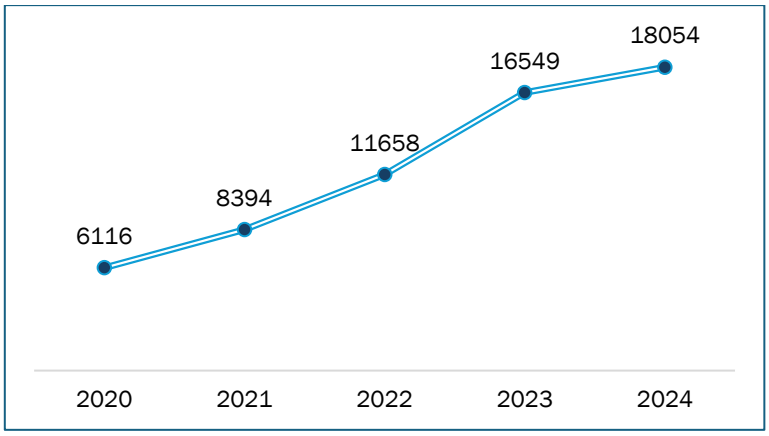


Gambar II-105 Rasio Kewirausahaan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Probolinggo, 2025

Sejalan dengan rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro, rasio kewirausahaan mengalami peningkatan yang signifikan mulai tahun 2020 sebesar 8,08% sampai tahun 2024 sebesar 8,28%. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Kota Probolinggo, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing pelaku usaha kecil dan mikro.

12) PENANAMAN MODAL

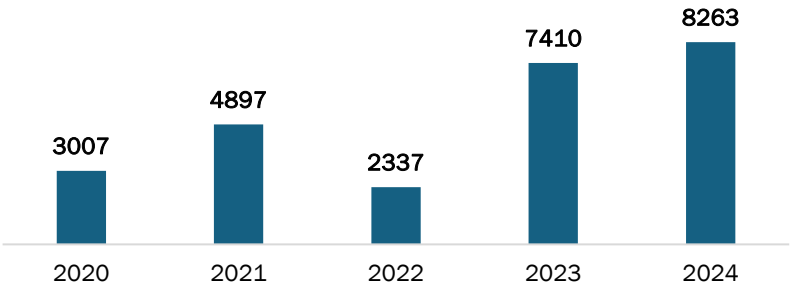
Urusan penanaman modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dari berbagai sektor. Investasi yang masuk diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah. Meski demikian, tantangan seperti persaingan antar daerah, keterbatasan infrastruktur, serta perlunya peningkatan kapasitas SDM menjadi perhatian yang harus diatasi untuk memastikan pertumbuhan investasi yang optimal dan berkelanjutan di Kota Probolinggo. Untuk memperdalam analisis terkait capaian urusan Penanaman Modal, terdapat indikator yang ditampilkan mencakup jumlah nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam satuan miliar rupiah, jumlah penerbitan perizinan dan non-perizinan penanaman modal, serta persentase pertumbuhan nilai investasi dari tahun ke tahun. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan investasi di Kota Probolinggo.



Gambar II-106 Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp dalam Milyar) berdasarkan Data LKPM dan NIB Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan Jumlah Nilai Investasi di Kota Probolinggo menunjukkan peningkatan yang lumayan stabil selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Pertumbuhan nilai investasi menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan investor, baik asing maupun domestik, terhadap iklim investasi di kota ini. Lonjakan terbesar terjadi menjelang tahun terakhir yang dicatat, mengindikasikan bahwa adanya pengembangan infrastruktur yang memadai dan kemudahan akses informasi terkait peluang penanaman modal. Selain itu, upaya promosi dan sosialisasi yang gencar dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan sedang diinisiasi penyusunan perda penanaman modal di juga menjadi pendorong utama tumbuhnya minat investor.

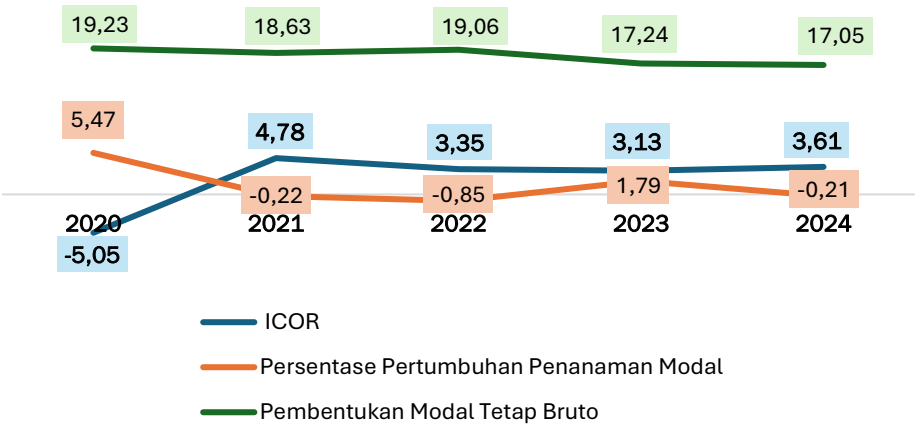


Gambar II-107 Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal di Kota Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Setelah mengalami peningkatan di tahun kedua, jumlah penerbitan perizinan sempat menurun di tahun berikutnya. Namun, tren

ini berubah drastis pada tahun terakhir yang dicatat, di mana terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah izin yang diterbitkan, mencapai angka tertinggi sepanjang periode tersebut. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan regulasi, dinamika ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong investasi. Hal ini mencerminkan upaya yang konsisten untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

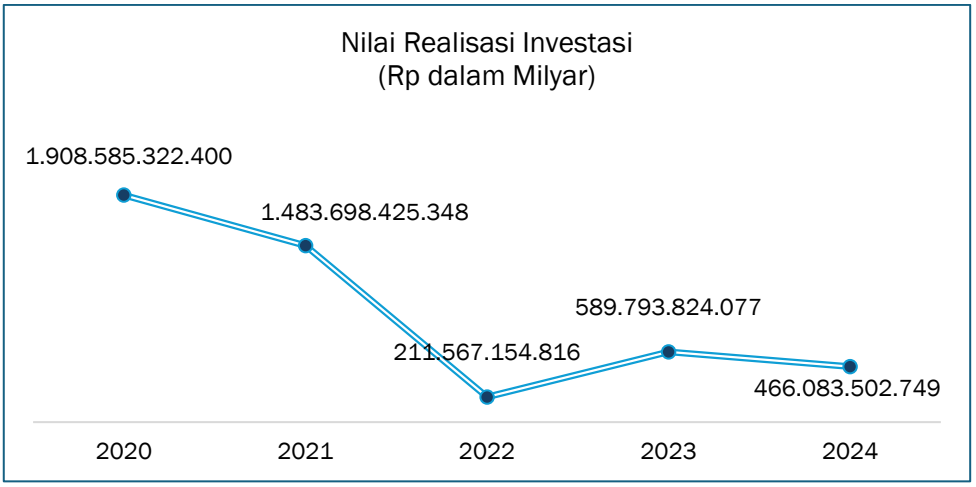


Gambar II-108 ICOR dan Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik di atas pertumbuhan penanaman modal secara persentase menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan positif tertinggi sebesar 5,47% pada tahun 2020 dan pertumbuhan negatif terdalam sebesar -0,85% pada tahun 2022. Sementara itu, nilai ICOR juga menunjukkan tren yang bervariasi, mencerminkan efisiensi investasi yang belum stabil dari tahun ke tahun. Sedangkan Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) menunjukkan proporsi investasi dalam aset tetap terhadap PDRB, yang mencerminkan seberapa besar bagian dari pendapatan regional yang digunakan untuk investasi jangka panjang. Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) sempat mengalami kenaikan di tahun 2022. Fluktuasi pertumbuhan penanaman modal di Kota Probolinggo dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong di antaranya adalah adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi dan mempermudah perizinan berusaha, serta promosi potensi investasi daerah yang mulai diperluas melalui berbagai kanal. Namun demikian, faktor penghambatnya meliputi belum stabilnya kondisi makroekonomi pasca pandemi COVID-19, rendahnya daya saing iklim investasi

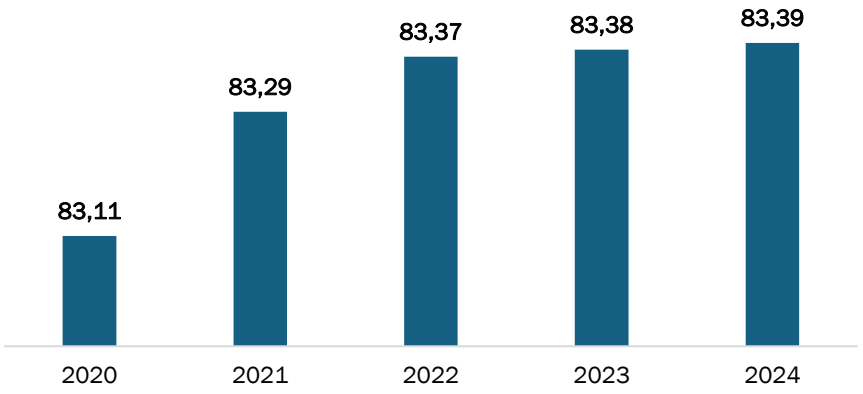
lokal, serta minimnya insentif yang menarik bagi investor. Rendahnya efisiensi investasi yang tergambar melalui tingginya nilai ICOR di beberapa tahun juga menunjukkan bahwa investasi yang masuk belum menghasilkan output ekonomi yang optimal.



Gambar II-109 Nilai Realisasi Investasi Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik nilai realisasi penanaman modal menunjukkan penurunan tajam pada nilai realisasi penanaman modal, dari Rp1,9 triliun lebih pada tahun 2020 menjadi hanya Rp211 miliar pada tahun 2022. Meski sempat naik menjadi Rp589 miliar di tahun 2023, nilai tersebut kembali turun menjadi Rp466 miliar pada tahun 2024. Tren ini menandakan adanya tantangan besar dalam mempertahankan minat investasi di Kota Probolinggo, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional, daya tarik daerah, atau efektivitas kebijakan investasi daerah. Faktor pendorong seperti ketersediaan lahan, pembangunan infrastruktur dasar, serta potensi sektor-sektor strategis seperti pariwisata dan perikanan sebenarnya cukup menjanjikan. Namun, penghambat utamanya adalah keterbatasan promosi investasi yang terarah, keterbatasan data dan informasi investasi yang transparan, serta rendahnya koordinasi lintas sektor dalam mendorong realisasi investasi. Di sisi lain, meningkatnya kembali nilai investasi di tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan dalam kepercayaan investor, meskipun belum berkelanjutan di tahun 2024.



Gambar II-110 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada DPMPTSP Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik Indeks Kepuasan Masyarakat pada DPMPTSP memperlihatkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Probolinggo justru mengalami peningkatan. Nilai IKM meningkat dari 83,11 pada tahun 2020 menjadi 83,39 pada tahun 2024. Ini mencerminkan bahwa meskipun tantangan investasi cukup besar, pelayanan publik di sektor ini tetap dijaga kualitasnya dan mampu memberikan kepuasan yang stabil bagi masyarakat. Faktor pendorongnya meliputi digitalisasi layanan perizinan melalui aplikasi atau sistem online, peningkatan kapasitas SDM pelayanan, serta penerapan standar pelayanan publik yang semakin baik. Namun, tantangan atau penghambatnya terletak pada belum meratanya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap prosedur layanan, keterbatasan literasi digital, serta kemungkinan masih adanya birokrasi yang belum sepenuhnya responsif. Meski demikian, DPMPTSP berhasil mempertahankan kepercayaan publik melalui peningkatan pelayanan yang berkelanjutan.

13) KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

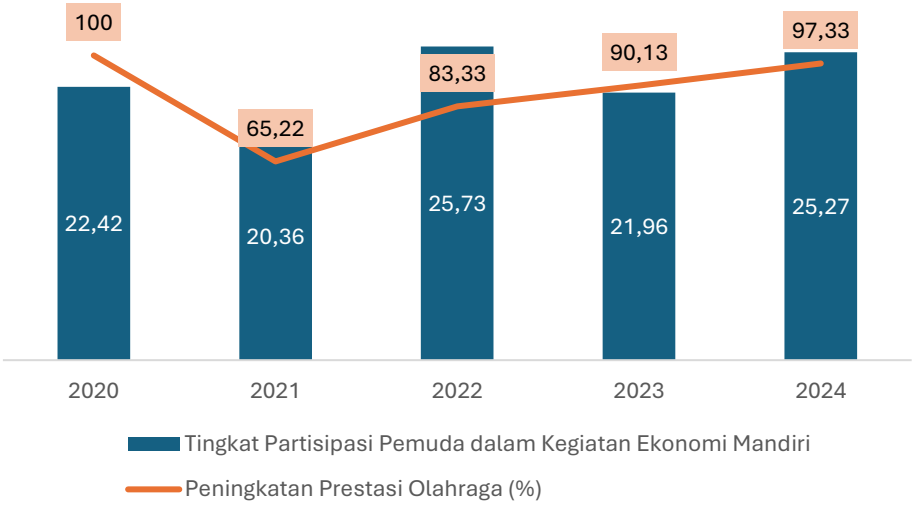
Urusan kepemudaan dan olahraga memiliki peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, serta mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif. Pemerintah Kota Probolinggo melalui dinas terkait terus berupaya mengembangkan program-program yang mampu meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang, seperti kepemimpinan, kewirausahaan, dan kreativitas. Berdasarkan uraian di

atas, urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Probolinggo diampuh oleh Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo yang diinterpretasikan melalui grafik berikut:



Gambar II-111 Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan data mengenai jumlah organisasi pemuda dan olahraga di Kota Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika yang menarik antara kedua jenis organisasi tersebut. Jumlah organisasi olahraga menunjukkan kestabilan yang cukup konsisten sepanjang tahun, tanpa mengalami fluktuasi berarti. Sementara itu, jumlah organisasi pemuda mengalami perkembangan yang lebih dinamis. Awalnya cenderung stagnan, kemudian mencapai puncak tertingginya di pertengahan periode sebelum akhirnya mengalami penurunan di tahun berikutnya. Peningkatan yang signifikan pada periode tertentu kemungkinan dipengaruhi oleh dorongan program pemberdayaan pemuda, kemudahan pendirian organisasi, serta meningkatnya minat generasi muda untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.



Gambar II-112 Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo, 2025

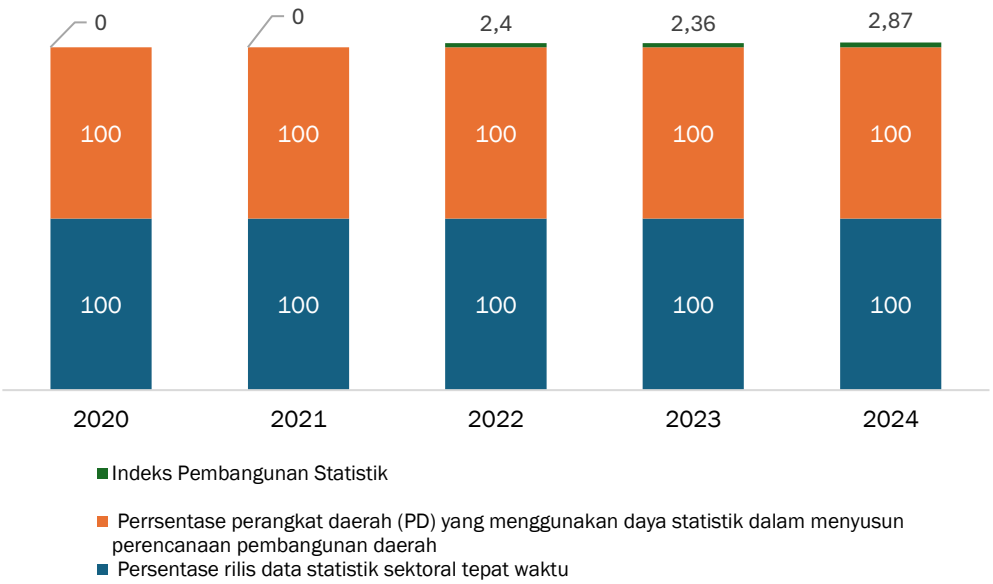
Capaian indikator kepemudaan dan olahraga di Kota Probolinggo menunjukkan tren yang cukup dinamis selama periode 2020–2024. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sempat mengalami penurunan pada tahun 2021, dari 22,42% menjadi 20,36%, sebelum meningkat kembali pada 2022 dan relatif stabil hingga 2024. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh pembatasan sosial dan kegiatan akibat pandemi COVID-19 yang membatasi ruang gerak pemuda. Namun, peningkatan partisipasi di tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa kegiatan kepemudaan mulai pulih dan didorong oleh program-program pemberdayaan pemuda yang semakin variatif dan inklusif.

Sementara itu, peningkatan prestasi olahraga mengalami tren menurun dari 100% pada tahun 2020 menjadi 65,22% di 2021, namun terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 97,33% pada tahun 2024. Penurunan di awal masa pandemi mencerminkan terbatasnya kompetisi olahraga yang diselenggarakan, serta minimnya pelatihan dan pembinaan atlet. Adapun faktor pendorong utama perbaikan prestasi olahraga di tahun-tahun berikutnya meliputi penguatan pembinaan atlet muda, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, serta dukungan pendanaan yang lebih baik.

14) STATISTIK

Urusan statistik memegang peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data di lingkup pemerintahan. Di Kota Probolinggo, pengelolaan urusan statistik diarahkan untuk menyediakan data yang akurat,

mutakhir, dan relevan guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan. Kegiatan statistik meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data di berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, dan demografi. Melalui pengelolaan statistik yang optimal, diharapkan pemerintah Kota Probolinggo dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Data yang berkualitas juga menjadi fondasi penting dalam mengidentifikasi isu strategis serta merancang program pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Berikut merupakan capaian kinerja urusan statistik di Kota Probolinggo:



Gambar II-113 Capaian Indikator Urusan Statistik tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, 2025

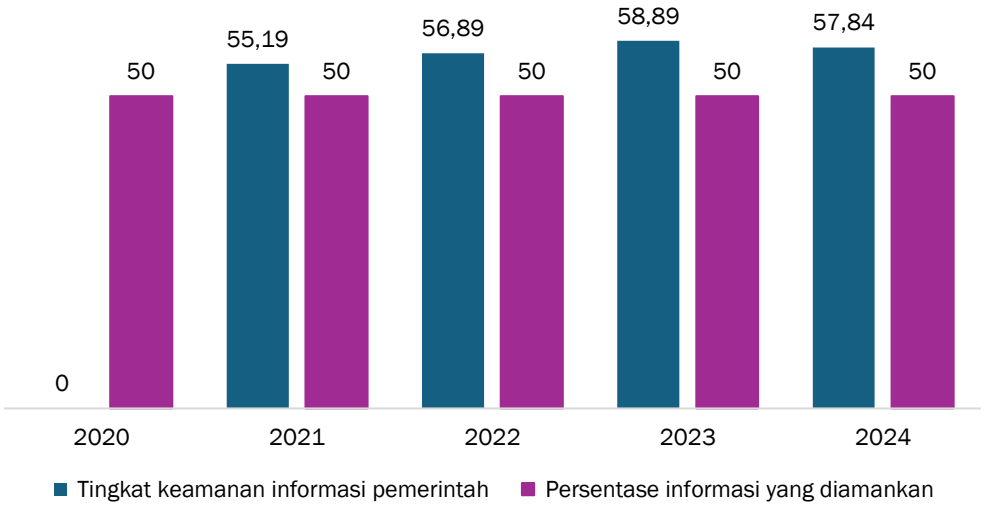
Berdasarkan grafik yang ditampilkan, indikator capaian yang mencerminkan kinerja urusan statistik di Kota Probolinggo menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan pencapaian maksimal sebesar 100%. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas dalam penerbitan dan pemanfaatan data statistik yang telah berjalan sesuai target. Namun, di balik capaian optimal tersebut, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan sistem satu data di Kota Probolinggo yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, meskipun capaian indikator kinerja statistik sudah maksimal, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat sistem satu data melalui peningkatan kapasitas

SDM, serta penguatan kolaborasi antar lembaga. Dengan demikian, diharapkan Kota Probolinggo dapat mengelola data statistik secara lebih efektif dan efisien demi mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat dan terpercaya.

Capaian Indeks Pembangunan Statistik Kota Probolinggo cenderung fluktuatif dari Tahun 2022-2024. Perhitungan Indeks ini baru dilakukan pada Tahun 2022 bekerjasama dengan BPS Kota Probolinggo. Capaian pada Tahun 2022 sebesar 2,4 dengan kategori cukup, dan meningkat menjadi 2,87 pada Tahun 2024 dengan kategori baik.

15) PERSANDIAN

Urusan persandian di Kota Probolinggo memegang peranan penting dalam menjaga keamanan informasi dan data pemerintah daerah. Persandian berfungsi sebagai sistem perlindungan komunikasi dan data agar terhindar dari potensi kebocoran, penyalahgunaan, maupun serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas informasi pemerintahan. Kinerja urusan ini terlihat dari seberapa efektif upaya pengamanan sistem informasi pemerintah, termasuk pengelolaan sertifikat elektronik, implementasi tanda tangan digital, dan penerapan sistem enkripsi untuk melindungi dokumen-dokumen strategis. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan meningkatnya ancaman siber menuntut adanya inovasi dan pembaruan sistem keamanan secara berkala. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan persandian, peningkatan infrastruktur keamanan informasi, serta sosialisasi yang lebih masif tentang pentingnya perlindungan data. Dengan pengelolaan persandian yang lebih optimal, Kota Probolinggo dapat memastikan keamanan data pemerintahan terjaga dengan baik, sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih aman dan terpercaya. Kinerja urusan persandian Kota Probolinggo direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

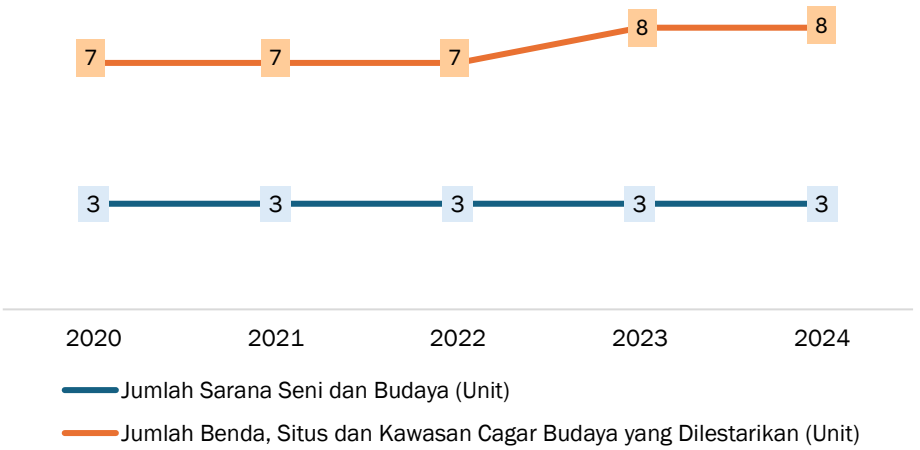


Gambar II-114 Capaian Indikator Urusan Persandian Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik di atas, tingkat keamanan informasi pemerintah menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya yang konsisten dalam memperkuat sistem keamanan data, baik melalui peningkatan infrastruktur maupun penguatan kebijakan keamanan siber. Puncak capaian tertinggi terlihat pada tahun terakhir dalam grafik, menunjukkan keberhasilan strategi yang diterapkan untuk melindungi informasi pemerintahan. Sementara itu, persentase informasi yang diamankan cenderung stagnan selama periode yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem keamanan terus diperkuat, cakupan data yang berhasil diamankan belum mengalami perkembangan signifikan.

16) KEBUDAYAAN

Urusan kebudayaan memiliki peran penting dalam melestarikan identitas dan warisan lokal, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga nilai-nilai tradisi. Pelaksanaan program kebudayaan di Kota Probolinggo difokuskan pada pelestarian seni dan budaya daerah, pengembangan kreativitas pelaku seni, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan budaya yang melibatkan komunitas lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi program kebudayaan yang lebih menarik bagi generasi muda dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kekayaan budaya Kota Probolinggo tetap lestari dan berkembang seiring waktu.

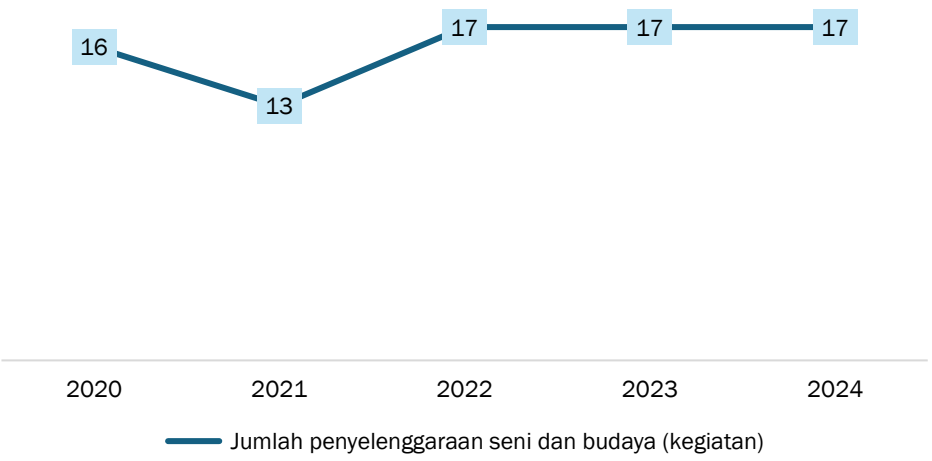


Gambar II-115 Jumlah Sarana Seni dan Budaya serta Benda, Situd dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2025

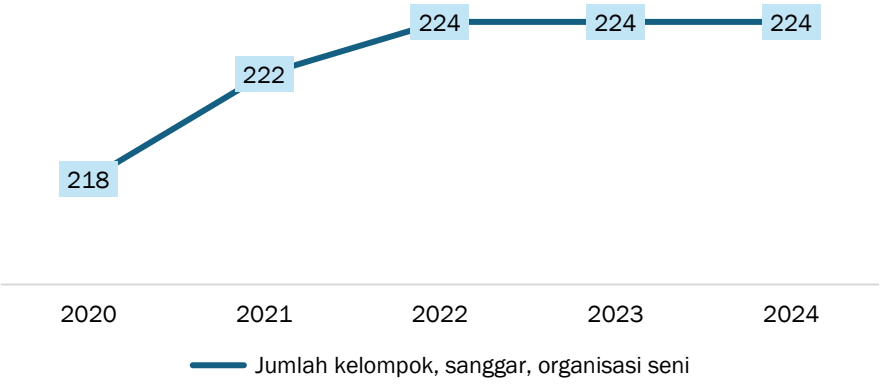
Berdasarkan data mengenai jumlah sarana seni dan budaya di Kota Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa jumlah fasilitas tersebut cenderung stagnan tanpa adanya peningkatan maupun penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, belum ada penambahan sarana baru yang dapat mendukung pengembangan aktivitas seni dan budaya di kota ini. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan anggaran yang memadai, potensi sektor kebudayaan di Kota Probolinggo dapat berkembang lebih optimal di masa depan.

Selain itu Grafik di atas juga menyajikan mengenai jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Probolinggo menunjukkan tren yang relatif stabil di awal periode, sebelum akhirnya mengalami peningkatan. Selama beberapa tahun pertama, jumlah cagar budaya yang dilestarikan tidak mengalami perubahan signifikan, namun pada tahun berikutnya, terdapat peningkatan yang mencerminkan adanya upaya lebih serius dalam pelestarian warisan budaya. Kenaikan ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga identitas budaya lokal serta dukungan kebijakan yang lebih kuat dalam pelestarian cagar budaya.



Gambar II-116 Jumlah Penyelenggara Seni dan Budaya (Kegiatan) Tahun 2020-2024
Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2025

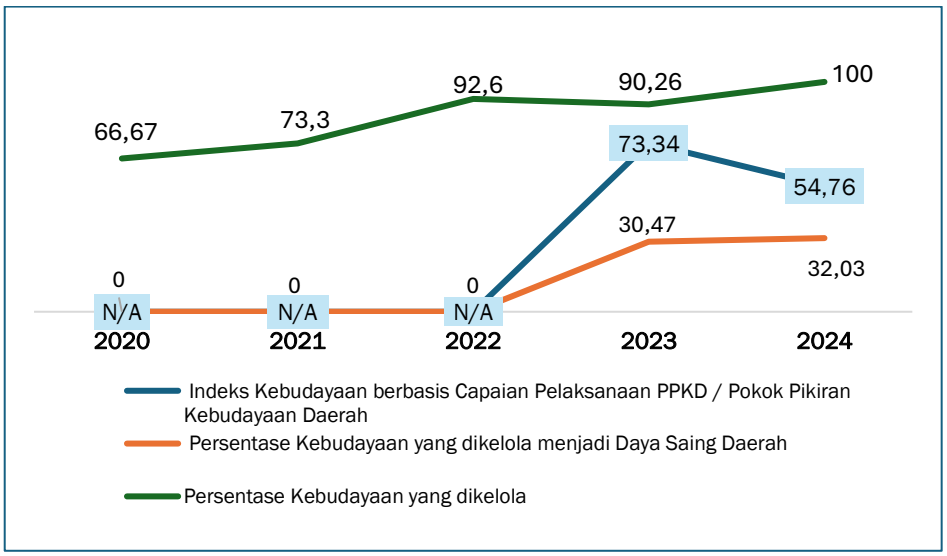
Berdasarkan data terkait jumlah penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada awal periode, jumlah kegiatan sempat mengalami penurunan. Namun, dalam tahun-tahun berikutnya, terdapat peningkatan yang cukup signifikan, mencerminkan adanya upaya pemulihan dan dorongan untuk kembali menghidupkan kegiatan seni dan budaya. Kestabilan ini menunjukkan adanya konsistensi dalam penyelenggaraan program seni dan budaya, meskipun tantangan dalam pelaksanaannya masih perlu terus diatasi guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas kegiatan di masa mendatang.



Gambar II-117 Jumlah Kelompok, Sanggar, Organisasi Seni Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2025

Jumlah kelompok, sanggar, dan organisasi seni di Kota Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan pada awal periode dan

kemudian stabil pada angka tertentu. Pada tahun 2020, jumlah kelompok seni tercatat sebanyak 218, yang kemudian meningkat menjadi 222 pada tahun 2021. Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan jumlah mencapai 224 kelompok, dan angka tersebut tetap stabil hingga tahun 2024. Stabilnya jumlah kelompok seni selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya upaya pelestarian dan penguatan komunitas seni yang dilakukan secara konsisten. Hal ini mencerminkan perhatian pemerintah daerah terhadap perkembangan seni dan budaya lokal, sekaligus menjadi indikator keberlanjutan kegiatan seni yang mampu bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak pandemi di tahun-tahun sebelumnya.



Gambar II-118 Indeks Kebudayaan berbasis Capaian Pelaksanaan PPKD / Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah serta Persentase Kebudayaan yang dikelola serta yang menjadi Daya Saing Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2020 hingga 2022 belum terdapat data (N/A) yang tercatat, belum dilakukan penilaian atas indikator Indeks Kebudayaan berdasarkan capaian PPKD serta Persentase Kebudayaan yang dikelola sebagai daya saing daerah. Hal ini disebabkan karena penilaian evaluasi terhadap capaian PPKD di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur baru mulai dilakukan pada tahun 2022 dan hanya mencakup 10 kabupaten/kota. Penilaian secara menyeluruh terhadap seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur baru mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Kemudian, pada tahun 2024 menjadi 54,76. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan prioritas kebijakan, keterbatasan anggaran pada sektor kebudayaan, serta

tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Meski demikian, capaian ini tetap mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem kebudayaan yang lebih terstruktur dan terukur melalui mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.

Persentase Kebudayaan yang Dikelola menjadi Daya Saing Daerah di Kota Probolinggo pada tahun 2020, 2021, dan 2022, tidak dilakukan perhitungan. Peningkatan drastis terlihat pada tahun 2023, di mana 30,47% kebudayaan telah dikelola. Angka ini kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 32,03%, menunjukkan tren positif dalam upaya pengelolaan kekayaan budaya daerah. Meskipun masih di bawah target optimal, peningkatan yang konsisten ini mengindikasikan semakin baiknya tata kelola dan pemanfaatan aset budaya daerah.

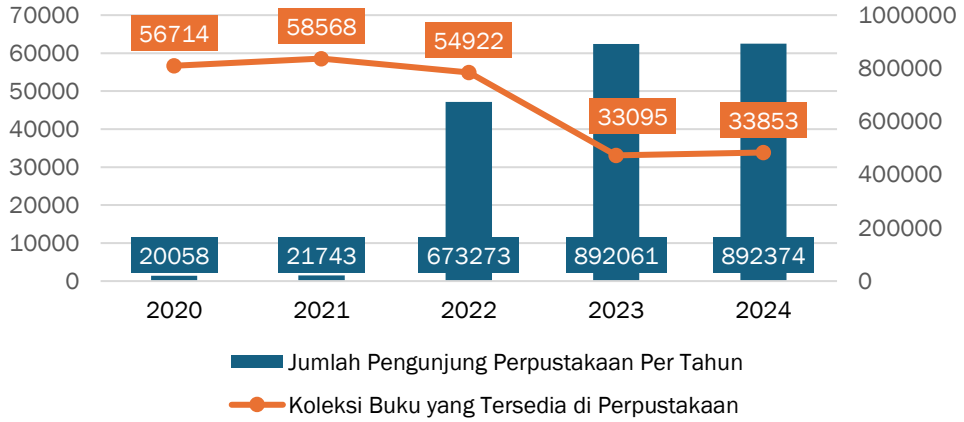
Sedangkan dari sisi Persentase Kebudayaan yang Dikelola merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar proporsi kegiatan, aset, atau warisan budaya yang telah dikelola secara aktif oleh pemerintah kota Probolinggo (dalam hal ini perangkat daerah yang mengampu urusan Kebudayaan) dalam periode tertentu. Capaian indikator dimaksud telah mencapai 100% pada tahun 2024, Hal ini disebabkan komitmen tinggi terhadap pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Namun hal ini tetap akan menjadi dasar pemicu peningkatan pengelolaan kebudayaan di Kota Probolinggo guna mendukung prioritas pembangunan kebudayaan di kota Probolinggo antara lain :

- Pendataan dan pelestarian warisan budaya baik benda maupun tak benda
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan
- Kolaborasi lintas sektor dalam program pelestarian budaya.

17) PERPUSTAKAAN

Urusan perpustakaan memegang peranan penting dalam mendukung peningkatan literasi dan pengetahuan masyarakat. Minat baca masyarakat merupakan gambaran dari masa depan bangsa. Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia sangat mempengaruhi kualitas bangsa, karena tanpa kebiasaan membaca, masyarakat sulit mengikuti perkembangan ilmu

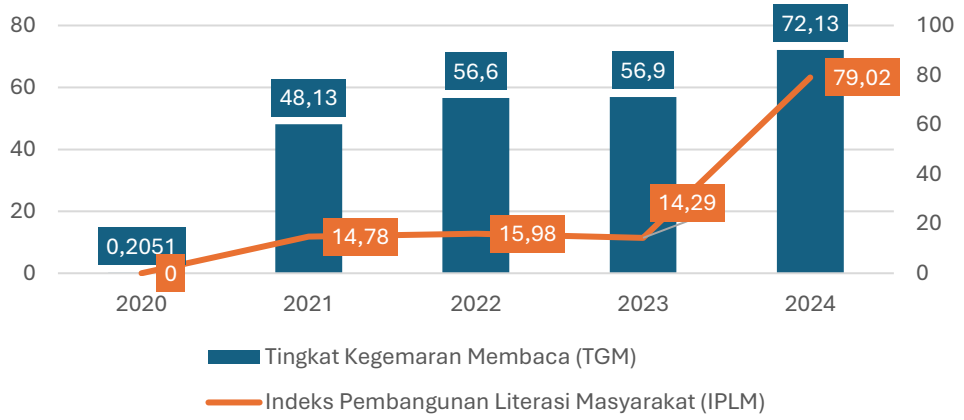
pengetahuan dan informasi di dunia. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan ketertinggalan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat minat baca masyarakat adalah jumlah pengunjung perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan modern kini dilengkapi dengan fasilitas digital dan layanan berbasis teknologi untuk memudahkan akses informasi secara lebih luas.



Gambar II-119 Jumlah Pengunjung dan Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo, 2025

Grafik di atas menunjukkan perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Probolinggo tahun 2020 – 2024 memiliki capaian yang fluktuatif. Jumlah pengunjung mengalami kenaikan secara perlahan hingga mencapai puncaknya di salah satu tahun dalam periode tersebut. Kenaikan ini kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan minat baca masyarakat dan berbagai program literasi yang diadakan oleh perpustakaan. Namun, setelah mencapai puncaknya, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah pengunjung di tahun 2023. Di sisi lain, jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan cenderung stabil pada awal periode, namun mengalami penurunan tajam di tahun-tahun berikutnya. Hal ini disebabkan masih minimnya diversifikasi koleksi perpustakaan serta adanya perkembangan teknologi membuat adanya perubahan cara koleksi buku yang dikelola. Sehingga perpustakaan perlu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.



Gambar II-120 Capaian Indikator TGM dan IPLM Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan capaian Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Probolinggo menunjukkan pola fluktuatif sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TGM tercatat sangat rendah sebesar 0,2051, sementara IPLM tidak menunjukkan capaian (n.a) dikarenakan tidak ada perhitungan. Namun, pada 2021, terjadi peningkatan signifikan di mana TGM naik menjadi 48,13 dan IPLM mencapai 14,78. Tren positif berlanjut pada 2022 dengan kenaikan TGM menjadi 56,6 dan IPLM menjadi 15,98. Pada tahun 2023, TGM kembali mengalami peningkatan menjadi 56,9 dan IPLM turun menjadi 14,29. Lonjakan TGM drastis terjadi pada tahun 2024, meningkat tajam menjadi 72,13. Sedangkan untuk IPLM mulai tahun 2024 terjadi perubahan metode perhitungan, yang menunjukkan adanya peningkatan capaian yakni menjadi sebesar 79,02.

Peningkatan capaian ini didukung oleh beberapa faktor, seperti penguatan program literasi yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip, peningkatan akses masyarakat terhadap bahan bacaan digital dan fisik, serta pelaksanaan berbagai kegiatan promosi budaya baca di masyarakat. Selain itu juga terdapat Faktor internal (kesadaran diri sendiri) meliputi minat ingin tahu, motivasi membaca di perpustakaan, serta kebutuhan buku utk kegiatan mata pelajaran sekolah yang juga mempengaruhi capaian peningkatan Tingkat Gemar Membaca (TGM). Namun, capaian yang sempat fluktuatif juga dipengaruhi oleh sejumlah hambatan, antara lain : *Faktor internal* yang meliputi kurangnya minat dan motivasi, kesulitan memahami bacaan, dan kurang fokus, rendahnya kesadaran literasi di sebagian kalangan masyarakat, serta *Faktor eksternal* yang meliputi

akses bacaan kurang (keterbatasan infrastruktur perpustakaan di beberapa wilayah), dominasi media sosial dan hiburan, dan kurangnya literasi.

Sedangkan terkait dengan IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat), faktor pendorong peningkatan kinerja indikator ini yaitu : ketersediaan akses literasi (jumlah, koleksi, akses internet, taman baca), kualitas SDM Perpustakaan, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat belum optimalnya capaian IPLM, khususnya penurunan dari Tahun 2023 ke 2024 yaitu : keterbatasan akses literasi (kurangnya taman baca / sudut baca), budaya literasi belum mengakar pada masyarakat, rendahnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Secara umum, upaya berkelanjutan dan adaptasi kebijakan menjadi kunci dalam menjaga tren peningkatan literasi di Kota Probolinggo. Adapun capaian indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.43 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Taman baca yang dibina	Unit	0	1	0	0	0
Jumlah perpustakaan sekolah, kelurahan dan masyarakat yang dibina	Orang	89	78	145	151	40
Peningkatan SDM pengelola perpustakaan (jumlah pengelola perpustakaan yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan)	Orang	89	70	79	120	40

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Probolinggo, 2025

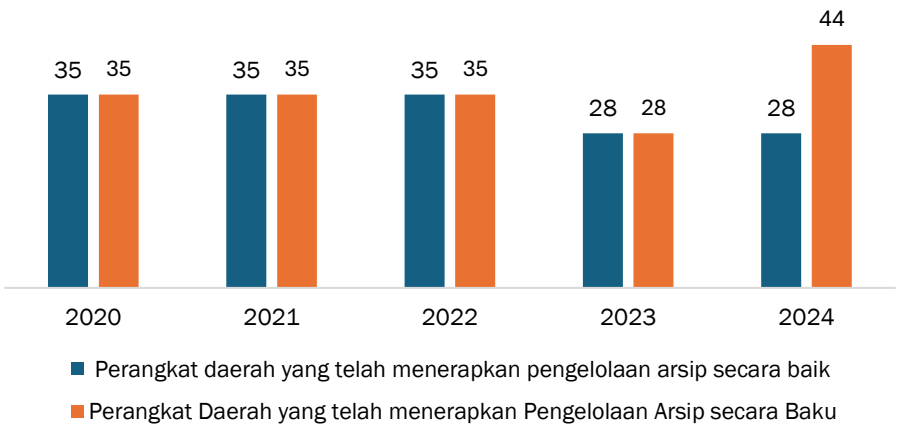
Untuk indikator taman baca yang dibina dimana tahun 2021 Kota Probolinggo memiliki 1 taman baca yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Nomor 18 Probolinggo. Namun sejak tahun 2022 taman baca telah dialihfungsi menjadi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dibawah naungan Dinas Sosial PP dan PA Kota Probolinggo sehingga taman baca bergabung menjadi satu di layanan perpustakaan umum Kota Probolinggo, sehingga tidak ada realisasi taman baca yang dibina pada Tahun 2022 – 2024.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan perpustakaan di Kota Probolinggo adalah masih belum optimalnya upaya membangun budaya literasi di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan perpustakaan konvensional yang belum maksimal serta kurang efektifnya penyelenggaraan perpustakaan digital. Selain itu, meskipun Kota Probolinggo telah mengembangkan aplikasi perpustakaan digital bernama iProbo, pemanfaatannya masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya koleksi buku digital

yang tersedia serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya upaya yang lebih terstruktur, seperti peningkatan koleksi buku digital, penyediaan fasilitas inklusif, serta program edukasi dan sosialisasi yang masif agar layanan perpustakaan, baik konvensional maupun digital, dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

18) KEARSIPAN

Urusan kearsipan memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan informasi dan dokumentasi, baik bagi instansi pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan arsip yang baik tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan data, tetapi juga sebagai sumber informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan serta menjadi bukti akuntabilitas kinerja. Dalam konteks desentralisasi pemerintahan, tanggung jawab penyelenggaraan urusan kearsipan dilimpahkan kepada pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota, yang memiliki kewenangan, tugas, hak, dan tanggung jawab untuk mengelola arsip secara optimal. Agar pelaksanaan tugas di bidang kearsipan dapat berjalan efektif dan efisien, diperlukan indikator yang mampu mengukur keberhasilan penyelenggaraan kearsipan. Indikator ini mencakup berbagai aspek penting, seperti penerapan pengelolaan arsip secara baik, jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku, serta tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.



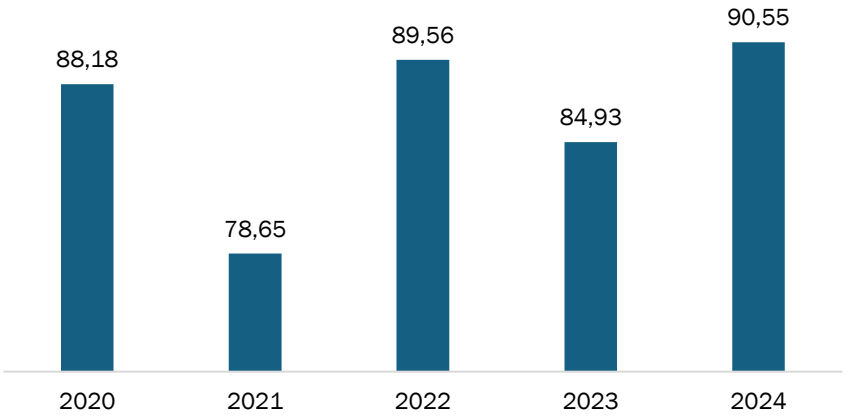
Gambar II-121 Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baik dan Baku Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo, 2025

Grafik di atas menyajikan perkembangan jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baik di Kota Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024. Pada awal periode, jumlah perangkat daerah yang memenuhi standar pengelolaan arsip terbilang stabil sejumlah 35 perangkat daerah. Namun, pada tahun 2023 hingga 2024, jumlah perangkat daerah yang berhasil menerapkan pengelolaan arsip dengan baik tidak menunjukkan peningkatan kembali, melainkan tetap pada angka yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya sejumlah 28 perangkat daerah.

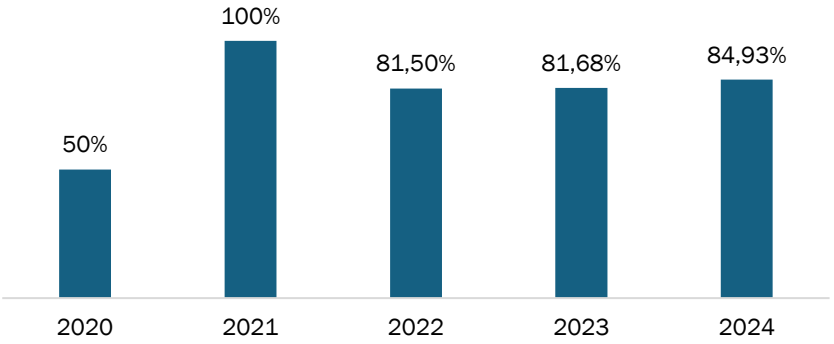
Data mengenai jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku menunjukkan tren yang cukup dinamis selama periode 2020 hingga 2024. Pada awal periode, jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku stabil yaitu sejumlah 35 SKPD, namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 sejumlah 28 SKPD yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan arsip, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan arsip sesuai standar, atau kendala dalam pengadaan infrastruktur pendukung.

Pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan di akhir periode sejumlah 44 SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku, di mana jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku mencapai puncaknya. Peningkatan tajam ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh upaya intensif dari pemerintah daerah dalam memperkuat sistem kearsipan, seperti melalui pelatihan arsiparis, penerapan kebijakan yang lebih tegas terkait pengelolaan arsip, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah proses pengarsipan. Selain itu, meningkatnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi administrasi di lingkungan pemerintahan juga turut mendorong lebih banyak SKPD untuk memenuhi standar pengelolaan arsip yang baku.



Gambar II-122 Indeks Pengawasan Kearsipan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo, 2025

Indeks Pengawasan Kearsipan (IPK) merupakan salah satu indikator kinerja kunci yang mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah. Capaian IPK selama periode Tahun 2020-2024 menunjukkan dinamika yang signifikan, mencerminkan adanya tantangan, upaya perbaikan berkelanjutan, dan keberhasilan dalam mencapai tata kelola kearsipan yang unggul. Dimana dengan capaian Tahun 2024 sebesar 90,55 menunjukkan kinerja pengelolaan kearsipan yang cukup baik di Kota Probolinggo yang meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Faktor pendorong tingginya capaian kinerja indikator Indeks Pengawasan kearsipan ini yaitu regulasi dan kebijakan yang jelas, komitmen pimpinan, SDM yg baik, ketersediaan sarpras kearsipan, serta kerjasama dan koordinasi antar lembaga terkait. Sedangkan faktor penghambat belum optimalnya capaian kinerja Indeks Pengawasan Kearsipan ini adalah SDM pengelola arsip yang merangkap tugas, budaya kerja yang masih kurang peduli terhadap tertib pengelolaan arsip, perubahan organisasi dan kebijakan yang sering terjadi (mutasi yang sering terjadi, kebijakan prioritas anggaran yang berubah-ubah). Analisis capaian ini menjadi dasar evaluasi kinerja periode sebelumnya serta fondasi untuk perumusan target dan strategi pada periode RPJMD berikutnya.



Gambar II-123 Tingkat Ketersesiaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan data pada grafik, terlihat adanya fluktuasi dalam capaian persentase ketersediaan arsip dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tingkat ketersediaan arsip hanya mencapai 50%, kemudian mengalami lonjakan signifikan menjadi 100% pada tahun 2021. Namun, capaian ini tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, di mana terjadi penurunan menjadi 81,50% pada tahun 2022, sedikit naik menjadi 81,68% di tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 84,93% pada tahun 2024.

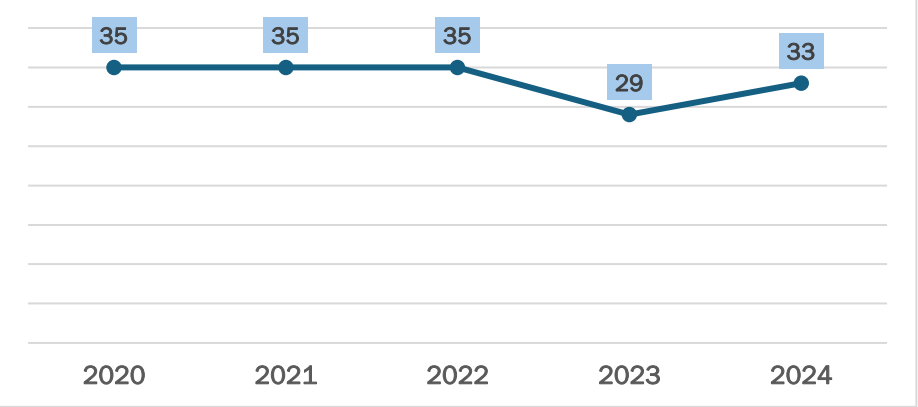
Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam manajemen kearsipan dan implementasi kebijakan pengelolaan arsip di lingkup pemerintahan Kota Probolinggo. Kenaikan drastis pada tahun 2021 dipengaruhi oleh faktor pendorong : adanya intervensi kebijakan atau program prioritas terkait reformasi birokrasi dan akuntabilitas publik yang mendorong optimalisasi pengelolaan arsip, dukungan regulasi dan kebijakan, pengembangan SDM Arsiparis, pemanfaatan teknologi informasi, sinergi lembaga kearsipan dgn instansi terkait, tersedianya infrastruktur kearsipan, dan pengawasan kearsipan yang berkelanjutan. Di sisi lain, penurunan setelah 2021 bisa disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti : keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan arsip, kurangnya anggaran untuk digitalisasi dan pemeliharaan arsip, belum optimalnya sistem informasi kearsipan yang terintegrasi, lemahnya regulasi dan implementasi kebijakan, keterbatasan sarpras kearsipan, tantangan pengelolaan arsip elektronik, serta kurangnya koordinasi dan sinergi (ego sektoral).

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1) KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah tertentu dengan melihat kondisi geografisnya juga mangampuh urusan kelautan dan perikanan. Kota Probolinggo sebagai salah satu daerah dengan kondisi geografis dengan memiliki Kawasan laut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan perangkat daerah yang mengampu beberapa urusan.

Cakupan bina kelompok nelayan dapat mendukung kesejahteraan nelayan serta mendorong keberlanjutan sektor perikanan. Di Kota Probolinggo, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan berupaya melakukan pembinaan terhadap kelompok nelayan sebagai upaya meningkatkan kapasitas nelayan dalam berbagai aspek seperti pengelolaan hasil tangkapan, teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta manajemen usaha perikanan yang lebih baik. Dalam periode tahun 2020 hingga 2024, cakupan pembinaan terhadap kelompok nelayan ini mengalami perubahan yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah.

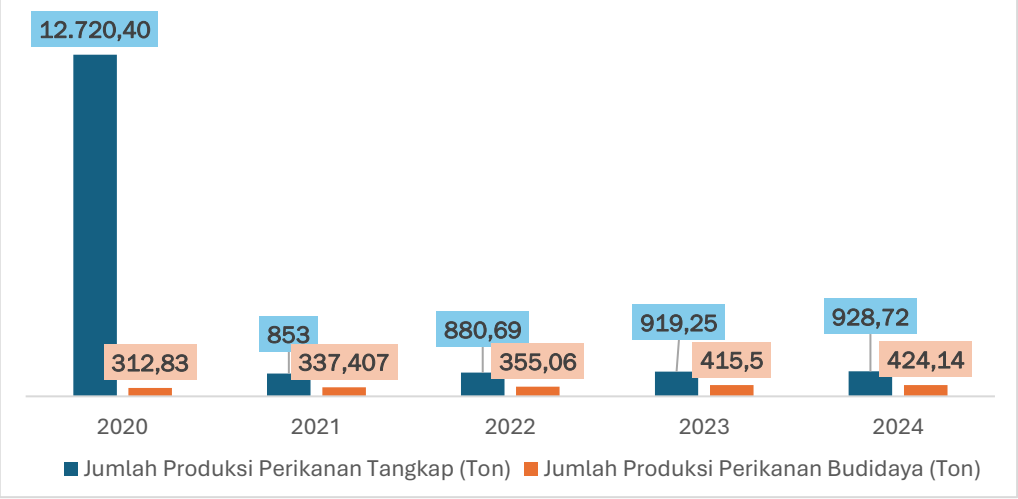


Gambar II-124 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

Selama tiga tahun pertama, yaitu tahun 2020 hingga 2022, cakupan bina kelompok nelayan relatif stabil dengan angka sebanyak 35 kelompok setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan kegiatan pembinaan dengan konsisten dalam periode tersebut. Namun demikian, pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan binaan menjadi 29 kelompok. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu segera diidentifikasi dan diatasi, seperti kemungkinan kurangnya pendampingan secara intensif, keterbatasan anggaran, atau

menurunnya antusiasme kelompok nelayan dalam mengikuti program pembinaan. Penurunan cakupan bina kelompok nelayan di tahun 2023 menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi program dan pendekatan yang digunakan. Diperlukan upaya perbaikan, baik dalam bentuk peningkatan kualitas program pembinaan, pemberian insentif kepada kelompok nelayan, maupun penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti akademisi, swasta, dan komunitas nelayan lokal. Pada tahun 2024 Cakupan bina kelompok nelayan menunjukkan peningkatan menjadi 33 Kelompok binaan dimana upaya perbaikan yng efektif telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam membina kelompok nelayan. Untuk menjaga konsistensi cakupan bina kelompek nelayan diperlukan adanya saling komitmen antara pemerintah dan Kelompok binaan. Dengan demikian, ke depannya pembinaan kelompok nelayan dapat berjalan lebih optimal dan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan serta mendukung keberlanjutan perikanan di Kota Probolinggo.

Produksi perikanan di Kota Probolinggo terbagi dalam dua sektor utama, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kedua sektor ini menjadi penopang penting dalam perekonomian lokal serta sumber utama pendapatan bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan maupun petani ikan. Berdasarkan data periode 2020-2024, terjadi perubahan signifikan yang menggambarkan dinamika produksi perikanan di Kota Probolinggo.



Gambar II-125 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kota Probolinggo 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

Pada tahun 2020, produksi perikanan tangkap tercatat sebesar 12.720,40 ton, jumlah ini merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan

tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi, angka produksi mengalami penurunan tajam di tahun-tahun selanjutnya, menjadi hanya 853 ton pada tahun 2021, kemudian meningkat perlahan menjadi 880,69 ton pada 2022, 919,25 ton pada 2023, dan terus naik menjadi 928,72 ton pada 2024. Penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2021 dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi lingkungan laut, peralihan jenis ikan yang ditangkap, maupun kebijakan penangkapan ikan yang berdampak langsung pada hasil tangkapan.

Produksi perikanan budidaya menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Tahun 2020, produksi perikanan budidaya hanya sebesar 312,83 ton. Angka ini terus meningkat secara konsisten menjadi 337,407 ton di tahun 2021, kemudian naik lagi menjadi 355,06 ton di tahun 2022, meningkat menjadi 415,5 ton pada tahun 2023, dan terus meningkat menjadi 424,14 ton di tahun 2024. Kecenderungan peningkatan produksi perikanan budidaya dari tahun 2020-2024 mengindikasikan adanya program atau investasi yang signifikan dalam sektor budidaya perikanan oleh pemerintah maupun swasta, serta potensi ekonomi yang sangat tinggi dalam perikanan budidaya di Kota Probolinggo.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan. Kesejahteraan nelayan sangat dipengaruhi oleh hasil tangkapan mereka. NTN juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga ikan, biaya operasional penangkapan, dan harga sembako. Nilai tukar nelayan (NTN) memiliki kriteria interpretasi untuk menilai tingkat kesejahteraan nelayan. NTN diukur dengan membandingkan indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). Jika NTN lebih kecil dari 100, artinya nelayan memiliki daya beli lebih rendah dan berpotensi mengalami defisit anggaran rumah tangga. Sebaliknya, jika NTN lebih besar dari 100, nelayan memiliki pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Kriteria Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) mengukur kemampuan tukar hasil budidaya ikan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan pembudidaya, baik untuk produksi maupun konsumsi. Secara sederhana, NTPi menunjukkan apakah harga ikan yang diterima pembudidaya cukup untuk menutupi biaya produksi dan konsumsi rumah tangganya. NTPi adalah alat ukur yang penting untuk mengetahui kesejahteraan pembudidaya ikan dan daya saing budidaya ikan. Pembudidaya dapat mem.anfaatkan NTPi untuk mengoptimalkan kegiatan budidaya mereka dan meningkatkan pendapatan.

Tabel II.44 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

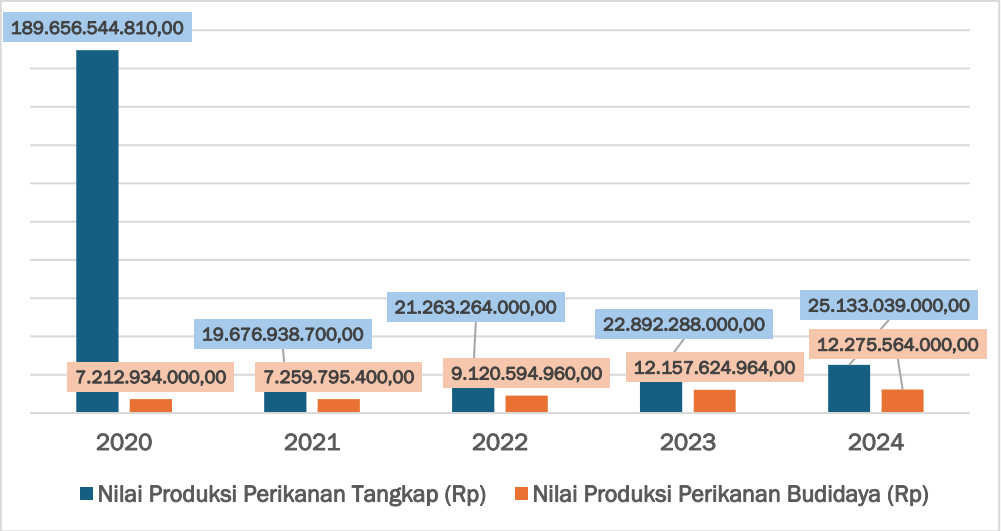
INDIKATOR KINERJA KUNCI	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Nelayan	0,74	0,78	0,82	0,84	97,18
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	1,1	1,16	1,19	1,17	94,93
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	-28,19	-90,89	3,81	8,01	1,36
Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	0,76	3	4	4,07	6,1

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, 2025

Nilai tukar nelayan Kota Probolinggo menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 - 2024. Pada Tahun 2020 NTN sebesar 0,74 dan terus meningkat sampai pada tahun 2024 sebesar 97,18. Kenaikan NTN mencerminkan peningkatan kesejahteraan nelayan yang kemungkinan didorong oleh perbaikan harga jual hasil tangkapan atau efisiensi biaya operasional. Nilai tukar nelayan adalah indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan. Kesejahteraan nelayan sangat dipengaruhi oleh hasil tangkapan mereka. NTN juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga ikan, biaya operasional penangkapan, dan harga sembako. Nilai tukar pembudidaya ikan Kota Probolinggo cenderung fluktuatif, meningkat secara bertahap hingga 1,19 pada tahun 2022, namun mengalami penurunan tajam menjadi 94,93 di tahun 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tekanan pada biaya produksi atau perubahan harga pasar komoditas budidaya. Pada Tahun 2024 terdapat perubahan perhitungan pada NTN dan NTPi. Namun demikian NTN dan NTPi pada Tahun 2024 masih dapat dibandingkan dengan perhitungan pada tahun sebelumnya dengan mengalikan NTN dan NTPi sebelum Tahun 2024 dengan 100. Selanjutnya pada Persentase peningkatan produksi perikanan sangat fluktuatif, sempat mengalami kontraksi tajam hingga -90,89% pada 2021 sebelum berbalik positif di tahun-tahun berikutnya, meskipun dengan tren melambat pada 2024. Nilai tambah produk hasil perikanan justru menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari 0,76% pada 2020 menjadi 6,1% di 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam mendorong hilirisasi produk perikanan, meskipun tantangan masih terjadi pada sisi produksi dan stabilitas pendapatan pembudidaya.

Di Kota Probolinggo, nilai produksi dari perikanan tangkap dan budidaya menunjukkan hasil yang berbeda selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, nilai produksi perikanan tangkap tercatat sebesar 189,65 miliar rupiah, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Namun, terjadi penurunan signifikan

pada tahun berikutnya, yaitu hanya sebesar 19,67 miliar rupiah pada tahun 2021. Selanjutnya, nilai produksi perikanan tangkap mulai pulih secara bertahap menjadi 21,26 miliar rupiah di tahun 2022, meningkat lagi menjadi 22,89 miliar rupiah di tahun 2023, dan mencapai 24,74 miliar rupiah pada tahun 2024.



Gambar II-126 Nilai Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, 2025

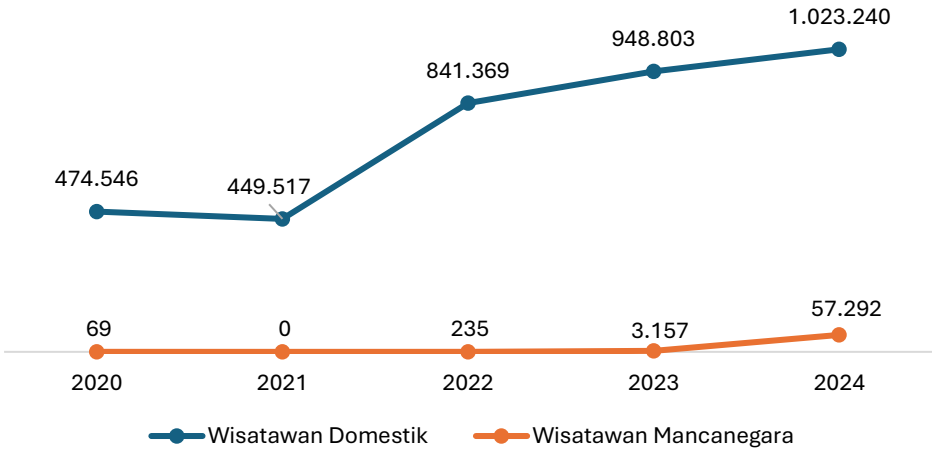
Nilai produksi dari sektor perikanan budidaya mengalami pertumbuhan stabil dan positif selama kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2020, nilai produksi budidaya tercatat sebesar 7,21 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 berturut - turut mengalami peningkatan menjadi 7,25 miliar rupiah, 9,12 miliar rupiah 12,15 miliar rupiah dan 12.27 miliar rupiah . Angka Peningkatan Nilai produksi sektor budidaya perikanan ini menunjukkan bahwa sektor perikanan budidaya di Kota Probolinggo memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut, sekaligus menunjukkan keberhasilan berbagai intervensi kebijakan dan investasi yang dilakukan pemerintah daerah maupun pihak swasta.

Meskipun mengalami penurunan tajam pasca tahun 2020, sektor peikanan tangkap tetap menunjukkan pemulihan yang stabil. Penurunan tajam ini terjadi disebabkan adanya perubahan kewenangan Kabupaten/Kota pada sektor perikanan. Sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya memiliki potensi pertumbuhan nilai produksi yang positif dimana setiap tahunnya selama periode 2020 - 2024 mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat kebijakan yang mendukung keberlanjutan produksi perikanan budidaya, serta memperhatikan sektor perikanan tangkap dan budidaya dengan

meningkatkan manajemen sumber daya laut, pengelolaan perikanan budidaya serta memperkuat kapasitas nelayan dan pembudidaya agar kedua sektor perikanan ini mampu memberikan dampak optimal bagi perekonomian daerah.

2) PARIWISATA

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo memegang peran strategis dalam mengelola dua bidang utama, yaitu urusan pemuda dan olahraga, serta urusan pariwisata. Dalam konteks pariwisata, dinas ini bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki Kota Probolinggo agar mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengelolaan destinasi wisata, promosi pariwisata, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, Dinas Pariwisata juga berperan dalam melibatkan masyarakat setempat melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pelatihan di sektor pariwisata, sehingga tercipta ekosistem wisata yang inklusif dan berkelanjutan. Terdapat 3 indikator kinerja urusan pariwisata Kota Probolinggo yang merepresentasikan capaian kinerja urusan pariwisata berikut:



Gambar II-127 Capaian Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo, 2025

Grafik jumlah kunjungan wisatawan di Kota Probolinggo selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada segmen wisatawan domestik, jumlah kunjungan tercatat sebanyak 474.546 pada tahun 2020, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 449.517 di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 841.369

kunjungan, yang terus meningkat menjadi 948.803 di tahun 2023 dan mencapai puncaknya di tahun 2024 dengan jumlah 1.023.240 kunjungan. Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga mengalami peningkatan yang mencolok. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 69 kunjungan, tetapi di tahun 2021 jumlah ini turun drastis menjadi 0 akibat pembatasan perjalanan internasional selama pandemi. Mulai tahun 2022, jumlah wisatawan asing kembali meningkat dengan 235 kunjungan, lalu melonjak menjadi 3.157 di tahun 2023, dan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024 dengan jumlah 57.292 kunjungan.

Tabel II.45 Rata-rata Lama Tinggal dan Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2020-2024

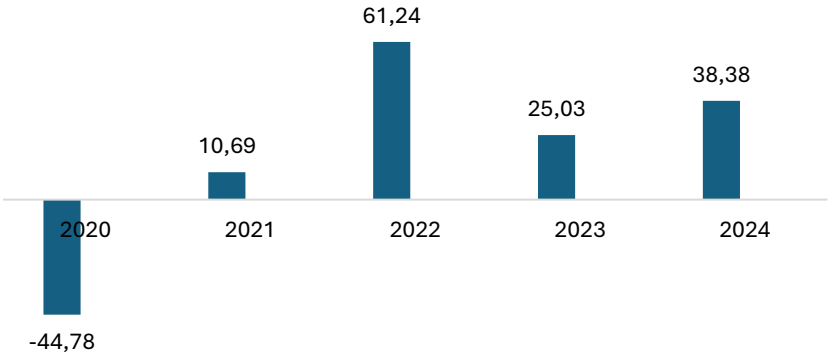
INDIKATOR KINERJA KUNCI	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata lama tinggal wisatawan	n/a	n/a	0,79	0,78	0,78
Persentase peningkatan angka kunjungan wisatawan	-57	-5,30	87,17	13,14	13,51

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2025

Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Probolinggo dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan stagnan, yakni hanya berkisar antara 0,78 hingga 0,79 hari atau kurang dari satu hari. Capaian ini mengindikasikan bahwa kunjungan wisatawan sebagian besar bersifat transit atau kunjungan singkat, tanpa berlanjut pada aktivitas inap. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan atraksi, fasilitas, dan paket wisata yang mampu mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal. Persentase peningkatan angka kunjungan wisatawan selama lima tahun terakhir cenderung tidak stabil. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2020 dan 2021 yang merupakan dampak langsung dari pembatasan mobilitas akibat pandemi. Kebangkitan mulai terlihat pada tahun 2022 dengan lonjakan signifikan sebesar 87,17%, menandai mulai pulihnya sektor pariwisata. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2023, kemudian disusul peningkatan moderat pada tahun 2024.

Dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pariwisata mulai pulih, keberlanjutan dan konsistensi pertumbuhan masih menjadi tantangan yang memerlukan strategi promosi dan pengelolaan destinasi yang lebih optimal. Pemerintah Kota Probolinggo juga berperan besar dalam mendorong sektor pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai event dan festival sebagai daya tarik wisata (DTW). Beragam acara budaya, festival kuliner, dan event olahraga yang diadakan setiap tahunnya turut meningkatkan minat wisatawan untuk

berkunjung, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Dengan strategi ini, Kota Probolinggo semakin memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Timur.

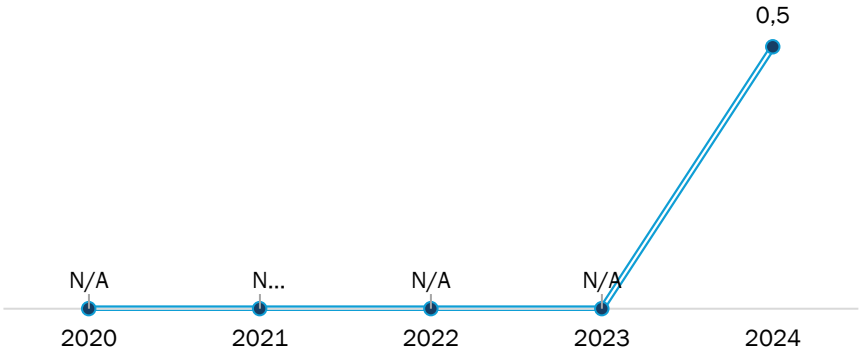


Gambar II-128 Capaian Indikator Rasio PAD Sektor Pariwisata di Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo, 2025

Grafik Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Kota Probolinggo selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terjadi penurunan tajam hingga mencapai angka negatif sebesar -44,78. Penurunan drastis ini diduga kuat akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan aktivitas wisata, penutupan objek wisata, dan penurunan jumlah kunjungan wisatawan secara drastis.

Pada tahun 2024, rasio PAD kembali meningkat menjadi 38,38. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan yang kembali stabil, berkat penguatan strategi digitalisasi promosi pariwisata, peningkatan kerja sama dengan pelaku usaha wisata, serta pengembangan destinasi baru yang lebih menarik dan inklusif. Secara umum, tren ini mencerminkan bahwa meskipun sektor pariwisata sempat terpuruk akibat pandemi, melalui berbagai langkah strategis dan adaptif, Pemerintah Kota Probolinggo berhasil mendorong pemulihan dan pertumbuhan sektor ini secara bertahap.



Gambar II-129 Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

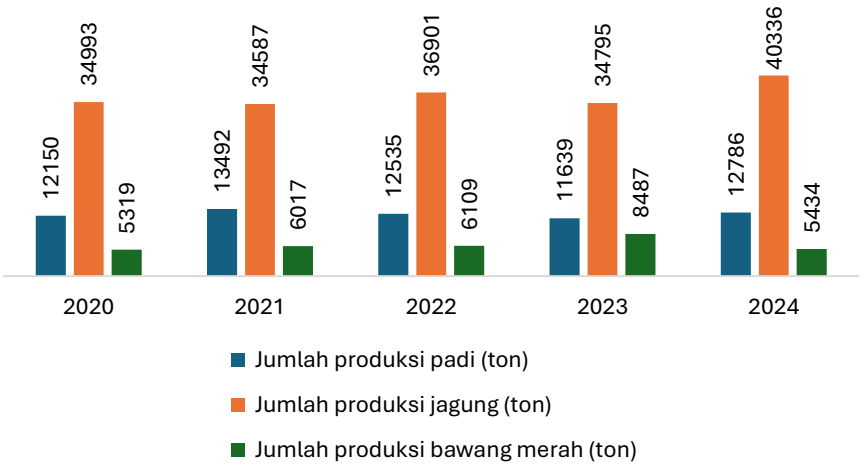
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan grafik persentase peningkatan usaha ekonomi kreatif di Kota Probolinggo tahun 2020–2024, terlihat bahwa tidak terdapat data atau pencatatan yang tersedia (N/A) dari tahun 2020 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut belum dilakukan pengukuran atau pelaporan resmi terkait perkembangan usaha ekonomi kreatif di daerah tersebut. Namun, pada tahun 2024 mulai terlihat adanya kemajuan dengan tercatatnya peningkatan sebesar 0,5 persen. Meskipun angka ini masih tergolong kecil, kehadirannya menandakan langkah awal yang positif dalam upaya pengembangan sektor ekonomi kreatif. Kemungkinan besar, pencapaian ini merupakan hasil dari mulai diterapkannya kebijakan pendataan, pelatihan kewirausahaan berbasis kreativitas, serta dukungan terhadap pelaku usaha kreatif melalui fasilitasi promosi, pembiayaan, maupun akses pasar. Peningkatan ini diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi kreatif yang lebih terarah dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

3) PERTANIAN

Urusan pertanian menjadi salah satu urusan pemerintahan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Di Kota Probolinggo, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen untuk mengelola urusan pertanian secara optimal dengan berbagai program yang berfokus pada peningkatan produktivitas, kualitas hasil pertanian,

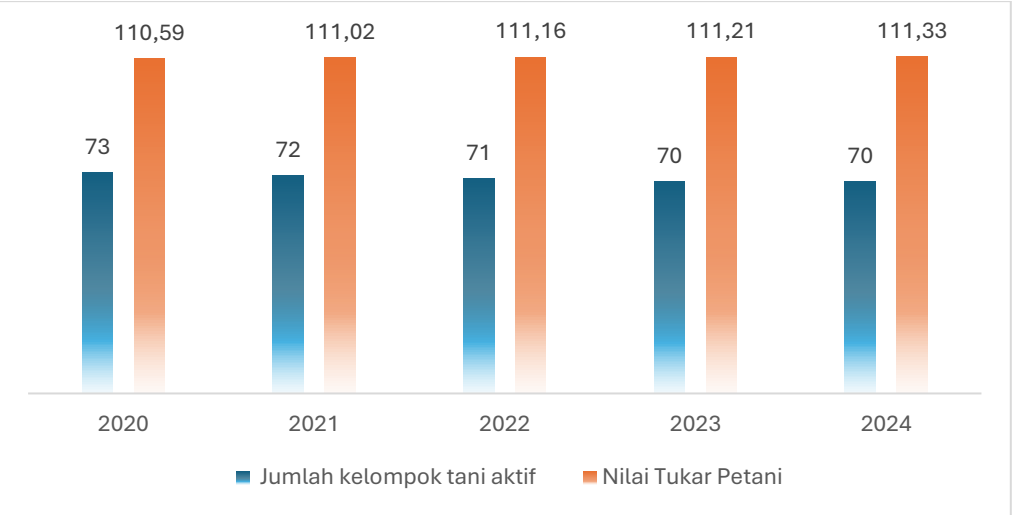
dan kesejahteraan petani. Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menjaga stabilitas pangan di Kota Probolinggo.



Gambar II-130 Produksi Padi, Jagung, dan Bawang Merah Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

Grafik di atas menyajikan data Produksi padi, jagung, dan bawang merah di Kota Probolinggo pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang beragam. Produksi padi menunjukkan kecenderungan fluktuatif dari tahun 2020-2024. Sementara itu, produksi jagung cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi, diawali dengan 34.993 ton pada 2020 dan mencapai puncaknya pada 2024 sebesar 40.336 ton. Sebaliknya, produksi bawang merah mengalami kenaikan bertahap dari 5.319 ton pada 2020 menjadi 8.487 ton pada 2023, namun turun kembali menjadi 5.434 ton pada 2024. Data ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan produksi padi dan jagung di Kota Probolinggo cukup berhasil, meskipun terdapat tantangan dalam menjaga stabilitas produksi bawang merah. Variasi hasil produksi ini mencerminkan pengaruh berbagai faktor, baik dari segi iklim, kebijakan pertanian, maupun teknologi budidaya yang diterapkan selama periode tersebut.

Peningkatan produktivitas ini dapat dikaitkan dengan berbagai program dan kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Probolinggo, seperti penyediaan sarana produksi pertanian, pelatihan bagi petani, serta pengembangan sistem irigasi yang lebih baik.



Gambar II-131 Jumlah Kelompok Tani Aktif dan Nilai Tukar Petani Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

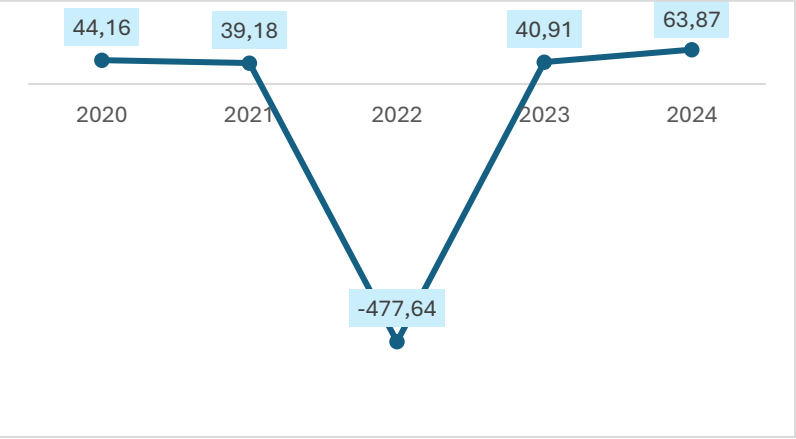
Jumlah kelompok tani aktif di Kota Probolinggo selama lima tahun terakhir menunjukkan tren menurun, dari 73 kelompok pada tahun 2020 menjadi 70 kelompok pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan ini dapat mencerminkan tantangan dalam regenerasi petani, minat generasi muda terhadap sektor pertanian, atau konsolidasi kelembagaan tani yang tidak diimbangi dengan pembentukan kelompok baru. Di sisi lain, nilai tukar petani mengalami peningkatan secara konsisten, dari 110,59 pada tahun 2020 menjadi 111,33 pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan perbaikan dalam daya beli petani dan efisiensi dalam produksi pertanian, meskipun jumlah kelompok yang aktif justru menurun. Kondisi ini menandakan perlunya penguatan kelembagaan petani agar capaian ekonomi yang membaik dapat diimbangi dengan keberlangsungan organisasi petani sebagai aktor utama dalam pembangunan pertanian.

Tabel II.46 Produksi Hasil Peternakan Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi Potong	kg	422.340	372.563	362.628	473.105	471.913
Kambing	kg	37.542	37.675	31.279	35.705	33.183
Domba	kg	149.332	164.462	165.969	159.424	178.346
Ayam Buras	kg	96.027	110.686	140.570	161.095	152.184
Ayam Ras Petelur	kg	6.003	5.544	4.375	14.940	10.612
Ayam Ras Broiler	kg	1.398.176	1.724.393	1.820.710	1.961.386	2.128.900
Itik	kg	25.668	26.108	27.214	29.475	30.369

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

Produksi hasil peternakan di Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang bervariasi pada setiap komoditas. Produksi sapi potong mengalami penurunan berturut - turut dari 422.340 kg pada 2020 menjadi 372.653 kg pada 2021 dan 362.628 pada tahun 2022, namun kembali meningkat hingga 473.105 kg pada 2023 dan sedikit menurun menjadi 471.913 kg pada 2024. Produksi kambing mengalami penurunan yang cukup drastis dari 37.675 kg pada 2021 menjadi 31.279 kg pada 2022 namun relatif stabil pada dua tahun berikutnya. Penurunan Produksi pada tahun 2022 yang terjadi pada produksi ternak sapi dan kambing merupakan dampak merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) yang terjadi di Kota Probolinggo. Sedangkan Komoditas domba mengalami peningkatan berturut - turut pada periode 2020 - 2022 (149.332 kg; 164.462 kg; 165.969 kg) dan sempat menurun pada tahun 2023 (159.424 kg) namun meningkat kembali pada tahun 2024 (178.346 kg), meskipun sempat menurun pada 2021. Produksi ayam buras juga mengalami kenaikan dari 96.027 kg pada 2020 menjadi puncaknya di 161.095 kg pada 2023, namun turun sedikit menjadi 152.184 kg pada 2024. Sementara itu, ayam ras petelur mengalami fluktuasi cukup tajam, dengan produksi terendah 4.375 kg pada 2022 dan tertinggi 14.940 kg pada 2023. Ayam ras broiler menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 1.398.176 kg pada 2020 menjadi 2.128.900 kg pada 2024. Komoditas itik juga mengalami kenaikan produksi dari 25.668 kg pada 2020 menjadi 30.369 kg pada 2024. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya perkembangan positif pada beberapa komoditas peternakan, meskipun beberapa komoditas lainnya masih menghadapi fluktuasi.



Gambar II-132 Persentase penurunan penyakit hewan menular strategis Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo, 2025

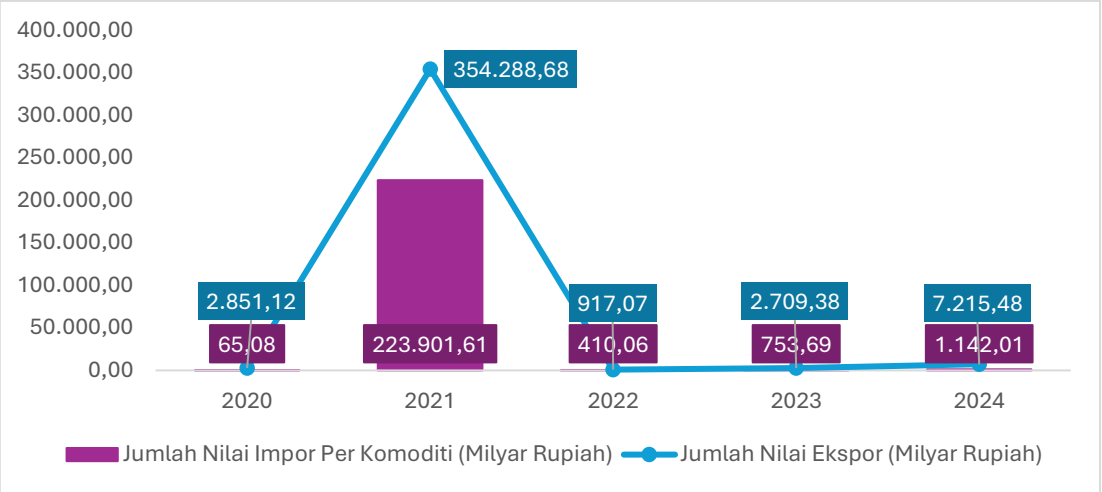
Persentase penurunan penyakit hewan menular strategis di Kota Probolinggo selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang sangat fluktuatif. Tahun 2020 hingga 2021 mencatat penurunan yang masih dalam kisaran wajar, yaitu masing-masing sebesar 44,16% dan 39,18%. Tahun 2022 terjadi lonjakan negatif ekstrem sebesar -477,64% yang menandakan adanya peningkatan kasus penyakit secara tajam dan signifikan. Hal ini dikarenakan pada pertengahan tahun 2022 merupakan puncak merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada hewan ternak berkuku belah (Sapi, Kambing, Domba). Tahun 2023 situasi mulai terkendali dengan kembali tercapainya penurunan sebesar 40,91%. Tahun 2024 menunjukkan pemulihan yang lebih kuat dengan capaian penurunan sebesar 63,87%, mengindikasikan keberhasilan langkah-langkah pengendalian dan pencegahan penyakit secara lebih efektif. Fluktuasi ini mencerminkan pentingnya konsistensi dalam kebijakan kesehatan hewan dan respons cepat terhadap potensi wabah.

Secara umum, capaian kinerja urusan pertanian di Kota Probolinggo selama periode 2020-2024 menunjukkan tren positif. Meski demikian, tantangan ke depan adalah mempertahankan dan meningkatkan pencapaian tersebut melalui pemanfaatan dan percepatan optimal sumber daya pertanian, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Fokus pada penerapan teknologi pertanian dan perkebunan yang sudah ada juga menjadi kunci dalam mendorong produktivitas. Salah satu permasalahan klasik yang masih sering dihadapi dalam pembangunan pertanian adalah ketersediaan air irigasi, yang menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian.

4) PERDAGANGAN

Perdagangan atau jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2022, mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo khususnya penyelenggaraan urusan perdagangan mempunyai tugas perizinan dan pendaftaran perusahaan, peningkatan sarana

distribusi Perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen, penggunaan dan pemasaran Produk dalam negeri. Adapun capaian kinerja urusan perdagangan Kota Probolinggo dapat tergambar melalui grafik berikut:



Gambar II-133 Jumlah Nilai Impor dan Ekspor Kota Probolinggo Tahun 2021-2024
Sumber: DKUP Kota Probolinggo, 2025

Nilai impor Kota Probolinggo mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 65,08 miliar pada 2020 menjadi 1.142,01 miliar pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan bahan baku atau barang modal untuk mendukung sektor industri dan perdagangan di daerah tersebut. Peningkatan impor ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan industri manufaktur, ekspansi usaha, atau ketergantungan terhadap produk luar negeri yang masih tinggi. Meskipun kenaikan impor dapat menjadi indikasi peningkatan aktivitas ekonomi, tingginya nilai impor juga perlu diimbangi dengan penguatan industri dalam negeri agar ketergantungan terhadap barang impor tidak terlalu besar, yang berpotensi mempengaruhi keseimbangan neraca perdagangan daerah.

Sementara itu, nilai ekspor mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Dari 2.851,12 miliar pada 2020, ekspor sempat menurun menjadi 917,07 miliar pada 2022, sebelum kembali meningkat secara drastis hingga mencapai 7.215,48 miliar pada 2024. Penurunan pada 2022 kemungkinan besar disebabkan oleh faktor eksternal seperti penurunan permintaan global, gangguan rantai pasok, atau kendala produksi di sektor ekspor utama. Namun, lonjakan ekspor pada 2024 menunjukkan adanya pemulihan yang kuat, didorong oleh

peningkatan daya saing produk lokal, kebijakan ekspor yang lebih mendukung, atau pulihnya pasar global.

Tabel II.47 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Sektor Perdagangan	25,71	26,35	26,48	26,22	26,20
Peningkatan Nilai Perdagangan	2.669,90 (Milyar)	127.600,99 (Milyar)	-129.880,05 (Milyar)	1.448,67 (Milyar)	4.117,78 (Milyar
Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	9,74%	123%	-0,99%	1,95%	1,66%

Sumber: DKUP Kota Probolinggo, 2025

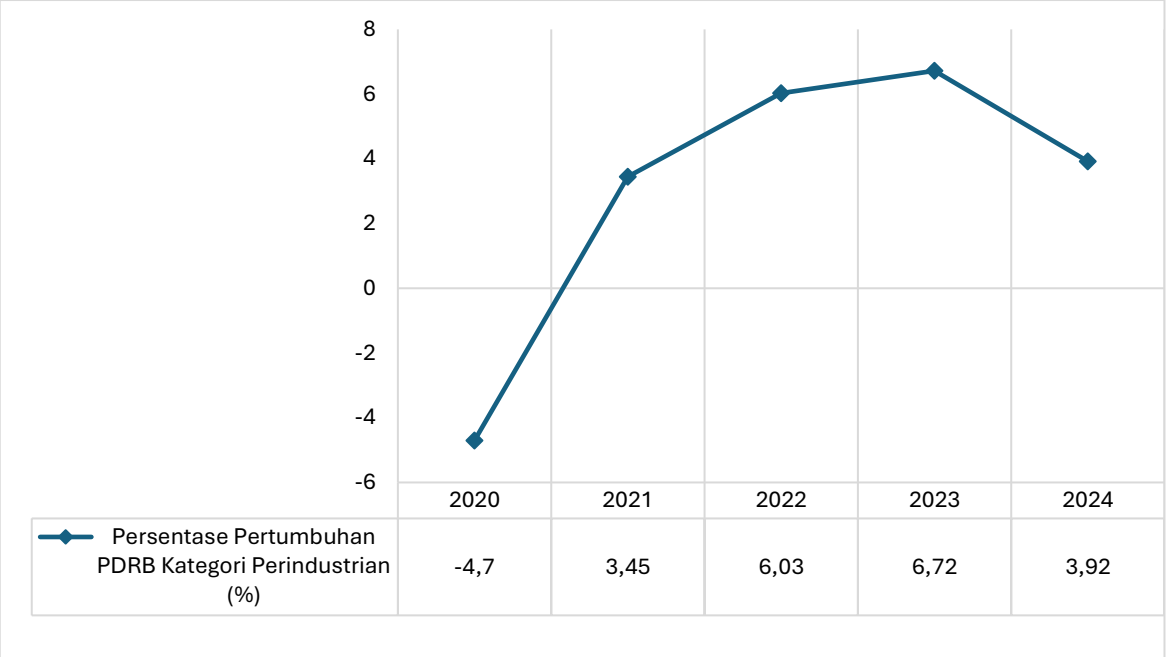
Persentase peningkatan nilai ekspor Kota Probolinggo dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan. Tahun 2021 mencatat lonjakan tertinggi sebesar 123%, menunjukkan momentum kuat sektor ekspor pasca pandemi. Tahun 2022 terjadi kontraksi sebesar -0,99% yang mengindikasikan adanya hambatan eksternal maupun penyesuaian pasar. Tahun 2023 dan 2024 mengalami pemulihan bertahap meskipun angkanya cenderung moderat. Rasio PDRB sektor perdagangan selama periode yang sama mencerminkan kontribusi yang konsisten dengan kecenderungan meningkat, meski sempat sedikit menurun pada dua tahun terakhir. Data ini mengindikasikan bahwa sektor perdagangan tetap menjadi pilar utama perekonomian kota.

Peningkatan nilai perdagangan mengalami fluktuasi tajam dengan capaian luar biasa pada tahun 2021, disusul penurunan drastis di tahun 2022 yang mencapai nilai negatif. Tahun-tahun berikutnya menunjukkan tren perbaikan meskipun belum setara dengan lonjakan sebelumnya. Fluktuasi ini memperlihatkan tingginya sensitivitas sektor perdagangan terhadap dinamika pasar global dan domestik. Secara keseluruhan, kestabilan dan keberlanjutan ekspor dan perdagangan memerlukan strategi yang adaptif serta dukungan terhadap pelaku usaha, terutama untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu dan meningkatkan diversifikasi produk ekspor unggulan.

5) PERINDUSTRIAN

Urusan perindustrian di Kota Probolinggo dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor industri lokal. Berbagai kebijakan dan program diterapkan untuk meningkatkan daya saing industri, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Dengan adanya upaya ini, diharapkan

sektor perindustrian dapat terus berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.



	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perindustrian (%)	-4,7	3,45	6,03	6,72	3,92

Gambar II-134 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perindustrian serta Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, 2025

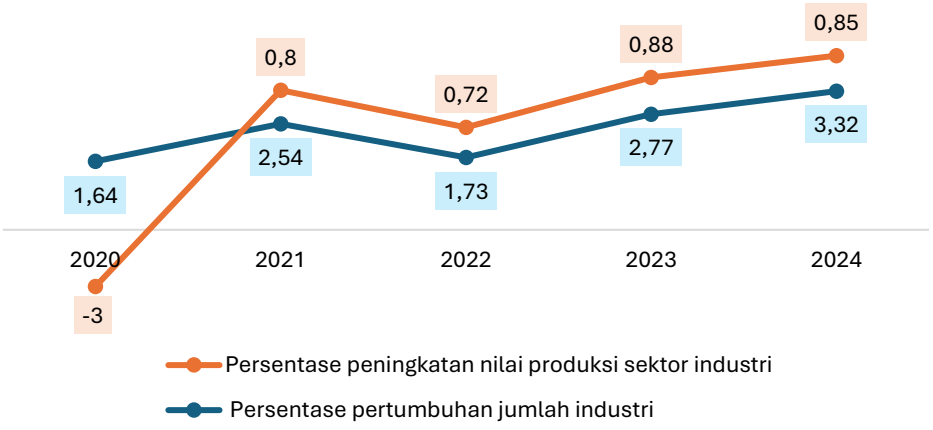
Berdasarkan data persentase pertumbuhan PDRB kategori perindustrian di Kota Probolinggo, terlihat adanya tren positif selama periode 2020-2023. Pada tahun 2020, sektor perindustrian mengalami kontraksi signifikan dengan pertumbuhan negatif sebesar -4,7%, kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi. Namun, pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,45%, diikuti oleh peningkatan signifikan menjadi 6,03% pada 2022. Tren positif ini berlanjut hingga 2023, dengan pertumbuhan mencapai 6,72%. akan tetapi pada tahun 2024 pertumbuhan PDRB kategori Perindustrian mencapai : 3,92. Data ini menunjukkan bahwa sektor perindustrian di Kota Probolinggo pada tahun 2024 mengalami penurunan, hal ini disebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan suku bunga.

Tabel II.48 Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian

NO	TAHUN	NILAI PRODUKSI SEKTOR INDUSTRI (RUPIAH)
1	2020	3.604.610.739.322
2	2021	3.402.301.570.112
3	2022	5.851.006.690.969
4	2023	5.902.604.233.165
5	2024	5.952.575.508.104

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan data nilai produksi sektor industri di Kota Probolinggo selama periode 2020-2024, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, nilai produksi tercatat sebesar Rp3.375.299.176.698. Angka ini mengalami kenaikan tipis pada 2021 menjadi Rp3.402.301.570.112. Namun, lonjakan besar terjadi di tahun 2022 dengan nilai produksi mencapai Rp5.851.006.690.969, mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat pasca pandemi. Peningkatan terus berlanjut pada 2023 dengan nilai produksi sebesar Rp5.902.604.233.165, dan diproyeksikan mencapai Rp5.952.575.508.104 di tahun 2024. Data ini menunjukkan pertumbuhan sektor industri yang stabil dan positif, mencerminkan kontribusi signifikan sektor ini terhadap perekonomian Kota Probolinggo.



Gambar II-135 Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri dan Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, 2025

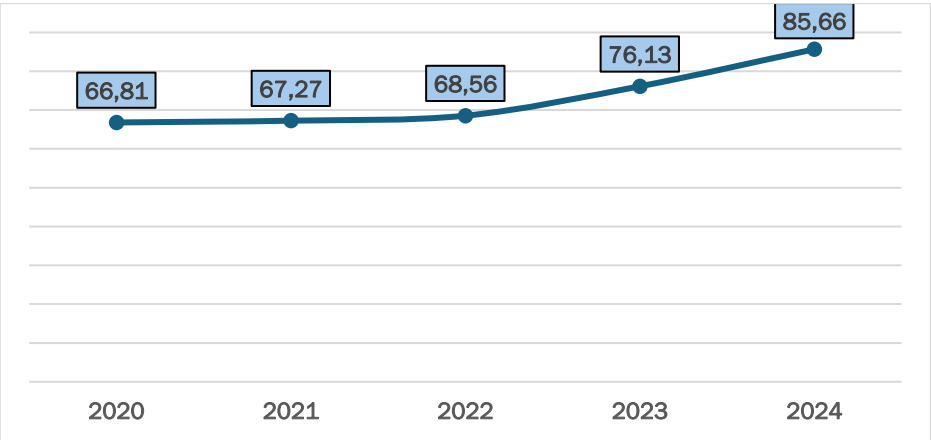
Persentase peningkatan nilai produksi sektor industri Kota Probolinggo dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan stabil pada level rendah. Tahun 2020 mencatat kontraksi sebesar -3% yang menandakan dampak signifikan pandemi terhadap sektor ini. Tahun-tahun berikutnya mencatatkan pertumbuhan positif namun terbatas, berkisar antara 0,72% hingga 0,88%, yang mencerminkan pemulihan bertahap namun belum menunjukkan lonjakan signifikan dalam produktivitas industri. Sementara itu,

jumlah industri di Kota Probolinggo mengalami pertumbuhan yang relatif stabil dengan fluktuasi ringan. Pada tahun 2023 jumlah industri sebesar 2,77%, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 3,32. Peningkatan jumlah industri yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan nilai produksinya mengindikasikan adanya ekspansi kuantitas tanpa diiringi peningkatan signifikan pada nilai tambah produksi. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi strategis dalam peningkatan kualitas produksi, inovasi industri, serta efisiensi proses untuk mengangkat kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah.

D. URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN

1) SEKRETARIAT DAERAH

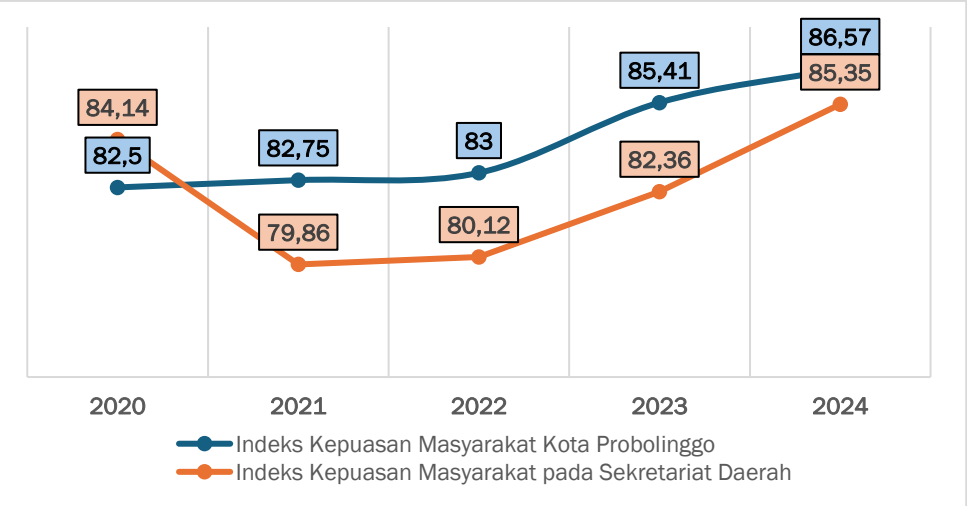
Sekretariat Daerah Kota Probolinggo berfungsi dalam koordinasi administrasi, penyusunan kebijakan, serta pelaksanaan tugas kepala daerah, Sekretariat Daerah bertanggungjawab dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Kinerja Sekretariat Daerah dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Sekretariat Daerah, serta Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Gambar II-136 Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, 2025

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Probolinggo tahun 2020-2024, terlihat tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, indeks ini berada pada angka 66,81, mengalami sedikit peningkatan menjadi 67,27 di tahun 2021, dan meningkat lebih lanjut menjadi 68,56 pada tahun 2022. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 85,66. Meski terus meningkat namun capaian ini juga menghadapi berbagai tantangan dalam

mempertahankan konsistensi reformasi birokrasi yang telah dicapai sebelumnya. Tidak hanya dilihat dari indeks reformasi birokrasi, indeks kepuasan masyarakat juga menjadi indikator penting dalam capaian kinerja sekretariat daerah. Berikut merupakan grafik capaian kepuasan masyararakt terhadap Sekretariat Daerah.

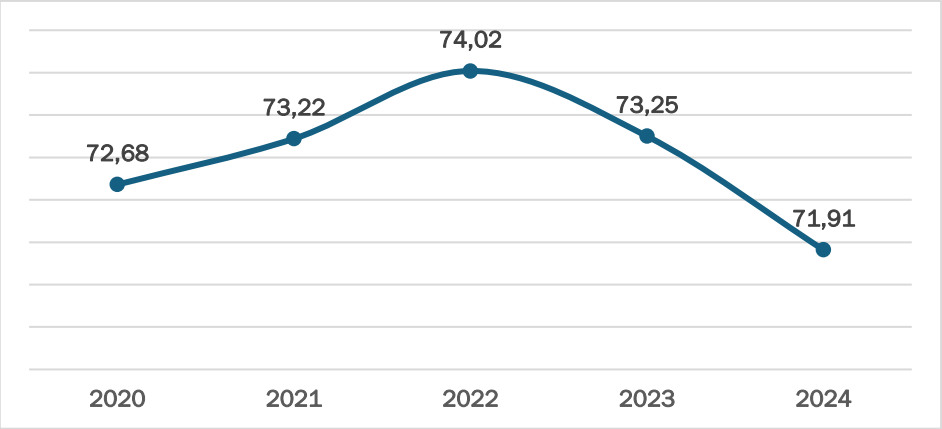


Gambar II-137 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, 2025

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Probolinggo dalam periode 2020-2024, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Indeks Kepuasan Masyarakat secara umum berada di angka 82,5 pada tahun 2020, mengalami peningkatan bertahap menjadi 82,75 di tahun 2021, 83 di tahun 2022, dan melonjak lebih tinggi di tahun 2023 dengan nilai 85,41, hingga akhirnya mencapai 86,57 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penyediaan layanan publik serta responsivitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Sekretariat Daerah mengalami fluktuasi yang lebih signifikan. Pada tahun 2020, indeks ini mencatat nilai 84,14, namun mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 79,86. Tren ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyelenggaraan layanan pada tahun tersebut. Namun, perlahan-lahan terjadi peningkatan pada tahun 2022 dengan nilai 80,12, yang terus berlanjut hingga 82,36 di tahun 2023 dan mencapai 85,35 pada tahun 2024. Kenaikan ini menandakan adanya peningkatan kualitas layanan, baik dari aspek efisiensi, efektivitas, maupun kepuasan masyarakat terhadap layanan Sekretariat Daerah.

Terlihat kinerja Sekretariat Daerah dalam meningkatkan kepuasan masyarakat mengalami perkembangan positif, khususnya dalam dua tahun terakhir. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat secara umum menunjukkan bahwa masyarakat semakin merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mempertahankan stabilitas dan memastikan bahwa peningkatan ini berkelanjutan. Penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Sekretariat Daerah pada tahun 2021 dapat menjadi bahan evaluasi lebih lanjut. Kemungkinan besar, faktor-faktor seperti keterbatasan akses layanan, perubahan kebijakan, atau transisi sistem administrasi dapat menjadi penyebab dari penurunan tersebut. Namun, dengan adanya tren pemulihan dalam beberapa tahun berikutnya, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah perbaikan yang efektif.

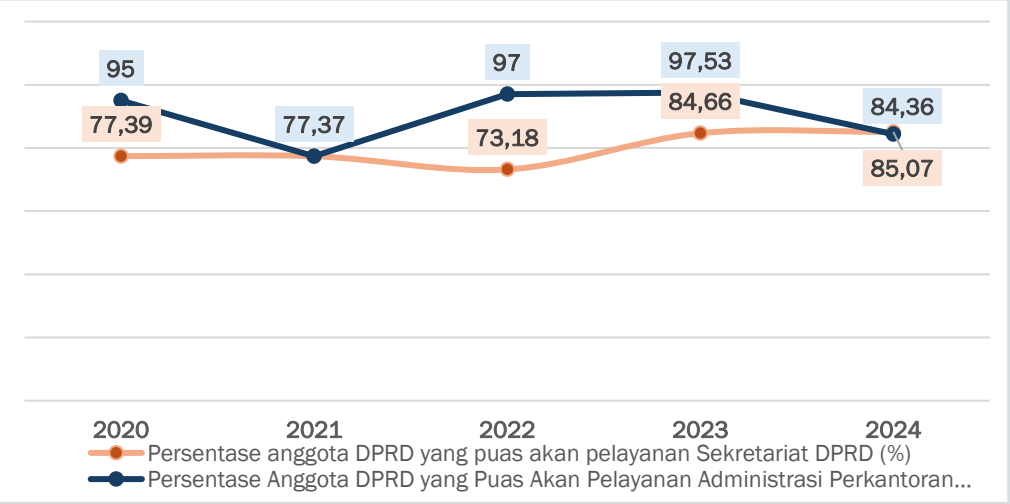


Gambar II-138 Nilai SAKIP Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, 2025

Nilai SAKIP Kota Probolinggo selama lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Pada tahun 2020, nilai SAKIP berada pada angka 72,68, mengalami peningkatan menjadi 73,22 pada tahun 2021, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai 74,02. Namun, pada tahun 2023, nilai ini sedikit menurun menjadi 73,25, dan mengalami penurunan lebih lanjut pada tahun 2024 dengan nilai 71,91. Tren ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan akuntabilitas kinerja pemerintahan, meskipun pada tahun-tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan. Faktor-faktor seperti efektivitas perencanaan strategis, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah mungkin menjadi penyebab utama dari fluktuasi nilai SAKIP ini.

2) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Sekretariat DPRD Kota Probolinggo berperan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fungsi utama Sekretariat DPRD adalah menyediakan layanan administratif, teknis, dan operasional guna menunjang efektivitas tugas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Evaluasi terhadap kinerja Sekretariat DPRD dapat diukur melalui tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan yang diberikan, termasuk aspek pelayanan administratif dan dukungan kesekretariatan. Adapun capaian indikator urusan sekretariat dewan dapat dilihat melalui grafik berikut:



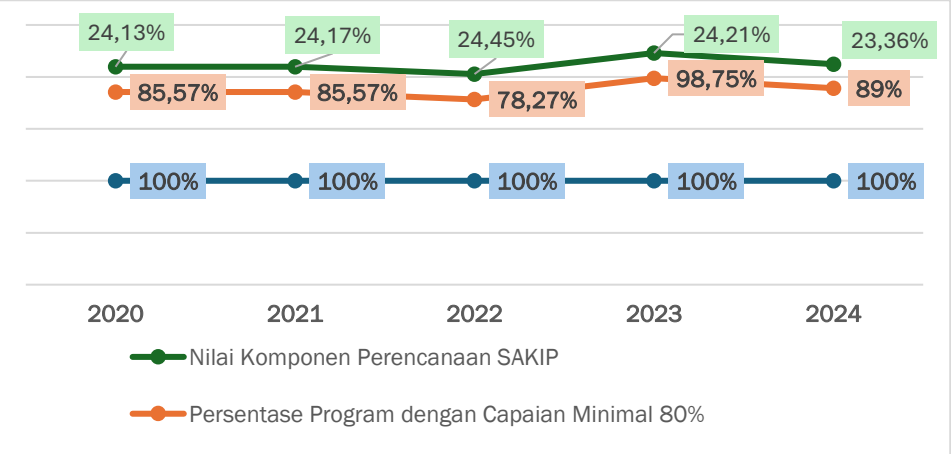
Gambar II-139 Persentase Anggota DPRD yang Puas Akan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Probolinggo, 2025

Pada tahun 2020, tingkat kepuasan anggota DPRD berada pada angka 95%, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 77,37%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan sistem administrasi atau kendala operasional yang terjadi pada tahun tersebut. Peningkatan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 97%, menunjukkan adanya perbaikan dalam layanan yang diberikan. Puncak kepuasan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 97,53%, yang menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPRD merasa puas terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan. Namun, pada tahun 2024, kembali terjadi penurunan menjadi 84,36%, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kualitas layanan secara konsisten. Persentase kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi perkantoran juga menunjukkan pola yang hampir serupa. Pada tahun 2020,

indeks ini berada di angka 77,39%, sedikit menurun menjadi 73,18% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dengan capaian 84,66%, yang berlanjut ke tahun 2024 dengan kenaikan menjadi 85,07%. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek pelayanan administrasi yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan anggota DPRD.

3) PERENCANAAN



Gambar II-140 Capaian Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024
Sumber: Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2025

Keberhasilan perencanaan dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu persentase program yang mencapai target minimal 80%, serta persentase OPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik. Persentase Program Dengan Capaian Minimal 80% mengukur efektivitas pelaksanaan program yang mencapai minimal 80% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian indikator ini stabil di angka 85,57%, namun mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2022 menjadi 78,27%. Tren ini kembali membaik pada tahun 2023 dengan kenaikan signifikan ke 98,75%, meskipun sedikit menurun menjadi 89% pada tahun 2024. Penurunan di tahun 2022 menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program, sementara peningkatan pada tahun 2023 mencerminkan adanya perbaikan dalam efektivitas program pembangunan. Persentase OPD yang Menyusun Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik mencerminkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh OPD di Kota Probolinggo. Dalam lima tahun terakhir, capaian indikator ini tetap berada pada angka 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh OPD telah menyusun dokumen perencanaan dengan standar yang baik. Stabilitas capaian ini menandakan keberhasilan

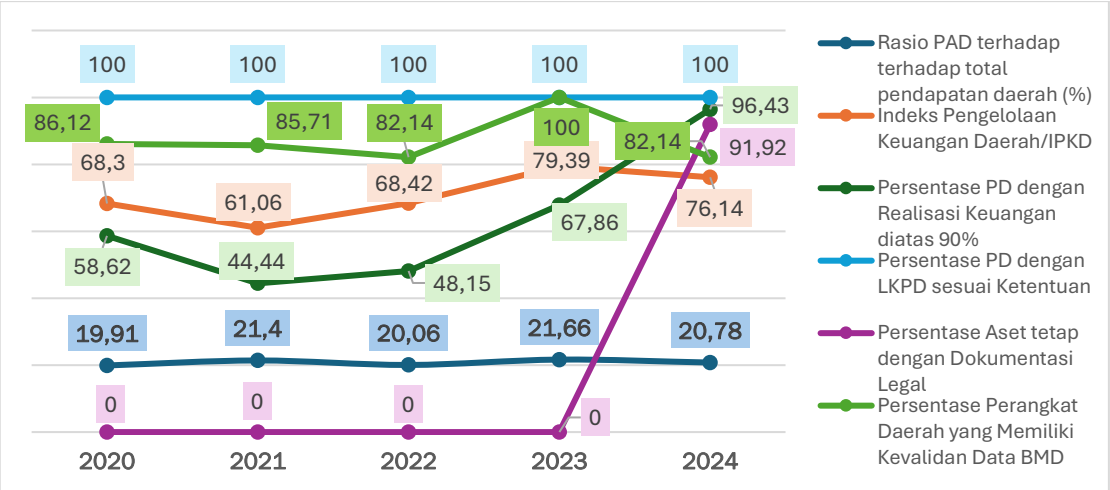
Bappeda Litbang dalam mendorong peningkatan kapasitas perencanaan di tingkat OPD.

Untuk Indikator Nilai Komponen Perencanaan SAKIP mengalami flktuasi mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Namun secara umum, capaian Nilai Komponen Perencanaan SAKIP pada 2020 ke 2024 mengalami penurunan

Secara keseluruhan, kinerja BappedaLitbang Kota Probolinggo dalam urusan perencanaan pembangunan daerah telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam efektivitas program pembangunan, dan penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas. Namun tantangan seperti ketidakstabilan capaian program masih menjadi perhatian utama. Dengan penguatan sistem monitoring dan evaluasi serta optimalisasi koordinasi dengan OPD, Bappeda Litbang diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Probolinggo yang lebih baik di masa depan.

4) KEUANGAN

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Probolinggo berperan sebagai pengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Sebagai perangkat daerah yang menangani pendapatan asli daerah (PAD), perencanaan anggaran, serta pengelolaan aset daerah, BPKAD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan stabilitas dan efektivitas keuangan daerah. Salah satu indikator kinerja utama dalam mengukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, dan juga opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Probolinggo, yang mencerminkan sejauh mana pendapatan asli daerah berkontribusi terhadap keseluruhan keuangan daerah.



Gambar II-141 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Probolinggo, 2025

Rasio PAD terhadap total pendapatan Kota Probolinggo dalam periode 2020-2024, terlihat adanya pola fluktuatif yang mencerminkan dinamika kemandirian fiskal daerah. Pada tahun 2020, rasio PAD berada di angka 19,91%, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 21,4%. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh optimalisasi berbagai sumber pendapatan daerah, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah. Namun, pada tahun 2022, rasio PAD mengalami penurunan menjadi 20,06%, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan penerimaan daerah. Kemungkinan penyebabnya bisa berasal dari faktor eksternal seperti kebijakan fiskal nasional, perlambatan ekonomi, atau perubahan regulasi pajak daerah. Pada tahun 2023, rasio PAD kembali meningkat secara signifikan ke angka 21,66%, menunjukkan keberhasilan strategi peningkatan PAD yang diterapkan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan daerah. Namun, di tahun 2024, rasio PAD mengalami sedikit penurunan kembali menjadi 20,78%, yang mengindikasikan bahwa tantangan dalam mempertahankan tren peningkatan PAD masih perlu mendapatkan perhatian serius.

Fluktuasi rasio PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan bahwa meskipu terdapat peningkatan pada beberapa tahun, upaya untuk menjaga stabilitas da pertumbuhan PAD masih menghadapi berbagai tantangan. Tren ini mencerminkan bahwa strategi peningkatan PAD yang diterapkan pada tahun 2021 dan 2023 cukup efektif, namun belum mampu menjamin konsistensi

peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi PAD di antaranya adalah dinamika perekonomian daerah, kebijakan fiskal nasional, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat serta aktivitas usaha dapat berdampak pad penerimaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, adanya perubahan kebijakan transfer fiskal dari pusat juga berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengukur enam dimensi utama: kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi belanja, penyerapan anggaran, serta inovasi pengelolaan keuangan daerah. Capaian IPKD Kota Probolinggo pada tahun 2020 sebesar 68,3 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 61,06. Capaian kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 68,42, lalu melonjak di tahun 2023 menjadi 79,39. Namun, pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 76,14. Secara keseluruhan, terdapat tren peningkatan capaian IPKD.

Persentase kenaikan PAD di Kota Probolinggo tiap tahun nya mengalami flutuasi. Pada tahun 20220 capaian sebesar 4,31 persen dan tahun 2021 meningkat menjadi 13,7 persen. Pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga -11,09 persen. Di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan hingga 8,67 persen namun di tahun 2024 kembali mengalami penurunan hingga -1,67.

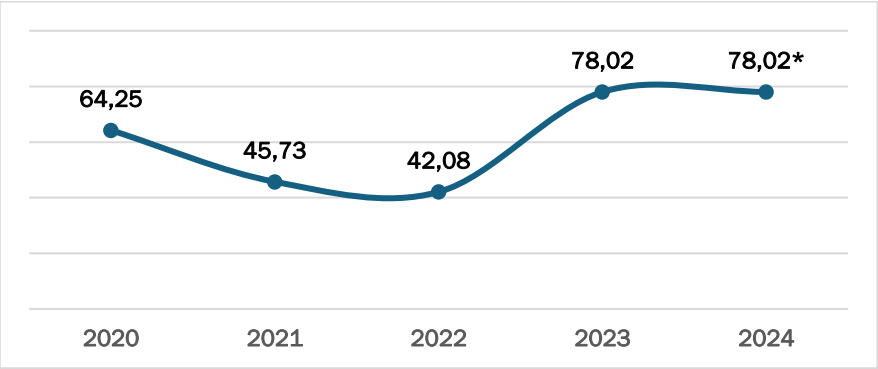
Adapun Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo menunjukkan capaian yang membanggakan, yakni memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 kali berturut-turut hingga tahun 2024. Di sisi lain, persentase Perangkat Daerah (PD) yang menyusun LKPD sesuai ketentuan juga mencapai 100% secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mencerminkan tingginya komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan.

Untuk indicator persentase Aset tetap dengan dokumen legal merupakan indicator dan baru dilakukan perhitungan pada tahun 2024 yakni sebesar 91,92. Sedangkan indicator Persentase PD yang memiliki kevalidan Data BMD mulai tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi, yakni pada tahun 2021 sebesar 86,21 dan pada tahun 2024 sebesar 82,14.

Dengan capaian ini, Kota Probolinggo diharapkan dapat terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan yang berkualitas dan berbasis kinerja.Sedangkan capaian atas persentase asset tetap dengan dokumentasi legal untuk fluktuasinya dipengaruhi oleh penambahan dari jumlah bidang tanah dan penambahan jumlah peralatan dan mesin sebagai hasil pengadaan tahun berjalan, serta hasil sertifikasi atas penambahan jumlah bidang tanah (tanah fasum dan jalan lingkungan)

5) KEPEGAWAIAN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo berperan dalam membangun kapasitas aparatur pemerintah yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan kepegawaian, pengembangan kompetensi, serta pembinaan aparatur sipil negara (ASN), BKPSDM berupaya untuk memastikan bahwa sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, yang mencerminkan tingkat kompetensi, integritas, dan kinerja ASN dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut didukung oleh indikator kinerja yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar II-142 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kota Probolinggo
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan Data Indeks Profesionalitas Aparatur Kota Probolinggo dalam periode 2020-2024, terlihat adanya tren fluktuatif yang mencerminkan dinamika peningkatan kapasitas ASN. Pada Tahun 2020, indeks ini berada pada angka 64,25 dengan kategori rendah. Namun pada Tahun 2021 terjadi penurunan

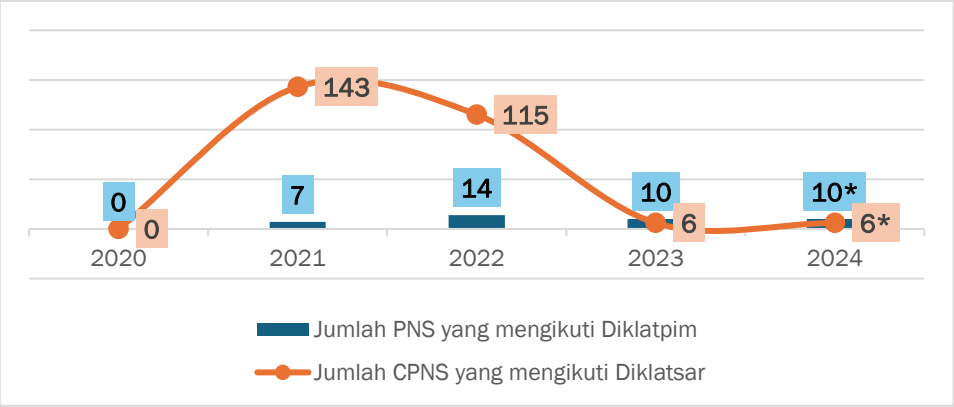
signifikan menjadi 45,73 dengan kategori sangat rendah, yang kemudian pada Tahun 2022 semakin menurun pada titik terendah dengan nilai 42,08 dengan kategori yang masih sama yaitu sangat rendah. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2021 dan 2022 terdapat penyetaraan jabatan fungsional yang menyebabkan banyaknya sertifikat yang sudah tidak bisa diakui lagi dalam perhitungan kompetensi. Sertifikat-sertifikat yang dulunya mendukung kompetensi ASN pada jabatan struktural, kini tidak bisa lagi diakui karena sudah beralih pada jabatan fungsional. Hal ini yang menyebabkan penurunan pada Indeks Profesionalitas Aparatur, khususnya pada komponen Kompetensi. Tidak hanya itu, terdapat beberapa ASN yang tidak segera memperbaharui ataupun mengunggah sertifikat-sertifikat yang baru diperoleh. Pada Tahun 2023, Indeks Profesionalitas Aparatur kembali mengalami peningkatan yang cukup tajam ke angka 78,02 dengan kategori sedang, nilai ini dirilis secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara dan menjadi angka tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena terdapat perubahan pada formulasi perhitungan pada komponen Kualifikasi dan Kompetensi. Nilai tersebut masih sama sampai dengan Tahun 2024, jadi nilai Indeks Profesionalitas Aparatur pada Tahun 2024 yaitu sebesar 78,02 merupakan nilai sementara yang ditarik secara real time pada Aplikasi SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara).

Terdapat tantangan yang dihadapi BKPSDM Kota Probolinggo dalam meningkatkan profesionalitas aparatur antara lain adalah ketidakstabilan tingkat profesionalisme ASN, yang terlihat dari penurunan indeks secara signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Selain itu, ketersediaan program pelatihan yang relevan dan berbasis kompetensi masih menjadi tantangan, karena peningkatan profesionalisme ASN sangat bergantung pada efektivitas program pengembangan yang diberikan. Implementasi sistem merit yang lebih ketat juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses promosi dan pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan berbasis kinerja, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan profesionalitas aparatur. kinerja BKPSDM Kota Probolinggo dalam meningkatkan profesionalitas aparatur telah menunjukkan perbaikan signifikan, terutama dalam dua tahun terakhir. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022, tren peningkatan pada tahun 2023 dan 2024 menandakan bahwa berbagai kebijakan dan program pengembangan ASN telah berjalan dengan baik. Untuk menjaga momentum ini, diperlukan strategi yang lebih sistematis dalam

pengelolaan SDM aparatur, termasuk penguatan sistem pelatihan berbasis digital, peningkatan manajemen talenta ASN, serta penerapan kebijakan yang mendukung profesionalisme dan integritas ASN dalam jangka panjang.

6) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Urusan pendidikan dan pelatihan merupakan urusan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. BKPSDM ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan. Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja dari urusan pendidikan dan pelatihan adalah:



Gambar II-143 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo, 2025

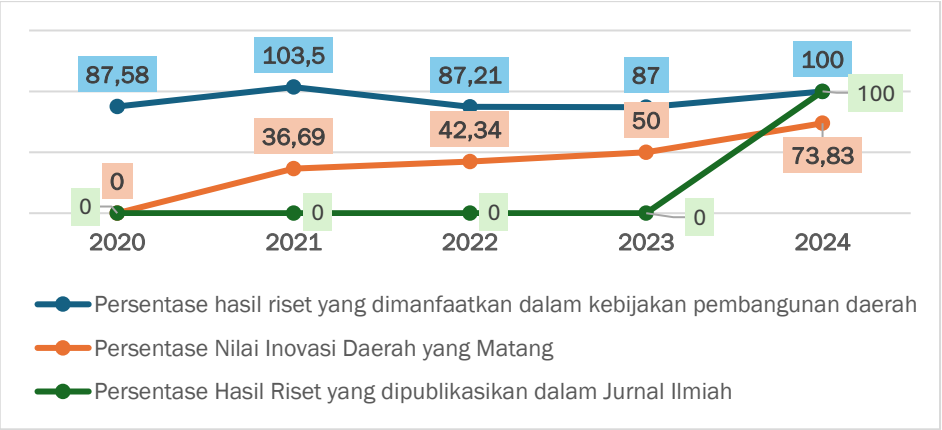
Berdasarkan data selama Tahun 2020-2024, indikator jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan di Kota Probolinggo mengalami dinamika yang cukup fluktuatif. Tahun 2020 tidak ada PNS yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan, kemudian meningkat menjadi 7 orang pada Tahun 2021, lalu meningkat lagi menjadi 14 orang di Tahun 2022, namun mengalami penurunan menjadi 10 orang pada Tahun 2023 dan 2024. Hal ini disebabkan karena pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan berdasarkan jumlah PNS yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan kompetensi baik Nasional, Administrator, maupun Pengawas. Sedangkan pada indikator jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Latsar terjadi dinamika yang fluktuatif juga dikarenakan jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Latsar ditentukan berdasarkan Jumlah Formasi yang

dibutuhkan dalam Pengadaan CPNS. Pada Tahun 2020 tidak ada CPNS yang mengikuti Diklat Latsar dikarenakan tidak ada Seleksi Penerimaan CPNS pada tahun sebelumnya. Terdapat lonjakan pada Tahun 2021 yaitu sebanyak 143 orang dan 115 orang pada Tahun 2022 dikarenakan terdapat Seleksi Penerimaan CPNS dengan Jumlah Formasi yang dibutuhkan dengan jumlah tersebut. Sedangkan pada Tahun 2023 sebanyak 6 orang dan 2024 sebanyak 5 orang yang mengikuti Diklat Latsar dikarenakan tidak ada Seleksi Penerimaan CPNS pada tahun sebelumnya. Sebanyak 6 orang CPNS yang mengikuti Diklat Latsar pada Tahun 2023 dan 5 orang CPNS pada Tahun 2024 tersebut merupakan CPNS yang berasal dari sekolah kedinasan.

7) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penelitian dan pengembangan (litbang) adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menciptakan produk baru serta menguji efektivitas dari produk yang telah dihasilkan. Metode ini mencakup proses riset secara sistematis untuk menciptakan inovasi serta mengevaluasi keefektifan dari hasil yang telah dikembangkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (BappedaLitbang) Kota Probolinggo memiliki peran strategis dalam merancang kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada data dan riset. BappedaLitbang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program pembangunan tersusun secara sistematis, berbasis bukti, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di Kota Probolinggo, urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang). Sesuai amanat Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perangkat daerah ini bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pembangunan berdasarkan hasil riset serta pengembangan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.



Gambar II-144 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2024

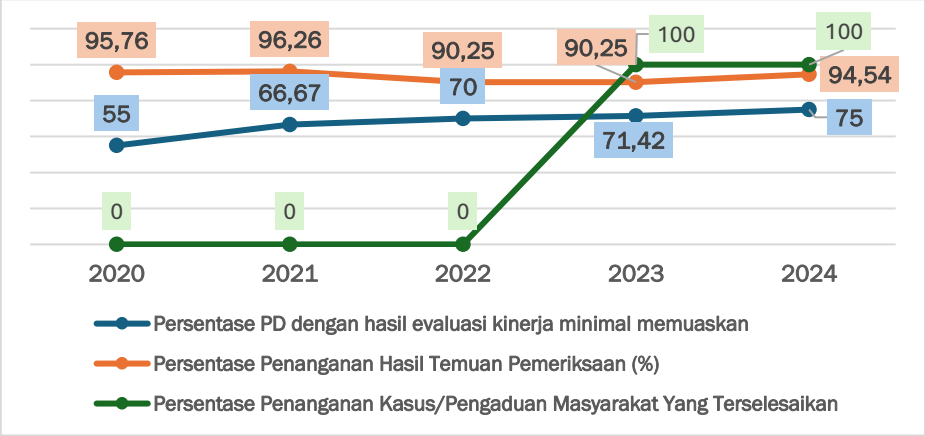
Indikator Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah menggambarkan sejauh mana hasil penelitian dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah. Pada tahun 2020, persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah berada di angka 87,58% yang menunjukkan bahwa hasil penelitian belum dimanfaatkan secara penuh dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Kemudian nilai persentase ini mengalami peningkatan pada tahun 2022, yakni 103,50%. Hal ini menunjukkan adanya optimalisasi riset yang dimanfaatkan. Namun pada tahun 2022 dan 2023, persentasenya menurun di angka 87,21% dan 87%. Kemudian pada tahun 2024, indikator ini mencapai 100%, yang menandakan seluruh hasil penelitian telah dimanfaatkan secara penuh dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Nilai inovasi daerah yang matang mengacu pada kemampuan suatu daerah untuk secara efektif dan efisien mengembangkan dan menerapkan inovasi kedalam berbagai aspek yakni: tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Capaian nilai inovasi daerah yang matang di Kota Probolinggo pada tahun 2021 sebesar 36,69 persen dan naik menjadi 42,34 persen. Pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 50 persen dan tahun 2024 menjadi 73,83 persen. Peningkatan nilai inovasi daerah yang matang ini mengindikasikan bahwa Kota Probolinggo sangat mendukung lahirnya inovasi baik dari adanya dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah serta adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta, dan Masyarakat.

Untuk Indikator Persentase hasil riset yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah merupakan indicator baru yang baru dilakukan perhitungan pada tahun 2024 yakni sebesar 100 persen.

8) PENGAWASAN

Inspektorat yang memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas akuntabilitas dan transparansi pemerintatan daerah. Kinerja Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti persentase perangkat daerah (PD) yang memperoleh nilai SAKIP minimal A, persentase penanganan hasil temuan pemeriksaan, serta tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Indikator-indikator ini berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintiran, serta untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

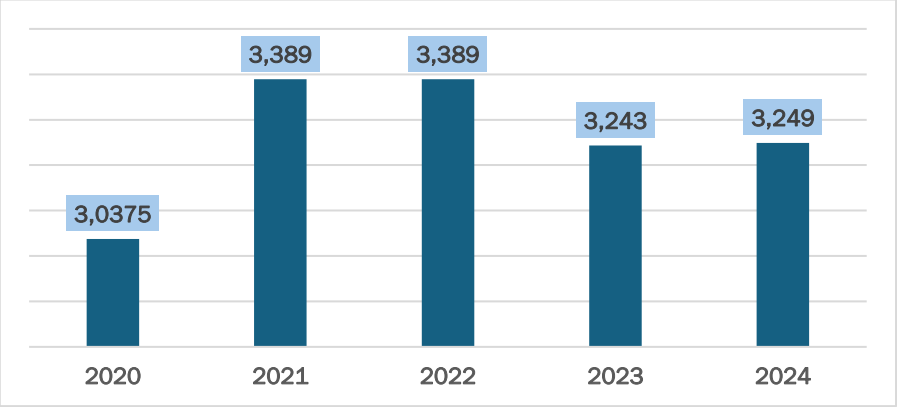


Gambar II-145 Capaian Kinerja Inspektorat Kota Probolinggo Tahun 2020-2024
Sumber: Inspektorat Kota Probolinggo, 2025

Indikator Persentase PD dengan hasil evaluasi kinerja minimal memuaskan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 55% pada tahun 2020 menjadi 66,67% pada tahun 2021, kemudian berturut-turut meningkat hingga mencapai 75% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Tingkat akuntabilitas dan perencanaan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo semakin membaik dari tahun ke tahun. Sementara itu, indicator persentase penanganan hasil temuan pemeriksaan menunjukkan capaian yang fluktuatif, yakni 95,76% pada tahun 2020 meningkat sedikit pada 2021 menjadi 96,26%, namun kemudian mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya hingga stagnan pada angka 90,25% akan tetapi kembali mengalami peningkatan

pada Tahun 2024 menjadi 94,54%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan dalam percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh perangkat daerah. Sedangkan Persentase Penanganan Kasus/Pengaduan Masyarakat Yang Terselesaikan baru dilakukan perhitungan mulai 2023 dengan capaian berturut-turut sebesar 100 persen. Untuk Persentase Perangkat Daerah yang mencapai kategori Baik dalam penyelenggaraan SPIP dan Persentase Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3 merupakan indicator baru sehingga tidak tersaji data.

Indikator yang menjadi perhatian lebih adalah tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mencerminkan efektivitas sistem pengendalian dalam mencegah risiko penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan. Pada tahun 2020, tingkat maturitas SPIP berada pada angka 3,0375, yang kemudian meningkat signifikan menjadi 3,389 pada tahun 2021 dan tetap berada di angka yang sama pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, indikator ini mengalami sedikit penurunan menjadi 3,243, sebelum kembali mengalami peningkatan kecil ke 3,249 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengendalian internal telah diperkuat dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat tantangan dalam mempertahankan efektivitasnya secara konsisten.



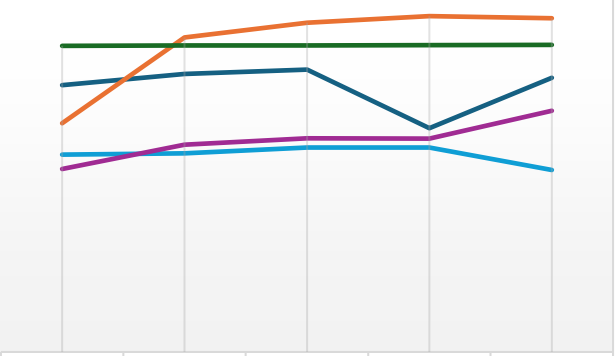
Gambar II-146 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2020-2024
Sumber: Inspektorat Kota Probolinggo, 2025

Inspektorat Kota Probolinggo menghadapi tantangan dengan adanya perangkat daerah yang belum mencapai nilai SAKIP minimal A, yang menunjukkan bahwa sistem perencanaan dan akuntabilitas kinerja masih perlu diperkuat. Selain itu, stagnasi dalam penanganan hasil temuan pemeriksaan mengindikasikan perlunya strategi yang lebih agresif dalam menindaklanjuti hasil audit dan pemeriksaan agar tidak terjadi akumulasi permasalahan yang belum

terselesaikan. Tantangan lainnya adalah ketidakstabilan dalam tingkat maturitas SPIP, yang menunjukkan perlunya penguatan dalam pengendalian internal agar mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan kebijakan dan risiko yang dihadapi pemerintah daerah. Kinerja Inspektorat Kota Probolinggo dalam pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan menunjukkan kemajuan yang cukup baik, terutama dalam peningkatan nilai SAKIP perangkat daerah dan efektivitas sistem pengendalian internal. Namun, tantangan dalam penyelesaian hasil temuan pemeriksaan dan konsistensi penguatan pengendalian internal masih perlu menjadi perhatian. Dengan strategi yang lebih sistematis, seperti penguatan mekanisme pengawasan berbasis risiko, percepatan tindak lanjut hasil audit, serta optimalisasi sistem pengendalian internal berbasis teknologi, Inspektorat Kota Probolinggo diharapkan dapat terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah secara lebih efektif.

9) KEWILAYAHAN

Kota Probolinggo memiliki lima kecamatan yaitu Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Kanigaran, dan Kecamatan Kedopok. Setiap kecamatan memiliki tanggung jawab penting dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan pemerintahan, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan publik, serta mendorong pemberdayaan masyarakat secara langsung di tingkat wilayah. Dalam menjalankan peran tersebut, tingkat keberhasilan kecamatan dapat diukur melalui indikator penting seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh masing-masing kecamatan.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kecamatan Mayangan	89,69	90,94	91,42	84,9	90,5
Kecamatan Kademangan	85,45	95	96,62	97,37	97,13
Kecamatan Wonoasih	94,06	94,09	94,12	94,15	94,17
Kecamatan Kanigaran	81,96	82,09	82,75	82,75	80,25
Kecamatan Kedopok	80,36	83,06	83,79	83,73	86,84

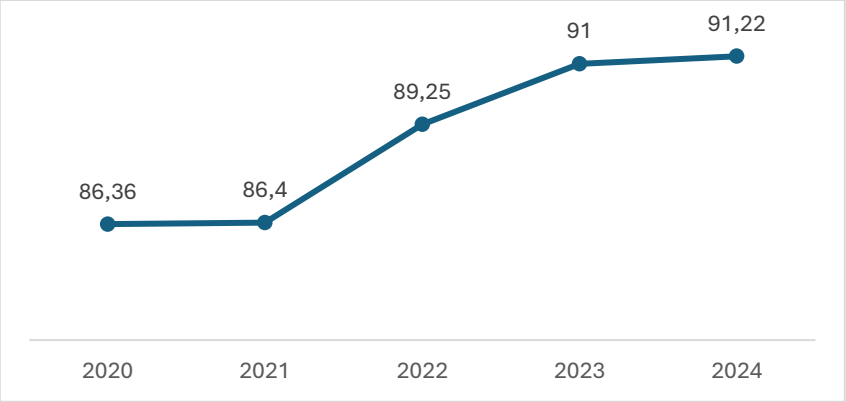
Gambar II-147 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat 5 Kecamatan Di Kota Probolinggo 2020-2024

Sumber : Semua Kecamatan Di Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan data grafik di atas, terlihat bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dari kelima kecamatan di Kota Probolinggo menunjukkan adanya peningkatan kinerja. Kecamatan Mayangan mengalami penurunan kinerja pada Tahun 2023 menjadi 84,9. Namun pada Tahun 2024 IKM Kecamatan Mayangan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 90,5. Sedangkan untuk Kecamatan Kanigaran menunjukan trend penurunan dari 81,96 pada Tahun 2020 menjadi 80,25 pada Tahun 2024. Capaian IKM ini menunjukkan adanya tantangan dan karakteristik yang berbeda di setiap kecamatan, seperti kondisi sarana dan prasarana yang kurang merata, kualitas sumber daya aparatur yang berbeda-beda, serta karakteristik masyarakat yang beragam. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi pelayanan publik agar lebih efektif dan merata. Dengan memperhatikan perbedaan karakteristik tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan serta menciptakan pelayanan publik yang lebih inklusif, responsif, dan berkualitas di seluruh kecamatan yang ada di Kota Probolinggo.

10) KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

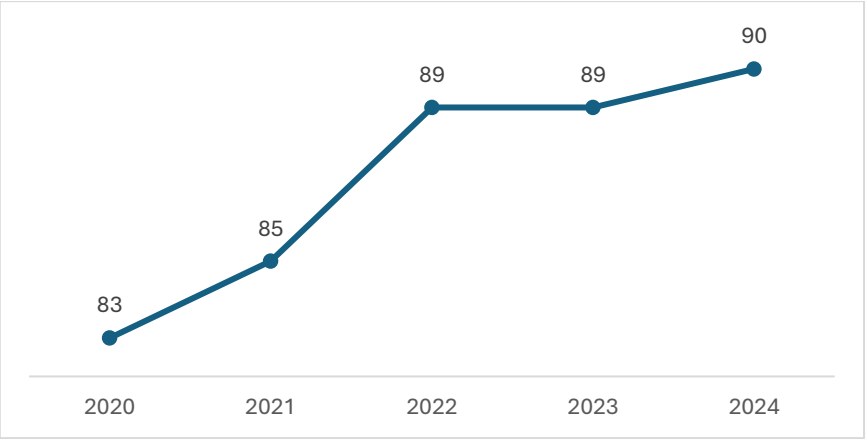
Urusan penyelenggaraan pemerintahan umum berada di bawah tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Probolinggo. Urusan ini diukur menggunakan tiga indikator utama, yaitu persentase jumlah potensi konflik sosial masyarakat yang terselesaikan serta kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP. Indikator persentase jumlah potensi konflik sosial yang terselesaikan menunjukkan capaian yang konsisten sebesar 100%, baik pada tahun 2020 maupun tahun 2024, yang berarti seluruh potensi konflik sosial yang muncul di Kota Probolinggo telah mampu diselesaikan secara tuntas. Selanjutnya diukur pula menggunakan survei kepuasan masyarakat. Dan presesentase orkemas yang aktif



Gambar II-148 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kesbangpol Kota Probolinggo Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo, 2025

Capaian survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesbangpol Kota Probolinggo menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, skor kepuasan masyarakat tercatat sebesar 86,36, yang kemudian meningkat tipis menjadi 86,4 pada tahun 2021. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana indeks mencapai 89,25, dan kembali melonjak menjadi 91 pada tahun 2023. Capaian tertinggi tercatat pada tahun 2024, yaitu sebesar 91,22. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja pelayanan, peningkatan efektivitas komunikasi publik, serta peningkatan aksesibilitas layanan yang diberikan oleh Kesbangpol kepada masyarakat luas. Disamping itu perhitungan kinerja kesbangpol juga dilihat dengan persentase orkesmas yang aktif di Kota Probolinggo.



Gambar II-149 Jumlah Orkesmas Aktif Kota Probolinggo tahun 2020-2024
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo, 2025

Jumlah Orkesmas aktif menunjukkan tren yang relatif stabil dan meningkat selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 83 Orkesmas yang aktif, kemudian meningkat menjadi 85 pada tahun 2021. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 89 Orkesmas aktif, yang bertahan hingga tahun 2023. Pada tahun 2024, angka ini kembali mengalami kenaikan menjadi 90 Orkesmas. Stabilitas dan kenaikan jumlah organisasi ini menunjukkan bahwa ekosistem organisasi masyarakat di Kota Probolinggo cenderung sehat dan berkembang, serta menunjukkan potensi partisipasi warga yang semakin aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan kebangsaan. Terlepas daripada itu terdapat satu capaian terkait pemilu yang baru dilakukan pada tahun 2024 lalu yakni Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Umum sebanyak 78,7% di Kota Probolinggo

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesbangpol Kota Probolinggo menunjukkan peningkatan positif dan jumlah organisasi kemasyarakatan (Orkesmas) aktif mengalami pertumbuhan stabil, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dampaknya lebih substantif terhadap kualitas kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan daerah. Salah satu isu utama adalah belum optimalnya legalitas dan pembaruan data kelembagaan Orkesmas yang dapat memengaruhi efektivitas pembinaan dan pengawasan. Di sisi lain, sebagian Orkesmas masih beroperasi secara seremonial dan belum menunjukkan kontribusi nyata dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan maupun partisipasi pembangunan. Selain itu, pelayanan publik Kesbangpol masih menghadapi tantangan dalam hal keterlibatan masyarakat secara bermakna, di mana komunikasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil belum

sepenuhnya bersifat dua arah dan responsif. Isu lain yang mengemuka adalah terbatasnya pelibatan masyarakat rentan dan kurang maksimalnya respon terhadap potensi konflik sosial di akar rumput. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Orkesmas, perbaikan mekanisme pembinaan yang lebih partisipatif, serta transformasi pelayanan publik yang inklusif menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas Kesbangpol dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara di tingkat lokal.

Selain tiga indikator yang telah disampaikan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) juga menggunakan indikator lain yakni : Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Kinerja Ormas, Indeks Kewaspadaan Nasional, Indeks Harmoni Indonesia dan Persentase Partai Politik dan Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik mengacu pada Surat Kementerian Dalam Negeri Tanggal 9 Oktober 2025 Nomor 400.4.7/e-575/Polpum Hal Dukungan terhadap Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Daerah. Adapun indeks-indeks tersebut baru dilakukan perhitungan di tahun 2024 sehingga tidak tersedia capaian untuk tahun 2020-2023, dan digunakan sebagai target Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pemerintahan Umum pada Bab IV.

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang, yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun aspek dalam keuangan daerah yang dibahas dalam sub bab ini meliputi realisasi anggaran yang didalamnya meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, serta neraca daerah. Keuangan daerah merujuk pada pengelolaan dan administrasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini mencakup pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi, serta alokasi dari pemerintah pusat. Keuangan daerah juga mencakup pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program di tingkat lokal, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai layanan publik lainnya. Sehingga, pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan

daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

2.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, analisis terkait kondisi dan proyeksi keuangan daerah menjadi esensial untuk memperoleh gambaran yang akurat terkait kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan serta mengatasi permasalahan strategis dengan tepat. Melakukan analisis keuangan daerah yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Kinerja keuangan masa lalu merujuk pada evaluasi dan analisis hasil keuangan yang telah dikelola di Kota Probolinggo dalam rentang tahun 2020 - 2024 yang mencakup pencapaian dan kesehatan keuangan daerah pada masa lalu, termasuk pendapatan yang diterima, pengeluaran yang dilakukan, serta bagaimana pengelolaan keuangan tersebut mempengaruhi kondisi keuangan keseluruhan.

2.2.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD

APBD mencerminkan rencana keuangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan berbagai program, proyek, dan kegiatan yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merujuk pada dokumen perencanaan dan penganggaran keuangan pemerintah daerah yang mencakup semua rencana penerimaan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas :
    a. Pendapatan Daerah;
    b. Belanja Daerah; dan
    c. Pembiayaan Daerah.

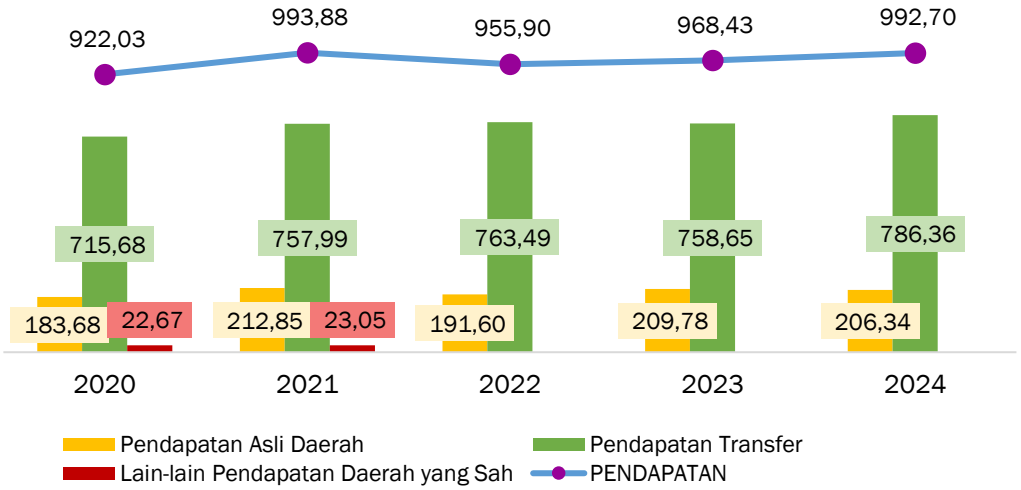
2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
6. Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo meliputi perkembangan pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. PENDAPATAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mendefinisikan bahwa pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah Kota Probolinggo bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang meliputi transfer dari pemerintah pusat maupun transfer dari provinsi dan daerah lain, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut

merupakan perkembangan nilai masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 (Dalam Milyar Rupiah) :



Gambar II-150 Pendapatan Kota Probolinggo Tahun 2020 – 2024
Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, 2025

Pendapatan Kota Probolinggo menunjukkan tren yang cukup fluktuatif pada setiap tahunnya. Tren ini memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek dalam konteks pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan Kota Probolinggo selama 5 tahun terakhir memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,95%. Capaian total pendapatan Kota Probolinggo terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 922,03 milyar rupiah kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 993,88 milyar rupiah dengan pertumbuhan sebesar 7,79%. Hingga pada tahun 2024 tercatat total pendapatan daerah Kota Probolinggo sebesar 992,70 milyar rupiah dengan pertumbuhan sebesar 2,51% dari tahun sebelumnya.

Komponen pendapatan daerah yang pertama adalah pendapatan asli daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,44% selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024). Capaian terendah terjadi pada tahun 2020 atau sebesar 183,68 milyar rupiah. Rendahnya capaian ini dikarenakan realisasi pada pajak daerah yang lebih rendah bila dibandingkan tahun berikutnya. Sedangkan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar 212,85 milyar rupiah dan pertumbuhan sebesar 15,88%. Kenaikan ini terjadi karena meningkatnya realisasi pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2024 PAD Kota Probolinggo mengalami penurunan menjadi sebesar 206,34 milyar rupiah dengan pertumbuhan sebesar -1,64%. Penurunan ini terjadi karena

menurunnya realisasi pada lain-lain PAD yang sah dari 139,52 milyar menjadi 120,86 milyar rupiah. Penurunan dimaksud disebabkan karena ada penurunan pendapatan jasa giro, bunga dan BLUD. Tetapi untuk pelayanan masih tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Adapun retribusi yang tidak boleh dipungut antara lain : (1) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, (2) retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, (3) retribusi pengujian kendaraan bermotor, (4) retribusi pelayanan tera/tera ulang, (5) retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan (6) retribusi ijin trayek.

Komponen kedua yaitu pendapatan transfer yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,41%. Pendapatan transfer Kota Probolinggo mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp. 758.653.155.765,00 dan pertumbuhan sebesar -0,63%. Penurunan ini dikarenakan terjadi penurunan pada nilai transfer pemerintah pusat. Kemudian pada tahun 2024 terjadi peningkatan pada tranfer daerah dengan pertumbuhan sebesar 3,65% dan realisasi sebesar Rp. 786.359.898.321,00. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan pada jumlah transfer pemerintah pusat. Selanjutnya komponen ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan nilai realisasi hanya terdapat pada tahun 2020 dan 2021 dengan pertumbuhan yang meningkat sebesar 1,67%. Berikut ini merupakan pertumbuhan pada masing-masing komponen pendapatan daerah Kota Probolinggo selama 5 tahun terakhir (2020 - 2024) :

Tabel II.49 Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 - 2024

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**	**7.79%**	**-3.90%**	**1.40%**	**2,51%**	**1,95%**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**15.88%**	**-9.98%**	**9.49%**	**-1,64%**	**3,44%**
1.1.1.	Pajak daerah	23.48%	17.27%	1.79%	11,87%	13,60%
1.1.2.	Retribusi daerah	5.58%	-2.45%	-6.10%	68,66%	16,42%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	-11.00%	-10.81%	5.05%	8,26%	-2,12%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	14.99%	-19.23%	14.73%	-13,37%	-0,72%
1.2	**Pendapatan Transfer**	**5.91%**	**0.73%**	**-0.63%**	**3,65%**	**2,41%**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**2.23%**	**1.17%**	**-4.28%**	**6,01%**	**1,28%**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	3.21%	5.15%	-2.75%	3,58%	2,30%
1.2.1.1.1	*Dana Bagi Hasil*	39.25%	15.11%	-26.11%	-3,97%	6,07%
1.2.1.1.2	*Dana Alokasi Umum (DAU)*	-1.75%	-0.42%	5.20%	6,60%	2,41%

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.3	*Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik*	-5.36%	21.63%	-7.14%	-3,76%	1,34%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-12.53%	-70.00%	-100.00%	0,00%	-42,50%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0.00%	0.00%	0.00%	0,00%	0,00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0.00%	0.00%	0.00%	0,00%	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	0.00%	0.00%	0.00%	0,00%	0,00%
1.2.2	**Transfer Antar-Daerah**	**37.31%**	**-2.06%**	**23.30%**	**-8,38%**	**12,54%**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	38.07%	-1.89%	23.44%	-8,65%	12,74%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-22.99%	-26.34%	-2.06%	56,20%	7,79%
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**1.67%**	**-100.00%**	0.00%	**0,00%**	**-24,58%**
1.3.1	Hibah	1.67%	-100.00%	0.00%	0,00%	0,42%
1.3.2	Dana Darurat	0.00%	0.00%	0.00%	0,00%	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0.00%	0.00%	0.00%	0,00%	0,00%

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, 2025 (diolah)

Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disebut PAD) merupakan salah satu sektor utama yang berkontribusi dalam menyumbang pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan mengacu pada regulasi yang berlaku. PAD bertujuan memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah, sejalan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah sebagai implementasi prinsip desentralisasi. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Jika dilihat dari nilai kompositnya, maka pada pendapatan asli daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif kecuali pada hasil pengelolaan keuangan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan masing-masing nilai rata-rata pertumbuhan sebesar -2,12% dan -0,72%. Sedangkan komponen dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah retribusi daerah sebesar 16,42%. Berikutnya pada komponen pendapatan transfer memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,41% dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 5,91%. Pendapatan transfer terdiri dari 2 komponen utama yaitu transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Berikutnya transfer pemerintah pusat terdiri dari beberapa komponen diantaranya dana perimbangan, dana bagi

hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana insentif daerah. Komponen dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah dana bagi hasil sebesar 3,59% sedangankan komponen dengan rata-rata pertumbuhan terendah adalah dana insentif daerah sebesar -34,00% dan dana alokasi khusus sebesar -0,12%. Sedangkan pada transfer antar daerah terdiri dari 2 komponen yaitu pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dimana masing-masing memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 12,74% dan 7,79%.

Selanjutnya komponen Pendapatan Daerah lainnya adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 bersumber dari Hibah, dimana tidak terdapat realisasi pada Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Rata-rata pertumbuhan Dana Hibah sebesar 0,42% yang menunjukkan capaian fluktuatif setiap tahunnya dan hanya memiliki realisasi pada tahun 2020 dan 2021. Secara keseluruhan realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Probolinggo tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut :

Tabel II.50 Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	**PENDAPATAN**	**922.027.675.562,60**	**993.879.239.176,41**	**955.089.232.636,99**	**968.433.112.167,29**	**992.701.449.220,29**	**1,95%**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**183.680.648.895,19**	**212.846.009.771,41**	**191.597.662.537,99**	**209.779.956.402,29**	**206.341.550.899,29**	**3,44%**
1.1.1	Pajak daerah	38.425.937.211,00	47.447.863.702,00	55.643.023.132,00	56.636.986.040,36	63.360.763.657,57	13,60%
1.1.2	Retribusi daerah	12.619.078.405,55	13.322.674.337,00	12.995.734.364,00	12.202.736.808,00	20.582.077.811,00	16,42%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.704.846.568,40	1.517.244.683,95	1.353.258.667,97	1.421.600.239,43	1.539.068.149,53	-2,12%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	130.930.786.710,24	150.558.227.048,46	121.605.646.374,02	139.518.633.314,50	120.859.641.281,19	-0,72%
1.2	**Pendapatan Transfer**	**715.678.307.047,00**	**757.985.129.405,00**	**763.491.570.099,00**	**758.653.155.765,00**	**786.359.898.321,00**	**2,41%**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**640.623.965.282,00**	**654.928.652.834,00**	**662.563.090.692,00**	**634.206.402.044,00**	**672.344.864.121,00**	**1,28%**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	600.921.302.282,00	620.201.625.834,00	652.144.647.692,00	634.206.402.044,00	656.882.353.121,00	2,30%
1.2.1.1.1	*Dana Bagi Hasil*	79.932.844.075,00	111.305.223.032,00	128.124.721.583,00	94.667.542.320,00	90.907.928.000,00	6,07%
1.2.1.1.2	*Dana Alokasi Umum (DAU)*	438.274.640.000,00	430.613.654.000,00	428.806.328.475,00	451.121.191.892,00	480.885.190.402,00	2,41%
1.2.1.1.3	*Dana Alokasi Khusus (DAK)*	82.713.818.207,00	78.282.748.802,00	95.213.597.634,00	88.417.667.832,00	85.089.234.719,00	1,34%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	39.702.663.000,00	34.727.027.000,00	10.418.443.000,00	-	15.462.511.000,00	-42,50%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.2	**Transfer Antar-Daerah**	**75.054.341.765,00**	**103.056.476.571,00**	**100.928.479.407,00**	**124.446.753.721,00**	**114.015.034.200,00**	**12,54%**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	74.119.122.765,00	102.336.257.571,00	100.397.956.407,00	123.927.180.100,00	113.203.455.700,00	12,74%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	935.219.000,00	720.219.000,00	530.523.000,00	519.573.621,00	811.578.500,00	7,79%
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**22.668.719.620,41**	**23.048.100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-24,58%**
1.3.1	Hibah	22.668.719.620,41	23.048.100.000,00	-	-	-	0,42%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00%

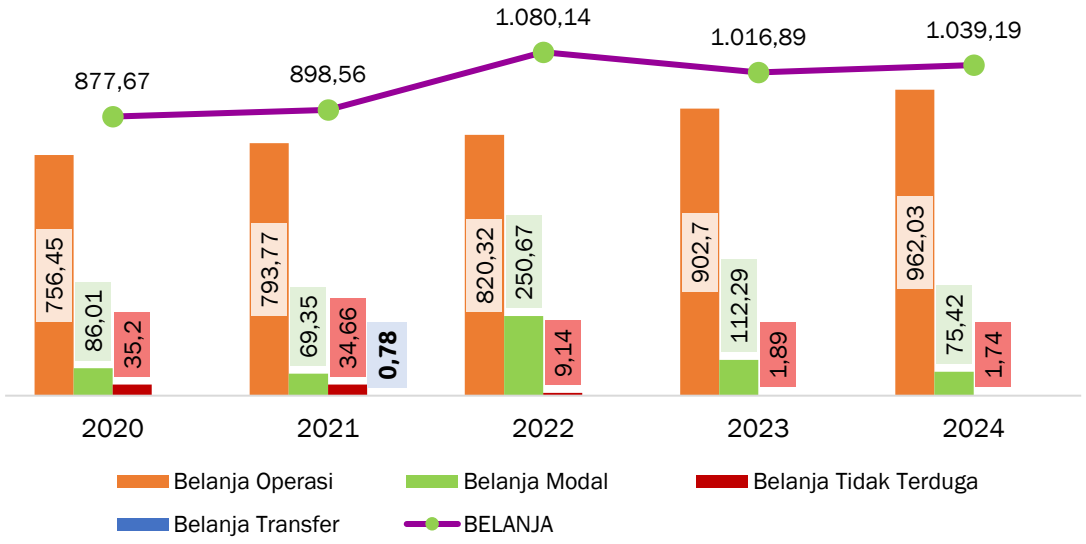
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	0,00%
2	**BELANJA**	**877.667.480.575,35**	**898.555.784.164,52**	**1.080.134.068.338,53**	**1.016.894.990.872,63**	**1.039.189.025.613,39**	**4,73%**
2.1	**Belanja Operasi**	**756.454.666.535,41**	**793.773.560.130,37**	**820.317.719.643,71**	**902.709.536.086,63**	**962.025.905.595,45**	**6,22%**
2.1.1	Belanja Pegawai	388.271.776.738,00	439.944.807.823,50	427.975.533.107,90	437.510.461.343,00	482.680.530.154,99	5,79%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	347.940.951.313,04	330.875.372.143,38	357.085.628.954,22	404.026.544.251,90	385.430.948.232,01	2,89%
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	17.372.255.939,37	21.072.319.993,00	33.864.935.641,59	59.789.919.852,73	93.723.268.208,45	52,46%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.049.785.000,00	1.881.060.170,49	1.391.621.940,00	1.382.610.639,00	191.159.000,00	18,50%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	819.897.545,00	-	-	-	-	0.00%
2.2	**Belanja Modal**	**86.011.421.274,94**	**69.347.557.336,15**	**250.674.126.301,82**	**112.290.783.286,00**	**75.418.956.796,94**	**38,52%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	25,00%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.141.749.214,00	39.152.410.118,40	48.462.449.151,85	48.060.266.778,00	38.597.721.026,00	1,48%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.328.125.666,51	14.046.808.751,54	181.709.002.200,44	40.561.483.076,00	16.393.751.764,94	252,42%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.041.137.912,43	16.067.447.761,21	18.792.487.617,53	21.310.177.902,00	18.229.916.560,00	1,24%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.419.408.482,00	80.890.705,00	1.348.451.132,00	2.252.807.309,00	2.050.139.196,00	381,86%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	81.000.000,00	-	361.736.200,00	106.048.221,00	147.428.250,00	-42,67%
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**35.201.392.765,00**	**34.655.169.948,00**	**9.142.222.393,00**	**1.894.671.500,00**	**1.744.163.221,00**	**-40,60%**
2.4	**Belanja Transfer**	**-**	**779.496.750,00**	**-**	**-**	**-**	-25,00%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	779.496.750,00	-	-	-	-25,00%

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**169.603.170.797,96**	**204.052.324.535,00**	**309.375.779.546,89**	**183.913.590.820,35**	**135.451.712.115,01**	**1,26%**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	169.603.170.797,96	204.052.324.535,00	269.375.779.546,89	183.913.590.820,35	135.451.712.115,01	-1,44%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	40.000.000.000,00	-	-	-25,00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	0,00%
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**10.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	-	-	25,00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	0,00%

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, 2025

Urusan Pemerintahan ini telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mencakup urusan wajib pelayanan dasar, urusan non-wajib pelayanan dasar, dan urusan penunjang pemerintahan. Fokus utama pendanaan dalam belanja daerah adalah untuk mendukung urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang harus memenuhi standar pelayanan minimal dan mengikuti standar teknis serta harga satuan regional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pendanaan belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan didasarkan pada analisis standar belanja dan harga satuan regional.

Realisasi belanja daerah Kota Probolinggo selama kurun waktu 5 tahun (2020 - 2024) mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,73%. Tren penurunan jumlah belanja di Kota Probolinggo terjadi pada tahun 2023 yang mencapai -5,85%. Belanja daerah Kota Probolinggo terdiri atas 4 jenis belanja, yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Adapun realisasi Belanja Daerah Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 adalah sebagai berikut :



Gambar II-151 Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024
Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, 2025

Tahun 2021 belanja daerah mengalami sedikit peningkatan sebesar 2,38% sehingga menjadi Rp. 898.555.784.164,52 yang sebelumnya sebesar Rp. 877.667.480.575,35 pada tahun 2020. Kemudian, kembali mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi Rp. 1.080.134.068.338,53. Belanja tahun 2023 mengalami penurunan mencapai -5,85% menjadi Rp. 1.016.894.990.872,63 namun pada tahun 2024 kembali meningkat 2,19% atau menjadi sebesar Rp. 1.039.189.025.613,39.

Secara umum fluktuasi total belanja Kota Probolinggo lebih diakibatkan fluktuasinya belanja modal serta belanja tidak terduga yang tidak menentu pada setiap tahunnya. Namun justru peningkatan belanja daerah pada setiap tahunnya disumbang oleh adanya peningkatan pada beberapa jenis belanja, dimana Belanja Operasi dalam setiap tahunnya memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,22%, sedangkan jenis belanja lainnya seperti Belanja Modal memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 38,52%, Belanja Tidak Terduga memiliki nilai rata-rata pertumbuhan sebesar -40,60% dan belanja transfer dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -20,00%.

Tabel II.51 Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 - 2024

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	
2	BELANJA	2,38%	20,21%	-5,85%	2,19%	4,73%
2.1	Belanja Operasi	4,93%	3,34%	10,04%	6,57%	6,22%
2.2	Belanja Modal	-19,37%	261,48%	-55,20%	-32,84%	38,52%
2.3	Belanja Tidak Terduga	-1,55%	-73,62%	-79,28%	-7,94%	-40,60%
2.4	Belanja Transfer	0,00%	-100,00%	0,00%	0,00%	-25,00%

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, 2025 (diolah)

Belanja operasi Kota Probolinggo memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,22% dengan tren yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah realisasi belanja operasi tercatat sebesar Rp. 756.454.666.535,41 kemudian pada tahun 2021 meningkat 4,93% atau menjadi Rp. 793.773.560.130,37. Tahun 2022 belanja operasi meningkat 3,34% atau menjadi sebesar Rp. 820.317.719.643,71 dan kembali meningkat sebanyak 10,04% atau menjadi Rp. 902.709.536.086,63 pada tahun 2023. Terakhir pada tahun 2024 belanja operasi Kota Probolinggo meningkat 6,57% atau menjadi Rp. 962.025.905.595,45. Tren peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan pada masing-masing komponen belanja operasi daerah Kota Probolinggo. Terdapat 5 jenis belanja yang terdapat pada komponen Belanja Operasi Kota Probolinggo, yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Sosial. Tidak terdapat adanya realisasi Belanja Bunga pada Belanja Kota Probolinggo. Dari lima jenis Belanja Operasi di Kota Probolinggo, nilai rata-rata pertumbuhan paling tinggi terdapat pada Belanja Hibah sebesar 52,46%. Untuk Belanja Pegawai pada tahun 2020 hingga 2024 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 5,79%,

Belanja Barang dan Jasa memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,89%, dan Belanja Bantuan Sosial memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 18,50%.

Belanja Modal terdapat realisasi pada masing-masing jenis belanja di setiap tahunnya terkecuali pada Belanja Aset Lainnya yang tidak mengalami realisasi pada tahun 2021 dan 2022. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan jenis Belanja Modal dengan rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu 381,86%, kemudian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 252,42%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 1,48%, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar 1,24%. Berbanding terbalik dengan realisasi Belanja Operasi yang semakin meningkat, pada masing-masing jenis Belanja Modal menunjukkan tren fluktuasi yang cukup tinggi.

Realisasi pada belanja tak terduga menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar -40,60% dengan tren yang semakin menurun pada setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat belanja tak terduga sebesar Rp. 35.201.392.765,00 kemudian menurun -1,55% atau menjadi Rp. 34.655.169.948,00. Kemudian pada tahun 2022 menurun signifikan menjadi Rp. 9.142.222.393,00 dan pada tahun 2023 menjadi Rp. 1.894.671.500,00. Tahun 2024 pertumbuhan menurun sebesar -7,94% atau menjadi Rp. 1.744.163.221,00. Berikutnya komponen terakhir dalam belanja daerah adalah Belanja Transfer yang merupakan salah satu jenis Belanja Daerah yang bersumber dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Transfer di Kota Probolinggo hanya terealisasi di tahun 2021 sebesar Rp. 779.496.750,00 yang hanya terdiri dari komponen Belanja Bagi Hasil.

Berikutnya berkaitan dengan pembiayaan daerah yang melibatkan transaksi keuangan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang menghasilkan Pembiayaan Netto. Jika terdapat surplus, pembiayaan mencerminkan penggunaan surplus, sedangkan dalam kondisi defisit anggaran, pembiayaan menunjukkan transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit. Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari berbagai sumber, yaitu :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah timbul karena ada surplus/ kelebihan anggaran, lebih lanjut APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi :

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. Penyertaan modal daerah;
3. Pembentukan dana cadangan;
4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis yang dilakukan terhadap komponen pembiayaan daerah akan memberikan gambaran mengenai selisih antara pendapatan yang diterima daerah secara agregat atau jumlah keseluruhan suatu objek dalam perekonomian, dengan belanja yang merepresentasikan upaya perencanaan di daerah. Asumsi yang digunakan dalam analisis pembiayaan adalah bahwa pembiayaan tidak memiliki kepastian untuk naik atau turun dengan maksud pembiayaan dapat mencapai angka *equilibrium* yakni Rp. 0,-. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Probolinggo memiliki angka pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,26%. Capaian nilai tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar Rp. 309.375.779.546,89 dibandingkan tahun 2024 sebagai capaian nilai terendah sebesar Rp. 135.451.712.115,01.

2.2.1.2 NERACA DAERAH

Neraca Daerah menjadi sebuah laporan keuangan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini memiliki signifikansi besar bagi manajemen pemerintah daerah, bukan hanya untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam upaya mengelola sumber daya ekonomi daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah, sebagai gambaran posisi keuangan entitas (pemerintah daerah) pada suatu titik waktu tertentu, mencakup elemen-elemen utama seperti Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset dapat didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, di mana manfaat ekonomi atau sosial di masa mendatang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Aset juga dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban dalam Neraca Daerah adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Komponen terakhir yang tercakup dalam Neraca Daerah adalah ekuitas, yang dapat didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah, merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Untuk mengetahui posisi keuangan daerah Kota Probolinggo berikut disajikan data perkembangan dan rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir (2020-2024):

Tabel II.52 Neraca Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	241.266.813.661,55	317.475.759.499,81	242.023.341.762,38	186.399.997.532,56	144.373.636.268,30	-9,43%
1.1.1.	Kas	204.024.026.899,21	268.859.720.925,14	184.285.926.242,35	135.734.487.523,01	89.137.416.367,91	-15,09%
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.3.	Piutang Pendapatan	17.920.282.346,50	22.633.593.050,50	27.078.444.246,50	33.284.408.255,50	37.690.218.494,25	25,84%
1.1.4.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.5.	Piutang Lainnya	16.017.438.339,89	23.306.156.804,99	27.402.418.315,69	13.803.653.023,99	1.630.986.675,00	-20,61%
1.1.6.	Penyisihan Piutang	(11.575.098.245,32)	(13.181.553.450,16)	(15.262.594.203,19)	(18.064.694.750,19)	(20.486.504.261,68)	15,36%
1.1.7.	Beban Dibayar Dimuka	344.063.121,67	461.470.552,17	358.304.191,92	409.825.156,58	362.723.387,01	3,66%
1.1.8.	Persediaan	14.536.101.199,60	15.396.371.617,17	18.160.842.969,11	21.232.318.323,67	36.038.795.605,81	27,63%
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	21.315.023.971,94	21.212.373.113,75	21.847.798.777,31	29.450.393.129,81	30.112.356.667,53	9,89%
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	3.898.484.311,10	4.073.806.794,56	4.060.347.539,60	4.105.131.273,10	4.137.279.474,82	1,51%
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	17.416.539.660,84	17.138.566.319,19	17.787.451.237,71	25.345.261.856,71	25.975.077.192,71	11,79%
1.3.	ASET TETAP	1.496.947.662.535,76	1.472.080.106.542,03	1.647.445.935.482,12	1.766.234.387.396,95	2.031.723.624.944,62	8,22%
1.3.1.	Tanah	613.077.772.032,12	613.077.772.032,12	613.077.772.032,12	695.844.119.532,12	991.050.429.698,12	14,16%
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	572.393.439.603,62	615.276.631.941,44	685.810.983.963,04	735.416.062.879,12	775.389.009.458,13	7,90%
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	561.116.982.291,80	569.540.210.368,09	609.683.963.798,33	819.453.468.948,61	774.952.694.360,50	9,38%
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	806.757.047.090,70	821.923.965.243,16	840.208.147.272,44	893.400.863.125,85	975.469.795.362,80	5,08%
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	20.930.326.923,50	18.484.987.813,00	18.724.256.813,00	18.693.994.219,00	18.694.557.737,00	-2,64%
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	30.765.027.119,07	37.585.143.889,27	203.889.583.325,30	21.544.068.100,06	4.271.623.656,00	73,76%
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	(1.108.092.932.525,12)	(1.203.808.604.745,05)	(1.323.948.771.722,11)	(1.418.118.189.407,81)	(1.508.104.485.327,93)	8,09%

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.	**DANA CADANGAN**	**10.000.000.000,00**	**40.246.132.640,75**	**-**	**-**	**-**	**75,62%**
1.4.1.	Dana Cadangan	10.000.000.000,00	40.246.132.640,75	-	-	-	75,62%
1.5.	**ASET LAINNYA**	**26.306.339.408,82**	**14.786.316.152,45**	**26.652.281.061,09**	**35.032.571.370,37**	**22.717.307.239,70**	**6,26%**
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	0,00%
1.5.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	0,00%
1.5.3.	Aset Tak Berwujud	5.925.423.100,00	5.447.803.100,00	5.848.389.300,00	5.999.437.521,00	4.673.554.221,00	2,03%
1.5.4.	Amortisasi	(4.663.304.000,00)	(4.844.626.100,00)	(5.318.537.440,00)	(5.626.847.224,20)	(4.176.379.743,40)	5,92%
1.5.5.	Aset Lain-lain	65.307.629.378,39	56.761.877.287,15	71.111.856.733,15	86.244.936.533,36	91.668.981.405,14	7,58%
1.5.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(40.263.409.069,57)	(42.578.738.134,70)	(44.989.427.532,06)	(51.584.955.459,79)	(69.448.848.643,04)	9,69%
1.6.	**Properti Investasi**						
1.6.1.	Properti Investasi Tanah	-	-	-	-	17.530.529.834,00	0,00%
1.6.2.	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	11.505.458.200,00	0,00%
1.6.3.	Properti Investasi Konstruksi Dalam pengerjaan	-	-	-	-	-	0,00%
1.6.4.	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-	(1.562.981.315,60)	0,00%
	Jumlah Properti Investasi	-	-	-	-	**27.473.006.718,40**	0,00%
	JUMLAH ASET	**1.795.835.839.578,07**	**1.865.800.687.948,79**	**1.937.969.357.082,90**	**2.017.117.349.429,69**	**2.256.399.931.838,55**	**5,97%**
2	**KEWAJIBAN**						
2.1.	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**17.127.685.544,34**	**12.575.349.984,14**	**19.134.960.255,36**	**39.253.392.925,49**	**21.950.029.834,57**	**21,66%**

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.	Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.	Pendapatan Diterima Dimuka	29.788.700,00	4.535.000,00	336.646.910,92	384.624.182,58	818.513.485,57	1841,40%
2.1.4.	Utang Beban	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.5.	Utang Belanja	-	8.287.892.893,51	11.870.864.345,00	18.686.621.119,47	20.932.624.979,00	17,36%
2.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	17.097.896.844,34	4.282.922.090,63	6.927.448.999,44	20.182.147.623,44	198.891.370,00	23,08%
2.2.	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2.	Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH KEWAJIBAN	**17.127.685.544,34**	**12.575.349.984,14**	**19.134.960.255,36**	**39.253.392.925,49**	**21.950.029.834,57**	**21,66%**
3	**EKUITAS**						
3.1.	**EKUITAS**	**1.778.708.154.033,73**	**1.853.225.337.964,65**	**1.918.834.396.827,54**	**1.977.863.956.504,20**	**2.234.449.902.003,98**	**5,99%**
3.1.1.	Ekuitas	1.778.708.154.033,73	1.853.225.337.964,65	1.918.834.396.827,54	1.977.863.956.504,20	2.234.449.902.003,98	5,99%
	JUMLAH EKUITAS	**1.778.708.154.033,73**	**1.853.225.337.964,65**	**1.918.834.396.827,54**	**1.977.863.956.504,20**	**2.234.449.902.003,98**	**5,99%**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.795.835.839.578,07**	**1.865.800.687.948,79**	**1.937.969.357.082,90**	**2.017.117.349.429,69**	**2.256.399.931.838,55**	**5,97%**

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, 2025

Berdasarkan pada tabel di atas, maka kondisi keuangan Pemerintah Kota Probolinggo yang telah disajikan dalam Neraca Daerah selama tahun 2020 - 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. ASET

Aset lancar Kota Probolinggo selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) memiliki tren yang fluktuatif dengan pertumbuhan -9,43%. Aset lancar Kota Probolinggo memiliki 8 komponen namun tidak ada realisasi pada komponen investasi jangka pendek dan bagian lancar tuntutan ganti rugi. Komponen dengan pertumbuhan rata-rata terendah adalah piutang lainya sebesar -20,16% sedangkan pada pertumbuhan rata-rata tertinggi pada komponen persediaan sebesar 27,63%. Aset lancar pada tahun 2024 sebesar Rp. 144.373.636.268,30 dengan penurunan pertumbuhan sebesar -22,54% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 186.399.997.532,56. Secara keseluruhan komponen dalam aset lancar Kota Probolinggo diantaranya adalah kas, investasi jangka pendek, piutang pendapatan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang lainya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Investasi jangka panjang daerah terdiri dari 2 komponen yaitu investasi jangka panjang non permanen dan investasi jangka panjang permanen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terletak pada komponen investasi jangka panjang permanen yaitu sebesar 11,79% sedangkan rata-rata pertumbuhan investasi jangka panjang non permanen sebesar 1,51%. Pada tahun 2024 investasi jangka panjang non permanen memiliki realiasi sebesar Rp. 4.137.279.474,82 sedangkan investasi jangka panjang permanen sebesar Rp. 25.975.077.192,71.

Aset tetap Kota Probolinggo memiliki tren semakin meningkat pada setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 15,03% atau sebesar Rp. 2.031.723.624.944,62 dari sebelumnya sebesar Rp. 1.766.234.387.396,95 pada tahun 2023. Sehingga rata-rata pertumbuhan aset tetap Kota Probolinggo sebesar 8,22%. Aset tetap Kota Probolinggo memiliki komponen diantaranya adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan. Sedangkan pada dana cadangan Kota Probolinggo hanya memiliki realisasi pada tahun 2020 dan 2021 dengan masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dan Rp. 40.246.132.640,75. Sehingga memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 75,62%.

Aset lainnya di Kota Probolinggo memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,26% dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 80,25% dari Rp. 14.786.316.152,45 tahun 2021 menjadi Rp. 26.652.281.061,09 pada tahun 2022. Aset lainnya memiliki 4 komponen yaitu aset tak berwujud dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,03%. Amortiasai dengan rata-rata pertumbuhan 5,92%, aset lain-lain 7,58% dan kas yang dibatasi penggunaanya sebesar 9,69%. Sedangkan pada properti investasi Kota Probolinggo hanya memiliki realisasi pada tahun 2024 yang terdiri dari Properti Investasi Tanah, Properti Investasi Gedung dan Bangunan, dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi.

B. KEWAJIBAN

Berdasarkan tabel neraca daerah juga dapat dilihat adanya Kewajiban. Kewajiban daerah terdiri dari 2 komponen yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Melihat pada tabel di atas terlihat bahwa pada Kota Probolinggo, Kewajiban Jangka Panjang tertera Rp. 0,00 pada setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sehingga Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo hanya bersumber dari Kewajiban Jangka Pendek yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 21,66%.

Selama kurun waktu 5 tahun (2020 - 2024) nilai kewajiban Kota Probolinggo menunjukan tren fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 nilai kewajiban menunjukan angka sebesar Rp. 17.127.685.544,34 dan menurun menjadi Rp. 12.575.349.984,14 di tahun 2021. Nilai kewajiban Kota Probolinggo kembali naik hingga tahun 2023 dimana merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar Rp. 39.253.392.925,49 yang didorong adanya peningkatan pada komponen Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Kemudian pada tahun 2024 kembali menurun menjadi Rp. 21.950.029.834,57.

C. EKUITAS

Selain aset dan kewajiban, salah satu komponen dari neraca selanjutnya adalah ekuitas. Nilai ekuitas Pemerintah Kota Probolinggo memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 5,99% selama kurun waktu 5 tahun (2020-2024) dengan tren pertumbuhan yang naik. Adapun nilai ekuitas tertinggi terdapat pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.234.449.902.003,98 sedangkan nilai ekuitas terkecil terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.778.708.154.033,73. Bila dilihat berdasarkan keseimbangan neraca daerah, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas dana tercatat sebesar 5,97% atau memiliki nilai yang sama dengan pertumbuhan asetnya.

Melihat pada data nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo yang tersaji dalam neraca di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dan analisis mengenai rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas keuangan Pemerintah Kota Probolinggo yang secara keseluruhan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel II.53 Rasio Neraca Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

No	Rasio Keuangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	**RASIO LIKUIDITAS**					
1	Rasio Lancar	14,0864	25,2459	12,6482	4,7486	6,5777
2	Rasio Quick	13,2377	24,0215	11,6991	4,2077	4,9358
B	**RASIO SOLVABILITAS**					
1	Rasio Total Hutang thd Total Aset	0,0095	0,0067	0,0099	0,0195	0,0097
2	Rasio Hutang terhadap Modal	0,0096	0,0068	0,0100	0,0198	0,0098
C	**RASIO AKTIVITAS**					
1	Rata-rata Umur Piutang	15,6733	10,1215	13,7534	12,8601	8,7995
2	Rata-rata Umur Persediaan	23,2881	36,0618	26,5389	28,3825	41,4796

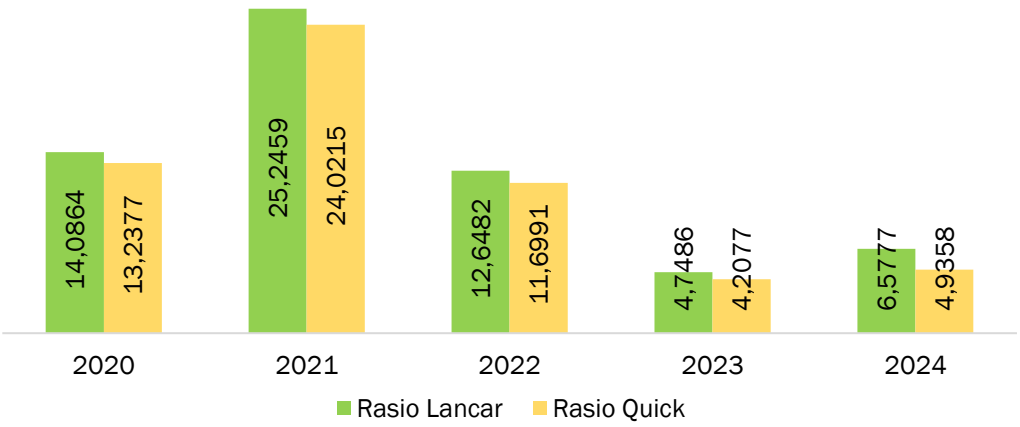
Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo, 2025 (diolah)

Secara rinci hasil penghitungan rasio neraca daerah yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas Kota Probolinggo dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan sebagai alat untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam

konteks neraca keuangan daerah, terdapat dua jenis rasio likuiditas yang relevan, yaitu rasio lancar dan rasio quick. Rasio lancar menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk melunasi hutang atau kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Di sisi lain, rasio *quick* menunjukkan sejauh mana Pemerintah Daerah mampu membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang lebih likuid, yaitu aset lancar dikurangi nilai persediaan.



Gambar II-152 Rasio Likuiditas Kota Probolinggo
Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Sebagaimana grafik di atas, Rasio lancar Pemerintah Kota Probolinggo dalam setiap tahunnya mengalami perkembangan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020 sebesar 14,0864 dan meningkat menjadi 25,2459. Meskipun meningkat di tahun 2021 menjadi 25,2459, nilai rasio lancar kembali menurun selama tahun 2022-2023 menjadi 4,7486. Penurunan terjadi dikarenakan adanya peningkatan nilai kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh Kota Probolinggo pada tahun tersebut, sedangkan perkembangan aset lancarnya cenderung mengalami penurunan, sehingga kemampuan untuk membayar hutang/ kewajiban jangka pendek juga semakin menurun. Pada tahun 2021 kemampuan Kota Probolinggo untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan mengunakan aset lancar tercatat sebesar 25,44 kali, sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 4,64 kali. Semakin rendah nilai rasio lancar menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki semakin menurun. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan Pemerintah

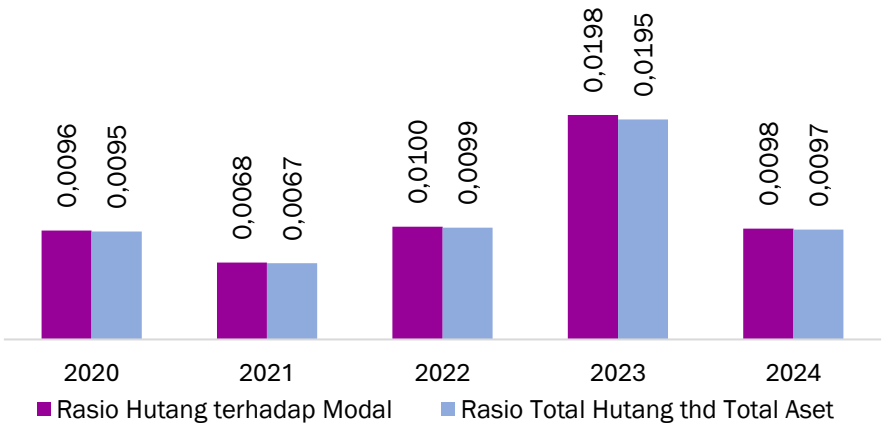
Kota Probolinggo dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya mengalami tren fluktuatif yang cenderung menurun dan kemudian pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 6,5777.

Nilai rasio quick pada tahun 2020 sebesar 13,2377 kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 24,0215, nilai rasio *quick* Kota Probolinggo kembali menurun dalam tahun 2022 & 2023 menjadi 4,2077. Penurunan di tahun 2020 maupun 2022 & 2023 terjadi dikarenakan adanya peningkatan nilai kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh Kota Probolinggo pada tahun tersebut, sedangkan perkembangan aset lancarnya cenderung mengalami penurunan. Nilai rasio quick pada dasarnya sedikit berada dibawah rasio lancarnya, karena aset lancar yang diperhitungkan sebagai kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya tidak memperhitungkan komponen persediaan. Perbedaan perhitungan rasio lancar dan rasio quick terletak pada adanya persediaan sebagai unsur penghitung besaran nilai rasio. Jika pada rasio lancar melihat pada kemampuan membayar hutang menggunakan aset lancar, maka pada rasio quick melihat kemampuan membayar dengan aset lancar selain persediaan. Sehingga pergerakan besar kecilnya rasio quick selain dipengaruhi oleh perubahan aset lancar dan kewajiban juga dipengarui oleh besarnya persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Pada tahun 2020 kemampuan Pemerintah Kota Probolinggo untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan mengunakan aset lancar (setelah dikurangi dengan nilai persediaan) tercatat sebesar 13,23 kali, kemudian di tahun 2021 meningkat sebanyak 24,02 kali dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi sebanyak 11,69 kali dan menjadi 4,20 kali di tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 4,9358. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah Kota Probolinggo untuk membayar/ melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang telah dikurangi dengan persediaan belum konsisten setiap tahunnya.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dalam konteks neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas dihitung dengan dua matriks utama. Pertama, Rasio total hutang terhadap total aset menggambarkan sejauh mana hutang berpengaruh terhadap nilai total aset,

memberikan gambaran tentang tingkat ketergantungan pada hutang. Kedua, Rasio hutang terhadap modal mengindikasikan sejauh mana penggunaan hutang dibandingkan dengan modal yang dimiliki, memberikan perspektif terhadap tingkat kebutuhan hutang dalam kaitannya dengan modal yang tersedia.



Gambar II-153 Rasio Solvabilitas Kota Probolinggo
Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

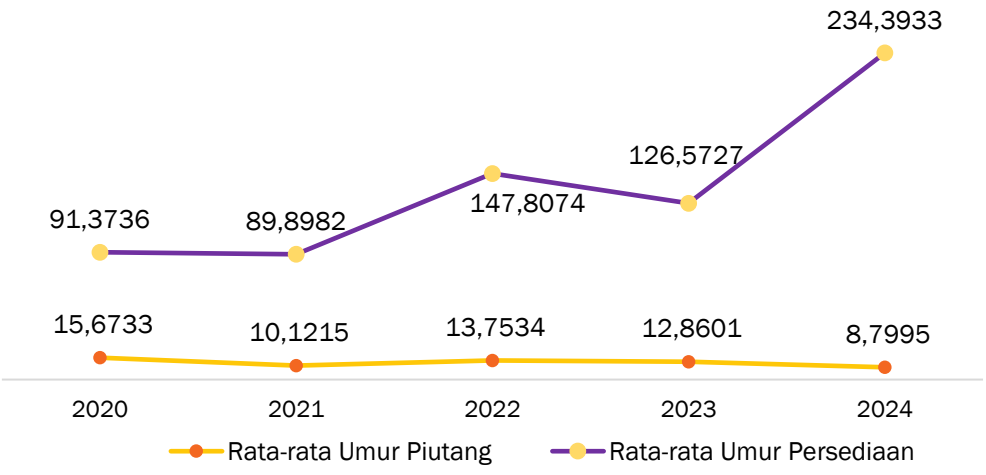
Rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Probolinggo dalam rentang tahun 2020 - 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Nilai di tahun 2020 sebesar 0,0095 dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 0,0067. Terjadinya penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan nilai kewajiban/ hutang Pemerintah Kota Probolinggo yang lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan total asetnya. Seiring adanya kenaikan nilai kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2023, sedangkan nilai total aset yang dimiliki semakin menurun, maka nilai Rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan hingga 97.09% dan merupakan capaian tertinggi selama rentang lima tahun terakhir karena pada tahun 2024 kembali menurun menjadi 0,0097. Semakin tinggi angka Rasio Total Hutang terhadap Total Aset maka hal ini dapat diartikan semakin tinggi pula pengaruh hutang terhadap pembiayaanya. Nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat menunjukan bahwa solvabilitas keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dalam keadaan yang Sehat. Persentase dana berasal dari kreditor/ donatur/ pihak ketiga dalam membiayai pembangunan

masih kecil (di bawah 2%) sekalipun dalam rentang tahun 2020 - 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif.

Tren serupa juga terjadi pada capaian Rasio Hutang terhadap Modal Pemerintah Kota Probolinggo, yang dalam lima tahun terakhir juga mengalami tren yang fluktuatif. Nilai di tahun 2020 sebesar 0,0096 dan meningkat signifikan menjadi 0,0198 di tahun 2023 meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 0,0098. Tren kenaikan yang pesat di tahun 2023 terjadi karena adanya kenaikan nilai total hutang di tahun 2023 meskipun kondisi ini masih berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki (Tidak Bergantung pada Hutang). Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah adanya tren kecenderungan meningkat khususnya pada tahun 2023.

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai tingkat aktivitas tertentu dalam kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Dua jenis rasio aktivitas yang sering digunakan adalah Rata-Rata Umur Piutang dan Rata-Rata Umur Persediaan. Rata-rata umur piutang mengindikasikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan piutang, menunjukkan seberapa cepat piutang dapat dikonversi menjadi uang tunai. Sementara itu, rata-rata umur persediaan memberikan informasi tentang berapa lama dana diinvestasikan dalam bentuk persediaan, menunjukkan seberapa efisien persediaan tersebut digunakan dalam penyediaan pelayanan publik.



Gambar II-154 Rasio Aktiva Kota Probolinggo

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio aktivitas Kota Probolinggo menunjukan adanya fluktuasi pada nilai Rata-rata Umur Piutang, yakni sebanyak 15,67 hari pada tahun 2020 namun mengalami penurunan hingga 10,12 hari di tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023 terjadi kenaikan menjadi 13,75 hari dan 14,25 hari. Nilai Rata-rata Umur Piutang secara keseluruhan menunjukkan angka yang masih baik, dimana umur piutangnya tidak melebihi 2 bulan, bahkan pada tahun 2021 dan 2023 tren umur piutang menurun. Dimana artinya, dengan semakin pendek jangka waktu pelunasannya, maka semakin kecil pula resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Sedangkan pada tahun 2024 rata-rata umur piutang Kota Probolinggo menurun menjadi 8,7 hari.

Melihat hasil perhitungan Rata-rata Umur Persediaan Kota Probolinggo pada tahun 2020 - 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 nilai Rata-rata Umur Persediaan Kota Probolinggo sebesar 89.89 hari atau 2 bulan 29 hari di tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan hingga 64,42% menjadi 147,80 hari atau 4 bulan 27 hari dan kembali meningkat menjadi 160,496 atau 5 bulan 10 hari di tahun berjalan (2023) dan meningkat secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 234,3933 hari.

Hal ini menunjukkan bahwa penurunan di tahun 2021 dan 2023, efektivitas dan manajemen pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo mengalami sedikit meningkat. Meskipun demikian, tren yang terjadi di tahun 2022 dan 2024 perlu diperhatikan dikarenakan terjadi peningkatan nilai Rata-rata Umur Persediaan, hal ini perlu diwaspadai dikarenakan semakin tinggi rasio ini, semakin tidak efisien pengelolaan persedian, karena dana diinvestasikan dalam persediaan dapat lebih lambat dikembalikan atau diubah menjadi layanan atau produk yang dibutuhkan.

2.2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

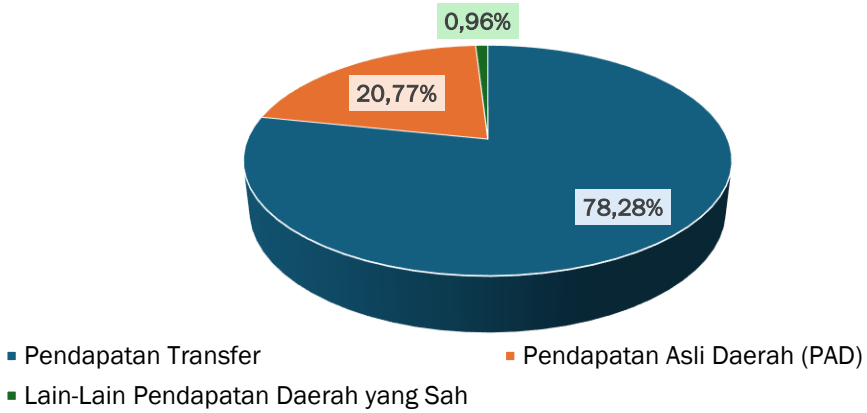
Terkait dengan pengelolaan keuangan masa lalu Pemerintah Kota Probolinggo telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik, dimana hal tersebut dapat dilihat dari capaian Opini BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dimana pada tahun 2024 Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh

penghargaan ke 8, Pemerintah Kota Probolinggo telah menerima Opini WTP dari BPK RI mulai Laporan Keuangan tahun 2017. Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo yang mempengaruhi penyusunan dan penyajian LKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kebijakan tersebut merupakan penataan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2.2.1 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

A. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah. Secara umum, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Kota Probolinggo paling banyak disumbang oleh Pendapatan Transfer dengan rata-rata proporsi sebesar 78,28%. Dengan kata lain bahwa tiga seperempat Pendapatan Daerah Kota Probolinggo berasal dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Sedangkan sisanya sebesar 20,77% berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebesar 0,96% Pendapatan Daerah Kota Probolinggo bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rata - rata Proporsi tersebut melalui perhitungan proporsi dari kurun waktu 2020 sampai dengan tahun 2024. Adapun perbandingan proporsi secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar II-155 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Secara lebih rinci proporsi masing-masing komponen pembentuk PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2020 - 2024 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel II.54 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata Proporsi
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**19,92%**	**21,42%**	**20,06%**	**21,66%**	**20,79%**	**20,77%**
1.1.1.	Pajak daerah	4,17%	4,77%	5,83%	5,85%	6,38%	5,40%
1.1.2.	Retribusi daerah	1,37%	1,34%	1,36%	1,26%	2,07%	1,48%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,18%	0,15%	0,14%	0,15%	0,16%	0,16%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	14,20%	15,15%	12,73%	14,41%	12,17%	13,73%
1.2	**Pendapatan Transfer**	**77,62%**	**76,27%**	**79,94%**	**78,34%**	**79,21%**	**78,28%**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**69,48%**	**65,90%**	**69,37%**	**65,49%**	**67,73%**	**67,59%**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	65,17%	62,40%	68,28%	65,49%	66,17%	65,50%
1.2.1.1.1	*Dana Bagi Hasil*	8,67%	11,20%	13,41%	9,78%	9,16%	10,44%
1.2.1.1.2	*Dana Alokasi Umum (DAU)*	47,53%	43,33%	44,90%	46,58%	48,44%	46,16%
1.2.1.1.3	*Dana Alokasi Khusus (DAK)*	8,97%	7,88%	9,97%	9,13%	8,57%	8,90%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	4,31%	3,49%	1,09%	0,00%	1,56%	2,09%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.2	**Transfer Antar-Daerah**	**8,14%**	**10,37%**	**10,57%**	**12,85%**	**11,49%**	**10,68%**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	8,04%	10,30%	10,51%	12,80%	11,40%	10,61%

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata Proporsi
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,10%	0,07%	0,06%	0,05%	0,08%	0,07%
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**2,46%**	**2,32%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,96%**
1.3.1	Hibah	2,46%	2,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,96%
1.3.2	Dana Darurat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang menjadi hak pemerintah daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Daerah Kota Probolinggo paling banyak disumbang oleh Pendapatan Transfer dengan rata-rata besar proporsi sebesar 78,28% selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024. Artinya, lebih dari tiga perempat Pendapatan Daerah Kota Probolinggo bersumber dari Pendapatan Transfer yang didominasi oleh Transfer Pemerintah Pusat. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi rata-rata sebesar 20,77%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya menyumbang rata-rata sebesar 0,96%. Jika dirinci lebih lanjut, PAD terutama berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah, dengan proporsi terbesar terdapat pada komponen Lain-lain PAD yang Sah dengan rata-rata mencapai 13,73% dan dilanjutkan dengan pajak daerah yang mencapai 5,40%.

Pada sisi pendapatan daerah, analisis kesehatan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio PAD terhadap PDRB dan Rasio Ruang Fiskal. Adapun Analisis Pendapatan Daerah Kota Probolinggo secara lebih jelas adalah sebagai berikut :

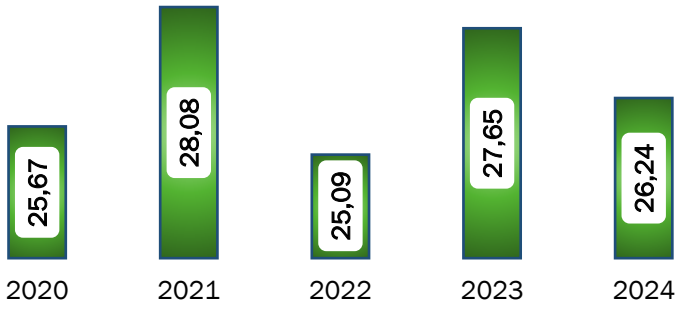
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan ukuran kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tanpa bergantung secara dominan pada bantuan dari pemerintah pusat atau pihak lain. Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin kuat kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri.

Tabel II.55 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

2020	2021	2022	2023	2024
25,67	28,08	25,09	27,65	26,24
KONSULTATIF	KONSULTATIF	KONSULTATIF	KONSULTATIF	KONSULTATIF

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (data diolah)



Gambar II-156 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024
Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Berdasarkan gambar diatas, maka untuk dapat mengkategorikan pola hubungan dan Tingkat kemampuan daerah dalam hal keuangan maka dapat diketahui melalui tabel dibawah ini :

Tabel II.56 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber: Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Abdul Halim, 2004:189)

Berdasarkan data Rasio Kemandirian Daerah Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024, tercatat bahwa nilai kemandirian Kota Probolinggo

berada pada rentang 25,09% hingga 28,08%. Secara rinci, tahun 2020 sebesar 25,67%, tahun 2021 sebesar 28,08%, tahun 2022 sebesar 25,09%, tahun 2023 sebesar 27,65%, dan tahun 2024 sebesar 26,24%. Berdasarkan rentang tersebut, tingkat kemampuan keuangan Kota Probolinggo tergolong "Rendah" dengan pola hubungan "Konsultatif" sebagaimana dikategorikan dalam tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah (kategori 25%–50%). Jika dibandingkan antar tahun, terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan Kota Probolinggo cenderung stabil meskipun fluktuatif, dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar 28,08% dan nilai terendah pada tahun 2022 sebesar 25,09%. Penurunan pada tahun 2022 menjadi catatan penting karena menunjukkan adanya penurunan kemandirian dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Meski demikian, rasio ini kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 meskipun sedikit menurun lagi di 2024. Meskipun rasio kemandirian Kota Probolinggo belum mampu menembus kategori "Sedang" (50%–75%), tren data dari tahun ke tahun menunjukkan adanya usaha perbaikan, terutama melalui peningkatan PAD. Kota Probolinggo masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer, terutama dari Pemerintah Pusat, namun upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan tersebut.

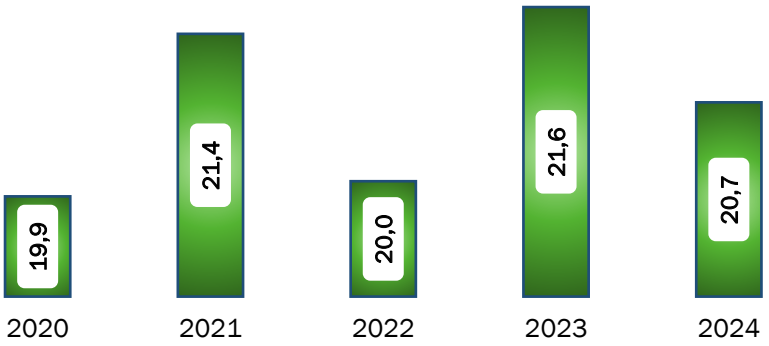
2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemandirian keuangan suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara PAD dan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola keuangan sendiri semakin baik.

Tabel II.57 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

2020	2021	2022	2023	2024
19,92	21,42	20,06	21,66	20,79
KURANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)



Gambar II-157 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024
Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Berdasarkan pada grafik dan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa derajat desentralisasi fiskal Kota Probolinggo tahun 2020 - 2024 dapat dijabarkan melalui tabel di bawah ini :

Tabel II.58 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Buku Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah (Abdul Halim, 2007)

Jika dilihat dari pola capaian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Probolinggo cenderung stabil meskipun berfluktuasi tipis pada kisaran angka 19% hingga 22%. Pada tahun 2020, rasio ini masuk kategori Kurang karena berada pada rentang 10,01% - 20%, namun sejak tahun 2021 hingga 2024, naik ke kategori "Sedang" dengan nilai sedikit di atas 20%. Peningkatan pada tahun 2021 (21,42%) dari tahun sebelumnya (19,92%) menunjukkan adanya upaya peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Namun capaian ini belum mengalami peningkatan yang signifikan ke kategori lebih tinggi (Cukup, Baik, atau Sangat Baik), sebab masih berada dalam batas bawah kategori "Sedang" (20,01% - 30%).

Meskipun demikian, stabilnya capaian rasio di atas 20% mencerminkan adanya kestabilan kontribusi PAD, meskipun Pemerintah Kota Probolinggo masih cukup bergantung pada pendapatan transfer dari pusat atau

provinsi. Jika dikaitkan dengan tabel kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, Kota Probolinggo masih perlu mendorong peningkatan PAD secara signifikan untuk mencapai tingkat Cukup (30,01% - 40%) atau lebih tinggi, yang menandakan semakin tingginya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri.

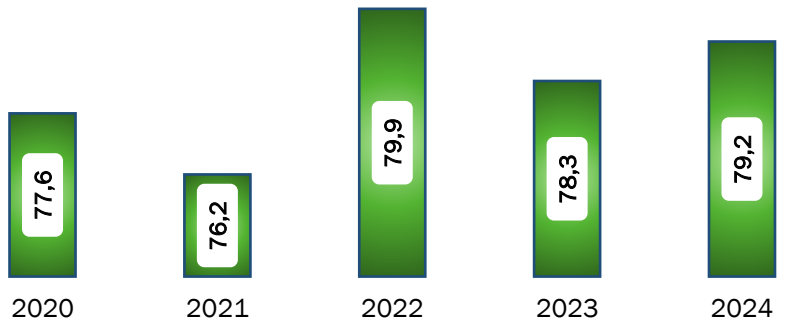
3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana ketergantungan keuangan suatu daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan dana transfer terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi persentase ketergantungan, semakin rendah kemandirian keuangan daerah, dan sebaliknya.

Tabel II.59 Rasio Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

2020	2021	2022	2023	2024
77,62	76,27	79,94	78,34	79,21
SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)



Gambar II-158 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024
Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Berdasarkan pada grafik dan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa derajat Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Probolinggo tahun 2020 - 2024 dapat dijabarkan melalui tabel di bawah ini :

Tabel II.60 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

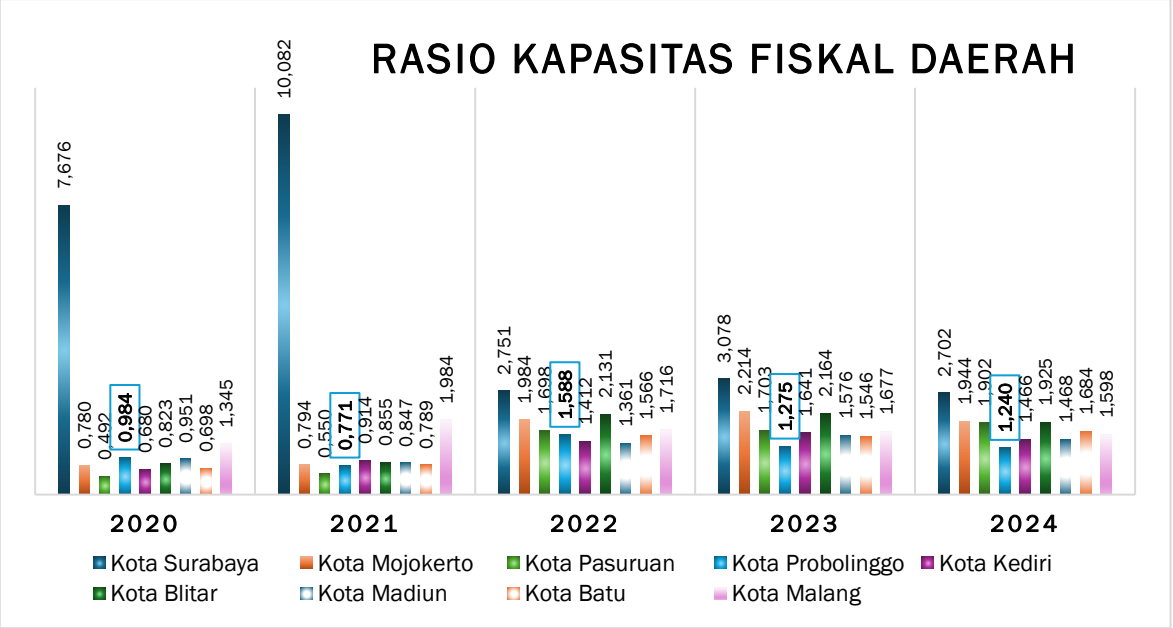
Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

Dari data tersebut, terlihat bahwa tingkat ketergantungan keuangan Kota Probolinggo berada pada kategori "Sangat Tinggi" setiap tahun dengan persentase di atas 75%. Meskipun terjadi sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun, angka ketergantungan selalu berada di kisaran 76% hingga 80%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan Kota Probolinggo masih berasal dari dana transfer pusat dan provinsi, baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Kondisi ketergantungan keuangan yang sangat tinggi ini selaras dengan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yang berada di tingkat "Sedang", sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kota Probolinggo masih perlu ditingkatkan agar tidak terlalu mengandalkan pemerintah pusat. Melalui tabel kriteria ketergantungan keuangan daerah, terlihat bahwa ketergantungan di atas 50% tergolong "Sangat Tinggi", sehingga Pemerintah Kota Probolinggo perlu merumuskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan potensi ekonomi lokal, serta diversifikasi sumber pendapatan agar rasio ketergantungan keuangan dapat ditekan.

4. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) merupakan ukuran kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya tanpa ketergantungan berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio ini sangat penting untuk menilai tingkat kemandirian fiskal daerah.



Gambar II-159 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kota Probolinggo dan Kota Lainnya di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 - 2024

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2025

Berdasarkan pada grafik maka dapat diketahui bahwa Kapasitas Fiskal Daerah Kota Probolinggo tahun 2020 - 2024 dapat dijabarkan melalui tabel di bawah ini :

Tabel II.61 Kriteria Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

Nilai RKFD	Kriteria
RKFD ≥ 1,615	Sangat Tinggi
1,378 ≤ RKFD < 1,615	Tinggi
1,141 ≤ RKFD < 1,378	Sedang
0,905 ≤ RKFD < 1,141	Rendah
RKFD < 0,905	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127 Tahun 2024

Perkembangan RKFD Kota Probolinggo menunjukkan adanya perbaikan kapasitas fiskal dari tahun ke tahun, terutama jika dibandingkan dengan tahun 2020. Namun, dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Jawa Timur seperti Kota Surabaya dan Kota Mojokerto yang memiliki RKFD jauh lebih tinggi, Kota Probolinggo masih berada di level menengah. Jika dikaitkan dengan kriteria kapasitas fiskal, sebagaimana tertuang dalam tabel di atas, RKFD Kota Probolinggo yang berada dalam rentang "Sedang" selama tiga tahun terakhir (2022 - 2024) menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kota Probolinggo mulai membaik, meskipun belum mencapai kategori "Tinggi" atau "Sangat Tinggi". Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi fiskal, meskipun masih terdapat tantangan untuk terus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.

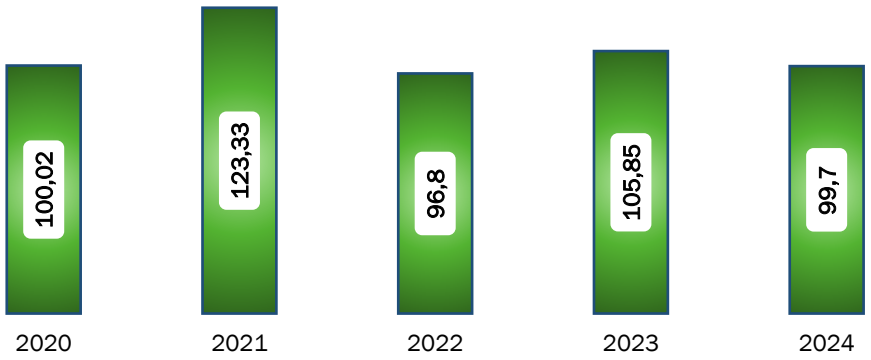
5. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin optimal pelaksanaan anggaran pendapatan daerah.

Tabel II.62 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

2020	2021	2022	2023	2024
100,02	123,33	96,84	105,85	99,79
SANGAT EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	CUKUP EFEKTIF	SANGAT EFEKTIF	CUKUP EFEKTIF

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)



Gambar II-160 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024
Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Berdasarkan pada grafik maka dapat diketahui bahwa Efektivitas Kota Probolinggo tahun 2020 - 2024 dapat dijabarkan melalui tabel di bawah ini :

Tabel II.63 Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

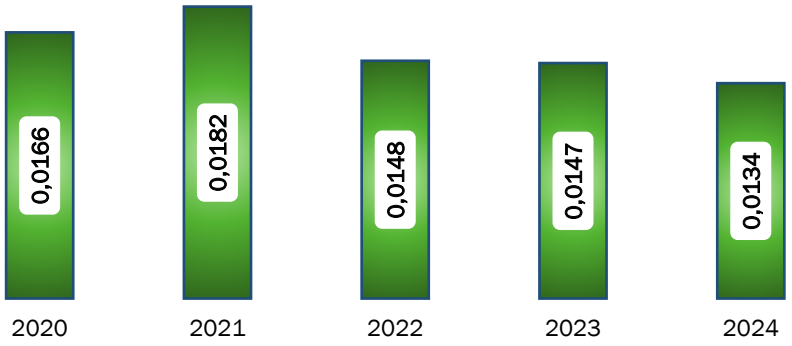
Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Mahmudi, 2010)

Berdasarkan pada tabel Kriteria Rasio Efektivitas, rasio efektivitas yang berada di atas 100% dikategorikan "Sangat Efektif", sedangkan rasio antara 90% hingga 99% dikategorikan "Cukup Efektif". Dari tren tersebut, kinerja efektivitas keuangan Kota Probolinggo cenderung fluktuatif, namun secara umum berada pada tingkat cukup baik hingga sangat baik. Artinya, kemampuan Pemerintah Kota Probolinggo dalam merealisasikan pendapatan daerah secara keseluruhan sudah berjalan optimal, meskipun perlu upaya konsisten agar efektivitas tetap stabil di atas 100%.

6. Rasio PAD terhadap PDRB

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengukur kontribusi PAD dalam perekonomian daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai pengeluaran daerahnya berdasarkan kapasitas ekonomi yang dimiliki.



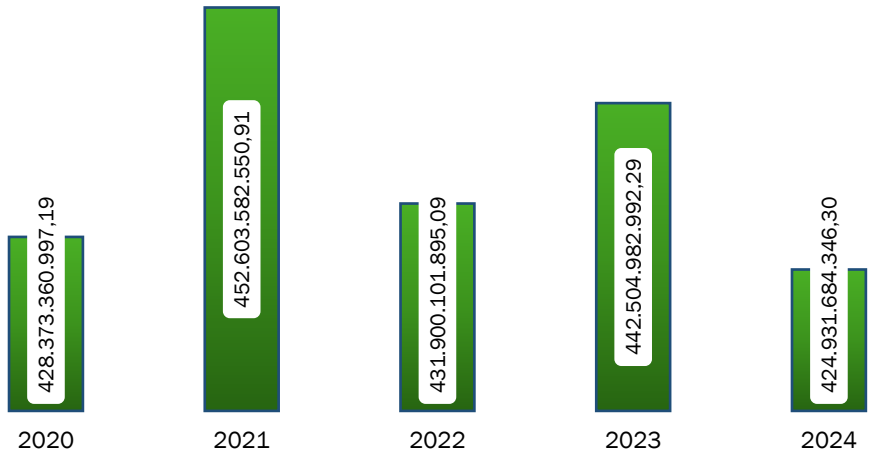
Gambar II-161 Rasio PAD terhadap PDRB Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024
Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Berdasarkan grafik perkembangan Rasio PAD terhadap PDRB Kota Probolinggo selama periode 2020-2024menunjukkan tren menurun, yang mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap total PDRB cenderung melemah. Pada tahun 2020, rasio PAD terhadap PDRB tercatat sebesar 0,0166, kemudian sempat mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,0182 pada tahun 2021. Namun, setelah itu angka tersebut terus menurun, yakni menjadi 0,0148 di tahun 2022, 0,0147 di tahun 2023, dan kembali turun ke angka terendah selama periode tersebut, yaitu 0,0134 pada tahun 2024.

Penurunan rasio PAD terhadap PDRB ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli dari aktivitas ekonomi lokal cenderung melemah. Dengan kata lain, pertumbuhan PDRB Kota Probolinggo tidak diikuti oleh peningkatan PAD secara proporsional. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurang optimalnya potensi PAD yang digali, lemahnya inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, atau pertumbuhan PDRB yang justru lebih banyak disumbang oleh sektor-sektor yang tidak menjadi sumber PAD utama.

7. Rasio Ruang Fiskal

Rasio Ruang Fiskal (RF) adalah indikator yang mengukur kemampuan keuangan daerah untuk mengalokasikan belanja yang fleksibel (diskresioner), yaitu belanja yang tidak terikat pada belanja wajib seperti belanja pegawai. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar ruang fiskal daerah untuk membiayai program-program pembangunan daerah secara mandiri.



Gambar II-162 Rasio Ruang Fiskal Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024
Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Rasio Ruang Fiskal Kota Probolinggo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi, dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 sebesar Rp. 452,6 miliar dan terendah pada tahun 2024 sebesar Rp. 424,9 miliar. Meskipun dari sisi nominal sempat mengalami peningkatan, namun secara persentase terhadap Belanja Daerah (RF/BD) dan Pendapatan Daerah (RF/PD) justru menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2020, ruang fiskal terhadap Belanja Daerah berada di angka 48,81% dan turun menjadi 40,89% pada 2024.

Begitu pula terhadap Pendapatan Daerah, dari 46,46% pada 2020 menjadi 42,81% di 2024.

B. BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pengurangan terhadap nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja *(performance budget)* yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah terbagi kedalam 4 pos belanja, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, serta Belanja Transfer. Proporsi realisasi belanja daerah Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel II.64 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Proporsi					Rata-Rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	**BELANJA**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
2.1	**Belanja Operasi**	**86,19%**	**88,34%**	**75,95%**	**88,77%**	**92,57%**	**86,36%**
2.1.1	Belanja Pegawai	44,24%	48,96%	39,62%	43,02%	46,45%	44,46%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39,64%	36,82%	33,06%	39,73%	37,09%	37,27%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	2,07%	2,35%	3,14%	5,88%	9,02%	4,49%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,23%	0,21%	0,13%	0,14%	0,02%	0,15%
2.2	**Belanja Modal**	**9,80%**	**7,72%**	**23,21%**	**11,04%**	**7,26%**	**11,81%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,35%	4,36%	4,49%	4,73%	3,71%	4,33%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,00%	1,56%	16,82%	3,99%	1,58%	5,39%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2,06%	1,79%	1,74%	2,10%	1,75%	1,89%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,39%	0,01%	0,12%	0,22%	0,20%	0,19%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**4,01%**	**3,86%**	**0,85%**	**0,19%**	**0,17%**	**1,81%**
2.4	**Belanja Transfer**	**0,00%**	**0,09%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,02%**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

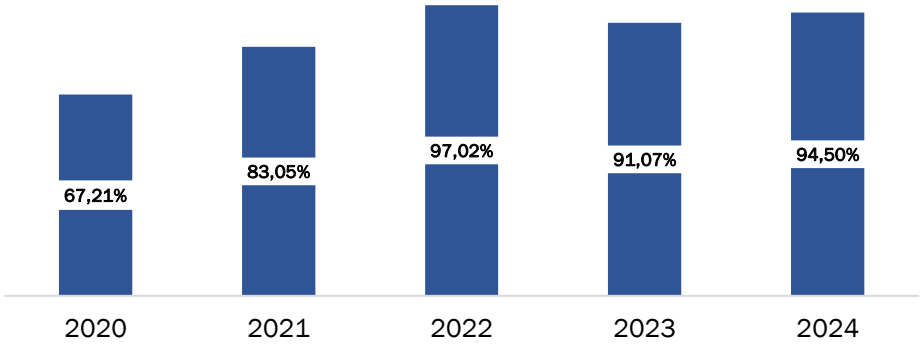
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata- rata proporsi realisasi belanja Kota Probolinggo tahun 2020 hingga 2024 cenderung fluktuatif. Proporsi realisasi Belanja Operasi Kota Probolinggo tahun 2020 hingga 2024 tercatat memiliki rata-rata diatas 80% namun pada tahun 2022 capaian rata-rata proporsi

belanja operasi 75,95%. Komponen realisasi belanja dengan rata-rata terbesar berada pada belanja pegawai (Belanja Operasi) yaitu sebesar 44,46% dari total belanja daerah, artinya realisasi belanja pegawai yang notabene bersifat rutin dan kurang berkaitan langsung dengan pembangunan masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal (secara umum) yang memiliki keterkaitan lebih dekat dengan Pembangunan daerah.

Di antara 4 pos belanja daerah Kota Probolinggo, Proporsi Belanja Operasi memiliki nilai rata-rata realisasi paling besar yakni dengan capaian rata- rata 86,36%. Dalam rentang tahun 2020 hingga 2024, proporsi realisasi belanja operasi terbesar tercatat pada tahun 2024 yang mencapai 92,57%. Sedangkan, proporsi realisasi Belanja Modal Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 tercatat memiliki nilai rata-rata 11,81%. Proporsi realisasi Belanja Modal memiliki nilai paling besar berada pada tahun 2022 yang mencapai 23,21%. Sedangkan komponen belanja dengan proporsi rata-rata realisasi terendah berada pada belanja Belanja Modal Aset Lainnya yang merupakan komponen Belanja Modal dengan rata- rata proporsi sebesar 0,01%. Secara spesifik, pengelolaan belanja daerah Kota probolinggo masa lalu dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio dan ukuran sebagai berikut :

1. Tingkat Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Tingkat realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah merupakan gambaran secara rill mengenai ketercapaian realisasi belanja daerah berdasarkan/ terhadap anggaran yang telah ditetapkan dalam setiap tahunnya. Semakin besar nilai tingkat realisasi menunjukkan bahwa besar realisasi belanja dibandingkan dengan jumlah belanja yang dianggarkan semakin tinggi, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui hasil perhitungan tingkat realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kota Probolinggo dalam waktu 5 tahun terakhir yakni di tahun 2020 - 2024 secara lebih jelas adalah sebagai berikut :



Gambar II-163 Tingkat Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

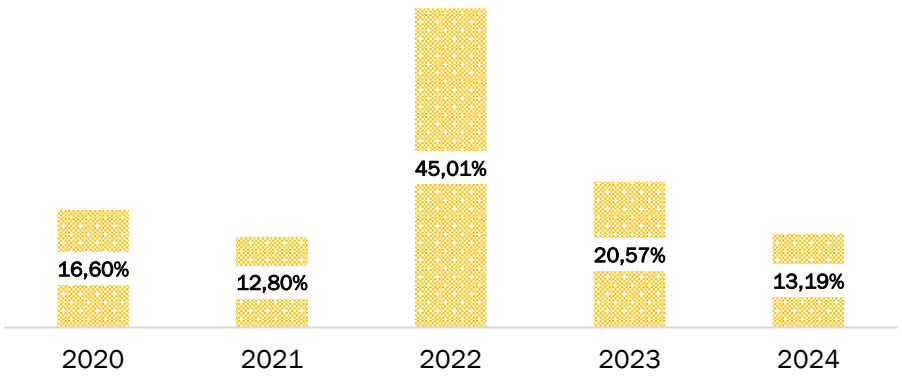
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 hingga 2024 tingkat realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah di Kota Probolinggo rata-rata masih berada dibawah 100% dengan nilai capaian tertinggi yaitu sebesar 97,02% yang terjadi pada tahun terakhir yaitu di tahun 2022. Pada tahun 2020 tingkat realisasi belanja hanya mencapai sebesar 67,21% dan merupakan capaian terendah selama kurun waktu lima tahun terakhir. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali walaupun tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 81,11% hal tersebut seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi maka tingkat realisasi belanja daerah kembali mengalami peningkatan. Tingkat capaian pada tahun 2022 merupakan puncak dari peningkatan nilai selama 5 tahun terakhir. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 91,07% dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 94,50%. Kondisi ini merupakan gambaran bahwa realisasi belanja daerah yang telah dilaksanakan di Kota Probolinggo selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2020 - 2024) terutama dalam 1 tahun terakhir, semakin baik dalam pemenuhan target/ anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat realisasi anggaran perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Probolinggo.

2. Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum

Proporsi Belanja Modal merupakan gambaran seberapa besar anggaran suatu daerah digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan seperti

percepatan pembangunan infrastruktur. Pengeluaran belanja modal akan memberikan manfaat yang besar dalam jangka menengah dan panjang, mengingat belanja modal yang secara mum diperuntukkan bagi pembangunan fisik terutama infrastruktur akan menjadi pengungkit (leverage) di berbagai sektor pembangunan lain. Infrastruktur memegang peranan penting dalam percepatan pembangunan daerah termasuk di Kota Probolinggo.

Adapun Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) digunakan untuk melihat kesesuaian belanja modal terhadap aturan yang berlaku. Dalam UU APBN Tahun Anggaran 2017, Dana Transfer Umum diarahkan ≥ 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, hal tersebut lebih jelas diatur dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016. Adapun proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum Kota Probolinggo dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar II-164 Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

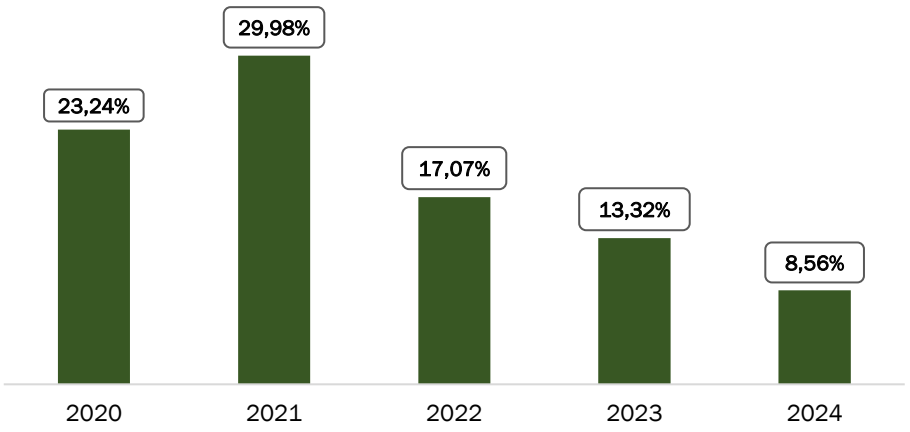
Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 secara umum mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 tercatat Kota Probolinggo memiliki capaian sebesar 16,60%. Sedangkan pada tahun 2021 selaras dengan di tahun 2020, mengalami penurunan sedikit signifikan hingga pada angka 12,60% namun nilai tersebut masih di atas ambang batas rasio Belanja Modal terhadap DTU dalam aturan UU APBN yaitu sebesar ≥ 25%. Sedangkan pada tahun 2022 proporsi belanja modal

terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kota Probolinggo mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai proporsi terbesar yaitu di angka 45,01%. Secara umun proporsi belanja modal terhadap DTU Kota Probolinggo pada tahun 2019 hingga 2023 telah berhasil mencapai rata-rata proporsi diatas 25% yakni mencapai 26,32%. Namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 13,19%. Sehingga hal tersebut perlu ditingkatkan secara bertahap, sehingga pembangunan infrastruktur di Kota Probolinggo akan semakin berkembang dalam menunjang pembangunan perekonomian daerah.

3. Proporsi SILPA Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA pada dasarnya merupakan sisa anggaran yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya. Proporsi SILPA terhadap belanja menunjukkan penggunaan dana yang tertunda atau tidak terserap. Artinya, semakin kecil angka proporsi SILPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah, maka semakin efektif penyerapan anggarannya. Proporsi SILPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kota Probolinggo pada tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



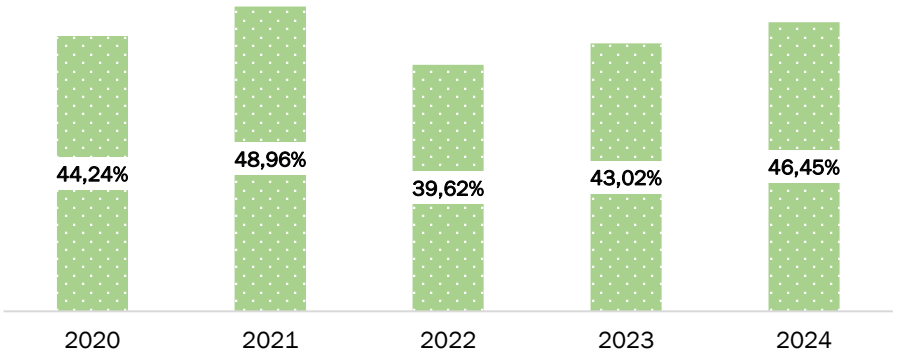
Gambar II-165 Proporsi SILPA terhadap Total Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024
Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Berdasarkan pada grafik di atas, tren proporsi SILPA terhadap total belanja daerah Kota Probolinggo tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 masuk

dalam kategori fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada 3 tahun terakhir (2022 - 2024). Pada tahun 2020 tercatat Kota Probolinggo memiliki capaian sebesar 23,24%. Akan tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan, hingga pada tahun tersebut mencapai 29,98%. Terjadinya peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan penyerapan anggarana belanja yang cukup rendah. Fluktuasi tren proporsi SILPA terhadap belanja daerah tersebut menggambarkan kemampuan Kota Probolinggo dalam penyerapan SiLPA tahun sebelumnya pada tahun 2020 hingga 2021 belum cukup efektif karena nilai SILPA mengalami peningkatan. Namun demikian proporsi SILPA terhadap belanja daerah pada tahun 2024 mengalami penurunan hingga mencapai angka 8,56%. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang semakin baik, mengingat kinerja belanja daerah cukup efektif melalui penyerapan dalam pelaksanaan program/ kegiatan. Semakin besar SILPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana *idle*. Untuk itu pada tahun-tahun mendatang diperlukan manajemen belanja daerah yang lebih baik, sehingga belanja yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif di Kota Probolinggo.

4. Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja

Proporsi ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebaliknya, semakin kecil angka proporsi belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada grafik di bawah ini :



Gambar II-166 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, proporsi belanja pegawai terhadap total realisasi belanja Kota Probolinggo pada tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 mencapai 48,96%, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga mencapai 39,62%. Sedangkan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan hingga pada angka 43,02%. Rata-rata proporsi belanja pegawai terhadap total belanja tahun 2019 hingga 2023 masih berada dibawah 50% yaitu di angka 43,00%, dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 46,45% artinya kondisi tersebut masih relatif baik di mana porsi anggaran tidak didominasi oleh belanja pegawai atau belanja yang bersifat pengeluaran rutin dan tidak berpengaruh terhadap kinerja program pembangunan secara langsung. Namun berdasarkan peraturan yang terbaru, Pada Pasal 146 ayat (1) UU HKPD, daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal sebesar 30% dari total belanja. Sehingga Pemerintah Kota Probolinggo yang memiliki belanja pegawai di atas 30% dari total belanja APBD, UU HKPD memberikan waktu selama 5 tahun bagi pemda untuk segera menyesuaikan porsi belanja pegawainya sesuai dengan ketentuan.

5. Proporsi Pemenuhan Belanja Aparatur

Analisis ini memberikan gambaran mengenai rasio belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan belanja kebutuhan aparatur. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio belanja

tersebut, maka semakin kecil pula proporsi anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan aparatur. Berdasarkan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Probolinggo pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana telah disampaikan pada sub-bab kinerja keuangan masa lalu, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel II.65 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2020	498.177.883.306,94	887.667.480.575,35	56,12%
2	Tahun Anggaran 2021	483.072.724.080,65	928.555.784.164,52	52,02%
3	Tahun Anggaran 2022	672.082.037.366,82	1.080.134.068.338,53	62,22%
4	Tahun Anggaran 2023	559.317.109.440,00	1.016.894.990.872,63	55,00%
5	Tahun Anggaran 2024	441.409.926.542,00	1.039.189.025.613,39	42,48%

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Meninjau data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Probolinggo pada periode tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 Kota Probolinggo memiliki angka proporsi sebesar 56,12%. Dimana kondisi tersebut bertahan hingga ditahun 2021 konsisten mengalami penurunan persentase hingga mencapai 52,02%. Namun pada akhirnya di tahun 2022 proporsi belanja pemenuhan aparatur mengalami peningkatan hingga menjadi 62,22. Keadaan membaik kembali pada tahun 2023 yakni proporsi anggaran pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami penurunan kembali hingga pada angka 55,00%. Sedangkan pada tahun 2024 pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami penurunan menjadi sebesar 42,48%.

Bila melihat pada data Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Probolinggo di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat diketahui bahwa persentase proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Probolinggo cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2022, namun kecenderungan penurunan tersebut membuktikan bahwa secara umum

Kota Probolinggo telah cukup baik dalam pemenuhan kebutuhan aparatur. Hal tersebut dikarenakan untuk menekan angka proporsi belanja pemenuhan aparatur dan lebih memfokuskan pada belanja barang dan jasa dan belanja modal untuk mendukung kegiatan pembangunan di Kota Probolinggo. Dan hal yang perlu menjadi catatan ialah capaian persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di tahun 2022 yang memperoleh capaian tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir, sehingga kedepannya perlu dilakukan evaluasi agar proporsi dapat ditekan kembali.

Pemerintah Kota Probolinggo memiliki mandat untuk berpikir keras dalam menyusun penganggaran belanja pegawai ke depan. Sebab, dalam lima tahun ke depan, alokasi belanja pegawai maksimal yang diperkenankan hanya 30 persen dari APBD. Hal tersebut sesuai dengan amanat UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Proporsi tertinggi di tahun 2022 yakni menembus angka 62,22% dan berangsur mengalami penurunan yang menandakan bahwa proporsi belanja pegawai semakin kecil dan mendekati target dari pemerintah pusat.

6. Alokasi Anggaran *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Dari penjelasan tersebut maka yang termasuk didalam *Mandatory Spending* ialah diantaranya :

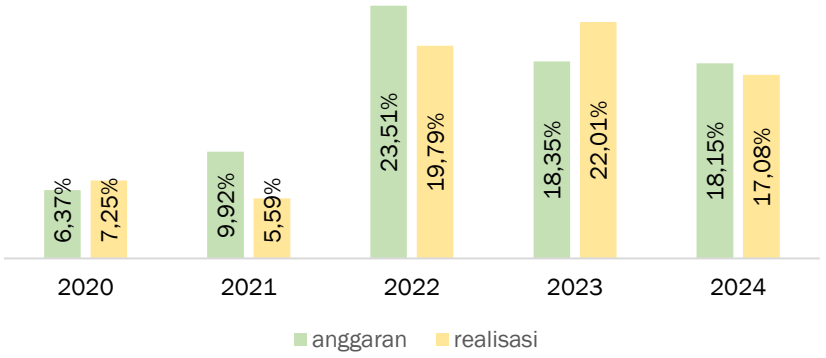
- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Namun berdasarkan Undang-Undang baru tentang kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023) saat ini tidak lagi menyebutkan bahwa Kabupaten/Kota harus mengalokasikan minimal 10% dari APBD. Namun walaupun demikian Kota Probolinggo memiliki proporsi yang semakin meningkat sehingga hal ini menandakan bahwa Kota Probolinggo terus melakukan upaya peningkatan kualitas masyarakat di bidang kesehatan.

- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah pada Pasal 147 bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja Infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40%, meskipun sampai dengan tahun 2024 belanja infrastruktur Pemerintah Kota Probolinggo belum bisa memenuhi mandatory tersebut, namun akan terus ditingkatkan secara bertahap. Untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Dengan berpedoman pada penjelasan sebelumnya maka akan dibagi menjadi Sub *Mandatory Spending* di Kota Probolinggo ialah sebagai berikut :

1) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Belanja Infrastruktur publik merupakan belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Sedangkan yang kemudian dimaksud infrastruktur ialah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat mengetahui perbandingan atau proporsi anggaran belanja insfrastruktur pelayanan publik terhadap total anggaran belanja :



Gambar II-167 Proporsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik terhadap Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Berdasarkan pada grafik diatas maka dapat diketahui bahwa proporsi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik terhadap total anggaran mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 dan 2023 dengan nilai 23,51% dan 18,35%. Jika melihat bahwa anggaran belanja insfrastruktur di tahun 2020 yaitu di angka Rp. 83.232.752.304,70 dibandingkan dengan total anggaran belanja 2020 daerah sebesar Rp. 1.305.945.473.976,52 dengan proporsi sebesar 6,37% merupakan capaian terendah pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Untuk di tahun selanjutnya yakni di tahun 2021 dengan anggaran belanja infrasrtuktur sebesar Rp. 107.344.686.090,00 dan diproporsikan dengan total anggaran keuangan daerah sebsar Rp. 1.082.004.882.500,62 maka dapat diketahui proporsi terhadap total anggaran belanja keuangan 9,92%. Pada tahun 2022 terdapat data yang memperlihatkan bahwa capaian proporsi anggaran serta realisasi bilanja infrastruktur, diketahui bahwa proporsi anggaran berada di angka 23,51% dan proporsi realisasi terhadap total realisasi belanja daerah sebesar 19,79% dengan asumsi bahwa proporsi anggaran merupakan capaian tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir. Besaran nilai realisasi belanja infrastruktur di tahun 2022 ialah Rp. 213.785.261.699,70 dan besaran total realisasi belanja keuangan daerah ialah Rp. 1.080.134.068.338,53. Sedangkan untuk besaran anggaran belanja infrastruktur di tahun 2022 ialah sebesar Rp. 261.732.255.173,00 dan untuk total anggaran belanja daerah ialah sebsar Rp. 1.113.315.247.534,00. Pada tahun terakhir yakni di tahun 2023, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa nilai proporsi anggaran belanja infrastruktur menurun dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai 18,35% dan proporsi realisasi diangka 22,31%. Besaran nilai anggaran belanja insfrastruktur sebesar Rp. 114.020.160.324,00 dan besaran nilai total anggaran belanja daerah Rp 1.263.103.482.080,00 di tahun 2023. Untuk proporsi realisasi sebesar 22,31% dengan merupakan nilai proporsi tertinggi dari lima tahun yang diperoleh dari realiasasi sebesar Rp. 100.515.371.768,00 dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah Rp. 1.016.894.990.872,63. Sedangkan pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan dengan proporsi anggaran sebesar 18,15% atau Rp 199.556.082.822,00 dan proporsi realisasi sebesar 17,08% atau Rp 187.769.263.625,00.

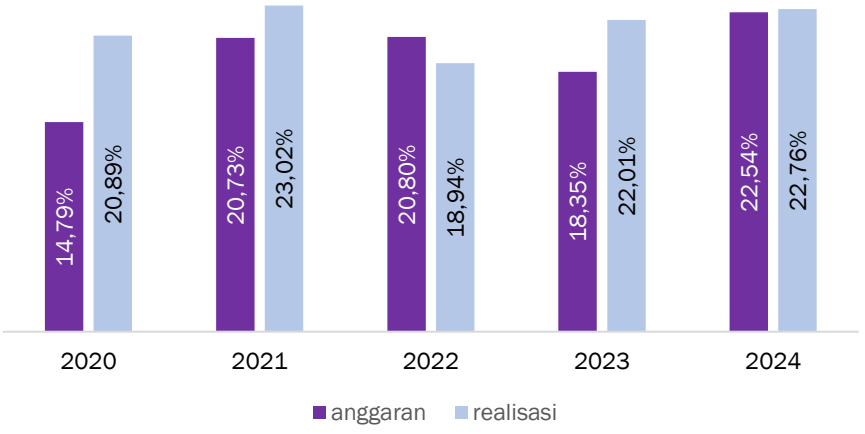
Tabel II.66 Nilai Anggaran dan Realisasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

Tahun	Keterangan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	83.232.752.304,70	63.653.924.115,26
2021	107.344.686.090,00	50.193.884.259,51
2022	261.732.255.173,00	213.785.261.699,70
2023	114.020.160.324,00	100.515.371.768,00
2024	199.556.082.822,00	187.769.263.625,00

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

2) Belanja Pendidikan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bicara mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Pemerintah Daerah menganut dan mengharuskan untuk melaksanakan pemenuhan mandatory anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan dalam sektor pendidikan akan terselesaikan. Pemenuhan akses dan layanan pendidikan diharapkan semakin meningkat pada masa mendatang. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan Mandatory Spending dalam bidang pendidikan di Kota Probolinggo selama tahun 2020 - 2024 ialah sebagai berikut.



Gambar II-168 Proporsi Belanja Pendidikan terhadap Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20% terhadap total anggaran keuangan daerah maka jika dilihat dari grafik diatas Pemerintah Kota Probolinggo telah melaksanakan amanat tersebut. Secara keseluruhan data diatas menunjukan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo masih belum mengalokasikan anggaran dalam bidang pendidikan sudah berada diatas angka 20% kecuali pada 2021 dan tahun 2022. Pada 2020 nilai proporsi anggaran pendidikan yang ditetapkan pusat yakni masih berada pada angka 14,79%, keadaan tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi covid- 19 yang melanda sehingga terdapat kebijakan recofusing anggaran sehingga anggaran untuk pendidikan juga terpengaruh. Namun ditahun berikutnya di tahun 2021 proporsi anggaran meningkat kembali yakni di angka 20,73%. Sama halnya di tahun 2022 yakni proporsi anggaran belanja meningkat hingga pada angka 20,78%. Di tahun 2023 proporsi anggaran pendidikan menurun kembali dan berada di angka 18,75% sehingga belum berada pada range yang telah diamanatkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian pada tahun 2024 baik pada anggaran dan realisasi memiliki proporsi di atas 20% dimana anggaran sebesar 22,54% dan realisasi sebesar 22,76%.

Sesuai dengan penjelasan diatas maka disajikan tabel mengenai nilai anggaran dan realisasi pendidikan serta data total realisasi dan total anggaran daerah :

Tabel II.67 Nilai Anggaran dan Realisasi Belanja Pendidikan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

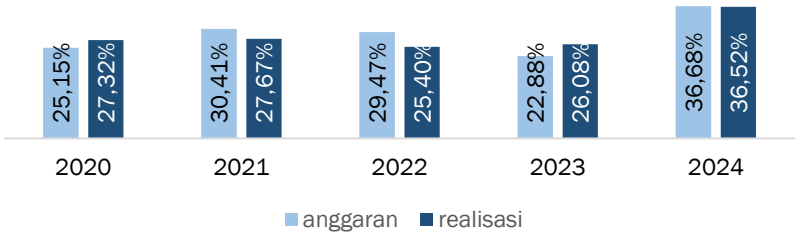
Tahun	Keterangan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	193.137.481.947,56	183.320.920.677,70
2021	224.278.857.256,00	206.840.487.372,00
2022	231.574.786.037,00	204.607.393.757,00
2023	231.839.524.471,00	223.802.066.082,73
2024	247.859.979.464,00	236.537.067.977,99

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

3) Belanja Kesehatan

Belanja kesehatan adalah dana yang digunakan untuk menyediakan dan menggunakan layanan kesehatan. Anggaran kesehatan merupakan bagian dari alokasi anggaran pemerintah untuk sektor kesehatan yang mencakup dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan layanan kesehatan, promosi

kesehatan, pencegahan penyakit, serta pengobatan dan perawatan. Sehingga dengan adanya belanja kesehatan ini diharapkan dapat menunjang kesehatan bagi seluruh masyarakat guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas 2045.



Gambar II-169 Proporsi Belanja Kesehatan terhadap Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Berdasarkan pada grafik diatas maka dapat diketahui bahwa proporsi anggaran belanja kesehatan telah berada pada posisi diatas 10%. Hal tersebut sudah terbukti terjadi di Kota Probolinggo, dengan rata-rata proporsi anggaran belanja diangka 28,92% selama kurun waktu 2020 - 2024. Dengan demikian maka Kota Probolinggo telah melaksanakan amanat dari Pemerintah Pusat dengan mengalokasikan anggaran Kesehatan lebih dari 10% total anggaran keuangan daerah. Untuk dapat mengetahui secara detail mengenai realisasi dan anggaran belanja kesehatan Kota Probolinggo yaitu sebagai berikut :

Tabel II.68 Nilai Anggaran dan Realisasi Belanja Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

Tahun	Keterangan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	328.475.479.444,18	239.771.464.032,04
2021	329.053.022.184,00	248.607.718.790,73
2022	328.043.838.684,00	274.320.624.953,67
2023	288.950.039.228,00	265.159.560.745,90
2024	332.030.729.901,00	309.286.185.861,00

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah anggaran beserta realisasi belanja Kesehatan di Kota Probolinggo dari kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 fluktuatif. Dari data tahun 2020 hingga 2024 diketahui bahwa jumlah anggaran terbesar berada di tahun 2024 yakni dengan

angka sebesar Rp. 332.030.729.901,00 dan realisasi sebesar Rp. 309.286.185.861,00. Sedangkan anggaran terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 288.950.039.288,00.

4) Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kota Probolinggo pada 5 tahun terakhir (2020 hingga 2024) mengalami perkembangan yang meningkat, dari total Rp 236.037.236.412,00 di tahun 2020 menjadi Rp 273.378.165.835,00 di tahun berjalan (2024). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 9,43% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir adalah 3,79%. Pengeluaran terbesar dalam struktur pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama terdapat pada Belanja Gaji dan Tunjangan, sedangkan pengeluaran paling sedikit terdapat pada Belanja Bagi Hasil yang hanya terealisasi pada tahun 2021. Untuk Belanja Bunga dan Pembayaran Pokok Utang tidak terealisasi dalam lima tahun terakhir dalam struktur pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kota Probolinggo. Adapun perkembangan Pengeluaran wajib dan mengikat Serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2020 - 2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.69 Perkembangan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	**Belanja Daerah**	**236.037.236.412,00**	**238.906.659.404,50**	**244.841.331.003,00**	**249.828.535.466,00**	**273.378.165.835,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	230.722.736.412,00	222.889.885.690,50	229.097.204.680,00	233.515.313.344,00	257.057.220.554,00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	5.314.500.000,00	15.237.276.964,00	15.744.126.323,00	16.313.222.122,00	16.320.945.281,00
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4	Belanja Bagi Hasil	-	779.496.750,00	-	-	-
B	**Pengeluaran Pembiayaan**					
1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
	TOTAL (A+B)	**236.037.236.412,00**	**238.906.659.404,50**	**244.841.331.003,00**	**249.828.535.466,00**	**273.378.165.835,00**

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Berdasarkan pada data historis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Probolinggo seperti yang telah dibahas dan disajikan pada tabel di atas, maka untuk mengetahui perkiraan pengeluaran pada tahun-tahun yang akan datang, perlu dilakukan proyeksi terhadap masing-masing komponen belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama tersebut.

Total Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 4,20%, yang disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pegawai maupun pangkat dan golongan pegawai. Nilai total Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp. 309.154.007.462,29, sedangkan pada tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp. 322.003.762.468,31, pada tahun 2027 mencapai Rp. 335.488.339.915,71, dan hingga pada tahun 2030 diperkirakan mencapai Rp. 380.074.443.732,37. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Probolinggo terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan yang diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan pada tahun 2025 hingga 2030 sebesar 4,47%, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH sebesar 0,00% atau memiliki jumlah yang sama dalam setiap tahunnya, Belanja Bunga dan Belanja Bagi Hasil sebesar 0,00% atau tidak terdapat realisasi. Untuk pengeluaran pembiayaan diperkirakan pada tahun 2025 hingga 2030 tidak terdapat pengeluaran untuk Pembentukan Dana Cadangan maupun Pembayaran Pokok Utang.

Untuk mengetahui secara lebih jelas, berikut disajikan hasil proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Probolinggo untuk tahun 2025 hingga 2030.

Tabel II.70 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2030

No	Uraian	Data Tahun Dasar	Tingkat Pertumbuhan	Proyeksi					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	**Belanja Wajib dan Mengikat**								
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	257.057.220.554,00	4,47%	290.282.957.293,29	303.132.712.299,31	316.617.289.746,71	330.768.239.124,85	345.618.682.606,71	361.203.393.563,37
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	16.320.945.281,00	0,00%	18.871.050.169,00	18.871.050.169,00	18.871.050.169,00	18.871.050.169,00	18.871.050.169,00	18.871.050.169,00
3	Belanja Bunga	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Bagi Hasil	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
B	**Pengeluaran Pembiayaan**								
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	**273.378.165.835,00**	**4,20%**	**309.154.007.462,29**	**322.003.762.468,31**	**335.488.339.915,71**	**349.639.289.293,85**	**364.489.732.775,71**	**380.074.443.732,37**

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

2.2.2.2 ANALISIS PEMBIAYAAN

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pendanaan pembangunan daerah di luar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Analisis ini tidak dapat dipisahkan dari kondisi defisit yang terjadi, sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Beberapa aspek yang dibahas dalam analisis pembiayaan meliputi : Analisis Sumber Penutup Defisit Riil, Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, serta Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

A. ANALISIS SUMBER PENUTUP DEFISIT RIIL

Analisis Sumber Penutup Defisit Riil memberikan gambaran mengenai kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah Kota Probolinggo pada masa lalu. Defisit riil diketahui dengan menghitung Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi dengan realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Setelah diketahui selanjutnya dilakukan penutupan oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan yang dimana keseluruhan datanya dituangkan dalam tabel Defisit Riil Anggaran. Berdasarkan tabel analisis tersebut, kemudian disusun tabel Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil perhitungan dan komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.71 Defisit Riil Anggaran Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	922.027.675.562,60	993.879.239.176,41	955.089.232.636,99	968.433.112.167,29	992.701.449.220,29
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	877.667.480.575,35	898.555.784.164,52	1.080.134.068.338,53	1.016.894.990.872,63	1.039.189.025.613,39
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	-	-
	Defisit riil	**34.360.194.987,25**	**65.323.455.011,89**	**(125.044.835.701,54)**	**(48.461.878.705,34)**	**(46.487.576.393,10)**

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 hingga 2024, keuangan Pemerintah Kota Probolinggo lebih sering mengalami defisit dibandingkan surplus, dimana defisit terjadi pada tahun 2022 hingga 2023. Sedangkan surplus hanya terjadi di tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Probolinggo mengalami defisit sebesar Rp. 125.044.835.701,54, sedangkan pada tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 48.461.878.705,34 dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 46.487.576.393,10. Dari defisit tersebut selanjutnya ditutup salah satunya dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, dimana proporsi Defisit Riil terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, berturut-turut tahun 2022, 2023 dan 2024 adalah sebesar 215,42%, 379,50%, dan 291,37%, yang artinya bahwa dari defisit yang terjadi pada masing-masing tahun tersebut, keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya memiliki nilai yang lebih besar sehingga bisa menutupi sebesar 215,42% dari defisit yang terjadi pada tahun 2022, 379,50% dari defisit yang terjadi pada tahun 2023, dan 291,37% dari defisit yang terjadi pada tahun 2024 atau dengan nilai SiLPA pada masing-masing tahun sebesar Rp. 269.375.779.546,89 untuk tahun 2022, sebesar Rp. 183.913.590.820,35 untuk tahun 2023, dan sebesar Rp. 135.451.712.115,01 untuk tahun 2024. Terjadinya defisit disebabkan oleh adanya realisasi belanja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kota Probolinggo. Kondisi keuangan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami surplus masing-masing sebanyak Rp. 34.360.194.987,25 dan Rp. 65.323.455.011,89. Surplus yang dimiliki telah meningkatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada tahun tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo masih cukup kuat untuk membiayai belanja dengan memaksimalkan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun anggaran sebelumnya.

Tabel II.72 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		2020	2021	2022	2023	2024
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	493,60%	312,37%	-215,42%	-379,50%	-291,37%
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	-31,99%	0,00%	0,00%

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		2020	2021	2022	2023	2024
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00%	0,000%	0,000%	0,00%	0,00%
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

B. ANALISIS SUMBER PENUTUP DEFISIT RIIL

Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran memberikan gambaran mengenai dari mana SiLPA diperoleh atau sumber perolehan SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sumber terhadap SiLPA yang dimiliki. Komposisi SiLPA Pemerintah Kota Probolinggo diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Pelampauan penerimaan PAD, Pelampauan penerimaan dana perimbangan, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, serta pencairan dana cadangan. Sedangkan untuk Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan tidak terdapat realisasi.

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Probolinggo pada tahun 2022 hingga 2024 diperoleh dari 2 sumber sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dimana pada tahun 2022 hingga 2024 realiasi SiLPA hanya bersumber dari Pelampauan penerimaan dana perimbangan dan Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Pada 2 tahun terakhir (2023 dan 2024) sebagian besar SiLPA diperoleh dari Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang melebihi 60%. Secara keseluruhan, Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Probolinggo pada tahun 2022 hingga 2024 mengalami penurunan yang menandakan adanya peningkatan kinerja. Berikut disajikan data terkait dengan perkembangan SiLPA dan sumber perolehan SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo selama 3 tahun terakhir (2022 - 2024).

Tabel II.73 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Probolinggo Tahun 2022 - 2024

No	Uraian	2022		2023		2024	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	**Jumlah SiLPA**	**202.711.904.164,79**	**100,00%**	**174.320.480.857,92**	**100,00%**	**110.095.652.070,91**	**100,00%**
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	165.646.315.506,35	81,72%	26.167.479.966,03	15,01%	20.264.061.956,88	18,41%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah		0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	18.267.275.314,00	9,01%	109.284.232.148,98	62,69%	68.700.073.765,03	62,40%
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	18.798.313.344,44	9,27%	38.868.768.742,91	22,30%	21.131.516.349,00	19,19%
7	Kegiatan lanjutan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

C. ANALISIS REALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan memberikan gambaran mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran secara riil yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2020 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo mencapai Rp. 186.926.130.054,87, namun pada tahun 2021 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran telah mengalami peningkatan sehingga mencapai Rp. 256.288.905.941,00. Pada tahun 2022 nilai Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga menjadi Rp. 165.487.612.897,91 dan terus menurun pada tahun 2023 menjadi Rp. 96.865.718.780,10. Pada tahun 2024 nilai Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran kembali mengalami penurunan sehingga mencapai Rp. 68.005.900.018,91. Adapun rata-rata pertumbuhan pada tahun 2020 - 2024 sebesar -17,40%. Semakin menurunnya Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran menunjukkan bahwa kebutuhan belanja dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang semakin meningkat, dimana defisit anggaran yang terjadi telah mampu ditutupi oleh adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Untuk mengetahui hasil perhitungan dan perkembangan Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.74 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	204.024.026.899,21	268.859.720.925,14	184.285.926.242,35	135.734.487.523,01	89.137.416.367,91
	Dikurangi:					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	17.097.896.844,34	12.570.814.984,14	18.798.313.344,44	38.868.768.742,91	21.131.516.349,00
3	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	**186.926.130.054,87**	**256.288.905.941,00**	**165.487.612.897,91**	**96.865.718.780,10**	**68.005.900.018,91**

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Dengan masih tingginya SILPA, maka Pemerintah Kota Probolinggo perlu memperbaiki tata kelola keuangan daerah dengan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dari sisi penerimaan serta pengeluaran yaitu memperhatikan kondisi makro perekonomian, memperbaiki kinerja penyerapan anggaran dan mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan. SiLPA yang diperoleh dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal, sehingga implementasi kebijakan yang berpihak pada rakyat dapat berjalan dengan lebih baik.

Pengelolaan keuangan yang semakin baik tercermin dalam hasil Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran, dimana Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran menggambarkan perkiraan kondisi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Probolinggo dalam beberapa tahun mendatang yang diproyeksikan cenderung lebih rendah dari kondisi eksisting yaitu tahun 2020 hingga 2024, penurunan cukup signifikan tersebut dikarenakan pada periode 2020-2024 masih ada kewajiban belanja pegawai yang dibayar lintas tahun, sedangkan mulai tahun 2025 direncanakan semua kewajiban benja pegawai dibayarkan pada tahun berkenaan. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Probolinggo diproyeksikan terus menurun mulai tahun 2025 senilai Rp. 40.610.202.681,67 sampai periode akhir di tahun 2030 menjadi Rp. 36.992.026.105,27. Hal tersebut mempertimbangkan stabilitas cashflow keuangan daerah, khususnya pada awal tahun. Adapun dalam setiap tahun rata-rata pertumbuhan diperkirakan mencapai -1,75%. Penurunan tersebut menunjukkan adanya optimalisasi dalam pelaksanaan belanja daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan di Kota Probolinggo.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Probolinggo pada tahun 2025 hingga 2030 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.75 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2030

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat Pertumbuhan	Proyeksi					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	89.137.416.367,91	0,00	48.002.700.962,57	48.002.700.962,57	48.002.700.962,57	48.002.700.962,57	48.002.700.962,57	48.002.700.962,57
	Dikurangi :								
1	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	21.131.516.349,00	8,29%	7.392.498.280,90	7.999.181.103,75	8.660.388.872,23	9.381.249.065,97	10.167.386.554,18	11.010.674.857,30
2	Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	**68.005.900.018,91**	**-1,75%**	**40.610.202.681,67**	**40.003.519.858,83**	**39.342.312.090,34**	**38.621.451.896,60**	**37.835.314.408,39**	**36.992.026.105,27**

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

2.2.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Probolinggo. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025 - 2029, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara rencana pembangunan daerah yang ingin dilaksanakan dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah Kota Probolinggo selama beberapa tahun ke depan (2025 - 2030). Beberapa hal yang akan diuraikan dalam sub bab ini meliputi : proyeksi pendapatan dan belanja, serta penghitungan kerangka pendanaan.

2.2.3.1 PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA

Kerangka pendanaan pemerintah daerah untuk kurun waktu beberapa tahun ke depan tidak dapat dipisahkan dari data historis yaitu perkembangan realisasi anggaran pemerintah daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan hal terebut, maka untuk melakukan analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan daerah untuk kurun waktu beberapa tahun kedepan perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Salah satu metode sederhana yang digunakan untuk memperkirakan kemampuan anggaran (proyeksi) adalah fungsi *forecast*, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan kumpulan data historis selama 5 tahun terakhir, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi, kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta kondisi ekonomi makro.

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah memberikan informasi mengenai pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kota Probolinggo pada masa perencanaan yang tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo, serta tingkat belanja

dan pengeluaran pembiayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam beberapa tahun mendatang. Pendapatan daerah secara umum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan pada belanja derah secara umum terbagi menjadi 4 jenis, yaitu : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa pendapatan daerah Kota Probolinggo pada tahun 2026 hingga 2030 diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,43%, untuk belanja daerah Kota Probolinggo secara keseluruhan pada rentang waktu tersebut diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 1,94%. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan Kota Probolinggo diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -5,76%, dan sebesar -20,00% untuk pengeluaran pembiayaan.

Melihat pada hasil proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata pada tahun 2026 hingga 2030 diperkirakan mencapai sebesar 4,35%, dimana berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2026 diperkirakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo mencapai Rp. 256.255.128.418,03, tahun 2027 mengalami pertumbuhan dari hasil proyeksi pada tahun 2026 sehingga menjadi Rp. 267.366.022.437,17, tahun 2028 mencapai Rp. 278.294.674.944,82, secara konsisten tetap meningkat sehingga pada tahun 2029 menjadi sebesar Rp. 289.392.082.452,47, dan pada tahun 2030 diperkirakan mencapai sebesar Rp. 300.003.332.960,11. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi pada tahun 2026 hingga 2030 antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan dari pemberlakuan Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Semakin meningkatnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026 hingga 2030 mengandung harapan tingkat kemandirian keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo semakin baik, hal ini tentunya menjadi konsekuensi seiring dengan meningkatnya belanja daerah dalam setiap tahun, serta sebagai antisipasi adanya kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap dana transfer dari pusat ke daerah. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan akan mencapai pertumbuhan diatas 3,00% pada tahun 2026 hingga 2030, pada tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan PAD tidak sepesat ini karena

masih terdampak pasca Covid-19. Selain itu adanya perkembangan infrastruktur di Kota Probolinggo mulai memberikan dampak terhadap meningkatnya iklim usaha yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk pendapatan transfer pada tahun 2026 hingga 2030 diperkirakan rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 1,76%, dimana pada Transfer Pemerintah Pusat, banyak dipengaruhi oleh sumber dana perimbangan diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar 1,70%. Rendahnya tingkat pertumbuhan antara lain disebabkan oleh adanya kerentanan terhadap pengaruh perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan negara sepertihalnya adanya kebijakan efisiensi yang terjadi pada tahun 2025.

Melihat pada hasil proyeksi belanja daerah dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2026 hingga 2030 diperkirakan mencapai 1,94%, dimana untuk belanja operasi rata-rata memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 1,09%, untuk belanja modal rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 12,43%. Untuk belanja tidak terduga diperkirakan memiliki nilai yang konstan sepanjang tahun 2026 hingga 2030, dan untuk belanja transfer rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 0,00%. Bila melihat pada jenis belanja operasi, untuk belanja pegawai di Kota Probolinggo pada tahun 2026 hingga 2030 diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 1,45%, dimana kecilnya pertumbuhan belanja tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan pemenuhan proporsi gaji pegawai sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang tidak boleh melebihi 30% dari APBD (total anggaran belanja), disisi lain peningkatan belanja pegawai diperlukan dalam rangka melakukan antisipasi terhadap penerimaan pegawai baru. Sehingga besar proporsi belanja pegawai dalam setiap tahunnya diupayakan semakin menurun. Untuk belanja barang dan jasa di Kota Probolinggo pada tahun 2026 hingga 2030 rata-rata diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar 1,20% yang disebabkan oleh adanya pemenuhan kebutuhan peningkatan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Probolinggo, termasuk melalui belanja infrastruktur, sehingga belanja modal selama tahun 2026 hingga 2030 diperkirakan memiliki pertumbuhan positif sebesar 12,43% dan memiliki proporsi yang semakin meningkat dengan proporsi pada tahun 2030 hingga mencapai sebesar 9,51% dari total belanja daerah atau lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2024 yang mencapai 7,26% dan APBD Tahun 2025 yang hanya mencapai sebesar 5,90%. Proyeksi belanja daerah dilakukan diantaranya

dengan memperhatikan asumsi-asumsi seperti : Pertumbuhan realisasi belanja daerah Kota Probolinggo tahun 2020 hingga 2024 dan analisis logis terhadap kebutuhan peningkatan kegiatan pembangunan di Kota Probolinggo; serta adanya penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

Pada proyeksi Pembiayaan Daerah, penerimaan pembiayaan pada tahun 2026 hingga 2030 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang diperkirakan pada tahun 2026 hhingga 2030 akan mengalami penurunan secara bertahap, dimana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dioptimalkan untuk membiayai belanja. Pada Tahun 2029 – 2030 SILPA diestimasikan tetap dalam rangka menjaga kondisi keuangan untuk menutupi kemungkinan terjadinya defisit pada tahun-tahun mendatang dengan nilai mencapai Rp. 48.000.000.000,00. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan diproyeksikan terjadi pada tahun 2026-2028 dengan total selama 3 (tiga) Tahun sebesar Rp. 18.265.000.000, 00 (terbagi menjadi sebesar Rp. 6.930.000.000,00 pada Tahun 2026, Rp. 9.850.000.000,00 pada Tahun 2027 dan Rp. 1.485.000.000,00 pada Tahun 2028) dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah. Penyertaan modal dimaksud ditujukan kepada perusahaan daerah (BUMD) yang saat ini sedang diinisiasi pendiriannya oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Adapun terkait penyertaan modal untuk BUMD dimaksud nantinya perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah.

Untuk mengetahui hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kota Probolinggo pada tahun 2026 hingga 2030 secara lebih jelas dan terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.76 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kota Probolinggo Tahun 2026 - 2030

No	Uraian	*Baseline* Tahun 2024	Proyeksi (Rp) Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**PENDAPATAN**						
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**206.341.550.899,29**	**256.255.128.418,03**	**267.366.022.437,17**	**278.294.674.944,82**	**289.392.082.452,47**	**300.003.332.960,11**
1.1.1.	Pajak daerah	63.360.763.657,57	99.133.860.670,64	106.430.118.218,53	113.651.960.785,11	120.940.595.481,82	128.032.493.383,82
1.1.2.	Retribusi daerah	20.582.077.811,00	146.650.804.838,28	150.113.156.255,24	153.472.436.126,34	156.924.229.198,19	160.103.523.840,26
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.539.068.149,53	1.658.597.605,72	1.769.089.308,21	1.878.349.320,65	1.988.714.852,44	2.095.824.067,43
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	120.859.641.281,19	8.811.865.303,39	9.053.658.655,19	9.291.928.712,73	9.538.542.920,01	9.771.491.668,60
1.2	**Pendapatan Transfer**	**786.359.898.321,00**	**759.771.808.616,67**	**771.043.520.511,57**	**782.767.688.463,12**	**794.957.886.153,01**	**807.628.094.473,40**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**672.344.864.121,00**	**694.738.675.616,67**	**706.010.387.511,57**	**717.734.555.463,12**	**729.924.753.153,01**	**742.594.961.473,40**
1.2.1.1	Dana Perimbangan	656.882.353.121,00	680.148.962.616,67	691.420.674.511,57	703.144.842.463,12	715.335.040.153,01	728.005.248.473,40
1.2.1.1.1	*Dana Bagi Hasil*	90.907.928.000,00	83.253.919.786,67	79.443.763.126,67	75.633.606.466,67	71.823.449.806,67	68.013.293.146,67
1.2.1.1.2	*Dana Alokasi Umum (DAU)*	480.885.190.402,00	502.728.951.830,00	517.810.820.384,90	533.345.144.996,45	549.345.499.346,34	565.825.864.326,73
1.2.1.1.3	*Dana Alokasi Khusus (DAK)*	85.089.234.719,00	94.166.091.000,00	94.166.091.000,00	94.166.091.000,00	94.166.091.000,00	94.166.091.000,00
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	15.462.511.000,00	14.589.713.000,00	14.589.713.000,00	14.589.713.000,00	14.589.713.000,00	14.589.713.000,00
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-
1.2.1.5	Dana Desa	-	-	-	-	-	-
1.2.2	**Transfer Antar-Daerah**	**114.015.034.200,00**	**65.033.133.000,00**	**65.033.133.000,00**	**65.033.133.000,00**	**65.033.133.000,00**	**65.033.133.000,00**
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	113.203.455.700,00	64.492.943.000,00	64.492.943.000,00	64.492.943.000,00	64.492.943.000,00	64.492.943.000,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	811.578.500,00	540.190.000,00	540.190.000,00	540.190.000,00	540.190.000,00	540.190.000,00
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	*Baseline* Tahun 2024	Proyeksi (Rp) Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	**992.701.449.220,29**	**1.016.026.937.034,70**	**1.038.409.542.948,74**	**1.061.062.363.407,94**	**1.084.349.968.605,48**	**1.107.631.427.433,51**
2	**BELANJA**						
2.1	**Belanja Operasi**	**962.025.905.595,45**	**985.960.278.026,59**	**996.286.402.569,36**	**1.008.688.524.768,03**	**1.023.693.422.745,48**	**1.040.708.178.833,20**
2.1.1	Belanja Pegawai	482.680.530.154,99	525.787.870.065,75	534.636.874.889,25	542.417.674.548,45	551.152.774.300,13	560.866.755.275,81
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	385.430.948.232,01	419.714.286.728,99	421.191.406.448,26	427.822.380.049,32	436.001.346.783,60	445.115.831.978,73
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	93.723.268.208,45	40.193.021.231,85	40.193.021.231,85	38.183.370.170,26	36.274.201.661,75	34.460.491.578,66
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	191.159.000,00	265.100.000,00	265.100.000,00	265.100.000,00	265.100.000,00	265.100.000,00
2.2	**Belanja Modal**	**75.418.956.796,94**	**66.016.659.008,12**	**85.073.140.379,38**	**95.323.838.639,91**	**103.606.545.860,00**	**109.873.248.600,32**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.597.721.026,00	22.474.841.100,00	25.304.054.124,90	26.843.488.518,84	28.382.922.912,79	29.922.357.306,74
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.393.751.764,94	18.030.023.338,12	28.158.691.919,23	32.771.356.020,57	35.416.029.081,46	36.044.697.662,58
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.229.916.560,00	24.220.454.114,00	30.215.722.891,00	34.210.991.668,00	38.206.260.445,00	42.201.529.222,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.050.139.196,00	1.105.474.788,25	1.208.805.776,50	1.312.136.764,75	1.415.467.753,00	1.518.798.741,25
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	147.428.250,00	185.865.667,75	185.865.667,75	185.865.667,75	185.865.667,75	185.865.667,75
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**1.744.163.221,00**	**5.050.000.000,00**	**5.050.000.000,00**	**5.050.000.000,00**	**5.050.000.000,00**	**5.050.000.000,00**
2.4	**Belanja Transfer**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	*Baseline* Tahun 2024	Proyeksi (Rp) Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	**1.039.189.025.613,39**	**1.057.026.937.034,70**	**1.086.409.542.948,74**	**1.109.062.363.407,94**	**1.132.349.968.605,48**	**1.155.631.427.433,51**
	SURPLUS/ DEFISIT	**(46.487.576.393,10)**	**(41.000.000.000,00)**	**(48.000.000.000,00)**	**(48.000.000.000,00)**	**(48.000.000.000,00)**	**(48.000.000.000,00)**
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**135.451.712.115,01**	**47.930.000.000,00**	**57.850.000.000,00**	**49.485.000.000,00**	**48.000.000.000,00**	**48.000.000.000,00**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	135.451.712.115,01	47.930.000.000,00	57.850.000.000,00	49.485.000.000,00	48.000.000.000,00	48.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	-
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**6.930.000.000,00**	**9.850.000.000,00**	**1.485.000.000,00**	**-**	**-**
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	-	6.930.000.000,00	9.850.000.000,00	1.485.000.000,00	-	-
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**135.451.712.115,01**	**41.000.000.000,00**	**48.000.000.000,00**	**48.000.000.000,00**	**48.000.000.000,00**	**48.000.000.000,00**

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

Melihat pada hasil proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagaimana yang telah terdapat pada tabel di atas, maka selanjutnya dapat dikemukakan beberapa kebijakan keuangan daerah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Adapun kebijakan keuangan daerah dikelompokkan berdasarkan 3 komponen yang meliputi : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan Daerah

   Kebijakan pendapatan daerah Kota Probolinggo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berupa kerangka pikir yang bersifat umum yang akan diterjemahkan dalam kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalian pendapatan dalam beberapa tahun kedepan. Adapun kebijakan terkait dengan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

   a. Peningkatan penerimaan PAD melalui intensifikasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (melakukan pendataan terhadap obyek dan wajib pajak yang belum terdata, validasi data potensi dan mengoptimalkan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah);
   b. Meningkatkan kepatuhan/ ketaatan wajib pajak dan retribusi melalui :
      - Pelaksanaan mekanisme *reward* dan *punishment*;
      - Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
      - Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
      - *Law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
   c. Melakukan *review* dan penyesuaian NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) Tanah dan Bangunan mendekati Harga Pasar secara berkala khususnya di wilayah-wilayah yang secara siginifikan mengalami pertumbuhan ekonomi;
   d. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
   e. Memperkuat sistem pelayanan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi/ Teknologi Informasi (IT);

f. Optimalisasi tata kelola aset daerah dan pemanfaatan Aset Daerah sebagai sumber penerimaan dalam PAD;
g. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dengan memperbaiki kinerja Perusahaan Milik Daerah/ BUMD;
h. Penguatan sistem manajemen dan koordinasi sinergis antar Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah;
i. Optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak melalui peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal, daerah (provinsi) dan daerah lain dalam menyerap basis pajak, termasuk PKB dan BBNKB (Respon terhadap kebijakan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang opsen dengan tarif 66%).

2. Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah didasarkan pada pendekatan *Money Follow* Program yang memberikan prioritas pada bobot program/ kegiatan sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Adapun kebijakan Belanja Daerah dalam RPJMD Kota Probolinggo ini adalah sebagai berikut :

a. Belanja daerah Kota Probolinggo diprioritaskan untuk membiayai program-program yang menjadi prioritas dan kebutuhan Daerah;
b. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan berbasis pada peningkatan kinerja;
c. Optimalisasi penyerapan belanja daerah melalui peningkatan sinergi antara perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah;
d. Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan Analisis Standar Belanja;
e. Belanja pegawai dialokasikan dengan proporsi yang semakin menurun hingga paling tinggi 30% dari total belanja APBD (di luar tunjangan guru) sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022;
f. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku;
g. Penggunaan dana tidak terduga dilakukan untuk menangani hal-hal bersifat darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

h. Tambahan penghasilan bagi pegawai diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen keuangan yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan keuangan dapat terlaksana secara optimal. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Adapun kebijakan Pembiayaan Daerah dalam RPJMD Kota Probolinggo ini adalah sebagai berikut :

a. SiLPA yang terpasang pada tahun 2025 - 2030 diperhitungkan lebih rendah dibandingkan SiLPA dalam 5 tahun terakhir. Rendahnya SiLPA yang diproyeksikan memerlukan upaya optimalisasi penyerapan anggaran setiap tahunnya, sehingga diperlukan perbaikan sistem sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran;

b. Mendorong peningkatan kerjasama pembiayaan daerah dengan pihak swasta/ masyarakat/ *Non-Governmental Organization* melalui *Publik Private Partnership*, seperti : KPBU atau optimalisasi CSR. Skema KPBU memungkinkan pelibatan swasta dalam penentuan proyek yang layak untuk dikembangkan. KPBU juga memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien. Selain itu, skema KPBU memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama.

2.2.3.2 PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan

dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Probolinggo selama beberapa tahun ke depan sampai dengan tahun 2030. Untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menghitung seluruh penerimaan daerah, yang meliputi : Pendapatan, Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda), dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran. Selanjutnya dari jumlah penerimaan tersebut dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan data hasil proyeksi yang diperoleh dapat diketahui bahwa proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Probolinggo pada tahun 2026 hingga 2030 memiliki pertumbuhan sebesar 1,94%, dimana pada tahun 2026 nilai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Probolinggo diperkirakan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 1.057.026.937.034,70. Selanjutnya pada tahun 2027 kapasitas riil mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 1.096.259.542.948,74. Tahun 2028 dan tahun 2029 mengalami tren yang sama yakni mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya sehingga mencapai Rp. 1.109.062.363.407,94 pada tahun 2028 dan Rp. 1.132.349.968.605,48 pada tahun 2029. Pada tahun 2030 nilai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Probolinggo kembali mengalami peningkatan sehingga pada tahun tersebut mencapai Rp. 1.155.631.427.433,51. Terjadinya peningkatan pada tahun 2026 hingga 2030 lebih disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan daerah, sedangkan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran diperkirakan mengalami penurunan atau lebih rendah dari realisasi selama 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan diperkirakan terdapat realisasi pada tahun 2026-2028 dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah unruk BUMD. Hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tahun 2026 hingga 2030 selanjutnya dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan daerah pada masing-masing tahun.

Adapun hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Probolinggo pada tahun 2026 hingga 2030 secara lebih jelas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.77 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 - 2030

No	Uraian	Proyeksi				
		2026	2027	2028	2029	2030
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	1.016.026.937.034,70	1.038.409.542.948,74	1.061.062.363.407,94	1.084.349.968.605,48	1.107.631.427.433,51
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	47.930.000.000,00	57.850.000.000,00	49.485.000.000,00	48.000.000.000,00	48.000.000.000,00
	Total Penerimaan	1.063.956.937.034,70	1.096.259.542.948,74	1.110.547.363.407,94	1.132.349.968.605,48	1.155.631.427.433,51
	Dikurangi :					
1	Pengeluaran Pembiayaan	6.930.000.000,00	9.850.000.000,00	1.485.000.000,00	-	-
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**1.057.026.937.034,70**	**1.086.409.542.948,74**	**1.109.062.363.407,94**	**1.132.349.968.605,48**	**1.155.631.427.433,51**

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo 2025, (diolah)

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Permasalahan pembangunan dapat ditelusuri melalui evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya dan memperhatikan kondisi di masyarakat atas suatu perkara yang sedang terjadi. Perkara tersebut di masa yang akan datang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehingga menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan. Berikut ini adalah rekapitulasi permasalahan pembangunan di Kota Probolinggo sebagaimana evaluasi yang telah dilakukan pada BAB 2 untuk setiap urusan pembangunan dan telah memperhatikan perkara atau isu di daerah, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional serta menjadi pijakan dalam perumusan isu strategis daerah tahun 2025-2030.

Tabel II.78 Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo

No	Urusan	Permasalahan
1	Pendidikan	Masih tingginya jumlah anak tidak sekolah (usia 7-15 tahun) yang mencakup putus sekolah/DO, lulus tetapi tidak melanjutkan dan belum pernah bersekolah
		Belum meratanya sebaran dan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan inklusif
		Belum optimalnya partisipasi penduduk usia sekolah dalam pendidikan formal
		Belum optimalnya jalur pendidikan non formal sebagai alternatif akses pendidikan
		Masih terbatasnya pemenuhan dan penyediaan tenaga pendidik pada jenjang pendidikan dasar
2	Kesehatan	Ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan belum merata
		Belum lengkap ketersediaan sarana prasarana untuk penunjang kesehatan
		Semakin tingginya kejadian kasus menular dan tidak menular
		Masih tingginya angka prevelensi stunting
		Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan
		Penderita gangguan mental mengalami peningkatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur dasar, seperti: jaringan perpipaan, sanitasi
		Belum optimalnya pembinaan penataan ruang
		Belum optimalnya penyediaan dan penataan RTH Publik
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh
		Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pendukung hunian di perumahan
		Minat masyarakat terhadap hunian vertical (Rumah susun) masih rendah
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	Rawannya pelanggaran Perda oleh masyarakat
		Belum optimalnya penerapan pentahelix kebencanaan dan konsep lintas wilayah penanggulangan bencana

No	Urusan	Permasalahan
	Perlindungan Masyarakat	Rawannya gangguan trantibum
6	Sosial	Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		Tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan dan sektor ketenagakerjaan formal masih rendah
7	Tenaga Kerja	Lapangan pekerjaan belum dapat menampung kebutuhan pencari kerja, termasuk bagi kelompok disabilitas
		Masih adanya kasus perselisihan hubungan industrial
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih terdapat kekerasan perempuan dan anak
		Akses ke bidang ekonomi bagi perempuan masih rendah
9	Pangan	Belum tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)
		Rendahnya stabilitas harga pangan
		Belum optimalnya diversifikasi pangan
		Tingginya *food waste*
		Tingginya tingkat *food loss*
10	Pertanahan	Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pertanahan, khususnya terkait pendataan tanah sebagai dasar sertifikasi dan perencanaan tata ruang
		Masih berpotensi terjadinya konflik kepemilikan tanah
11	Lingkungan Hidup	Belum optimalnya upaya pencegahan pencemaran lingkungan khususnya pada Pencegahan pencemaran air
		Belum optimalnya penanganan sampah yang disebabkan karena keterbatasan sarana prasarana persampahan
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Kecepatan layanan yang terhambat karena kurangnya sarpras dan kurangnya sosialisasi layanan ke masyarakat
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	▪ Keterbatasan cakupan pemberdayaan kelompok dan lembaga kemasyarakatan ▪ Kurangnya pertisipasi aktif kelompok dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rendahnya Kepesertaan KB dan Belum optimalnya pendampingan Keluarga TPK
15	Perhubungan	Belum optimalnya sistem operasional dalam pengelolaan dan penataan penyelenggaran perparkiran di tepi jalan umum
		Belum optimalnya pemerataan sarana dan prasarana perhubungan ke seluruh wilayah
16	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas SDM koperasi dan pelaku usaha mikro
		Rendahnya daya saing produk Usaha Kecil Menengah dalam memperluas akses pasar
		Rendahnya akses permodalan untuk mengembangkan usaha
		Masih terdapat kelembagaan koperasi yang tidak berdasarkan regulasi dalam penyusunan pelaporan

No	Urusan	Permasalahan
17	Komunikasi dan Informatika	Belum Optimalnya Integrasi Aplikasi dan sistem informasi di perangkat daerah
		Masih terdapat wilayah yang minim aksesibilitas jaringan internet
18	Penanaman Modal	Belum optimalnya upaya penguatan daya tarik investasi
19	Kepemudaan dan Olahraga	Kurangnya kegiatan yang efektif dalam meningkatkan pengembangan pemuda baik dari sisi kewirausahaan muda maupun pengembangan potensi keolahragaan
		Ketersedian sarana olahraga masih rendah
		Belum optimalnya pengembangan potensi keolahragaan, termasuk bagi disabilitas
		Partisipasi pemuda dalam pembangunan masih rendah
20	Statistik	Belum Optimalnya pengelolaan satu data
21	Persandian	Belum optimalnya kematangan pelaksanaan Kebijakan Keamanan serta audit keamanan informasi
22	Kebudayaan	Belum optimalnya pelibatan pelaku dan tokoh seni dalam pengembangan, pelestarian kesenian serta kebudayaan lokal
		Belum tersedianya prasarana Gedung Kesenian yang layak di Kota Probolinggo
23	Perpustakaan	Peningkatan literasi masyarakat belum optimal, minat baca digital masyarakat masih kurang
		Sarana dan prasarana perpustakaan masih belum memberikan rasa nyaman kepada pengunjung
24	Kearsipan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Arsip di Perangkat Daerah belum optimal sehingga pemahaman terhadap kearsipan masih rendah
		Masih belum semua perangkat daerah menerapkan arsip digital
25	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya pengelolaan budidaya perikanan yang partisipatif
		Masih rendahnya Produk olahan perikanan yang terstandarisasi
		Diversifikasi produk perikanan olahan rendah
		Penggunaan Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan
		Diversifikasi usaha nelayan yang rendah
26	Pariwisata	Belum optimalnya promosi pariwisata
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaku ekonomi kreatif
		Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata dari sisi kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan aksesibel
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pariwisata
		Belum optimalnya peran Sumber Daya Manusia pariwisata dalam pengembangan pariwisata
27	Pertanian	Belum optimalnya produktivitas pertanian
		Biaya produksi tinggi
		Tingginya alih fungsi lahan pertanian
		Rantai pemasaran terlalu panjang
		Belum optimalnya sarana produksi pertanian

No	Urusan	Permasalahan
		Rendahnya regenerasi Sumber Daya Manusia pertanian
		Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana penanganan penyakit hewan menular strategis
		Belum optimalnya standarisasi produk hasil pertanian
		Lemahnya jejaring kemitraan pertanian
28	Perdagangan	Belum optimalnya nilai tambah sektor perdagangan yang bersumber dari ekspor
29	Perindustrian	Belum optimalnya nilai tambah produksi sektor industri
		Kurangnya daya saing produk
30	Sekretariat Daerah	Belum optimalnya pelaporan kinerja perangkat daerah
		Belum optimalnya fasilitasi perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat
		Belum optimalnya harmonisasi produk hukum, fasilitasi bantuan hukum dan pengelolaan informasi hukum
		Belum optimalnya tata Kelola pengadaan barang/jasa
		Monitoring dan evaluasi atas inflasi daerah yang terjadi belum maksimal
		Belum optimalnya pemenuhan dokumen pendukung dalam penilaian kematangan organisasi perangkat daerah
		Belum optimalnya inovasi dan kualitas layanan publik meliputi aksesibilitas dan pengembangan informasi
		Belum maksimalnya implementasi SAKIP, yang masih sebatas pemenuhan dokumen-dokumen
31	Sekretariat DPRD	Kurangnya sinkronisasi dan harmonisasi peran legislatif dan eksekutif dalam penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah (*legislasi, budgeting, controlling*)
		Belum optimalnya fasilitas tugas DPRD dari aspek ketersediaan sarana prasarana pendukung
32	Perencanaan	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi data pada proses perencanaan pembangunan daerah
33	Keuangan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah masih rendah
		Belum adanya pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi
		Potensi pajak dan retribusi yang belum optimal
		Adanya perubahan regulasi yang dinamis
34	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Belum Optimalnya Pembangunan Manajemen Talenta yang berkelanjuta
		Pengaruh kepentingan politik terhadap birokrasi masih dominan, sehingga membuat kecenderungan ASN membentuk polarisasi terhadap kekuatan politik tertentu
35	Penelitian dan Pengembangan	Beberapa kajian hasil penetian belum diimplementasikan
36	Unsur Pengawasan	Belum maksimalnya pengawasan terhadap Perangkat Daerah sehingga masih terdapat temuan terkait kerugian daerah
37	Unsur Pemerintahan Umum	Banyak Organisasi Masyarakat yang tidak terdaftar dan tidak resmi
38	Kewilayahan	Belum Optimalnya pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan analisis permasalahan per urusan dimaksud, maka dapat disimpulkan Permasalahan Pembangunan Utama Kota Probolinggo yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan daya saing SDM dari sisi tingkat pendidikan masyarakat yang bersumber dari pemerataan sebaran dan kualitas pendidikan serta belum optimalnya angka partisipasi sekolah
2. Belum optimalnya layanan kesehatan yang terkait dengan pemerataan Ketersediaan sarana prasarana untuk penunjang kesehatan serta pemerataan Ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan
3. Belum optimalnya pemerataan kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan akselerasi percepatan penanggulanggan kemiskinan, penanganan masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial serta cakupan perlindungan sosial masyarakat yang inklusif
4. Laju pertumbuhan ekonomi yang belum optimal dari sisi produktivitas dan nilai tambah sektor ekonomi produktif, daya saing ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada Usaha Kecil Menengah serta peningkatan akses pemasaran, permodalan dan nilai investasi daerah
5. Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah untuk membiayai pembangunan khususnya yang bersumber dari kebutuhan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dari pajak dan retribusi
6. Belum optimalnya Pemahaman dalam implementasi reformasi birokrasi guna peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat
7. Meningkatnya Kegiatan Sosial Ekonomi khususnya industri berdampak pada cemaran limbah industri dan limbah domestik
8. Belum optimalnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur dasar dari sisi kuantitas dan kualitas infrastruktur yang mampu menjadi faktor pengungkit investasi daerah
9. Belum optimalnya usaha integrasi percepatan pembangunan yang selaras dengan peningkatan kualitas lingkungan yang terkait pencemaran lingkungan dari aktivitas ekonomi khususnya industri, pengelolaan sampah terpadu hulu hilir serta usaha pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.

2.3.2 ISU STRATEGIS DAERAH

2.3.2.1 ISU GLOBAL

Kota Probolinggo, yang terletak di pesisir utara Jawa Timur, tak luput dari dampak dinamika global yang kian kompleks. Berlanjutnya konflik geopolitik dan geoekonomi termasuk perang Rusia-Ukraina, krisis Timur Tengah, hingga ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok menciptakan fluktuasi ekonomi global yang dapat mempengaruhi arus investasi dan perdagangan lokal di Probolinggo. Di sisi lain, tren pelemahan ekonomi China dapat menekan permintaan produk ekspor Indonesia, termasuk komoditas yang dihasilkan oleh sektor pertanian dan perikanan. Perubahan iklim global dengan cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan laut juga berpotensi mengancam sektor perikanan dan pertanian, yang menjadi salah satu penopang mata pencaharian masyarakat. Ditambah lagi, kebijakan proteksionisme yang diterapkan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, berpotensi menurunkan volume perdagangan internasional dan memengaruhi stabilitas ekonomi nasional hingga daerah.

A. GEOPOLITIK DAN GEOEKONOMI

Kota Probolinggo, yang terletak di pesisir utara Jawa Timur, dengan kota terkecil ke-2 se-Jawa Timur namun berperan penting sebagai simpul ekonomi regional. Kota Probolinggo bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, dan perikanan, khususnya melalui Pelabuhan Tanjung Tembaga. Dalam lanskap geopolitik dan geoekonomi global yang bergejolak, kondisi pasar internasional dapat memengaruhi harga komoditas, biaya logistik, hingga kelancaran rantai pasok. Dinamika ini berdampak pada keberlangsungan usaha kecil dan menengah, pengolahan ikan, serta distribusi barang yang masuk dan keluar wilayah. Sebagai kota pelabuhan, Probolinggo perlu mewaspadai efek riak dari kebijakan internasional yang kian tak menentu. Konflik geopolitik di luar negeri kerap berdampak pada kenaikan harga bahan bakar dan tarif angkutan laut, sehingga memperbesar biaya operasional bagi pelaku usaha. Di sisi lain, jika terjadi penurunan permintaan atau pembatasan impor di negara tujuan ekspor, produk asal Probolinggo terutama hasil laut dan olahan dapat terkena imbas berupa turunnya volume pemesanan. Persoalan ini memerlukan respons aktif, baik dari pemerintah kota, asosiasi pelaku usaha, maupun pihak pelabuhan, agar stabilitas ekonomi setempat tetap terjaga. Sehingga perlu untuk memodernisasi pelabuhan dan penerapan teknologi logistik yang transparan akan memudahkan pemantauan arus barang, meningkatkan efisiensi bongkar muat, serta memperkuat daya saing. Diversifikasi pasar ekspor sangat diperlukan agar

ketergantungan terhadap negara tertentu berkurang, termasuk membuka peluang ke kawasan lain seperti Timur Tengah dan Eropa. Pelatihan serta pendampingan bagi pelaku UMKM penting untuk memastikan mereka mampu memenuhi standar mutu internasional, memanfaatkan pemasaran digital, dan mengadopsi inovasi pengolahan yang sesuai kebutuhan pasar global.

B. PELEMAHAN EKONOMI CHINA

Sebagai salah satu negara importir terbesar di dunia, menurunnya permintaan dari Tiongkok bisa memengaruhi ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti hasil perikanan, pertanian, dan tambang yang menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pelaku usaha di Probolinggo. Jika Tiongkok memperketat kebijakan impor atau melakukan efisiensi industri, maka permintaan terhadap produk asal Probolinggo dapat berkurang, memengaruhi volume ekspor dan stabilitas harga komoditas di tingkat petani serta nelayan. Selain berpotensi menurunkan kinerja ekspor, pelemahan ekonomi Tiongkok juga dapat mempengaruhi rantai pasok lokal. Sebagian pelaku industri pengolahan di Probolinggo menggunakan mesin, bahan baku, atau suku cadang impor dari Tiongkok yang harganya bisa naik jika kapasitas produksi di negeri tirai bambu menurun atau terjadi gangguan logistik internasional. Jika Tiongkok mengambil langkah stimulasi ekonomi melalui investasi di luar negeri, Kota Probolinggo berpeluang menarik minat investor Tiongkok yang sedang mencari alternatif pengembangan bisnis di pasar negara berkembang. Kondisi ini bukan hanya ancaman, tetapi juga menawarkan peluang bagi kota yang mampu mempersiapkan infrastruktur dan iklim usaha kondusif. Sektor pengolahan makanan, kerajinan, dan industri rumahan, menggunakan komponen atau kemasan asal Tiongkok. Apabila industri di Tiongkok terpaksa memangkas kapasitas produksi atau menaikkan harga jual demi menutupi penurunan laba, UMKM di Probolinggo berisiko menghadapi kenaikan biaya produksi dan kelangkaan pasokan. Kondisi ini menuntut para pebisnis lokal untuk meninjau ulang sumber bahan baku, mencari alternatif pemasok, atau bahkan melakukan penyesuaian produk agar tetap kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Bagi Pemerintah Kota Probolinggo, langkah antisipatif dapat dilakukan dengan Mendorong peningkatan kualitas produk perikanan dan pertanian melalui sertifikasi internasional, peningkatan teknologi pengolahan, serta perluasan pasar ekspor ke negara alternatif akan membantu mengurangi dampak pelemahan ekonomi Tiongkok. Selain itu diperlukan adanya pengembangan ekosistem industri melalui Kolaborasi Hexahelix dengan melibatkan enam

aktor utama dalam pembangunan atau inovasi, di mana terjadi interaksi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lingkungan hidup.

C. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Kota Probolinggo, yang terletak di pesisir utara Jawa Timur, menghadapi tantangan serius dari dampak perubahan iklim global. Naiknya permukaan laut meningkatkan risiko banjir rob, di wilayah permukiman dan kawasan pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Tembaga. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas bongkar muat barang serta menurunkan produktivitas sektor perikanan, khususnya jika terjadi kerusakan pada infrastruktur pelabuhan dan gudang penyimpanan akibat luapan air laut. Perubahan pola cuaca yang kian ekstrem juga mempersulit perencanaan ekonomi di tingkat lokal, mengingat kesulitan memprediksi masa panen dan ketersediaan bahan baku hasil laut. Perubahan iklim berpotensi memengaruhi ketersediaan ikan di perairan Probolinggo. Peningkatan suhu permukaan laut dapat mendorong ikan bermigrasi ke tempat yang lebih sejuk, sehingga nelayan harus melaut lebih jauh dan mengeluarkan biaya operasional lebih besar. Pola cuaca yang tidak menentu termasuk gelombang tinggi dan badai juga berdampak pada keselamatan aktivitas penangkapan ikan. Hal ini secara langsung memengaruhi pendapatan nelayan, sementara produsen pengolahan ikan di kota dapat menghadapi ketidakstabilan pasokan bahan baku. Pemerintah Kota Probolinggo telah memulai pembangunan infrastruktur pesisir yang lebih tangguh, seperti peningkatan tanggul penahan abrasi dan sistem drainase kota. Rehabilitasi ekosistem pesisir juga dilakukan melalui penanaman mangrove untuk menahan erosi, serta sosialisasi praktik ramah lingkungan bagi pelaku usaha perikanan. Di sisi lain, penguatan kapasitas nelayan dan pelaku UMKM pengolahan ikan lewat pelatihan dan penerapan teknologi adaptasi iklim menjadi kunci untuk menjaga stabilitas rantai pasok di tengah kondisi cuaca yang tidak pasti.

D. KEBIJAKAN PROTEKSIONISME AMERIKA SERIKAT

Kebijakan proteksionisme Amerika Serikat yang ditandai dengan kenaikan tarif impor dan pengetatan standar mutu bisa memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha di Kota Probolinggo. Meski skala ekspor ke pasar AS tidak sebesar daerah industri besar, sektor perikanan terutama pengolahan dan distribusi hasil laut melalui Pelabuhan Tanjung Tembaga tetap berpotensi terkena imbas. Jika persyaratan kualitas semakin ketat atau biaya impor meningkat, minat pelaku dagang di Amerika Serikat terhadap

produk ikan beku atau olahan asal Probolinggo dapat menurun, sehingga memengaruhi volume ekspor dan pendapatan pelaku UMKM setempat. Selain sektor perikanan, pelaku usaha di bidang agribisnis dan hortikultura misalnya pengolahan buah, sayuran, atau produk turunan lainnya turut berhadapan dengan tantangan yang sama. Apabila Amerika Serikat mengeluarkan regulasi baru yang membatasi kuota atau menambah prosedur sertifikasi, biaya kepatuhan bagi eksportir naik, dan produk Probolinggo mungkin kalah bersaing dengan negara-negara yang memiliki perjanjian dagang lebih longgar dengan AS.

E. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)

Dalam rangka dukungan terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, saat ini Kota Probolinggo melalui Laporan Hasil Rating SDGs Kota dalam Program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM For Cities) tahun 2024 menempati posisi ke 11 dari 76 kota yang mengikuti program penilaian dimaksud. Kota Probolinggo mendapatkan skor 65,20 sehingga dikategorikan dalam champion grade sebagai "*The Encourager*" dalam pencapaian SDG's di tingkat pemerintah kota seluruh Indonesia. Pelaksanaan pembangunan periode 2020-2024 terbukti memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Kota Probolinggo dimana sinergitas dan kerja sama lintas sektoral yang melibatkan seluruh elemen masyarakat telah dilakukan sebagai bentuk kebersamaan dan kolaborasi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan di Kota Probolinggo berhasil mewujudkan kesetaraan ekonomi antar kelompok, sektor dan wilayah, menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan khususnya bagi kelompok rentan, mencukupi kebutuhan primer mencakup pangan, pendidikan dan kesehatan, mempermudah akses terhadap lapangan pekerjaan, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik serta melaksanakan pembangunan berbasis *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Adapun intervensi utama daerah yang mendukung pencapaian SDG's dimaksud antara lain :

a. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan BOP PAUD Daerah sebagai upaya menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akses pendidikan. BOSDA dan BOP PAUD Daerah berperan dalam

meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu ;

b. Beberapa aspek penting dalam integrasi BOSDA dan BOP PAUD Daerah dengan pendidikan inklusif dan berkelanjutan meliputi:
   - Pemerataan Kesempatan Pendidikan – BOSDA dan BOP PAUD Daerah membantu meningkatkan angka partisipasi sekolah (meringankan beban biaya pendidikan kepada Masyarakat) ;
   - Peningkatan Mutu Pendidikan – Dana BOSDA dan BOP PAUD Daerah digunakan untuk mendukung operasional sekolah, termasuk penyediaan fasilitas dan peningkatan kualitas pembelajaran ;
   - Mendukung Wajib Belajar 13 Tahun – BOSDA dan BOP PAUD Daerah berkontribusi dalam program wajib belajar dengan memastikan bahwa siswa memiliki akses ke pendidikan yang layak tanpa hambatan ekonomi ;
   - Fasilitas Pendidikan yang Memadai – BOSDA dan BOP PAUD Daerah dapat digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, seperti perpustakaan, laboratorium, dan teknologi pendidikan ;
   - Pendidikan Sepanjang Hayat – BOSDA dan BOP PAUD Daerah juga dapat mendukung program pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang ingin terus belajar.

c. Penjaminan pembiayaan pelayanan Kesehatan gratis berupa kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu melalui :
   - SKTM untuk pembiayaan kesehatan bagi Masyarakat tidak mampu/miskin diluar cakupan BPJS, dapat diklaimkan dengan menunjukkan kartu pendalungan dan atau kartu bestari
   - UHC pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam bentuk bantuan iuran PBPU BP Pemda dan bantuan Iuran PBPU BP Kls. III Mandiri Aktif

d. Membantu rumah tangga miskin memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan (berupa bantuan sosial, Layanan Kesehatan diluar manfaat BPJS (Ambulance rujukan, dll), dan pendidikan (berupa Bantuan Seragam) dengan bentuk kegiatan berupa pemberian Kartu Bestari untuk masyarakat yang masuk DTKS sedangkan Kartu Pendalungan untuk Masyarakat yang tidak masuk DTKS. Untuk Kartu Pendalungan bisa dimanfaatkan Masyarakat untuk:
   - Di bidang pendidikan untuk mendapatkan keringanan biaya sekolah jenjang SMA

- Di bidang Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis diluar manfaat BPJS;

e. Memastikan semua kelompok masyarakat, termasuk yang paling rentan, memiliki perlindungan dan akses terhadap layanan keuangan;
f. Meningkatkan standar hidup masyarakat miskin dan mengurangi kerentanan terhadap bencana.

2.3.2.2 ISU NASIONAL (ASTA CITA dan RPJMN TAHUN 2025-2029)

Kebijakan nasional yang dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia saat ini berlandaskan pada Asta Cita yang dituangkan sebagai Misi Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025. Asta Cita dimaksud merupakan sebuah kerangka visi dan misi yang mencakup delapan agenda besar demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Melalui Asta Cita, pemerintah berupaya mengkokohkan fondasi ekonomi, memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menegakkan hukum dan tata kelola yang baik, serta memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agenda-agenda ini tidak hanya dirancang untuk menjawab tantangan domestik seperti ketimpangan regional, tata kelola infrastruktur, dan transformasi digital tetapi juga untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Dengan pijakan Asta Cita, diharapkan semua lapisan masyarakat, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal, dapat bersinergi dalam menciptakan iklim pembangunan yang kondusif, berdaya saing, dan berkeadilan sosial di seluruh wilayah Tanah Air.



Gambar II-170 Misi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029
Sumber: RPJMN, 2025

- **Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**

  Agenda pertama dalam Asta Cita menegaskan pentingnya memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi berbangsa dan bernegara. Demokrasi dijunjung tinggi dengan menghadirkan ruang partisipasi seluas-luasnya bagi rakyat, sementara penegakan hak asasi manusia (HAM) dipastikan melalui regulasi dan penindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran. Selain itu, pengembangan budaya politik yang sehat dan transparan bertujuan memupuk rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, integritas demokrasi dan penegakan HAM merupakan landasan yang mempersatukan segala lapisan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi tercermin melalui kebijakan partisipatif yang melibatkan warga dalam perencanaan pembangunan daerah, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan forum aspirasi masyarakat lainnya. Pemerintah Kota Probolinggo juga berupaya memastikan perlindungan HAM melalui penyediaan pelayanan publik yang adil dan ramah untuk semua golongan, termasuk kaum difabel. Upaya ini diharapkan dapat membangun iklim sosial yang harmonis sekaligus memperkuat sendi-sendi demokrasi di tingkat lokal.

- **Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**

  Agenda kedua menitikberatkan pada terwujudnya sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh, sekaligus memacu kemandirian bangsa di berbagai sektor strategis. Swasembada pangan, energi, dan air menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas domestik, diikuti pengembangan sektor ekonomi syariah, digital, hijau, serta biru yang diharap mampu memberikan nilai tambah berkelanjutan. Pendekatan ini menyiapkan Indonesia agar lebih tangguh menghadapi dinamika global serta berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keberlanjutan lingkungan. Kemandirian pangan dan energi dapat diwujudkan melalui penguatan sektor perikanan, pengolahan hasil laut, hingga pemanfaatan potensi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Upaya pemerintah kota dalam memajukan teknologi perikanan tangkap dan budidaya turut mendukung konsep ekonomi biru, sementara pemanfaatan lahan perkotaan untuk pertanian hidroponik mendorong kemandirian pangan lokal. Di sisi lain, inisiatif menuju smart city dan penerapan teknologi digital dalam layanan publik sejalan dengan semangat ekonomi digital yang tertuang dalam Asta Cita kedua.

- **Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi**

  Pembangunan infrastruktur yang merata menjadi penopang utama peningkatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Program ini tak hanya mencakup jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, namun juga infrastruktur digital untuk memajukan industri kreatif dan kewirausahaan. Selain itu, peran aktif koperasi di sektor agromaritim ditingkatkan guna memaksimalkan potensi hasil bumi dan perikanan, agar mampu berkompetisi di pasar domestik maupun internasional. Keseluruhannya ditujukan untuk membuka lapangan kerja berkualitas dan menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat. Infrastruktur pelabuhan menjadi kunci vital karena berfungsi sebagai penghubung perdagangan hasil laut dan komoditas lain ke wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Peningkatan kapasitas Pelabuhan Tanjung Tembaga, modernisasi sistem bongkar muat, serta penataan akses jalan kota akan memudahkan distribusi barang dan mendorong tumbuhnya lapangan kerja. Pemerintah kota juga dapat memfasilitasi pelaku industri kreatif lokal dengan ruang pameran, event seni-budaya,

serta dukungan digital marketing. Sedangkan koperasi nelayan dan petani berperan strategis dalam memaksimalkan hasil perikanan dan pertanian perkotaan, sejalan dengan agenda agromaritim industri yang diusung Asta Cita ketiga.

- **Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas**

  Penguatan SDM menjadi elemen krusial untuk menciptakan generasi yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Peningkatan kualitas pendidikan, riset sains, teknologi, dan layanan kesehatan menjadi prioritas, disertai dukungan pada keolahragaan serta penjaminan kesetaraan gender. Selain itu, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas di bidang ekonomi, sosial, dan politik diharapkan memperluas basis partisipasi publik. Semua ini bertujuan membentuk SDM unggul yang mampu menggerakkan roda pembangunan nasional. Peningkatan SDM diwujudkan melalui program beasiswa, pelatihan keterampilan kerja, dan pembangunan pusat-pusat kegiatan pemuda. Dinas terkait juga terus memperkuat kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit daerah untuk memastikan akses yang adil dan merata. Pemerintah kota berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk memperkenalkan teknologi dan riset sederhana kepada generasi muda, termasuk siswa di tingkat SMA/SMK. Dorongan bagi wirausaha perempuan dan perlindungan hak bagi kaum difabel menjadi bagian penting dari kebijakan inklusif, sehingga semua kalangan dapat berkontribusi dalam kemajuan Probolinggo.

- **Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri**

  Hilirisasi industri menjadi cara efektif untuk menambah nilai bagi sumber daya alam, memaksimalkan manfaat ekonomi, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Melalui agenda ini, pemerintah mendorong pembangunan pabrik pengolahan dan rantai pasok terpadu, sehingga produk dalam negeri tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah. Dengan meningkatkan standar mutu dan teknologi pengolahan, Indonesia dapat memperluas pasar ekspor sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor produk olahan bernilai tinggi. Potensi hilirisasi di Kota Probolinggo tampak jelas pada sektor perikanan dan pengolahan hasil laut. Banyak hasil tangkapan langsung dikirim ke luar daerah, inisiatif hilirisasi bisa mendorong pendirian unit pengolahan dan pengemasan modern di sekitar Pelabuhan Tanjung Tembaga. Begitu pula di sektor pertanian perkotaan, pengembangan industri pengolahan hortikultura

dapat memberikan nilai tambah sebelum didistribusikan. Dengan begitu, lapangan kerja baru terbuka dan daya saing produk Probolinggo di pasar domestik maupun internasional meningkat.

- **Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan**

  Kebijakan "membangun dari desa" menekankan pentingnya inisiatif lokal dan pemberdayaan komunitas akar rumput. Melalui perbaikan infrastruktur pedesaan, dukungan pembiayaan UMKM, dan pengembangan potensi lokal, pemerintah berusaha mengatasi ketimpangan ekonomi antara kota dan desa. Upaya ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh pelosok negeri. Pendekatan pembangunan dari bawah tetap relevan untuk mendukung komunitas wilayah pinggiran dan kampung-kampung nelayan. Pemerintah Kota dapat mendorong pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) bagi nelayan, peningkatan akses modal bagi UMKM rumahan, serta pemberdayaan kaum perempuan di sentra-sentra produksi makanan tradisional. Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir dan kawasan padat penduduk, agenda pemberantasan kemiskinan akan lebih efektif dan menyentuh lapisan terbawah di Kota Probolinggo.

- **Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan**

  Reformasi politik, hukum, dan birokrasi merupakan agenda yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kinerja lembaga-lembaga negara. Pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan menjadi prioritas guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan melindungi generasi muda dari dampak negatif perilaku menyimpang. Dengan menciptakan tata kelola yang bersih dan kredibel, pemerintah membuka jalan bagi partisipasi publik yang luas dan kepercayaan masyarakat yang lebih kuat terhadap aparatur negara. Reformasi birokrasi dapat diwujudkan melalui pemangkasan prosedur perizinan usaha, digitalisasi layanan administrasi, serta peningkatan pengawasan internal. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah lewat mekanisme transparansi—seperti portal informasi publik—akan menekan potensi penyelewengan. Upaya kepolisian dan instansi terkait pun diperkuat untuk membasmi peredaran narkoba dan aktivitas ilegal di kawasan

pelabuhan. Dengan birokrasi bersih dan penegakan hukum yang tegas, Probolinggo dapat menjadi kota yang aman, tertib, sekaligus ramah investasi.

- **Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya,** serta **peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur**

  Agenda kedelapan menitikberatkan pada keseimbangan antara pembangunan, pelestarian lingkungan, dan harmoni sosial. Pelibatan masyarakat lokal dalam menjaga budaya, adat istiadat, dan kelestarian alam ditekankan agar pertumbuhan ekonomi tidak merusak ekosistem maupun merusak hubungan sosial. Toleransi antarumat beragama juga menjadi landasan menjaga kerukunan di tengah keberagaman Indonesia, sehingga tercipta masyarakat yang aman dan sejahtera. Di Kota Probolinggo, upaya menjaga keharmonisan lingkungan terlihat dari inisiatif penanaman mangrove di kawasan pesisir untuk menanggulangi abrasi dan banjir rob. Pemerintah kota juga mengembangkan destinasi wisata bahari yang menekankan edukasi lingkungan, sehingga menumbuhkan kesadaran pelestarian alam bagi pengunjung. Sementara itu, kehidupan sosial yang majemuk di Probolinggo ditopang oleh kerukunan umat beragama, tampak dalam kegiatan keagamaan bersama maupun dialog antar-komunitas yang rutin diadakan. Melalui dukungan semua pihak, kota ini dapat bertransformasi menjadi wilayah yang tumbuh secara ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian alam dan keharmonisan sosial.

Tabel II.79 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat RPJMN Tahun 2025-2029

17 PROGRAM PRIORITAS	8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
Pemberantasan Kemiskinan	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara

17 PROGRAM PRIORITAS	8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif: Karakteristik Mandiri Lainnya	
Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya bagi Warga dan Ketahanan Ekonomi	
Menstabilkan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendidikan, dan Perawatan Rumah Ibadah	
Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Berdasarkan RPJMN 2025-2029 indikasi Isu Nasional fokus pada wilayah Pulau Jawa adalah Sebagai Berikut :

1. Inefisiensi dalam Kawasan Perkotaan dan Metropolitan

   Kota Probolinggo memiliki potensi strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di pesisir utara Jawa Timur, inefisiensi masih terlihat dalam pelayanan perkotaan. Misalnya, integrasi transportasi umum antarwilayah belum optimal, sehingga pergerakan penduduk dan distribusi barang sering kali terhambat. Dampak dari ketidakterhubungan sistem transportasi ini diperparah oleh terbatasnya ruang terbuka

hijau, yang berpengaruh pada kualitas lingkungan dan kenyamanan kota. Jika tidak segera diatasi, inefisiensi ini dapat mengurangi daya saing Kota Probolinggo sebagai destinasi investasi dan berdampak pada kualitas hidup masyarakat perkotaan di sekitarnya serta distribusi barang dan jasa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota.

2. Kesenjangan Infrastruktur Logistik dan Ketersediaan Infrastruktur Sosial

   Pelabuhan Tanjung Tembaga andalan Kota Probolinggo sebagai simpul utama logistik, namun infrastruktur pendukung seperti akses jalan penghubung antar-kawasan dan fasilitas bongkar muat masih perlu peningkatan. Kesenjangan ini menyebabkan biaya distribusi barang cenderung tinggi, terlebih ketika pasokan komoditas pertanian atau hasil laut membutuhkan penanganan rantai dingin (*cold chain*) yang memadai. Selain itu, keterbatasan fasilitas sosial seperti terminal terpadu, area pergudangan, dan layanan kesehatan di area pelabuhan menjadikan Kota Probolinggo kurang maksimal dalam menarik investor dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa bagian selatan maupun kawasan lain yang terhubung dengan kota Probolinggo sebagai pusat kegiatan wilayah dalam konstelasi perwilayahan Provinsi Jawa Timur khususnya untuk Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang.

3. Kerentanan Terhadap Bencana Alam

   Meskipun Kota Probolinggo tidak berada di pesisir selatan Jawa yang rawan gempa bumi dan tsunami, risiko bencana tetap menghantui wilayah ini dalam bentuk banjir, penurunan muka tanah, dan dampak erupsi gunung berapi di sekitarnya. Bencana banjir dapat menghambat aktivitas ekonomi khususnya jika terjadi banjir rob di wilayah pesisir utara yang lebih rendah, di wilayah pelabuhan sebagai simpul transportasi dan ekonomi, serta merusak infrastruktur strategis di kawasan pesisir. Oleh sebab itu, penataan ruang kota yang mempertimbangkan peta rawan bencana serta upaya penanganan perubahan iklim perlu diprioritaskan untuk meminimalisir dampak kerugian.

4. Kesenjangan Keterampilan dan Ketidaksesuaian Pendidikan-Industri

   Ketimpangan antara keterampilan lulusan SMA/SMK dan kebutuhan industri masih sering ditemui. Sektor perikanan, jasa, dan pengolahan hasil laut yang menjadi andalan kota acap kali kesulitan mendapatkan tenaga kerja terampil yang mampu mengoperasikan peralatan modern atau memahami prosedur ekspor-impor. Di lain pihak, lulusan SMK dan SMA justru kesulitan memperoleh pekerjaan karena belum dibekali kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal dan dunia usaha.

Akibatnya angka pengangguran tetap tinggi, sehingga memerlukan sinergi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan pelaku usaha untuk mengatasi mismatch ini.

5. Prevalensi *Stunting*, *Wasting*, dan *Underweight* yang Masih Tinggi

   Kota Probolinggo merupakan daerah perkotaan dengan akses pangan lebih terbuka, persoalan gizi buruk seperti *stunting*, *wasting*, dan *underweight* masih ditemukan. Faktor pemicunya beragam, mulai dari rendahnya pengetahuan gizi pada keluarga, pola konsumsi yang tidak seimbang, hingga terbatasnya akses terhadap makanan bernutrisi di area kantong kemiskinan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Probolinggo untuk memperkuat program intervensi gizi, promosi kesehatan di posyandu, serta penyuluhan pola asuh anak di lingkungan padat penduduk agar tumbuh kembang anak lebih optimal.

6. Beban Kasus Tuberkulosis (TBC) yang Tinggi

   Sebagai kota dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat, Probolinggo juga menghadapi tantangan beban kasus TBC (Tuberkulosis). Permukiman padat dan kurangnya sirkulasi udara yang sehat dapat mempercepat penularan penyakit menular ini. Meski telah ada upaya screening dan pengobatan gratis di puskesmas, masih diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan pengobatan tuntas. Keterlibatan kader kesehatan dan edukasi berbasis komunitas menjadi kunci untuk menurunkan prevalensi TBC, sehingga masyarakat Kota Probolinggo dapat hidup lebih sehat dan produktif.

7. Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi

   Tingkat kemiskinan di Kota Probolinggo relatif lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain di Jawa, namun masih terdapat kantong-kantong kemiskinan, khususnya di kawasan pesisir dan permukiman informal. Program pengurangan kemiskinan yang bersifat top-down kerap kurang tepat sasaran karena tidak terintegrasi dengan potensi ekonomi lokal, seperti pengolahan hasil laut dan usaha kreatif. Untuk itu, diperlukan inovasi pemberdayaan ekonomi dan kolaborasi lintas sektor, misalnya melalui pembentukan klaster UMKM berbasis komunitas atau pelatihan kewirausahaan yang menyasar kelompok rentan, agar program penanggulangan kemiskinan lebih efektif dan berkelanjutan.

Sementara itu sisi potensi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 fokus pada wilayah Jawa adalah sebagai berikut :

1. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kota Probolinggo memang tidak memiliki areal pertanian seluas kabupaten-kabupaten lain di Pulau Jawa. Namun, kontribusinya terhadap ketahanan pangan tetap signifikan melalui sektor pertanian dan perikanan yang sejalan dengan capaian Jawa di bidang produksi pertanian dan perikanan nasional. Selain itu, sejumlah kawasan pinggiran Kota Probolinggo juga mengembangkan lahan pertanian kota (*urban farming*) dan hortikultura untuk memasok kebutuhan lokal. Dengan demikian, Probolinggo berperan menjaga rantai pasok pangan di wilayah setempat, sekaligus mendukung ketahanan pangan yang menjadi andalan Pulau Jawa.

2. Potensi Ketahanan Energi

   Kota Probolinggo, walau tidak memiliki cadangan gas bumi atau minyak bumi yang besar, tetap dapat memanfaatkan potensi energi bersih seperti tenaga surya dan angin. Wilayah pesisir utaranya, dengan paparan sinar matahari melimpah serta embusan angin laut yang stabil, berpeluang dikembangkan sebagai sumber energi terbarukan skala kecil. Integrasi penggunaan panel surya di gedung pemerintahan maupun penerangan jalan umum dapat mendukung kebijakan hijau. Selain itu, kawasan pesisir juga berpotensi menerapkan teknologi energi laut, jika program percontohan energi terbarukan terus diperluas oleh pemerintah pusat dan daerah.

3. Industri Pengolahan

   Porsi industri pengolahan Probolinggo tidak sebesar pusat manufaktur lain di Pulau Jawa, sektor ini tetap menjadi tulang punggung ekonomi kota, khususnya industri pengolahan hasil pertanian serta perikanan dan kelautan. Ikan beku, seafood olahan, hingga camilan berbasis rumput laut menjadi komoditas andalan, didukung keberadaan Pelabuhan Tanjung Tembaga sebagai pintu ekspor maupun distribusi domestik. Jika ekosistem industri pengolahan di kota ini terus dikembangkan—misalnya lewat kolaborasi dengan kabupaten sekitar—Probolinggo berpotensi semakin terintegrasi dalam rantai pasok industri Pulau Jawa yang berkontribusi besar bagi perekonomian nasional.

4. SDM Terampil

   Kota Probolinggo diuntungkan oleh lokasinya yang dekat dengan beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur, seperti di Surabaya, Malang, maupun Jember. Hal ini memungkinkan tenaga kerja muda dan terampil untuk direkrut oleh perusahaan-perusahaan di sektor perikanan, perdagangan, dan jasa pelabuhan. Pemerintah kota juga mendorong kerja sama dengan lembaga pendidikan vokasi guna menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri lokal. Dengan meningkatkan keterampilan

tenaga kerja, Probolinggo dapat berkontribusi pada penyerapan lulusan perguruan tinggi yang berpotensi terus bertambah seiring pesatnya perkembangan pendidikan di Pulau Jawa.

5. Perkotaan

   Sekitar 56 persen penduduk Pulau Jawa tinggal di perkotaan, dan Kota Probolinggo menjadi salah satu kota pesisir yang turut mengalami arus urbanisasi. Pendatang dari daerah sekitar membawa kebutuhan akan lapangan kerja, hunian layak, dan fasilitas umum. Di sisi lain, konsentrasi penduduk perkotaan berperan besar sebagai motor pertumbuhan ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM, ritel modern, dan industri kreatif. Dengan pengelolaan tata ruang yang baik, Probolinggo dapat mengoptimalkan peran perkotaan untuk menjadi pusat layanan publik, perdagangan, dan perikanan, sehingga menyeimbangkan kebutuhan penduduk yang semakin bertambah.

6. Konektivitas Jalan, Jalur Kereta, Pelabuhan, dan Bandara

   Kota Probolinggo telah terhubung jaringan jalan nasional dan jalur kereta api lintas utara Jawa, peningkatan kapasitas dan integrasi moda transportasi masih dibutuhkan untuk mendukung perdagangan regional. Keberadaan Pelabuhan Tanjung Tembaga memudahkan akses produk laut dan pertanian ke berbagai daerah, namun sinkronisasi dengan jalur kereta dan jalan darat di kota perlu ditingkatkan. Program percepatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi membantu Probolinggo memanfaatkan fasilitas pelabuhan secara maksimal, termasuk potensi distribusi barang ke bandara-bandara di Jawa Timur.

7. Jangkauan Jaringan Seluler 4G

   Dengan cakupan 4G yang mendekati 100 persen di Pulau Jawa, Kota Probolinggo memiliki peluang besar untuk memajukan ekonomi digital. Pelaku UMKM, seperti pengolah hasil laut, pengrajin batik khas Probolinggo, dan bisnis kuliner, dapat menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform *e-commerce* atau media sosial. Selain itu, Pemerintah Kota Probolinggo bisa memanfaatkan konektivitas digital untuk memperkuat layanan publik, misalnya dengan aplikasi pengaduan online, pelayanan publik terintegrasi dengan TI, hingga edukasi daring. Ketersediaan internet yang andal merupakan modal utama untuk akselerasi pembangunan berbasis teknologi.

8. Sistem Interkoneksi Kelistrikan Jamali

   Sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) yang berkontribusi terhadap 70 persen produksi energi listrik di Indonesia memastikan pasokan listrik yang relatif stabil di Kota Probolinggo. Kondisi ini menguntungkan pelaku industri dan sektor jasa, karena dapat

beroperasi tanpa khawatir akan pemadaman berkala. Dengan kelistrikan yang andal, Kota Probolinggo mampu mengoptimalkan pengembangan industri pengolahan berorientasi ekspor dan industri kreatif yang bergantung pada teknologi. Selain itu, stabilitas suplai listrik membantu pemerintah kota mendorong inisiatif *smart city*, yang bergantung pada infrastruktur digital untuk pelayanan publik.

2.3.2.3 ISU REGIONAL

A. ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2029

Merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2030, terdapat enam isu strategis daerah yang akan memberikan pengaruh pada pembangunan di Jawa Timur dan Kota Probolinggo lima tahun kedepan. Keenam isu strategis tersebut adalah:

1. **Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah**

   Pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah meliputi peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar. Pengembangan investasi berbasis sumber daya lokal di Provinsi Jawa Timur masih menghadapi beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi dan pembangunan daerah.

   Meskipun Provinsi Jawa Timur memiliki banyak potensi dan sumber daya lokal yang beragam, termasuk sektor pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata, namun potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dalam rangka pemerataan ekonomi, dibutuhkan percepatan keseimbangan pembangunan antara koridor pertumbuhan wilayah utara-selatan dan kepulauan sebagai upaya mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. Secara umum, Disparitas di Jawa Timur disebabkan oleh keterbatasan aksesibilitas dan belum meratanya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di Jawa Timur (transportasi, sumber daya air, dan layanan dasar), serta belum efektifnya implementasi konsep pengembangan wilayah yang ada di Jawa Timur seperti Agropolitan, Minapolitan, Pariwisata, Industri, dan sebagainya.

2. **Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk**

pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program ekonomi dan kewirausahaan serta program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, sehingga yang memerlukan pendekatan yang holistik dalam upaya untuk mengatasinya. Kemiskinan bisa disebabkan oleh berbagai faktor kompleks. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan meliputi PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kenaikan Harga Barang Secara umum (Inflasi) dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi investasi Jawa Timur yang meningkat 1,5 persen tahun 2024 pada kondisi perekonomian dunia yang dinamis juga belum dapat menyerap tenaga kerja secara optimal di pasar kerja formal. Dibutuhkan upaya kompleks dalam membuka kesempatan kerja yang luas dan berkualitas bagi masyarakat.

3. **Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas.**

   Masalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) karena layanan pendidikan yang tidak memadai adalah isu serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kurangnya layanan pendidikan yang baik dapat memperbesar kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial masyarakat. Perubahan demografi menyebabkan kebutuhan akan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya menjadi terbatas. Keterbatasan akses ini menyebabkan sulitnya kendali pemerintah terhadap konflik sosial-ekonomi yang terjadi, tingkat pendidikan yang terdominasi di level menengah, serta marginalisasi kelompok rentan (terutama wanita dan kaum tidak berkemampuan). Ketika kualitas SDM masih belum dapat bersaing, fenomena unemployment dan under employment sangat rentan berkembang dan memicu permasalahan-permasalahan sosial-ekonomi yang lebih kompleks dan rumit.

4. **Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik**

   Penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses birokrasi yang rumit dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, sehingga penyederhanaan prosedur dan pelayanan yang efisien sangat penting. Selain itu Provinsi Jawa Timur perlu akan adanya Kepemimpinan lokal yang

berwawasan global berlandaskan kearifan lokal yang dapat menggerakkan masyarakatnya untuk berwawasan global namun tetap berpijak pada landasan nilai-nilai budayanya sebagai kearifan lokal.

5. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan.**

Lingkungan hidup beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Adanya peningkatan jumlah penduduk menyebabkan ketersediaan sumber daya alam menjadi semakin terbatas seiring dengan meningkatnya kebutuhan makhluk hidup melebihi ketersediaan sumber daya alam yang ada. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Peningkatan resiko bencana dalam diidentifikasi memiliki keterkaitan akar masalah dengan beberapa hal penting yaitu: peningkatan kerentanan terkait dampak perubahan iklim, kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung penanggulangan bencana, serta alih fungsi lahan. Dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, ekonomi dan kesehatan masyarakat dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Pelestarian warisan budaya lokal memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Tradisi agraris, arsitektur ramah lingkungan, serta sistem peringatan dini berbasis budaya mengandung nilai-nilai konservasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

6. **Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani**

Kedaulatan Pangan Jawa Timur terkonfirmasi dari tingginya kontibusi komoditas agro (pertanian dalam arti luas) Jawa Timur terhadap nasional, sehingga menjadi lumbung pangan nasional. Kebutuhan pangan di Jawa Timur hampir seluruhnya dapat dipenuhi dari produksi domestik. Surplus komoditas pangan pertanian di Jawa Timur selain didukung potensi sumber daya alam yang sesuai, juga sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur pendukung yang cukup baik.

Pertumbuhan NTP tahunan pada beberapa kurun waktu ini, selain terdorong dari naiknya harga beras, juga ditopang dari kondisi makro ekonomi pedesaan yang meningkat. Peningkatan kesejahteraan petani ini perlu dipertahankan lebih lanjut dengan upaya menjaga stabilitas harga komoditas pertanian, meningkatkan efisiensi

produksi melalui intensifikasi dan penguatan saprodi hulu produksi, dan membuat nilai tambah hilir olahan produk pangan dan pemasaran pertanian di tingkat petani.

B. VISI DAN MISI PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2029

Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun kebelakang (2019-2024) menjadi Provinsi terbesar kedua setelah Jakarta dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai Langkah taktis dengan pendekatan kolaboratif mampu mengelola isu-isu strategis mencapai kinerja yang terbaik. Atas dasar tersebut dan memperhatikan keselarasan dengan Visi Misi nasional tahun 2024-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 di bawah kepemimpinan Khofifah-Emil telah ditetapkan Visi Pembangunan Jawa Timur tahun 2025-2030 **"BERSAMA JAWA TIMUR MAJU YANG ADIL, MAKMUR, UNGGUL, DAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045".**

Sedangkan untuk Misi Pembangunan terdapat 9 (Sembilan) Misi yang disebut Nawa Bhakti Satya, yaitu:

1) Jatim Sejahtera, Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan melalui perlindungan sosial yang adaptif, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pedesaan dengan pendekatan lintas sektoral-spasial berbasis data terpadu.
2) Jatim Kerja, Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan, iklim investasi, dan stabilitas ekonomi.
3) Jatim Akses, Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.
4) Jatim Cerdas, Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
5) Jatim Sehat, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC).
6) Jatim Berkah Amanah, Memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, berdaya guna, dan partisipatif.

7) Jatim Agro, Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi, pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan nasional.
8) Jatim Harmoni, Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif melalui pengembangan nilai-nilai kesalehan sosial, berjiwa pancasila, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni, budaya dan prestasi olahraga.
9) Jatim Lestari, Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi melalui peningkatan kualitas lingkungan dan ketahanan iklim dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan dan percepatan pengelolaan isu strategis serta pencapaian Misi, pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadikan Nawa Bakti sebagai program prioritas dengan berbagai macam fokus kegiatan.

Program Kerja Prioritas Jatim Sejahtera, merupakan program yang difokuskan untuk menunjang keberhasilan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan PKH Plus, Klinik BUMDESA, Desa Devisa, Jatim Puspa Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, Bantuan Sosial bagi Miskin Ekstrem, Keluarga Penerima Manfaat Jawa Timur Wani Sejahtera, Perempuan Tangguh Mandiri Jatim Wani Sejahtera, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur Wani Sejahtera, elektrifikasi, rutilahu, jambanisasi, Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, Peti Koin Bermantra, Pengurangan Beban 26 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pemberdayaan BUMDesa, Desa Berdaya, Tali Asih Perintis Kemerdekaan.

Program Prioritas Jatim Kerja, dengan fokus menuju keberhasilan upaya memperluas lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan menjaga iklim investasi serta stabilitas ekonomi melalui kegiatan Millenium Job Centre, EkoTren-One Pesantren One Product, YC2 (Youth Creativepreneur Centre), Job Market Fair, Pelatihan Kerja dan Revitalisasi UPT BLK & MTU, Promosi Dagang dan Investasi, SALEHA (Sadar Legalitas Berusaha), Stabilisasi Harga, Pemuda Wirausaha, Koperasi Sektor Riil , PROKESRA & DAGULIR, Klinik Investasi, Penguatan Daya Saing Produk, Cerdig (Cerdas Digital), jatim infinity, ekosistem halal.

Program Kerja Prioritas Jatim Akses, sebagai program yang difokuskan untuk menunjang keberhasilan perkuatan konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan dengan kegiatan Trans Jatim Plus, Trans Laut Jatim, Dukungan Percepatan Pembangunan Pansela (Jalan Lintas Pantai Selatan),

Mudik Balik Gratis, Pembangunan & Pengembangan Bandara, Pembangunan & Pengembangan Terminal Tipe B, Pemenuhan Alat Keselamatan Jalan dengan teknologi terbaru, Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang, Penanganan Jalan & Jembatan.

Program Kerja Prioritas Jatim Cerdas yang difokuskan untuk menunjang keberhasilan perkuatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua yang berkualitas, merata, dan berkeadilan maka dirumuskan kegiatan Jatim World Class Education, Beasiswa Santri Unggul, East Java Centre of Literacy, BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan), Revitalisasi SMK melalui Sekolah Pengampu/ Pengimbas, BOSDA MADIN, Bantuan SMK Jurusan Prioritas, Pendidikan Kesetaraan vokasi (kejar paket), Double Track, MILEA, Sekolah Boarding, Peningkatan Kualitas Sarpras Pendidikan, Beasiswa S1, S2, & S3 Guru Madin, Beasiswa S1 Ma'had Aly, Beasiswa Al-Azhar Kairo, Peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, Peningkatan Kesejahteraan Kinerja Guru Non PNS jenjang TK/SD/SMP, Peningkatan Kesejahteraan Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS.

Program Kerja Prioritas Jatim Sehat, fokus untuk menunjang keberhasilan perkuatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan layanan kesehatan untuk semua yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC) maka dirumuskan kegiatan Jatim World Class Hospital Collaboration, KIPA (Kesehatan Inklusif, Preventif dan Aksesibel), Buaian (Bunda Anak Impian), Mental Wellness & Happiness Service, Pelayanan Kesehatan Bergerak , SAJADAH (Santri Jatim Sehat & Berkah), Desa Sehat, Penguatan RSU & RSUD Rujukan di 5 Koridor, KOPIPU (Konseling dari Pintu ke Pintu), TANTISTAS (Pelayanan Kesehatan gratis & berkualitas).

Program Kerja Prioritas Jatim Berkah Amanah, untuk menunjang keberhasilan perkuatan tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila dengan kegiatan Birokrasi Transformatif 4.0, SATRIA ROPEM (Sistem Aplikasi Terpadu Pemerintahan dan Solusi Inovatif dalam meningkatkan pelayanan tata kelola pemerintahan yang baik), Cakrawala Birokrasi, Sidbankumda Jatim (Sistem Informasi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin melalui OBH (Organisasi Bantuan Hukum), Semesta Bangkom (Sistem Manajemen e-Sertifikat Pengembangan Kompetensi), ASN DHAHAR NGOPI (Tiada hari tanpa Pengembangan Kompetensi),

Satu Data Jawa Timur, Maja Digi, Sijalinmaja (Sistem Integrasi Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur), Klinik Semangat (Klinik Solusi Bersama-sama dengan Inspektorat), ATLAS (Sistem Informasi Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat), ASKME (Audit Sistem Kearsipan Manajemen E-Arsip), Jaguar Jatim (Jaga Ruang Siber).

Program Kerja Prioritas Jatim Agro, dengan fokus menunjang keberhasilan peningkatan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional. maka dirumuskan kegiatan Youth Agrifuture-Hub, Hilirisasi Dan Korporasi Pertanian (Agri-Industri Pedesaan), Jatim Agro-Hub (Lumbung Pangan), Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP), Penanganan Banjir, Asuransi Petani, Kemandirian Pangan.

Program Kerja Prioritas Jatim Harmoni, difokuskan untuk menunjang keberhasilan upaya terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga melalui kegiatan SENIWARIS (Sentra Penguatan Seniman, budayawan & warisan adat), Kenduri Kebhinekaan, Kopilaborasi (Ngopi dan Kolaborasi Serap Aspirasi) Pustaka Jatim, Tunjangan Kehormatan Hafidz Hafidzoh, Tunjangan Kehormatan Imam Masjid di Pesisir & luar terluar, Tunjangan Kehormatan Juru Pelihara Cagar Budaya, Pengembangan Shelter Keluarga PMI, Vocational Training pasca kepulangan PMI Wanita, Penghargaan bagi Pelaku Olahraga Berprestasi, Kualitas dan ketahanan keluarga, Pemenuhan Hak Anak serta perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pelestarian Naskah Kuno , SIJALINMAJA (Sistem Integrasi Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur), JATIMPURA (Jawa Timur Pusat Arsip, Memori dan Peradaban).

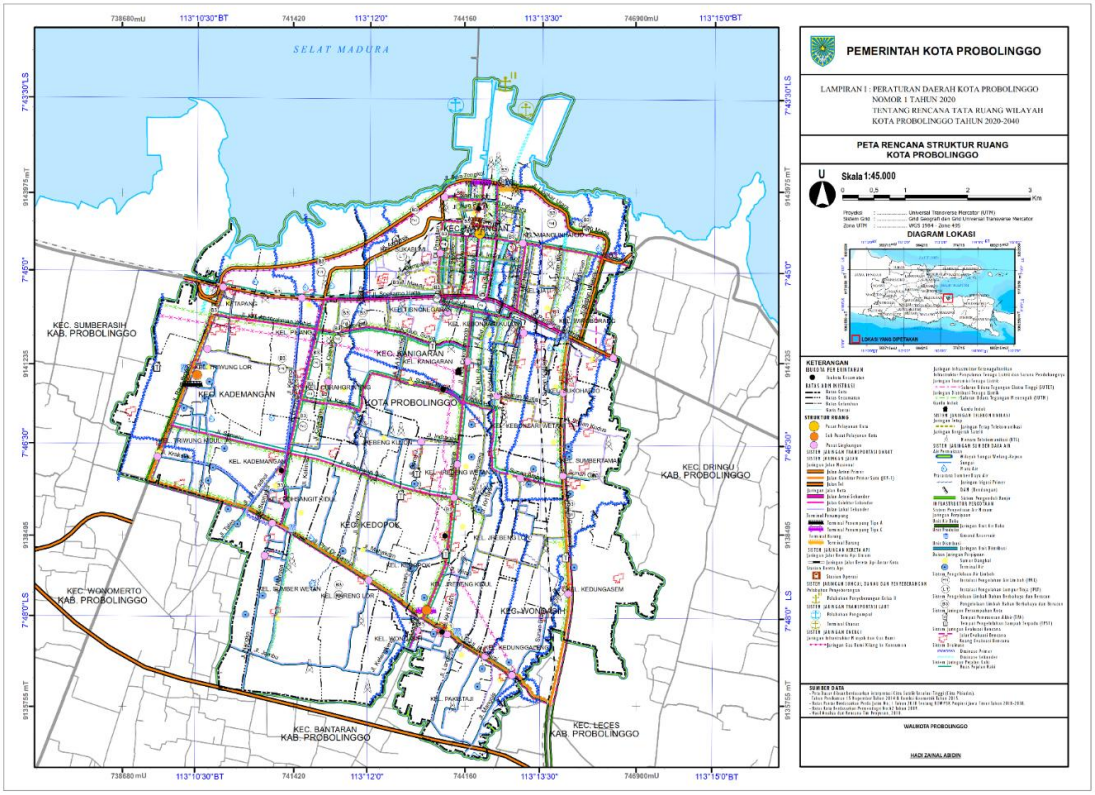
Program Kerja Prioritas Jatim Lestari, fokus dalam menunjang keberhasilan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral dengan kegiatan BERSERI (Bersih dengan Renewable Energy), Dewi Cemara , Mangrove Lestari, PESTANA (Pesantren Tanggap Bencana), Destana (Desa Tangguh Bencana), Pemenuhan Kebutuhan Dasar Darurat Bencana, Pemulihan Sarana Prasarana Pasca Bencana, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, Akses Sanitasi Layak, Penanganan Desa Rawan

kekeringan, DAS Berkualitas, DETIK (Desa Tanggap Iklim), Sagara Kita, BERSUMPAH (Bersih Sungai dari Sampah), Desa Berseri (Bersi dan Lestari).

2.3.2.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PROBOLINGGO

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. RTRW merupakan wujud suatu dokumen perencanaan yang mencangkup suatu wilayah dengan memperhatikan berbagai aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dalam menentukan struktur ruang, pola ruang serta berbagai potensi wilayah yang dapat dijadikan sebuah kawasan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan disekitarnya dalam wilayah. Tujuan penataan ruang Kota Probolinggo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 adalah adalah mewujudkan ruang wilayah Kota Probolinggo berbasis perdagangan dan jasa, industri dan transportasi sebagai pusat kegiatan wilayah yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang meliputi kebijakan dan strategi: struktur ruang wilayah kota, pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis wilayah kota. Selanjutnya kebijakan dan strategi tersebut akan diterjemahkan dalam rencana (struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis) serta indikasi program sebagai operasionalisasi kebijakan dan strategi.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota serta untuk mengintegrasikan wilayah kota yang akan dituju sampai dengan akhir masa perencanaan (20 tahun). Berikut gambaran Peta Struktur Ruang Wilayah Kota Probolinggo:



Gambar II-171 Peta Struktur Ruang Wilayah Kota Probolinggo
Sumber: RTRW Kota Probolinggo Tahun 2020-2040

Rencana struktur ruang wilayah Kota Probolinggo terbentuk dari simpul (node) dan jaringan (line) yang menjadi pembentuk atau gambaran citra Kota Probolinggo. Simpul-simpul sebagai lokasi-lokasi dominasi aktivitas dihubungkan dengan jaringan khususnya jaringan jalan. Secara keruangan Kota Probolinggo berkembang mengikuti jaringan jalan dengan pola jaringan jalan berupa grid khususnya pada pusat kota. Sumbu imajiner Kota Probolinggo berada pada satu garis yang menghubungkan Pelabuhan – Benteng – Alun-Alun – Jalan Suroyo – KODIM. Pada perkembangannya aktivitas fisik berkembang pesat di sekitar sumbu tersebut dan pada akhirnya juga berkembang ke arah selatan khususnya di sepanjang Jalan Cokroaminoto dan Jalan Mastrip. Rencana struktur ruang wilayah Kota Probolinggo terdiri atas:

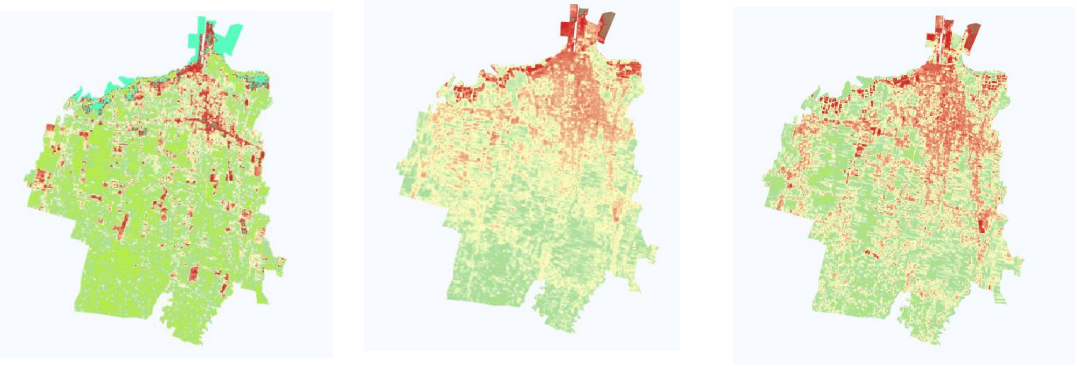
1. Pusat kegiatan di wilayah kota yang meliputi:
    a. Pusat Pelayanan Kota yang berfungsi untuk melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional di Kecamatan Kanigaran dan Mayangan.
    b. Sub Pusat Pelayanan Kota yang berfungsi untuk melayani sub-wilayah kota yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan kecamatan meliputi: Sub

Pusat Pelayanan Kota A di Kecamatan Kademangan, Sub Pusat Pelayanan Kota B di Kecamatan Wonoasih dan Kedopok.

c. Pusat Lingkungan yang berfungsi melayani skala lingkungan wilayah kota, berada di masing masing kelurahan.

2. Sistem jaringan prasarana yang meliputi:
   a. Sistem jaringan transportasi.
   b. Sistem jaringan energi.
   c. Sistem jaringan telekomunikasi.
   d. Sistem jaringan sumber daya air.
   e. Infrastruktur perkotaan.

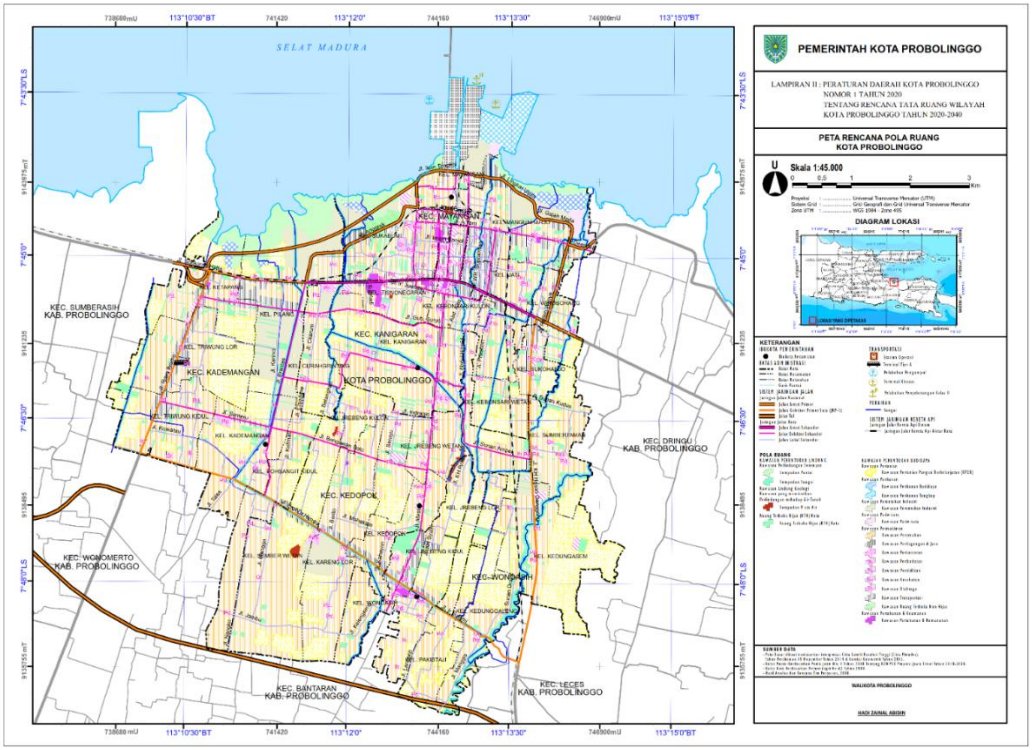
Secara keruangan konsentrasi aktivitas sebagai pembentuk penggunaan lahann di Kota Problinggo cenderung terpusat terkonsentrasi di Kecamatan Mayangan dan Kanigaran sebagai pusat kota dengan kepadatan penduduk dan bangunan yang tinggi serta didominasi oleh aktivitas di sektor sekunder. Sebaliknya Kecamatan Kademangan, Kedopok dan Wonoasih memiliki kepadatan yang relatif rendah dengan dominasi kegiatan di sektor primer khususnya pertanian. Pola penggunaan lahan tersebut menjadikan morfologi Kota Probolinggo cenderung monocentric dimana bentuk ini hanya memiliki satu pusat pelayanan. Apabila di wilayah utara berkembang perumahan dengan kepadatan tinggi dan berkarakteristik kekotaan maka di wilayah selatan khususnya di Kecamatan Wonoasih berkembang perumahan yang lebih berkarakteristik pedesaan yang pada umumnya mengelompok dalam suatu kawasan dan dikelilingi oleh kawasan pertanian atau berkembang secara linier di sepanjang jalan utama yang ada. Kecenderungan tersebut dapat dilihat pada trend penggunaan lahan Kota Probolinggo sebagai berikut.



Penggunaan Lahan 1994 | Penggunaan Lahan 2015 | Penggunaan Lahan 2022

Gambar II-172 Penggunaan Lahan di Kota Probolinggo
Sumber: Interpretasi Citra Landsat, 2023

Berdasarkan gambaran diatas utamanya pada tahun 2015 dan tahun 2022 dalam kurun waktu 7 tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana wilayah yang berkategori sedang dengan warna kuning dengan cepat berubah menjadi warna merah. Hal ini perlu diperhatikan dalam kurun waktu RPJMD 2025-2029 sehingga pertumbuhan penduduk utamanya penggunaan lahan berjalan sesuai peruntukannya akan tetapi pelayanan perumahan dan tempat tinggal bagi masyarakat Kota Probolinggo masih terpenuhi secara baik. Adapun peruntukan ruang telah ditentukan dalam rencana pola ruang wilayah Kota Probolinggo Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. Berikut gambaran Peta Pola Ruang Wilayah Kota Probolinggo:



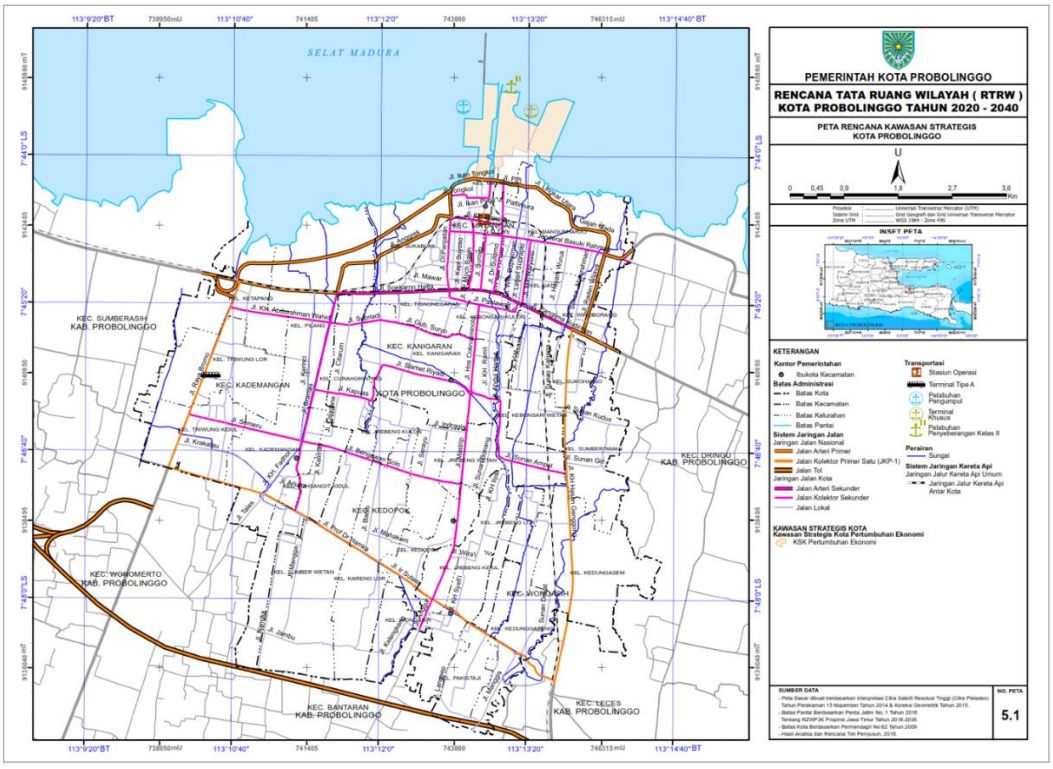
Gambar II-173 Peta Pola Ruang Wilayah Kota Probolinggo
Sumber: RTRW Kota Probolinggo Tahun 2020-2040

Gambar diatas merupakan rencana pola ruang, dalam rencana pola ruang telah ditentukan Kawasan peruntukan lindung, kawasan ini merupakan kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain. Kawasan ini meliputi kawasan perlindungan yakni sempadan pantai dan sempadan sungai, kawasan lindung ekologi yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yakni sempadan mata air, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya dan ruang terbuka hijau dimana RTH minimal adalah 30% dari keseluruhan wilayah dimana angka tersebut terbagi menjadi 20% sebagai peruntukan RTH Publik dan 10% merupakan RTH Privat. RTH dapat berupa taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, Hutan Kota dan Pemakaman.

Kawasan peruntukan budidaya dalam RTRW merupakan kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, dapat terdiri atas kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan

peruntukan lindung merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga keseimbangan alam dan lingkungan sedangkan kawasan peruntukan budidaya merupakan kawasan yang perlu dikelola dan dioptimalkan dalam rangka menunjang pertumbuhan perekonomian wilayah akan tetapi dalam pengelolaannya tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga kawasan peruntukan budidaya dapat secara terus-menerus memberikan daya dukungnya terhadap kegiatan sosial dan ekonomi bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Adapun dalam menentukan rencana pembangunan kedepan memiliki prioritas pembangunan yang perlu diperhatikan sehingga potensi yang dimiliki dapat dikelola secara optimal, adapun dalam RTRW Kota Probolinggo terhadap kawasan prioritas dimana kawasan ini mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Kawasan strategis Kota Probolinggo berdasarkan aspek ekonomi dioptimakan merlalui 2 cara yakni (1) mengembangkan kawasan pelabuhan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai (2) mengembangkan kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya baik dengan kawasan peruntukan industri, kawasan perdagangan dan jasa, perumahan dan pariwisata. Berikut merupakan rencana Kawasan Strategis Kota Probolinggo :



Gambar II-174 Rencana Kawasan Strategis Kota Probolinggo
Sumber: RTRW Kota Probolinggo Tahun 2020-2040

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai salah satu aspek perencanaan dalam pemerintah daerah merupakan rencana spasial yang menekankan terhadap ketaatan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis, didalam dokumen RTRW telah termuat secara kongkrit program pembangunan yang diarahkan selama 20 tahun, oleh karenanya secara detil Rencana Tata Ruang Wilayah dapat diperhatikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan kedepan pada masa periode RPJM Kota Probolinggo tahun 2025-2030.

2.3.2.5 TELAAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025-2045

Penekanan telaah Rencana Jangka Panjang Daerah untuk menyajikan linearitas dan integritas yang relevan pada periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah. Sehingga pada dokumen Rantek RPJMD tersebut, selaras dan sinkronisasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Telaah RPJPD berfokus pada isu strategis, visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok agar menjadi pedoman yang selaras dan terarah.

Isu strategis sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 meliputi:

1. Kesempatan Masyarakat Kota Probolinggo dalam Menjangkau Pendidikan Tinggi
2. Kesehatan berkualitas menjangkau seluruh lapisan Masyarakat
3. Masyarakat yang berdaya dan jaminan kesejahteraan sosial dalam percepatan pengentasan kemiskinan
4. Birokrasi efektif, Adaptif, dan kompetitif berorientasi terhadap dampak serta layanan publik yang prima
5. Optimalisasi pendapatan asli daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal Kota Probolinggo
6. Kota Probolinggo sebagai kota industri, perdagangan, dan jasa
7. Infrastruktur berkelanjutan pendukung superhub jaringan distribusi nasional
8. Masyarakat yang berbudaya dalam menciptakan ketentraman dan kenyamanan lingkungan sosial
9. Iklim investasi penggerak sektor strategis Kota Probolinggo

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi hingga tahun 2045, maka Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 adalah:

"PROBOLINGGO KOTA LOGISTIK TANGGUH, MAJU, DAN BERKELANJUTAN"

Berdasarkan uraian diatas guna memastikan visi tercapai serta sasaran visi dapat terkawal dan termonitor dengan baik dalam kurun waktu dua puluh tahun, maka berikut ditetapkan target yang dibagi berdasarkan periodesasi RPJPD Kota Probolinggo sebagai berikut:

Tabel II.80 Penetapan Target Berdasarkan Periodesasi RPJPD Kota Probolinggo

Visi	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Target	
				2025	2045
KOTA PROBOLINGGO TANGGUH. MAJU DAN BERKELANJUTAN	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77.05	90.5
	Menurunkan Kemiskinan dan Ketimpangan	Persentase Penduduk Miskin	%	5.06	0.3
		Indeks Gini	Indeks	0.295	0.195
	Ekonomi Tumbuh dan Merata	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp (dalam Juta)	61.05	178.14
		Pertumbuhan Ekonomi	%	6.37	7.51
	Transformasi Birokrasi dan Layanan Publik yang Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76.15	74.56
	Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan Hidup Lestari	Indeks Infrastruktur	Indeks	76.88	92.05
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	15	50

Sumber: Data Diolah, 2025

Sebagai upaya mewujudkan visi **Probolinggo Kota Logistik Tangguh, Maju, dan Berkelanjutan** ditempuh melalui 5 misi pembangunan. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan 2025-2045. Berikut merupakan linieritas pokok-pokok visi, sasaran visi terhadap misi RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045.

1. Sumber Daya Manusia Unggul yang Berdaya Saing
2. Masyarakat Mandiri dan Sejahtera
3. Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
4. Pemerintah yang Adaptif dan Layanan Publik yang Prima
5. Integrasi Infrastruktur, Konektivitas, dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Arah Kebijakan Misi 1 Sumber Daya Manusia Unggul Yang Berdaya Saing diarahkan pada periode RPJMD 2025 – 2029 : Pemenuhan dan peningkatan layanan dasar pendidikan dan dan kesehatan sebagai pondasi utama pembangunan SDM. Berdasarkan uraian pentahapan arah kebijakan misi menciptakan SDM Unggul berkelanjutan diatas, berikut merupakan rincian detail fokus pembangunan Kota Probolinggo Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.

1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan berkualitas
2. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
3. Peningkatan pemerataan kesejahteraan dan kompetensi Tenaga Kesehatan
4. Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja;
5. Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting
6. Peningkatan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
7. Percepatan eliminasi penyakit menular dan tidak menular
8. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
9. Pemerataan dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
10. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar
11. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar melalui digital literacy serta pengembangan bakat, minat dan karakter
12. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
13. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan

Arah Kebijakan pada Misi 2 Masyarakat Mandiri dan Sejahtera diarahkan ada tahun Periode RPJMD 2025 – 2029 : Akselarasi Penangan Masalah Kesejahteraan sosial. Berdasarkan uraian pentahapan arah kebijakan misi menciptakan kesejahteraan sosial diatas, berikut merupakan rincian detail fokus pembangunan Kota Probolinggo Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, melalui peningkatan kompetensi

1. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
2. Perluasan penyediaan bantuan dan jaminan sosial
3. Penguatan dan pengendalian keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
4. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melaui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
5. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal
6. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
7. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
8. Pemenuhan dan perlindungan hak- hak perempuan dan kelompok rentan
9. Peningkatan pemberdayaan, kapasitas dan kemandirian perempuan serta kelompok rentan
10. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

Arah Kebijakan Misi 3 Transformasi Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan diarahkan pada tahun 2025 – 2029 : Penguatan dan Pengembangan Wirausaha dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Berdasarkan uraian pentahapan arah kebijakan misi ekonomi diatas, berikut merupakan rincian detail fokus pembangunan Kota Probolinggo yang tentunya mengacu terhadap arah pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur:

1. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
2. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
3. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
4. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan nelayan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer
5. Fasilitasi akses pembiayaan kredit usaha pertanian

6. Pengembangan closed loop model pertanian dan perikanan melalui penguatan kelembagaan dan penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian dan perikanan
7. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
8. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
9. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
10. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi
11. Modernisasi sarana produksi perikanan
12. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
13. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik
14. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
15. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
16. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
17. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
18. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
19. Pengembangan potensi kerjasama regional, nasional, dan global
20. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
21. Peningkatan produktivitas BUMD.
22. Pemberian deregulasi dan kemudahan perizinan terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif
23. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif.

Arah Kebijakan Misi 4 Pemerintah Yang Adaptif, Layanan Publik Prima pada periode RPJMD 2025-2029: Penyederhanaan Birokrasi sebagai Modal Utama Transformasi Tata Kelola. Berdasarkan uraian pentahapan arah kebijakan misi birokrasi yang berdampak dan adaptif diatas, berikut merupakan rincian detail fokus pembangunan Kota Probolinggo dalam 20 tahun kedepan yang tentunya mengacu terhadap arah pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur:

1. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
2. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
3. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
4. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
5. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
6. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
8. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

Arah Kebijakan Misi 5 Integrasi Infrastruktur, Konektivitas, Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan diarahkan pada periode RPJMD 2025 – 2029 yaitu Akselarasi Pembangunan Infrastruktur Penggerak Ekonomi yang berwawasan Lingkungan. Berdasarkan uraian pentahapan arah kebijakan misi infrastruktur berkelanjutan diatas, berikut merupakan rincian detail fokus pembangunan Kota Probolinggo:

1. Percepatan pemerataan, penyediaan, dan peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik)
2. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
3. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan

kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.

4. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan
5. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan
6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (*green & grey infrastructure)* pada kawasan perkotaan.
7. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
8. Penyediaan infrastruktur pendukung energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
9. *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.
10. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan integrasi sistem distribusi logistik
11. Penguatan pengelolaan jalan kota dan jalan lingkungan
12. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan integrasi sistem distribusi logistik
13. Peningkatan sarana dan prasarana perkeretaapian sesuai dengan kewenangan daerah
14. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pendukung jasa layanan kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul.
15. Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan serta perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi;
16. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi khususnya di sektor strategis. (iii) Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan

informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.

17. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
18. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan
19. Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung
20. Peningkatan upaya pelestarian kawasan lindung dan ekosistem alami
21. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
22. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
23. Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (*Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated*) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
24. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
25. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.

2.3.2.6 TELAAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan pembangunan di Indonesia dilakukan melalui kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017. TPB pada dasarnya mengadopsi kebijakan global yakni Sustainable Development Goals (SDGs). Perpres No. 59 Tahun 2017 memuat: (1) Peta Jalan Nasional. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional tahun 2016 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional; (2) Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Naisonal, yang merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai

kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional; dan (3) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang merupakan dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan dokumen perencanaan daerah berbasis lingkungan sebagai implementasi dari SDG's sebagaimana Permendagri 7 tahun 2018 Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat prinsip-prinsip dasar muatan perencanaan dengan memperhatikan ekologi daya dukung dan daya tampung sebagai pertimbangan perencanaan dokumen yang lain. Sebagai highlight dokumen KLHS perlu diperhatikan oleh dokumen perencanaan lainya yakni:

1. Indikator Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2. Status Daya Dukung dan Daya Tampung
3. Isu Pendek dan Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis
4. Skenario Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil telaah kajian lingkungan hidup Strategis Kota RPJMD Kota Probolinggo tahun 2025-2029 didapatkan hasil pencapaian indikator SDG sebanyak 199 indikator dimana 116 indikator telah mencapai target Perpres 59 tahun 2017 atau sebanyak 58,29%. Sebanyak 48 indikator atau 24,12% adalah indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target, 3 indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target dan 32 indikator atau sebanyak 16,08% tidak tersedia data. 199 indikator tersebut merupakan telaah dari 220 indikator dari 17 tujuan TPB yang disisihkan sebanyak 21 indikator yang bukan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota

Dari Hasil telaah Daya Dukung dan Daya Tampung pada aspek daya tampung tempat tinggal, dengan asumsi proyeksi penduduk pada tahun 2029 dan penggunaan lahan sebesar 50% maka seluruh wilayah di Kota Probolinggo masih belum melebihi daya tampungnya. Namun terdapat dua kecamatan yaitu Mayangan dan Kanigaran mencapai 62,80% dan 60,56% daya tampungnya. Namun, apabila hanya 30% lahan yang digunakan untuk lahan, makanya kedua kecamatan tersebut telah melebihi daya tampungnya yaitu Kecamatan Mayangan mencapai 104,67% dan Kecamatan Kanigaran mencapai

100,93%. Ini mengindikasikan bahwa Daya Tampung Tempat tinggal masih cukup memungkinkan hingga akhir tahun 2029.

Tabel II.81 Daya Tampung Tempat Tinggal Kota Probolinggo Tahun 2029

Kecamatan	Luas (Ha)	Luas (m2)	Jumlah Penduduk 2023	Proyeksi Penduduk 2029	50% Threshold	30% Threshold	Asumsi Penggunaan Lahan untuk Tempat Tinggal			
							Daya Tampung 50%		Daya Tampung 30%	
Kademangan	1.374,50	13.745.024	46.090	48.318	6.872.512	4.123.507	171.812	28,12%	103.087	46,87%
Kedopok	1.197,56	11.975.558	40.320	42.269	5.987.779	3.592.667	149.694	28,24%	89.816	47,06%
Wonoasih	1.068,43	10.684.295	36.290	38.044	5.342.147	3.205.288	133.553	28,49%	80.132	47,48%
Mayangan	832,00	8.319.963	62.300	65.312	4.159.981	2.495.989	103.999	62,80%	62.399	104,67%
Kanigaran	858,53	8.585.343	61.990	64.987	4.292.671	2.575.603	107.316	60,56%	64.390	100,93%
Kota Probolinggo	**5.331,02**	**53.310.186**	**246.990**	**258.931**	**26.655.093**	**15.993.055**	**666.377**	**38,86%**	**399.826**	**64,76%**

Keterangan : Asumsi Penggunaan Lahan Tempat Tinggal sebesar 50%

Sumber: KLHS Kota Probolinggo, 2025

Dinilai Dari Status Daya dukung air secara garis besar disimpulkan bahwa daya dukung air di Kota Probolinggo berupa defisit dengan kecukupan ambang batas pada tahun 2023 yang mengindikasikan bahwa jumlah supply air tidak mampu mencukupi kebutuhan domestik dan non domestik. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan tersebut sebagaimana sumber mata air Ronggojaluk yang disalurkan melalui Perumda Bayuangga mengalami penurunan debit dan ketersediaan tiap tahunnya. Perumda Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo menggunakan Mata Air Ronggojalu untuk melayani seluruh Kota Probolinggo. Mata Air Ronggojalu terletak di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo yang berjarak dari pusat Kota Probolinggo ±12 Km. Mata Air Ronggojalu memiliki kapasitas debit ± 2500 L/det. Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo memanfaatkan Mata Air Ronggojalu untuk keperluan air minum. Perumda Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo memiliki kapasitas terpasang sebesar 390 L/det dan volume air terdistribusi Tahun 2019 sebesar 277 L/det. Unit produksi terdiri dari intake dan rumah pompa yang dilengkapi dengan 5 buah pompa. Pengolahan air dilakukan dengan cara sederhana yaitu dengan pembubuhan chlor saja. Hal ini dikarenakan kualitas air dari Mata Air Ronggojalu telah memenuhi standar kualitas air minum. Pembubuhan chlor merupakan proses desinfeksi untuk membunuh bakteri yang tidak diinginkan sehingga aman sampai di konsumen.

Dinilai dari Status daya dukung pangan sebagaimana disimpulkan dalam hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis 5 Kecamatan di Kota Probolinggo dinyatakan “Defisit” pangan. Hal ini cukup normal mengingat Kota Probolinggo berbentuk kota dimana sektor lahan pertanian memiliki degradasi luasan yang berakibat pada minimnya dukungan lahan pangan. Urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang berkaitan

dengan pengelolaan lingkungan di sekitar masyarakat. Lingkungan hidup juga dapat menggambarkan gaya hidup masyarakat yang berkaitan dengan perhatian terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Urusan lingkungan hidup suatu daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan urusan lingkungan hidup mempengaruhi tingkat kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo memiliki capaian yang relatif konsisten, meskipun demikian jika dibandingkan dengan posisi IKLH Jatim dan Nasional IKLH Kota Probolinggo merupakan capaian terendah. Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terlihat bahwa IKLH Kota Probolinggo mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, Kota Probolinggo memiliki skor 56,51, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 70,2 pada tahun 2021. Namun, setelah itu terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 dengan skor 60,85, sebelum kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 61,69 pada tahun 2023. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan skor nasional, tren IKLH Kota Probolinggo cenderung lebih fluktuatif dan berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional. Jawa Timur mengalami peningkatan dari 60,25 pada 2019 menjadi 69,92 pada 2022, meskipun sedikit menurun ke 69,59 pada 2023. Sementara itu, skor nasional menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil dari 66,5 pada 2019 menjadi 72,54 pada 2023, dengan kenaikan bertahap setiap tahunnya. Penurunan skor IKLH di Kota Probolinggo pada tahun 2022 bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan pencemaran udara, penurunan kualitas air, atau berkurangnya tutupan lahan hijau. Kota Probolinggo yang memiliki aktivitas industri dan pelabuhan juga berpotensi menghadapi tantangan dalam pengelolaan lingkungan, terutama dalam hal limbah industri dan emisi transportasi.

Dari Hasil Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029 diperoleh Isu Paling Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Probolinggo 2025-2029 sebagai berikut :

1. Pengendalian Pencemaran dan Meningkatkan kualitas Lingkungan
2. Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan
3. Mengoptimalkan sarana Prasarana Wilayah
4. Meningkatkan Kualitas SDM (Kesehatan, Kesejahteraan dan Pendidikan)
5. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

2.3.2.7 TELAAH RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH (RIPJPID)

➢ **MASALAH, ISU STRATEGIS, TANTANGAN DAN PELUANG RIDA KOTA PROBOLINGGO**

1. Masalah RIDA

Permasalahan utama dalam ekosistem Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) Kota Probolinggo memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah. Masih rendahnya sinkronisasi data, keterbatasan akses pendanaan, dan belum memadainya infrastruktur dasar untuk mendukung aktivitas riset dan inovasi menjadi kendala krusial dalam mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), yang merupakan prinsip penting dalam perencanaan pembangunan di era digital. Kondisi ini menghambat efektivitas perencanaan sektoral, termasuk dalam bidang ekonomi kreatif, pariwisata, dan pengembangan sektor pertanian yang menjadi fokus prioritas pembangunan daerah.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, khususnya pada sektor koperasi, usaha mikro, dan ekonomi kreatif, turut melemahkan kapasitas daerah dalam menghasilkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Permasalahan ini juga berkaitan dengan isu strategis SDM unggul yang tercantum dalam RPJMD, di mana peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan teknis menjadi bagian dari agenda prioritas. Lemahnya jejaring kemitraan riset dan rendahnya daya saing produk lokal menunjukkan perlunya intervensi pemerintah daerah dalam membangun kolaborasi pentahelix yang melibatkan perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas, dan media.

Tabel II.82 Permasalahan Utama Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo

No	Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Permasalahan Utama Riset dan Inovasi Daerah
1	Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah	• Belum optimalnya sikronisasibasis data • Belum Optimalnya pengelolaan satu data • Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi data pada proses perencanaan pembangunan daerah • Rendahnya akses permodalan untuk mengembangkan usaha • Belum terpenuhinya luasan RTH publik 20% • Masih diperlukan infrastruktur yang memadai untuk mengungkit investasi • Pengembangan destinasi pariwisata (sarpras) yang belum optimal	Kurangnya sinkronisasi data, akses permodalan, dan infrastruktur RIDA.

No	Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Permasalahan Utama Riset dan Inovasi Daerah
2	Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset daninovasi	• Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas SDM koperasi danpelaku usaha mikro • Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaku ekonomi kreatif • Masih rendahnya kualitas dankuantitas SDM pariwisata • Belum optimalnya peran SDMpariwisata dalam pengembanganpariwisata	Kualitas SDM RIDA yang belum optimal.
3	Kemitraan riset dan inovasi	• Rendahnya daya saing produkdalam memperluas akses pasar • Regulasi terkait dengan penanaman modal dan kemudahan berusaha belumoptimal • Kurang optimalnya upayapromosi potensi dan peluang investasi • Diversifikasi produk perikanan olahan rendah • Rantai pemasaran terlalu Panjang • Lemahnya jejaring kemitraan pertanian • Kurangnya daya saing produk	Lemahnya jejaring kemitraandan rendahnya daya saing produk
4	Budaya riset dan inovasi	• Belum maksimalnya pelibatan pelaku seni dan tokoh seni dalampengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan local • Belum optimalnya promosipariwisata	Kurangnya promosi dan pelestarian RIDA
5	Keterpaduan riset daninovasi di daerah	• Integrasi Aplikasi dan sisteminformasi di perangkat daerah masih rendah, Banyak aplikasi yang belum dikelola olehdiskominfo • Masih terdapat wilayah yang minim aksesibilitas jaringan internet	Integrasi sistem informasiRIDA yang belum optimal
6	Penyelarasan dengan perkembangan global	• Masih rendahnya Produk olahanperikanan yang terstandarisasi • Peningkatan standarisasi produkhasil pertanian • Kurangnya mutu produk industri	Standarisasi produk dalam ekosistem RIDA yang belum maksimal.

Sumber: Rancangan RIPJPID Kota Probolinggo, 2025

2. Isu Strategis RIDA
   - Infrastruktur dan alat produksi yang terbatas
   - Pengelolaan sampah sebagai prioritas lingkungan
   - Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID), mengacu pada indikator utama Indeks Inovasi Daerah berdasarkan regulasi Kemendagri (misalnya Permendagri No. 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah) Inovasi Daerah Lainnya
   - Pengembangan Aplikasi Layanan Publik guna mempercepat pelayanan, menghemat waktu, dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
   - Pengakuan sebagai Kota Sangat Inovatif, Penghargaan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

3. Tantangan Dalam Pemanfaatan Riset Dan Inovasi di Masa Datang

   Percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan memanfaatkan riset dan inovasi memiliki sejumlah hambatan yang perlu diatasi agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Beberapa dari tantangan-tantangan ini meliputi:

   - Keterbatasan Sumber Daya Finansial
   - Keterbatasan Keterampilan dan Keahlian (Daya Saing Sumber Daya Manusia)
   - Keterbatasan *Forecasting* Terhadap Riset dan Inovasi di Masa Depan
   - Rendahnya Tingkat Adopsi Inovasi
   - Tantangan Keberlanjutan

4. Peluang Dalam Pemanfaatan Riset Dan Inovasi di Masa Datang

   - Kemitraan dan Kolaborasi

     Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga penelitian adalah kunci untuk mengatasi tantangan dalam riset dan inovasi. Kemitraan ini memungkinkan berbagi sumber daya, pengetahuan, dan keahlian, serta memfasilitasi akses ke dana dan infrastruktur penelitian. Keterlibatan sektor swasta juga mempercepat komersialisasi inovasi.

   - Kuantitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

     Jumlah sumber daya manusia memberikan peluang untuk ditingkatkan kualitasnya setidaknya dalam rangka mengawasi dan mensinergikan riset dan inovasi di daerah. Kuantitas sumber daya manusia ini perlu dibekali dengan kapasitas minimum untuk menjalankan fungsi riset dan inovasi di daerah.

   - Pendanaan Alternatif

     Pendanaan dari sumber-sumber alternatif seperti sektor swasta, kemitraan publik-swasta, dan skema berbasis proyek penting dalam mendukung riset dan inovasi. Ini membantu mengatasi keterbatasan pendanaan dan mendorong aktivitas riset yang inovatif.

   - Regulasi dan Kebijakan

     Regulasi yang mendukung riset dan inovasi, seperti insentif fiskal, perlindungan kekayaan intelektual, dan penyederhanaan prosedur administratif, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi berbasis riset dan inovasi. Melalui upaya ini, pemerintah daerah dapat menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di

Kota Probolinggo dan daerah-daerah sejenisnya.

- **TEMA PRODUK UNGGULAN DAERAH/PUD KOTA PROBOLINGGO**

Berdasarkan permasalahan utama PUD Kota Probolinggo maka dirumuskan tematik untuk PUD Kota Probolinggo adalah "Penguatan ekonomi lokal melalui perbaikan infrastruktur logistik, peningkatan inovasi dan daya saing produk unggulan daerah".

Tema PUD Kota Probolinggo mengandung beberapa makna antara lain:

1. Penguatan ekonomi lokal berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas. Dorongan terhadap inovasi dalam proses produksi, diversifikasi produk, pengemasan, hingga pemasaran digital.
2. Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah sesuai dengan maksud penetapan Perwali Kota Probolinggo No 3 Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025 antara lain mengembangkan PUD berbasis potensi sumber daya lokal, mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru, meningkatkan nilai tambah dan daya saing PUD, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo.
3. Memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan utama terkait pengembangan PUD Kota Probolinggo
4. Mencakup enam elemen ekosistem riset dan inovasi daerah sesuai dengan Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah antara lain kebijakan dan infrastruktur, kapasitas kelembagaan dan daya dukung, kemitraan, budaya, keterpaduan, dan penyelarasan perkembangan global.

Tabel II.83 Strategi dan Arah Kebijakan PUD Kota Probolinggo

No	Permasalahan PUD	Strategi	Arah Kebijakan
1	Infrastruktur dan alat produksi yang terbatas	Mengoptimalkan teknologi tepat guna dan memanfaatkanfasilitas bersama sebagai sarana produksi dengandukungan kemudahanpermodalan.	• Mengembangkan sentraindustri/UMKM berbasis klaster komoditas unggulan • Subsidi/hibah alat produksi kepada pelaku UMKM • Meningkatkan akses jalanproduksi dan logistik ke lokasi-lokasi sentra produksi dan distribusi • Memanfaatakan & Meningkatkan infrastruktur digital • Melakukan kolaborasi denganperguruan tinggi, BUMN/BUMD,dan swasta untuk riset alatproduksi • Melakukan kemitraan dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memperoleh dana bantuan

No	Permasalahan PUD	Strategi	Arah Kebijakan
2	Keterbatasan Akses Permodalan dan Pendampingan UMKM	Meningkatkan akses terhadap lembaga keuangan formaldengan pengembangan skema pembiayaan alternatif, memberikan insentif dan subsidi dari pemerintah daerah, serta membentuk tim pendampingan UMKM dari daerah.	• Melakukan penguatan Sistem Pembiayaan Inklusif danBerkelanjutan • Melakukan peningkatan kapasitaskelembagaan dan legalitas UMKM • Melakukan pendampingan terpadu berbasis komoditasunggulan • Meningkatkan digitalisasi dan inovasi model pendampingan
3	Pemasaran dan Akses Pasar yang lemah	Meningkatkan penguatan identitas dan branding produk unggulan didukung olehdigitalisasi pemasaran, dan kemitraan strategis serta business matching (buyer-distributor-eksportir).	• Menetapkan peraturanpenggunaan produk lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah • Menetapkan kebijakanstandarisasi mutu, kemasan, dan sertifikasi produk (halal, PIRT, BPOM, SNI) • Mendorong kebijakan transformasi digital UMKM • Menyusun kebijakan kemitraan dagang dengan retail modern,koperasi konsumen, platformdigital • Mendorong terbentuknyakoperasi pemasaran atau asosiasiproduk unggulan daerah untuk efisiensi promosi dan distribusi
4	Penguatan Kapasitas dan SDM yang kurang	Mengembangkan SDM manajerial dan kewirausahaan melalui peningkatan literasi digital dan inovasi teknologi dan pembentukan ekosistem belajar yang tepat sasaran dan berkelanjutan.	• Menyelenggarakan pelatihan teknis produksi, pengolahan, dan inovasi produk yang sesuai dengan karakteristik komoditas unggulan daerah • Mendorong peningkatan literasiteknologi produksi dan pemasaran berbasis inovasi lokal dan teknologi tepat guna • Mendorong inkubasi bisnis dan coaching usaha secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, BLK, dan lembaga mitra lainnya • Mendorong partisipasi pemuda dan perempuan dalam sektor produk unggulan, melalui pelatihan berbasis komunitas dan pendidikan vokasi.
5	Validitas data pelaku usaha dan sistem informasi yang bermasalah	Mendorong pengembangansistem informasi terpadu UMKM daerah untuk penataan dan verifikasi data UMKM secara berkala	• Menetapkan sistem informasi berbasis digital (web/mobile) sebagai alat utama pengelolaan dan pemantauan program pengembangan UMKM • Mensinergikan antar-OPD dalam standarisasi format data UMKM dan produk unggulan untuk meminimalisir duplikasi dan kesenjangan data • Mendorong kebijakan partisipatifdengan melibatkan stakeholder dalam Pendataan dan Validasi • Mengembangkan mekanisme pelaporan mandiri pelaku usaha untuk menjaga keterbaruan data.
6	Rendahnya Inovasi dalam Produk Unggulan	Mendorong kolaborasi antara UMKM dan perguruan tinggi (universitas, lembaga riset) untuk melakukan riset dan pengembangan produk Unggulan didukung pengembangan pusat inovasi produk daerah (lab inkubasi atau ruang kreatif) serta mendorong adopsi teknologi tepat	• Menyediakan fasilitas riset dan pengembangan (*R&D*) yang dapatdiakses oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dandiversifikasi produk unggulan • Mengadopsi teknologi tepat guna dalam produksi produk unggulan • Mempermudah akses pelakuUMKM ke teknologi terbaru melalui kemitraan dengan lembaga riset atau perusahaan teknologi • Menyusun kebijakan yang mendukung inovasi dalam desain produk dan kemasan untuk menarik minat pasar lokal dan global

No	Permasalahan PUD	Strategi	Arah Kebijakan
		guna dan mesin produksi modern, diversifikasi produk, eksplorasi produk turunan, dankolaborasi antar sektor.	• Mendorong diversifikasi produk unggulan dengan menciptakan produk turunan atau produk olahan baru yang memiliki nilai tambah tinggi • Mendorong kolaborasi lintas sektor (seperti sektor pertanian, pariwisata, dan kerajinan) untuk menciptakan produk inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Sumber: Rancangan RIPJPID Kota Probolinggo, 2025

➢ TEMA RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA PROBOLINGGO 2025-2029

Tabel II.84 Strategi dan Arah Kebijakan Permasalahan Utama RIDA Kota Probolinggo

No	Permasalahan Utama RIDA	Strategi	Arah Kebijakan
1	Kurangnya sinkronisasidata, akses permodalan, dan infrastruktur RIDA.	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur inovasi dan riset melalui skemapendanaan kolaboratif (swastadan CSR) dan optimalisasipotensi lokal	• Mendorong skema pendanaan kolaboratif dan pemanfaatan dana CSR • Penguatan infrastruktur riset daninovasi berbasis potensi lokal (spt Pembangunan Agro Techno Park,Marine Innovation Hub, atau Industri Kreatif Center) • Desentralisasi akses infrastruktur di seluruh wilayah untuk mengoptimalkan potensi lokal • Mengembangkan infrastrukturriset dan inovasi daerah untuk pendukung peluang investasi
2	Kualitas SDM RIDA yangbelum optimal.	Sinergi antar pemangku kepentingan melalui kemitraan strategis dengan lembaga riset nasional maupuninternasional, pengembanganPusat Inovasi Daerah	• Menjalin kolaborasi tripelhelix untuk membentuk kemitraan strategis • Menyediakan sarana pendukung pusat inovasi daerah sebagai media kolaborasi riset dan inovasi
3	Lemahnya jejaring kemitraan dan rendahnya daya saing produk	Peningkatan kemitraan untuk memaksimalkan iklim investasiberdasar potensi lokal daerah	• Meningkatkan kemitraan strategis untuk membangun platform kolaboratif antara investor, BUMD, dan komunitas lokal untuk menjaga kesinambungan sosial ekonomi lokal • Menyusun regulasi daerah yang pro-investasi
4	Kurangnya promosi dan pelestarian RIDA	Optimalisasi literasi digital melalui pelatihan dan pelibatan komunitas digital lokal, promosi dengan kontekstual kearifan lokal, dan digitalisasi aset dan data daerah	• Peningkatan apresiasi pelaku riset dan inovasi daerah • Penguatan digital local branding untuk optimalisasi pemasaran potensi daerah • Penguatan infrastruktur dan aksesteknologi digital • Transformasi digital dalampengelolaan data daerah
5	Integrasi sistem informasi RIDA yang belum optimal	Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi dan Kebijakan Pro-riset	• Mendorong penggunaan teknologi tepat guna (TTG) untuk meningkatkan produktivitassektor unggulan • Mengadopsi hasil riset dan inovasidaerah dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah

No	Permasalahan Utama RIDA	Strategi	Arah Kebijakan
6	Standarisasi produk dalamekosistem RIDA yang belummaksimal.	Standarisasi hasil riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah	• Menyusun pedoman standar mutu riset dan inovasi daerah berdasarkan indikator nasional • Peningkatan Kapasitas SDM Riset dalam Penerapan Standar • Pemetaan hasil riset dan inovasi yang layak untuk distandarisasi.

Sumber: Rancangan RIPJPID Kota Probolinggo, 2025

Tema Induk merupakan hasil sintesis dari kebutuhan untuk mengatasi permasalahan yang terdapat dalam ekosistem riset dan inovasi serta mendorong pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal. Dalam kajian ini, riset dan inovasi diposisikan sebagai instrumen utama untuk mentransformasi sektor-sektor unggulan menjadi lebih produktif, bernilai tambah tinggi, serta berkelanjutan. Pendekatan berbasis inovasi mencakup pemanfaatan teknologi tepat guna, penerapan model bisnis inovatif, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial. Hasil sintesa dari tema permasalahan utama daerah beserta tema PUD Kota Probolinggo didapatkan tema induk RIDA Kota Probolinggo adalah **"Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Penguatan Sektor Unggulan serta Agroindustri dan Industri Kreatif Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan"**.

Tema Permasalahan Utama berperan sebagai pondasi awal yang mengidentifikasi aspek-aspek penting yang perlu diperbaiki terlebih dahulu. Tema Potensi Unggulan Daerah (PUD) memberikan arah sektoral yang menjadi fokus utama intervensi riset dan inovasi, dan Tema Induk RIDA mengarah pada tujuan strategis jangka panjang, yakni peningkatan daya saing daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Keterpaduan ketiga elemen tersebut memastikan bahwa kebijakan riset dan inovasi di Kota Probolinggo tidak hanya bersifat normatif atau konseptual, tetapi juga aplikatif, terarah, dan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.

Tema riset dan inovasi daerah Kota Probolinggo mengandung makna antara lain:

1. Berbasis potensi lokal

   Mengintegrasikan produk unggulan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2025 tentang Produk Unggulan Daerah Kelurahan dan Kecamatan Kota Probolinggo Tahun 2025 (olahan ikan, tempe, pia, batik, potensi kesenian daerah) dan sektor unggulan Kota Probolinggo (perdagangan, logistik, pengelolaan sampah) sebagai pendorong ekonomi.

2. Mengatasi permasalahan utama

   Menjawab tantangan terkait ekosistem riset dan inovasi daerah di Kota Probolinggo seperti rendahnya inovasi, keterbatasan akses pasar, dan lemahnya SDM melalui riset dan inovasi.

3. Selaras dengan ekosistem riset dan inovasi daerah

   Mencakup enam elemen RIDA (kebijakan dan infrastruktur, kapasitas kelembagaan dan daya dukung, kemitraan, budaya, keterpaduan, dan penyelarasan perkembangan global) dengan fokus pada digitalisasi, kemitraan, dan standarisasi produk sebagai point permasalahan utama riset dan inovasi di Kota Probolinggo.

2.3.2.8 ISU STRATEGIS KOTA PROBOLINGGO 2025-2030

Berdasarkan dari hasil telaah permasalahan sebagaimana disampaikan pada long list permasalahan yang kemudian disadurkan dengan mandat nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan pandangan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029 dan dengan memperhatikan kondisi kewilayahan regional, Analisis terhadap isu-isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta pola-pola keruangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah maka disepakati bahwa Isu strategis Kota Probolinggo dalam RPJMD Kota Probolinggo tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. **Upaya pengendalian lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim untuk meningkatkan resiliensi dan ketahanan pangan daerah**

   Kota Probolinggo menghadapi tantangan besar dalam pengendalian lingkungan, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Sebagai kota pesisir yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir rob, kekeringan, serta cuaca ekstrem, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak. Jika tidak dikendalikan dengan baik, degradasi lingkungan dapat memperburuk risiko bencana dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Perubahan iklim yang semakin tidak menentu menuntut masyarakat Kota Probolinggo untuk lebih resiliensi dan memiliki ketahanan daerah yang kuat. Salah satu langkah yang harus diambil adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik, mengelola sampah dengan benar, serta memperbanyak ruang terbuka hijau untuk mengurangi dampak pemanasan global.

   Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan dalam membangun ketahanan lingkungan Kota Probolinggo.Dengan

langkah-langkah tersebut, Kota Probolinggo diharapkan mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjadi kota yang lebih tangguh serta berkelanjutan. Pengendalian lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat agar tercipta lingkungan yang sehat dan aman bagi generasi mendatang.

Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan pengendalian lingkungan dengan menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap industri dan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Pengawasan terhadap penggunaan sumber daya alam, seperti air tanah dan lahan hijau, harus diperketat guna memastikan keberlanjutan lingkungan hidup di masa mendatang. Upaya mitigasi bencana juga harus menjadi perhatian utama dalam strategi pengendalian lingkungan. Program seperti pembangunan tanggul pesisir untuk mengurangi dampak banjir rob, peningkatan sistem drainase perkotaan, serta penanaman kembali mangrove sebagai pelindung alami dari abrasi pantai harus terus digalakkan.

Ancaman lain dengan adanya perubahan iklim selain bencana yakni perubahan pola musim yang berakibat pada perubahan kondisi pangan. Dengan adanya global warming memberikan dampak yang sangat masif terhada cuaca, iklim dan berimbas kepada produksi pangan. Kemarau panjang menyebabkan kekeringan air yang berujung terhadap gagalnya panen. Isu lingkungan secara makro selalu dikaitkan dengan ketahanan pangan dalam rangka memberikan dorongan terhadap IPTEK pengembangan inovasi pangan non-konvensional yang tidak menggantungkan pada kondisi alam. Dengan adanya inovasi dan IPTEK dalam pertanian diharapkan selain meningkatkan produktivitas pertanian juga dapat memberikan jaminan bahwa ketersediaan pangan akan tetap tersedia. Kebijakan pembangunan ketahanan pangan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penggunaan teknologi tepat guna ramah lingkungan dan pengelolaan potensi pangan secara optimal. Meski Pertanian dan perikanan bukan merupakan sektor dominan penentu pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo, namun jika melihat kondisi eksisting dimana luas lahan budidaya pertanian ± 43,25% dari luas wilayah Kota Probolinggo. Namun luas lahan budidaya pertanian semakin lama semakin menurun dikarenakan terjadi alih fungsi lahan pertanian dan ini sangat berpengaruh terutama kaitannya dalam

meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan menurunnya luas lahan bagi pengembangan tanaman pangan seperti padi. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar kebutuhan beras di Kota Probolinggo di penuhi dari luar daerah. Selain itu, sektor pertanian yang cendrung dominansi pada tanaman pangan (beras dan jagung) menyebabkan pengembangan diversifikasi tanaman pangan dan hortikultura yang mampu meningkatkan ketahanan pangan daerah menjadi lebih sulit untuk diwujudkan.

Jika alih fungsi lahan tanaman pangan terus terjadi dan usaha pemerintah daerah dalam upaya mencegah terjadinya alih fungsi tersebut masih lemah, maka pada masa mendatang di Kota Probolinggo akan terjadi kerawanan pangan yang berakibat pada kurangnya gizi masyarakat dan terbatasnya supply kebutuhan pokok masyarakat. Disamping itu, kegiatan budidaya pertanian yang belum sepenuhnya menggunakan teknologi ramah lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas air dan kualitas tanah yang semakin menurun. Isu perubahan iklim juga sangat mempengaruhi jumlah produktivitas pertanian, hal ini dikarenakan Petani lebih sulit dalam menentukan Pola Tanam berdasarkan musim dimana di Kota Probolinggo banyak menerapkan pola tanam untuk tanaman Pangan Padi (November - Februari) - Jagung (Maret - Juni)- Jagung (Juli - Oktober), dengan fenomena perubahan iklim tentunya kondisi cuaca akan sulit diprediksi sehingga petani sering melakukan budidaya diluar musim yang menyebabkan gagal panen maupun produksi yang rendah.

Ditarik lebih mikro di Kota Probolinggo bahwa sektor pertanian bukan merupakan sektor strategis dimana struktur kota lebih menekankan pada sektor industri besar, perdagangan dan sektor jasa yang memiiliki kerentanan lebih tinggi terhadap kelangkaan pangan dimana sumber utama pangan bersumber dari wilayah-wilayah berbasis pangan. Sehingga kebijakan pengelolaan pangan di Kota-Kota lebih banyak kepada menjaga stok pangan tetap ada, beredar dan cukup tanpa menghadap kelangkaan pangan yang dapat menyebabkan inflasi dan gejolak ekonomi yang memiiliki efek pendulum terhadap barang-barang yang lain. Maka dalam rangka menghadapi kelangkaan pangan pemerintah perlu untuk melakukan pengawasan, monitoring dan menyusun kebijakan taktis dan strategis dalam rangka menjaga ketahanan pangan.

2. **Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar serta infrastruktur leverage ekonomi**

Kota Probolinggo, sebagai salah satu kota strategis di Jawa Timur, terus berupaya meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi guna mendukung kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih, sanitasi layak, dan rumah tinggal layak huni menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Sementara itu, infrastruktur ekonomi berperan sebagai pendorong utama bagi perkembangan industri, perdagangan, serta konektivitas dan mobilitas masyarakat. Pemenuhan infrastruktur dasar dan ekonomi di Kota Probolinggo merupakan langkah strategis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat terus diwujudkan untuk menjadikan Kota Probolinggo sebagai kota yang lebih maju, layak huni, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

Pemenuhan Infrastruktur Air Bersih terutama bagi masyarakat yang kurang mampu perlu untuk segera dicapai. Penyediaan air bersih menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kota Probolinggo. Melalui optimalisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta pembangunan jaringan distribusi air yang lebih luas dan merata, kota ini berusaha memastikan seluruh warganya mendapatkan akses air bersih yang layak. Selain itu, upaya konservasi sumber daya air melalui pembangunan embung dan sumur resapan juga terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih dalam jangka panjang. **Sanitasi Layak dan Berkelanjutan** Peningkatan sistem sanitasi yang layak dan berkelanjutan merupakan agenda penting dalam pembangunan kota. Kota Probolinggo telah menginisiasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dan septic tank individu yang ramah lingkungan guna mengurangi pencemaran lingkungan. Kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) juga terus digencarkan agar masyarakat dapat secara aktif menjaga kebersihan lingkungan serta memanfaatkan fasilitas sanitasi yang tersedia dengan optimal. **Rumah Tinggal Layak Huni** Program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) terus dilaksanakan untuk memberikan hunian yang aman dan nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Kota Probolinggo juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan rumah subsidi serta meningkatkan kualitas perumahan melalui

perencanaan tata kota yang lebih baik. Program ini bertujuan untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh dan meningkatkan daya tahan rumah terhadap bencana alam.

Selain itu Kota Probolinggo merupakan salah satu kota strategis di Pulau Jawa yang memiliki potensi besar dalam sektor perdagangan, pariwisata, dan industri. Terletak di jalur utama yang menghubungkan Surabaya, Banyuwangi, dan Pulau Bali, kota ini menjadi simpul penting dalam arus distribusi barang dan jasa. Selain itu, keberadaan Pelabuhan Tanjung Tembaga serta akses menuju kawasan wisata seperti Gunung Bromo dan Pantai Bentar semakin memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Namun, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, peningkatan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak. Perbaikan dan modernisasi jalan, pengembangan transportasi publik, serta optimalisasi fasilitas pelabuhan akan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi logistik dan kenyamanan mobilitas masyarakat. Selain itu, penguatan infrastruktur digital juga diperlukan guna mendukung sektor ekonomi kreatif dan digitalisasi layanan publik.

Pemenuhan infrastruktur dasar dan ekonomi di Kota Probolinggo merupakan langkah strategis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat terus diwujudkan untuk menjadikan Kota Probolinggo sebagai kota yang lebih maju, layak huni, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional dengan mempertimbangkan hal berikut :

a. **Industrialisasi dan Hilirisasi**

   Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, Kota Probolinggo terus mengembangkan kawasan industri yang mendukung hilirisasi produk unggulan daerah, seperti hasil perikanan, pertanian, dan manufaktur. Fasilitas produksi dan pengolahan ditingkatkan guna menciptakan nilai tambah pada produk lokal dan membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.

b. **Akses Mobilitas dan Konektivitas**

   Infrastruktur transportasi yang memadai menjadi kunci dalam menunjang aktivitas ekonomi. Pemerintah Kota Probolinggo terus berupaya memperbaiki dan memperluas jaringan jalan, serta mengoptimalkan terminal dan stasiun kereta api untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Peningkatan konektivitas dengan daerah sekitar, termasuk pengembangan akses menuju Pelabuhan Tanjung Tembaga, juga menjadi fokus utama guna memperlancar arus perdagangan.

c. **Perdagangan dan Ekonomi Kreatif**

Sektor perdagangan di Kota Probolinggo didukung dengan modernisasi pasar tradisional serta pengembangan pusat perbelanjaan yang mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Digitalisasi ekonomi juga mulai diterapkan melalui pemberdayaan pelaku usaha dalam memanfaatkan platform e-commerce guna meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah serta dukungan investasi yang tepat, Kota Probolinggo dapat berkembang menjadi pusat ekonomi yang lebih kompetitif, mendorong pertumbuhan industri, perdagangan, dan pariwisata yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

3. **Pertumbuhan ekonomi inklusif berkeadilan pada sektor-sektor unggulan serta optimalisasi pendapatan daerah untuk mendorong kemandirian fiskal**

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini tidak hanya mencakup pertumbuhan yang pesat, tetapi juga distribusi manfaat yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Fokus pada sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi daerah menjadi langkah penting, di samping pengoptimalan pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Produktivitas sektor Perdagangan, jasa dan Industri sebagai potensi unggulan daerah Kota Probolinggo dalam pengembangannya lima tahun kedepan dihadapkan pada beberapa tantangan utama yang perlu diatasi. pertama, infrastruktur pendukung seperti jalan, pasar, pelabuhan dan fasilitas logistik belum optimal, sehingga menghambat distribusi barang dan efisiensi perdagangan. Kedua, kurangnya mutu produksi dalam proses produksi menghambat daya saing industri lokal.

Sedangkan agar dapat mengoptimalisasi PAD melalui Pajak dan Retribusi daerah, pemerintah perlu focus untuk menyelesaikan sistem pendataan dan penagihan pajak yang belum optimal, sehingga banyak potensi pendapatan yang belum tergali sepenuhnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah perlu

didorong melalui peningkatan literasi dan tata Kelola pendapatan asli daerah harus ditransformasi berbasis digital.

Pembangunan ekonomi yang inklusif serta pengoptimalan pendapatan daerah tentu memerlukan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta agar dapat menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan sekaligus menciptakan iklim Investasi.

4. **Pemerataan akses kebutuhan dasar serta pengembangan SDM berkualitas**

Pemenuhan akses terhadap kebutuhan dasar dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas adalah dua pilar utama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kebutuhan dasar setidaknya mencakup pendidikan, kesehatan dan perumahan yang layak. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa layanan dasar tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat khususnya kelompok rentan.

Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap generasi masa depan. Namun dalam temuannya di Kota Probolinggo untuk distribusi dan kualitas pendidikan belum merata, yang berarti akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan bagi sebagian besar warga maka dengan percepatan pembangunan terutama pada tingkat sekolah menengah pertama. Sedangkan terkait dengan kesehatan, sarana dan prasarana penunjang belum sepenuhnya tersedia dan memadai begitupula dengan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan juga belum merata, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan standar kesehatan masyarakat. Padahal layanan kesehatan yang merata dan berkualitas sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, menghadirkan kawasan perumahan yang layak dan dapat diakses oleh kelompok rentan juga menjadi tantangan perkotaan dalam lima tahun kedepan.

Oleh karena itu dalam lima tahun kedepan, Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan sosial harus mengarah pada pemerataan dan menciptakan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk memperhatikan perspektif gender maupun kelompok rentan. Untuk percepatan perlu meningkatkan sinergitas dan Kolaborasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, dan Akademisi.

5. **Pembangunan Inklusif yang didukung Usaha Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak-hak masyarakat rentan**

Kota Probolinggo terus berupaya menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warganya. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengarusutamaan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Tantangan ini perlu mendapatkan perhatian serius agar pembangunan di Kota Probolinggo benar-benar berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam sektor tenaga kerja formal. Kurangnya akses terhadap pelatihan keterampilan, keterbatasan kesempatan kerja, serta minimnya fasilitas ramah disabilitas di tempat kerja menjadi penghambat utama bagi mereka untuk berdaya secara ekonomi. Padahal, dengan dukungan yang tepat, penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam dunia kerja dan pembangunan daerah.

Selain itu, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, eksploitasi anak, serta lemahnya penegakan hukum terhadap anak juga menjadi perhatian serius. Kekerasan berbasis gender masih sering terjadi akibat faktor sosial, budaya, dan lemahnya sistem perlindungan korban. Sementara itu, eksploitasi anak, baik dalam bentuk pekerja anak maupun perdagangan anak, masih menjadi ancaman yang memerlukan tindakan tegas. Penegakan hukum yang lebih kuat, perlindungan korban yang optimal, serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam mengatasi permasalahan ini. Di sisi lain, akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak juga masih rendah. Banyak perempuan yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara, sehingga berdampak pada keterbatasan mereka dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan cukup. Untuk mewujudkan kesetaraan gender, perlu adanya kebijakan afirmatif yang mendorong peningkatan akses pendidikan bagi perempuan serta pemberdayaan ekonomi yang lebih luas melalui program pelatihan dan kewirausahaan.

Kondisi ini menuntut pendekatan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok minoritas lainnya. Sayangnya, inklusivitas mereka dalam proses pembangunan masih sangat terbatas. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik sering kali kurang mempertimbangkan kebutuhan dan suara

kelompok rentan, yang mengakibatkan mereka semakin termarjinalkan. Pemenuhan hak penyandang disabilitas juga menjadi sorotan penting. Diskriminasi, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan masih menjadi poin penting untuk dikritisi mengingat mandat pembangunan nasional mensyaratkan bahwa dalam dunia kerja perlu untuk melibatkan difabel dan hak-hak penyandang disabilitas telah dijamin oleh undang-undang, namun implementasinya masih lemah akibat minimnya anggaran, kurangnya pemahaman aparatur negara, serta rendahnya kesadaran publik.

Untuk itu, pengarusutamaan gender dan perspektif hak asasi manusia harus menjadi pendekatan utama dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini mencakup penguatan sistem hukum yang responsif gender dan inklusif, peningkatan edukasi masyarakat, serta keterlibatan aktif kelompok rentan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Hanya dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan menjunjung tinggi martabat setiap warga negara tanpa kecuali. Mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan komitmen dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, serta komunitas lokal. Implementasi kebijakan yang responsif terhadap gender, disabilitas, dan kelompok rentan harus diutamakan agar Kota Probolinggo dapat menjadi kota yang inklusif, berkeadilan, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warganya tanpa terkecuali.

6. **Optimalisasi Riset dan Inovasi daerah guna mendukung perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik**

Dalam era pembangunan berbasis pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi menjadi elemen strategis yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan daerah. Dimana riset dan inovasi sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Optimalisasi riset daerah sangat penting untuk menghasilkan kebijakan publik yang berbasis data dan evidence. Dengan memanfaatkan hasil riset secara optimal, kebijakan pembangunan Kota Probolinggo dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Riset yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan memungkinkan pemerintah daerah mengidentifikasi masalah secara lebih akurat, merumuskan solusi yang kontekstual, serta mengevaluasi dampak kebijakan secara objektif.

Kondisi saat ini Inovasi di Kota Probolinggo cukup gencar dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat atas kinerja urusan yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah. Beberapa fokus pengembangan inovasi terkait dengan : (1) efektifitas inovasi dalam meningkatkan pelayanan, (2) keberlanjutan inovasi, (3) peluang pengembangan dalam skala yang lebih kolaboratif, (4) impact terhadap policy brief dan policy decision dalam membuat keputusan terkait pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Namun demikian, tantangan besar masih membayangi upaya penguatan riset dan inovasi di tingkat daerah. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan pendanaan serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan. Keterbatasan ini kerap menyebabkan kegiatan riset menjadi bersifat seremonial atau tidak berkelanjutan, sehingga hasilnya kurang dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi pengembangan riset yang inovatif dan kolaboratif. Pemerintah Kota Probolinggo dapat mengupayakan alternatif pembiayaan, seperti melalui skema kemitraan dengan sektor swasta, pemanfaatan dana CSR, maupun memanfaatkan program pendanaan riset dari pemerintah pusat dan lembaga donor. Di samping itu, adopsi teknologi digital perlu ditingkatkan guna mempercepat proses riset, analisis data, dan diseminasi hasil penelitian. Yang tidak kalah penting adalah membangun kolaborasi lintas daerah, baik dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun pemerintah daerah lainnya. Kolaborasi ini akan membuka ruang pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan infrastruktur riset secara bersama. Kota Probolinggo dapat menjadi contoh daerah yang mampu bertransformasi dari pengguna kebijakan menjadi produsen pengetahuan lokal yang unggul dan kontributif terhadap pembangunan nasional.

Dengan komitmen kuat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, optimalisasi riset dan inovasi bukan hanya menjadi agenda teknokratis, melainkan bagian dari gerakan kolektif menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, inklusif, dan berbasis ilmu pengetahuan. Kota Probolinggo siap menjadi pionir dalam mengintegrasikan riset ke dalam denyut nadi pembangunan daerah

7. Pemerintahan Yang Bersih, adaptif serta berorientasi Layanan

Pemerintahan di Kota Probolinggo menghadapi tantangan besar untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan demi mewujudkan good and clean governance. Hal ini menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat, sekaligus menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dari segala bentuk penyimpangan. Langkah strategis lainnya adalah melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur, yang menjadi kunci dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif. Investasi dalam pelatihan, pendidikan, dan penguatan kompetensi para aparatur sipil negara merupakan prioritas utama. Dengan meningkatkan profesionalisme dan etika kerja, diharapkan aparatur pemerintahan Kota Probolinggo mampu memberikan layanan yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Tidak kalah penting adalah upaya untuk mewujudkan meritokrasi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Meritokrasi memastikan bahwa penempatan jabatan dan promosi didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan prestasi, bukan pada hubungan personal atau kepentingan tertentu. Prinsip ini tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memotivasi aparatur untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik. Sebagai elemen yang tak terpisahkan, pemerintah juga harus selalu berorientasi pada pemberian layanan prima kepada masyarakat. Pelayanan publik yang responsif, mudah diakses, dan berbasis teknologi menjadi fondasi penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. Dengan pendekatan yang ramah, efisien, dan inklusif, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat merasakan manfaat nyata dari kehadiran pemerintah.

Secara keseluruhan, pemerintah Kota Probolinggo perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam setiap kebijakan dan programnya demi menciptakan pemerintahan yang efektif, bersih, dan berdaya saing tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2.9 POTENSI DAERAH

Potensi daerah merupakan segala aspek yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung

pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan yang tepat atas potensi ini akan memberikan dampak positif dalam peningkatan perekonomian daerah, kualitas hidup masyarakat, serta kesejahteraan secara menyeluruh. Kota Probolinggo dengan luas wilayah 55,197 km^2 terbagi dalam 5 kecamatan dan 29 kelurahan. Kota Probolinggo merupakan kota sedang yang berfungsi sebagai pusat dari WP Probolinggo – Lumajang dalam konstelasi perwilayahan Provinsi Jawa Timur dan bagian dari kawasan kebudayaan Pendalungan yang berbatasan langsung dengan Selat Madura memiliki berbagai potensi yang dapat mengungkit daya saing daerah.

Sebagai kota berkembang, potensi ekonomi Kota Probolinggo yang terus mengalami peningkatan hingga 5,15 pada tahun 2024 dan lebih tinggi dari rata provinsi Jawa Timur dan nasional dengan pertumbuhan tertinggi tercatat pada 3 sektor lapangan usaha yaitu : (1) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (2) Transportasi dan Pergudangan; serta (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam Struktur PDRB didominasi oleh : (1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (2) Sektor Transportasi dan Pergudangan; serta (3) Sektor Industri Pengolahan, dengan rata-rata kontribusi total terhadap PDRB ADHB sebesar 55,87%. Sebagaimana tipologi perkotaan, sektor pertanian menjadi sektor dengan pertumbuhan lambat dan tidak bisa berdaya saing mengingat semakin terbatasnya lahan pertanian di wilayah perkotaan.

Kota Probolinggo dengan jumlah penduduk 249.560 jiwa dengan 69,03% usia produktif merupakan bonus demografi yang bisa menjadi akselerator pembangunan. Bahkan dalam lima tahun kedepan penduduk Kota Probolinggo diproyeksi mengalami peningkatan kurang lebih 10.500 jiwa. Ketersediaan sejumlah sekolah atau lembaga Pendidikan, lembaga keterampilan dan sarana atau fasilitas Kesehatan yang terstandarisasi mampu mendukung pengembangan kualitas SDM. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia yang berkategori tinggi hingga sebesar 77.79 pada Tahun 2024.

Potensi Pariwisata, Kota Probolinggo yang merupakaan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, menjadi pintu utama menuju destinasi wisata alam yang terkenal dan menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu juga terdapat destinasi wisata seperti Kota Probolinggo terdapat 13 destinasi yaitu Museum Dr. Moh Saleh, Museum Probolinggo, Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL), Bee Jay Bakau Resort (BJBR), Kolam Renang TRA Bayuangga, Kolam Renang Olimpic, Gereja Merah, Pelabuhan Perikanan

Pantai, Klenteng Tri Dharma, Pantai permata, Sumber Sentong, Kolam Renang Putra Papua, dan Pelabuhan Tanjung Tembaga Wisata Kum-Kum yang berpotensi sebagai daya tarik ekonomi daerah.

Potensi Industrialisasi, Kota Probolinggo memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri pengolahan hasil alam, pertanian dan perikanan. Industri kerajinan tangan dari bahan lokal seperti batik, bordir, keramik, tenun, dan anyaman bisa menjadi sektor yang menarik untuk dikembangkan, baik sebagai produk domestik dan ekspor. Selain itu dengan tingginya kunjungan wisatawan, industri Pariwisata dan Penginapan berpotensi berkembang pesat yang dapat mengungkit kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1 VISI DAN MISI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029

Dinamika penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 selain berkaitan dengan transisi kepemerintahan dari wali kota lama kepada wali kota yang baru, juga diwarnai dengan penyesuaian atau transisi dari acuan penyusunan dokumen perencanaan dari sebelumnya mengacu terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berubah dengan memedomani Intruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Merujuk terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijelaskan bahwa Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijelaskan bahwa Visi dan Misi kepala daerah dipilih diperkenankan untuk dibahas secara teknokratik. Hal tersebut bertujuan guna memastikan bahwa adanya kesesuaian / keberlanjutan dari rancangan teknokratik terhadap visi dan misi kepala daerah terpilih. Sehingga visi dan misi kepala daerah terpilih tidak hanya saja mendapat legitimasi dari masyarakat melalui pemilihan umum secara politis melainkan juga dapat selaras dengan arah pembangunan jangka panjang serta rancangan teknokratik yang memerhatikan isu strategis pembangunan daerah.

Mempertimbangkan pada sub bab sebelumnya terkait dengan isu strategis dan memerhatikan visi secara politik kepala daerah terpilih, maka diputuskan tidak adanya perubahan / penyesuaian terkait redaksional visi. Hal tersebut dikerenakan visi kepala daerah terpilih 2025-2029 sangat represesntatif menggambarkan cita-

cita pembangunan Kota Probolinggo tahun 2029. Berikut merupakan Visi Kota Probolinggo 2025-2029:

MEWUJUDKAN KOTA PROBOLINGGO YANG TANGGUH, BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, MODERN, DAN ADAPTIF

Berdasarkan redaksi visi Kota Probolinggo 2025-2029 diatas dapat ditangkap bahwa setidaknya terdapat 5 kata kunci yang dapat ditekankan meliputi tangguh, berkelanjutan, sejahtera, modern, dan adaptif. Memahami lebih dalam terkait landasan filosofis dari visi tersebut berikut merupakan gambaran maksude tersirat dari poin-poin visi sebagai berikut:



Gambar III-1 Pokok-Pokok Visi Kota Probolinggo 2025-2029
Sumber: Diolah, 2025

Lebih detail memahami pokok-pokok visi Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 berikut merupakan penjabaran detailnya

1. **Tangguh**

   Kota Probolinggo yang "Tangguh" menggambarkan ketahanan kota dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun kebencanaan. Ketangguhan ini mencakup kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah secara mandiri dan berdaya saing tinggi. Pembangunan yang berorientasi pada ketangguhan mencakup ketahanan ekonomi terhadap krisis, ketahanan sosial dalam menjaga keharmonisan masyarakat, serta ketahanan lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana.

2. **Berkelanjutan**

   Pembangunan Kota Probolinggo harus berorientasi jangka panjang dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berkelanjutan berarti memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan hari ini tidak mengorbankan generasi mendatang. Kota Probolinggo akan mengutamakan prinsip pembangunan hijau (green development), efisiensi energi, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, termasuk dukungan dalam pencapaian Indikator SDG's.

3. **Sejahtera**

   Kota Probolinggo yang "Sejahtera" berarti menciptakan kondisi di mana seluruh masyarakat memiliki akses yang adil terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sejahtera mencakup peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan yang merata, akses kesehatan yang baik, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Kota yang sejahtera juga berarti memberikan kepastian akan kebutuhan dasar, akses terhadap lapangan kerja, dan jaminan sosial yang inklusif bagi seluruh warga.

4. **Modern**

   Kota Probolinggo yang "Modern" menggambarkan kemajuan kota yang didukung oleh inovasi teknologi dan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital. Modernitas tidak hanya mencakup infrastruktur fisik yang maju, tetapi juga pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, sistem transportasi yang lebih efisien, serta pengelolaan kota yang berbasis smart city. Kota modern juga berarti memiliki ekosistem ekonomi kreatif dan industri yang

berkembang untuk meningkatkan daya saing daerah.

5. Adaptif

   Kota Probolinggo yang "Adaptif" menggambarkan fleksibilitas dan kesiapan dalam menghadapi dinamika perubahan, baik di tingkat nasional maupun global. Adaptif berarti responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam aspek regulasi, kebijakan, teknologi, serta perubahan sosial dan ekonomi. Kota yang adaptif akan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan baru, seperti perubahan iklim, transformasi digital, dan pergeseran pola ekonomi global, sehingga tetap relevan dan kompetitif dalam segala situasi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Sebagai gambaran penjabaran visi berikut merupakan misi kepala daerah daerah terpilih yang tentunya secara langsung telah memperoleh legitimasi dalam pemilu oleh masyarakat:

1. Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing
2. Masyarakat Mandiri Dan Sejahtera
3. Transformasi Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan
4. Pemerintah Yang Adaptif Dan Layanan Publik yang Prima
5. Integrasi Infrasturktur, Konektifitas Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan teknokratis, misi politis diatas setidaknya sudah cukup mewakili upaya apa saja yang perlu ditempuh guna mencapai visi Kota Probolinggo Tahun 2029. Bila diperhatikan secara tersurat misi tersebut sangat erat dan identik kaitanya terhadap misi jangka panjang Kota Probolinggo dalam RPJPD Tahun 2025-2045, cukup representatif namun sebagai bagian / tahapan pertama periodesasi RPJPD misi yang tertuang diatas cukup general. Hal tersebut menunjukkan perlu adanya penekanan-penekanan sebagai fokus arah pembangunan 5 tahun kedepan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kota Probolinggo tahun 2025-2029. Berdasarkan konsensus antara tim teknokrat dengan kepala daerah terpilih maka berikut

merupakan misi Kota Probolinggo 2025-2029 yang disepakati sebagai misi penyempurna dari misi diatas yakni sebagai berikut :

1. Penguatan Kualitas SDM sebagai Modal Dasar Pembangunan;
2. Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan;
3. Ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah yang didukung Integrasi Ekonomi Digital;
4. Birokrasi adaptif, modern dan berorientasi layanan; dan
5. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Penggerak Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan

Dengan memperhatikan isu strategis Kota Probolinggo, berikut merupakan linieritas antara isu strategis yang tertuang dalam dokumen Rancangan Teknokratik Kota Probolinggo dengan misi Kota Probolinggo tahun 2025-2029:

Tabel III.1 Keterkaitan Isu Strategis dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029

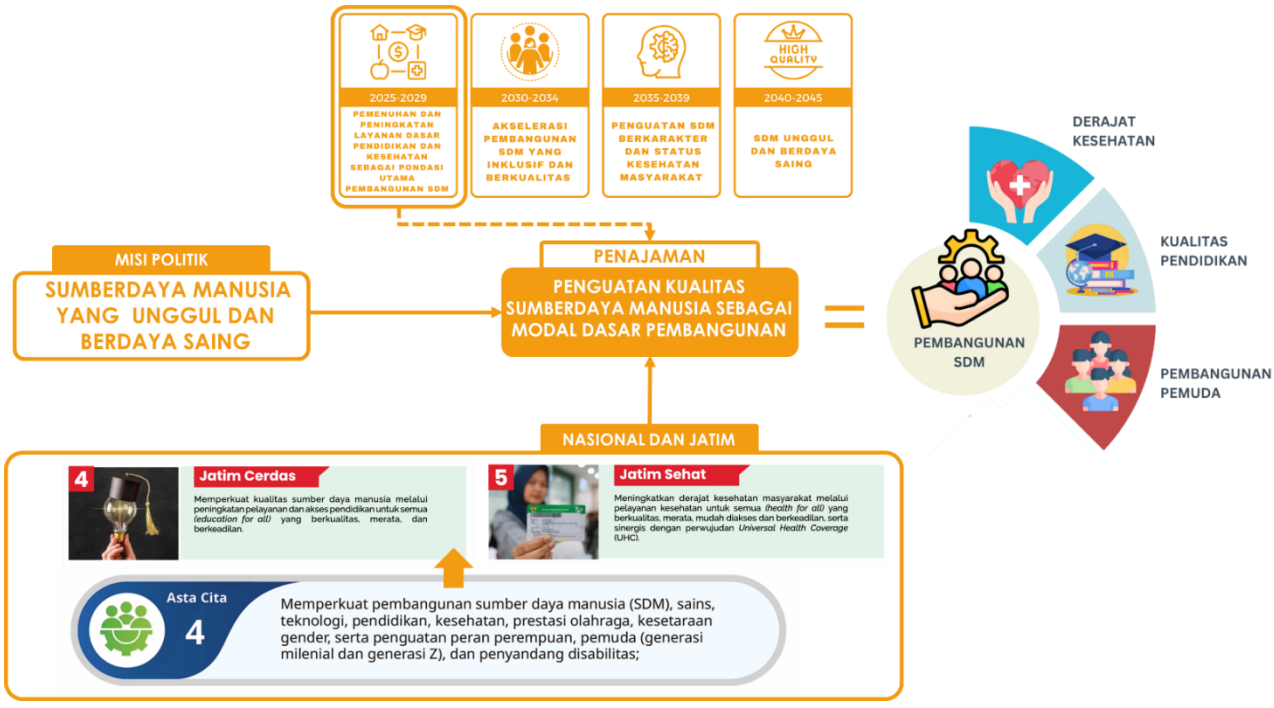
ISU STRATEGIS	MISI RPJMD 2025-2029
Pemerataan akses kebutuhan dasar serta pengembangan SDM berkualitas	Penguatan Kualitas SDM sebagai Modal Dasar Pembangunan
Pembangunan Inklusif yang didukung Usaha Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Rentan	Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan
Pertumbuhan ekonomi inklusif berkeadilan pada sektor-sektor unggulan serta optimalisasi pendapatan daerah untuk mendorong kemandirian fiscal	Ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah yang didukung Integrasi Ekonomi Digital
Optimalisasi Riset dan Inovasi daerah dalam konteks perencanaan pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Publik	Birokrasi adaptif, modern dan berorientasi layanan
Pemerintahan yang bersih, adaptif, serta berorientasi layanan	
Upaya pengendalian lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim untuk meningkatkan resiliensi dan ketahanan pangan daerah	Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Penggerak Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan
Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar serta infrastruktur leverage ekonomi	

Sumber: Diolah, 2025

Gambaran diatas merupakan linieritas antara isu strategis yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik Kota Probolinggo Tahun 2025-2029. Rancangan teknokratik Kota Probolinggo merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang disusun oleh teknokratik sebagai pertimbangan calon kepala daerah dalam pilkada menetapkan dan mendaftarkan Visi dan Misinya. Berikut merupakan penjelesan lebih detail dari masing-masing Misi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2025-2029:

3.1.1.1 MISI I PENGUATAN KUALITAS SDM SEBAGAI MODAL DASAR PEMBANGUNAN

Misi pertama ini menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan pondasi utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kota Probolinggo. Secara filosofis, sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing merupakan fondasi utama yang menentukan arah serta keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Probolinggo menempatkan penguatan kualitas SDM sebagai prioritas utama, sebagaimana tercermin dalam penempatan misi ini pada urutan pertama dalam dokumen perencanaan pembangunan. Komitmen ini menegaskan bahwa pembangunan manusia bukan hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan kemajuan daerah secara berkelanjutan serta sebagai instrumen untuk mencapai visi Kota Probolinggo yang Tangguh, Berkelanjutan, Sejahtera, Modern, dan Adaptif. Pilar utama dalam penguatan SDM ini bertumpu pada peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, dua sektor fundamental yang saling berkaitan dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, dan produktif. Berikut merupakan gambaran poin-poin utama Misi I Kota Probolinggo tahun 2025-2029 yang mana pada penyempurnaanya memerhatikan RPJPD, RPJMN, RPJMD, serta Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih tentang pembangunan manusia:

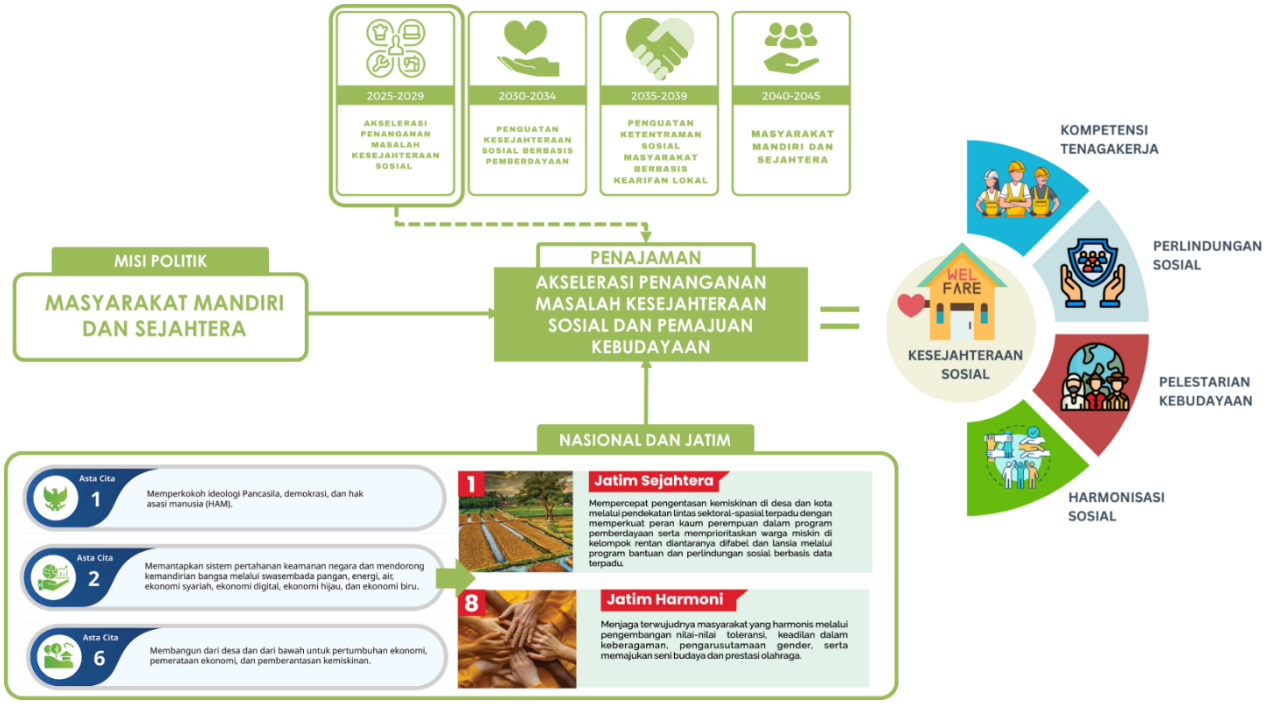


Gambar III-2 Kerangka Pikir Penajaman Misi I Kota Probolinggo
Sumber: Diolah, 2025

Dalam implementasinya, misi ini diarahkan pada pemenuhan dan peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan secara merata dan berkualitas. Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen memperluas akses pendidikan melalui jaminan mutu layanan pendidikan di semua jenjang, mendukung penuh program wajib belajar 13 tahun, serta mendorong peningkatan daya saing pemuda melalui pengembangan potensi di bidang olahraga dan kepemudaan. Di sisi lain, cakupan layanan kesehatan masyarakat juga diperluas, dengan peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan serta penguatan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pendekatan holistik ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, serta memiliki daya saing yang tinggi, sehingga menjadi motor penggerak pembangunan Kota Probolinggo menuju masa depan yang lebih baik.

3.1.1.2 MISI II AKSELERASI PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Misi ini bertujuan untuk mempercepat penanganan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang selama ini menjadi tantangan utama pembangunan di Kota Probolinggo. Pengentasan kemiskinan secara efektif menjadi prioritas utama, dengan pendekatan yang tidak hanya fokus pada bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan produktif. Pemerintah Kota Probolinggo akan memperluas cakupan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, memastikan adanya kesetaraan gender, serta menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja lokal yang kompeten dan berdaya saing. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran, menekan ketimpangan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan sosial yang merata akan menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan visi Kota Probolinggo yang sejahtera dan inklusif. Berikut merupakan gambaran poin-poin utama Misi II Kota Probolinggo tahun 2025-2029 yang mana pada penyempurnaanya memerhatikan RPJPD, RPJMN, RPJMD, serta Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih tentang kesejahteraan sosial:



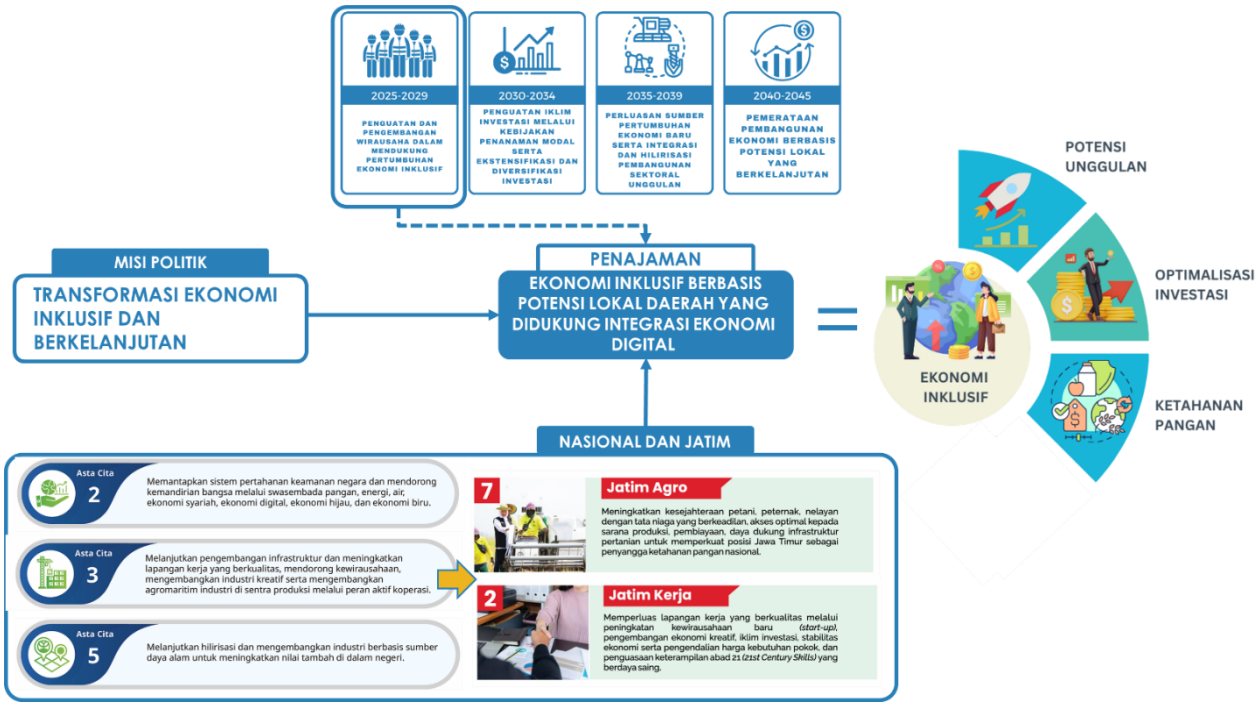
Gambar III-3 Kerangka Pikir Penajaman Misi II Kota Probolinggo
Sumber : Diolah, 2025

Di sisi lain, pemajuan kebudayaan juga menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, berkarakter, dan berdaya saing di tengah dinamika modernisasi. Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya daerah, sekaligus mendorong pengembangan kebudayaan sebagai bagian dari identitas kota yang kuat. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi prioritas untuk menciptakan ruang hidup yang nyaman dan harmonis, mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman sosial. Melalui misi ini, Kota Probolinggo optimis dapat mewujudkan kehidupan sosial yang adil, setara, dan bermartabat, sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya yang memperkokoh jati diri daerah.

3.1.1.3 MISI III EKONOMI INKLUSIF BERBASIS POTENSI LOKAL DAERAH YANG DIDUKUNG INTEGRASI EKONOMI DIGITAL

Misi ketiga ini berfokus pada percepatan pembangunan ekonomi Kota Probolinggo yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memaksimalkan potensi lokal di sektor perdagangan, jasa, dan industri. Sebagai kota dengan tipologi perkotaan kecil, pengembangan ekonomi diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu mendorong pertumbuhan lapangan kerja, khususnya melalui penguatan UMKM dan industri kreatif berbasis potensi lokal. Pemerintah Kota Probolinggo juga akan

mengintegrasikan teknologi digital untuk mendukung transformasi ekonomi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan efisiensi usaha di berbagai sektor. Melalui akselerasi investasi produktif, peningkatan daya saing perdagangan dan jasa, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif, Kota Probolinggo diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor-sektor unggulannya secara merata. Berikut merupakan gambaran poin-poin utama Misi III Kota Probolinggo tahun 2025-2029 yang mana pada penyempurnaanya memerhatikan RPJPD, RPJMN, RPJMD, serta Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih tentang ekonomi yang inklusif:



Gambar III-4 Kerangka Pikir Penajaman Misi III Kota Probolinggo
Sumber: Diolah, 2025

Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan di Kota Probolinggo tidak hanya bertumpu pada peningkatan produktivitas lahan pertanian yang terbatas, tetapi juga mengutamakan strategi pengelolaan distribusi pangan melalui sektor perdagangan. Intervensi pengendalian harga dan stabilisasi pasokan menjadi kunci utama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pemerintah kota akan memperkuat jejaring perdagangan pangan antarwilayah serta memfasilitasi pengembangan pasar yang efisien dan transparan. Dengan strategi ini, ketahanan pangan dapat terjaga, sementara perekonomian daerah terus tumbuh berbasis potensi lokal yang didukung oleh investasi produktif dan integrasi teknologi digital. Misi ini diharapkan mampu mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota modern yang tangguh, sejahtera, dan adaptif dalam menghadapi dinamika pembangunan ekonomi global.

3.1.1.4 MISI IV BIROKRASI ADAPTIF, MODERN DAN BERORIENTASI LAYANAN

Misi keempat bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Probolinggo yang adaptif, modern, dan berorientasi pada layanan publik yang prima. Dalam upaya membangun birokrasi yang profesional, mandiri, dan akuntabel, Pemerintah Kota Probolinggo akan mendorong transformasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi prioritas, agar mampu merespon tantangan pembangunan secara cepat, tepat, dan inovatif. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien ini juga didukung dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang bertujuan menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Berikut merupakan gambaran poin-poin utama Misi IV Kota Probolinggo tahun 2025-2029 yang mana pada penyempurnaanya memerhatikan RPJPD, RPJMN, RPJMD, serta Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih tentang tata kelola pemerintah yang adaptif:



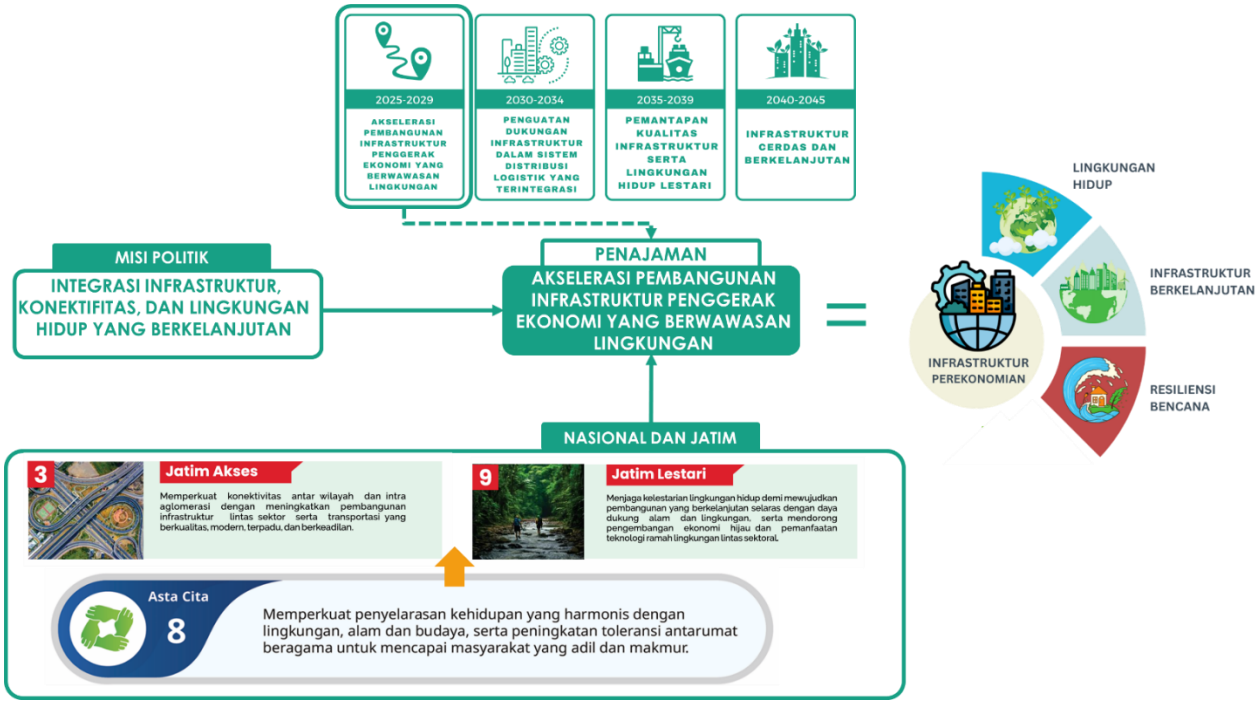
Gambar III-5 Kerangka Pikir Penajaman Misi IV Kota Probolinggo
Sumber: Diolah, 2025

Selain itu, pembangunan ekosistem pelayanan publik yang humanis dan modern menjadi bagian dari strategi dalam memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Probolinggo akan mendorong penguatan pelayanan publik terpadu, memperluas cakupan layanan berbasis digital, serta mengadopsi inovasi-inovasi layanan

yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta pelayanan publik yang lebih mudah diakses, cepat, dan efisien, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan. Misi ini mendukung terwujudnya Kota Probolinggo yang tangguh, berkelanjutan, sejahtera, modern, dan adaptif dalam menghadapi berbagai dinamika pemerintahan di era transformasi digital.

3.1.1.5 MISI V AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGGERAK EKONOMI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Misi kelima menegaskan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang tidak hanya menjadi penggerak utama perekonomian, tetapi juga berwawasan lingkungan. Dalam menghadapi tantangan perkotaan, seperti keterbatasan ruang, pertumbuhan kawasan permukiman kumuh, dan risiko bencana, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah secara merata dan terintegrasi dengan penataan ruang yang adaptif. Penyediaan infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase, air bersih, sanitasi, dan perumahan layak huni menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di samping itu, pembangunan infrastruktur ini harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar tidak menambah beban terhadap kualitas lingkungan hidup yang sudah menurun. Berikut merupakan gambaran poin-poin utama Misi V Kota Probolinggo tahun 2025-2029 yang mana pada penyempurnaanya memerhatikan RPJPD, RPJMN, RPJMD, serta Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih tentang infrastruktur berkelanjutan:



Gambar III-6 Kerangka Pikir Penajaman Misi V Kota Probolinggo
Sumber: Diolah, 2025

Selain itu, pembangunan infrastruktur Kota Probolinggo juga diarahkan untuk memperkuat resiliensi terhadap bencana, baik yang bersifat alam maupun non-alam. Upaya mitigasi dan pengelolaan risiko bencana menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah, guna menciptakan kota yang tangguh menghadapi perubahan iklim dan potensi bencana lainnya. Pemantapan resiliensi perkotaan diwujudkan melalui pengembangan ruang terbuka hijau, konservasi lingkungan, serta penerapan sistem peringatan dini bencana yang terintegrasi. Dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, Kota Probolinggo diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, modern, dan adaptif.

3.1.2 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 (berdasarkan janji politik Kepala Daerah) yang telah mendapat legitimasi dari masyarakat melalui pemilihan umum tentunya masih belum terukur. Untuk memastikan cita-cita Kota Probolinggo akan tercapai pada tahun 2029 maka visi dan misi tersebut perlu diselaraskan dengan kerangka teknokratis dan diterjemahkan kedalam rangkaian kinerja yang terukur, yang di *breakdown* mulai dari kondisi dampak perubahan yang dicita-citakan hingga pada level yang sangat operasional. Selain itu perangkat daerah sebagai

motor penggerak birokrasi dalam mencapai Visi Pembangunan Daerah Kota Probolinggo hingga Tahun 2030 harus dipetakan sehingga tampak siapa melakukan apa, dengan tolok ukur keberhasilan apa maka tujuan dan sasaran Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 disusun memerhatikan visi dan misi, yang juga melihat keselarasannya dengan RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 serta RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.

Sarat utama disusunya tujuan dan sasaran RPJMD adalah *measurable* dan *tangible.* Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang *measurable* yang dimaksud ialah baik tujuan maupun sasaran RPJMD harus dipastikan untuk dapat diukur. Hal tersebut seperti yang kita kenal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mana dalam IKU yang dimaksud dalam dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 ialah indikator tujuan dan sasaran RPJMD. Secara penjenjangan kinerja IKU Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 nantinya akan menjadi perjanjian kinerja Wali Kota yang akan dipertanggung jawabkan setiap tahunnya dalam laporan kinerja tahunan. Sedangkan *tangible* yang dimaksud ialah tujuan dan sasaran RPJMD hasilnya nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berikut merupakan rumusan tujuan dan sasaran Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang disajikan pula beserta indikatornya:

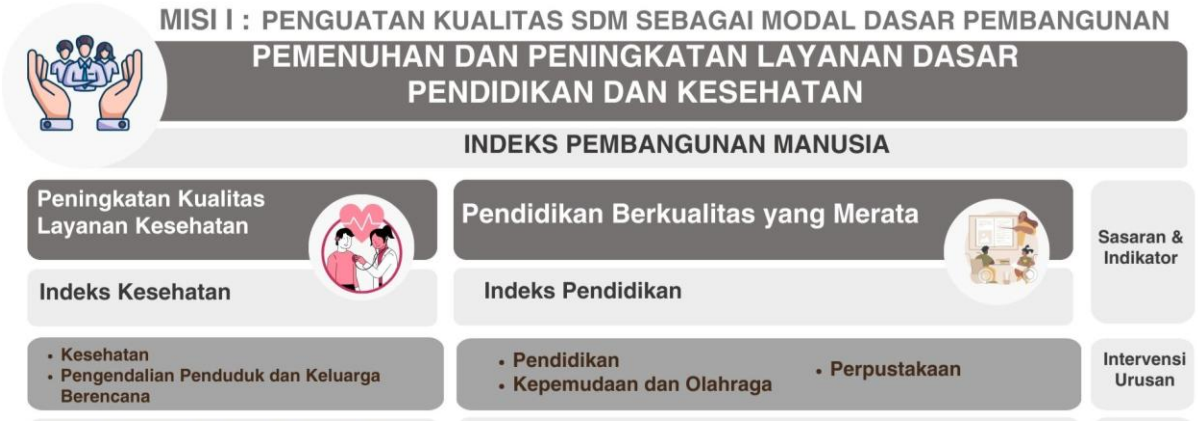
3.1.2.1 TUJUAN DAN SASARAN MISI I

Misi I Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 fokus terhadap pembangunan SDM yang berkualitas secara tersurat ialah sebagai berikut "**Penguatan Kualitas SDM Sebagai Modal Dasar Pembangunan**". Memahami makna tersurat maupun tersirat dari misi I diatas maka ditetapkanlah kinerja tujuan dan sasaran pembangunan SDM Kota Probolinggo sebagai berikut:

- Tujuan : Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan, kemudian sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kota Probolinggo maka berikut merupakan sasaran pembangunan SDM Kota Probolinggo Tahun 2025-2029:
  1) Pendidikan Berkualitas yang Merata; dan
  2) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi I RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* misi I yang disajikan sebagai berikut:



Gambar III-7 Cascading Misi I RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029
Sumber: Diolah, 2025

Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi landasan utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah, yang diwujudkan melalui upaya peningkatan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Akses yang merata dan kualitas yang semakin baik pada kedua sektor ini menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengan penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, diharapkan derajat kesehatan masyarakat terus meningkat, sehingga mampu mendukung produktivitas dan daya saing SDM. Sementara itu, pendidikan yang merata dan bermutu menjadi fondasi dalam menciptakan generasi yang berpengetahuan dan terampil, siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Melalui sinergi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan ini, pembangunan sumber daya manusia akan semakin kuat, yang pada akhirnya mendorong peningkatan Indeks Modal Manusia sebagai tolok ukur keberhasilan investasi daerah dalam pengembangan SDM unggul.

3.1.2.2 TUJUAN DAN SASARAN MISI II

Misi II Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 fokus terhadap meningkatkan kesejahteraan sosial secara tersurat ialah sebagai berikut "**Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan**". Memahami makna tersurat maupun tersirat dari misi II diatas maka ditetapkanlah kinerja tujuan dan sasaran meningkatkan kesejahteraan sosial Kota Probolinggo sebagai berikut:

- Tujuan : Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan, kemudian sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat

pembangunan Kota Probolinggo maka berikut merupakan sasaran kesejahteraan sosial Kota Probolinggo Tahun 2025-2029:

1) Peningkatan Kemandirian Sosial Masyarakat;
2) Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing;
3) Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya serta Pengembangan Kebudayaan.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi II RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* misi II yang disajikan sebagai berikut:



Gambar III-8 Cascading Misi II RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029
Sumber: Diolah, 2025

Pembangunan yang berfokus pada percepatan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan pemajuan kebudayaan diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan, sekaligus memperkuat pelestarian serta pengembangan budaya daerah. Upaya ini diwujudkan melalui perluasan cakupan perlindungan sosial yang menyentuh kelompok rentan, mendorong kemandirian masyarakat, dan memperkuat kesetaraan gender, sehingga mampu menekan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatkan Indeks Pembangunan Gender. Di sisi lain, peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja menjadi prioritas penting dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka, menciptakan kesempatan kerja yang lebih merata. Dalam rangka menjaga identitas dan memperkokoh daya saing daerah, perlindungan dan pelestarian warisan budaya terus diperkuat, dengan memastikan budaya lokal dikelola secara profesional sehingga menjadi kekuatan ekonomi dan sosial.

3.1.2.3 TUJUAN DAN SASARAN MISI III

Misi III Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 fokus terhadap meningkatnya inklusifitas ekonomi secara tersurat ialah sebagai berikut "**Ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah yang didukung Integrasi Ekonomi Digital**". Memahami makna tersurat maupun tersirat dari misi III diatas maka ditetapkanlah kinerja tujuan dan sasaran meningkatkan ekonomi yang inklusif di Kota Probolinggo sebagai berikut:

a. Akselerasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektoral, kemudian sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kota Probolinggo maka berikut merupakan sasaran tujuan pertama misi III Kota Probolinggo Tahun 2025-2029:
   1) Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah; dan
   2) Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Sumberdaya Lokal yang didukung peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;

b. Penguatan Ekonomi Inklusif berbasis Investasi Produktif, kemudian sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kota Probolinggo maka berikut merupakan sasaran tujuan kedua misi III Kota Probolinggo Tahun 2025-2029:
   3) Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal;

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi III RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading misi III yang disajikan sebagai berikut:



Gambar III-9 Cascading Misi III RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029
Sumber: Diolah, 2025

Pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, dengan memanfaatkan potensi lokal yang didukung oleh integrasi ekonomi digital. Akselerasi pengembangan ekonomi sektoral menjadi kunci utama, khususnya dalam meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah seperti industri, perdagangan, pariwisata, koperasi dan UMKM serta usaha penguatan ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal yang didukung pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dari daya ungkit Sektor Industri, Perdagangan, UMKM, memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta jaminan meningkatkannya ketahanan pangan, kesejahteraan petani dan nelayan dari nilai tukar petani (NTP) dan nelayan (NTN). Di sisi lain, penguatan ekonomi inklusif juga diperkuat melalui peningkatan daya saing investasi yang produktif, yang tercermin dari pertumbuhan penanaman modal dan optimalisasi pembentukan modal tetap bruto. Dengan strategi tersebut, diharapkan perekonomian daerah semakin tangguh, efisien, dan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.1.2.4 TUJUAN DAN SASARAN MISI IV

Misi IV Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 fokus terhadap mewujudkan birokrasi yang berorientasi layanan secara tersurat ialah sebagai berikut "**Birokrasi adaptif, modern dan berorientasi layanan**". Memahami makna tersurat maupun tersirat dari misi III diatas maka ditetapkanlah kinerja tujuan dan sasaran mewujudkan birokrasi berorientasi layanan Kota Probolinggo sebagai berikut:

- Tujuan : Penyelenggaraan Pemerintahan yang Mandiri, Akuntabel dan Profesional serta Transformasi Pelayanan Publik, kemudian sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kota Probolinggo maka berikut merupakan sasaran mewujudkan birokrasi berorientasi layanan Kota Probolinggo Tahun 2025-2029:
  1) Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Produktif dan Dinamis; dan
  2) Penguatan Pelayanan Publik Terpadu, Efektif dan Efisien didukung Ekosistem Inovasi;
  3) Stabilitas Keamanan dan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi IV RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* misi IV yang disajikan sebagai berikut:



Gambar III-10 Cascading Misi IV RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029
Sumber: Diolah, 2025

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang adaptif, modern, dan berorientasi pada layanan, pembangunan difokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, akuntabel, dan profesional, sekaligus mendorong transformasi pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, produktif, dan dinamis, tercermin melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja (SAKIP), opini wajar dari BPK, penguatan maturitas SPIP, penerapan sistem merit yang konsisten, serta optimalisasi layanan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Di sisi lain, penguatan pelayanan publik terus didorong agar terpadu, efektif, dan efisien, dengan dukungan ekosistem inovasi yang mendorong kreativitas dan kemudahan akses layanan. Selain itu usaha transformasi pelayanan publik juga didukung oleh stabilitas keamanan serta harmonisasi kehidupan masyarakat, yang tercermin melalui peningkatan indeks ketentraman dan ketertiban umum, sebagai bentuk bagian dari pelayanan publik dari sisi pemerintahan umum bagi masyarakat selain pelayanan publik dari sisi administrasi pemerintahan sebagai pondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan yang berkeadilan. Keseluruhan langkah strategis ini diharapkan mampu meningkatkan indeks reformasi birokrasi, memperkuat indeks pelayanan publik, serta menciptakan inovasi yang menjadi katalisator terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

3.1.2.5 TUJUAN DAN SASARAN MISI V

Misi V Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 fokus terhadap infrastruktur berkelanjutan secara tersurat ialah sebagai berikut "**Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Penggerak Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan**". Memahami makna tersurat maupun tersirat dari misi V diatas maka ditetapkanlah kinerja tujuan dan sasaran mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan Kota Probolinggo sebagai berikut:

a. Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan, kemudian sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kota Probolinggo maka berikut merupakan sasaran tujuan pertama dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan Kota Probolinggo Tahun 2025-2029:
   1) Pengembangan infrastruktur Berbasis Instrumen Penataan Ruang untuk mendukung konektivitas antarwilayah
b. Pemantapan Resiliensi Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan, kemudian sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kota Probolinggo maka berikut merupakan sasaran tujuan kedua dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan Kota Probolinggo Tahun 2025-2029:
   1) Resiliensi terhadap Bencana; dan
   2) Pelestarian Lingkungan Hidup

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi V RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* misi V yang disajikan sebagai berikut:



Gambar III-11 Cascading Misi V RPJMD Kota Probolinggo 2025-2029
Sumber: Diolah, 2025

Akselerasi pembangunan infrastruktur difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan di wilayah perkotaan. Pemerataan dan pemantapan infrastruktur menjadi prioritas, melalui pengembangan yang terintegrasi dengan instrumen penataan ruang guna meningkatkan konektivitas antarwilayah secara optimal. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan infrastruktur sekaligus memperluas akses dan efisiensi mobilitas, yang tercermin dari peningkatan indeks infrastruktur dan rasio konektivitas. Selain itu, pembangunan juga diarahkan pada penguatan resiliensi perkotaan yang berwawasan lingkungan, dengan fokus pada penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), peningkatan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana, serta pelestarian kualitas lingkungan hidup. Dengan langkah-langkah tersebut, pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kota yang tangguh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Berikut merupakan gambaran umum target kinerja RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029:

Tabel III.2 Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN (IKU)	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA KOTA PROBOLINGGO TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
T.1	**Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**77.79**	**77,64 - 77,99**	**77,83 -78,43**	**78,22 - 79,12**	**78,61 - 79,81**	**79,00 - 81,20**	**79,49 - 82,05**
S.1	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Indeks Pendidikan	Indeks	0.71	0.715	0.720	0.725	0.730	0.735	0.740
S.2	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0.836	0.838	0.839	0.841	0.843	0.844	0.846
T.2	**Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan**	**1. Persentase Penduduk Miskin**	**%**	**6.18**	**5,01 - 5,89**	**4,98 - 5,7**	**4,88 - 5,45**	**4,78 - 5,26**	**3,32 - 4,95**	**3,13 - 4,32**
		2. Rasio Gini	**Indeks**	**0.344**	**0,33 - 0,37**	**0,325 -0,365**	**0,320 -0,360**	**0,315 -0,355**	**0,310 -0,350**	**0,305 -0,345**
		3. Indeks Kebudayaan berbasis Capaian Pelaksanaan PPKD / Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	**Indeks**	**54.76**	**70**	**72**	**74**	**76**	**78**	**80**
S.3	Peningkatan Kemandirian Sosial Masyarakat	Persentase Penurunan PPKS / PMKS / PAS	%	8,792	9,193	9,596	10,001	10,467	10,875	11,284
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,26	97,5	97,78	97,95	98,15	98,38	98,5
S.4	Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,44	3,72	3,67	3,52	3.32	3.22	3.17
S.5	Perlindungan dan Pelestarian Warisan	Persentase kebudayaan yang	%	32,03	33,59	35,16	36,72	38,28	39,84	41,41

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN (IKU)	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA KOTA PROBOLINGGO TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Budaya serta Pengembangan Kebudayaan	dikelola menjadi daya saing daerah								
T.3	**Akselerasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektoral**	**1. Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**5,15**	**5,17 - 5,54**	**5,18-5,58**	**5,20-6,11**	**5,23-6,33**	**5,29-6,67**	**5,39-6,75**
		2. PDRB per Kapita	**Juta Rupiah**	**61,61**	**61,93-63,85**	**62,78-67,82**	**63,81-71,79**	**64,84-75,77**	**65,88-79,74**	**66,91-88,72**
		3. Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	**%**	**0,48**	**0,481**	**0,482**	**0,484**	**0,485**	**0,487**	**0,49**
S.6	Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	1. Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	14,63	14,69-14,86	14,75-15,1	14,83-15,33	14,91-15,56	15-15,8	15,10-16,03
		2. Rasio PDRB Sektor Perdagangan	%	26,20	26,33-26,36	26,46-26,53	26,59-26,71	26,73-26,91	26,86-27,13	27-27,36
		3. Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD	%	4,67	4,68	4,69	4,70	4,71	4,72	4,73
S.7	Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Sumberdaya Lokal yang didukung peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan	1. Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,62	79,30	79,98	80,66	81,34	82,02	82,70
		2. NTP (Nilai Tukar Petani)	Indeks	111,33	111,40	111,50	111,60	111,70	111,80	111,90
		3. NTN (Nilai Tukar Nelayan)	Indeks	97,18	97,20	97,22	97,24	97,26	97,28	97,30
T.4	**Penguatan Ekonomi Inklusif berbasis Investasi Produktif**	**1. ICOR**	**Nilai**	**3,61**	**3,09**	**3,084**	**3,078**	**3,072**	**3,065**	**3,059**
		2. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**%**	**17,05**	**17,07-17,14**	**17,08-17,22**	**17,10-17,31**	**17,12-17,39**	**17,14-17,48**	**17,15-17,57**
S.8	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal	%	-0,21	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
T.5	**Penyelenggaraan Pemerintahan yang**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**85,66**	**85,94**	**86.54**	**87.14**	**87.74**	**88.34**	**88.94**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN (IKU)	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA KOTA PROBOLINGGO TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Mandiri, Akuntabel dan Profesional serta Transformasi Pelayanan Publik									
S.9	Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Produktif dan Dinamis	Nilai SAKIP	Nilai	71,91	72,50	73,00	73,50	74,00	74,50	75
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3	3	3	3	3
		Indeks Sistem Merit	Nilai	Indeks : 0,74* Nilai : 303*	Indeks : 0,75 Nilai : 308	Indeks : 0,76 Nilai : 312	Indeks : 0,77 Nilai : 316	Indeks : 0,78 Nilai : 320	Indeks : 0,79 Nilai : 325	Indeks : 0,80 Nilai : 328
		Indeks SPBE *(*Catatan : Mulai tahun 2026 dilakukan penguatan indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi))*	Nilai	4.04	4.09	1,74 - 1,97	1,84 - 2,12	1,94 - 2,26	2,04 - 2,41	2,14 - 2,55
S.10	Penguatan Pelayanan Publik Terpadu, Efektif dan Efisien didukung Ekosistem Inovasi	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,15	4.6	4.65	4.68	4.7	4.72	4.74
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	66,38	70.57	71.05	72.76	73.88	75.02	76.18
S.11	Stabilitas Keamanan dan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	70,00	70,49	71,02	71,59	72,20	72,85	73,54
T.6	**Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan**	**Indeks Infrastruktur**	**Indeks**	**74.66**	**76,88**	**77,64**	**78,4**	**79,16**	**79,92**	**80,68**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN (IKU)	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA KOTA PROBOLINGGO TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
S.12	Pengembangan infrastruktur Berbasis Instrumen Penataan Ruang untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	82.52	83.02	83.52	84.02	84.52	85.02	85.52
		Rasio Konektivitas	Nilai	84.61	84.61	84.61	92,3	92,3	92,3	92,3
T.7	**Pemantapan Resiliensi Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan**	**Penurunan Emisi GRK Kumulatif**	**Ton CO2 eq**	**342.851,836**	**366.851,465**	**392.531,068**	**420.008,242**	**449.408,819**	**480.867,437**	**514.528,157**
S.13	Pelestarian Lingkungan Hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	poin	58,17	66,51	66,59	66,67	66,74	66,82	66,90
S.14	Resiliensi terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	117,83	113,04	110,35	107,78	105,34	102,99	99,90

Sumber: Perangkat Daerah Data Diolah, 2025

Keterangan: (*) Angka sementara sambil menunggu rilis data capaian

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini memuat kerangka manajemen strategis yang menetapkan tujuan dan sasaran pemerintah daerah beserta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai hal tersebut. Pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diwujudkan secara konkret dalam perumusan strategi dan arah kebijakan, serta prioritas pembangunan daerah selama jangka waktu 5 tahun ke depan.

Dalam upaya perumusannya, permasalahan dan isu strategis yang telah teridentifikasi di bagian sebelumnya, dikaitkan dengan rangkaian solusi yang tercermin di dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang pada akhirnya menjadi modal utama dalam perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah hasil dari proses tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

3.2.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Secara mendasar, strategi merupakan rencana tindakan komprehensif yang dirumuskan untuk mencapai tujuan atau sasaran RPJMD. Strategi yang dirumuskan seyogyanya juga mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah yang telah dipetakan sebelumnya. Maka dari itu, dalam rangka memperoleh strategi komprehensif yang mengungkit langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran serta mampu menjawab permasalahan dan isu strategis, maka dalam penentuan alternatifnya, dilakukan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities* and *Threats* atau Analisis SWOT pada hasil telaah permasalahan dan isu-isu strategis yang sudah dilakukan sebelumnya. Metode ini merupakan salah satu perangkat analisis yang direkomendasikan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2019, karena kesesuaiannya dengan prinsip perencanaan pembangunan yang sederhana namun memiliki hasil yang relatif kuat dan menyasar pada inti permasalahan sesuai kategorisasinya sebagai daya dukung atau hambatan internal maupun eksternal.

Dengan prinsip komprehensivitas dan daya ungkit yang luas, suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu atau beberapa sasaran, dengan asumsi bahwa 1 strategi mampu mencapai sekurang-kurangnya 1 sasaran atau lebih. Dari

sekian banyak alternatif strategi yang muncul dari hasil analisis SWOT sebagai kertas kerja metode perencanaan pada kondisi pembangunan Kota Probolinggo, terdapat setidaknya 14 strategi yang ditetapkan sebagai upaya untuk mencapai 14 sasaran pembangunan. Adapun perincian strategi tersebut antara lain sebagai berikut:

ST 1. Perluasan, Penguatan Dan Jaminan Mutu Layanan Pendidikan Dalam Mendukung Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun Serta Daya Saing Pemuda Dan Olahraga

Tingginya angka anak tidak sekolah serta ketimpangan dalam sebaran dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata. Selain itu, tingkat literasi masyarakat yang belum optimal serta rendahnya minat baca digital mencerminkan masih terbatasnya akses terhadap sumber belajar yang memadai. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan strategi berupa perluasan akses, penguatan sistem, dan penjaminan mutu layanan pendidikan sebagai bagian dari upaya mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun. Strategi ini mencakup peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah, serta penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sebagai ujung tombak peningkatan mutu pembelajaran. Dalam bidang perpustakaan, strategi ini juga berfokus pada peningkatan literasi masyarakat melalui optimalisasi layanan perpustakaan berbasis digital serta program-program inovatif yang mendorong minat baca sejak usia dini.

Selain bidang pendidikan dan literasi, strategi pembangunan ini juga menitikberatkan pada pengembangan pemuda dan olahraga guna meningkatkan daya saing generasi muda Kota Probolinggo. Kurangnya kegiatan yang efektif dalam mendorong kewirausahaan muda serta pengembangan potensi keolahragaan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah menginisiasi berbagai program pelatihan kewirausahaan berbasis komunitas, akses pendanaan bagi startup muda, serta pendampingan bagi pemuda dalam mengembangkan usaha kreatif dan sosial. Di bidang olahraga, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan atlet usia dini, serta

penyelenggaraan kompetisi lokal hingga nasional menjadi langkah konkret dalam membangun ekosistem olahraga yang lebih maju. Dengan strategi ini, diharapkan Kota Probolinggo dapat menciptakan generasi muda yang tidak hanya unggul dalam pendidikan, tetapi juga berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi kreatif dan olahraga, sehingga mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan daerah.

ST 2. Perluasan Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan daerah, terutama dalam mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Kota Probolinggo masih menghadapi berbagai tantangan dalam sektor kesehatan, seperti ketimpangan dalam ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan, serta belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan medis. Selain itu, meningkatnya kasus penyakit menular dan tidak menular menunjukkan perlunya sistem kesehatan yang lebih responsif dan berdaya guna. Di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, rendahnya kepesertaan program KB serta belum optimalnya pendampingan Keluarga TPK (Tim Pendamping Keluarga) turut menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Kota Probolinggo menetapkan strategi pembangunan daerah berupa Perluasan Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan. Strategi ini mencakup pemerataan distribusi tenaga kesehatan dengan peningkatan kompetensi serta insentif bagi tenaga medis di daerah terpencil, pembangunan dan modernisasi sarana kesehatan, serta optimalisasi layanan kesehatan berbasis digital untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Di sisi lain, untuk menghadapi lonjakan kasus penyakit menular dan tidak menular, strategi ini juga menekankan pada penguatan program promotif-preventif yang berbasis komunitas. Dalam bidang pengendalian penduduk, pemerintah mengintensifkan program edukasi KB dan memperkuat peran Keluarga TPK dalam mendampingi keluarga rentan. Dengan penerapan strategi ini, Kota Probolinggo diharapkan mampu menghadirkan layanan kesehatan yang lebih merata, berkualitas,

dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat menikmati standar kesehatan yang lebih baik untuk mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.

ST 3. Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial Serta Efektivitas Pemberdayaan, Perlindungan, Dan Pelibatan Seluruh Kelompok Masyarakat

Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian sosial masyarakat melalui strategi pembangunan daerah yang berfokus pada perluasan cakupan perlindungan sosial serta efektivitas pemberdayaan, perlindungan, dan pelibatan seluruh kelompok masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk penguatan jaminan sosial kepada masyarakat, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berdaya, dan memiliki akses yang setara terhadap berbagai peluang pembangunan, serta mewujudkan kesetaraan gender. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai program perlindungan sosial yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan promotif guna memastikan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, serta perempuan dan anak.

Strategi ini lahir dari analisis SWOT terhadap kondisi sosial Kota Probolinggo, yang masih menghadapi permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan serta rendahnya akses perempuan dalam sektor sosial ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah mengembangkan program pemberdayaan berbasis komunitas yang melibatkan kelompok rentan dalam kegiatan ekonomi produktif, memperkuat layanan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat khususnya kelompok rentan, serta memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga diperkuat guna memastikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan dan mencakup seluruh kelompok masyarakat. Dengan penerapan strategi ini, Kota Probolinggo diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, setara, dan inklusif, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

ST 4. Penguatan Sistem *Demand - Driven* Ketenagakerjaan

Tantangan ketenagakerjaan di Kota Probolinggo masih cukup kompleks, terutama dalam hal optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan stabilitas hubungan industrial. Lapangan pekerjaan yang tersedia belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja secara optimal, sehingga banyak tenaga kerja yang belum terserap di sektor formal maupun informal. Selain itu, masih adanya kasus perselisihan hubungan industrial menunjukkan bahwa kesejahteraan tenaga kerja serta kepastian hukum dalam hubungan kerja perlu diperkuat. Kondisi ini menuntut adanya strategi pembangunan yang tidak hanya meningkatkan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga memperluas peluang kerja dan memperkuat perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo menetapkan strategi Penguatan Sistem Demand-Driven Ketenagakerjaan dengan mengoperasionalkannya melalui beberapa arah kebijakan utama. Pertama, kerja sama penempatan tenaga kerja di sektor formal dan informal dengan dunia usaha, guna menciptakan keterkaitan antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja. Kedua, perluasan akses informasi pasar kerja dan peningkatan kompetensi angkatan kerja, melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri serta penyediaan platform informasi ketenagakerjaan yang lebih luas. Ketiga, optimalisasi perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja, dengan memperkuat regulasi serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan implementasi strategi ini, Kota Probolinggo diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan berdaya saing, serta membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih produktif dan harmonis.

ST 5. Penguatan Nilai Seni Dan Budaya Lokal

Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen untuk melestarikan dan mengembangkan kekayaan seni serta budaya lokal melalui strategi Penguatan Nilai Seni dan Budaya Lokal. Strategi ini bertujuan untuk memastikan perlindungan warisan budaya serta memperkuat peran seni dalam membangun identitas dan kebanggaan masyarakat. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan tidak hanya berfokus pada aspek konservasi, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif para pelaku seni, tokoh budaya, dan

masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, warisan budaya dapat terus hidup dan berkembang seiring dengan perubahan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai lokal yang melekat.

Strategi ini lahir dari analisis kondisi kebudayaan di Kota Probolinggo yang masih menghadapi tantangan dalam pelibatan pelaku seni dan tokoh budaya dalam pengelolaan serta pelestarian kesenian daerah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengoperasionalkan strategi tersebut melalui beberapa arah kebijakan utama. Pertama, pengelolaan kesenian tradisional secara berkelanjutan, termasuk pemberdayaan sanggar seni dan komunitas budaya agar tetap aktif dalam melestarikan warisan seni daerah. Kedua, pemajuan obyek kebudayaan serta pelestarian cagar budaya dan museum, dengan pendekatan yang lebih partisipatif serta berbasis komunitas, sehingga masyarakat dapat turut serta dalam upaya pelestarian budaya. Ketiga, pengelolaan budaya yang inklusif, yang memastikan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal. Dengan strategi ini, Kota Probolinggo diharapkan dapat menjadi kota yang tetap berakar pada warisan budaya, sekaligus mampu berinovasi dalam pengembangan seni dan kebudayaan yang adaptif dan berkelanjutan.

ST 6. **Percepatan Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah Melalui Modernisasi Sistem Serta Penguatan Konektivitas, Kolaborasi dan dan Integrasi Ekonomi Syariah**

Kota Probolinggo menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan daya saing sektor unggulannya, terutama di bidang industri, perdagangan, koperasi dan UMKM, pariwisata. Mutu dan daya saing produk industri masih perlu ditingkatkan, sementara ketidakseimbangan antara nilai impor dan ekspor serta belum stabilnya struktur sektor perdagangan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Di sektor koperasi dan UMKM, rendahnya kualitas SDM dan keterbatasan akses permodalan menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha. Sementara itu, sektor pariwisata masih belum optimal dalam hal promosi, pengembangan destinasi, serta peran SDM pariwisata dalam meningkatkan daya tarik wisata. Kondisi ini menuntut adanya strategi terpadu untuk mempercepat peningkatan daya saing sektor unggulan daerah melalui modernisasi dan

penguatan konektivitas serta kolaborasi lintas sektor serta integrasi konsep ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi sektor unggulan.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo menetapkan strategi Percepatan Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah melalui Modernisasi Sistem serta Penguatan Konektivitas dan Kolaborasi, yang dioperasionalkan melalui berbagai arah kebijakan strategis. Untuk sektor industri dilakukan penguatan industri kecil dan menengah (IKM) dengan peningkatan ekosistem industrialisasi. Untuk sektor perdagangan dilakukan melalui pengembangan mata rantai perdagangan regional serta standarisasi sarana prasarana perdagangan, guna meningkatkan nilai ekspor daerah dan menjaga stabilitas harga. Pada sektor Koperasi UKM, strategi yang diterapkan meliputi peningkatan daya saing koperasi melalui penguatan proses bisnis, kelembagaan, serta adopsi teknologi, dan penguatan daya saing UMKM dengan didukung peningkatan akses ke sumber daya produktif. Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dilakukan penataan dan penguatan daya tarik serta pemasaran wisata secara kolaboratif dan partisipatif yang mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif guna mendukung penguatan daya saing pelaku ekonomi kreatif. Dengan strategi ini, Kota Probolinggo diharapkan mampu menciptakan sektor unggulan yang lebih kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

ST 7. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta pemanfaatan pangan lokal secara masif

Ketahanan pangan merupakan aspek krusial dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, terutama dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat. Kota Probolinggo berupaya mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal melalui strategi Pengembangan Tata Kelola Pangan, yang menitikberatkan pada penguatan logistik dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan sistem pangan yang lebih stabil, efisien, serta berorientasi pada pengurangan risiko kerawanan pangan. Dengan adanya tata kelola pangan yang lebih baik, diharapkan distribusi pangan menjadi lebih merata, harga pangan lebih

terkendali, dan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap pangan berkualitas.

Kebutuhan untuk ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal dari sisi ketersediaan dan keterjangkauan pangan dimaksud didukung oleh usaha peningkatan sektor pertanian dan perikanan. Sektor pertanian menghadapi berbagai isu, seperti rendahnya produktivitas, tingginya biaya produksi, dan alih fungsi lahan, sementara sektor kelautan dan perikanan masih terkendala oleh rendahnya standarisasi produk, minimnya diversifikasi olahan, serta penggunaan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan. Oleh karena itu sektor pertanian perlu diperkuat melalui peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian secara berkelanjutan, didukung oleh modernisasi sistem, prasarana dan sarana produksi, sedangkan sektor kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan produksi perikanan melalui fasilitasi peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan serta integrasi teknologi.

Strategi ini dirumuskan berdasarkan analisis terhadap berbagai tantangan yang dihadapi sektor pangan di Kota Probolinggo. Beberapa isu utama yang menghambat ketahanan pangan daerah antara lain belum tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang dapat berfungsi sebagai *buffer stock* dalam situasi darurat, rendahnya stabilitas harga pangan yang sering kali berfluktuasi akibat dinamika pasar, serta belum optimalnya diversifikasi pangan yang menyebabkan ketergantungan pada jenis pangan tertentu. Selain itu, potensi penurunan *food loss* dan *food waste* masih belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan efisiensi ketersediaan dan konsumsi pangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah mengoperasionalkan strategi ini melalui serangkaian kebijakan yang mencakup penguatan sistem logistik pangan guna memperlancar distribusi dan stabilisasi harga, peningkatan standar keamanan pangan untuk menjamin kualitas konsumsi masyarakat, serta penanganan kerawanan pangan melalui program intervensi berbasis komunitas. Dengan pendekatan ini, Kota Probolinggo diharapkan mampu membangun sistem pangan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan selaras dengan potensi lokal yang dimilikinya.

ST 8. Pengembangan Iklim Investasi Berbasis Potensi Lokal

Kurangnya optimalisasi regulasi dalam penanaman modal dan kemudahan berusaha masih menjadi tantangan bagi Kota Probolinggo dalam meningkatkan daya saing investasi. Selain itu, upaya promosi potensi dan peluang investasi masih belum dilakukan secara maksimal, sehingga banyak investor yang belum mengetahui keunggulan dan potensi ekonomi daerah ini. Kendala-kendala tersebut menyebabkan aliran investasi ke Kota Probolinggo belum optimal, menghambat perkembangan sektor ekonomi produktif, serta berpotensi mengurangi daya tarik daerah bagi pelaku usaha.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kota Probolinggo menerapkan strategi Pengembangan Iklim Investasi berbasis Potensi Lokal yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing penanaman modal. Strategi ini dioperasionalisasikan melalui penguatan daya tarik investasi dengan memberikan kepastian hukum bagi investor, peningkatan promosi potensi dan kerjasama penanaman modal, serta penyederhanaan perizinan sektor ekonomi produktif. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif, menarik lebih banyak investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Melalui pendekatan ini, diharapkan investasi di Kota Probolinggo dapat meningkat secara signifikan, membuka lebih banyak peluang kerja, serta mempercepat perkembangan sektor ekonomi unggulan di daerah.

ST 9. "Penerapan Prinsip *Good Governance* Yang Didukung Profesionalitas SDM Dan Digitalisasi

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Kota Probolinggo berkomitmen untuk memperkuat prinsip Good Governance yang didukung oleh profesionalitas SDM dan digitalisasi guna mencapai tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, produktif, dan dinamis. Penerapan strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan kebijakan yang dirumuskan berbasis data yang akurat dan terkini. Selain itu, strategi ini juga mendorong optimalisasi layanan publik melalui integrasi sistem informasi dan penguatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Dengan adanya reformasi dalam tata kelola pemerintahan,

diharapkan kinerja pemerintah daerah dapat lebih adaptif terhadap perubahan regulasi serta mampu menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya daerah secara lebih optimal.

Strategi ini dipilih berdasarkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kota Probolinggo dalam aspek tata kelola pemerintahan. Beberapa isu yang masih menjadi kendala antara lain rendahnya deviden dari BUMD ke pemerintah daerah, belum optimalnya belanja produk dalam negeri (PDN), produk hukum yang belum terupdate, serta stabilitas inflasi daerah yang belum sepenuhnya terkendali. Selain itu, permasalahan terkait sinkronisasi data dalam perencanaan pembangunan, keterlambatan implementasi hasil kajian penelitian, serta belum optimalnya pengelolaan satu data daerah juga menjadi perhatian. Dari sisi keuangan, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, pemutakhiran data wajib pajak dan retribusi belum maksimal, serta pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah masih lemah. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi ini dioperasionalisasikan melalui peningkatan kualitas perumusan kebijakan berbasis data, penguatan sistem pengelolaan arsip daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta pengembangan ekosistem digital yang andal dan aman. Melalui pendekatan ini, Kota Probolinggo berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berbasis inovasi digital dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

ST 10. Membangun Ekosistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Humanis Dan Modern, Serta *Scaling Up* Inovasi

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik, Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen untul menerapkan strategi Membangun Ekosistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Humanis dan Modern, serta Scaling Up Inovasi. Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih terpadu, efektif, dan efisien dengan didukung ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Saat ini, masih terdapat tantangan dalam penyelenggaraan layanan publik, seperti keterbatasan sarana dan prasarana yang menghambat kecepatan layanan, serta kurangnya sosialisasi yang menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan memanfaatkan layanan yang tersedia. Selain itu, beberapa hasil kajian

penelitian yang dapat menjadi dasar kebijakan perbaikan layanan belum diimplementasikan secara optimal.

Sebagai solusi, strategi ini dioperasionalisasikan melalui peningkatan kualitas standar pelayanan publik yang inklusif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh penguatan digitalisasi layanan. Selain itu, sinergitas dengan lembaga legislatif juga diperkuat dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat. Tak kalah penting, strategi ini juga menitikberatkan pada peningkatan kematangan inovasi daerah, agar inovasi dalam pelayanan publik dapat terus dikembangkan dan diterapkan secara lebih luas. Dengan langkah-langkah ini, Kota Probolinggo berupaya menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.

ST 11. Peningkatan Kepatuhan, Kewaspadaan, Dan Toleransi Dalam Mewujudkan Stabilitas Daerah

Kota Probolinggo menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Masih maraknya pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) oleh masyarakat serta potensi gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Selain itu, keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak terdaftar dan beroperasi secara tidak resmi menimbulkan potensi konflik sosial dan ketidakstabilan politik di daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis yang tidak hanya menegakkan aturan secara lebih efektif, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan hukum, kewaspadaan dini terhadap potensi konflik, serta memperkuat nilai-nilai toleransi dan kebangsaan.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo menetapkan strategi Peningkatan Kepatuhan, Kewaspadaan, dan Toleransi dalam Mewujudkan Stabilitas Daerah, yang dioperasionalisasikan melalui dua arah kebijakan utama. Pertama, penguatan budaya demokrasi dan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial, yang melibatkan partai politik, organisasi masyarakat, serta unsur pemerintahan dalam menjaga

stabilitas sosial dan politik daerah. Kedua, peningkatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila serta ketahanan ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya, guna memperkuat harmoni masyarakat melalui pendidikan wawasan kebangsaan serta penguatan ketahanan ekonomi dan sosial budaya. Dengan strategi ini, diharapkan Kota Probolinggo dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan harmonis, di mana masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam menaati aturan serta mampu menjaga stabilitas sosial demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

ST 12. Meningkatkan Penyediaan Dan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Mantap

Strategi Meningkatkan Penyediaan dan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Mantap dirancang untuk mewujudkan pengembangan infrastruktur berbasis instrumen penataan ruang. Saat ini, masih terdapat berbagai tantangan dalam pembangunan infrastruktur, seperti belum optimalnya pemerataan akses terhadap jaringan perpipaan dan sanitasi, penataan ruang yang belum maksimal, serta masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani secara tuntas. Selain itu, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pendukung hunian di perumahan masih belum merata, sementara pengelolaan pertanahan, terutama dalam pendataan dan sertifikasi tanah, masih memerlukan peningkatan. Tantangan lain juga terlihat dalam sistem perparkiran di tepi jalan umum yang belum tertata dengan baik serta keterbatasan akses sarana dan prasarana perhubungan yang belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi ini dioperasionalisasikan melalui beberapa arah kebijakan utama, termasuk percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur strategis yang terintegrasi guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Upaya lain yang dilakukan mencakup peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi aman, serta pemantapan pembangunan kewilayahan melalui harmonisasi pusat pelayanan kota dan percepatan pengembangan sub pusat pelayanan kota. Selain itu, strategi ini menitikberatkan pada peningkatan akses hunian layak, percepatan penataan kawasan kumuh, serta peningkatan kualitas PSU perumahan dan kawasan permukiman. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pertanahan guna memastikan tata

ruang yang lebih tertata dan berkelanjutan. Terakhir, peningkatan mobilitas dan konektivitas melalui integrasi sistem multimoda serta penguatan sarana dan prasarana perhubungan menjadi langkah krusial dalam mewujudkan infrastruktur perkotaan yang mendukung pertumbuhan wilayah secara menyeluruh.

ST 13. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Sesuai Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan

Kota Probolinggo menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup akibat berbagai permasalahan seperti pencemaran lingkungan yang belum sepenuhnya terkendali, belum terpenuhinya target ruang terbuka hijau (RTH) publik sebesar 20%, serta pengelolaan sampah yang masih belum optimal terutama di hulu. Ketidakseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan ini dapat berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang berpotensi mengancam keberlanjutan ekosistem perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mencapai sasaran pelestarian lingkungan yang lebih baik.

Sebagai solusi, strategi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan diterapkan dengan mengacu pada dua arah kebijakan utama. Pertama, membangun citra kota melalui peningkatan daya tarik lingkungan dan keanekaragaman hayati, yang mencakup upaya memperluas RTH, memperbaiki kualitas udara dan air, serta meningkatkan estetika kota dengan penataan lingkungan yang lebih hijau. Kedua, menjamin pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon dengan pelibatan masyarakat, yang meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis hulu, pengurangan emisi karbon, serta penguatan regulasi dan insentif bagi praktik ramah lingkungan. Dengan strategi ini, Kota Probolinggo diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup, serta mewujudkan kota yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

ST 14. Pengelolaan Risiko Bencana Kawasan Perkotaan

Dalam menghadapi tantangan bencana perkotaan, Kota Probolinggo menerapkan strategi Pengelolaan Risiko Bencana Kawasan Perkotaan guna

meningkatkan resiliensi terhadap bencana. Strategi ini berangkat dari analisis kondisi pembangunan sektor kebencanaan yang mengidentifikasi berbagai isu, salah satunya belum optimalnya penerapan pentahelix kebencanaan serta koordinasi lintas wilayah dalam penanggulangan bencana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan arah kebijakan Pengembangan Mitigasi Teknis dan Non-Teknis di daerah rawan bencana, yang mencakup peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Langkah-langkah konkret dalam kebijakan ini meliputi penguatan sistem peringatan dini, edukasi masyarakat mengenai kebencanaan, optimalisasi sarana dan prasarana tanggap darurat, serta penyusunan rencana pemulihan pasca-bencana yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan Kota Probolinggo dapat membangun sistem ketahanan bencana yang lebih responsif, kolaboratif, dan berkelanjutan guna meminimalkan risiko serta dampak bencana di masa mendatang.

Ke-14 alternatif strategi yang telah dipilih dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Kota Probolinggo tersebut sejatinya memiliki keselarasan dengan sasaran dan tujuan yang mendukung langsung pada pencapaian visi misi pembangunan Kota Probolinggo selama 5 tahun yang akan datang. Linieritas antara strategi yang ditetapkan dengan sasaran, tujuan, misi serta visi pembangunan tersebut akan diuraikan secara lebih jelas di dalam matriks berikut:

Tabel III.3 Keterkaitan Strategi Pembangunan dengan Sasaran, Tujuan, Misi Dan Visi Kota Probolinggo 2025-2029

VISI: MEWUJUDKAN KOTA PROBOLINGGO YANG TANGGUH, BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, MODERN, DAN ADAPTIF		
MISI 1: Penguatan Kualitas SDM sebagai Modal Dasar Pembangunan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
T 1. Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	S1.1. Pendidikan Berkualitas yang Merata	ST 1. Perluasan, penguatan dan jaminan mutu layanan pendidikan dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar 13 tahun serta daya saing pemuda dan olahraga
	S 1.2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ST 2. Perluasan Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat
MISI 2: Akselerasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI

VISI: MEWUJUDKAN KOTA PROBOLINGGO YANG TANGGUH, BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, MODERN, DAN ADAPTIF		
T 2. Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	S 2.1. Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender	ST 3. Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial serta efektifitas pemberdayaan, perlindungan, dan pelibatan seluruh kelompok masyarakat
	S 2.2. Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing	ST 4. Penguatan Sistem *Demand - Driven* Ketenagakerjaan
	S 2.3. Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya serta Pengembangan Kebudayaan	ST 5. Penguatan Nilai Seni dan Budaya Lokal
MISI 3: Ekonomi Inklusif berbasis Potensi Lokal Daerah yang didukung Integrasi Ekonomi Digital		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
T 3.Akselerasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektoral	S 3.1. Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	ST 6. Percepatan Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah melalui Modernisasi Sistem serta Penguatan Konektivitas, Kolaborasi dan Integrasi Ekonomi Syariah
	S 3.2. Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Sumberdaya dan Kearifan Lokal	ST 7. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta pemanfaatan pangan lokal secara masif
T 4. Penguatan Ekonomi Inklusif berbasis Investasi Produktif	S 4.1. Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	ST 8. Pengembangan Iklim Investasi berbasis Potensi Lokal
MISI 4: Birokrasi adaptif, modern dan berorientasi layanan		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
T 5. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Mandiri, Akuntabel dan Profesional serta Transformasi Pelayanan Publik	S 5.1 Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Produktif dan Dinamis	ST 9. Penerapan prinsip *Good Governance* yang didukung Profesionalitas SDM dan Digitalisasi
	S 5.2. Penguatan Pelayanan Publik Terpadu, Efektif dan Efisien didukung Ekosistem Inovasi	ST 10. Membangun Ekosistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Humanis dan Modern, serta *Scaling Up* Inovasi
	S 5.3. Stabilitas Keamanan dan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat	ST 11. Peningkatan kepatuhan, kewaspadaan, dan toleransi dalam mewujudkan stabilitas daerah
MISI 5: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Penggerak Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
T 6.Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan	S 6.1. Pengembangan infrastruktur Berbasis Instrumen Penataan Ruang untuk mendukung konektivitas antarwilayah	ST 12. Meningkatkan Penyediaan dan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang mantap

VISI: MEWUJUDKAN KOTA PROBOLINGGO YANG TANGGUH, BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, MODERN, DAN ADAPTIF		
T 7. Pemantapan Resiliensi Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	S 7.1. Pelestarian Lingkungan Hidup	ST 13. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
	S 7.2. Resiliensi terhadap Bencana	ST 14. Pengelolaan Risiko Bencana Kawasan Perkotaan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan pedoman yang menjadi dasar untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Selain itu, sebagai suatu rangkaian kerja yang merupakan rincian misi, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Arah kebijakan harus mampu menjabarkan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa pemerintahan perlu dipersiapkan baik sifatnya menyasar pada permasalahan maupun menjadi sarana menjawab isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Selain itu, arah kebijakan juga sudah seyogyanya selaras dengan strategi yang dirumuskan semua strategi yang telah dipilih dapat terejawantahkan secara konkret di masing-masing tahun.

Meskipun periode dari RPJMD yang disusun ini adalah 2025-2029, namun tahapan arah kebijakan yang dipergunakan terhitung sejak tahun 2026 hingga tahun 2030, dengan dasar asumsi bahwa di tahun 2030, Kota Probolinggo masih di masa transisi antara periode pembangunan, sehingga tetap bisa memedomani arah kebijakan yang termuat di dalam dokumen ini. Berikut merupakan perincian dari arah kebijakan yang selaras dengan strategi pembangunan Kota Proboliggo di tahun 2026-2030:

Tabel III.4 Arah Kebijakan Kota Probolinggo 2025-2029

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
ST.1 Perluasan, penguatan dan jaminan mutu layanan pendidikan dalam mendukung pelaksanaan	1. Pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas pendidikan melalui pelengkapan sarana prasarana, dan pengembangan kurikulum yang inklusif, serta pengendalian izin pendidikan

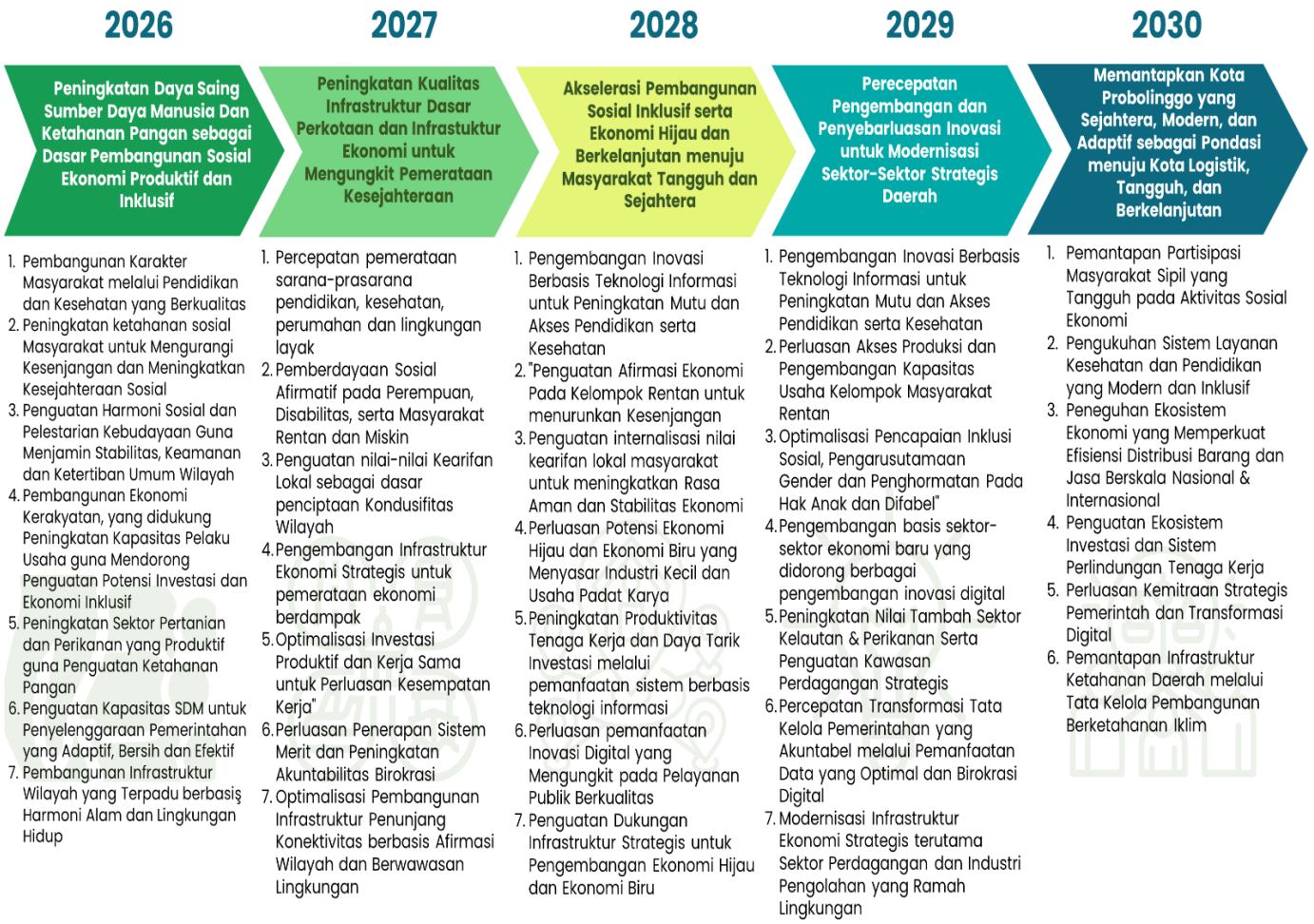
STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
wajib belajar 13 tahun serta daya saing pemuda dan olahraga	2. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
	3. Penguatan Budaya Baca dan Literasi didukung Konten Lokal dan Digitalisasi Layanan
	4. Peningkatan Kualitas Pemuda dan Kepramukaan serta Prestasi dan Pembudayaan Olahraga
ST.2 Perluasan Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	1. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas didukung penguatan pengelolaan layanan serta penyediaan sarana prasarana bagi fasilitas kesehatan primer dan rujukan
	2. Pemenuhan, peningkatan dan pemerataan terhadap penyediaan, penempatan, serta kompetensi Tenaga Kesehatan yang didukung kesejahteraaan yang memadai
	3. Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga melalui peningkatan cakupan kepesertaan KB dan pembinaan Ketahanan Keluarga
ST.3 Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial serta efektifitas pemberdayaan, perlindungan, dan pelibatan seluruh kelompok masyarakat	1. Pemberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial terintegrasi dan inklusif berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
	2. Penguatan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
	3.Penguatan kapasitas dan partisipasi kelompok masyarakat serta lembaga kemasyarakatan, termasuk kelompok rentan dalam pembangunan daerah dan dukungan pencapaian SPM
	4.Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pengarusutamaan gender dan inklusi sosial serta perlindungan dan pemenuhan hak anak
ST.4 Penguatan Sistem *Demand - Driven* Ketenagakerjaan	1. Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja pada Sektor Formal dan Informal dengan Dunia Usaha didukung Perluasan akses informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja
	2. Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan tenaga kerja
ST.5 Penguatan Nilai Seni dan Budaya Lokal	Pengelolaan Kesenian Tradisional, Obyek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Museum secara berkelanjutan, partisipatif dan inklusif
ST.6 Percepatan Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah melalui Modernisasi Sistem serta Penguatan Konektivitas, Kolaborasi dan Integrasi Ekonomi Syariah	1. Penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) yang didukung Peningkatan Ekosistem Industrialisasi
	2. Pengembangan mata rantai perdagangan regional serta standarisasi sarana prasarana perdagangan guna peningkatan nilai ekspor daerah dan stabilitas harga
	3. Peningkatan Daya Saing Koperasi melalui penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
	4. Penguatan Daya Saing UMKM yang didukung Peningkatan akses ke sumber daya produktif
	5. Penataan dan Penguatan Daya Tarik serta Pemasaran Wisata secara kolaboratif dan partisipatif yang mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	6. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif guna mendukung penguatan daya saing Pelaku Ekonomi Kreatif
ST.7 Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta pemanfaatan pangan lokal secara masif	1. Pengembangan Tata Kelola Pangan melalui penguatan logistik dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan
	2. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Pertanian yang berkelanjutan didukung modernisasi sistem, prasarana dan sarana produksi
	3. Peningkatan Produksi Perikanan yang didukung Fasilitasi peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan serta integrasi teknologi
ST.8 Pengembangan Iklim Investasi berbasis Potensi Lokal	Penguatan daya tarik investasi melalui kepastian hukum, promosi dan kerjasama penanaman modal, serta kemudahan perizinan sektor ekonomi produktif
ST.9 Penerapan prinsip *Good Governance* yang didukung Profesionalitas SDM dan Digitalisasi	1. Peningkatan kualitas perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintah daerah yang kolaboratif, efektif, efisien, akuntabel dan penguatan dukungan pencapaian SPM serta optimalisasi potensi lokal melalui pembentukan, pembinaan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
	2. Peningkatan kualitas perencanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang didukung hasil penelitian pengembangan dan berbasis satu data
	3. Penguatan pengelolaan arsip daerah yang autentik dan terpercaya
	4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
	5. Perluasan cakupan pendapatan daerah dan pengendalian Potential Loss Pendapatan Asli Daerah
	6. Optimalisasi Pemanfaatan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah secara tertib, efektif dan efisien
	7. Penguatan Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis manajemen Risiko dan Peningkatan Kapabilitas APIP
	8. Peningkatan kapabilitas dan kompetensi ASN sesuai kebutuhan daerah serta pengembangan karir ASN berbasis Meritokrasi
	9. Pengembangan ekosistem digital yang andal, aman dan aksesibel dalam mendukung transformasi tata kelola pemerintahan
ST.10 Membangun Ekosistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Humanis dan Modern, serta *Scaling Up* Inovasi	1. Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Publik yang inklusif dan berorientasi kepuasan masyarakat, didukung penguatan digitalisasi
	2. Penguatan Sinergitas peran Lembaga Legislatif dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
	3. Peningkatan Kematangan Inovasi Daerah
ST.11 Peningkatan kepatuhan, kewaspadaan, dan toleransi dalam	1.Penguatan kualitas pengendalian gangguan kenteraman dan ketertiban umum yang didukung penegakan Perda dan Perkada serta Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
mewujudkan stabilitas daerah	2. Penguatan budaya demokrasi, kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial dalam memelihara stabilitas sosial dan politik daerah
	3. Peningkatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, ketahanan ideologi, ekonomi, Sosial dan Budaya dalam memperkuat harmoni masyarakat
ST.12 Meningkatkan Penyediaan dan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang mantap	1. Percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur strategis yang terintegrasi dan aksesibel guna mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi
	2. Peningkatan Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Aman, serta kerjasama penyediaan air minum regional
	3. Pemantapan Pembangunan Kewilayahan melalui Harmonisasi Pusat Pelayanan Kota dan Akselerasi Sub Pusat Pelayanan Kota
	4. Peningkatan akses hunian layak di perkotaan, percepatan penataan kawasan kumuh perkotaan dan Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman
	5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pertanahan
	6. Peningkatan mobilitas dan konektivitas melalui integrasi multimoda dan sarana prasarana perhubungan
ST.13 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Pengelolaan Sampah terpadu hulu hilir berbasis masyarakat serta pengembangan kerjasama pengelolaan sampah regional
	2. Penguatan Identitas dan Daya Saing Kota melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati secara Berkelanjutan
	3. Menjamin pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon dengan pelibatan masyarakat
ST.14 Pengelolaan Risiko Bencana Kawasan Perkotaan	Pengembangan Mitigasi Teknis dan Non Teknis di daerah Rawan Bencana melalui peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berangkat dari strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dapat dirumuskan beberapa tema atau fokus pembangunan tahunan yang akan menjadi acuan umum penentuan prioritas di setiap tahunnya yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tema dan prioritas Daerah pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2025-2029 juga mengacu pada tema pembangunan tahap pertama RPJPD Kota Probolinggo 2025-2045. Dengan demikian, tema pembangunan Tahun 2026-2030 disajikan pada Gambar berikut ini



Gambar III-12 Tema/ Pentahapan Tahunan Pembangunan Kota Probolinggo 2026-2030
Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.2.3 PROGRAM PRIORITAS

Langkah selanjutnya menyelaraskan antara sasaran, serta dengan mensinkronkan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan tujuan dan sasaran. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar sasaran dan arah kebijakan. Sasaran tersebut kemudian didefinisikan kedalam strategi dan arah kebijakan atapun kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifkasi Dan Validasi Pemutakhiran

Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun dukungan Program Prioritas untuk Pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada Tabel III.5.

Program Unggulan Daerah Kota Probolinggo untuk Tahun 2025-2029 sebagai *Highlight Intervensi* Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah antara lain :

1. Peningkatan kualitas pendidikan melalui integrasi nilai-nilai keagamaan yang didukung perluasan cakupan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan sektor informal ;
2. Perluasan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas melalui fasilitasi pembiayaan ;
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung Usaha Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui integrasi basis data terpadu (DTSEN) serta pemberian fasilitasi/bantuan yang tepat sasaran ;
4. Stimulan Peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif kelompok masyarakat dalam Pembangunan ;
5. Peningkatan efektifitas pembiayaan pembangunan berbasis kewilayahaan ;
6. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui stimulan pengembangan usaha bagi UMKM ;
7. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah yang didukung usaha peningkatan produktivitas sektor pertanian ;
8. Pengembangan Destinasi Pariwisata guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi kota;
9. Perluasan cakupan pendapatan daerah melalui penguatan basis data dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan ;
10. Peningkatan nilai manfaat dan produktifitas aset daerah ;
11. Penguatan tata kelola Sumberdaya Manusia Aparatur Daerah guna mendorong efektivitas pelayanan publik ;
12. Peningkatan Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis Kawasan;
13. Penguatan Citra Kota melalui Integrasi Konsep Probolinggo Bersolek yang terintegrasi dengan usaha penanggulangan bencana daerah.

Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam Tabel III.5 dimaksud, selain

ditujukan bagi Pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Program dimaksud juga ditujukan untuk keselarasan dukungan terhadap Program Prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 (Program Prioritas, Program Hasil Cepat Terbaik, Proyek Strategis Nasional serta Kegiatan Prioritas Utama) sebagai berikut :

1. Pemberian Makan Bergizi dan Pencegahan Stunting
   a. Pemberian makan bergizi di sekolah dan pesantren yang terintegrasi dalam pelaksanaan Tujuan : Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan
   b. Pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta kelompok rentan lainnya (lansia, PMKS, dll) yang terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : (1) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan serta (2) Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender
   c. Pencegahan Stunting terintegrasi dalam pelaksanaan Tujuan : Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan serta Pelaksanaan Sasaran Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender
2. Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang didukung Usaha Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan, Cakupan Akses Layanan Kesehatan serta Usaha Percepatan Penurunan Stunting

   Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
3. Peningkatan Produktivitas Pertanian guna mendukung Usaha Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui Jaminan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida

   Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : (a) Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah dari Sektor Pertanian, Perkebunan Peternakan, dan Perikanan serta (b) Penguatan Ketahanan Pangan berbasis Sumberdaya dan Kearifan Lokal
4. Pengembangan Sekolah Unggul Terintegrasi (termasuk Program Prioritas Sekolah Rakyat) serta Usaha Peningkatan Akses dan Partisipasi Pendidikan, didukung Perbaikan Sarana Prasarana dan integrasi digitalisasi

   Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : Pendidikan Berkualitas yang Merata

5. Pengentasan Kemiskinan (termasuk Kemiskinan Ekstrim) melalui Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Stimulan Usaha (termasuk dukungan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih)

   Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran yang terintegrasi melalui Fasilitasi Stimulan Kartu Amanah terintegrasi :

   a. Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender → bagi peningkatan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, termasuk integrasi Program Sekolah Rakyat
   b. Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah → bagi stimulan usaha baik permodalan maupun peralatan serta dukungan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

6. Pembangunan Infrastruktur, konservasi sumberdaya air serta dukungan perluasan akses rumah (termasuk dukungan Program 3 juta rumah) yang terintegrasi dengan PSU serta akses sanitasi dan air bersih aman

   Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : Pengembangan infrastruktur Berbasis Instrumen Penataan Ruang untuk mendukung konektivitas antarwilayah

7. Peningkatan Rasio Penerimaan Daerah, Penguatan Reformasi Birokrasi dan Hukum serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

   Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Produktif dan Dinamis

8. Penguatan Keamanan dan Stabilitas Wilayah, didukung usaha pemberantasan narkoba dan penguatan Kerukunan Umat Beragama

   Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : Stabilitas Keamanan dan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat

9. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas

   Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : Perluasan Cakupan Perlindungan Sosial, Kemandirian Masyarakat, dan Kesetaraan Gender

10. Pelestarian Lingkungan Hidup

    Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : Pemantapan Resiliensi Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan

11. Pemerataan Ekonomi dan pengendalian Inflasi melalui Penguatan UMKM, Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA) serta Perluasan Akses Lapangan Kerja

    Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : (a) Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah, (b) Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal serta (c) Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing

12. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga

    Terintegrasi dalam pelaksanaan Sasaran : (a) Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya serta Pengembangan Kebudayaan, (b) Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui Peningkatan kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif serta (b) Pendidikan Berkualitas yang Merata melalui Peningkatan pembudayaan dan prestasi olah raga.

Tabel III.5 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2030

MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
PENGUATAN KUALITAS SDM SEBAGAI MODAL DASAR PEMBANGUNAN	Pemenuhan dan Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas yang menangani Urusan Pendidikan
				Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS)		
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas yang menangani Urusan Pendidikan
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks pemerataan guru	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas yang menangani Urusan Pendidikan
				Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik		
			Meningkatnya layanan perpusatakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas yang menangani Urusan Perpustakaan
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Dinas yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda	Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Dinas yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	Program Pengembangan kapasitas kepramukaan	Dinas yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas yang menangani Urusan Kesehatan
				Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita		

MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas yang menangani Urusan Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas yang menangani Urusan Kesehatan
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	Program Pengendalian Penduduk	Dinas yang menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern contraceptive (mCPR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas yang menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)		
AKSELERASI PENANGANAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan serta Pelestarian Kebudayaan	Peningkatan Kemandirian Sosial Masyarakat	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas yang menangani Urusan Sosial
				Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	

MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi		Dinas yang menangani Urusan Sosial
				Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		
			Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas yang menangani Urusan Sosial
				Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA		
				Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial dan / atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar		
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial		
				Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial		

MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakat Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat
			Meningkatnya kelompok / lembaga masyarakat yang aktif	Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	Dinas yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender		

MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
EKONOMI INKLUSIF BERBASIS POTENSI LOKAL DAERAH YANG DIDUKUNG INTEGRASI EKONOMI DIGITAL	Akselerasi Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektoral	Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas yang menangani Urusan Tenaga Kerja
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas yang menangani Urusan Tenaga Kerja
			Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan hak - hak pekerja dan dialog sosial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas yang menangani Urusan Tenaga Kerja
		Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya serta Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan
		Peningkatan Nilai Tambah dan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas yang menangani Urusan Perindustrian
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas yang menangani Urusan Perdagangan
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas yang menangani Urusan Perdagangan
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Dinas yang menangani Urusan Perdagangan

MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas yang menangani Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas yang menangani Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi Usaha mikro menjalin kemitraan dan ekspor	Program Pengembangan UMKM	Dinas yang menangani Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas yang menangani Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Pertumbuhan wirausaha		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata yang Berkembang	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas yang menangani Urusan Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas yang menangani Urusan Pariwisata
			Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas yang menangani Urusan Pariwisata
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas yang menangani Urusan Pariwisata
		Penguatan Ketahanan Pangan berbasis	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Rasio Ketersediaan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan	Dinas yang menangani Urusan Pangan

MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Sumberdaya Lokal yang didukung peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan			Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas yang menangani Urusan Pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2.Peningkatan Produksi Hortikultura 3.Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas yang menangani Urusan Pertanian
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas yang menangani Urusan Pertanian
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas yang menangani Urusan Perikanan
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas yang menangani Urusan Perikanan
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas yang menangani Urusan Perikanan
	Penguatan Ekonomi Inklusif berbasis Investasi Produktif	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas yang menangani Urusan Penanaman Modal
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas yang menangani Urusan Penanaman Modal
BIROKRASI ADAPTIF, MODERN DAN BERORIENTASI LAYANAN	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Mandiri, Akuntabel dan Profesional serta	Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Produktif dan Dinamis	Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas kerjasama daerah (%)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				Efektivitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (%)		
				Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat (%)		

MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Transformasi Pelayanan Publik			Persentase produk hukum yang dihasilkan		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan (%)	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
				Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)		
				Tingkat kematangan UKPBJ (nilai)		
			1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan 3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	1. Presentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan yang menangani Urusan Perencanaan
				2. Presentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		
				3. Presentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Badan yang menangani Urusan Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah		
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Data Statistik Sektoral yang Memenuhi Prinsip Satu Data	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas yang menangani Urusan Statistika

MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Peningkatan Arsip yang Dikelola	Program Pengelolaan Arsip	Dinas yang menangani Urusan Kearsipan
				Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip sesuai standart		
			1. Meningkatnya tata kelola anggaran 2. Meningkatnya tata kelola perbendaharaan 3. Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan yang menangani Urusan Keuangan
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
				Persentase Penurunan SILPA		
				Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu		
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan yang menangani Urusan Keuangan
			1. Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan 2. Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan 3. Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan yang menangani Urusan Keuangan
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan		
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat

MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
			1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian 2. Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN 3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN 4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	1 Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi 2 Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya 3 Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya 4 Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	Program Kepegawaian Daerah	Badan yang menangani Urusan Kepegawaian
			1. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional 2. Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi 3. Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi 4. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan yang menangani Urusan Pendidikan dan Pelatihan
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika

MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Tingkat kepuasan pengguna (internal/eksternal) terhadap layanan aplikasi informatika (survei)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas yang menangani Urusan Persandian
		Penguatan Pelayanan Publik Terpadu, Efektif dan Efisien didukung Ekosistem Inovasi	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Program pencatatan sipil	Dinas yang menangani Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
				Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
				Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Program pendaftaran penduduk	Dinas yang menangani Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase kepemilikan kartu identitas anak		
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas yang menangani Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas yang menangani Urusan Penanaman Modal
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Fasilitasi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas yang menangani Urusan Kesehatan

MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Badan yang menangani Urusan Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah		
		Stabilitas Keamanan dan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	2 Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	3 Persentase cakupan perlindungan masyarakat		
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konfilik Sosial	Badan yang menangani Urusan Pemerintahan Umum
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan	Badan yang menangani Urusan Pemerintahan Umum

MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
					Pengembangan Etika serta Budaya Politik	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan yang menangani Urusan Pemerintahan Umum
AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGGERAK EKONOMI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Pemerataan dan Pemantapan Infrastruktur Perkotaan	Pengembangan infrastruktur Berbasis Instrumen Penataan Ruang untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
				Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob		
				Persentase luas layanan irigasi multikomoditas		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase cakupan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Dinas yang menangani Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	Dinas yang menangani Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum (PSU)	Dinas yang menangani Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas yang menangani Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas yang menangani Urusan Pertanahan
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas yang menangani Urusan Perhubungan
	Pemantapan Resiliensi Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Mutu Lingkungan Hidup (Media Air dan Udara) Dengan Kualitas Baik	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH Publik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
		Resiliensi terhadap Bencana	1. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat 3. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	1. Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana 2. Persentase penanganan tanggap darurat 3. Persentase penanganan pasca bencana	Program Penanggulangan Bencana	Dinas yang menangani Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Bencana

Sumber: Data Diolah, 2025

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab IV RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 memuat seluruh program prioritas pembangunan yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing, yang telah disertai dengan indikator kinerja, target capaian, pagu indikatif, serta penanggung jawab pelaksanaan program sesuai dengan bidang urusan pemerintahan. Penyusunan program-program tersebut mengacu pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD ini.

Dalam rangka menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, Pemerintah Kota Probolinggo wajib memperhatikan kapasitas riil keuangan daerah sebelum menetapkan alokasi anggaran belanja daerah setiap tahun selama periode RPJMD 2025-2029. Ketentuan ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah secara realistis dan akuntabel.

Kapasitas riil keuangan daerah merupakan gambaran kemampuan fiskal daerah dalam mendanai program dan kegiatan pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan. Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah Kota Probolinggo telah disajikan secara rinci pada Bab II RPJMD Tahun 2025-2029, yang mencakup identifikasi terhadap seluruh sumber penerimaan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, maupun penerimaan lainnya yang sah.

Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dilakukan perhitungan dengan menjumlahkan proyeksi pendapatan daerah, pencairan dana cadangan, serta SiLPA yang tersedia, dikurangi dengan kebutuhan belanja wajib,

belanja yang bersifat mengikat, serta belanja prioritas utama lainnya yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan kapasitas riil keuangan daerah tersebut menjadi acuan utama dalam penyusunan alokasi anggaran belanja untuk program dan kegiatan Perangkat Daerah selama periode RPJMD.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel pada Bab III RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, menjadi landasan utama dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang tercantum pada Bab IV. Oleh karena itu, seluruh program yang dirumuskan oleh perangkat daerah harus diselaraskan dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut agar perencanaan dan penganggaran pembangunan berjalan secara realistis, efektif, dan akuntabel.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa seiring dengan terbitnya regulasi baru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005, terdapat perbedaan prinsip dalam pengelolaan dan pencatatan anggaran program perangkat daerah. Berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, struktur program perangkat daerah melekat pada seluruh jenis belanja daerah. Hal ini menyebabkan akumulasi nilai anggaran program perangkat daerah yang dicantumkan dalam Bab IV RPJMD cenderung mencerminkan nilai total belanja daerah secara keseluruhan, bukan semata-mata nilai dari kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Bab II.

Dengan kata lain, meskipun kapasitas riil kemampuan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan fiskal yang tersedia untuk mendanai prioritas pembangunan, namun nilai total anggaran program perangkat daerah mencerminkan keseluruhan alokasi belanja daerah, termasuk belanja wajib dan belanja prioritas utama yang bersifat mengikat. Oleh sebab itu, perbedaan angka antara kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan total nilai anggaran program perangkat daerah dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah sesuatu yang wajar, sesuai dengan prinsip dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, dalam penyusunan daftar program dan kegiatan perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra masing-masing OPD, perlu dicermati bahwa dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 disusun pada tahun 2024, yang merupakan masa transisi dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2024 yang telah definitif dan sedang berjalan. Oleh karena itu, alokasi belanja dan program pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD harus mempertimbangkan kesinambungan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, akumulasi anggaran program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Bab IV mencerminkan keseluruhan belanja daerah. Jika dilakukan perbandingan antara total anggaran program perangkat daerah dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana disajikan pada Bab II, maka dapat diperoleh gambaran mengenai proporsi dan konsistensi alokasi anggaran daerah dalam mendukung prioritas pembangunan Kota Probolinggo selama periode RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun untuk rincian anggaran belanja setiap program perangkat daerah pada RPJMD Kota Probolinggo periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026-2030

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB LAYANAN DASAR															
PENDIDIKAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	Rp 196,675,219,523	100	Rp 202,142,280,263	100	Rp 206,357,166,640	100	Rp 210,690,163,939	100	Rp 215,022,017,618	Dinas yang menangani Urusan Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah	1. Persentase Anak Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	%	98,48	98,67	Rp 91,218,908,672	98,77	Rp 93,754,557,624	98,87	Rp 95,709,442,110	98,96	Rp 97,719,107,009	99,06	Rp 99,728,241,490	Dinas yang menangani Urusan Pendidikan
		2. Persentase Anak Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS)	%	75,76	79,90		81,97		84,04		86,12		88,19		

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	100.00	100	Rp 187,877,714	100	Rp 193,100,227	100	Rp 197,126,576	100	Rp 201,265,754	100	Rp 205,403,839	Dinas yang menangani Urusan Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1. Indeks pemerataan guru	Indeks	0,59	0,66	433,158,332	0,69	445,199,009	0,72	454,481,893	0,75	464,024,904	0,78	473,565,397	Dinas yang menangani Urusan Pendidikan
		2. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	55,73	68,40	Rp	74,73	Rp	81,06	Rp	87,40	Rp	93,73	Rp	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan / diperbarui	%	100	100	25,050,362 Rp	100	25,746,697 Rp	100	26,283,544 Rp	100	26,835,434 Rp	100	27,387,179 Rp	Dinas yang menangani Urusan Pendidikan

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	%	100	100	Rp 31,312,952	100	Rp 32,183,371	100	Rp 32,854,429	100	Rp 33,544,292	100	Rp 34,233,973	Dinas yang menangani Urusan Pendidikan
KESEHATAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	Rp 62,954,891,336	100	Rp 64,704,873,951	100	Rp 66,054,040,941	100	Rp 67,441,014,728	100	Rp 68,827,622,448	Dinas yang menangani Urusan Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	Rasio	250.70	102.13	Rp 60,061,100,900	93.23	Rp 61,730,643,649	85.10	Rp 63,017,794,702	77.00	Rp 64,341,014,723	70.91	Rp 65,663,885,502	Dinas yang menangani Urusan Kesehatan
		2. Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	23,1	17.50		16.30		15.20		14.20		14.00		

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	36	70	Rp 636,870,344	75	Rp 654,573,687	80	Rp 668,222,260	85	Rp 682,253,298	90	Rp 696,280,633	Dinas yang menangani Urusan Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas fasilitasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Fasilitasi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	100.00	100.00	Rp 553,509,038	100	Rp 568,895,152	100	Rp 580,757,235	100	Rp 592,951,721	100	Rp 605,142,988	Dinas yang menangani Urusan Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	100.00	100	Rp 4,911,590,061	100	Rp 5,048,119,519	100	Rp 5,153,378,301	100	Rp 5,261,586,679	100	Rp 5,369,766,497	Dinas yang menangani Urusan Kesehatan
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani	%	6,38	32,09	Rp 1,056,450,999	44,94	Rp 1,091,377,076	62,08	Rp 1,118,303,692	79,22	Rp 1,145,984,855	100	Rp 1,173,658,712	Dinas yang menangani Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	Rp 1,039,581,423	100	Rp 1,085,157,532	100	Rp 1,120,294,900	100	Rp 1,156,416,897	100	Rp 1,192,529,361	Dinas yang menangani Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh	Persentase Penurunan luasan permukiman kumuh	%	6,38	32,09	Rp 1,000,000,000	44,94	Rp 1,000,000,000	62,08	Rp 1,000,000,000	79,22	Rp 1,000,000,000	100.00	Rp 1,000,000,000	Dinas yang menangani Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	80	82	Rp 1,150,749,288	83	Rp 1,188,296,613	84	Rp 1,217,244,107	85	Rp 1,247,002,778	86	Rp 1,276,753,594	Dinas yang menangani Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	Rp 15,772,584,442	100	Rp 16,211,021,357	100	Rp 16,549,038,783	100	Rp 16,896,528,243	100	Rp 17,243,925,989	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat	1 Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	%	93,94	94,94	Rp 2,012,908,899	95,44	Rp 2,068,862,543	95,94	Rp 2,112,000,577	96,44	Rp 2,156,347,439	96,94	Rp 2,200,682,597	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	terhadap irigasi	2 Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	%	83,57	84,57		85,07		85,57		86,07		86,57		
		3 Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	%	68,85	69,85		70,35		70,85		71,35		71,85		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase cakupan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan	%	29,85	35,35	Rp 3,653,797,535	38,35	Rp 3,755,363,625	41,35	Rp 3,833,667,041	44,35	Rp 3,914,164,701	47,35	Rp 3,994,641,114	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	100	100	Rp 7,971,274,873	100	Rp 8,192,855,630	100	Rp 8,363,685,579	100	Rp 8,539,302,582	100	Rp 8,714,873,233	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	47,97	48,97	Rp 1,453,984,920	49,47	Rp 1,494,401,928	49,97	Rp 1,525,561,834	50,47	Rp 1,557,594,912	50,97	Rp 1,589,619,536	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	80	82	Rp12,446,163,199	83	Rp12,792,134,239	84	Rp13,058,864,149	85	Rp13,333,068,452	86	Rp13,607,200,384	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%	84	86	Rp 170,192,158	87	Rp 174,923,059	88	Rp 178,570,395	89	Rp 182,319,938	90	Rp 186,068,491	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan	%	97,52	97,92	Rp 2,381,192,514	98,12	Rp 2,447,383,487	98,32	Rp 2,498,414,094	98,52	Rp 2,550,874,698	98,72	Rp 2,603,321,455	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	60	70	Rp 3,131,295	75	Rp 3,218,337	80	Rp 3,285,443	85	Rp 3,354,429	90	Rp 3,423,397	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	Rp 1,350,904,600	100	Rp 1,388,456,243	100	Rp 1,417,407,065	100	Rp 1,447,169,157	100	Rp 1,476,923,394	Dinas yang menangani Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT															

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	90	90	Rp 14,584,313,841	90	Rp 14,989,719,920	90	Rp 15,302,271,882	90	Rp 15,623,582,277	90	Rp 15,944,807,867	Dinas yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dam Perlindungan Masyarakat
PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	Rp 6,831,085,124	100	Rp 7,020,971,564	100	Rp 7,167,366,457	100	Rp 7,317,863,675	100	Rp 7,468,321,172	Dinas yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dam Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	2 Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100		100		100		100		100		
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	3 Persentase cakupan perlindungan masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	1 Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	%	100	100	Rp 671,014,493	100	Rp 689,666,955	100	Rp 704,047,261	100	Rp 718,830,537	100	Rp 733,609,911	Dinas yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dam Perlindungan Masyarakat

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2 Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100		100		100		100		100		
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB KEBENCANAAN)															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	80	82	Rp 4,078,379,608	83	Rp 4,191,747,978	84	Rp 4,279,150,482	85	Rp 4,369,002,207	86	Rp 4,458,830,217	Badan/Dinas yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dam Perlindungan Masyarakat (sub bencana)
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%	22.39	52.24	Rp 1,526,878,297	67.16	Rp 1,569,321,551	82.09	Rp 1,602,043,612	97.01	Rp 1,635,682,622	98.51	Rp 1,669,312,753	Badan/Dinas yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dam Perlindungan

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	2. Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100		100		100		100		100		Masyarakat (sub bencana)
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	3. Persentase penanganan pasca bencana	%	100.00	100		100		100		100		100		
SOSIAL															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	Rp 8,903,675,256	100	Rp 9,151,174,321	100	Rp 9,341,986,259	100	Rp 9,538,145,189	100	Rp 9,734,252,348	Dinas yang menangani Urusan Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	1 Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial	%	75	76	Rp 76,038,870	77	Rp 78,152,554	78	Rp 79,782,119	79	Rp 81,457,349	80	Rp 83,132,137	Dinas yang menangani Urusan Sosial

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		2 Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA	%	75	76		77		78		79		80		
		3 Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan sosial dan / atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	80	81		82		83		84		85		
		4 Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	35	36		37		38		39		40		

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		5 Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	75	75,5		76		76,5		77		77,5		
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	1 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	Orang	1	1	Rp 26,250,000	1	Rp 27,562,500	1	Rp 28,940,625	1	Rp 30,387,656	1	Rp 32,507,039	Dinas yang menangani Urusan Sosial
		2 Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	%	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	1 Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	80	80,5	Rp 1,428,848,841	81	Rp 1,468,567,131	81,5	Rp 1,499,188,353	82	Rp 1,530,667,653	82,5	Rp 1,562,138,644	Dinas yang menangani Urusan Sosial
		2 Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	80.00	80,5		81.00		81,5		82.00		82,5		
		3 Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	80.00	81		82		83		84		85		

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		4 Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	70.00	70,5		71.00		71,5		72.00		72,5		
		5 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	85.00	85,5		86.00		86,5		87.00		87,5		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1 Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	80	81	Rp 9,302,347,431	82	Rp 9,560,345,733	83	Rp 9,758,885,921	84	Rp 9,962,959,380	85	Rp 10,166,306,244	Dinas yang menangani Urusan Sosial
		2 Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	7,5	7,6		7,7		7,8		7,9		8.00		
		3Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	3	3,2		3,4		3,6		3,8		4,0		

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1 Persentase korban bencana alam, sosial, dan / atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	Rp 387,105,746	100	Rp 397,866,282	100	Rp 406,162,226	100	Rp 414,690,643	100	Rp 423,216,808	Dinas yang menangani Urusan Sosial
		2 Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	80	81		82		83		84		85		
		3 Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	85.00	85,2	Rp 161,145,220	85,4	Rp 165,624,639	85,6	Rp 169,078,093	85,8	Rp 172,628,321	86.00	Rp 176,177,611	Dinas yang menangani Urusan Sosial
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR															
TENAGA KERJA															

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	90	100	Rp 11,416,431,640	100	Rp 11,836,558,556	100	Rp 12,083,363,674	100	Rp 12,337,084,846	100	Rp 12,590,739,053	Dinas yang menangani Urusan Tenaga Kerja
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	%	100	100	Rp100,000,000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	Dinas yang menangani Urusan Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya	%	89,28	90,3	Rp 308,350,167	90,6	Rp 316,921,501	90,9	Rp 323,529,659	91,2	Rp 330,322,993	91,5	Rp 337,114,534	Dinas yang menangani Urusan Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	89,28	90,3	Rp107,605,896	90,6	Rp110,597,061	90,9	Rp112,903,130	91,2	Rp115,273,820	91,5	Rp117,643,885	Dinas yang menangani Urusan Tenaga Kerja

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan hak - hak pekerja dan dialog sosial	%	81,20	82	Rp 179,109,812	82,4	Rp 184,088,600	82,8	Rp 187,927,047	83,2	Rp 191,873,057	83,6	Rp 195,818,025	Dinas yang menangani Urusan Tenaga Kerja
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	30	32	Rp 367,100,528	33	Rp 377,304,970	34	Rp 385,172,189	35	Rp 393,259,865	36	Rp 401,345,408	Dinas yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2 Persentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender	%	53	55		58		60		65		66		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	Rp 429,174,322	100	Rp 441,104,254	100.00	Rp 448,301,758	100.00	Rp 459,756,996	100	Rp 469,209,740	Dinas yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang beerspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Ketentuan	%	100	100	367,500,000 Rp	100.00	385,875,000 Rp	100	399,486,686 Rp	100	425,427,187 Rp	100	446,698,546 Rp	Dinas yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat kemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	Indeks	40	41	6,888,850 Rp	43	7,080,342 Rp	44	7,227,974 Rp	45	7,379,746 Rp	46	7,531,474 Rp	Dinas yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	70,2	71,3	Rp321,885,958	72,4	Rp322,674,098	73,5	Rp328,836,432	74,6	Rp313,083,952	75	Rp306,996,606	Dinas yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1 Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	Rp 337,032,577	100	Rp 346,401,210	100	Rp 350,624,051	100	Rp 361,049,294	100	Rp 368,472,577	Dinas yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	83,97	84,47		84,97		85,47		85,97		86,47		
PANGAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	Rp 18,232,303,664	100	Rp 18,739,114,394	100	Rp 19,129,845,309	100	Rp 19,531,525,410	100	Rp 19,933,099,499	Dinas yang menangani Urusan Pangan

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Rasio Ketersediaan Pangan	Skor	0,57	0,56	Rp 113,609,533	0,53	Rp 116,767,583	0,50	Rp 119,202,315	0,47	Rp 121,705,273	0,44	Rp 124,207,570	Dinas yang menangani Urusan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	100	10	Rp 10,020,145	8	Rp 10,298,679	7	Rp 10,513,417	6	Rp 10,734,174	5	Rp 10,954,871	Dinas yang menangani Urusan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	80	85,1	Rp 10,020,145	85,2	Rp 10,298,679	85,3	Rp 10,513,417	85,4	Rp 10,734,174	85,5	Rp 10,954,871	Dinas yang menangani Urusan Pangan
PERTANAHAN															

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	Rp 530,254,747	100	Rp 544,994,453	100	Rp 556,358,180	100	Rp 568,040,345	100	Rp 579,719,426	Dinas yang menangani Urusan Pertanahan
LINGKUNGAN HIDUP															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	77,88	81	Rp 22,034,353,875	82	Rp 22,646,851,735	83	Rp 23,119,063,223	84	Rp 23,604,507,174	85	Rp 24,089,823,002	Dinas yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	67,14	69	Rp 417,589,532	70	Rp 429,197,437	71	Rp 438,146,670	72	Rp 447,346,682	73	Rp 456,544,266	Dinas yang menangani Urusan Lingkungan Hidup

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Mutu Lingkungan Hidup (Media Air dan Udara) Dengan Kualitas Baik	%	89,50	89,70	Rp 1,555,653,545	89,80	Rp 1,598,896,677	89,80	Rp 1,632,235,411	89,90	Rp 1,666,508,375	90,00	Rp 1,700,772,292	Dinas yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH Publik	%	5,66	20	Rp 6,801,847,562	20	Rp 6,990,921,273	20	Rp 7,136,689,585	20	Rp 7,286,542,663	20	Rp 7,436,356,191	Dinas yang menangani Urusan Lingkungan Hidup

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	80	82	Rp 25,719,206	83	Rp 26,434,134	84	Rp 26,985,314	85	Rp 27,551,940	86	Rp 28,118,416	Dinas yang menangani Urusan Lingkungan Hidup

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan / atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	%	80	82	Rp 144,122,127	83	Rp 148,128,348	84	Rp 151,216,985	85	Rp 154,392,173	86	Rp 157,566,523	Dinas yang menangani Urusan Lingkungan Hidup

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	54,29	56,00	Rp 208,542,280	57,00	Rp 214,339,214	58,00	Rp 218,808,419	59,00	Rp 223,402,863	60,00	Rp 227,996,093	Dinas yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	58,82	61	Rp 213,003,227	62	Rp 218,924,164	63	Rp 223,488,971	64	Rp 228,181,694	65	Rp 232,873,179	Dinas yang menangani Urusan Lingkungan Hidup

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100	100	Rp 23,985,721	100	Rp 24,652,462	100	Rp 25,166,493	100	Rp 25,694,928	100	Rp 26,223,223	Dinas yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	80	80	Rp18,296,368,292	80	Rp18,804,959,852	80	Rp19,197,063,716	80	Rp19,600,155,242	80	Rp20,003,140,379	Dinas yang menangani Urusan Lingkungan Hidup
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	Rp 6,709,240,144	100	Rp 6,895,739,608	100	Rp 7,039,523,278	100	Rp 7,187,336,103	100	Rp 7,335,109,913	Dinas yang menangani Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1 Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	6,70	10	Rp 561,673,289	12	Rp 577,286,349	14	Rp 589,323,397	16	Rp 601,697,751	18	Rp 614,068,839	Dinas yang menangani Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2 Persentase kepemilikan kartu identitas anak	%	77.30	81		83		85		87		89		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1 Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	Rp 335,775,455	100	Rp 345,109,142	100	Rp 352,305,043	100	Rp 359,702,589	100	Rp 367,098,184	Dinas yang menangani Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2 Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	98.73	100		100		100		100		100		
		3 Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100		100		100		100		100		
		4 Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100		100		100		100		100		

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	100	100	Rp 280,511,514	100	Rp 288,309,007	100	Rp 294,320,563	100	Rp 300,500,577	100	Rp 306,678,960	Dinas yang menangani Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	%	100	100	Rp 27,555,398	100	Rp 28,321,367	100	Rp 28,911,898	100	Rp 29,518,977	100	Rp 30,125,896	Dinas yang menangani Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kualitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	%	90	100	Rp 1,606,747,743	100	Rp 1,651,411,161	100	Rp 1,685,844,880	100	Rp 1,721,243,511	100	Rp 1,756,632,800	Dinas yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	Rasio	2.02	1.98	Rp 313,380,026	1.97	Rp 322,091,177	1.97	Rp 328,807,130	1.96	Rp 335,711,277	1.96	Rp 342,613,603	Dinas yang menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	Rasio	17.60	17.50		17.30		17.30		17.00		17.00		

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern contraceptive (mCPR)	Rasio	69.00	70.00	Rp 2,955,458,343	70.50	Rp 3,037,612,416	71.00	Rp 3,100,949,938	71.50	Rp 3,166,062,325	72.00	Rp 3,231,157,527	Dinas yang menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	7.20	7.15		7.13		7.11		7.09		7.07		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	20	40	Rp 2,658,230,419	45	Rp 2,732,122,327	50	Rp 2,789,090,048	55	Rp 2,847,654,138	60	Rp 2,906,202,771	Dinas yang menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PERHUBUNGAN															

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	98	100	Rp 10,347,685,514	100	Rp 10,635,324,320	100	Rp 10,857,082,398	100	Rp 11,085,054,653	100	Rp 11,312,966,739	Dinas yang menangani Urusan Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	71.63	76	Rp 22,587,145,555	78	Rp 23,217,396,234	80	Rp 23,701,770,716	82	Rp 24,199,767,413	84	Rp 24,697,503,992	Dinas yang menangani Urusan Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani	%	76.47	82.35	Rp306,023,000	85.00	Rp312,143,000	88.24	Rp318,385,000	90.00	Rp324,753,000	94.11	Rp331,248,000	Dinas yang menangani Urusan Perhubungan
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	Rp 9,781,509,361	100	Rp 10,053,409,939	100	Rp 10,263,034,469	100	Rp 10,478,533,167	100	Rp 10,693,974,987	Dinas yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	%	N/A	81	Rp 1,814,572,529	82	Rp 1,865,012,937	83	Rp 1,903,900,485	84	Rp 1,943,877,752	85	Rp 1,983,844,469	Dinas yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Tingkat kepuasan pengguna (internal/eksternal) terhadap layanan aplikasi informatika (survei)	%	N/A	81	Rp 1,658,268,868	82	Rp 1,704,364,439	83	Rp 1,739,902,291	84	Rp 1,776,435,997	85	Rp 1,812,960,059	Dinas yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika
STATISTIK															

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase Data Statistik Sektoral yang Memenuhi Prinsip Satu Data	%	68	72	Rp 191,001,870	74	Rp 196,311,226	76	Rp 200,404,529	78	Rp 204,612,535	80	Rp 208,819,431	Dinas yang menangani Urusan Statistika
PERSANDIAN															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	531	580	Rp 244,915,384	590	Rp 251,723,396	600	Rp 256,972,102	605	Rp 262,367,890	610	Rp 267,762,253	Dinas yang menangani Urusan Persandian
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	84	86	Rp 11,386,144,287	87	Rp 11,702,649,552	88	Rp 11,946,662,521	89	Rp 12,197,513,301	90	Rp 12,448,297,876	Dinas yang menangani Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	38	42	Rp 309,726,703	44	Rp 318,391,896	46	Rp 325,072,416	48	Rp 331,940,139	50	Rp 338,806,049	Dinas yang menangani Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	73	85	Rp 2,281,817	90	Rp 2,289,650	95	Rp 2,295,690	100	Rp 2,301,899	100	Rp 2,308,106	Dinas yang menangani Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif	%	17	25	Rp 47,298,214	30	Rp 48,612,982	35	Rp 49,626,616	40	Rp 50,668,654	45	Rp 51,710,416	Dinas yang menangani Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	12	18	Rp 90,726,148	21	Rp 93,248,099	24	Rp 95,192,424	27	Rp 97,191,233	30	Rp 99,189,514	Dinas yang menangani Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	43	47	Rp 51,327,564	49	Rp 52,754,337	51	Rp 53,854,322	53	Rp 54,985,132	55	Rp 56,115,643	Dinas yang menangani Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1 Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	%	8	12	Rp 1,245,029,488	14	Rp 1,251,840,672	16	Rp 1,257,091,824	18	Rp 1,262,490,125	20	Rp 1,267,887,002	Dinas yang menangani Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2 Pertumbuhan wirausaha	%	2	6		8		10		12		14		

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi Usaha mikro menjalin kemitraan dan ekspor	%	30	40	Rp 1,360,601,009	45	Rp 1,398,422,187	50	Rp 1,427,580,810	55	Rp 1,457,556,526	60	Rp 1,487,524,330	Dinas yang menangani Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PENANAMAN MODAL															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	Rp 9,500,049,597	100	Rp 9,764,126,324	100	Rp 9,967,718,978	100	Rp 10,177,016,769	100	Rp 10,386,259,321	Dinas yang menangani Urusan Penanaman Modal
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Realisasi Total terhadap target investasi	%	100	100	Rp 643,884,794	100	Rp 661,783,120	100	Rp 675,582,018	100	Rp 689,767,593	100	Rp 703,949,424	Dinas yang menangani Urusan Penanaman Modal

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	24,50	25,50	Rp 66,845,701	26.00	Rp 68,703,838	26,50	Rp 70,136,387	27.00	Rp 71,609,081	27,50	Rp 73,081,385	Dinas yang menangani Urusan Penanaman Modal
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	100	100	Rp 403,895,887	100	Rp 415,123,144	100	Rp 423,778,913	100	Rp 432,677,237	100	Rp 441,573,212	Dinas yang menangani Urusan Penanaman Modal
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	100	100	Rp 135,271,954	100	Rp 139,032,163	100	Rp 141,931,135	100	Rp 144,911,343	100	Rp 147,890,764	Dinas yang menangani Urusan Penanaman Modal

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	100	100	Rp 80,144,835	100	Rp 82,372,654	100	Rp 84,090,213	100	Rp 85,855,902	100	Rp 87,621,126	Dinas yang menangani Urusan Penanaman Modal
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	89.00	89,05	Rp 9,473,663,573	89,10	Rp 9,737,006,836	89,15	Rp 9,940,034,018	89,20	Rp 10,148,750,494	89,25	Rp 10,357,411,883	Dinas yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	%	25,27	25,40	Rp 662,018,243	25,59	Rp 680,420,633	25,68	Rp 694,608,143	25,76	Rp 709,193,220	25,93	Rp 723,774,448	Dinas yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda	%	0,82	1,10	Rp 8,063,099,066	1,28	Rp 8,301,130,999	1,28	Rp 8,484,644,151	1,28	Rp 8,673,299,770	1,37	Rp 8,861,905,595	Dinas yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	%	22,20	22,40	Rp 1,412,880,269	22,50	Rp 1,493,850,782	22,60	Rp 1,556,275,827	22,70	Rp 1,620,450,166	22,80	Rp 1,684,607,568	Dinas yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga
KEBUDAYAAN															
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	1,87	2,11	Rp 312,560,755	2,23	Rp 321,249,132	2,35	Rp 327,947,525	2,47	Rp 334,833,625	2,59	Rp 341,717,905	Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional Yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	52,63	63,16	Rp 204,473,578	73,68	Rp 210,157,413	84,21	Rp 214,539,424	89,47	Rp 219,044,229	100	Rp 223,547,845	Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	%	39,00	55,00	Rp 167,626,124	62,50	Rp 172,285,696	75,00	Rp 175,878,040	87,50	Rp 179,571,050	100	Rp 183,263,085	Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	91,36	93,96	Rp 73,997,266	95,26	Rp 76,054,198	96,56	Rp 77,640,011	97,86	Rp 79,270,261	99,16	Rp 80,900,082	Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan
		2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	75,00	84,21		89,47		94,74		100		100		

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	%	73,97	75,76	Rp1,369,959,198	76,57	Rp1,408,040,509	77,33	Rp1,437,399,685	78,03	Rp1,467,581,573	78,70	Rp1,497,755,495	Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan
PERPUSTAKAAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	90	100	Rp 8,648,393,688	100	Rp 8,888,796,590	100	Rp 9,074,137,665	100	Rp 9,264,672,430	100	Rp 9,455,156,905	Dinas yang menangani Urusan Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya layanan perpusatakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan	%	1	3	Rp 922,282,582	4	Rp 948,336,606	5	Rp 968,423,222	6	Rp 989,072,711	7	Rp1,009,716,751	Dinas yang menangani Urusan Perpustakaan

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	%	100	100	Rp 15,000,000	100	Rp 15,000,000	100	Rp 15,000,000	100	Rp 15,000,000	100	Rp 15,000,000	Dinas yang menangani Urusan Perpustakaan
KEARSIPAN															
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	1. Persentase Peningkatan Arsip yang Dikelola	%	14,55	14,65	Rp 1,060,680,200	14,70	Rp 1,090,164,357	14,71	Rp 1,112,895,470	14,72	Rp 1,136,263,561	14,73	Rp 1,159,625,484	Dinas yang menangani Urusan Kearsipan
		2. Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip sesuai standart	%	95	100		100		100		100		100		
URUSAN PILIHAN															
KELAUTAN DAN PERIKANAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1,032	1,3	Rp 581,357,154	1,31	Rp 597,517,375	1,32	Rp 609,976,262	1,33	Rp 622,784,275	1,34	Rp 635,588,910	Dinas yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1,01	1,22	Rp 481,001,537	1,23	Rp 494,372,131	1,24	Rp 504,680,328	1,25	Rp 515,277,384	1,26	Rp 525,871,643	Dinas yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase perairan umum darat yang mendapat pengawasan	%	100	100	Rp 38,891,899	100	Rp 39,972,993	100	Rp 40,806,473	100	Rp 41,663,310	100	Rp 42,519,920	Dinas yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Tahun	21,64	21,68	Rp 578,114,836	21,7	Rp 594,184,928	21,72	Rp 606,574,330	21,74	Rp 619,310,912	21,76	Rp 632,044,132	Dinas yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan
PERTANIAN															

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	0,57	0,57	Rp 339,325,313	0,57	Rp 348,757,675	0,57	Rp 356,029,652	0,57	Rp 363,505,407	0,57	Rp 370,979,188	Dinas yang menangani Urusan Pertanian
		2 Peningkatan Produksi Hortikultura	%	-33,91	0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		
		3 Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	0,52	0,64		0,64		0,64		0,64		0,64		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B	Ha	1099	1099	Rp 149,291,309	1099	Rp 153,441,220	1099	Rp 156,640,636	1099	Rp 159,929,707	1099	Rp 163,217,911	Dinas yang menangani Urusan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1Persentase Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan	%	26,09	27.00	Rp 992,591,033	27.2	Rp 1,020,182,488	27.4	Rp 1,041,454,403	27.6	Rp 1,063,322,406	27.8	Rp 1,085,184,637	Dinas yang menangani Urusan Pertanian

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		2 Persentase Peningkatan Pengendalian Masyarakat Veteriner	%	80	85		85.2		85.4		85.6		85.8		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1 Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	90,35	95	Rp 109,595,333	96	Rp 112,641,799	96	Rp 114,990,503	98	Rp 117,405,023	98	Rp 119,818,906	Dinas yang menangani Urusan Pertanian
		2 Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	80	88,23		89,47		90,47		91,3		92		
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	%	100	100	Rp 82,335,409	100	Rp 84,624,120	100	Rp 86,388,625	100	Rp 88,202,575	100	Rp 90,016,047	Dinas yang menangani Urusan Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi	%	80	80	Rp4,283,979,117	80	Rp4,403,062,620	80	Rp4,494,871,264	80	Rp4,589,252,600	80	Rp4,683,609,025	Dinas yang menangani Urusan Pertanian
PARIWISATA															

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	50	66	Rp 1.305,486,946	75	Rp 1.327,877,395	83	Rp 1.345,139,539	91	Rp 1.362,885,408	100	Rp 1.380,626,593	Dinas yang menangani Urusan Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata yang Berkembang	%	2,4	4,81	Rp 1.438,551,594	6,02	Rp 1.464,640,892	8,43	Rp 1.484,754,704	10,84	Rp 1,505,432,152	13,25	Rp 1,526,104,142	Dinas yang menangani Urusan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	7,69	21,16	Rp 59,369,358	26,19	Rp 61,019,672	30,63	Rp 62,291,998	34,56	Rp 63,599,978	38,06	Rp 64,907,613	Dinas yang menangani Urusan Pariwisata

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	%	0	1,02	Rp 22,545,326	1,11	Rp 23,172,027	1,20	Rp 23,655,189	1,27	Rp 24,151,890	1,34	Rp 24,648,461	Dinas yang menangani Urusan Pariwisata
PERDAGANGAN															
PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	74	76	Rp 457,425,870	77	Rp 470,141,121	78	Rp 479,944,076	79	Rp 490,021,731	80	Rp 500,096,726	Dinas yang menangani Urusan Perdagangan

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	80	80	Rp 2,108,725,682	80	Rp 2,167,342,784	80	Rp 2,212,534,238	80	Rp 2,258,992,061	80	Rp 2,305,437,623	Dinas yang menangani Urusan Perdagangan
PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	15	16	Rp 11,022,159	16,5	Rp 11,328,547	17	Rp 11,564,759	17,5	Rp 11,807,591	18	Rp 12,050,359	Dinas yang menangani Urusan Perdagangan
STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	1 Persentase pelaku usaha yang sadar Tera dan Tera Ulang UTTP	%	5	15	Rp 101,680,671	20	Rp 104,507,130	25	Rp 106,686,217	30	Rp 108,926,368	35	Rp 111,165,927	Dinas yang menangani Urusan Perdagangan
		2 Persentase alat UTTP yang memenuhi standart metrologi legal	%	5	15		20		25		30		35		
PERINDUSTRIAN															

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor industri dan Kawasan Industri	%	83	84	Rp 338,437,024	84,5	Rp 347,844,695	85,5	Rp 355,097,635	86,5	Rp 362,553,820	87,5	Rp 370,008,037	Dinas yang menangani Urusan Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	82	82,8	Rp 13,777,699	83,2	Rp 14,160,683	83,6	Rp 14,455,949	84	Rp 14,759,489	84,4	Rp 15,062,948	Dinas yang menangani Urusan Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	82	83	Rp 21,410,269	83,5	Rp 22,005,419	84,5	Rp 22,464,256	85,5	Rp 22,935,950	86,5	Rp 23,407,520	Dinas yang menangani Urusan Perindustrian
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH															
PERENCANAAN															

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	98	100	Rp 9,585,896,174	100	Rp 9,852,359,212	100	Rp 10,057,791,616	100	Rp 10,268,980,715	100	Rp 10,480,114,072	Badan yang menangani Urusan Perencanaan
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Presentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	96	Rp 1,301,288,641	100	Rp 1,337,461,089	100	Rp 1,365,348,607	100	Rp 1,394,017,598	100	Rp 1,422,679,023	Badan yang menangani Urusan Perencanaan
		2. Peresentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	95	96		97		98		99		100		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Presentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	Rp 1,296,514,696	100	Rp 1,332,554,440	100	Rp 1,360,339,650	100	Rp 1,388,903,465	100	Rp 1,417,459,742	Badan yang menangani Urusan Perencanaan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang	2. Presentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100		100		100		100		100		

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Perekonomian dan SDA														
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3. Presentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100		100		100		100.00		100		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	1. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	100	100	Rp 676,269,588	100	Rp 695,068,128	100	Rp 709,561,054	100	Rp 724,460,106	100	Rp 739,355,226	Badan yang menangani Urusan Penelitian dan Pengembangan
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	2. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian	3. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	permasalahan daerah														
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	4. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	%	100	100		100		100		100		100		
KEUANGAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	87,5	100	Rp 49,809,102,532	100	Rp 51,193,666,330	100	Rp 52,261,109,947	100	Rp 53,358,465,819	100	Rp 54,455,532,060	Badan yang menangani Urusan Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran	1 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	44,75	44	Rp 10,116,654,139	30	Rp 10,397,870,872	30	Rp 10,614,677,788	30	Rp 10,837,560,137	30	Rp 11,060,383,661	Badan yang menangani Urusan Keuangan
		2 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	18,15	29		40		40		40		40		

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	94,34	94,84		95,09		95,34		95,59		95,84		
		4 Persentase Penurunan SILPA	%	34,32	33,82		33,57		33,32		33,07		32,82		
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	5 Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	13,07	14	Rp 475,626,210	15	Rp 488,847,385	16	Rp 499,040,384	17	Rp 509,519,015	18	Rp 519,994,881	Badan yang menangani Urusan Keuangan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	1 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	20,79	25,22	Rp 3,726,280,387	25,75	Rp 3,829,861,312	26,23	Rp 3,909,718,085	26,69	Rp 3,991,812,631	27,09	Rp 4,073,885,510	Badan yang menangani Urusan Keuangan

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	2 Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	100	100		100		100		100		100		
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	3 Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	33,71	75		80		85		90		95		
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	Rp 8,243,157,080	100	Rp 8,472,295,456	100	Rp 8,648,952,029	100	Rp 8,830,558,931	100	Rp 9,012,117,901	Badan yang menangani Urusan Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	1 Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	90	92	Rp 885,289,966	93	Rp 909,898,730	94	Rp 928,871,108	95	Rp 948,375,137	96	Rp 967,874,017	Badan yang menangani Urusan Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	2 Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	56	70		75		80		90		93		

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	3 Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	80	82		83		84		85		86		
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	4 Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	%	90,67	91,67		92,17		92,67		93,17		93,67		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	1 Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	%	76	80	Rp 316,976,945	82	Rp 325,788,082	85	Rp 332,581,118	88	Rp 339,564,510	90	Rp 346,546,060	Badan yang menangani Urusan Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan
	Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	2 Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	%	100	100		100		100		100		100		
	Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	3 Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	78	88		90		93		95		100		

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	4 Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	17.53	36.63		42.05		46.12		51.55		56.97		
PENGAWASAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	Rp 9,665,772,595	100	Rp 9,934,455,991	100	Rp 10,141,600,203	100	Rp 10,354,549,076	100	Rp 10,567,441,746	Perangkat Daerah yang menangani Fungsi Pengawasan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	94,54	95,3	Rp 1,331,961,448	95,7	Rp 1,368,986,520	96	Rp 1,397,531,377	96,3	Rp 1,426,876,129	96,5	Rp 1,456,213,135	Perangkat Daerah yang menangani Fungsi Pengawasan

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	Rp 677,237,158	3	Rp 696,062,594	3	Rp 710,576,256	3	Rp 725,496,625	3	Rp 740,413,055	Badan yang menangani Fungsi Pengawasan
SEKRETARIAT DPRD															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	Rp 39,174,969,271	100	Rp 40,263,931,760	100	Rp 41,103,478,524	100	Rp 41,966,551,343	100	Rp 42,829,396,368	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan	1 Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	Rp 34,629,813,131	100	Rp 35,592,432,073	100	Rp 36,334,572,990	100	Rp 37,097,510,421	100	Rp 37,860,246,488	Sekretariat DPRD
		2 Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	100		100		100		100		100		

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	3 Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		
SEKRETARIAT DAERAH															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	Rp 35,887,311,524	100	Rp 37,328,999,856	100	Rp 38,311,383,257	100	Rp 38,887,276,997	100	Rp 39,211,771,195	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1. Efektivitas kerjasama daerah	%	100	100	Rp 11,605,226,036	100	Rp 11,514,071,438	100	Rp 11,549,204,100	100	Rp 11,898,600,622	100	Rp 12,574,939,205	Sekretariat Daerah
		2. Efektivitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
		3. Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	%	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
		4. Persentase produk hukum yang dihasilkan	%	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	1. Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	%	100	100	Rp 1,321,450,000	100	Rp 1,327,818,450	100	Rp 1,356,420,000	100	Rp 1,506,562,000	100	Rp 1,580,877,640	Sekretariat Daerah
		2. Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	%	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
		3. Tingkat kematangan UKPBJ	Nilai	88,90	88,95		88,98		89,00		89,20		89,40		Sekretariat Daerah
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	98	98	Rp 5,166,160,486	98	Rp 5,309,766,342	98	Rp 5,420,480,745	99	Rp 5,534,297,622	99	Rp 5,648,084,460	Badan yang menangani Urusan Pemerintahan Umum
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	%	90	91	Rp 265,649,027	91	Rp 273,033,381	92	Rp 278,726,424	93	Rp 284,578,999	94	Rp 290,430,029	Badan yang menangani Urusan Pemerintahan Umum

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	90	91	Rp 1,672,182,097	91	Rp 1,718,664,420	92	Rp 1,754,500,442	93	Rp 1,791,340,673	94	Rp 1,828,171,181	Badan yang menangani Urusan Pemerintahan Umum
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	%	85	86	Rp 961,754,534	87	Rp 988,488,814	88	Rp 1,009,099,881	89	Rp 1,030,288,518	90	Rp 1,051,471,562	Badan yang menangani Urusan Pemerintahan Umum

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	87	88	Rp 722,677,889	89	Rp 742,766,459	90	Rp 758,253,947	90	Rp 774,175,431	91	Rp 790,092,713	Badan yang menangani Urusan Pemerintahan Umum

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan	%	100	100	Rp 2,112,810,143	100	Rp 2,171,540,782	100	Rp 2,216,819,769	100	Rp 2,263,367,579	100	Rp 2,309,903,103	Badan yang menangani Urusan Pemerintahan Umum
KECAMATAN MAYANGAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	Rp 10,570,428,646	100	Rp 10,864,259,133	100	Rp 11,090,790,751	100	Rp 11,323,670,311	100	Rp 11,556,488,407	Kecamatan Mayangan

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan	Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif	%	80	84	Rp 2,077,760,889	85	Rp 2,135,517,250	86	Rp 2,180,045,107	87	Rp 2,225,820,739	88	Rp 2,271,584,288	Kecamatan Mayangan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan	Skor	84,90	87	Rp 3,390,994,114	88	Rp 3,485,254,951	89	Rp 3,557,926,307	90	Rp 3,632,634,084	91	Rp 3,707,322,142	Kecamatan Mayangan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum wilayah kelurahan dan kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	23	25	Rp 55,883,507	26	Rp 57,297,937	27	Rp 58,388,406	28	Rp 59,509,432	29	Rp 60,630,163	Kecamatan Mayangan

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum kelurahan dan kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	%	80	82	Rp 416,337,014	83	Rp 427,910,102	84	Rp 436,832,493	85	Rp 446,004,910	86	Rp 455,174,907	Kecamatan Mayangan
KECAMATAN KANIGARAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	99	100	Rp 13,646,681,655	100	Rp 14,026,023,993	100	Rp 14,318,481,847	100	Rp 14,619,135,051	100	Rp 14,919,708,902	Kecamatan Kanigaran

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan	Skor	80.25	84.50	3,350,779,636 Rp	84.65	3,443,922,615 Rp	84.75	3,515,732,147 Rp	84.85	3,589,553,949 Rp	85	3,663,356,267 Rp	Kecamatan Kanigaran
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan	Persentase Kelompok/ Lembaga Masyarakat Aktif	%	88	88.5	2,491,781,957 Rp	88.75	2,561,047,029 Rp	89	2,614,447,645 Rp	89.50	2,669,344,670 Rp	90	2,724,227,206 Rp	Kecamatan Kanigaran

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum wilayah kelurahan dan kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	30	36	52,950,110 Rp	37	54,282,999 Rp	38	55,310,603 Rp	39	56,367,003 Rp	40	57,423,124 Rp	Kecamatan Kanigaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum kelurahan dan kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	%	78	81	514,784,936 Rp	82	529,094,621 Rp	83	540,126,819 Rp	84	551,468,165 Rp	85	562,806,518 Rp	Kecamatan Kanigaran
KECAMATAN KADEMANGAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	Rp 12,705,100,013	100	Rp 13,058,268,824	100	Rp 13,330,547,930	100	Rp 13,610,456,931	100	Rp 13,890,292,054	KECAMATAN KADEMANGAN

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan	Skor	97,25	97,27	Rp 2,678,987,519	97,28	Rp 2,753,456,421	97,29	Rp 2,810,868,981	97,30	Rp 2,869,890,376	97,31	Rp 2,928,896,192	Kecamatan Kademangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan	Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif	%	95	95,10	Rp 2,419,535,501	95,15	Rp 2,486,792,309	95,20	Rp 2,538,644,633	95,25	Rp 2,591,949,980	95,30	Rp 2,645,241,258	Kecamatan Kademangan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum wilayah kelurahan dan kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	24	26	Rp 58,757,554	27	Rp 58,862,005	28	Rp 58,942,532	29	Rp 58,025,315	30	Rp 59,108,077	Kecamatan Kademangan

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum kelurahan dan kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	%	79	81	Rp 533,565,112	82	Rp 548,396,837	83	Rp 559,831,508	84	Rp 571,586,604	85	Rp 583,338,598	Kecamatan Kademangan
KECAMATAN KEDOPOK															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	Rp 12,639,288,670	100	Rp 12,990,628,096	100	Rp 13,261,496,818	100	Rp 13,539,955,913	100	Rp 13,818,341,514	Kecamatan Kedopok
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan	Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif	%	84	84	Rp 2,428,983,415	85	Rp 2,496,502,851	86	Rp 2,548,557,651	87	Rp 2,602,071,147	88	Rp 2,655,570,519	Kecamatan Kedopok

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan	Skor	83	85	Rp 2,849,900,449	86	Rp 2,929,120,286	87	Rp 2,990,195,630	88	Rp 3,052,982,447	89	Rp 3,115,752,692	Kecamatan Kedopok
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum wilayah kelurahan dan kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	24	26	Rp 51,627,451	27	Rp 52,923,573	28	Rp 53,922,832	29	Rp 54,950,092	30	Rp 55,977,081	Kecamatan Kedopok
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum kelurahan dan kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	%	82	84	Rp 464,809,464	85	Rp 477,729,961	86	Rp 487,691,150	87	Rp 497,931,475	88	Rp 508,169,097	Kecamatan Kedopok
KECAMATAN WONOASIH															

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	%	100	100	Rp 12,998,143,034	100	Rp 13,359,457,681	100	Rp 13,638,016,902	100	Rp 13,924,382,000	100	Rp 14,210,671,518	Kecamatan Wonoasih
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan	Skor	94,17	94,19	Rp 2,851,802,754	94,20	Rp 2,931,075,470	94,21	Rp 2,992,191,581	94,22	Rp 3,055,020,308	94,23	Rp 3,117,832,452	Kecamatan Wonoasih
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pada tingkat kelurahan dan kecamatan	Persentase Kelompok/Lembaga Masyarakat Aktif	%	95	97	Rp 2,313,078,938	98	Rp 2,377,376,530	99	Rp 2,426,947,416	100	Rp 2,477,907,394	100	Rp 2,528,853,922	Kecamatan Wonoasih

PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum wilayah kelurahan dan kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	23	25	Rp 66,923,905	26	Rp 70,730,034	27	Rp 73,664,409	28	Rp 76,681,011	29	Rp 79,696,817	Kecamatan Wonoasih
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum kelurahan dan kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	%	80.00	82.00	Rp 477,585,148	83.00	Rp 490,860,776	84.00	Rp 501,095,757	85.00	Rp 511,617,546	86.00	Rp 522,136,558	Kecamatan Wonoasih
TOTAL ANGGARAN					**Rp 1,057,026,937,035**		**Rp 1,086,409,542,949**		**Rp 1,109,062,363,408**		**Rp 1,132,349,968,605**		**Rp 1,155,631,427,434**		

Sumber: Data Diolah, 2025

Merujuk pada hasil identifikasi terhadap program prioritas serta rincian program perangkat daerah Kota Probolinggo Tahun 2026 - 2030, maka selanjutnya dapat dilakukan pemetaan dan alokasi belanja program di Kota Probolinggo dengan merujuk pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mana kebijakan pengalokasian belanja diklasifikasikan dalam 3 (tiga) prioritas dengan definisi sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Prioritas Kedua adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah; dan
3. Prioritas Ketiga adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Berikut adalah besar nilai dan proporsi alokasi belanja pada program perangkat daerah selama tahun 2026 hingga tahun 2030 berdasarkan prioritas alokasi belanja daerah.

Tabel IV.2 Prioritas Pendanaan Kota Probolinggo Tahun 2026-2030

URAIAN	ALOKASI BELANJA PROGRAM									
	2026		2027		2028		2029		2030	
	%	ANGGRAN	%	ANGGRAN	%	ANGGRAN	%	ANGGRAN	%	ANGGRAN
Prioritas I	80.86	854,751,275,129	80.91	879,058,036,474	80.93	897,591,385,682	80.91	916,210,064,127	80.87	934,572,580,947
Prioritas II	16.67	176,192,413,300	16.63	180,642,295,911	16.61	184,201,400,754	16.63	188,276,135,679	16.70	193,022,932,057
Prioritas III	2.47	26,083,248,606	2.46	26,709,210,565	2.46	27,269,576,974	2.46	27,863,768,799	2.43	28,035,914,428
Kapasitas Riil (Rp)	**1,057,026,937,035**		**1,086,409,542,950**		**1,109,062,363,410**		**1,132,349,968,605**		**1,155,631,427,432**	

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan data alokasi belanja Kota Probolinggo tahun 2026 - 2030 terlihat bahwa komposisi belanja daerah masih didominasi oleh Prioritas I, yakni program-program yang mengakomodasi belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan layanan dasar. Alokasi untuk prioritas ini secara konsisten berada di atas 80% setiap tahunnya. Sementara itu, Prioritas II yang berfokus pada program-program pencapaian visi dan misi kepala daerah (diluar program yang terkait dengan pemenuhan penerapan pelayanan dasar) hanya mendapatkan porsi sekitar 16 - 17%. Adapun Prioritas III, yang mencakup program-program di luar dua prioritas utama tersebut, hanya berkisar di angka 2% dari total proyeksi belanja tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% anggaran Kota Probolinggo masih diarahkan

pada pemenuhan *mandatory spending* seperti belanja pegawai, kebutuhan dasar masyarakat, dan kewajiban lain yang tidak bisa ditunda.

Kondisi ini memberikan gambaran terbatasnya ruang fiskal yang tersedia untuk inovasi dan program-program strategis pembangunan jangka menengah. Walaupun terdapat irisan antara program wajib layanan dasar dengan tujuan strategis kepala daerah, namun fleksibilitas penganggaran untuk program yang secara eksplisit mendukung visi-misi masih relatif sempit. Oleh karena itu, salah satu langkah penting yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Kota Probolinggo ke depan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencari alternatif sumber pembiayaan. Upaya ini bertujuan untuk memperluas ruang fiskal yang lebih leluasa guna menjawab berbagai tantangan pembangunan yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan belanja wajib semata, melainkan juga memerlukan belanja strategis yang proaktif dan berdampak langsung pada transformasi daerah.

Sebagai implikasi dari komposisi alokasi tersebut, penguatan kapasitas perencanaan dan penganggaran menjadi krusial agar setiap rupiah yang dialokasikan, khususnya pada prioritas pertama, mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja serta penyusunan program yang terintegrasi lintas perangkat daerah perlu terus diperkuat agar belanja wajib tidak semata-mata menjadi rutinitas administratif, melainkan dapat dikelola secara strategis untuk mendukung transformasi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah selama periode lima tahun ke depan. Indikator kinerja daerah menjadi alat ukur utama dalam menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan pembangunan, khususnya dalam tiga aspek utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan layanan publik yang berkualitas, dan penguatan daya saing daerah.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama periode RPJMD ini diukur melalui akumulasi capaian indikator kinerja program yang bersifat hasil (*outcome*) maupun dampak (*impact*) secara tahunan, maupun secara kumulatif

hingga akhir periode perencanaan tahun 2030. Dengan demikian, indikator kinerja daerah menjadi tolok ukur utama untuk memastikan bahwa arah pembangunan berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD.

Secara teknis, perumusan indikator kinerja dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 mengacu pada indikator tujuan dan indikator sasaran yang telah ditetapkan serta indikator kinerja kunci dari penyelenggaraan masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan indikator tersebut didasarkan pada hasil analisis keterkaitan dan pengaruh antara satu atau lebih indikator kinerja program pembangunan daerah dengan capaian indikator kinerja daerah secara keseluruhan. Proses ini memastikan bahwa setiap indikator kinerja daerah memiliki keterukuran yang jelas, relevan, dan dapat dievaluasi secara periodik.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja yang telah dirumuskan mencerminkan sejauh mana visi dan misi pembangunan Kota Probolinggo diwujudkan. Dengan kata lain, capaian indikator kinerja daerah memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah (merupakan representasi dari target kinerja indikator tujuan dan indikator sasaran), sekaligus menjadi indikator utama bagi keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan pada periode 2025-2029. Berkaitan dalam penetapan target kinerja tentunya memerhatikan berbagai hal, mulai dari proyeksi atas dasar *trendline* kinerja pembangunan daerah Tahun 2020-2024 (sebagaimana disajikan pada Bab 2), baseline capaian kinerja Tahun 2024 sebagai *starting point* penentuan target untuk komitmen peningkatan kinerja, maupun memerhatikan target Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun target nasional yang mana Kota Probolinggo merupakan agregat wilayah yang tidak dapat dipisahkan secara regional maupun nasional serta bentuk dukungan/keselarasan pencapaian target nasional dan provinsi.

Selain sebagai alat ukur capaian pembangunan, indikator kinerja daerah juga berfungsi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyajian target kinerja indikator secara terbuka kepada publik memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang responsif dan bertanggung jawab.

Berikut ini disajikan gambaran Target Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 yang merangkum ukuran pencapaian kinerja pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam matriks di bawah ini:

Tabel IV.3 Indikator Kinerja Utama Kota Probolinggo Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN (IKU)	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA KOTA PROBOLINGGO TAHUN						KETERANGAN
			Kota Probolinggo	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,79	77,64 - 77,99	77,83 -78,43	78,22 - 79,12	78,61 - 79,81	79,00 - 81,20	79,49 - 82,05	▪ Indikator Tujuan Misi 1 ▪ Indikator Sasaran Pembangunan *Mandatory* Provinsi
2	Persentase Penduduk Miskin	%	6,18	5,01 - 5,89	4,98 - 5,7	4,88 - 5,45	4,78 - 5,26	3,32 - 4,95	3,13 - 4,32	▪ Indikator Tujuan Misi 2 ▪ Indikator Sasaran Pembangunan *Mandatory* Provinsi ▪ Indikator Utama Pembangunan (IUP)
3	Rasio Gini	Indeks	0,344	0,33 - 0,37	0,325 -0,365	0,320 -0,360	0,315 -0,355	0,310 -0,350	0,305 -0,345	▪ Indikator Tujuan Misi 2 ▪ Indikator Sasaran Pembangunan *Mandatory* Provinsi
4	Indeks Kebudayaan berbasis Capaian Pelaksanaan PPKD / Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	Indeks	54,76	70	72	74	76	78	80	Indikator Tujuan Misi 2
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,17 - 5,54	5,18-5,58	5,20-6,11	5,23-6,33	5,29-6,67	5,39-6,75	▪ Indikator Tujuan Misi 3 ▪ Indikator Sasaran Pembangunan *Mandatory* Provinsi
6	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	61,61	61,93-63,85	62,78-67,82	63,81-71,79	64,84-75,77	65,88-79,74	66,91-88,72	▪ Indikator Tujuan Misi 3 ▪ Indikator Sasaran Pembangunan *Mandatory* Provinsi

NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN (IKU)	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA KOTA PROBOLINGGO TAHUN						KETERANGAN
			Kota Probolinggo	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	ICOR	Nilai	3,61	3,09	3,084	3,078	3,072	3,065	3,059	▪ Indikator Tujuan Misi 3, ▪ Indikator Utama Pembangunan (IUP)
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	17,05	17,07-17,14	17,08-17,22	17,10-17,31	17,12-17,39	17,14-17,48	17,15-17,57	▪ Indikator Tujuan Misi 3, ▪ Indikator Utama Pembangunan (IUP)
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,66	85,94	86.54	87.14	87.74	88.34	88.94	Indikator Tujuan Misi 4
10	Indeks Infrastruktur	Indeks	74,66	76,88	77,64	78,4	79,16	79,92	80,68	Indikator Tujuan Misi 5
11	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 eq	342.851,836	366.851,465	392.531,068	420.008,242	449.408,819	480.867,437	514.528,157	▪ Indikator Tujuan Misi 5, ▪ Indikator Sasaran Pembangunan *Mandatory* Provinsi ▪ Indikator Utama Pembangunan (IUP)

Sumber: Data Diolah, 2025

Sejalan dengan target IKU Kota Probolinggo, berikut diuraikan berkaitan dengan indikator kinerja daerah dan indikator kinerja kunci Kota Probolinggo dengan target kinerja tahun 2025 – 2029:

Tabel IV.4 Indikator Kinerja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	**Aspek Geografi dan Demografi**									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,62	79,30	79,98	80,66	81,34	82,02	82,70	Indikator Sasaran Misi 3
2	Rasio Konektivitas	Rasio	84,61	84,61	84,61	92,3	92,3	92,3	92,3	Indikator Sasaran Misi 5
3	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 eq	342.851,836	366.851,465	392.531,068	420.008,242	449.408,819	480.867,437	514.528,157	Indikator Tujuan Misi 5, IUP, Indikator Sasaran Pembangunan *Mandatory* Provinsi
4	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	poin	58,17	66,51	66,59	66,67	66,74	66,82	66,90	Indikator Sasaran Misi 5, IUP, Indikator Sasaran Pembangunan *Mandatory* Provinsi
5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	117,83	113,04	110,35	107,78	105,34	102,99	99,90	Indikator Sasaran Misi 5, IUP
II	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,17 - 5,54	5,18-5,58	5,20-6,11	5,23-6,33	5,29-6,67	5,39-6,75	Indikator Tujuan Misi 3, Indikator Sasaran Pembangunan *Mandatory* Provinsi
2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	61,61	61,93-63,85	62,78-67,82	63,81-71,79	64,84-75,77	65,88-79,74	66,91-88,72	Indikator Tujuan Misi 3,

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Indikator Sasaran Pembangunan *Mandatory* Provinsi
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,44	3,72	3,67	3,52	3,32	3,22	3,17	Indikator Sasaran Misi 2, IUP, Indikator Sasaran Pembangunan *Mandatory* Provinsi
4	Rasio Gini	Indeks	0,344	0,33 - 0,37	0,325 -0,365	0,320 -0,360	0,315 -0,355	0,310 -0,350	0,305 -0,345	Indikator Tujuan Misi 3, Indikator Sasaran Pembangunan *Mandatory* Provinsi
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,79	77,64 - 77,99	77,83 -78,43	78,22 - 79,12	78,61 - 79,81	79,00 - 81,20	79,49 - 82,05	Indikator Tujuan Misi 1, Indikator Sasaran Pembangunan *Mandatory* Provinsi
6	Indeks Pendidikan	Indeks	0,71	0,715	0,72	0,725	0,73	0,735	0,74	Indikator Sasaran Misi 1
7	Indeks Kesehatan	Indeks	0.836	0.838	0.839	0.841	0.843	0.844	0.846	Indikator Sasaran Misi 1
8	Persentase Penduduk Miskin	%	6,18	5,01 - 5,89	4,98 - 5,7	4,88 - 5,45	4,78 - 5,26	3,32 - 4,95	3,13 - 4,32	Indikator Tujuan Misi 2, IUP, Indikator Sasaran Pembangunan *Mandatory* Provinsi
9	Indeks Kebudayaan berbasis Capaian Pelaksanaan PPKD /	Indeks	54,76	70	72	74	76	78	80	Indikator Tujuan Misi 2

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah									
10	Persentase Penurunan PMKS / PPKS / PAS	%	8,792	9,193	9,596	10,001	10,467	10,875	11,284	Indikator Sasaran Misi 2
11	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,26	97,46	97,66	97,86	98,06	98,26	98,46	Indikator Sasaran Misi 2
12	Persentase kebudayaan yang dikelola menjadi daya saing daerah	%	32,03	33,59	35,16	36,72	38,28	39,84	41,41	Indikator Sasaran Misi 2
III	**Aspek Daya Saing Daerah**									
1	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	14,63	14,69-14,86	14,75-15,1	14,83-15,33	14,91-15,56	15-15,8	15,10-16,03	Indikator Sasaran Misi 3, IUP
2	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	%	26,20	26,33-26,36	26,46-26,53	26,59-26,71	26,73-26,91	26,86-27,13	27-27,36	Indikator Sasaran Misi 3
3	Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	%	0,48	0,481	0,482	0,484	0,485	0,487	0,49	Indikator Tujuan Misi 3, Indikator Sasaran Pembangunan *Mandatory* Provinsi
4	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD	%	4,67	4,68	4,69	4,70	4,71	4,72	4,73	Indikator Sasaran Misi 3
5	NTP (Nilai Tukar Petani)	Indeks	111,33	111,4	111,5	111,6	111,7	111,8	111,9	Indikator Sasaran Misi 3
6	NTN (Nilai Tukar Nelayan)	Indeks	97,18	97,2	97,22	97,24	97,26	97,28	97,3	Indikator Sasaran Misi 3
7	Indeks Infrastruktur	Indeks	74,66	76,88	77,64	78,4	79,16	79,92	80,68	Indikator Tujuan Misi 5
8	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	82,52	83,02	83,52	84,02	84,52	85,02	85,52	Indikator Sasaran Misi 5
9	ICOR	Indeks	3,61	3,09	3,084	3,078	3,072	3,065	3,059	Indikator Tujuan, IUP, Misi 3

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	17,05	17,07-17,14	17,08-17,22	17,10-17,31	17,12-17,39	17,14-17,48	17,15-17,57	Indikator Tujuan Misi 3, IUP
11	Persentase Pertumbuhan Penanaman Modal	%	-0,21	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	Indikator Sasaran Misi 3
12	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	5,79	5,80	5,81	5,82	5,83	5,84	5,84	
13	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,49	0,53	0,57	0,61	0,65	0,69	0,73	
IV	**Aspek Pelayanan Umum**									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,66	85,94	86,54	87,14	87,74	88,34	88,94	Indikator Tujuan Misi 4
2	Nilai SAKIP	Skor	71,91	72,50	73,00	73,50	74,00	74,50	75	Indikator Sasaran Misi 4
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Indikator Sasaran Misi 4
4	Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3	3	3	3	3	Indikator Sasaran Misi 4
5	Indeks Sistem Merit	Indeks	Indeks : 0,74* Nilai : 303*	Indeks : 0,75 Nilai : 308	Indeks : 0,76 Nilai : 312	Indeks : 0,77 Nilai : 316	Indeks : 0,78 Nilai : 320	Indeks : 0,79 Nilai : 325	Indeks : 0,80 Nilai : 328	Indikator Sasaran Misi 4
6	Indeks SPBE	Nilai	4.04	4.09	1,74 - 1,97	1,84 - 2,12	1,94 - 2,26	2,04 - 2,41	2,14 - 2,55	Indikator Sasaran Misi 4, IUP *(*Catatan : Mulai tahun 2026 dilakukan penguatan indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi))*
7	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,15	4,6	4,65	4,68	4,7	4,72	4,74	Indikator Sasaran Misi 4
8	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	66,38	70,57	71,05	72,76	73,88	75,02	76,18	Indikator Sasaran Misi 4

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	70,00	70,49	71,02	71,59	72,20	72,85	73,54	Indikator Sasaran Misi 4
INDIKATOR KINERJA KUNCI										
A	Pendidikan									
1	Rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun	Tahun	9,72	9,97	10,22	10,47	10,72	10,97	11,22	IUP
2	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	13,64	15,02	16,39	17,77	19,14	20,52	21,89	IUP
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,98	14,13	14,28	14,43	14,58	14,73	14,88	IUP
4	Skor Kemampuan Literasi SD	Skor	66,09	68,59	71,09	73,59	76,09	78,59	81,09	
5	Skor Kemampuan Literasi SMP	Skor	76,90	78,00	79,10	80,20	81,30	82,40	83,50	
6	Skor Kemampuan Numerasi SD	Skor	55,61	58,51	61,41	64,31	67,21	70,11	73,01	
7	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Skor	65,87	67,37	68,87	70,37	71,87	73,37	74,87	
8	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	%	75,76	77,83	79,90	81,97	84,04	86,12	88,19	
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	%	98,48	98,58	98,67	98,77	98,87	98,96	99,06	
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	%	32,72	40,93	49,14	57,35	63,84	70,33	71,09	
11	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD	%	71,17	75,77	78,69	82,57	87,42	93,25	99,07	
12	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	85,72	87,61	88,9	90,19	91,48	92,77	94,06	
13	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	59,00	61,50	64,00	66,50	69,00	71,50	74,00	

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	57,89	60,29	62,69	65,09	67,49	69,89	72,29	
15	Iklim Keamanan SD	Nilai	74,73	75,63	76,53	77,43	78,33	79,23	80,13	
16	Iklim Keamanan SMP	Nilai	70,36	71,86	73,36	74,86	76,36	77,86	79,36	
17	Iklim Kebinekaan SD	Nilai	74,56	75,56	76,56	77,56	78,56	79,56	80,56	
18	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	70,50	71,50	72,50	73,50	74,50	75,50	76,50	
B	**Kesehatan**									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,31	74,43	74,68	74,94	75,19	75,45	75,7	IUP
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	23,1	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	14	IUP
3	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Rasio	250,70	111,89	102,13	93,23	85,10	77	70,91	IUP
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Kesehatan PPKB	Indeks	88,21	88,25	88,34	88,43	88,52	88,60	88,69	
5	Penemuan Kasus TBC	%	110	90	90	90	90	90	90	
6	Angka Persentase Pasien HIV Baru yang memulai pengobatan ARV	%	61	95	95	95	95	95	95	
7	Angka Persentase Penemuan Kasus Malaria diobati sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	99,54	100	100	100	100	100	100	
9	Angka Kematian Balita (Per 1000 Kelahiran hidup)	Rasio	17,54	15	13,80	13,10	12,50	11,90	10,30	

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	N/A	36	46	55	61	70	70	
11	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	103,29	100	100	100	100	100	100	
12	Angka Keberhasilan Pengobatan TB	%	83,5	90	90	90	90	90	90	
13	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	%	94,51	95	95	95	95	95	95	
14	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Cukup	%	N/A	62,6	65	68	71	75	80	
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	11,1	17	18	20	21	24,5	28	IUP
2	Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	29,85	33,96	37,39	40,83	44,27	47,71	50	IUP
3	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	97,52	97,72	97,92	98,12	98,32	98,52	98,72	
4	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	90,98	91,23	91,48	91,73	91,98	92,23	92,48	
5	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata ruang	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase bangunan yang memiliki IMB	%	23,5	28,5	33,5	38,5	43,5	48,5	53,5	
7	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum Berkualitas Baik	%	88,09	88,71	89,34	89,94	90,58	91,21	91,85	
D	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**									

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	99,5	99,52	99,525	99,55	99,575	99,6	99,625	IUP
2	Persentase penurunan luasan permukiman kumuh	%	6,38	19,24	32,09	44,94	62,08	79,22	100	
E	**Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**									
1	Persentase Penurunan Kasus Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	%	2	2	2	2	2	2	2	
2	Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
F	**Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Kebencanaan)**									
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,42	0,53	0,57	0,6	0,65	0,68	0,7	
G	**Sosial**									
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	90,05	90,25	90,30	90,35	90,4	90,45	90,50	
H	**Tenaga Kerja**									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	53,09	60,89	61,47	62,05	62,63	63,21	63,79	IUP
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,55	71,01	71,05	71,09	71,13	71,17	71,21	
3	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	%	89,28	90	90,3	90,6	90,9	91,2	91,5	

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	%	70	72	74	76	78	80	82	
5	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	60,70	62,57	64,45	66,32	68,19	70,06	72,74	IUP
J	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
1	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,257	0,248	0,239	0,230	0,222	0,214	0,207	IUP
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	69,7	70,90	72,10	73,30	74,50	75,70	76,90	
K	**Pangan**									
1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	4,47	4,27	4,07	3,87	3,67	3,47	3,27	IUP
2	Skor PPH Konsumsi	Skor	84,69	84,80	85,00	85,10	85,30	85,40	85,60	
3	Skor PPH Ketersediaan	Skor	59,22	59,23	59,25	59,26	59,27	59,28	59,30	
L	**Pertanahan**									
1	Persentase penyelesaian sengketa pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	41	49,75	59,75	69,75	79,75	89,88	100	
M	**Lingkungan Hidup**									
1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	16,58	17,24	17,9	18,56	19,22	19,88	20,54	IUP
2	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)	%	57,47	57,67	57,87	58,07	58,27	58,47	58,67	IUP
3	Indeks Kulitas Air (IKA)	Indeks	41,43	64,01	64,11	64,21	64,31	64,41	64,51	

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	90,74	82,02	82,12	82,22	82,32	82,42	82,52	
5	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	26,66	42,12	42,12	42,12	42,12	42,12	42,12	
6	Persentase RTH Publik	%	5,66	20	20	20	20	20	20	
M	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
1	Persentase penduduk memiliki KTP-el	%	99,01	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penduduk memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun	%	99,03	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penyajian Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang valid	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Permintaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	86,68	87	88	89	90	91	92	
6	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Ketentuan	%	95,64	96	96,25	96,50	97	97,25	97,50	
N	**Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**									
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	%	95	100	100	100	100	100	100	Dinsos PPPA

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Kelompok Masyarakat yang aktif	%	95	100	100	100	100	100	100	Dinsos PPPA
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Kecamatan Mayangan	%	95	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Kelompok Masyarakat Kecamatan Mayangan yang aktif	%	80	84	85	86	87	88	89	
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Kecamatan Kanigaran	%	95	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Kelompok Masyarakat Kecamatan Kanigaran yang aktif	%	88	88,3	88,50	88,75	89,00	89,50	90	
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Kecamatan Kademangan	%	95	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Kelompok Masyarakat Kecamatan Kademangan yang aktif	%	92,94	95,15	95,30	95,45	95,60	95,75	95,90	
9	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Kecamatan Kedopok	%	80	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Kelompok Masyarakat Kecamatan Kedopok yang aktif	%	85	85,15	85,30	85,45	85,60	85,75	85,90	
11	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Kecamatan Wonoasih	%	85,71	85,81	85,91	86,01	86,11	86,21	86,31	

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Persentase Kelompok Masyarakat Kecamatan Wonoasih yang aktif	%	86	86,25	86,50	86,75	87	87,25	87,50	
O	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
1	Angka Kelahiran Total (Fertility Rate)	Skor	2,02	1,98	1,98	1,97	1,97	1,96	1,96	
2	Unmeet Need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) (%)	%	7,2	7,17	7,15	7,13	7,11	7,09	7,07	
3	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Rasio	17,6	17,5	17,5	17.3	17,3	17	17	
4	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63,72	64,1	66,1	68,1	70,1	72,1	74,1	
5	Angka pemakaian konrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	%	69	69.50	70	70.5	71	71.5	72	
6	Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	Indeks	74.3	75	75,5	76	76,5	77	77,5	
7	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan	%	14	16	18	20	22	24	26	
8	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Indeks	88	90	92	95	98	101	105	
9	Indeks lansia Berdaya	Indeks	59,4	60	62	64	67	69	72	
10	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	41,4	45	50	55	60	65	70	
P	**Perhubungan**									
1	Persentase Sarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	%	96,76	97	97,25	97,50	97,75	98	98,25	

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi standar keselamatan	%	67	68	69	71	73	75	78	
3	Persentase Pemenuhan Standart keselamatan Angkutan Umum trayek dalam kota	%	47,57	48,37	49,39	49,66	51,15	52,14	53	
4	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Berkondisi Baik	%	72	79	84	86	88	90	91	
Q	**Komunikasi dan Informatika**									
1	Persentase Sistem Elektronik yang terintegrasi	%	83,45	85	86	87	88	89	90	
2	Persentase Badan Publik yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	%	60,98	73,17	75,61	78,05	80,49	82,93	85,37	
R	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**									
1	Rasio Kewirausahaan	%	8,28	8,45	8,62	8,72	8,82	8,92	8,95	
2	Persentase Koperasi Sehat	%	54,43	60	61	62	63	64	65	
3	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Mandiri	%	2,39	2,47	2,55	2,63	2,71	2,79	2,87	
S	**Penanaman Modal**									
1	Realisasi Investasi	Triliyun Rupiah	0,466 T	0,540 T	0,548 T	0,556 T	0,564 T	0,628 T	0,70 T	IUP
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada DPMPTSP	Indeks	83,39	84	84,3	84,6	85	85,3	85,6	
T	**Kepemudaan dan Olahraga**									

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	25,27	25,30	25,35	25,40	25,45	25,47	25,40	
2	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	97,33	97,35	97,40	97,42	97,45	97,47	97,50	
U	**Statistika**									
1	Persentase Data statistik sektoral yang berkualitas	%	69	70	71	72	73	74	75	
2	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,87	2,93	2,98	3,03	3,08	3,13	3,18	
V	**Persandian**									
1	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	531	570	580	590	600	605	610	
2	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	50	62,09	63,18	64,27	65,36	65,90	66,45	
W	**Kebudayaan**									
1	Persentase kebudayaan yang dikelola	%	100	100	100	100	100	100	100	
X	**Perpustakaan**									
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Nilai	72,13	73,15	73,65	74,15	74,65	75,15	75,65	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	79,02	79,03	79,04	79,05	79,06	79,07	79,08	
Y	**Kearsipan**									
1	Indeks Pengawasan Kearsipan	Indeks	90,55	90,56	90,57	90,58	90,59	90,60	90,61	
2	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah dan	%	84,92	85	86	87	88	89	90	

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pertanggungjawaban nasional									
Z	**Kelautan dan Perikanan**									
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1,02	1,21	1,26	1,27	1,28	1,29	1,3	
2	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	%	6,1	6,2	6,5	6,7	6,73	6,76	6,79	
3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Indeks	94,93	95,84	96,79	97,75	98,72	99,73	100,72	
AA	**Pariwisata**									
1	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82	0,83	0,84	
2	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan	%	8,05	8,5	9	9,5	10	10,5	11	
3	Persentase Peningkatan Usaha Ekonomi Kreatif	%	0,5	0,75	1	1,05	1,1	1,15	1,2	
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	4,01	4,02-4,31	4,03-4,61	4,04-4,94	4,05-5,31	4,09-5,70	4,13-6,12	IUP
AB	**Pertanian**									
1	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	%	0,22	0,230	0,240	0,250	0,260	0,270	0,280	
2	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Pertanian	%	1,37	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis	%	63,87	63,9	64	64,1	64,2	64,3	64,4	
AC	**Perdagangan**									
1	Peningkatan Nilai Perdagangan	%	10	12	14	16	18	20	22	
2	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	%	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27	
AD	**Perindustrian**									
1	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	%	0,85	0,89	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	
AE	**Unsur Staff**									
1	Nilai LPPD	Nilai	2,9769	3,443	3,446	3,450	3,453	3,457	3.460	
2	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Indeks	83,9	84,00	84,10	84,20	84,30	84,40	84.50	
3	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	96,94	97,00	97,05	97,10	97,15	97,20	97.25	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat Daerah	Indeks	85,35	86,00	86,10	86,21	86,31	86,41	86,52	
5	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	51,71	51,72	51,73	51,74	51,84	51,93	52.13	
6	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	85,07	86,00	86,10	86,20	86,30	86,40	86,50	
AF	**Perencanaan**									
1	Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan berkualitas baik	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	Nilai	23,36	24	25	26	27	28	29	
AG	**Keuangan**									
1	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Nilai	76,14	76,89	76,90	77,67	78,45	79,23	80,02	
2	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	-1,67	17,55	5,66	4,34	4,08	3,99	3,67	
3	Persentase PD dengan Realisasi Keuangan di atas 90%	%	96,43	96,55	96,8	97	97,3	97,5	97,8	
4	Persentase PD dengan LKPD yang sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Aset Tetap dengan Dokumentasi Legal	%	91,92	92	92,5	92,8	93	93,2	93,5	
6	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Kevalidan Data Barang Milik Daerah	%	82,14	82,30	82,50	82,60	82,70	83	83,10	
AH	**Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan**									
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Nilai	78,02*	79	80	81	82	83	84	
2	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks	79,12*	79,50	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	
AI	**Penelitian dan Pengembangan**									
1	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase hasil riset yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Presentase Nilai Inovasi Daerah yang matang	%	73	75	77	78	80	82	85	
AJ	**Pengawasan**									
1	Persentase PD dengan hasil evaluasi kinerja minimal memuaskan	%	75	82	85,71	89,28	92,85	96,42	100	
2	Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	%	94,54	94,75	95	95,25	95,5	95,7	96	
3	Persentase penanganan kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Perangkat Daerah yang mencapai kategori Baik dalam penyelenggaraan SPIP	%	N/A (indikator baru)	82	85,71	89,28	92,85	96,42	100	
5	Persentase Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3	%	N/A (indikator baru)	82	85	89	92	96	100	
AK	**Urusan Kewilayahan**									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kecamatan Mayangan	Indeks	84,90	86	87	88	89	90	91	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kecamatan Kademangan	Indeks	97,25	97,26	97,27	97,28	97,29	97,30	97,31	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kecamatan Kanigaran	Indeks	80.25	84.25	84.5	84.65	84.75	84.85	85	

No	Indikator	Satuan	BASELINE 2024	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kecamatan Kedopok	Indeks	83	84	85	86	87	88	89	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kecamatan Wonoasih	Indeks	94,17	94,18	94,19	94,20	94,21	94,22	94,23	
AL	**Urusan Pemerintahan Umum**									
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	78,7	78,7	78,7	78,7	78,7	80	80	
2	Indeks Kinerja Ormas	Indeks	60	60	60	61	62	63	64	
3	Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks	60	60	60	62	63	64	64,5	
4	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6	6,95	7	7,1	7,2	7,3	7,4	
5	Persentase Partai Politik dan Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik	%	78	78	79	80	81	81,5	82	

Sumber: Data Diolah, 2025

BAB V
PENUTUP

5.1 PEDOMAN TRANSISI

RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan komprehensif untuk periode lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, serta menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan penganggaran yang terarah dan terukur. RPJMD juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Dengan demikian, RPJMD ini diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian visi pembangunan Kota Probolinggo, yakni mewujudkan kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Memasuki tahun terakhir periode RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, yakni pada tahun 2029, akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan daerah. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan berikutnya, yaitu RPJMD Kota Probolinggo untuk periode 2030-2034, yang merupakan tahapan kedua dari implementasi RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025-2045. Pada masa transisi menuju periode pembangunan selanjutnya, RKPD Tahun 2030 akan disusun masih mengacu terhadap RPJMD 2025-2029. Oleh karena itu maka meskipun secara tahun perencanaan RPJMD tahun 2025-2029, namun dalam dokumen ini target kinerja telah dilengkapi pula dengan target kinerja tahun 2030, hal tersebut bertujuan selain dokumen ini sebagai acuan dari perencanaan pembangunan daerah tahun 2025-2029 dokumen ini masih menjadi acuan dalam transisi pada tahun 2030 khsusunya dalam penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2030. Dengan mekanisme transisi yang terencana, kesinambungan dan konsistensi pembangunan Kota Probolinggo akan tetap terjaga dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Probolinggo, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat, integritas, kolaborasi yang sinergis, transparansi, akuntabilitas, serta inovasi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Untuk memastikan keberhasilan implementasi RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, maka kaidah-kaidah pelaksanaan berikut wajib menjadi acuan:

a. Pemerintah Kota Probolinggo wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan, guna meningkatkan pemahaman, dukungan, dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan pembangunan.
b. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 wajib berpedoman pada RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.
c. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo bersama pemangku kepentingan lainnya berkewajiban mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, baik melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan masyarakat.
d. Seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah masing-masing yang mengacu secara langsung pada RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, segera setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ini ditetapkan.
e. Penyusunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan secara partisipatif melalui forum konsultasi publik, forum perangkat daerah, dan Musrenbang RPJMD. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan dalam RPJMD diharapkan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, serta meningkatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah.

f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Probolinggo selaku institusi yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran strategis untuk melakukan fasilitasi, pengoordinasian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 oleh seluruh perangkat daerah.

g. Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, maka proses penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Tahun Anggaran 2029, harus mengacu kepada RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029.

h. Dalam hal terdapat dinamika dan kebutuhan penyesuaian yang signifikan selama masa pelaksanaan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029—seperti perubahan nomenklatur perangkat daerah, revisi tujuan dan sasaran, penyesuaian indikator kinerja, maupun penyesuaian program prioritas—harus didasarkan pada hasil kajian akademis, evaluasi kinerja pembangunan, atau telaahan strategis lainnya. Selanjutnya, perubahan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembahasan yang melibatkan pemangku kepentingan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program prioritas, serta kerangka pendanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, serta menjadi acuan DPRD Kota Probolinggo dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah.

RPJMD Tahun 2025-2029 ini disusun melalui proses yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat Kota Probolinggo. Dengan demikian, diharapkan seluruh program dan kebijakan yang tertuang di dalam RPJMD ini mampu menjawab kebutuhan dan

tantangan pembangunan daerah secara komprehensif dan berkelanjutan, dalam rangka mewujudkan Kota Probolinggo yang Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan.

Pemerintah Kota Probolinggo bersama DPRD Kota Probolinggo berkomitmen menjaga konsistensi antara dokumen RPJMD ini dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, seperti RKPD, KUA-PPAS, dan APBD setiap tahunnya. Seluruh perangkat daerah diinstruksikan untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, dengan senantiasa mengutamakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Untuk memastikan pelaksanaan RPJMD berjalan optimal dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, Pemerintah Kota Probolinggo akan melakukan monitoring, evaluasi, serta reviu secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan akan dilakukan secara responsif terhadap perubahan lingkungan strategis, tantangan pembangunan, dan kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Akhirnya, dengan sinergi, kolaborasi, dan komitmen seluruh pihak, kami optimis bahwa pelaksanaan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2025-2029 akan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, serta menciptakan Kota Probolinggo yang lebih baik, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

RPJMD

Kota Probolinggo

Tahun 2025-2029